PT MENTHOBI KARYATAMA RAYA TBK

Harmonizing Sustainable Ecosystem

Harmonisasi Ekosistem yang Berkelanjutan



2025

Annual Report

Laporan Tahunan

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasional, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko dan ketidakpastian, serta yang dapat mengakibatkan hasil atau perkembangan aktual menyimpang secara signifikan dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis di mana PT Menthobi Karyatama Raya Tbk menjalankan kegiatan usaha. Data keuangan yang disajikan pada Laporan Tahunan merupakan data konsolidasian yang melibatkan seluruh entitas yang berada di bawah Perseroan.

Laporan Tahunan ini memuat kata “PT Menthobi Karyatama Raya Tbk”, “MKTR” dan “Perseroan” yang merupakan definisi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. Laporan Tahunan ini disajikan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Inggris. Laporan Tahunan dan Keberlanjutan dapat dilihat dan diunduh di situs *web* resmi Perseroan yaitu www.mktr.co.id.

This Annual Report contains statements regarding the financial condition, results of operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, which are classified as forward-looking statements within the meaning of the applicable laws and regulations, except for matters of a historical nature. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results or developments to differ materially from those reported.

The forward-looking statements in this Annual Report are made based on various assumptions concerning current and future conditions, as well as the business environment in which PT Menthobi Karyatama Raya Tbk conducts its operations. The financial data presented in this Annual Report are consolidated figures, incorporating all entities under the Company.

In this Annual Report, the terms “PT Menthobi Karyatama Raya Tbk,” “MKTR,” and the “Company” refer to PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. This Annual Report is presented in two languages, namely Indonesian and English. The Annual and Sustainability Report can be accessed and downloaded through the Company’s official website at www.mktr.co.id.

Penjelasan Tema

Theme Explanation

Perjalanan transformasi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) memasuki fase yang lebih matang. Jika sebelumnya kami menegaskan inovasi sebagai fondasi utama dalam menciptakan solusi bernilai tinggi maka pada tahun 2025, arah tersebut berkembang menjadi suatu sistem yang terintegrasi. Sebuah ekosistem bisnis yang saling terhubung dan saling menguatkan.

Inovasi yang sebelumnya hadir sebagai terobosan kini telah meresap menjadi struktur. Berbagai inisiatif yang dikembangkan Perseroan mulai dari pengelolaan perkebunan, operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS), hingga pengolahan produk turunan berbahan baku produk samping kelapa sawit seperti pupuk organik dan biomassa, tidak lagi berjalan sebagai entitas yang terpisah.

Seluruhnya berjalan dalam satu bingkai ekosistem yang dirancang untuk menciptakan efisiensi, memperkuat keberlanjutan, dan menghasilkan nilai tambah secara berkelanjutan.

Melalui tema "Harmonisasi Ekosistem yang Berkelanjutan", Perseroan menegaskan fase baru dalam perjalanan transformasi ini. MKTR berada pada tahap pengukuhan di mana arah strategi telah teruji, model bisnis berbasis inovasi telah terbentuk, dan seluruh aset serta kapabilitas mulai dioptimalkan dalam satu orkestrasi yang selaras.

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk's transformation journey has entered a more mature phase. Previously, we emphasized innovation as the primary foundation for creating high-value solutions. By 2025, this direction had evolved into an integrated system. A business ecosystem that is interconnected and mutually reinforcing.

Innovations that previously emerged as breakthroughs have now become integrated into the structure. The Company's various initiatives, from plantation management and Palm Oil Mill (POM) operations to the processing of derivative products made from palm oil byproducts, such as organic fertilizer and biomass, no longer operate as separate entities.

All of this runs within an ecosystem framework designed to create efficiency, strengthen sustainability, and generate sustainable added value.

Through the theme "Harmonizing Sustainable Ecosystem" PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) affirms the start of a new phase in this transformation journey. MKTR is in the consolidation phase, where strategic direction has been tested, an innovation-based business model has been established, and all assets and capabilities are beginning to be optimized within a unified orchestration.

Pendekatan ini kian memperkuat keyakinan kami di MKTR bahwa keunggulan kompetitif di industri perkebunan tidak hanya ditentukan semata oleh skala lahan atau ekspansi fisik, melainkan oleh kemampuan berinovasi dalam mengelola keterhubungan antar lini bisnis menjadi suatu ekosistem yang produktif dan berkelanjutan.

Harmonisasi ini juga memperkuat peran MKTR dalam menciptakan dampak yang lebih luas. Tidak hanya meningkatkan kinerja operasional dan finansial Perseroan, tetapi juga mendorong praktik industri yang lebih bertanggung jawab, memperkuat kolaborasi dengan mitra, serta memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan lingkungan.

Dengan ekosistem yang semakin terintegrasi, MKTR berada pada posisi yang lebih solid untuk melanjutkan pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada kualitas nilai yang dihasilkan yaitu nilai yang berkelanjutan, inklusif, dan kami berharap berdampak relevan bagi masa depan industri.(*)

This approach further strengthens our belief at MKTR that competitive advantage in the plantation industry is not solely determined by land scale or physical expansion, but rather by the ability to innovate in managing the interconnectedness among business lines to create a productive and sustainable ecosystem.

This harmonization also strengthens MKTR's ability to create a broader impact. It not only improves the Company's operational and financial performance but also encourages more responsible industry practices, strengthens collaboration with partners, and makes a tangible contribution to environmental sustainability.

With an increasingly integrated ecosystem, MKTR is in a stronger position to continue growth that is not only results-oriented but also focused on the quality of the value generated, i.e., sustainable, inclusive value, and we hope to have a relevant impact on the future of the industry. (*)

1

Sistem Produksi Terintegrasi
Integrated Production System

Siklus produksi kelapa sawit MKTR dirancang dengan pendekatan agronomi yang sistematis, efisien, dan berbasis *best practice*. Perseroan tidak hanya fokus pada hasil panen, namun juga memastikan bahwa setiap tahap produksi mendukung produktivitas jangka panjang, keberlanjutan lingkungan, dan efisiensi operasional.

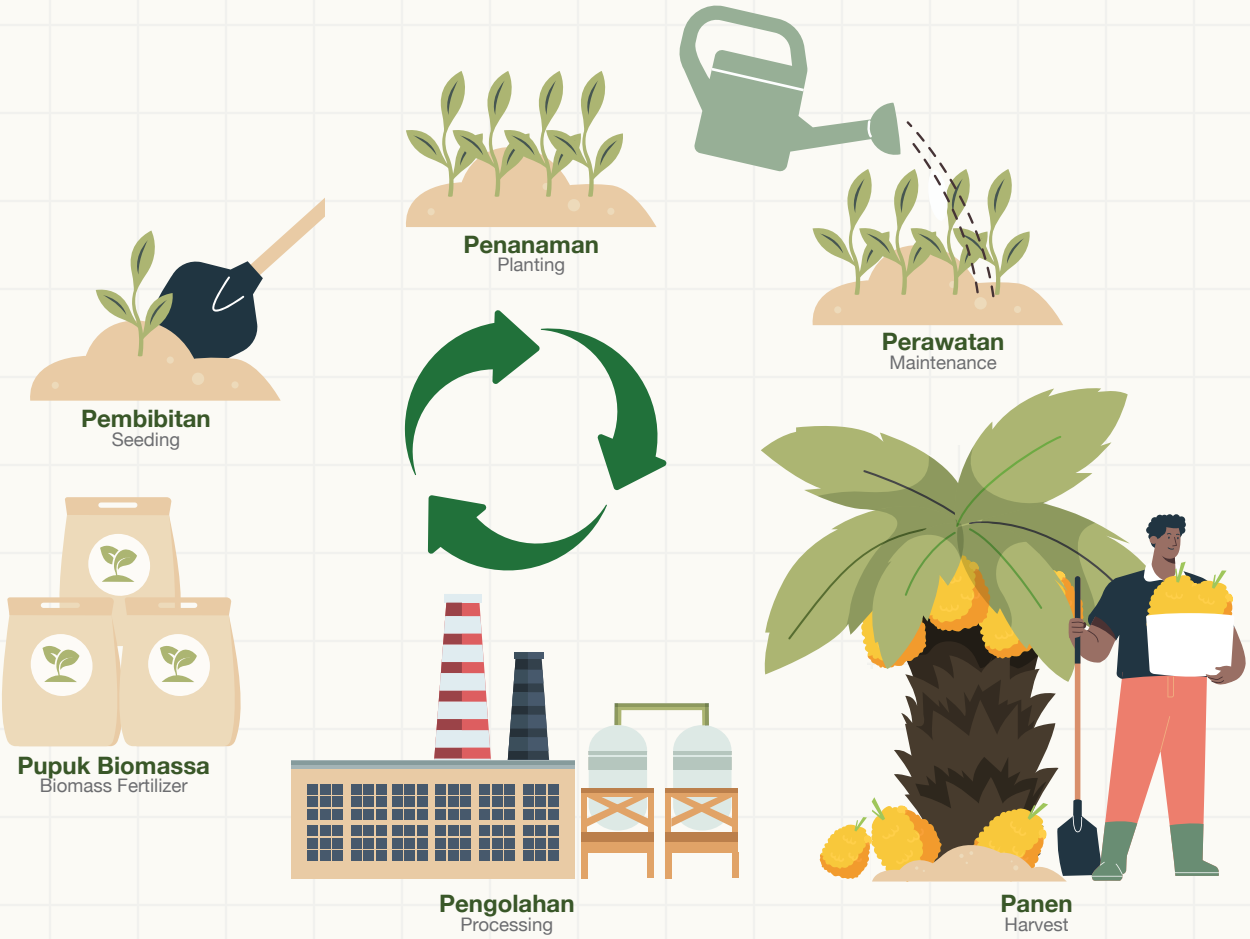
MKTR Oil Palm Production Cycle follows a systematic and efficient best practice-based agronomic cultivation approach, ensuring long-term productivity, environmental sustainability, and operational efficiency.

2

Pionir dalam Model *Zero Waste*
Pioneer in Zero Waste Model

MKTR melalui entitas anak PT Menthobi Hijau Lestari, mengoptimalkan pemanfaatan limbah padat berupa janjangan kosong menjadi *biomass pellet* berkualitas tinggi. Inisiatif ini tidak hanya mendukung prinsip ekonomi sirkular, namun juga menciptakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan, sejalan dengan agenda energi berkelanjutan nasional.

Through its subsidiary PT Menthobi Hijau Lestari, MKTR turns empty fruit bunches into high-quality biomass pellets. This reinforces its commitment to a circular economy and renewable energy development while meeting the national sustainable energy agenda.



3

Komitmen pada Praktik Berkelanjutan
Commitment to Sustainable Practices

MKTR menjalankan seluruh aktivitas bisnis dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan. Operasional Perseroan telah selaras dengan standar *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), ISO 9001:2015, dan ISO 14001:2015.

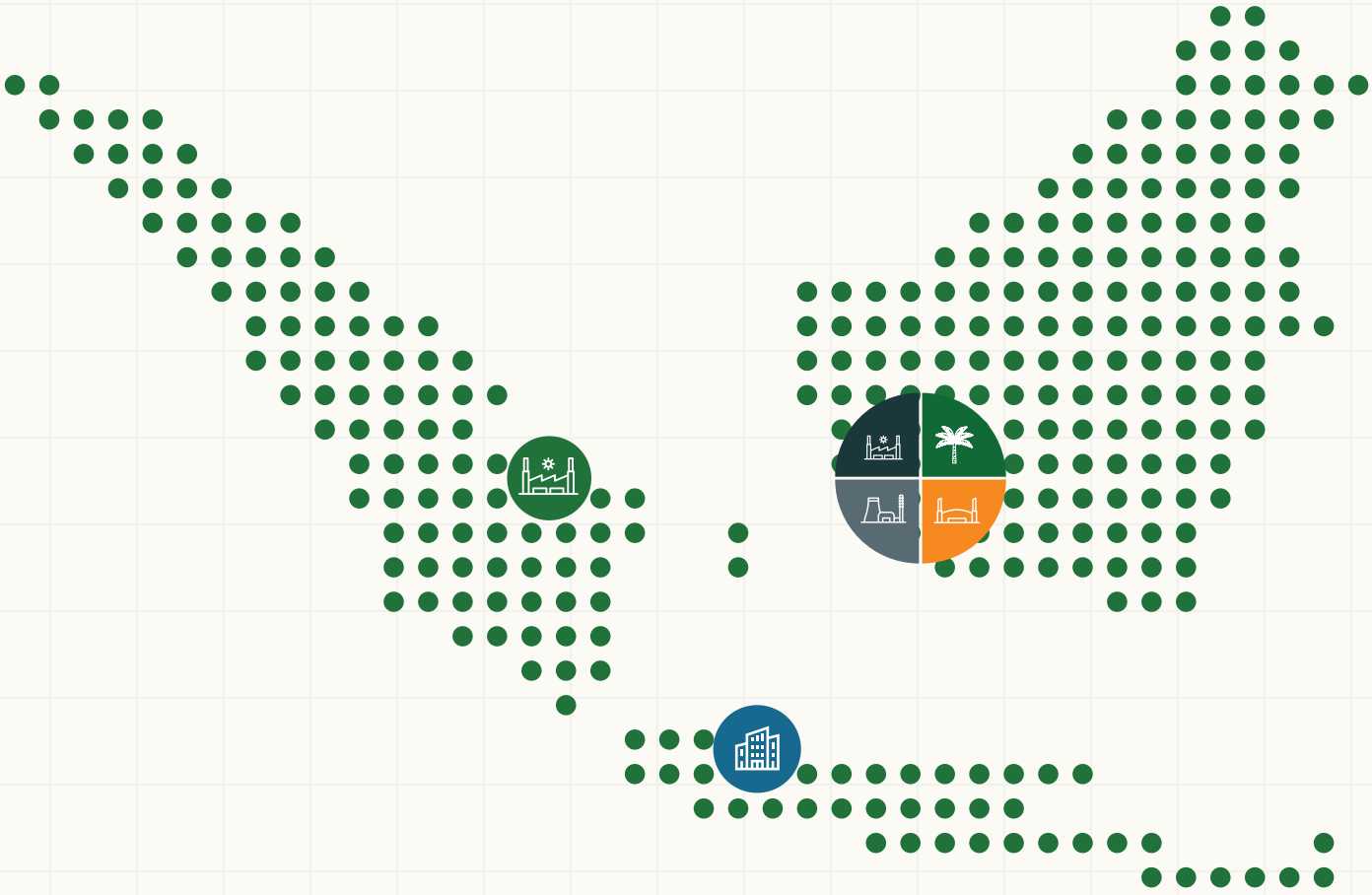
MKTR conducts all business activities with a focus on sustainability, taking responsibility for its social and environmental impacts. The Company's operations align with the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) principles and are certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015.

4

Tata Kelola dan Integrasi Usaha yang Kuat
Strong Business Governance and Integration

Keunggulan utama MKTR terletak pada integrasi penuh dari hulu ke hilir, mulai dari kegiatan perkebunan, pengolahan kelapa sawit, hingga pemanfaatan limbah. Tata kelola usaha ini dilengkapi dengan sistem manajemen transportasi dan distribusi yang efisien dan ramah lingkungan.

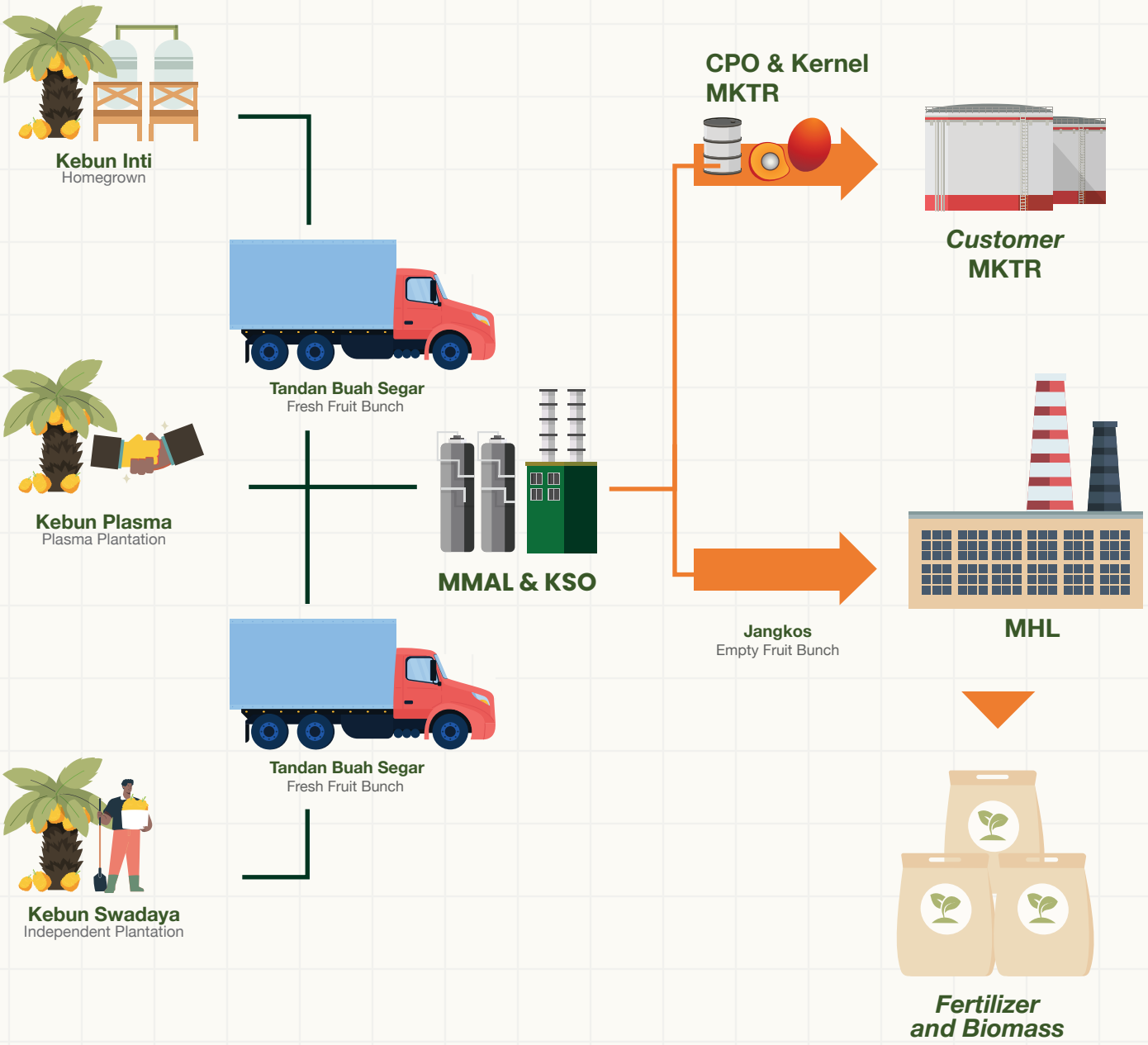
MKTR's main advantage lies in its full integration from upstream to downstream, from plantation activities and palm oil processing to waste utilization. An efficient and eco-friendly transportation and distribution management system strengthens its business governance.



Rantai Pasok yang Andal dan Tertelusur
Reliable and Traceable Supply Chain

Rantai pasok MKTR terbangun secara terintegrasi dengan teknologi yang handal, aman, dan ramah lingkungan. Sistem ini memastikan ketersediaan produk yang stabil serta harga jual yang kompetitif, memperkuat posisi MKTR di pasar domestik maupun ekspor.

MKTR's supply chain is built in an integrated manner using reliable, safe, and eco-friendly technology. This system ensures stable product availability and competitive selling prices, strengthening MKTR's position in both domestic and export markets.



6

Kepatuhan Hukum dan Ketersediaan Bahan Baku
Legal Compliance and Raw Material Availability

MKTR hanya memasarkan CPO dari sumber legal dan tersertifikasi. Seluruh pasokan berasal dari kebun sendiri serta mitra petani dan perusahaan yang telah memenuhi regulasi dan prinsip keberlanjutan.

MKTR only markets CPOs from legal and certified sources. All supplies come from MKTR's plantations, farmer partners, and other companies that have met applicable regulations and sustainability principles.

7

Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
Respect for Human Rights

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, MKTR menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM dalam seluruh rantai operasional dan kemitraan. Fokus utama diarahkan kepada perlindungan tenaga kerja, masyarakat lokal, dan kelompok rentan.

MKTR upholds respect for human rights throughout its operational and partnership chains as part of its social responsibility. The primary focus is on protecting workers, local communities, and vulnerable groups.



Strategi Perusahaan

Company's Strategy

Pada Tahun 2025 dengan menyongsong tema "pertumbuhan berkelanjutan", PT Menthobi Karyatama Raya Tbk menetapkan strategi berbasis optimalisasi aset, inovasi produk, dan ekspansi agribisnis untuk memperkuat fundamental Perseroan. Selanjutnya tahun 2026, Perseroan menuju "akselerasi", yakni di mana MKTR tidak hanya mengejar pertumbuhan pendapatan, tetapi juga memastikan pertumbuhan yang berkualitas—yang didukung oleh kesehatan perusahaan dan infrastruktur organisasi yang tangguh.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan telah menetapkan berbagai strategi antara lain:

In 2025, under the theme of "sustainable growth," PT Menthobi Karyatama Raya Tbk established strategies focused on asset optimization, product innovation, and agribusiness expansion to strengthen the Company's fundamentals. Moving into 2026, the Company enters a phase of "acceleration," in which MKTR not only aims to pursue revenue growth but also ensures high-quality growth—supported by a strong financial position and a resilient organizational infrastructure.

To achieve these objectives, the Company has formulated various strategies, including:

(2025 - 2026)

Strategi Jangka Pendek

Optimalisasi Aset dan Peningkatan kapasitas Produksi

Short-Term Strategy

Asset Optimization and Enhancement of Production Capacity

(2026 - 2027)

Strategi Jangka Menengah

Ekspansi Agribisnis dan Diversifikasi Pendapatan

Medium-Term Strategy

Agribussiness Expansion and Revenue Diversification

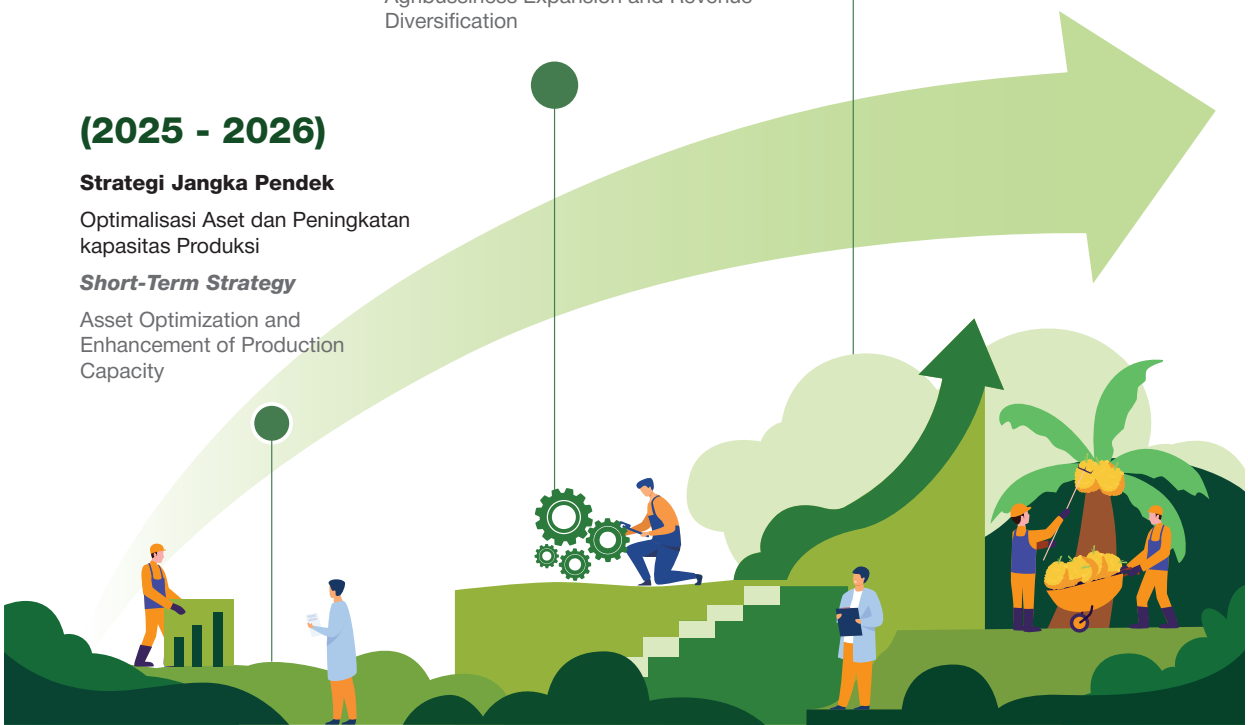
(> 2028)

Strategi Jangka Panjang

Transformasi Menuju Industri Agribisnis Berkelanjutan

Long-Term Strategy

Transformation Toward a Sustainable Agribussiness Industry



1 Strategi Jangka Pendek (2025–2026): Optimalisasi Aset dan Peningkatan Kapasitas Produksi

Short-Term Strategy (2025–2026): Asset Optimization and Production Capacity Enhancement

Pengembangan Strategi Operasional

- **Optimalisasi *Throughput* KCP**
  Pada tahun 2025, Perseroan memprioritaskan optimalisasi kinerja aset yang telah dimiliki guna meningkatkan efisiensi operasional dan kontribusi pendapatan. Strategi ini diwujudkan melalui peningkatan utilisasi *Kernel Crushing Plant* (KCP) untuk memaksimalkan produksi *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) dan *palm kernel cake*, sehingga mendorong pertumbuhan penjualan dari produk turunan kelapa sawit.

- **Efisiensi Operasional Aset**
  Perseroan juga terus meningkatkan efisiensi operasional melalui penguatan integrasi antara kegiatan perkebunan, pabrik pengolahan CPO, dan fasilitas pengelolaan limbah (*waste management*). Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan margin laba operasional serta memperkuat daya saing Perseroan.

- **Efisiensi Operasi Berkelanjutan**
  Perseroan akan melakukan mekanisasi selektif pada kegiatan operasional tertentu. Ini merupakan langkah strategis untuk menekan biaya pokok produksi secara signifikan namun dengan tetap meningkatkan konsistensi kualitas produksi. Perseroan menerapkan praktek operasional yang bermutu tinggi dengan tetap menjaga efektivitas dan efisien menjadi standar baru di seluruh lini produksi.

- **Ekspansi dan Diversifikasi Basis Pelanggan**
  Perseroan secara aktif melakukan diversifikasi basis pelanggan, dengan menjangkau segmen-segmen baru yang selama ini belum tergarap optimal, namun tetap memperkuat hubungan dengan pelanggan eksisting. Hal ini dengan membuka peluang baru dalam meningkatkan kinerja Perseroan.

Operational Strategy Development

- **KCP Throughput Optimization**
  In 2025, the Company prioritizes optimizing the performance of its existing assets to enhance operational efficiency and revenue contribution. This strategy is implemented through increased utilization of the Kernel Crushing Plant (KCP) to maximize the production of Crude Palm Kernel Oil (CPKO) and palm kernel cake, thereby driving sales growth from palm-based derivative products.

- **Operational Asset Efficiency**
  The Company continues to improve operational efficiency through stronger integration between plantation activities, CPO processing mills, and waste management facilities. This integration is expected to enhance operating profit margins and strengthen the Company's competitiveness.

- **Sustainable Operational Efficiency**
  The Company will implement selective mechanization in certain operational activities. This strategic initiative aims to significantly reduce cost of production while maintaining and improving product quality consistency. High-quality operational practices combined with efficiency and effectiveness are being established as new standards across all production lines.

- **Expansion and Diversification of Customer Base**
  The Company actively diversifies its customer base by targeting new segments that have not been optimally penetrated, while continuing to strengthen relationships with existing customers. This approach opens new opportunities to enhance overall business performance.

- **Eksplorasi Hulu: Mengembangkan Kerja-sama Strategis**
  MKTR senantiasa membuka peluang dan kerja sama strategis (*joint venture*) dengan pihak lain. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan operasional hulu (penguatan rantai pasok) dan membuka peluang diversifikasi produk.

Pengembangan Strategi Keberlanjutan

- **Akselerasi Penjualan Pupuk Organik *GreenGrow***
  Sejalan dengan itu, Perseroan mengakselerasi penjualan pupuk organik *GreenGrow* yang telah memperoleh sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sertifikasi tersebut memungkinkan *GreenGrow* berpartisipasi dalam program strategis ketahanan pangan nasional, sekaligus memperluas akses pasar dan memperkuat posisi produk sebagai solusi pertanian berkelanjutan.

- **ESG sebagai Investasi, Bukan Sekedar Biaya**
  Dalam rangka memperkuat komitmen pada lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Perseroan terus meningkatkan dan mengembangkan komitmennya pada tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pengembangan komunitas setempat, dan inisiatif Sistem Lingkungan Berkelanjutan. Perseroan meyakini bahwa praktik ESG yang baik adalah *risk mitigation* yang efektif sekaligus membangun reputasi perusahaan yang positif, yang pada akhirnya akan bernilai berkelanjutan.

- **Upstream Exploration: Development of Strategic Partnerships**
  MKTR continuously explores opportunities for strategic collaborations (joint ventures) with external parties. These partnerships aim to strengthen upstream operations (supply chain reinforcement) and create opportunities for product diversification.

Sustainability Strategy Development

- **Acceleration of GreenGrow Organic Fertilizer Sales**
  In line with its sustainability agenda, the Company is accelerating the sales of GreenGrow organic fertilizer, which has obtained the Domestic Component Level (TKDN) certification. This certification enables GreenGrow to participate in strategic national food security programs, while also expanding market access and strengthening its positioning as a sustainable agricultural solution.

- **ESG as an Investment, Not Merely a Cost**
  To reinforce its commitment to environmental, social, and governance (ESG) principles, the Company continues to enhance and develop its initiatives in corporate social responsibility (CSR), local community development, and sustainable environmental systems. The Company believes that strong ESG practices serve as an effective risk mitigation tool while also building a positive corporate reputation, ultimately creating long-term sustainable value.



2 Strategi Jangka Menengah (2027–2028): Ekspansi Agribisnis dan Diversifikasi Pendapatan

Short-Term Strategy (2025–2026): Asset Optimization and Production Capacity Enhancement

Pengembangan Strategi Operasional

Strategi jangka menengah pada fase profitabilitas yang disebut sebagai *Fase Optimization*, di mana fokus utama adalah memaksimalkan aset yang ada, mengefisiensi biaya, namun tetap mencapai target profitabilitas yang menjadi prasyarat bagi pertumbuhan selanjutnya. Perseroan memiliki beberapa strategi pada fase ini yakni:

a. **Pertumbuhan Pendapatan (*Top-line Growth*)**
Perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan tahunan dengan pada tiga pilar utama: optimalisasi pabrik, penguatan *offtaker* (pembeli) serta pengembangan produk bernilai tambah.

b. **Menjaga performa kinerja keuangan (*Bottom-line & Balance Sheet*)**
Strategi ini meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan melalui perbaikan *Cash Conversion Cycle* (CCC), penguatan arus kas, efisiensi belanja modal (capex) dan penataan pendanaan melalui mengoptimalkan struktur modal (*debt-to-equity ratio*).

c. **Infrastruktur Organisasi dan Tata Kelola**
Untuk mendukung skala bisnis yang lebih besar, manajemen melakukan beberapa strategi meliputi: digitalisasi *monitoring* operasional (pemantauan kinerja operasi secara *real-time*); penyempurnaan proses kerja dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG), serta penguatan sistem manajemen risiko berbasis data.

Pengembangan Strategi Keberlanjutan

Penguatan Kemitraan Strategis
Pada fase ini, Perseroan secara aktif memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak untuk:

- Memperkuat rantai pasok (*supply chain*);
- Mempercepat inisiatif ESG melalui kolaborasi dengan lembaga kredibel;
- Membuka peluang diversifikasi produk melalui riset bersama atau akses ke teknologi baru.

- The medium-term strategy enters a profitability phase referred to as the Optimization Phase, where the primary focus is on maximizing existing assets, improving cost efficiency, while consistently achieving profitability targets as a prerequisite for sustainable growth. The Company has established several key strategies in this phase, including:

a. **Revenue Growth (Top-line Growth)**
The Company targets annual revenue growth based on three main pillars: optimization of processing facilities, strengthening of offtakers (buyers), and development of value-added products.

b. **Maintaining Financial Performance (Bottom-line & Balance Sheet)**
This strategy focuses on enhancing financial performance through improvements in the Cash Conversion Cycle (CCC), strengthening cash flow, optimizing capital expenditure (capex), and structuring financing by optimizing the capital structure (debt-to-equity ratio).

c. **Organizational Infrastructure and Governance**
To support larger business scale, management implements several initiatives, including digitalization of operational monitoring (real-time performance tracking), refinement of business processes and Good Corporate Governance (GCG) practices, and strengthening data-driven risk management systems.

Sustainability Strategy Development

Strengthening Strategic Partnerships
At this stage, the Company actively strengthens partnerships with various stakeholders to:

- Reinforce the supply chain;
- Accelerate ESG initiatives through collaboration with credible institutions; and
- Create opportunities for product diversification through joint research or access to new technologies.

3 Strategi Jangka Panjang (Pasca 2028) : Transformasi Menuju Industri Agribisnis Berkelanjutan

Long-Term Strategy (Post-2028): Transformation Towards a Sustainable Agribusiness Industry

Fase ini pada *Sustainable Growth* yang berlangsung di atas tahun 2028 di mana Perseroan mengembangkan pertumbuhan secara berkelanjutan. Dengan berbagai strategi yakni:

a. ***Zero Waste Palm Oil Industry***
Dalam jangka panjang, Perseroan menargetkan transformasi menuju industri agribisnis berkelanjutan dengan mengimplementasikan konsep *Zero Waste Palm Oil Industry*. Seluruh aset dan kapabilitas pengelolaan limbah akan dioptimalkan untuk menghasilkan berbagai produk bernilai tambah, seperti pupuk organik, *biopellet* energi, dan *biofertilizer*, sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular.

This phase represents Sustainable Growth beyond 2028, during which the Company focuses on achieving long-term, sustainable expansion through the following strategies:

a. ***Zero Waste Palm Oil Industry***
In the long term, the Company aims to transform into a sustainable agribusiness entity by implementing the Zero Waste Palm Oil Industry concept. All assets and waste management capabilities will be optimized to generate various value-added products, such as organic fertilizer, energy biopellets, and biofertilizers, as part of a circular economy approach.



b. Integrasi Energi Baru Terbarukan (EBT)
Pengembangan pabrik *biopellet* akan menjadi fondasi bagi integrasi yang lebih luas dalam rantai pasok energi biomassa, baik di tingkat domestik maupun regional. Melalui strategi ini, MKTR berkomitmen untuk memperkuat ketahanan usaha, menciptakan nilai tambah berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor agribisnis dan energi.

c. Integrasi Rantai Nilai (*Vertical Integration*)
Strategi Perseroan adalah menguasai mata rantai nilai dari hulu hingga hilir pada setiap tahapan proses, dari pengadaan bahan baku hingga pemasaran produk akhir.

d. Teknologi dan Ekonomi Sirkular
Pertumbuhan berkelanjutan harus dibangun di atas fondasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini dengan mengadopsi teknologi baru guna meningkatkan produktivitas Perseroan. Sedangkan ekonomi sirkular melalui pelaksanaan intensifikasi (meningkatkan produktivitas aset yang ada) dan pengembangan aset atau operasi baru secara organik. Hal ini dengan strategi ekspansi yang bertahap guna menjaga pertumbuhan jangka panjang Perseroan.

b. Integrasi Energi Baru Terbarukan (EBT)
The development of the biopellet plant will serve as a foundation for broader integration within the biomass energy supply chain, both domestically and regionally. Through this strategy, MKTR is committed to strengthening business resilience, creating sustainable value, and contributing to the achievement of sustainable development goals in the agribusiness and energy sectors.

c. Integrasi Rantai Nilai (*Vertical Integration*)
The Company's strategy is to control the entire value chain from upstream to downstream processes, ranging from raw material procurement to the marketing of final products.

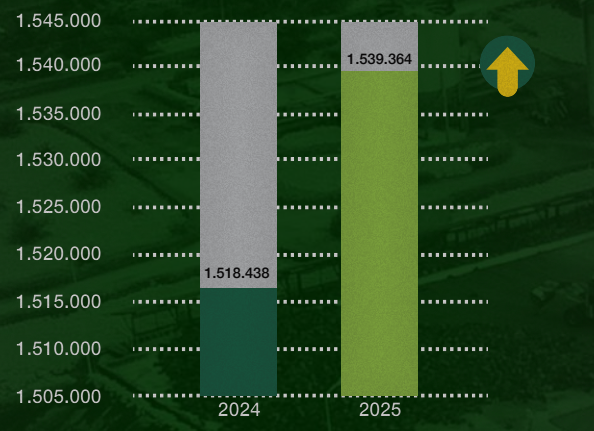
d. Teknologi dan Ekonomi Sirkular
Sustainable growth must be built on a foundation of technology and environmental sustainability. This is achieved through the adoption of new technologies to enhance productivity, as well as the implementation of a circular economy approach through intensification (maximizing productivity of existing assets) and the organic development of new assets or operations. This is supported by a phased expansion strategy to ensure the Company's long-term growth.



Financial Highlights

Aset
Assets

(Dalam Jutaan Rupiah)
(in Millions of Rupiah)



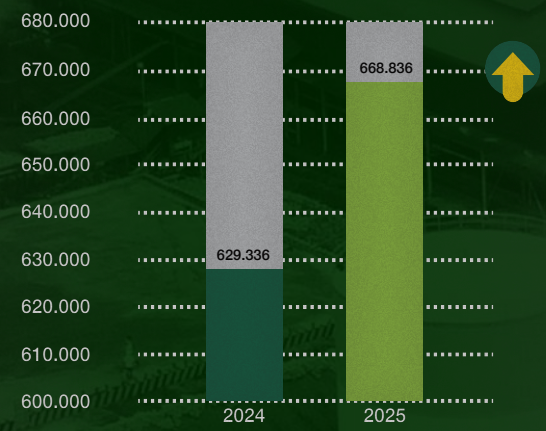
2024 Rp1.518,44 Miliar | Billion

2025 Rp1.539,36 Miliar | Billion

Meningkat
Increased
1,38%

Ekuitas
Equity

(Dalam Jutaan Rupiah)
(in Millions of Rupiah)



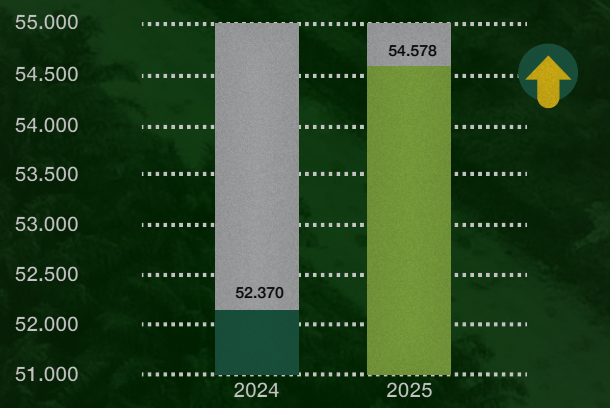
2024 Rp629,34 Miliar | Billion

2025 Rp668,84 Miliar | Billion

Meningkat
Increased
6,28%

Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Comprehensive Income for the Year

(Dalam Jutaan Rupiah)
(in Millions of Rupiah)



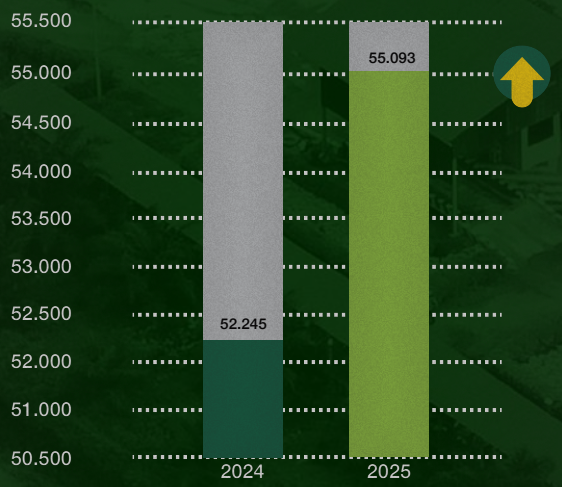
2024 Rp52,37 Miliar | Billion

2025 Rp54,58 Miliar | Billion

Meningkat
Increased
4,21%

Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

(Dalam Jutaan Rupiah)
(in Millions of Rupiah)



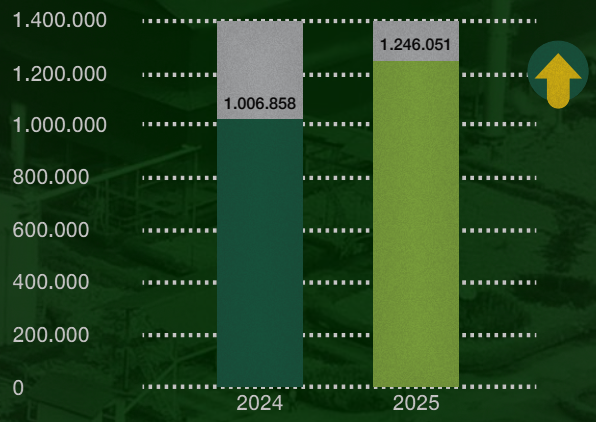
2024 Rp52,24 Miliar | Billion

2025 Rp55,09 Miliar | Billion

Meningkat
Increased
5,45%

Pendapatan
Revenue

(Dalam Jutaan Rupiah)
(in Millions of Rupiah)



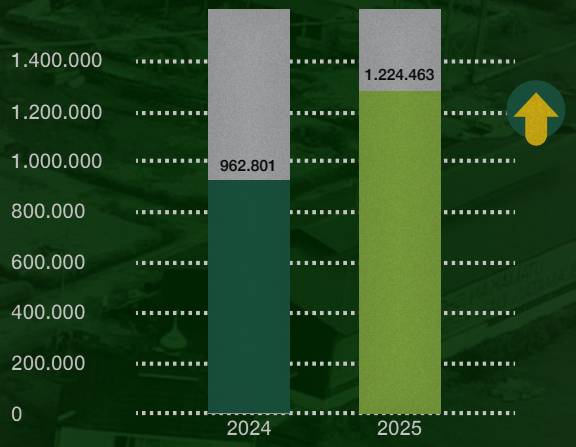
2024 Rp1.246,05 Miliar | Billion

2025 Rp1.246,05 Miliar | Billion

Meningkat
Increased
23,76%

Penjualan CPO & CPKO
CPO and CPKO Sales

(Dalam Jutaan Rupiah)
(in Millions of Rupiah)



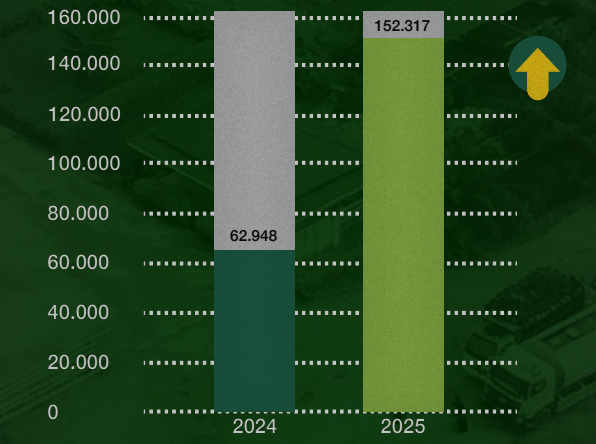
2024 Rp962,80 Miliar | Billion

2025 Rp1.224,46 Miliar | Billion

Meningkat
Increased
27,18%

Penjualan Inti Minyak Kelapa Sawit
Palm Kernel Oil Sales

(Dalam Jutaan Rupiah)
(in Millions of Rupiah)



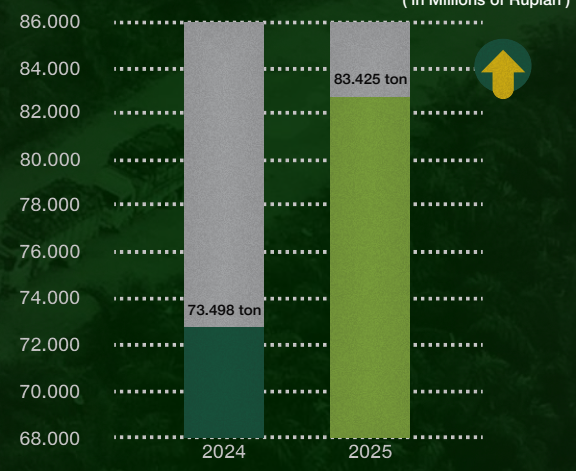
2024 Rp62,95 Miliar | Billion

2025 Rp152,32 Miliar | Billion

Meningkat
Increased
141,97%

Produksi CPO & CPKO
CPO and CPKO Production

(Dalam Jutaan Rupiah)
(in Millions of Rupiah)



2024 73.498 Ton | Tons

2025 83.425 Ton | Tons

Meningkat
Increased
13,51%

Daftar Isi

Table of Contents

4 **Penjelasan Tema**
Theme Explanation

6 **Keunggulan Kompetitif**
Competitive Advantage

10 **Strategi Perusahaan**
Company's Strategy

16 ***Financial Highlight***

18 **Daftar Isi**
Table of Contents

Kilas Kinerja 2025
2025 Performance Overview

22 **Ikhtisar Operasional**
Operational Overview

24 **Ikhtisar Data Keuangan**
Financial Data Overview

27 **Ikhtisar Saham**
Stock Overview

32 **Peristiwa Penting 2025**
Important Events In 2025

36 **Penghargaan & Sertifikasi**
Award & Certifications

Laporan Manajemen
Management Reports

40 **Laporan Komisaris Utama**
Report from President Commissioner

54 **Laporan Direktur Utama**
Report from President Director

66 **Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025**
Statement Letter of Responsibilitty for Annual Report 2025

Profil Perusahaan
Company Profile

70 **Identitas Perusahaan**
Corporate Identity

72 **Riwayat Singkat Perseroan**
Corporate History

76 **Jejak Langkah Perusahaan**
Milestones

76 **Makna dan Logo Perusahaan**
Corporate Logo Meaning

79 **Visi, Misi dan Budaya Perusahaan**
Corporate Vision, Mission and Culture

84 **Bidang Usaha**
Line of Business

89 **Produk dan Layanan Perusahaan**
Company Products and Services

92 **Wilayah Operasional**
Operational Areas

94 **Struktur Organisasi**
Organizational Structure

96 **Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**
Changes to The Composition of The Board of Commissioners and Board of Director

98 **Profil Dewan Komisaris**
Board of Commissioner's Profile

102 **Profil Direksi**
Board of Director's Profile

109 **Profil Pejabat Eksekutif**
Executive Officer Profiles

115 **Informasi Pemegang Saham**
Shareholder Information

126 **Kronologi Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia**
Stock and Other Securities Listing Chronology

128 **Kronologi Pencatatan Efek Lainnya**
Chronology of Other Securities Listing

130 **Struktur Grup Perseroan**
Corporate Group Structure

137 **Alamat Kantor dan Entitas Anak**
Office Address and Subsidiaries

138 **Keanggotaan Asosiasi**
Association Membership

139 **Lembaga dan Profesional Penunjang Perusahaan**
Company's Supportng Professions and Institutions

140 **Informasi pada Jumlah Karyawan**
Information about Number of Employees

146 **Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi**
Training and Competency Development

150 **Informasi pada *Website* Perusahaan**
Information on The Company's Website

Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Review

158 **Sumber Daya Manusia**
Human Resources

180 **Teknologi Informasi**
Information Technology

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Disscussion and Analysis

205 **Tinjauan Perekonomian Makroekonomi**
Macroeconomic Overview

216 **Tujuan Operasi Per Segmen Usaha**
Operational Review Per Business Segment

221 **Tinjauan Keuangan**
Financial Review

242 **Struktur Permodalan**
Capital Structure

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

281 **Penerapan Tata Kelola Perusahaan**
Implementation of Corporate Governance

290 **Kerangka Kerja Governansi Korporat**
Corporate Governance Framework

302 **Rapat Umum Pemegang Saham**
General Meeting of Shareholders

314 **Dewan Komisaris**
Board of Commissioners

336 **Direksi**
Board of Directors

360 **Dewan Pengawas Syariah**
Sharia Supervisory Board

360 **Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris**
Organs and Committees under the Board of Commissioners

370 **Komite Nominasi dan Remunerasi**
Nominations and Remuneration Committees

380 **Organ dan Komite di bawah Direksi**
Organs and Committees under the Board of Directors

395 **Audit Eksternal**
External Audit

399 **Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi**
Board of Commissioners and Board of Directors Diversity

401 **Sistem Pengendalian Internal**
Internal Control System

405 ***Internal Control Over Financial Reporting/* ICOFR**

409 **Manajemen Risiko**
Risk Management

421 **Perkara Hukum**
Legal Matters

424 **Sanksi Administrasi**
Administrative Sanctions

424 **Klaim Hak atas Kepemilikan Tanah**
Land Ownership Claims

425 ***Insider Trading***

425 **Kebijakan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Kreditur**
Policy on Fulfillment of Creditors' Rights

426 **Kode Etik**
Code of Ethics

432 **Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen**
Management and Employee Stock Ownership Program

438 ***Whistleblowing System***

443 **Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi**
Anti-Corruption and Gratification Control

445 **Akses Informasi dan Data Perusahaan**
Access to Company Information and Data

448 **Pengadaan Barang dan Jasa**
Procurement of Goods and Services

451 **Pedoman Kebijakan Komunikasi**
Communication Policy Guidelines

451 **Pedoman Transaksi Afiliasi**
Affiliated Transactions Guidelines

452 **Tata Kelola Perusahaan Terbuka**
Public Company Governance

1

Kilas Kinerja 2025

2025 Performance Overview





Ikhtisar Operasional
Operational Overview

Ikhtisar Data Keuangan
Financial Data Overview

Ikhtisar Saham
Stock Overview

Peristiwa Penting 2025
Important Events In 2025

Penghargaan & Sertifikasi
Award & Certifications

Ikhtisar Operasional

Operational Overview

Tabel Ikhtisar Hasil Operasional
Table: Operational Results Overview

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless stated otherwise)

Keterangan **Description**	**2025**	2024	2023	2022	2021
Penjualan Neto Net Sales					
Minyak Kelapa Sawit Crude Palm Oil	1.072.145.795	899.852.983	652.864.466	567.124.561	458.116.217
Minyak Inti Kelapa Sawit Palm Kernel Oil	152.317.397	62.947.662	-	-	-
Inti Kelapa Sawit Palm Kernel	4.829.964	32.808.065	57.407.107	60.756.350	54.239.526
Lainnya Others	16.757.708	11.249.662	711.435	-	-
Jumlah **Total**	1.246.050.864	**1.006.858.372**	**710.983.008**	**627.880.911**	**512.355.743**
Laba Bruto Gross Profit					
Minyak Kelapa Sawit Crude Palm Oil	151.345.406	160.360.272	115.469.137	158.802.798	146.412.635
Minyak Inti Kelapa Sawit Palm Kernel Oil	34.944.617	11.217.726	-	-	-
Inti Kelapa Sawit Palm Kernel	241.498	5.846.633	10.153.331	15.387.265	19.629.976
Lainnya Others	2.841.396	2.004.772	125.828	-	-
Jumlah **Total**	189.372.917	**179.429.403**	**125.748.296**	**174.190.063**	**166.042.611**

Tabel Ikhtisar Produksi Operasional
Table: Operational Production Overview

(dinyatakan dalam nilai Ton)
(stated in Ton value)

Keterangan **Description**	**Satuan** **Unit**	**2025**	2024	2023	2022	2021
Jumlah TBS hasil Produksi Perkebunan Fresh Fruit Bunches from Homegrown Production	Ton	106.091	100.830	121.778	117.967	110.702
Jumlah TBS yang dibeli dari pihak ketiga Fresh Fruit Bunches purchased from third parties	Ton	254.514	217.660	180.478	71.472	72.412
Jumlah TBS yang diolah Fresh Fruit Bunches processed	Ton	350.922	318.717	302.317	189.912	183.521
Jumlah produksi CPO Crude Palm Oil production	Ton	76.680	69.967	57.803	43.729	18.474
Volume Penjualan CPO Crude Palm Oil Sales Volume	Ton	76.091	69.675	59.704	44.518	15.195
Jumlah produksi PK Palm Kernel production	Ton	15.622	13.667	10.211	7.453	1.743
Volume Penjualan PK Palm Kernel Sales Volume	Ton	350	5.214	11.149	7.332	1.659
Jumlah produksi PKO Palm Kernel Oil production	Ton	6.745	3.531	-	-	-
Volume Penjualan PKO Palm Kernel Oil Sales Volume	Ton	6.093	3.364	-	-	-
Harga jual rata – rata CPO Average selling price of Crude Palm Oil	Rp/Kg	14.090	12.932	10.933	12.739	8.617
Harga jual rata – rata PKO Average selling price of Palm Kernel	Rp/Kg	25.001	6.292	5.063	8.286	4.219

Ikhtisar Data Keuangan

Financial Data Overview

Tabel Ikhtisar Data Keuangan
Financial Data Overview Table

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless stated otherwise)

Keterangan Description	2025	2024	2023	2022	2021
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian **Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income**					
Penjualan **Sales**	**1.246.050.864**	**1.006.858.372**	**710.983.008**	**627.880.911**	**512.355.743**
Beban Pokok Penjualan Cost of Sales	(1.056.677.947)	(827.428.969)	(585.234.712)	(453.690.848)	(346.313.132)
Laba Bruto **Gross Profit**	**189.372.917**	**179.429.403**	**125.748.296**	**174.190.063**	**166.042.611**
Beban Usaha Operating Expenses	(68.675.940)	(73.043.130)	(63.069.238)	(52.378.737)	(51.551.854)
Laba Usaha **Operating Profit**	**120.696.977**	**106.386.273**	**62.679.058**	**121.811.326**	**114.490.757**
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	(38.950.091)	(26.331.924)	7.079.617	(31.852.038)	(51.310.433)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	81.746.886	80.054.349	69.758.675	89.959.288	63.180.324
Laba Tahun Berjalan **Profit for the Year**	**55.093.257**	**52.245.463**	**51.375.410**	**61.883.697**	**47.871.301**
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Profit for the Year attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	54.882.631	52.036.897	51.241.374	61.523.703	15.321.534
Kepentingan *Non*-Pengendali Non-Controlling Interests	210.626	208.566	134.036	359.994	70.475
Jumlah **Total**	**55.093.257**	**52.245.463**	**51.375.410**	**61.883.697**	**15.392.009**
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Profit for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	54.368.382	52.161.815	51.232.509	61.515.956	15.304.646
Kepentingan *Non*-Pengendali Non-Controlling Interests	209.431	208.620	134.016	359.977	70.390
Jumlah **Total**	**54.577.813**	**52.370.435**	**51.366.525**	**61.875.933**	**15.375.036**

Keterangan Description	2025	2024	2023	2022	2021
Laba per Saham Dasar (Nilai Penuh) Basic Earnings per Share (Full Amount)	4,55	4,33	4,27	6,20	1,61
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian **Consolidated Statement of Financial Position**					
Aset Lancar Current Assets	692.848.796	668.757.689	538.016.466	460.445.854	166.781.067
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	846.515.455	849.680.806	793.778.091	505.789.893	482.255.826
Jumlah Aset **Total Assets**	**1.539.364.251**	**1.518.438.495**	**1.331.794.557**	**966.235.747**	**649.036.893**
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	199.053.388	171.440.965	166.153.040	211.339.579	173.070.407
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	671.475.255	717.661.480	581.165.509	211.488.380	290.381.780
Jumlah Liabilitas **Total Liabilities**	**870.528.643**	**889.102.445**	**747.318.549**	**422.827.959**	**463.452.187**
Ekuitas yang Diatribusikan kepada: Equity Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	666.926.214	627.636.087	582.984.665	542.050.461	184.132.433
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	1.909.394	1.699.963	1.491.343	1.357.327	1.452.273
Jumlah Ekuitas **Total Equity**	**668.835.608**	**629.336.050**	**584.476.008**	**543.407.788**	**185.584.706**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas **Total Liabilities and Equity**	**1.539.364.251**	**1.518.438.495**	**1.331.794.557**	**966.235.747**	**649.036.893**
Laporan Arus Kas **Consolidated Statement of Cash Flows**					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	117.896.145	110.419.974	16.580.700	89.255.065	109.755.060
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(50.787.330)	(257.617.181)	(328.312.578)	(99.882.899)	(48.039.317)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(70.463.265)	123.473.034	196.300.793	264.508.643	(23.822.679)
(Penurunan) Kenaikan Bersih Kas dan Bank **Cash on Hand and in Banks at Beginning of Year**	**(3.354.450)**	**(23.724.173)**	**(115.431.084)**	**253.880.809**	**37.893.064**
Kas dan Bank Pada Awal Tahun **Cash on Hand and in Banks at Beginning of Year**	**164.519.625**	**188.243.798**	**303.674.882**	**49.794.073**	**11.901.009**
Kas dan Bank Pada Akhir Tahun **Cash on Hand and in Banks at End of Year**	**161.165.175**	**164.519.625**	**188.243.79**	**303.674.882**	**49.794.073**

Keterangan Description	2025	2024	2023	2022	2021
	Rasio Keuangan **Financial Ratios**				
Rasio Solvabilitas (%) **Solvability Ratio (%)**					
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas Total Liabilities / Total Equity	130,16	141,28	127,86	0,78	2,50
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset Total Liabilities / Total Assets	56,55	58,55	56,11	0,44	0,71
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Assets / Total Current Liabilities	348,07	390,08	323,81	2,18	0,96
Jumlah Aset Tidak Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Assets / Total Non-Current Liabilities	126,07	118,40	136,58	2,39	1,66
Rasio Profitabilitas (%) **Profitability Ratio**					
Laba Bruto / Penjualan Neto Gross Profit / Net Sales	15,20	17,82	17,69	27,74	32,41
Laba Tahun Berjalan / Penjualan Neto Profit for the Year / Net Sales	4,42	5,19	7,23	9,85	9,34
Return on Asset (ROA)	3,58	3,45	3,86	6,40	7,38
Return on Equity (ROE)	8,24	8,32	8,79	11,39	25,79
Rasio Likuiditas **Liquidity Ratio**					
Rasio Lancar (%) Current Ratio	348,07	390,08	323,81	217,87	96,37
Rasio Kas (%) Cash Ratio	80,97	95,96	113,30	143,69	28,77
Debt Service Coverage Ratio (X)	129,40	123,07	80,32	86,22	115,28
Interest Coverage Ratio (X)	379,54	399,08	289,27	454,20	385,66
Rasio Keuangan Lainnya **Other Financial Ratios**					
Jumlah Ekuitas / Jumlah Aset Total Equity / Total Assets	0,43	0,41	0,44	0,56	0,29
Rasio Kolektabilitas Piutang (hari) Receivables Collectibility Ratio (days)	12	15	18	9	12

Ikhtisar Saham

Stock Overview

Penawaran saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada tanggal 4 November 2022 dengan kode saham "MKTR". Berikut ini adalah ikhtisar saham Perseroan selama tahun buku 2024–2025, yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini:

The Company held its initial public offering on the Indonesia Stock Exchange (IDX) using the "MKTR" stock code on November 4, 2022. The following is a summary of the Company's shares during the 2024-2025 financial year, as presented in this Annual Report:

Bulan Month	**Harga Pembuka** Opening Price **(Rp)**	**Harga Tertinggi** Highest Price **(Rp)**	**Harga Terendah** Lowest Price **(Rp)**	**Harga Penutup** Closing Price **(Rp)**	**Volume Transaksi** Transaction Volume **(Saham)** (Stocks)	**Jumlah Saham Beredar (Saham)** Outstanding Stocks (Stocks)	**Kapitalisasi Pasar** Market Capitalization **(Ribuan Rp)** (Thousand Rp)
Tahun 2024 2024							
Januari January	145	145	130	132	405.700	12.000.122.602	1.584.016.183
Februari February	128	129	127	129	114.700	12.000.123.702	1.548.015.956
Maret March	115	124	115	124	130.000	12.000.123.702	1.488.015.339
April	123	124	118	123	448.200	12.000.123.702	1.476.015.215
Mei May	121	122	120	122	164.800	12.000.123.702	1.464.015.092
Juni June	121	121	119	121	308.500	12.000.124.703	1.452.015.089
Juli July	123	128	122	124	329.000	12.000.125.803	1.488.015.600
Agustus August	122	123	119	122	927.700	12.052.390.322	1.470.391.619
September	119	119	118	119	256.200	12.052.390.422	1.434.234.460
Oktober October	123	123	120	123	1.867.900	12.052.390.422	1.482.444.022
November	115	120	115	118	1.822.400	12.052.390.422	1.422.182.070
Desember December	120	120	119	120	173.500	12.052.397.422	1.446.287.691
Tahun 2025 2025							
Januari January	120	122	117	122	18.193.200	12.052.397.422	1.470.392.485
Februari February	121	122	118	119	8.907.800	12.052.397.422	1.434.235.293

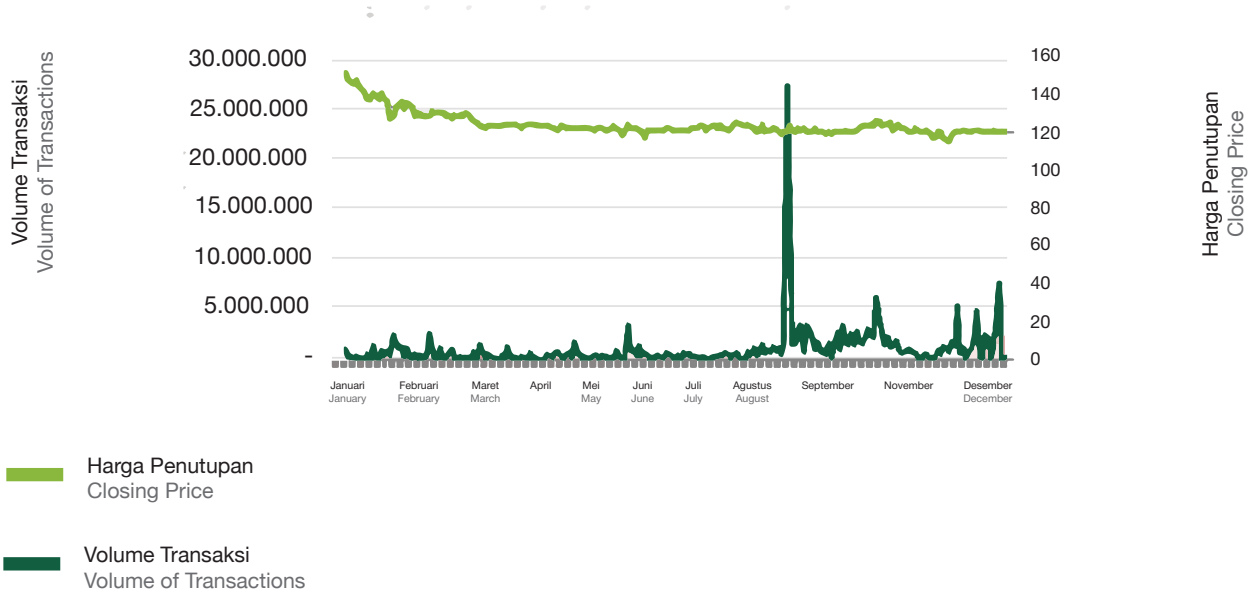
Bulan Month	Harga Pembuka Opening Price (Rp)	Harga Tertinggi Highest Price (Rp)	Harga Terendah Lowest Price (Rp)	Harga Penutup Closing Price (Rp)	Volume Transaksi Transaction Volume (Saham) (Stocks)	Jumlah Saham Beredar (Saham) Outstanding Stocks (Stocks)	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization (Ribuan Rp) (Thousand Rp)
Maret March	118	120	108	117	5.227.000	12.052.399.922	1.410.130.791
April	113	117	108	116	2.380.400	12.052.399.922	1.398.078.391
Mei May	120	120	111	113	6.418.400	12.052.399.922	1.361.921.191
Juni June	113	114	105	110	4.028.400	12.052.400.022	1.325.764.002
Juli July	109	111	105	107	21.792.600	12.052.401.121	1.289.606.920
Agustus August	107	113	104	104	28.897.500	12.052.401.122	1.253.449.717
September	102	170	102	145	433.718.800	12.052.401.122	1.747.598.163
Oktober October	146	157	136	150	112.058.600	12.052.536.940	1.807.880.541
November	148	156	144	149	37.741.400	12.052.878.202	1.795.878.852
Desember December	150	165	146	155	58.137.700	12.060.428.584	1.869.366.431

Grafik Pergerakan Harga Penutupan Saham dan Volume Transaksi Tahun 2024 – 2025

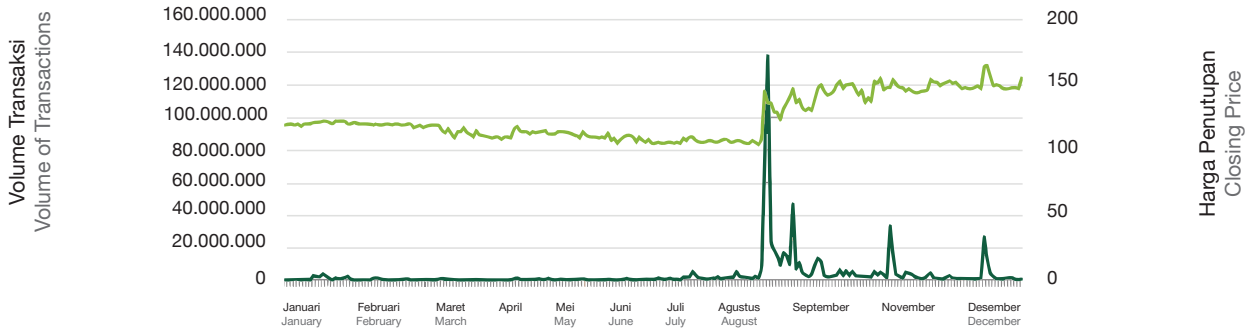
Share Closing Price Movement and Trading Volume for 2024–2025 Chart

Pergerakan saham MKTR Tahun 2024

MKTR Share Performance in 2025



Pergerakan saham MKTR Tahun 2025
MKTR Share Performance in 2025



Harga Penutupan
Closing Price

Volume Transaksi
Volume of Transactions

Aksi Korporasi
Corporate Actions

Selama tahun 2025, Perseroan melaksanakan beberapa aksi korporasi diantaranya sebagai berikut:

Throughout 2025, the Company carried out several corporate actions, as follows:

Dividen Saham
Share Dividends

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 30 April 2025, Perseroan menetapkan untuk membagikan dividen saham atas kinerja tahun buku 2024 sebesar Rp 18.212.913.950,- dengan dividen per saham sebesar Rp1,51/lembar saham.

Based on the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) held on April 30, 2025, the Company resolved to distribute share dividends for the 2024 financial year amounting to Rp18,212,913,950, with a dividend of Rp1.51 per share.

Konversi Waran Menjadi Saham
Conversion of Warrants Into Shares

Sepanjang tahun 2025 (1 Januari – 31 Desember 2025), terdapat 7.231.535 waran yang dikonversi menjadi saham. Akibat konversi waran menjadi saham tersebut, saham MKTR bertambah dari sebelumnya sejumlah 12.052.397.422 lembar (per 01 Januari 2025) menjadi 12.060.428.584 lembar (per 31 Desember 2025).

During the period of January 1 – December 31, 2025, a total of 7,231,535 warrants were converted into shares. As a result of the warrant conversion, the shares of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk increased from 12,052,397,422 shares (as of January 1, 2025) to 12,060,428,584 shares (as of December 31, 2025).

Program *Management Employee Stock Option Program* (MESOP)
Management Employee Stock Option Program (MESOP)

Merujuk pada Pasal 43A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE0002/BEI/03-2020 perihal Tata Cara Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk mengadakan Program *Management Employee Stock Option Program* (MESOP) dalam *Windows Exercise* III.

Referring to Article 43A of Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies with Pre-Emptive Rights (HMETD) and Circular Letter of PT Bursa Efek Indonesia No. SE-0002/BEI/03-2020 regarding Procedures for the Implementation of Share Ownership Programs, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk implemented the Management Employee Stock Option Program (MESOP) under Windows Exercise III.

Pelaksanaan Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Program MESOP) PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dan Surat No: 12/DIR-MKTR/XII/2025 tertanggal 30 Juli 2025 perihal pelaksanaan Tahap I–*Windows Exercise* III yang dilaksanakan selama 30 hari Bursa sejak tanggal 1 Juli 2025 atau sejak 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juli 2025. Pelaksanaan HMETD tersebut yakni sebanyak 232.735.481 lembar saham akan dikonversi ke saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp165 per lembar saham.

The implementation of the Management and Employee Share Ownership Program (MESOP) of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, as stated in Letter No. 12/DIR-MKTR/XII/2025 dated July 30, 2025 regarding the implementation of Phase I – Windows Exercise III, was conducted over 30 trading days starting from July 1, 2025 until July 30, 2025. The HMETD implementation covered 232,735,481 shares to be converted into new shares at an exercise price of Rp165 per share.

Selain itu, sepanjang tahun 2025, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk tidak melakukan aksi korporasi terkait mengenai aksi pemecahan saham (*stock split)*, penggabungan saham (*reverse stock*), maupun penurunan nilai nominal saham.

Furthermore, throughout 2025, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk did not undertake any corporate actions related to stock splits, reverse stock splits, or reductions in the nominal value of shares.

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Temporary Suspension of Stock Trading (Suspension) and/or Stock Listing Deletion (Delisting)

Sampai dengan akhir tahun 2025, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk tidak pernah menerima sanksi yang dapat mempengaruhi kegiatan perdagangan saham di Bursa Efek, baik berupa penghentian sementara (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*). Dengan demikian tidak ada informasi terkait hal tersebut yang dapat disajikan pada Laporan Tahunan ini.

As of the end of 2025, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk has never received any sanctions that could affect its share trading activities on the Stock Exchange, whether in the form of a temporary trading suspension (suspension) and/or delisting. Accordingly, there is no related information to be disclosed in this Annual Report.

Informasi Obligasi atau Efek Lainnya

Bond or Other Securities Information

Dalam 2 (dua) tahun terakhir, Perseroan tidak menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi konversi sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

Over the past 2 (two) years, the Company has not issued any bonds, sukuk, or convertible bonds. Therefore, there is no information to disclose regarding the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest or profit-sharing rates, maturity dates, or bond/sukuk ratings.

Peristiwa Penting 2025

Important Events In 2025



28 APR

Kembangkan Bisnis Berkelanjutan, Program CSR MKTR ini Dukung Agrobisnis *Zero Waste*

Strengthening Employee Engagement, MKTR Holds 2025 Outing

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk berkomitmen dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Hal ini didukung penuh oleh *Top Management* dan seluruh insan Perseroan. Dalam hal berkelanjutan, MKTR terus berupaya memberdayakan masyarakat sekitar untuk terlibat aktif dalam menjalankan operasional bisnis Perseroan. Hal ini sejalan dengan prinsip utama program CSR MKTR yaitu *Trimitra Harmony* yang menjaga keseimbangan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dengan tetap memegang teguh semangat kebun *zero waste*.

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk remains committed to conducting sustainable business operations, fully supported by Top Management and all Company personnel. As part of its sustainability initiatives, MKTR continues to empower local communities to actively participate in the Company's operational activities. This initiative aligns with the core principle of MKTR's CSR program, Trimitra Harmony, which promotes a balanced relationship between the Company, the government, and the community, while upholding the spirit of zero-waste plantation management.



30 APR

MKTR Umumkan Pembagian Dividen pada RUPS Tahunan
MKTR Announces Dividend Distribution at Annual GMS

Tahun 2025, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk membagikan dividen Rp18,21 miliar untuk tahun buku 2024. Dana ini merupakan alokasi atas 35% dari perolehan laba bersih tahun buku 2024 senilai Rp52,2 miliar. Keputusan itu, telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUSPT) tahun buku 2024 yang dihadiri oleh Top Manajemen Perseroan.

In 2025, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk distributed dividends amounting to Rp18.21 billion for the 2024 financial year. This amount represents 35% of the Company's net profit for 2024, totaling Rp52.2 billion. The decision was approved at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2024 financial year, attended by the Company's Top Management.



30 APR

MKTR Siapkan Capex Rp76 Miliar untuk Belanja 2025 pada *Public Expose* 2025
MKTR Allocates Rp76 Billion Capex for 2025 at Public Expose

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk menyelenggarakan *Public Expose* mengenai pemaparan terkait prospek dan kinerja bisnis Perseroan kepada masyarakat, para investor dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, pada *Public Expose* tersebut juga menyampaikan bahwa Perseroan mempersiapkan belanja modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX) sebesar Rp76 miliar pada 2025 yang akan digunakan untuk merawat fasilitas produksi, seperti pabrik, kebun, lahan baru, dan aktivitas operasional lainnya.

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) held a Public Expose to present the Company's business prospects and performance to the public, investors, and other stakeholders. During the event, the Company announced a planned capital expenditure (CAPEX) allocation of Rp76 billion for 2025. The budget will be utilized for the maintenance and development of production facilities, including factories, plantations, new land development, and other operational activities.



11 JUN

MKTR Raih TOP CSR Star 4 dan Penghargaan Komitmen CSR Nasional 2025

MKTR Wins TOP CSR Star 4 and National CSR Commitment Award 2025

Dalam ajang penghargaan TOP CSR Awards 2025, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk berhasil menyabet dua penghargaan prestisius sekaligus yaitu TOP CSR AWARDS 2025 # STAR 4 dan TOP LEADER ON CSR COMMITMENT 2025. Penghargaan ini sebagai bukti tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) dalam memaksimalkan program-program CSR kepada masyarakat maupun *stakeholder* lainnya.

At the TOP CSR Awards 2025, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk received two prestigious awards: TOP CSR Awards 2025 # Star 4 and TOP Leader on CSR Commitment 2025. These awards reflect the Company's strong commitment to implementing impactful Corporate Social Responsibility (CSR) programs for communities and stakeholders.



Januari-Desember
January-December

MKTR Turut Mendukung Perbaikan Jalan Desa

MKTR Supports Rural Road Infrastructure Improvement

Perseroan hadir dalam menjaga akses dan mobilitas warga, dengan turut memperbaiki infrastruktur jalan desa. Perbaikan jalan ini meliputi wilayah Batu Desa Batu Kotam, Simpang Parigi, Batu Hambawang di wilayah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Hal ini juga sebagai bentuk komitmen MKTR dalam membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat di area operasional Perseroan.

The Company contributed to improving village road infrastructure to maintain access and mobility for local residents. The road improvement initiatives covered the areas of Batu Kotam Village, Simpang Parigi, and Batu Hambawang in Lamandau Regency, Central Kalimantan. This initiative demonstrates MKTR's commitment to building long-term relationships with communities in its operational areas.



8 DEC

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) memenangkan Annual Report Award (ARA) 2024

PT Menthobi Karyatama Raya (MKTR) Wins Annual Report Award (ARA) 2024

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) berhasil meraih Annual Report Award (ARA) 2024 sebagai Pemenang Kategori Perusahaan Non BUMN/Non BUMD, atas kualitas laporan tahunan yang dinilai mencerminkan praktik tata kelola dan keberlanjutan yang kuat dan konsisten. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) bersama sejumlah lembaga strategis nasional, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kementerian Keuangan dan regulator lainnya.

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) won the Annual Report Award (ARA) 2024 in the Non-State-Owned/Non-Regionally-Owned Enterprise category. The award recognized the Company's high-quality annual reporting, reflecting strong and consistent governance and sustainability practices. The award was organized by the Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) in collaboration with national strategic institutions, including the Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, and the Ministry of Finance.



23 DEC

MKTR Mengadakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi Warga Desa Guci

MKTR Conducts Free Health Check Program for Residents of Guci Village

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang kesehatan. Perseroan menggelar pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi warga Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Kegiatan sosial ini dihadiri Wakil Bupati Lamandau, Abdul Hamid untuk memberikan dukungan dan menyaksikan jalannya pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar tersebut.

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk once again demonstrated its commitment to community welfare through a Corporate Social Responsibility (CSR) program in the health sector. The Company organized free medical check-ups and treatment services for residents of Guci Village, Bulik District, Lamandau Regency. The activity was attended by the Vice Regent of Lamandau, Abdul Hamid, who provided support and observed the healthcare services delivered to the local community.

Penghargaan
Awards



TOP CSR Awards 2025

Tanggal Perolehan Acquisition Date	11 Juni 2025 June 11, 2025
Kategori Category	TOP CSR Awards 2025 #Star 4
Event	CSR Awards 2025



TOP Leader on CSR Commitment 2025

Tanggal Perolehan Acquisition Date	11 Juni 2025 June 11, 2025
Kategori Category	TOP Leader on CSR Commitment 2025
Event	CSR Awards 2025

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dalam membangun tata kelola perusahaan yang berintegritas dan transparan kembali memperoleh pengakuan nasional. Hal ini ditandai diperolehnya penghargaan Annual Report Award (ARA) 2024.

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, in strengthening the implementation of corporate governance founded on integrity and transparency, once again received national recognition. This achievement was marked by the Company's receipt of the Annual Report Award (ARA) 2024

Annual Report Awards 2024

Tanggal Perolehan Acquisition Date	08 Desember 2025 December 8, 2025
Kategori Category	Juara *Non* BUMN/*Non* BUMD Klaster 1 Triliun – 5 Triliun Winner – Non-State-Owned / Non-Regionally-Owned Enterprise Category Cluster: Rp1 Trillion–5 Trillion
Event	Annual Report Awards 2024



Sertifikasi
Certifications

Tahun 2024, Perseroan serta Entitas Anak telah memperoleh sertifikasi dari beberapa lembaga, yakni disampaikan sebagai berikut:

In 2024, the Company and its Subsidiaries obtained certification from several institutions:

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Tanggal Perolehan Acquisition Date	02 Juni | June 2023.
Diperoleh dari Obtained from	PT TUV NORD Indonesia.
Masa Berlaku Validity Period	01 Juni | June 2028.



ISO 9001 Certification: 2015

Tanggal Perolehan Acquisition Date	5 Desember | December 2023.
Diperoleh dari Obtained from	Bureau Veritas.
Masa Berlaku Validity Period	4 Desember | December 2025.



2

Laporan Manajemen

Management Report





Laporan Komisaris Utama
Report from President Commissioner

Laporan Direktur Utama
Report from President Director

Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025
Statement Letter of Responsibilitty for
Annual Report 2025

Laporan Komisaris Utama

Report from President Commissioner

"Kami selaku Dewan Komisaris bersyukur bahwa jajaran Direksi, manajemen, dan seluruh insan Perseroan telah menunjukkan kinerja terbaik serta dedikasi tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan yang terjadi sepanjang tahun."

"As the Board of Commissioners, we are grateful that the Board of Directors, management, and all employees of the Company have demonstrated their best performance and strong dedication in facing various challenges throughout the year."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Alhamdulillah, segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya membawa kita bisa menyimak sajian Laporan Tahunan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (Perseroan) atau yang kita kenal dengan singkatan MKTR ini. Dapat kami sampaikan bahwa Perseroan telah mampu melewati perjalanan usaha dengan baik pada sepanjang tahun 2025.

Kami sebagai Dewan Komisaris bersyukur bahwa jajaran Direksi, manajemen, dan seluruh insan Perseroan telah menunjukkan kinerja terbaik serta dedikasi tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan yang terjadi sepanjang tahun.

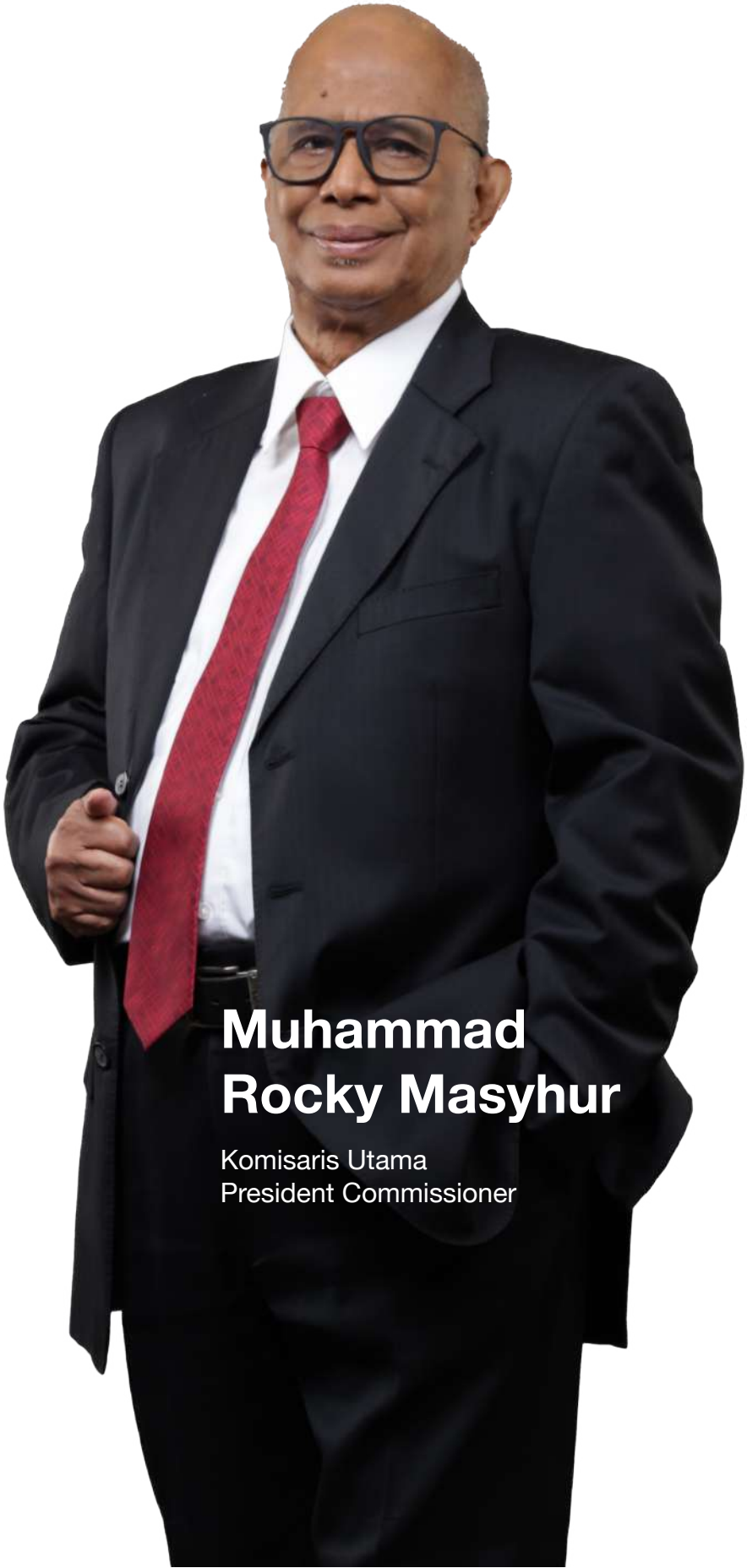
Kita ketahui bersama, tahun 2025 penuh dengan dinamika. Momen yang sempat diharapkan menjadi titik balik lanjutan pasca terdampak pandemi Covid-19 ternyata justru menghadirkan tantangan

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Alhamdulillah, all praise be to Allah SWT, whose blessings and grace have enabled us to present the Annual Report of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (the "Company"), also known as MKTR. We are pleased to convey that the Company has successfully navigated its business journey throughout 2025 with solid performance.

As the Board of Commissioners, we are grateful that the Board of Directors, management, and all employees of the Company have demonstrated their best performance and strong dedication in facing various challenges throughout the year.

As we are all aware, 2025 was marked by significant dynamics. What was initially expected to be a continued recovery momentum following the impact of the COVID-19 pandemic instead brought new



Muhammad Rocky Masyhur

Komisaris Utama
President Commissioner

baru. Situasi yang membuat semua pelaku usaha, bukan hanya di Indonesia, adaptif dan bergerak cepat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Tinjauan Ekonomi Makro dan Industri

Tantangan sepanjang tahun 2025 didominasi oleh dinamika di level global yang berdampak ke banyak negara. Salah satu yang paling ramai dibahas dan menciptakan kegaduhan ekonomi adalah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

Meski awalnya terkesan bahwa kebijakan AS tersebut diarahkan kepada China dan sepertinya hanya akan berdampak terhadap dua negara saja, faktanya kemudian menjalar ke hampir seluruh negara yang menjalin perdagangan dengan AS. Situasi tersebut kemudian disikapi secara berbeda oleh masing-masing negara sehingga menjadi dinamika yang sempat menciptakan ketidakpastian pasar.

Jika ditelaah lebih dalam, pada akhirnya memang tujuannya dalam rangka renegosiasi hubungan dagang yang saling menguntungkan. Meski begitu, prosesnya bukan hal mudah karena setiap negara memiliki kepentingan berbeda dilandasi target pertumbuhan perekonomian masing-masing.

Situasi ini menciptakan reaksi berbagai pihak akan prospek perekonomian global. Bank Dunia pada perjalanannya sempat mengingatkan bahwa ekonomi berpotensi melambat sebagai dampak atas situasi ini. Hasilnya, ekonomi global mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,3% pada 2025.

Di tengah situsi yang tidak mudah, kami memandang perekonomian Indonesia tetap resilient. Di bawah pemerintahan baru dipimpin presiden Prabowo Subianto, fleksibilitas kebijakan di bidang perekonomian dijalankan untuk menyesuaikan dinamika global yang berkembang.

Terbukti bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Januari–Desember 2025 sebesar Rp1.931,2 triliun, atau 101,3% dari target yang dicanangkan Presiden yaitu sebesar Rp1.905,6 triliun. Kontribusi di sektor hilirisasi cukup dominan dengan porsi 30,2% atau senilai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3% persen secara tahunan.

challenges. These conditions required all business players—not only in Indonesia but globally—to remain adaptive and agile in responding to ongoing developments.

Macroeconomic and Industry Overview

Challenges throughout 2025 were largely driven by global dynamics that affected many countries. One of the most widely discussed issues that created economic turbulence was the United States' reciprocal tariff policy.

Although initially perceived as being directed primarily at China and expected to impact only the two countries, in reality, the effects extended to nearly all countries engaged in trade with the United States. This situation prompted varied responses from different countries, creating dynamics that led to market uncertainty.

Upon closer examination, the policy was ultimately aimed at renegotiating mutually beneficial trade relations. However, the process proved to be complex, as each country pursued different interests aligned with its respective economic growth targets.

This situation triggered diverse reactions regarding the global economic outlook. During this period, the World Bank cautioned that the global economy could experience a slowdown as a consequence of these developments. As a result, global economic growth was recorded at 3.3% in 2025.

Amid these challenging conditions, we view Indonesia's economy as remaining resilient. Under the new administration led by President Prabowo Subianto, flexible economic policies have been implemented to adapt to evolving global dynamics.

This is evidenced by data from the Ministry of Investment and Downstream Industry/Investment Coordinating Board (BKPM), which recorded investment realization for January–December 2025 at Rp1,931.2 trillion, or 101.3% of the target set by the President at Rp1,905.6 trillion. The downstream sector contributed significantly, accounting for 30.2% or Rp584.1 trillion, representing a year-on-year growth of 43.3%.

Dari total realisasi investasi bidang hilirisasi sepanjang 2025, investasinya didominasi sektor mineral sebesar Rp373,1 triliun, diikuti perkebunan dan kehutanan Rp144,5 triliun, minyak dan gas bumi Rp60 triliun, serta perikanan dan kelautan dengan total Rp6,4 triliun.

From the total downstream investment realization in 2025, the largest portion was contributed by the mineral sector amounting to Rp373.1 trillion, followed by plantations and forestry at Rp144.5 trillion, oil and gas at Rp60 trillion, and fisheries and marine sectors totaling Rp6.4 trillion.

Besarnya investasi terlebih hilirisasi sektor perkebunan termasuk di dalamnya tentu menjadi angin segar bagi industri. Menciptakan optimisme bagi para pelaku usaha di industri serta diharapkan besarnya investasi tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan investor baik global maupun domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global.

The substantial level of investment, particularly in downstream plantation sectors, provides a positive outlook for the industry. It fosters optimism among industry players and reflects strong investor confidence—both global and domestic—amid ongoing global economic uncertainties.

Semoga realisasi investasi tersebut juga mencerminkan fundamental perekonomian nasional sekaligus menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

It is expected that such investment realization also reflects the strength of the national economic fundamentals, serving as a key driver of economic growth and job creation.

Hal yang tetap harus disyukuri adalah bahwa di tengah situasi menantang ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,11% meskipun di bawah target APBN yaitu sebesar 5,2%. Negara kita menjadi salah satu dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di ASEAN di bawah Vietnam yang mampu tumbuh 8% pada 2025.

Amid these challenging conditions, it is worth noting that Indonesia's economic growth reached 5.11% in 2025, slightly below the State Budget (APBN) target of 5.2%. Nevertheless, Indonesia remains among the fastest-growing economies in ASEAN, following Vietnam, which recorded an 8% growth rate in 2025.

Sektor perkebunan khususnya industri kelapa sawit masih menjadi salah satu sektor pendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Devisa hasil ekspor minyak kelapa sawit *Crude Palm Oil*/CPO memberikan kontribusi signifikan serta sebagai salah satu penyumbang pendapatan tertinggi bagi negara.

The plantation sector, particularly the palm oil industry, continues to be one of the key drivers of national economic growth. Export revenues from Crude Palm Oil (CPO) contribute significantly and remain among the highest sources of foreign exchange earnings for the country.

Industri sawit juga berkontribusi dalam membuka lapangan kerja bagi lebih dari 17 juta orang di seluruh rantai pasok. Selain menopang perekonomian nasional, industri ini juga turut serta memperkuat perekonomian di daerah.

The palm oil industry also plays a crucial role in employment, supporting more than 17 million jobs across the supply chain. In addition to strengthening the national economy, the industry contributes significantly to regional economic development.

Pada 2025, di tengah tantangan cuaca yaitu La Nina, GAPKI mencatat produksi CPO nasional sebanyak 51,66 juta ton atau naik 7,26% dibandingkan 48,16 juta ton produksi tahun 2024. Produksi minyak inti sawit atau *Palm Kernel Oil* (PKO) juga mencatatkan kenaikan sebesar 6,41% menjadi 4,893 juta ton pada sepanjang 2025 dibandingkan 4,598 juta ton pada sepanjang 2024.

In 2025, despite weather-related challenges such as La Niña, the Indonesian Palm Oil Association (GAPKI) recorded national CPO production of 51.66 million tons, representing an increase of 7.26% compared to 48.16 million tons in 2024. Production of Palm Kernel Oil (PKO) also rose by 6.41% to 4.893 million tons in 2025, compared to 4.598 million tons in 2024.

Secara total, produksi CPO dan PKO nasional mencapai 56,553 juta ton pada tahun 2025 atau naik 7,18% dibandingkan 52,762 juta ton produksi CPO dan PKO pada sepanjang 2024.

In total, national production of CPO and PKO reached 56.553 million tons in 2025, an increase of 7.18% compared to 52.762 million tons in 2024.

Peran Pengawasan dan Penilaian Kinerja Direksi

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara intensif pada sepanjang 2025. Di antaranya melalui partisipasi aktif terlibat dalam evaluasi atas strategi dan kinerja Perseroan melalui rapat gabungan bersama Direksi.

Dewan Komisaris tidak semata memantau jalannya pelaksanaan rencana serta realisasi kerja tetapi juga memberikan masukan strategis dan rekomendasi guna memastikan keselarasan dengan visi jangka panjang Perseroan yang menekankan keberlanjutan, efisiensi, dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sepanjang 2025, Dewan Komisaris memberikan sejumlah arahan kepada Direksi baik yang bersifat teknis operasional maupun terkait dengan tata kelola dan peningkatan kualitas komunikasi serta koordinasi.

Masukan Dewan Komisaris kepada Direksi pada 2025 antara lain terkait dengan usulan peningkatan kualitas serta efektivitas rapat rutin baik untuk antar Direksi maupun antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Selain itu, Dewan Komisaris juga menyarankan kepada Direksi tentang pentingnya peningkatan proses audit laporan keuangan perusahaan. Sejauh ini, pelaksanaan atas hal ini telah berjalan dengan baik namun Dewan Komisaris tetap menganjurkan untuk selalu terjadi peningkatan seiring dengan upaya peningkatan tata kelola perusahaan yang baik.

Dewan Komisaris juga terlibat dalam sejumlah rencana pengembangan kegiatan usaha baik di level *holding* maupun kegiatan usaha di level anak perusahaan. Keterlibatan Dewan Komisaris dalam peran pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan sejak awal perencanaan sampai dengan implementasi dan evaluasinya.

Selain itu, Dewan Komisaris juga terlibat aktif dalam pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi terkait dengan rencana pembiayaan untuk pengembangan kegiatan usaha anak perusahaan.

Supervisory Role and Performance Assessment of the Board of Directors

The Board of Commissioners carried out its supervisory function intensively throughout 2025, including through active participation in evaluating the Company's strategy and performance via joint meetings with the Board of Directors.

The Board of Commissioners not only monitored the implementation of plans and operational performance but also provided strategic insights and recommendations to ensure alignment with the Company's long-term vision, which emphasizes sustainability, efficiency, and value creation for all stakeholders.

Throughout 2025, the Board of Commissioners provided various directives to the Board of Directors, covering both technical operational matters and aspects related to governance, as well as the enhancement of communication quality and coordination.

Among the key recommendations provided in 2025 were proposals to improve the quality and effectiveness of routine meetings, both among members of the Board of Directors and between the Board of Directors and the Board of Commissioners.

In addition, the Board of Commissioners emphasized the importance of enhancing the financial audit process. While the implementation to date has been satisfactory, the Board of Commissioners continues to encourage ongoing improvements in line with efforts to strengthen good corporate governance practices.

The Board of Commissioners was also involved in various business development plans, both at the holding level and within subsidiary operations. Its involvement in supervisory and advisory roles was carried out from the initial planning stage through to implementation and evaluation.

Furthermore, the Board of Commissioners actively supervised and provided advice to the Board of Directors regarding financing plans for the development of subsidiary business activities.

Kami selaku Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas, serta terus mendorong fleksibilitas dalam pengambilan keputusan strategis menyesuaikan dinamika yang terjadi.

Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2025, Direksi telah menunjukkan kepemimpinan yang solid, disiplin, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan berbagai rencana yang telah ditetapkan Perseroan.

Dewan Komisaris mengapresiasi atas berbagai langkah inisiatif serta inovasi baik melalui anak perusahaan maupun kolaborasi dalam rangka menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Nilai tambah yang didasarkan pada semangat Perseroan sebagai perusahaan yang mengedepankan prinsip dan praktik keberlanjutan yang ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang.

Kami melihat Direksi telah secara konsisten memperkuat manajemen risiko dan melakukan adaptasi teknologi di industri. Sebuah upaya yang tidak hanya menciptakan efisiensi biaya, tetapi juga membuka peluang baru untuk diversifikasi pendapatan dan peningkatan kontribusi ekonomi berkelanjutan.

Penilaian Atas Kinerja Operasional dan Keuangan Perseroan

Dewan Komisaris menyadari bahwa terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi industri dan juga Perseroan pada sepanjang 2025. Meski begitu, dapat kami nilai bahwa Direksi dan seluruh jajaran di perusahaan telah menjalankan operasional bisnis dan pengelolaan keuangan dengan baik dan terukur sehingga menghasilkan pertumbuhan kinerja yang sangat positif.

Pada sepanjang 2025, pendapatan perusahaan melonjak cukup pesat, naik 23% menjadi Rp1,246 triliun dibandingkan Rp1,006 triliun pada 2024. Terjadi efisiensi beban usaha sebagai upaya disiplin dalam keuangan dari Rp73,043 miliar pada 2024 menjadi Rp68,675 miliar pada 2025.

Laba usaha meningkat hampir 14% menjadi Rp120,696 miliar pada 2025 dibandingkan Rp106,386 miliar pada tahun sebelumnya. Perseroan

As the Board of Commissioners, we carry out our supervisory function by upholding the principles of prudence and accountability, while continuously encouraging flexibility in strategic decision-making in response to evolving dynamics.

The Board of Commissioners assesses that throughout 2025, the Board of Directors has demonstrated strong, disciplined, and responsible leadership in executing the Company's established plans.

The Board of Commissioners appreciates the various initiatives and innovations undertaken, both through subsidiaries and collaborative efforts, in creating sustainable value for all stakeholders. Such value creation is rooted in the Company's commitment to environmental sustainability principles and long-term orientation.

We also observe that the Board of Directors has consistently strengthened risk management practices and embraced technological adaptation within the industry. These efforts not only enhance cost efficiency but also open new opportunities for revenue diversification and contribute to sustainable economic growth.

Assessment of the Company's Operational and Financial Performance

The Board of Commissioners recognizes that both the industry and the Company faced a number of challenges throughout 2025. Nevertheless, we assess that the Board of Directors and all levels of management have managed business operations and financial performance effectively and in a well-measured manner, resulting in very positive performance growth.

Throughout 2025, the Company's revenue grew significantly by 23% to Rp1.246 trillion, compared to Rp1.006 trillion in 2024. Operating expenses were also reduced as a result of disciplined financial management, declining from Rp73.043 billion in 2024 to Rp68.675 billion in 2025.

Operating profit increased by nearly 14% to Rp120.696 billion in 2025, compared to Rp106.386 billion in the previous year. The Company also

juga berhasil menurunkan total kewajibannya (Liabilitas) dari Rp889,102 miliar pada 2024 menjadi Rp870,528 miliar pada 2025 yang menciptakan struktur neraca Perseroan semakin kuat.

Total kekayaan bersih (ekuitas) Perseroan pada 2025 meningkat menjadi Rp 668,835 miliar atau naik 6,2% dari Rp629,336 miliar pada 2024. Peningkatan ekuitas di tengah penurunan liabilitas ini membuat rasio utang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio*) Perseroan turun dari 1,15 pada tahun 2024 menjadi 1,06 pada tahun 2025 yang mengindikasikan tingkat risiko finansial (*leverage*) perusahaan semakin terkendali.

Selain itu, arus kas bersih dari aktivitas operasi mencatatkan tren positif, meningkat dari Rp110,419 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp117,896 miliar di tahun 2025 yang menandakan arus kas operasional semakin positif.

Pada 2025, Perseroan berhasil meraih laba bersih sebesar Rp55,093 miliar atau naik lebih dari 5% dibandingkan Rp52,245 miliar pada 2024. Dewan Komisaris meyakini situasi keuangan ini mencerminkan fundamental perusahaan yang terus bertumbuh dengan operasional yang semakin efisien dan risiko utang yang menurun.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas komitmen Direksi dalam menjaga kesinambungan kinerja keuangan dan terus meningkatkan efisiensi usaha secara menyeluruh.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Dewan Komisaris menyadari pentingnya sinergi dan kerjasama solid dengan Direksi. Secara fundamental, hal ini dalam rangka mewujudkan hubungan yang kuat dan kondusif dalam menjalankan bisnis Perseroan dan pada saat yang sama akan menciptakan kesepahaman serta memperkuat interaksi antar personal sehingga komunikasi berjalan dengan baik dan lancar.

Maka Dewan Komisaris menjaga komunikasi secara teratur melalui pertemuan rutin bulanan. Kesempatan baik itu juga menjadi momen bagi Dewan Komisaris untuk menjalankan peran memberikan nasihat yang solutif dan bermanfaat kepada Direksi dalam rangka mendukung tujuan dan keberlanjutan usaha Perseroan.

succeeded in reducing its total liabilities from Rp889.102 billion in 2024 to Rp870.528 billion in 2025, resulting in a stronger balance sheet structure.

Total equity increased to Rp668.835 billion in 2025, representing a 6.2% rise from Rp629.336 billion in 2024. This increase in equity, coupled with the reduction in liabilities, led to an improvement in the Company's debt-to-equity ratio, which declined from 1.15 in 2024 to 1.06 in 2025, indicating a more controlled level of financial leverage.

In addition, Net Cash Flows from Operating Activities showed a positive trend, increasing from Rp110.419 billion in 2024 to Rp117.896 billion in 2025, reflecting stronger operational cash flow performance.

In 2025, the Company recorded a net profit of Rp55.093 billion, representing an increase of more than 5% compared to Rp52.245 billion in 2024. The Board of Commissioners believes that this financial performance reflects a strengthening corporate foundation, supported by increasingly efficient operations and a declining level of debt risk.

The Board of Commissioners expresses its appreciation for the Board of Directors' commitment to maintaining the sustainability of financial performance and continuously improving overall operational efficiency.

Frequency and Methods of Providing Advice to the Board of Directors

The Board of Commissioners recognizes the importance of strong synergy and cooperation with the Board of Directors. Fundamentally, this is aimed at fostering a solid and conducive relationship in managing the Company's business, while also creating mutual understanding and strengthening interpersonal interactions to ensure effective and smooth communication.

To this end, the Board of Commissioners maintains regular communication through monthly meetings. These occasions also serve as an opportunity for the Board of Commissioners to fulfill its advisory role by providing constructive and practical recommendations to the Board of Directors in support of the Company's objectives and business sustainability.

Pertemuan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui rapat gabungan sebanyak 12 (dua belas) kali yang diselenggarakan secara periodik maupun melalui pertemuan khusus, apabila terdapat situasi/kondisi yang membutuhkan evaluasi mendalam atau keputusan yang krusial yang bersifat mendesak.

Di luar pertemuan rutin tersebut, Dewan Komisaris juga menghadiri rapat gabungan sepanjang diperlukan yang biasanya juga menghadirkan seluruh organ perusahaan dalam tata kelola di bawah Dewan Komisaris ataupun Direksi untuk melakukan pembahasan yang lebih detail dan komprehensif.

Selain rapat formal, Dewan Komisaris juga melakukan komunikasi informal yang menjadi sarana efektif dalam memberikan nasihat strategis kepada Direksi. Dewan Komisaris senantiasa menjaga komunikasi yang terbuka dan memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pandangan dan saran yang tepat dan efektif kepada Direksi, menyampaikan sudut pandang serta kebijaksanaan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris berupaya untuk memberikan pandangan yang komprehensif terhadap isu-isu strategis maupun risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Dengan demikian, Dewan Komisaris berkomitmen penuh untuk terus menjalankan peran aktif dalam memberikan nasihat yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan Perseroan.

Pandangan atas Aspek Keberlanjutan Perseroan

Dewan Komisaris memandang Perseroan pada sepanjang 2025 semakin menancapkan komitmen terhadap aspek keberlanjutan. Bahkan, kami menilai aspek penting ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi jangka pendek maupun arah jangka panjang Perseroan.

Dewan Komisaris menilai bahwa komitmen Direksi dalam aspek keberlanjutan telah dijalankan secara konsisten, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun tata kelola (ESG). Implementasinya bahkan telah membuahkan apresiasi dari pihak eksternal berupa penghargaan baik terkait praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun inovasi dalam operasional perusahaan.

Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors were conducted through joint meetings held 12 (twelve) times, both on a periodic basis and through ad hoc meetings when specific situations or conditions required in-depth evaluation or urgent strategic decision-making.

Beyond these routine meetings, the Board of Commissioners also attends joint meetings as necessary, which may involve all corporate governance organs under the Board of Commissioners and/or the Board of Directors to facilitate more detailed and comprehensive discussions.

In addition to formal meetings, the Board of Commissioners also maintains informal communication, which serves as an effective channel for delivering strategic advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners upholds open communication and ensures that each member can convey relevant and effective insights, perspectives, and sound judgment to the Board of Directors.

The Board of Commissioners strives to provide comprehensive views on strategic issues and risks faced by the Company. Accordingly, the Board remains fully committed to actively performing its advisory role in supporting the Company's sustainable growth.

Perspective on the Company's Sustainability Aspects

The Board of Commissioners observes that throughout 2025, the Company has further strengthened its commitment to sustainability. This critical aspect has become an integral part of both the Company's short-term implementation and long-term strategic direction.

The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has consistently demonstrated its commitment to sustainability across environmental, social, and governance (ESG) aspects. Its implementation has also garnered external recognition in the form of awards related to Corporate Social Responsibility (CSR) practices as well as operational innovation.

Sebelumnya, Perseroan telah melakukan pengembangan produk pupuk organik melalui entitas anak yaitu PT Menthobi Hijau Lestari (MHL) yang menempatkan Perseroan sebagai pionir penghasil pupuk organik granule berbahan baku produk samping kelapa sawit. Inovasi ini terus dikembangkan sampai dengan saat ini.

Pada 2025, dengan bahan baku yang sama yaitu produk samping kelapa sawit yang kita kenal tandan kosong, Perseroan mengembangkan bahan bakar alternatif yaitu biomassa EFB Pellet.

Selain itu, program kemitraan dengan Petani Sawit Rakyat (PSR) juga terus diperkuat, termasuk dalam hal akses teknologi dan pendampingan praktik budidaya berkelanjutan.

Dewan Komisaris menilai bahwa bagi Perseroan, praktik ramah lingkungan dan penguatan dengan lingkungan sosial sekitar bukan saja sekadar menunaikan kewajiban. Lebih dari itu, Dewan Komisaris melihat bahwa Perseroan telah memandang serius aspek ini sehingga menjadi bagian penting dalam menjalankan bisnis Perseroan.

Kesadaran akan dampak bisnis terhadap lingkungan dan sosial ini menjadi pendorong utama dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil Perseroan. Dari aspek sosial, Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya upaya-upaya Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan tanpa diskriminasi, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara lingkungan internal perusahaan dengan lingkungan sekitarnya.

Dewan Komisaris juga menilai berbagai insiatif melalui program CSR dilakukan Perseroan secara konsisten dan kreatif sehingga dapat menghasilkan dampak positif yang lebih baik terhadap lingkungan sekitar dan bahkan dampak positifnya bagi para pemangku kepentingan.

Pandangan atas Prospek Usaha Perseroan

Prospek usaha Perseroan dipengaruhi oleh dua hal; internal dan eksternal. Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha Perseroan dari sisi internal semakin positif seiring dengan hadirnya berbagai inovasi serta kolaborasi strategis dengan pelaku usaha lain di industri. Begitu juga dari aspek

Previously, the Company developed an organic fertilizer product through its subsidiary, PT Menthobi Hijau Lestari (MHL), positioning the Company as a pioneer in producing granulated organic fertilizer derived from palm oil by-products. This innovation continues to be further developed to date.

In 2025, utilizing the same raw material—palm oil by-products known as empty fruit bunches—the Company further developed an alternative fuel in the form of biomass EFB pellets.

In addition, partnership programs with independent smallholder farmers (Petani Sawit Rakyat/PSR) continued to be strengthened, particularly in terms of access to technology and assistance in implementing sustainable cultivation practices.

The Board of Commissioners views that, for the Company, environmentally responsible practices and strengthening relationships with surrounding communities are not merely obligations. Rather, the Board observes that the Company has placed serious emphasis on these aspects, making them an integral part of its business operations.

Awareness of the environmental and social impacts of its business activities has become a key driver in shaping the Company's policies and strategic initiatives. From a social perspective, the Board of Commissioners fully supports the Company's efforts to foster an inclusive, fair, and non-discriminatory work environment, thereby promoting harmonious relationships between the internal corporate environment and the surrounding community.

The Board of Commissioners also notes that various initiatives implemented through the Company's Corporate Social Responsibility (CSR) programs have been carried out consistently and innovatively, generating broader positive impacts on the surrounding environment as well as for its stakeholders.

View on the Company's Business Prospects

The Company's business prospects are influenced by two key factors: internal and external. The Board of Commissioners assesses that, from an internal perspective, the Company's prospects are increasingly positive, supported by the emergence of various innovations and strategic collaborations

keuangan yang semakin positif dan kami berharap bisa semakin kuat di tahun 2026 serta masa yang akan datang.

Dari sisi eksternal, MKTR sebagai bagian dari industri sawit nasional tentu tidak terlepas dari dinamika yang terjadi baik di dalam negeri maupun global. Baik yang bersifat regulasi maupun non regulasi seperti faktor geopolitik.

Selain itu, industri sawit juga tidak akan lepas dari faktor risiko cuaca sehingga Dewan Komisaris akan selalu mengingatkan kepada Direksi untuk terus memberikan perhatian terhadap aspek ini dan melakukan mitigasi risiko.

Dewan Komisaris melihat bahwa selain upaya pertumbuhan organik, Perseroan akan tetap memantau dan mengoptimalkan setiap potensi pertumbuhan bisnis, termasuk melalui langkah anorganik.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) menjadi salah satu fokus Dewan Komisaris dalam menjalankan peran di perusahaan. Sepanjang 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi beserta seluruh jajarannya telah menjaga komitmen tinggi atas penerapan tata kelola ini dan dijalankan dengan penuh kesungguhan.

Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran diimplementasikan melalui berbagai kebijakan internal dan praktik operasional. Dewan Komisaris mengapresiasi atas konsitensi implementasi ini.

Dewan Komisaris melihat bahwa Perseroan telah memenuhi unsur kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan undangan yang berlaku. Bagi Perseroan, sistem pengendalian internal terkait kepatuhan terhadap regulasi, merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan tata kelola perusahaan serta menjadi dasar pelaksanaan kegiatan operasional yang sehat, penuh kehati-hatian (*prudent*), dan aman.

with other industry players. Likewise, the Company's financial condition continues to improve, and we expect it to become even stronger in 2026 and the years ahead.

From an external standpoint, as part of the national palm oil industry, MKTR is inevitably affected by both domestic and global dynamics, including regulatory and non-regulatory factors such as geopolitical developments.

In addition, the palm oil industry remains exposed to weather-related risks. Therefore, the Board of Commissioners will continue to remind the Board of Directors to maintain close attention to this aspect and implement appropriate risk mitigation measures.

The Board of Commissioners also observes that, in addition to pursuing organic growth, the Company will continue to monitor and optimize all potential avenues for business expansion, including through inorganic initiatives.

View on the Implementation of Good Corporate Governance

Supervision over the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles remains one of the primary focuses of the Board of Commissioners in carrying out its role within the Company. Throughout 2025, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors and all levels of management have maintained a strong commitment to governance practices and have implemented them with diligence and integrity.

The principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness have been consistently applied through various internal policies and operational practices. The Board of Commissioners appreciates this consistency in implementation.

The Board of Commissioners also observes that the Company has complied with applicable laws and regulations. For the Company, an internal control system that ensures regulatory compliance is a fundamental component of corporate governance and serves as the basis for conducting sound, prudent, and secure business operations.

Berkaitan dengan tata kelola ini, fungsi pengawasan dan kepatuhan oleh Dewan Komisaris juga berjalan efektif dengan dukungan dari Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi yang menjalankan peran sesuai tugasnya.

Dewan Komisaris juga terus memperkuat fungsi pengawasan tersebut dengan forum rapat gabungan dengan organ pendukung Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mengundang Divisi terkait untuk membahas bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing Komite.

Dengan fondasi tata kelola yang kokoh ini menciptakan optimisme dari kami sebagai Dewan Komisaris bahwa Perseroan akan mampu menjaga stabilitas operasional, memperkuat daya saing, serta memastikan keberlanjutan bisnis di tengah tantangan industri yang semakin kompleks.

Pandangan Dewan Komisaris atas Penerapan dan Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) Perusahaan

Dewan Komisaris turut serta memastikan agar komitmen Perseroan terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG yang termasuk di dalamnya menghadirkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) berjalan dengan baik dan konsisten.

Perseroan telah memiliki pedoman WBS yang tertuang dalam Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PT Menthobi Karyatama Raya Tbk ini sejak tahun 2022. Tepatnya, pedoman ini diresmikan dan ditandatangani tanggal 12 Juli 2022.

Dewan Komisaris juga melakukan koordinasi dengan Direksi untuk memastikan manakala terdapat perubahan dari regulator yang menuntut dilakukannya pembaruan pedoman ini maka perlu dilakukan penyesuaian. Meski begitu, sejauh ini pedoman yang ada di Perseroan masih relevan dan mengacu standar yang berlaku.

Selain pedoman GCG, Perseroan juga menyediakan sarana prosedur komunikasi maupun konsultasi terkait pelaporan pelanggaran secara efektif serta penanganan atas sebuah laporan.

In relation to governance, the supervisory and compliance functions of the Board of Commissioners have been carried out effectively, supported by the Audit Committee and the Nomination & Remuneration Committee, both of which have performed their roles in accordance with their respective mandates.

The Board of Commissioners continues to strengthen its oversight function through joint meetings involving its supporting organs, namely the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee, by inviting relevant divisions to discuss matters within each committee's scope of responsibility.

With this strong governance foundation, the Board of Commissioners remains optimistic that the Company will be able to maintain operational stability, enhance its competitiveness, and ensure business sustainability amid increasingly complex industry challenges.

The Board of Commissioners' View on the Implementation and Management of the Company's Whistleblowing System (WBS)

The Board of Commissioners plays an active role in ensuring the Company's commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG) principles, including the effective and consistent operation of the Whistleblowing System (WBS).

The Company has established WBS guidelines as part of the Good Corporate Governance (GCG) Manual of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk since 2022, which were formally enacted and signed on July 12, 2022.

The Board of Commissioners also coordinates with the Board of Directors to ensure that any regulatory changes requiring updates to the guidelines are properly addressed. To date, the existing guidelines remain relevant and aligned with prevailing standards.

In addition to the GCG guidelines, the Company has provided effective communication and consultation channels to facilitate the reporting of violations, as well as procedures for handling such reports.

Dengan adanya saluran pelaporan pelanggaran, Dewan Komisaris berperan penting dalam mengawasi terhadap pengelolaan WBS Perseroan hingga menindaklanjuti atas pelaporan tersebut. Dalam hal ini, Dewan Komisaris menjalankan peran aktif dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran apabila Direksi menjadi pihak yang dilaporkan, dengan berkoordinasi bersama Pemegang Saham.

Dewan Komisaris tidak menerima maupun menemukan adanya pelanggaran yang dilaporkan melalui WBS pada sepanjang 2025, baik di lingkungan *holding* maupun di anak perusahaan.

Penilaian atas Kinerja Organ Pendukung di Bawah Dewan Komisaris

Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan organ penting di bawah Dewan Komisaris. Keberadaannya membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perseroan.

Kedua dimaksud telah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan sepanjang tahun 2025. Terutama dari sisi operasional, keuangan dan aspek strategis lainnya.

Penilaian dari masing-masing Organ Pendukung di bawah Dewan Komisaris dijelaskan sebagai berikut:

- Dalam membantu Dewan Komisaris, Komite Audit yang dibentuk telah menjalankan tugasnya memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal maupun auditor eksternal serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui penyelenggaraan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali sepanjang tahun 2025.

- Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memantau prosedur remunerasi dan nominasi Perseroan serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik yang diwujudkan melalui penyelenggaraan rapat komite sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang tahun 2025 termasuk rapat dengan divisi kerja bidang terkait.

Through the existence of these reporting channels, the Board of Commissioners plays a key role in overseeing the management of the Company's WBS and in following up on any reported cases. In this regard, the Board of Commissioners actively responds to reports of alleged violations, particularly when members of the Board of Directors are involved, in coordination with the Shareholders.

Throughout 2025, the Board of Commissioners did not receive nor identify any reported violations through the WBS, both at the holding company level and within its subsidiaries.

Assessment of the Performance of Supporting Organs Under the Board of Commissioners

The Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee are key supporting organs under the Board of Commissioners. Their presence plays a vital role in assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function over the management of the Company.

Both committees have effectively supported the Board of Commissioners in performing its oversight duties throughout 2025, particularly in operational, financial, and other strategic aspects.

The assessment of each supporting organ under the Board of Commissioners is as follows:

- In supporting the Board of Commissioners, the Audit Committee has carried out its duties by monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system, as well as overseeing the performance of both internal and external auditors. The Audit Committee fulfilled its roles and responsibilities through the convening of 7 (seven) meetings throughout 2025.

- The Nomination and Remuneration Committee has assisted the Board of Commissioners in reviewing and monitoring the Company's remuneration and nomination procedures. It has performed its duties and responsibilities effectively, as evidenced by the convening of 3 (three) committee meetings throughout 2025, including meetings with relevant working divisions.

Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan atas susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Composition of the Board of Commissioners

Throughout 2025, there were no changes to the composition of the Company's Board of Commissioners. Accordingly, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2025 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Muhammad Rocky Masyhur	Direktur Utama President Director	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 31 Maret 2021. Extraordinary GMS Resolution dated March 31, 2021.
Bambang Widodo	Direktur Director	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 31 Maret 2021. Extraordinary GMS Resolution dated March 31, 2021
M. Khairnadif Kasyfillah	Direktur Director	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 31 Maret 2021. Extraordinary GMS Resolution dated March 31, 2021

Penutup

Semoga pencapaian positif sepanjang 2025 semakin memperkuat fondasi serta fundamental bisnis Perseroan baik untuk melangkah lebih baik di tahun 2026 maupun pada tahun–tahun berikutnya.

Dewan Komisaris meyakini bahwa berbagai inisiatif serta kebijakan strategis Direksi yang telah berjalan positif pada 2025 akan menjadi landasan untuk pengembangan selanjutnya secara berkelanjutan dan jangka panjang.

Melalui Laporan Tahunan ini, Dewan Komisaris sekali lagi mengapresiasi Direksi dan seluruh insan di MKTR serta kami ucapkan terima kasih atas dukungan serta kepercayaan para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan sehingga tahun 2025 bisa dilalui dengan baik.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk secara konsisten menjalankan peran pengawasan dan pemberian nasihat secara objektif, professional, dan bijaksana demi terwujudnya pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan Perseroan secara jangka panjang.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Closing

The positive achievements throughout 2025 are expected to further strengthen the Company's foundation and business fundamentals, enabling it to move forward more effectively in 2026 and in the years ahead.

The Board of Commissioners believes that the various initiatives and strategic policies implemented by the Board of Directors in 2025 will serve as a solid foundation for the Company's sustainable and long-term development.

Through this Annual Report, the Board of Commissioners would like to once again express its appreciation to the Board of Directors and all employees at MKTR, as well as extend its gratitude for the continued support and trust of the shareholders and all stakeholders, which have enabled the Company to successfully navigate 2025.

The Board of Commissioners remains committed to consistently carrying out its supervisory and advisory roles in an objective, professional, and prudent manner, in order to ensure the Company's long-term business growth and sustainability.

Jakarta, April 2026
Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of Board of Commissioners
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk



Muhammad Rocky Masyhur
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direktur Utama

Report from President Director

"Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan iklim sepanjang 2025, Perseroan berhasil menjaga resiliensi operasional dan mencetak kinerja positif melalui penguatan kemitraan strategis serta inovasi berkelanjutan berbasis *zero waste management system*."

"Amidst global economic dynamics and climate challenges throughout 2025, the Company successfully maintained operational resilience and recorded positive performance through strengthened strategic partnerships and sustainable innovation based on a zero-waste management system."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya, sehingga PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (Perseroan) mampu menavigasi dinamika tahun buku 2025 dengan tetap menjaga komitmen terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan. Sepanjang tahun 2025, di tengah fluktuasi pasar komoditas, geopolitik, dan tantangan iklim, Perseroan berhasil menjaga resiliensi operasional dan memperkuat posisi strategisnya dalam industri agribisnis.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat bagi Perseroan sebagai perusahaan publik setelah melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 November 2022. Alhamdulillah, sepanjang rentang waktu dimaksud kami dapat menjaga konsistensi sebagai perusahaan yang menerapkan *best practices* agribisnis yang sejalan dengan prinsip dan praktik keberlanjutan yang ramah lingkungan sehingga memberikan nilai tambah berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan.

Dear respected stakeholders,

We extend our praise and gratitude to Allah SWT for all His blessings, which enabled PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (the Company) to navigate the dynamics of the 2025 financial year while maintaining its commitment to sustainable growth. Throughout 2025, amid fluctuations in commodity markets, geopolitical challenges, and climate change, the Company successfully maintained operational resilience and strengthened its strategic position in the agribusiness industry.

The year 2025 marked the Company's fourth year as a public company, following its initial public offering on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on November 8, 2022. Alhamdulillah, throughout this period, we have consistently implemented agribusiness best practices aligned with environmentally friendly sustainability principles, thereby providing sustainable added value to our stakeholders.



Harry M. Nadir

Direktur Utama
President Director

Situasi Makroekonomi Global dan Nasional

Bapak dan ibu para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, sebagaimana dirasakan pelaku usaha pada umumnya, perjalanan bisnis tahun 2025 penuh dengan tantangan dan dinamika.

Secara global, tahun 2025 diwarnai oleh sejumlah tantangan meskipun arah besarnya positif yaitu pemulihan ekonomi yang moderat dengan angka pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3%. Sepanjang tahun 2025, ekonomi global bergerak dinamis dan sarat ketidakpastian.

Proteksionisme menguat terutama akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu tantangan terbesar yang berdampak kepada banyak sektor unggulan Indonesia termasuk komoditas hasil perkebunan dan pertanian. Perang dagang kembali menjadi alat tekanan geopolitik dan arus perdagangan global semakin terfragmentasi.

Kebijakan moneter di negara maju yang kerap berubah, adanya fluktuasi arus modal, serta konflik geopolitik turut memperbesar volatilitas pasar keuangan global. Situasi ini memberikan dampak negatif pada keyakinan para pelaku ekonomi dan investor di berbagai negara.

Kondisi ini juga mendorong para bank sentral cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan kecepatan dan waktu penurunan suku bunga. *The Federal Reserve* memangkas *Federal Funds Rate* (FFR) sebesar 25 bps pada pertemuan di Desember 2025 dan Bank of England (BoE) juga kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%, yang merupakan pemangkasan keempat sepanjang 2025.

Perbedaan tingkat dan waktu penurunan suku bunga kebijakan juga terjadi di *Emerging Market Economies* (EMEs) seperti China, India, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina. Di sisi lain, penurunan inflasi dunia berjalan lebih lambat dari perkiraan sebelumnya, dengan prakiraan inflasi mencapai 3,9% pada 2025. Pada periode yang sama, inflasi negara maju diperkirakan sekitar 2,4% pada 2025, sementara inflasi *emerging economies* sekitar 4,8%.

Global and National Macroeconomic Situation

Dear shareholders and stakeholders, as is generally the case with businesspeople, 2025 proved to be a challenging and dynamic year for businesses.

Globally, 2025 was marked by several challenges, although the overall outlook was positive, with a moderate economic recovery and global economic growth of 3.3%. Throughout 2025, global economic movements have been dynamic and uncertain.

Strengthening protectionism, particularly due to the United States' reciprocal tariff policy, has become one of the biggest challenges impacting many of Indonesia's leading sectors, including plantation and agricultural commodities. The trade war has once again become a tool of geopolitical pressure, and global trade flows have been increasingly fragmented.

Frequent changes in monetary policy in developed countries, fluctuating capital flows, and geopolitical conflicts have contributed to increased volatility in global financial markets. This situation has negatively impacted the confidence of economic players and investors in various countries.

This situation has also prompted central banks to be more cautious in determining the pace and timing of interest rate cuts. The Federal Reserve cut the Federal Funds Rate (FFR) by 25 bps at its December 2025 meeting, and the Bank of England (BoE) also cut its benchmark interest rate by another 25 basis points to 3.75%, marking the fourth cut in 2025.

Disparities in the level and timing of policy rate cuts also occurred across Emerging Market Economies (EMEs), including China, India, South Korea, Malaysia, and the Philippines. Meanwhile, global inflation has been declining more slowly than previously expected, and it was forecast to reach 3.9% in 2025. During the same period, inflation in developed economies in 2025 was forecast at around 2.4%, while inflation in emerging economies was forecast at around 4.8%.

Sebagian besar negara-negara anggota BRICS dalam periode Juli sampai September 2025 juga mempertahankan suku bunga acuannya seperti Brasil, India, China, dan Afrika Selatan. Di sisi lain, Rusia menerapkan kebijakan yang sedikit berbeda dengan menurunkan suku bunga acuan saat peralihan dari bulan Agustus sebesar 18,0% menjadi 17,0% pada bulan September 2025.

Most BRICS member countries, such as Brazil, India, China, and South Africa, maintained their benchmark interest rates from July to September 2025. Russia, on the other hand, implemented a slightly different policy, lowering its benchmark interest rate from 18.0% in August to 17.0% in September 2025.

Lebih lanjut, kebijakan tarif resiprokal AS telah menurunkan volume dan nilai perdagangan global serta semakin memperparah dampak gangguan rantai pasok dunia sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha.

Furthermore, the US's reciprocal tariff policy has reduced the volume and value of global trade and exacerbated the impact of supply chain disruptions, thereby affecting business continuity.

Dengan berbagai kondisi tersebut, World Bank sempat memperkirakan pertumbuhan ekonomi global kian melambat berkisar 3,0-3,3% pada 2025.

Given these conditions, the World Bank had predicted that global economic growth would slow further to 3.0%-3.3% in 2025.

Meski begitu, patut disyukuri bahwa di Indonesia, stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga dengan pertumbuhan sebesar 5,11% meskipun di bawah target APBN yaitu sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi sebesar itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan negara lain di ASEAN serta dibandingkan dengan para negara mitra dagang termasuk China, kecuali Vietnam yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 8%.

Nevertheless, it is commendable that Indonesia's national economic stability remains intact, with growth reaching 5.11%, although below the 5.2% target set by the State Budget (APBN). This economic growth places Indonesia among the highest-growing economies in ASEAN and among its trading partners, including China, except for Vietnam, which recorded 8% growth.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 23.821,1 triliun untuk PDB atas dasar harga berlaku di 2025. Adapun PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp13.580,5 triliun pada 2025. Seluruhnya mencerminkan aktivitas ekonomi kita masih berjalan stabil sepanjang tahun.

According to data from the Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) projection at current prices in 2025 was at Rp23,821.1 trillion. GDP at constant prices stood at Rp13,580.5 trillion in 2025. All of this reflects stable economic activity throughout the year.

Tinjauan Industri Sawit

Sektor pertanian menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap PDB nasional yaitu mencapai 13,10% pada 2025. Tertinggi pertama adalah sektor industri pengolahan sebesar 19,07% dan sektor perdagangan sebesar 13,17%. Di bawah sektor pertanian adalah kontribusi sektor konstruksi sebesar 9,83% dan sektor pertambangan sebesar 8,75%.

Jika dilihat lebih dalam, kontribusi sektor pertanian ini terjadi di saat sebagian besar harga komoditas pertanian melemah. Setidaknya sampai dengan triwulan III 2025. Rata-rata harga komoditas karet, misalnya, mencapai USD2,2 per kilogram,

Palm Oil Industry Review

The agricultural sector became one of the largest contributors to national GDP, reaching 13.10% in 2025. The manufacturing sector made the highest contribution at 19.07%, followed by the trade sector at 13.17%. Following closely behind were the construction sector at 9.83% and the mining sector at 8.75%.

A closer look reveals that this contribution to the agricultural sector came at a time when most agricultural commodity prices were weakening, at least until the third quarter of 2025. The average price of rubber, for example, reached

mengalami penurunan sebesar 8,6% dibandingkan dengan triwulan III tahun 2024.

Komoditas kedelai juga mengalami penurunan rata-rata harga sebesar 3,2% dibandingkan dengan rata-rata harga triwulan yang sama pada tahun sebelumnya menjadi sebesar USD407,0 per ton.

Meski begitu, rata-rata harga minyak kelapa sawit (CPO) pada triwulan III tahun 2025 tercatat sebesar USD1.013,1 per ton pada triwulan III 2025 atau menguat 8,1% jika dibandingkan dengan rata-rata harga triwulan yang sama pada tahun 2024. Salah satu faktor terbesar yang mendorong kenaikan harga ini adalah penurunan tak terduga stok minyak sawit Malaysia sebesar 18% karena menurunnya produksi.

Penurunan tersebut memicu para pihak berkepentingan untuk melakukan pembelian secara agresif di pasar untuk mengantisipasi stok. Selain produksi, peningkatan harga juga dipicu faktor cuaca yaitu La Nina yang membuat musim hujan berlangsung lebih lama di banyak wilayah penghasil utama termasuk di Indonesia seperti di Sumatera dan Kalimantan.

Bagi industri perkebunan kelapa sawit, La Nina berdampak langsung pada terhambatnya aktivitas panen, kendala logistik, serta potensi penurunan tingkat rendemen (*extraction rate*).

Di tengah fenomena La Nina, pada saat yang sama, permintaan internasional terhadap komoditas minyak kelapa sawit tetap tinggi terutama dari importir besar seperti India dan Pakistan. Dengan meningkatnya permintaan dan risiko pasokan terkait cuaca yang masih terasa, harga minyak kelapa sawit tetap kuat sampai dengan akhir 2025.

Di pasar domestik, sebagaimana catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) terjadi kenaikan atas total penggunaan CPO dalam negeri dengan peningkatan sebesar 3,82% dari 23,859 juta ton pada 2024 menjadi 24,772 juta ton pada sepanjang 2025. Peningkatan terbesar terjadi pada konsumsi biodiesel yang naik 10,97% menjadi 12,704 juta ton dibandingkan 11,447 juta ton pada tahun sebelumnya.

Kenaikan konsumsi biodiesel tersebut dipicu peningkatan bauran biodiesel dari 35% menjadi 40%. Sementara itu, konsumsi oleokimia juga meningkat dari 2,207 juta ton menjadi 2,234 juta ton atau naik sekitar 1,22%.

USD2.2 per kilogram, a 8.6% decrease from the third quarter of 2024.

Soybeans also experienced an average price decline of 3.2% compared to the same quarter the previous year, to USD407 per ton.

Despite this, the average price of Crude Palm Oil (CPO) in the third quarter of 2025 was USD1,013.1 per ton, an 8.1% increase from the same quarter in 2024. One of the biggest factors driving this price increase was the unexpected 18% decline in Malaysian palm oil stocks, driven by lower production.

This decline prompted stakeholders to purchase in the market aggressively to anticipate stock shortages. Besides production, the price increase was also driven by weather factors, such as La Niña, which lengthens the rainy season in many major producing regions, including Indonesia's Sumatra and Kalimantan.

In the palm oil plantation industry, La Niña directly led to delays in harvesting, logistical constraints, and the potential for reduced extraction rates.

Despite the La Niña phenomenon, international demand for palm oil remained high, particularly from major importers such as India and Pakistan. With increasing demand and lingering weather-related supply risks, palm oil prices stayed strong through the end of 2025.

In the domestic market, according to the Indonesian Palm Oil Producers Association (GAPKI), total domestic CPO consumption increased by 3.82%, from 23.859 million tons in 2024 to 24.772 million tons throughout 2025. The largest increase was in biodiesel consumption, which rose 10.97% to 12.704 million tons from 11.447 million tons in the previous year.

This increase in biodiesel consumption was driven by a higher biodiesel blend from 35% to 40%. Meanwhile, oleochemical consumption also increased from 2.207 million tons to 2.234 million tons, an increase of approximately 1.22%.

Kenaikan konsumsi tersebut diiringi dengan kenaikan jumlah produksi. Pada 2025, produksi CPO nasional mencapai 51,66 juta ton atau naik 7,26% dibandingkan 48,16 juta ton produksi tahun 2024. Begitu juga produksi minyak inti sawit atau *Palm Kernel Oil* (PKO) naik 6,41% menjadi 4,893 juta ton pada sepanjang 2025 dibandingkan 4,598 juta ton pada sepanjang 2024.

Maka sepanjang 2025 total produksi CPO dan PKO nasional mencapai 56,553 juta ton atau naik 7,18% dibandingkan 52,762 juta ton produksi CPO dan PKO pada sepanjang 2024.

Kebijakan Strategi Perseroan dalam Menghadapi Tantangan

Secara umum, tantangan industri minyak sawit nasional adalah aspek produktivitas di tengah meningkatnya permintaan nasional maupun global. Sementara pada saat yang sama, para pelaku di industri ini semakin dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kebijakan lingkungan yang semakin kompleks.

Pada 2025, rata-rata harga CPO dunia ada di level tinggi secara historis, mirip dengan tahun sebelumnya yang berkisar antara USD 1.050–USD 1.100 per ton (CIF Rotterdam). Level yang sama diperkirakan terjadi lagi pada 2026 meskipun akan tergantung faktor cuaca, kebijakan biofuel, dan perkembangan ekonomi global seiring memanasnya geopolitik.

Tantangan struktural terhadap sektor CPO yang terbilang serius, sebagaimana dibahas dalam forum resmi salah satunya melalui Indonesia *Palm Oil Conference (IPOC)* adalah:

- Regulasi keberlanjutan seperti *EU Deforestation Regulation (EUDR),*
- Fragmentasi tata kelola di dalam negeri dimana terdapat *overlap* kewenangan antara kementerian,
- Ketidakpastian legalitas lahan dan penertiban kebun sawit dalam kawasan hutan.

Menyikapi situasi tersebut, Perseroan memilih serangkaian kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha. Dijalankan melalui praktik bisnis dan tata kelola terbaik yang sejalan dengan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan (*sustainability*).

Higher production volumes accompanied this increase in consumption. In 2025, national CPO production reached 51.66 million tons, a 7.26% increase from 48.16 million tons in 2024. Similarly, Palm Kernel Oil (PKO) production rose by 6.41% to 4.893 million tons in 2025 from 4.598 million tons in 2024.

Thus, throughout 2025, total national CPO and PKO production reached 56.553 million tons, a 7.18% increase from 52.762 million tons in 2024

The Company's Strategic Policy in Facing Challenges

In general, productivity has become a challenge for the national palm oil industry amid increasing national and global demand. Meanwhile, industry players dealt with the demands of complying with increasingly complex environmental policies.

In 2025, the average global CPO price reached a historically high level, similar to the previous year, ranging between USD1,050 and USD1,100 per ton (CIF Rotterdam). Similar levels are expected to resurface in 2026, although this will depend on weather factors, biofuel policies, and global economic developments amid heightened geopolitical tensions.

The serious structural challenges facing the CPO sector, as discussed in official forums, including the Indonesia Palm Oil Conference (IPOC), include:

- Sustainability regulations such as the EU Deforestation Regulation (EUDR),
- Fragmentation of domestic governance, with overlapping authority between ministries,
- Uncertainty over land legality and the regulation of oil palm plantations within forest areas.

In response to this situation, the Company has implemented a series of strategic policies to increase competitiveness and business sustainability. This is implemented through best business practices and governance aligned with environmentally friendly, sustainable principles.

Melalui kebijakan tersebut, Perseroan tidak hanya mengandalkan pada produk eksisting yang bersumber dari perkebunan milik sendiri. MKTR mengembangkan skema kemitraan untuk mendapatkan pasokan dari perkebunan di lingkungan sekitar perusahaan serta mengembangkan produk ramah lingkungan yang diolah dari produk samping kelapa sawit dalam rangka penciptaan nilai tambah.

Through these policies, the Company does not solely rely on existing products sourced from its own plantations. MKTR has developed partnership schemes to source supplies from plantations surrounding the Company and to develop environmentally friendly products processed from palm oil by-products to create added value.

Langkah strategis ini tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada produk utama, tapi juga membuka peluang baru yang berkontribusi terhadap kinerja bisnis serta keuangan Perseroan. Termasuk juga menjadi langkah diferensiasi Perseroan di industri.

This strategic step not only helps reduce dependence on core products but also opens up new opportunities that contribute to the Company's business and financial performance. It also serves as a differentiation strategy for the Company in the industry.

Seluruh ekosistem di lingkungan Perseroan berkontribusi untuk mengimplementasikan strategi ini. Salah satunya dengan pengembangan bibit atau benih unggul yang bermanfaat bagi petani sekitar. Bersamaan dengan pendampingan, bibit unggul ini menjadi jembatan bagi Perseroan untuk membina hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan petani kelapa sawit di sekitar perusahaan sehingga hasil panen mereka turut meningkatkan produktivitas bagi Perseroan.

The entire Company ecosystem contributes to implementing this strategy. One example is the development of superior seeds that benefit local farmers. Along with mentoring, these superior seeds serve as a bridge for the Company to foster mutually beneficial partnerships with surrounding oil palm farmers, thereby increasing the Company's yields.

Melalui berbagai inisiasi inovatif, Perseroan memperkuat sistem pengelolaan produk samping. Menghasilkan produk ramah lingkungan yang diolah dari tandan kosong kelapa sawit menjadi pupuk organik padat berbentuk granule dimana Perseroan merupakan pionir dari hasil inovasi ini. Selain itu, Perseroan juga mengolah tandan kosong menjadi bahan bakar alternatif yaitu biomassa EFB Pellet.

Through various innovative initiatives, the Company is strengthening its by-product management system. It produces environmentally friendly products by processing empty fruit bunches into solid organic fertilizer in granular form, a product in which the Company is a pioneer. Furthermore, the Company is also processing empty fruit bunches into an alternative fuel, i.e., biomass EFB pellets.

Seluruh inovasi tersebut memperkuat inisiatif Perseroan sebelumnya yang kami sebut sebagai kemitraan bisnis baru berbasis *zero waste management system*. Perseroan tidak hanya menjalankannya sendiri tetapi juga membangun kolaborasi dengan perusahaan lain di industri sehingga bukan hanya menyelesaikan persoalan limbah para mitra tetapi juga secara bersama menciptakan nilai tambah yang kami yakini bukan hanya menguntungkan bagi Perusahaan tetapi juga menjadi solusi terhadap salah satu persoalan di industri.

All of these innovations strengthen the Company's previous initiatives, which we refer to as new business partnerships based on a zero-waste management system. The Company not only operates independently but also collaborates with other companies in the industry to address its partners' waste issues and collectively create added value, which we believe will benefit the Company and address a key industry issue.

Melalui implementasi yang baik dan dengan tetap mengedepankan prinsip *best practice agronomy* yang ramah lingkungan dan keberlanjutan, Perseroan optimistis strategi ini bukan sekadar menciptakan pertumbuhan bisnis namun juga menawarkan model baru di industri yang mengedepankan aspek ramah lingkungan.

By effectively implementing and prioritizing best-practice agronomic principles that are environmentally friendly and sustainable, the Company is optimistic that this strategy will not only drive business growth but also offer a new industry model that prioritizes environmental sustainability.

Peran Direksi Dalam Perumusan dan Implementasi Strategi

Direksi memegang peranan sentral dalam memastikan arah kebijakan strategis Perseroan selaras antara target jangka pendek dengan visi jangka panjang. Pada praktiknya, direksi berperan aktif melalui kewenangan dan perangkat yang ada di bawahnya melakukan pemantauan langsung atas implementasi strategi melalui sistem pelaporan rutin dari manajemen operasional.

Melalui pendekatan ini, direksi selalu mendapat informasi terkini mengenai perkembangan operasional sehingga memungkinkan untuk memberikan arahan secara cepat namun terukur. Pendekatan ini juga sekaligus menjadikan direksi dapat memahami kendala yang berpotensi menghambat kegiatan operasional.

Maka direksi tidak hanya menghadirkan solusi namun juga aspek mitigasi atas berbagai risiko yang dapat menghambat aspek teknis maupun risiko lain yang dapat menyebabkan tidak tercapainya objektif atas strategi yang ditetapkan. Mitigasi ini memungkinkan dijalankan melalui rapat rutin bulanan direksi serta laporan atas hasil pantauan langsung di lapangan.

Implementasi strategi dilakukan melalui pemantauan ketat secara periodik terhadap pencapaian target di setiap unit bisnis. Direksi secara aktif terlibat dalam peninjauan kebijakan manajemen risiko untuk merespons dinamika eksternal, seperti fluktuasi harga pupuk, perubahan regulasi perdangan termasuk ekspor, dan hal terkait lainnya.

Realisasi Kinerja Dibandingkan Target

Pada tahun buku 2025, Perseroan menetapkan target dengan memertimbangkan berbagai aspek mulai dari kondisi internal perusahaan, situasi di dalam negeri, juga potensi atas dampak dinamika global. Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan:

Board of Directors' Role in Strategy Formulation and Implementation

The Board of Directors plays a central role in ensuring the Company's strategic policy direction aligns short-term targets with its long-term vision. In practice, the Board of Directors actively monitors strategy implementation through its authority and its subordinate apparatus, using a routine reporting system from operational management.

This approach ensures that the Board of Directors remains informed about operational developments, enabling them to provide timely yet measurable direction. This approach also enables the Board of Directors to understand potential obstacles that could hinder operational activities.

Therefore, the Board of Directors not only presents solutions but also mitigates various risks that could hinder technical aspects and prevent the achievement of established strategic objectives. This mitigation is implemented through regular monthly Board of Directors meetings and reports on the results of direct field monitoring.

Strategy implementation is carried out through periodic, close monitoring of target achievement in each business unit. The Board of Directors is actively involved in reviewing risk management policies to respond to external dynamics, such as fluctuations in fertilizer prices, changes in trade regulations, including exports, and other related matters.

Performance Realization Compared to Target

For the 2025 fiscal year, the Company set targets by considering various factors, including internal conditions, the domestic situation, and potential impacts from global dynamics. The following is a comparison of actual performance against established targets:

Indikator Kinerja Performance Indicators	Target 2025	Realisasi 2025 Actualization 2025	% Capaian % Achievement
Pendapatan (Rp Miliar) Revenue (Rp Billion)	1.441.850.090	1.246.050.864	86,42%
Laba Bersih (Rp Miliar) Net Income (Rp Billion)	179.335.774	55.093.257	30,72%
Produksi Inti Kelapa Sawit (Ton) Production of Palm Kernel (Tons)	16.916	15.622	92,35%
Produksi CPO (Ton) Production of CPO (Tons)	82.877	76.680	92,52%

Secara umum, realisasi kinerja keuangan dan operasional Perseroan berlangsung positif pada sepanjang 2025 didukung stabilitas perekonomian nasional dan kenaikan harga rata-rata CPO. Selain itu, Perseroan merasakan dampak positif penerapan *zero waste management system* di dalam ekosistem perusahaan serta praktik kemitraan yang baik dengan petani sekitar dan hubungan positif dengan lingkungan sehingga kinerja tetap positif meskipun menghadapi tantangan cuaca yaitu La Nina.

Overall, the Company's financial and operational performance remained positive throughout 2025, supported by national economic stability and rising average CPO prices. Furthermore, the Company experienced the positive impact of implementing a zero-waste management system within its ecosystem, as well as healthy partnership practices with local farmers and a positive relationship with the environment, which contributed to its positive, strong performance despite the weather challenges posed by La Niña.

Prospek Usaha

Meskipun terdapat sejumlah tantangan struktural yang serius, Perseroan mengapresiasi berbagai upaya dan kebijakan yang telah dijalankan pemerintah dalam rangka melindungi industri kelapa sawit sebagai bagian dari industri strategis nasional.

Pada 2026, data GAPKI mencatat produksi CPO akan tumbuh sekitar 4%-5% terutama ditopang perbaikan produktivitas dan maturase tanaman. Adapun dari sisi harga, secara rata-rata diproyeksi masih akan mirip dengan 2025 di kisaran USD 1.050–USD 1.150 per ton dengan tetap memertimbangkan realisasi cuaca, kebijakan biofuel, dan perkembangan ekonomi global.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan tumbuhnya pendapatan di sejumlah negara berkembang, permintaan minyak nabati, terutama sawit, akan terus meningkat. Meski begitu, situasi ini juga dibarengi dengan berbagai upaya dan rencana di banyak negara yang ingin menciptakan kemandirian minyak nabati masing-masing.

Business Prospects

Despite several serious structural challenges, the Company appreciates the various efforts and policies implemented by the government to protect the palm oil industry as part of the national strategic industry.

In 2026, GAPKI data indicate that CPO production will grow by around 4%-5%, primarily driven by productivity improvements and plant maturation. In terms of price, the average price is projected to remain similar to 2025, at around USD1,050-USD1,150 per ton, taking into account weather conditions, biofuel policies, and global economic developments.

Along with population growth and rising incomes in several developing countries, demand for vegetable oils, particularly palm oil, will continue to increase. However, this situation is also accompanied by various efforts and plans in many countries to achieve self-sufficiency in their respective vegetable oil production.

Di India, misalnya, melalui program *National Mission on Edible Oils–Oil Palm* (NMEO-OP) merancang kebijakan pemberian subsidi dan jaminan harga untuk memperluas area sawit domestik. Pada saat yang sama negara tersebut mengatur tarif impor secara aktif.

Begitu juga Amerika Serikat yang mengacu pada narasi '*America First*' berupaya memperbesar penggunaan *soybean oil* untuk biodiesel dan *renewable diesel*. Situasi ini bisa berdampak pada struktur harga minyak nabati global.

Meski begitu, optimisme juga hadir dari pasar domestik. Salah satunya melalui kebijakan biodiesel yang baurannya akan terus ditingkatkan. Selain itu, kebijakan energi terbarukan akan memperluas penggunaan minyak nabati sebagai bahan baku *biofuel*.

Menimbang situasi tersebut dan dikaitkan dengan perkembangan perusahaan, Perseroan pada tahun 2026 menargetkan pertumbuhan produksi CPO sebesar 82.877 ton, dibandingkan tahun 2025 sebesar 76.680 ton.

Perseroan memproyeksikan pertumbuhan penjualan sebesar Rp1.441,85 triliun dengan laba bruto sebesar Rp322,60 miliar.

Implementasi Tata Kelola (GCG)

Perseroan meyakini bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) bersifat fundamental serta merupakan fondasi utama keberlanjutan bisnis. Selama tahun 2025, Direksi memastikan seluruh lini organisasi patuh terhadap prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran.

Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan tidak hanya memastikan pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik tetapi juga membangun kepercayaan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan telah memperkuat sistem pengendalian internal, menjalankan audit kepatuhan secara rutin, serta memastikan kebijakan *Whistleblowing System* berjalan efektif.

In India, for example, the National Mission on Edible Oils – Oil Palm (NMEO-OP) program has designed a policy of providing subsidies and price guarantees to expand domestic palm oil production. At the same time, the country is actively regulating import tariffs.

Similarly, the United States, embracing the "America First" narrative, is seeking to increase the use of soybean oil for biodiesel and renewable diesel. This situation could impact the global vegetable oil price structure.

However, optimism is also emerging in the domestic market. One example is the biodiesel policy, which will continue to be refined. Furthermore, the renewable energy policy will expand the use of vegetable oil as a biofuel feedstock.

Considering this situation and in relation to the Company's development, the Company is targeting CPO production growth of 82.877 tons in 2026, compared to 76.680 tons in 2025.

The Company projects sales growth of Rp1,441.85 billion, with operating profit of Rp322.60 billion.

Implementation of Good Corporate Governance (GCG)

The Company believes that good corporate governance (GCG) is fundamental and the main foundation of business sustainability. Throughout 2025, the Board of Directors ensured that all levels of the organization adhered to the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.

The implemented GCG principles not only ensure healthy company management but also build trust with all stakeholders. The Company has strengthened its internal control system, conducted regular compliance audits, and ensured the effective implementation of its Whistleblowing System.

Implementasi GCG di tahun 2025 juga didukung aspek digitalisasi termasuk pelaporan produksi, operasional, dan keuangan guna meningkatkan akurasi data dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Perseroan juga senantiasa menjalankan edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap seluruh unsur dan organ perusahaan tentang pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan telah menyelenggarakan pelatihan berkala serta program seminar, webinar, serta sosialisasi anti-korupsi dan anti-penyuapan.

Pelatihan dijalankan dengan tingkat partisipasi yang tinggi dari karyawan dalam membentuk budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan profesional di seluruh lini organisasi.

Sejalan dengan itu, sistem dalam perusahaan secara konsisten melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang terus menerus terhadap kinerja organ tata kelola agar setiap organ menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif.

Penerapan prinsip tata kelola yang baik ini dijalankan Perseroan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui peraturan OJK terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik.

Komposisi Direksi

Guna menjalankan fungsi eksekutif secara efektif, formasi Direksi Perseroan pada tahun 2025 terdiri dari individu-individu yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Komposisi dan pembagian peran Direksi adalah sebagai berikut:

The implementation of GCG in 2025 was also supported by digitalization across production, operations, and financial reporting to improve data accuracy and accelerate decision-making.

The Company also continuously provides education to enhance understanding among all elements and organs of the Company regarding the importance of implementing good corporate governance. The Company has held regular training programs, seminars, webinars, and anti-corruption and anti-bribery outreach programs.

This training is conducted with high employee participation, fostering a culture of integrity, transparency, and professionalism across all levels of the organization.

In line with this, the Company's systems consistently monitor, control, and evaluate the performance of its governance organs to ensure each organ effectively carries out its duties and responsibilities.

The Company implements these good governance principles in accordance with regulations established by the Indonesian Government through the Financial Services Authority (OJK) regarding good corporate governance.

Board of Directors Composition

To effectively carry out executive functions, the Company's Board of Directors in 2025 comprised individuals with competencies in their respective fields. The composition and division of roles of the Board of Directors are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Harry M. Nadir	Direktur Utama President Director	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 31 Maret 2021. Extraordinary GMS Resolution dated March 31, 2021.
Wawan Sulistyawan	Direktur Director	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 31 Maret 2021. Extraordinary GMS Resolution dated March 31, 2021
Bambang Laksanawan	Direktur Director	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 31 Maret 2021. Extraordinary GMS Resolution dated March 31, 2021
M. Arief Pahlevi Pangerang	Direktur Director	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 5 Agustus 2022. Extraordinary GMS Resolution dated August 5, 2022.

Penutup

Atas nama Direksi, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas kerjasama dan pendampingan yang berjalan positif serta saling menguatkan pada sepanjang 2025. Kepada seluruh karyawan atas dedikasi luar biasa dalam menghadapi tantangan di tahun 2025.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemegang saham dan mitra kerja atas kepercayaan yang terus diberikan. Mari kita terus bersinergi demi pertumbuhan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) yang lebih gemilang dan memberikan manfaat yang semakin luas kepada seluruh pemangku kepentingan, masyarakat, dan industri.

Direksi juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh pemegang saham serta pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami sehingga dapat melewati tahun 2025 dengan pencapaian sebagaimana telah kami jelaskan.

Kami terus bertekad melakukan berbagai insiatif serta inovasi agar Perseroan dapat terus menciptakan nilai tambah serta manfaat yang lebih luas bukan hanya bagi pertumbuhan bisnis perusahaan tetapi juga lingkungan sekitar dan industri. Inovasi yang sejalan dengan semangat serta prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan.

Closing

On behalf of the Board of Directors, we would like to thank the Board of Commissioners for their positive and mutually reinforcing cooperation and guidance throughout 2025. We would also like to thank all our employees for their incredible dedication in facing the challenges of 2025.

We also extend our gratitude to our shareholders and business partners for their continued trust. Let us continue to work together to achieve even greater growth for PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) and to provide broader benefits to all stakeholders, the community, and the industry.

The Board of Directors also expresses its appreciation to all shareholders and stakeholders for their support and trust, which have enabled us to reach 2025 with the achievements we have outlined.

We remain committed to implementing various initiatives and innovations to enable the Company to continue creating added value and broader benefits not only for the Company's business growth but also for the surrounding environment and industry. This innovation aligns with the spirit and principles of environmental friendliness and sustainability.

Jakarta, April 2026
Atas Nama Direksi
On Behalf of Board of Directors
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk



Harry M Nadir
Direktur Utama
President Director

Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2025

Statement Letter of Responsibility for Annual Report 2025

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Menthobi Karyatama Raya Tbk.

Statement Letter of the Board of Commissioners and Board of Directors regarding the Responsibility for the 2025 Annual Report of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran seluruh isi Laporan Tahunan Perseroan.

We, the undersigned, declare that all information in PT Menthobi Karyatama Raya Tbk's 2025 annual report has been presented in its entirety, and we are fully responsible for the accuracy of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Hereby, this statement is made truthfully.

Jakarta, April 2026

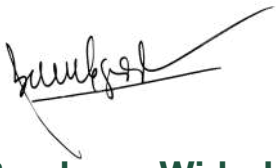
Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Komisaris Utama
President Commissioner



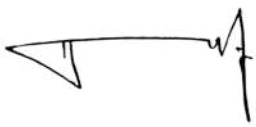
Muhammad Rocky Masyhur

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Bambang Widodo

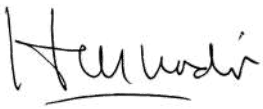
Komisaris
Commissioner



M. Khairnadhif Kasyfillah

Direksi
Board of Directors

Direktur Utama
President Director



Harry M. Nadir

Direktur
Director



Wawan Sulistyawan

Direktur
Director



Bambang Laksanawan

Direktur
Director



M. Arief Pahlevi Pangerang

3

Profil Perusahaan

Company Profile



Identitas Perusahaan
Corporate Identity

Riwayat Singkat Perseroan
Corporate History

Jejak Langkah Perusahaan
Milestones

Makna dan Logo Perusahaan
Corporate Logo Meaning

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
Corporate Vision, Mission and Culture

Bidang Usaha
Line of Business

Produk dan Layanan Perusahaan
Company Products and Services

Wilayah Operasional
Operational Areas

Struktur Organisasi
Organizational Structure

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Changes to The Composition of The Board of Commissioners and Board of Director

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioner's Profile

Profil Direksi
Board of Director's Profile

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer Profiles

Informasi Pemegang Saham
Shareholder Information

Kronologi Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia
Stock and Other Securities Listing Chronology

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Listing

Struktur Grup Perseroan
Corporate Group Structure

Alamat Kantor dan Entitas Anak
Office Address and Subsidiaries

Keanggotaan Asosiasi
Association Membership

Lembaga dan Profesional Penunjang Perusahaan
Company's Supportng Professions and Institutions

Informasi pada Jumlah Karyawan
Information about Number of Employees

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
Training and Competency Development

Informasi pada *Website* Perusahaan
Information on The Company's Website



Identitas Perusahaan

Corporate Identity

Nama Perusahaan
Company Name

PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk.

Status Perusahaan
Legal Status

Perseroan Terbatas/Perusahaan Publik.
Limited Liability Company/Public Company.

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-044658.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0125930. AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017.

Decree of The Minister of Law and Human Rights No. AHU-044658.AH.01.01.Year 2017 dated October 10, 2017, and registered in the Company's Register No. AHU -0125930. AH.01.11. Year 2017 dated October 10, 2017.

Informasi Perubahan Nama
Name Change

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Accinvest Bangun Lestari, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01 tanggal 4 Oktober 2017. Efektif tanggal 31 Desember 2020, nama Perseroan berubah menjadi PT Menthobi Karyatama Raya.

Minister of Law and Human Rights Decree No. AHU-044658. AH.01.01. Year 2017 dated October 10, 2017, and registered in the Company's Register No. AHU -0125930.AH.01.11. Year 2017 dated October 10, 2017.

Produk dan Jasa Layanan
Products and Services

- Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*/CPO)
- Inti Sawit (*Palm Kernel*/PK)
- Minyak Inti Sawit (*Palm Kernel Oil*/PKO)
- Pupuk Organik

- Crude Palm Oil (CPO);
- Palm Kernel (PK);
- Palm Kernel Oil (PKO); and
- Organic Fertilizer.

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp 380.000.000.000.-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid-Up Capital

Rp 120.064.285.840.-

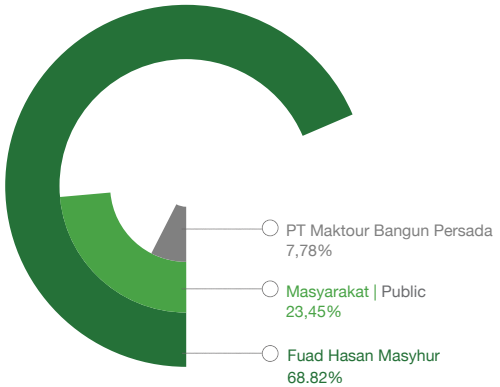
Total Aset
Total Assets

Rp1.539.364.251 per 31 Desember 2025.
Rp1,539,364,251 as of December 31, 2025.



Kepemilikan Saham
Shareholder

Fuad Hasan Masyhur	:	68,62% atau 8.276.210.000 lembar saham; 68.62% or 8,276,210,000 shares;
PT Maktour Bangun Persada	:	7,78% atau 938.790.000 lembar saham; 7.78% or 938,790,000 shares;
Muhammad Rocky Masyhur	:	0,01% atau 1.187.354 lembar saham; 0.01% or 1,187,354 shares;
Harry M. Nadir	:	0,05% atau 6.535.948 lembar saham; 0.05% or 6,535,948 shares;
Wawan Sulistyawan	:	0,03% atau 4.159.239 lembar saham; 0.03% or 4,159,239 shares;
Bambang Laksanawan	:	0,03% atau 4.059.239 lembar saham; 0.03% or 4,059,239 shares;
M. Arief Pahlevi Pangerang	:	0,03% atau 4.159.239 lembar saham; 0.03% or 4,159,239 shares;
Masyarakat (Public)	:	23,45% atau 2.825.327.565 lembar saham. 23.45% or 2,825,327,565 shares.



Bursa Efek
Stock Exchange

Saham PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dicatat dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia.

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk shares are listed and traded on the Indonesia Stock Exchange.

Kode Saham
Ticker

MKTR

Tanggal Pencatatan saham
Stock Listing Date

8 November 2022
November 8, 2022

Jaringan Usaha*
Business Network*

1. DKI Jakarta
2. Kalimantan Tengah
3. Sumatera Selatan

*disajikan selengkapnya pada bab Profil Perusahaan di bagian Wilayah Operasional dalam Laporan Tahunan ini.

1. DKI Jakarta
2. Central Kalimantan
3. South Sumatra

*presented in full in the Company Profile in the Operational Area section of this Annual Report.

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Wisma Maktour Lt. 4
Jalan Otista Raya No. 80
Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Kode Pos: 13330



Entitas Anak
Subsidiaries

1. PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)
2. PT Menthobi Agro Raya (MAR)
3. PT Menthobi Hijau Lestari (MHL)
4. PT Menthobi Transtitian Raya (MTR)
5. PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya (KSO)

Website

www.mktr.co.id

Telepon
Telephone

021-50201035

Kontak Perusahaan
Corporate Contact

Sekretaris Perusahaan :
Corporate Secretary
Ilhamd Fithriansyah
Head of Corporate Secretary
Email: ilhamd@mmal.co.id

Hubungan Investor:
Investor Relations
Anindito W. Wicaksono
Head of Corporate Communication
Email: anindito@mmal.co.id

Facebook

PT Menthobi Karyatama Raya. Tbk

Instagram

@mktr.id

YouTube

@mktr

Linkedin

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk

Jumlah Sumber Daya Manusia
Number of Human Resources

Tahun 2025 : 1.353 orang (termasuk karyawan Entitas Anak)
In 2025: 1.353 people (including employees in Subsidiaries)



Riwayat Singkat Perseroan

Corporate History

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan" maupun "MKTR") mengawali rekam jejaknya dengan nama PT Accinvest Bangun Lestari, sebuah entitas yang berfokus pada industri perkebunan kelapa sawit. Perseroan didirikan pada tanggal 4 Oktober 2017 berdasarkan Akta Pendirian No. 1 yang dibuat di hadapan Notaris Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn. Pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0044658.AH.01.01. Tahun 2017, serta tercatat dalam Daftar Perseroan dengan nomor AHU-0125930.AH.01.11. Tahun 2017 tertanggal 10 Oktober 2017.

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (hereinafter referred to as the "Company" or "MKTR") began its operations under the name PT Accinvest Bangun Lestari, an entity focused on the palm oil plantation industry. The Company was established on October 4, 2017, based on Deed of Establishment No. 1 made before Notary Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn. The Minister of Law and Human Rights approved the corporate establishment through Decree No. AHU-0044658.AH.01.01. Year 2017, and is registered in the Company Register with number AHU-0125930.AH.01.11. Year 2017 dated October 10, 2017.

Pada 31 Desember 2020, Perseroan secara resmi berganti nama menjadi PT Menthobi Karyatama Raya disebabkan adanya perubahan kepemilikan saham setelah diakuisisi oleh PT Maktour Bangun Persada. Perubahan identitas ini disahkan melalui Akta No. 36 di hadapan Notaris Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn., dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0005547.AH.01.02. Tahun 2021.

On December 31, 2020, the Company officially changed its name to PT Menthobi Karyatama Raya due to a change in share ownership following its acquisition by PT Maktour Bangun Persada. This identity change was legalized through Deed No. 36 before Notary Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn., and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights through Decree No. AHU-0005547.AH.01.02. Year 2021.

Tahun 2022 menandai langkah korporasi signifikan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) di Bursa Efek Indonesia. Perseroan melakukan penawaran sebanyak 2.500.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10 per saham guna memperkuat permodalan jangka panjang. Momentum ini mengubah status hukum Perseroan menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk.

The year 2022 marked a significant corporate milestone with the implementation of an Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange. The Company offered 2,500,000,000 shares with a par value of Rp10 per share to strengthen its long-term capital base. This momentum changed the Company's legal status to that of a public company, with its official name PT Menthobi Karyatama Raya Tbk.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kinerja usaha jangka panjang, Perseroan secara rutin menjalankan program *replanting* di seluruh kebun MKTR untuk peremajaan tanaman serta peningkatan hasil produksi buah kelapa sawit pada masa mendatang. Saat ini, Perseroan memiliki total area perkebunan seluas ± 8.500 hektare yang terletak di wilayah Kalimantan Tengah. Hingga akhir tahun buku 2025, Perseroan mengelola cadangan lahan produktif seluas 1.807,94 hektare dengan standar agrikultur mutakhir demi produktivitas optimal. Selaras dengan regulasi Pemerintah Indonesia, Perseroan mengalokasikan sebagian lahan tersebut untuk program kemitraan petani plasma. Inisiatif ini bertujuan mengakselerasi ekonomi masyarakat lokal sekaligus menciptakan harmoni antara pertumbuhan korporasi dan kesejahteraan petani swadaya.

To maintain long-term business sustainability and performance, the Company routinely carried out replanting programs across all MKTR plantations to rejuvenate plants and increase future palm oil production. Currently, the Company has approximately 8,500 hectares of plantation area in Central Kalimantan. By the end of the 2025 financial year, the Company managed a productive land reserve of 1,807.94 hectares in accordance with the latest agricultural standards to achieve optimal productivity. In line with Indonesian Government regulations, the Company allocated a portion of this land for a plasma farmer partnership program. This initiative aimed to accelerate the local community economy while creating harmony between corporate growth and the welfare of independent farmers.

Sejalan dengan visi Perusahaan untuk menjadi Perseroan yang menghasilkan produk perkebunan terbaik melalui penerapan praktik agronomi terbaik (*Best Practice Agronomy*) yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, Perseroan memperkuat komitmen dengan menerapkan prinsip *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Manufacturing Practices* (GMP) yang didukung oleh tata kelola berkelanjutan (*Sustainable Governance*) dalam seluruh proses bisnis, mencakup kegiatan penanaman, pengolahan, dan distribusi.

In line with the Company's vision to become a Company that produces the best plantation products through the implementation of sustainable and environmentally friendly Best Practice Agronomy, the Company strengthens its commitment by implementing the principles of Good Agricultural Practices (GAP) and Good Manufacturing Practices (GMP) supported by sustainable governance in all business processes, including planting, processing, and distribution activities.

Melalui inovasi produk seperti pupuk organik dan biomassa dari limbah sawit, MKTR menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Dengan mengedepankan inovasi produk secara holistik, Perseroan berupaya menjaga keseimbangan antara profitabilitas, perlindungan ekosistem, dan kemajuan industri kelapa sawit nasional, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan bagi kemaslahatan masyarakat.

Selain itu, bentuk komitmen MKTR terhadap tata kelola perusahaan yang baik tercermin dari keberhasilan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk meraih penghargaan *Annual Report Award* (ARA) 2024 untuk kategori Perusahaan *Non*-BUMN/BUMD. Prestasi ini memvalidasi kualitas penerapan GCG Perseroan yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan standar terbaik dalam menyajikan strategi serta manajemen risiko kepada pemangku kepentingan.

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di MKTR juga diintegrasikan secara langsung dengan prinsip ESG (*Environmental*, *Social*, *and Governance*) melalui fokus pada ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah. Perseroan memastikan nilai-nilai integritas terinternalisasi dalam operasional bisnis untuk menjaga keseimbangan antara performa kinerja bisnis dengan keberlanjutan dampak sosial dan lingkungan secara konsisten. Dalam hal ini, Perseroan senantiasa menumbuhkan Nilai Hijau untuk Generasi Mendatang.

Through product innovations such as organic fertilizer and biomass from palm oil waste, MKTR creates sustainable added value for the company, the environment, and the surrounding community. By prioritizing holistic product innovation, the Company strives to maintain a balance between profitability, ecosystem protection, and the advancement of the national palm oil industry, while prioritizing the principle of sustainability for the benefit of society.

Furthermore, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk's commitment to good corporate governance is reflected in its achievement of the 2024 Annual Report Award (ARA) in the Non-State-Owned Enterprise/Regional-Owned Enterprise category. This achievement validates the quality of the Company's GCG implementation, which upholds transparency, accountability, and adherence to the highest standards in presenting strategies and risk management to stakeholders.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) at MKTR is also closely aligned with ESG (Environmental, Social, and Governance) principles, with a focus on the circular economy and waste management. The company ensures that integrity values are internalized in its business operations, consistently maintaining a balance between business performance and the sustainability of social and environmental impacts. In this regard, the Company continuously cultivates Green Values for Future Generations.

Keterangan Perubahan Nama
Name Change

PT Accinvest Bangun Lestari — 2017

PT Menthobi Karyatama Raya — 2020

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk — 2022

Perubahan Nama Name Change	Dasar Hukum Legal Basis
PT Accinvest Bangun Lestari	• Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 4 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Andhika Mayrizal Amir, SH., M.Kn., Notaris di Tangerang. • Telah memperoleh pengesahan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0044658.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017. • Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 1 dated October 4, 2017, made before Andhika Mayrizal Amir, SH., M.Kn., a Notary in Tangerang. • Approved through the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0044658.AH.01.01. Year 2017 dated October 10, 2017.
PT Menthobi Karyatama Raya	• Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tanggal 31 Desember 2020, dibuat di hadapan Notaris Andhika Mayrizal Amir, SH., M.Kn., Notaris di Tangerang. • Telah memperoleh pengesahan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0005547.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021. • Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 36 dated December 31, 2020, made before Andhika Mayrizal Amir, SH., M.Kn., a Notary in Tangerang. • Approved through the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0005547.AH.01.02. Year 2021 dated January 28, 2021.
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk	• Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 01 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. • Telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0055471.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 5 Agustus 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 063 tanggal 09 Agustus 2022, Tambahan Berita Negara RI No. 026372. • Deed of Statement of Shareholders Decree No. 01 dated August 5, 2022, made before Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., a Notary in Jakarta. • Approved through the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0055471.AH.01.02. Year 2022 dated August 5, 2022, and was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 063, dated August 9, 2022, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 026372.

Jejak Langkah Perseroan

Milestones

2005

PT Menthobi Makmur Lestari, yang merupakan entitas anak dari Perseroan, resmi didirikan pada tanggal 30 Juli 2005 di Provinsi Kalimantan Tengah.

PT Menthobi Makmur Lestari, which is a subsidiary of the Company, was officially established on July 30, 2005, in Central Kalimantan Province.

2007

Entitas Anak telah **merealisasikan penanaman perdana** kelapa sawit pada area seluas ± 947,47 Ha sebagai bagian dari pengembangan unit bisnis baru.

The subsidiary **has completed the initial planting** of oil palms on an area of approximately 947.47 Ha as part of the development of a new business unit.

2011

Pertama kali, melakukan realisasi **produksi komersial** dari seluruh area penanaman kelapa sawit telah dilakukan.

The first realization of **commercial production** from the entire oil palm planting area.

2022

Perseroan melaksanakan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten **MKTR**.

The Company carried out its initial public offering on the Indonesia Stock Exchange under the ticker **MKTR**.

2023

- **Operasional Entitas Anak:** PT Menthobi Hijau Lestari (MHL) telah memulai operasional pabrik pengolahan limbah sawit (padat dan cair) menjadi pupuk organik serta pupuk hayati dengan kapasitas produksi 3–5 ton per jam.
- **Inisiatif Industri Hijau:** Sebagai wujud komitmen green industry, MHL mengimplementasikan prinsip ekonomi sirkular dengan mengolah limbah hasil produksi kelapa sawit menjadi pupuk berkualitas.
- **Ekspansi Strategis:** Perseroan resmi mengakuisisi PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya (KSO) berdasarkan Akta No. 11 tanggal 28 Agustus 2023 guna mengintegrasikan area lahan sawit yang berbatasan langsung dengan wilayah MKTR. Akusisi tersebut menandai langkah awal ekspansi strategis perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya.

- **Subsidiary Operations:** PT Menthobi Hijau Lestari (MHL) commenced operations of a palm oil waste processing plant (solid and liquid) to produce organic fertilizer and biofertilizer, with a production capacity of 3–5 tons per hour.
- **Green Industry Initiative:** As part of its commitment to green industry, MHL implemented circular-economy principles by processing palm oil waste into high-quality fertilizer.
- **Strategic Expansion:** The Company officially acquired PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya (KSO) based on Deed No. 11 dated August 28, 2023, to integrate the palm oil plantation area directly adjacent to the MKTR area. This acquisition marked the first step in the company's strategic expansion in running its business operations.

2024

Melalui Entitas Anak (PT Menthobi Hijau Lestari), Perseroan secara resmi mengolah pabrik pupuk kompos granul yang berkapasitas 40 ton per hari di Palembang pada tanggal 1 Oktober 2024. Pembangunan proyek ini merupakan hasil kolaborasi strategis dengan PT Berlian Inti Mekar (BIM), bagian dari PT Mahkota Group Tbk.

Through its Subsidiary (PT Menthobi Hijau Lestari), the Company officially commenced operations of a 40-ton-per-day granular compost fertilizer plant in Palembang on October 1, 2024. The construction of this project was the result of a strategic collaboration with PT Berlian Inti Mekar (BIM), a part of PT Mahkota Group Tbk.

2016

- **Perubahan Struktur Kepemilikan:** terjadi pengalihan kepemilikan saham pada Entitas Anak (PT Menthobi Makmur Lestari), kepada Bapak Fuad Hasan Masyhur dan PT Maktour Bangun Persada. Perubahan ini diresmikan melalui Akta Berita Acara No. 44 tanggal 09 November 2016 di hadapan Notaris Humberg Lie, SH., MKn., di Jakarta.
- **Integrasi Grup:** Pasca akuisisi, PT Menthobi Makmur Lestari resmi bergabung dengan Maktour Group, yang merupakan grup perusahaan penyelenggara haji dan umrah terkemuka di Indonesia.

- **Change in Ownership Structure:** There was a transfer of share ownership in the Subsidiary Entity (PT Menthobi Makmur Lestari) to Mr. Fuad Hasan Masyhur and PT Maktour Bangun Persada. This change was formalized through Deed of Minutes No. 44 dated November 9, 2016, before Notary Humberg Lie, SH., MKn., in Jakarta.
- **Group Integration:** Following its acquisition, PT Menthobi Makmur Lestari officially joined Maktour Group, a leading Hajj and Umrah organizer in Indonesia.

2017

- Perseroan pertama kali didirikan dengan nama awal PT Accinvest Bangun Lestari melalui pengesahan Akta Pendirian No. 01 pada 4 Oktober 2017.
- Dalam perkembangannya, Entitas Anak (PT Menthobi Makmur Lestari), berhasil mendorong pertumbuhan hasil panen melalui peningkatan produktivitas perkebunan sawit yakni dengan kenaikan hingga mencapai sebesar *yield* 21,5 ton/Ha/tahun.

- The Company was initially established as PT Accinvest Bangun Lestari under Notarial Deed No. 1 dated October 4, 2017.
- The Subsidiary (PT Menthobi Makmur Lestari) has successfully increased yields by improving the productivity of its oil palm plantations, achieving a yield of 21.5 tons/Ha/year.

2018

- **Ekspansi Area Tanam:** Luas perkebunan kelapa sawit meningkat menjadi 8.000 Ha, dengan adanya penambahan area sebesar 1.276,8 Ha melalui Izin Lokasi Tambahan.
- **Dampak Produktivitas:** Penambahan luas lahan tersebut berkontribusi pada pencapaian produktivitas yang optimal sebesar *yield* 24,5 ton/Ha/tahun.

- **Planting Area Expansion:** The area of oil palm plantations increased to 8,000 Ha, with an additional area of 1,276.8 Ha through Additional Location Permits.
- **Productivity Impact:** The increase in land area helped achieve an optimal productivity of 24.5 tons/Ha/year.

2021

Sistem CMC pada pabrik yang dimiliki Perseroan, terbukti efektif meningkatkan produksi minyak inti kelapa sawit. Hal ini tercermin dari capaian *Oil Extraction Rate* (OER) sebesar 23% dan tingkat utilitas yang melampaui target, yakni sebesar 107%.

The CMC system at the Company's mills has proven effective in increasing palm kernel oil production. It was reflected in the Oil Extraction Rate (OER) of 23% and a utilization rate exceeding the target of 107%.

2020

- **Transformasi Identitas:** Perseroan resmi berganti nama menjadi PT Menthobi Karyatama Raya pada tanggal 31 Desember 2020.
- **Inovasi Produksi:** Meresmikan Pabrik Kelapa Sawit sistem CMC sehingga kapasitas produktivitas mampu mencapai kapasitas sebesar 30 ton/jam (dapat ditingkatkan menjadi 45 ton/jam).

- **Identity Transformation:** The Company officially changed its name to PT Menthobi Karyatama Raya on December 31, 2020.Permits.
- **Production Innovation:** Inauguration of the palm oil mill CMC system that enables productivity capacity to reach 30 tons/hour (can be increased to 45 tons/hour).

2019

Implementasi Sistem *Compact Modular Continuous* (CMC) pada Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit.

Compact Modular Continuous (CMC) System Implementation in the Palm Oil Mill Construction.

2025

- Dalam upaya optimalisasi aset, fasilitas *Kernel Crushing Plant* (KCP) mulai beroperasi secara penuh di tahun 2025. Fasilitas KCP akan memeroses inti sawit menjadi minyak inti sawit memiliki nilai jual tinggi. Proses produksi akan berjalan 24 jam dalam sehari, dan ditarget mampu menghasilkan 7.400 ton *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO).
- Dalam upaya mengoptimalisasi sumber pendapatan, Perseroan melakukan komersialisasi pupuk organik dengan merek *GreenGrow* yang telah memperoleh sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

- In an effort to optimize assets, the Kernel Crushing Plant (KCP) facility began operating in 2025. The KCP facility processes palm kernels into high-value palm kernel oil. Production runs 24 hours a day, targeting 7,400 tons of Crude Palm Kernel Oil (CPKO).
- In an effort to optimize revenue sources, the Company commercialized organic fertilizer under the GreenGrow brand, which has obtained Domestic Component Level (TKDN) certification.

Makna dan Logo Perseroan

Corporate Logo Meaning



- **Hijau**
  Keseimbangan dan Harmoni: **Hijau** berada di tengah spektrum warna, melambangkan titik keseimbangan antara kehangatan (merah/kuning) dan kesejukan (biru). Ini mencerminkan kehidupan yang ideal: penuh harmoni dan stabilitas.

- **Biru**
  Visualisasi lingkaran biru melambangkan elemen air, yang merefleksikan komitmen serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup.

- **Emas**
  Lingkaran berwarna emas di bagian luar melambangkan **puncak kejayaan dan kemuliaan** yang berkelanjutan.

- **MKTR**
  Penggunaan kode **MKTR** bukan sekadar singkatan teknis; ia adalah sebuah bentuk pengejawantahan dari nilai-nilai dan visi yang terkandung dalam nama **PT Menthobi Karyatama Raya.**

- **Green**
  Balance and Harmony: **Green** sits in the middle of the color spectrum, representing the balance between warmth (red/yellow) and coolness (blue). It reflects the ideal life: full of harmony and stability.

- **Blue**
  The blue circle visualization symbolizes the water element, reflecting a commitment to and concern for environmental sustainability.

- **Golden**
  The golden circle on the outside symbolizes the **peak of continued success and glory.**

- **MKTR**
  The use of the **MKTR** ticker is not simply a technical abbreviation; it is a manifestation of the values and vision embodied in its name, **PT Menthobi Karyatama Raya.**

Visi, Misi dan Budaya Perseroan

Corporate Vision, Mission and Culture

Visi dan Misi Perseroan telah disahkan dalam Surat Keputusan Bersama Nomor; 025/Dir-MKTR/II/2021 tentang Visi dan Misi Perseroan. Mengacu pada surat keputusan tersebut, visi dan misi menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan pengambilan kebijakan strategis di lingkungan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. Adapun seluruh jajaran Direksi, Manajemen dan seluruh karyawan insan MKTR wajib memahami, menginternalisasi, dan mengimplementasi visi dan misi tersebut dalam setiap aspek operasional Perusahan.

The Company's Vision and Mission have been ratified in Joint Decree Number 025/Dir-MKTR/II/2021 concerning the Company's Vision and Mission. In line with the decree, the vision and mission serve as guidelines for implementing business activities and formulating strategic policies within PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. The entire Board of Directors, Management, and all MKTR employees are required to understand, internalize, and implement the vision and mission in every aspect of the Company's operations.

Visi
Vision

Menjadi perusahaan agribisnis terkemuka berbasis ***zero waste*** yang berfokus pada penciptaan nilai tambah melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

To become a leading zero-waste agribusiness company that focuses on creating added value through sustainable environmental management.

Misi
Mission

Membangun agrobisnis melalui inovasi agronomi berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk memberikan nilai tambah optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Building agribusiness through sustainable and environmentally friendly agronomic innovation to provide optimal added value for all stakeholders.

Review Visi dan Misi Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Review of Vision and Mission by Board of Commissioners and Board of Directors

Perseroan senantiasa menyelaraskan Visi dan Misi dengan perkembangan ekosistem bisnis melalui mekanisme tinjauan secara berkala dan terukur. Pernyataan visi dan misi Perseroan tertuang dalam Surat Keputusan Direksi pada tanggal 2 Februari 2021 dengan persetujuan penuh dari Dewan Komisaris dan Direks.

Hingga diterbitkannya laporan tahunan ini, manajemen telah memastikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Visi dan Misi tersebut masih relevan. Dewan Komisaris dan Direksi juga berkeyakinan bahwa visi dan misi saat ini masih mampu mengakomodasi tantangan lingkungan bisnis terkini dalam mewujudkan arah dan tujuan strategis Perseroan di masa mendatang.

The Company consistently aligns its Vision and Mission with the development of its business ecosystem through regular and measurable reviews. The Company's vision and mission statements are outlined in a Board of Directors Decree dated February 2, 2021, with full approval from the Board of Commissioners and the Board of Directors.

As of the publication of this annual report, management has ensured that the values contained in the Vision and Mission remain relevant. The Board of Commissioners and Board of Directors also believe that the current Vision and Mission continue to accommodate the challenges of the current business environment and achieve the Company's future strategic direction and objectives.



Nilai dan Budaya Perseroan
Corporate Values and Culture

Budaya Perusahaan merepresentasikan nilai-nilai kerja yang dijunjung tinggi oleh seluruh insan Perseroan. Hingga saat ini, perilaku dan etos kerja berpedoman pada empat pilar nilai atau budaya Perusahaan yakni sebagai berikut:

Corporate culture represents the work values held dear by all employees. To date, our behavior and work ethic are guided by the following four pillars of corporate values or culture:

01

Motivasi dan Integritas
Motivation & Integrity

- Memiliki semangat kerja dengan kinerja terbaik dan semangat mengembangkan kompetensi secara mandiri untuk menjadi pribadi yang unggul; dan
- Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, tanggung jawab serta konsisten menjaga etika.
- Have a strong work ethic with excellent performance and the spirit of independently developing competencies to become an outstanding individual.
- Harmony between heart, mind, words, and actions by upholding the values of truth, honesty, responsibility, and consistently maintaining ethics.

02

Komitmen dan Profesional
Commitment and Professional

- Mendedikasikan diri seutuhnya untuk tumbuh dan maju bersama perusahaan; dan
- Selalu bersikap dan bertindak yang terbaik untuk perusahaan.
- Dedicate oneself entirely to growing and advancing together with the Company.
- Always behave and act in the best interest of the Company.

03

Transparan dan Terpercaya
Transparent and Trustworthy

- Keterbukaan dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan; dan
- Membangun kepercayaan dan berprasangka baik di antara *stakeholders* dan seluruh insan perusahaan.
- Openness and availability of necessary information.
- Build trust and goodwill among stakeholders and employees.

04

Responsif
Responsive

- Memiliki perilaku kerja proaktif, kooperatif, kritis, suportif serta peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja; dan
- Memiliki kemampuan memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada untuk pencapaian kinerja terbaik.
- Demonstrate proactive, cooperative, critical, and supportive behavior and sensitivity to the situation and needs of the work environment.
- Have the ability to seize opportunities and challenges to achieve the best performance.



Strategi Kunci
Key Strategy

Perseroan menerapkan strategi terukur untuk memastikan setiap kebijakan tidak hanya relevan, tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan. Strategi tersebut berfokus pada empat pilar utama berikut:

The Company implements a measurable strategy to ensure that each policy is not only relevant but also has a significant impact on the company's growth and on all stakeholders. This strategy focuses on the following four main pillars:

- Meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas yang berkelanjutan melalui praktik operasional yang bermutu dan mekanisasi kegiatan operasional tertentu secara selektif.
  Improving cost efficiency and sustainable productivity through high-quality operational practices and selective mechanization of specific operational activities.

- Meningkatkan dan mengembangkan komitmen Perseroan pada tanggung jawab sosial perusahaan, pengembangan komunitas setempat dan inisiatif sistem lingkungan yang berkelanjutan.
  Improving and evolving the Company's commitment to corporate social responsibility, local community development, and sustainable environmental system initiatives.

- Secara selektif menelaah kesempatan mengakuisisi lahan dan membentuk Kerja sama strategis dengan pihak lain untuk mengembangkan kegiatan operasional hulu dan diversifikasi produk; dan
  Selectively reviewing opportunities to acquire land and form strategic partnerships with other parties to develop upstream operational activities and product diversification.

- Melakukan pengembangan dan diversifikasi basis pelanggan.
  Develop and diversify the customer base.

Kode Etik
Code of Ethics

Nilai-nilai dalam Kode Etik ini merupakan panduan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja bagi seluruh insan Perseroan—mulai dari karyawan, manajemen, hingga jajaran Direksi dan Dewan Komisaris. Pedoman ini mengarahkan setiap individu untuk menjalankan tanggung jawab profesinya dan mampu berinteraksi secara efektif, efisien, dan aman. Selain itu, Perseroan berkomitmen penuh untuk menegakkan standar etika ini dalam hubungan dengan investor, pelanggan, mitra bisnis, maupun pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah rincian Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perseroan:

The values in this Code of Ethics serve as a guideline for Business Ethics and Work Ethics for all members of the Company—from employees and management to the Board of Directors and Board of Commissioners. These guidelines guide each individual in carrying out their professional responsibilities and interacting effectively, efficiently, and safely. Furthermore, the Company is fully committed to upholding these ethical standards in its relationships with investors, customers, business partners, and other stakeholders. The following details the Company's Business Ethics and Work Ethics Guidelines:

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Compliance with laws and regulations

Menghindari praktik-praktik yang tidak mengindahkan norma dan peraturan hukum
Avoiding practices that disregard legal norms and regulations

Tidak dibenarkan menerima gratifikasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan
Not allowed to accept gratuities that can influence decision-making

Tidak dibenarkan menawarkan atau menerima suap
Not allowed to offer or accept bribes

Tidak dibenarkan melakukan praktik-praktik pembayaran tidak wajar kepada pihak-pihak di luar perusahaan
Not allowed to impose unfair payment practices against parties outside the Company

Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup (K3LH)
Principles of occupational safety, health, and the environment (K3LH).

Memperkuat nilai keadilan kepada seluruh SDM
Strengthening the value of justice for all Human Resources

Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Perusahaan
Corporate Culture Socialization and Internalization

Perseroan mengadopsi Budaya/Nilai Perusahaan "MKTR" yang secara akronim (Motivasi & Integritas, Komitmen & Profesional, Transparan & Terpercaya dan Responsif) sebagai Budaya/Tata Nilai yang diberlakukan di lingkungan Perseroan. Budaya Perusahaan tersebut juga telah dicantumkan pada Peraturan Direksi PT Menthobi Karyatama Raya Tentang Pedoman Implementasi Nilai-Nilai Utama Sumber Daya Manusia PT Menthobi Karyatama Raya, yang diberlakukan juga pada seluruh aktivitas bisnis Perseroan termasuk seluruh Entitas Anak.

Selain Budaya Perusahaan, MKTR juga secara konsisten mengimplementasikan Kode Etik atau Pedoman Etika dan Bisnis sebagai kunci dalam menjaga etika berperilaku dan berbisnis kepada seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sejak diberlakukan secara resmi pada Maret 2022, Kode Etik ini telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Saat ini, Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja telah menjadi bagian integral dari program induksi karyawan baru serta kurikulum pengembangan kompetensi di lingkungan Perseroan.

The Company adopts the "MKTR" Corporate Culture/Values, which is an acronym (Motivation & Integrity, Commitment & Professional, Transparent & Trustworthy, and Responsive), as the Culture/Values applied within the Company. The Corporate Culture has also been included in PT Menthobi Karyatama Raya's concerning Guidelines for the Implementation of PT Menthobi Karyatama Raya's Human Resources Core Values, which is also applied to all business activities of the Company, including all Subsidiaries.

In addition to its Corporate Culture, MKTR consistently implements a Code of Ethics, or Ethics and Business Guidelines, as a key to maintaining ethical behavior and business practices for all stakeholders, thereby achieving sustainable business growth. Since its official implementation in March 2022, this Code of Ethics has been disseminated to all employees. Currently, the Business and Work Ethics Guidelines are an integral part of the Company's new employee induction program and competency development curriculum.



Bidang Usaha

Line of Business

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tertanggal 31 Maret 2021, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah untuk menjalankan kegiatan usaha dalam bidang-bidang sebagai berikut:

Referring to the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association, as stated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 31 dated March 31, 2021, the purpose and objective of establishing the Company is to carry out business activity in the following fields:







1. Aktivitas kantor pusat;
2. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
3. Aktivitas perusahaan *holding*;
4. Perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan pertanian;
5. Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya;
6. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
7. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI;
8. Perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
9. Perkebunan buah kelapa sawit;
10. Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*); dan
11. Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Head office activity.
2. Other management consulting activities.
3. Holding company activity.
4. Wholesale trade of agricultural machinery, equipment, and supplies.
5. Wholesale trade of office and industrial machinery, spare parts, and accessories.
6. Wholesale trade of other machinery, equipment, and supplies.
7. Wholesale trade of solid, liquid, and gas fuels and YBDI products.
8. Wholesale trade of vegetable oils and fats.
9. Oil palm fruit plantation.
10. Crude palm oil industry.
11. Crude palm kernel oil industry.

To achieve these aims and objectives, the Company may carry out the following business activities:

1. **Aktivitas Kantor Pusat**
   Mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*, pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Kantor Pusat, Kantor Administrasi Pusat, Kantor yang berbadan hukum, Kantor Distrik dan Kantor Wilayah dan Kantor Manajemen Cabang *Subsidiary* dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.

1. **Head office activity**
   This includes supervising and managing other company units or enterprises, strategic enterprise planning or organization, and decision-making based on company or enterprise regulations. Units in this group exercise operational control and manage related unit operations. Activities within this group include the Head Office, Central Administrative Office, Legal Entity Office, District Offices, Regional Offices, and Subsidiary Branch Management Offices, with the main activity being group ownership.







2. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**
   Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyedia jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

2. **Other management consulting activities**
   This group includes provisions for advice, guidance on business operations, and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions relating to finances; marketing goals and policies; human resource planning, practice and policy; scheduling planning, and production control. These business service providers may include advice, guidance, and operational assistance of various management functions, management consulting for agronomists and agricultural economists in agriculture and the like, design of accounting methods and procedures for cost accounting programs, procedures for budget supervision, provision of advice and assistance to businesses and community services in planning, organizing efficiency and supervision, management information and others.



3. **Aktivitas Perusahaan *Holding***
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan *subsidiary* dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.

4. **Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Pertanian**
Kelompok ini mencakup perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian seperti bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan termasuk mesin pemotong rumput.

5. **Perdagangan Besar Mesin Kantor, Industri Pengolahan, Suku Cadang, dan Perlengkapannya**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain (yang tidak termasuk dalam lainnya) untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

6. **Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan seperti perdagangan besar *furniture* kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin

3. **Holding company activity**
This group includes the activities of holding companies, that is, companies that control the assets of a group of subsidiary companies and whose main activity is ownership of the group.

4. **Wholesale trade of agricultural machinery, equipment, and supplies**
This group includes a large trade in agricultural machinery, equipment, and supplies, such as plows, fertilizer spreaders, seed growers, harvesting tools, threshing tools, milking machines, poultry raising machines, beekeeping machines, and treats used in agriculture and forestry, including lawn mowers.

5. **Wholesale trade of office and industrial machinery, spare parts, and accessories**
This group includes large trading businesses of industrial machinery and office machinery except computers, as well as equipment, such as wood and metal processing machinery, various machinery for industry and office purposes, power generation machinery, and machinery for domestic use. This includes large trade production robots, other (not included in others) machines for industrial use, trade, navigation, and other services and computer-controlled machinery for the textile industry, as well as computer-controlled sewing and knitting machines.

6. **Wholesale trade of other machinery, equipment, and supplies**
This group includes large trading ventures for machinery, equipment, and supplies, such as large trade office furniture, cables, and switches. It also provides for installing other industrial equipment, machine tools of various



berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

7. **Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI**
   Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, *gasoline*, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (*biofuels*) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.

8. **Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati**
   Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin.

9. **Perkebunan Buah Kelapa Sawit**
   Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

10. **Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*)**
    Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil*/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.

11. **Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*)**
    Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil*/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.

types and materials, computer-controlled machine tools, and measurement equipment.

7. **Wholesale trade of solid, liquid, and gas fuels and YBDI products**
   This group includes large trading businesses of gas, liquid, and solid fuels and similar products, such as crude petroleum, crude oil, diesel fuel, gasoline, fuel oil, kerosene, premium diesel, kerosene, coal, charcoal, coal, wood fuel, naphtha, biofuels, and other fuels, including gas fuels (LPG, butane, and propane gas, etc.), polish oils, lubricating oils, and purified petroleum products.

8. **Wholesale trade of vegetable oils and fats**
   This group includes large trading ventures in vegetable oils and fats, including margarine.

9. **Oil palm fruit plantation**
   This group includes plantation activities ranging from land processing, seeding, breeding, planting, maintenance, and harvesting oil palm fruit. It also provides seedling and planting activities for oil palm trees.

10. **Crude palm oil industry**
    This group includes processing palm fruit into crude palm oil (CPO), which still needs further processing. Other industries typically use this product.

11. **Crude palm kernel oil industry**
    This group includes processing palm kernel into crude palm kernel oil (CPKO), which still needs further processing. Other industries typically use this product.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Tahun 2025
Business Activity In 2025

Selama tahun buku 2025, sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar yang terakhir, belum seluruhnya dijalankan oleh Perseroan. Penjelasan mengenai realisasi kegiatan usaha tersebut disajikan dalam tabel berikut:

During the 2025 financial year, in accordance with the latest Articles of Association, the Company has not fully implemented it. The realization of business activity is presented in the following table:

No.	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan Implemented/Not Implemented Yet	Keterangan Description
1.	Aktivitas kantor pusat; Head office activity;	Telah Dijalankan Implemented	-
2.	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; Other management consulting activities;	Telah Dijalankan Implemented	Layanan konsultasi teknis dan manajerial untuk Konsultan Agri-Bisnis. Technical and managerial consulting services for Agri-Business Consultants.
3.	Aktivitas perusahaan *holding*; Holding company activity;	Telah Dijalankan Implemented	
4.	Perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan pertanian; Wholesale trade of agricultural machinery, equipment, and supplies;	Telah Dijalankan Implemented	Diperuntukkan bagi kegiatan produksi Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (CPKO). Intended for Crude Palm Oil (CPO) and Crude Palm Kernel Oil (CPKO) production activities.
5.	Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya; Wholesale trade of office and industrial machinery, spare parts, and accessories;	Telah Dijalankan Implemented	Diperuntukkan bagi kegiatan pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS). Intended for the transportation of Fresh Fruit Bunches (FFB).
6.	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya; Wholesale trade of other machinery, equipment, and supplies;	Telah Dijalankan Implemented	Diperuntukkan bagi kegiatan produksi Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (CPKO). Intended for Crude Palm Oil (CPO) and Crude Palm Kernel Oil (CPKO) production activities.
7.	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas, serta produksi YBDI; Wholesale trade of solid, liquid, gas fuels, and YBDI production;	Telah Dijalankan Implemented	-
8.	Perdagangan besar minyak dan lemak nabati; Wholesale trade of vegetable oils and fats;	Telah Dijalankan Implemented	
9.	Perkebunan buah kelapa sawit; Oil palm fruit plantation;	Telah Dijalankan Implemented	
10.	Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*); dan Crude palm oil industry; and	Telah Dijalankan Implemented	
11.	Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil)*. Crude palm kernel oil industry.	Telah Dijalankan Implemented	

Produk dan Layanan Perseroan

Corporate Products and Services

Sejak awal berdiri, melalui Entitas Anak, kegiatan usaha difokuskan pada perdagangan minyak kelapa sawit serta pengelolaan perkebunan dan aktivitas pengelolaan kelapa sawit yang berada di pabrik. Selain itu, Perseroan menjalankan lini bisnis perdagangan Tandan Buah Segar (TBS) yang bersumber dari pengepul, koperasi, dan kelompok tani di sekitar wilayah operasional PT Menthobi Makmur Lestari. Dalam proses produksinya, TBS tersebut diolah di pabrik menjadi *Crude Palm Oil* (CPO). Produk CPO dan Inti Sawit (*Kernel*) ini kemudian dipasarkan di wilayah Kalimantan Tengah, dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan melalui PT Menthobi Makmur Lestari.

Since its inception, through its Subsidiaries, its business activities have focused on palm oil trading, plantation management, and palm oil processing at its mill. The Company also runs a business line of Fresh Fruit Bunches (FFB) trading sourced from collectors, cooperatives, and farmer groups around the operational area of PT Menthobi Makmur Lestari. In the mill, the FFB is processed into Crude Palm Oil (CPO). These CPO and Palm Kernel products are then marketed in the Central Kalimantan region, with payments made through PT Menthobi Makmur Lestari.

Produk dari Kelapa Sawit

Products Made From Palm Oil

Adapun produk yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit yaitu Tandan Buah Segar (TBS) atau *Fresh Fruit Bunch* (FFB), yang didapatkan dari pemasok selanjutnya diolah oleh Perseroan menjadi Minyak Kelapa Sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) sekitar 17-24%, serta minyak inti kelapa sawit atau *Palm Kernel Oil* (PKO) sekitar 4,6-5,5%. Dalam proses produksi, Perseroan memilih pemasok yang memproduksi TBS yang berkualitas dengan harga yang terjangkau agar mendapatkan pengolahan CPO dan PKO yang maksimal. Berikut adalah turunan produk utama dari pengolahan kelapa sawit:

1. Minyak Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*): Minyak nabati yang diekstraksi dari daging buah (*mesocarp*) pohon sawit, khususnya spesies *Elaeis guineensis*, serta sebagian kecil dari spesies *Elaeis oleifera* dan *Attalea maripa*.

2. Minyak Inti Sawit (*Palm Kernel Oil*): Minyak nabati yang layak dikonsumsi yang berasal dari proses ekstraksi inti biji buah sawit.

The products made from oil palm trees include Fresh Fruit Bunches (FFB) obtained from suppliers, which the Company then processes into crude palm oil (CPO) at approximately 17-24% and Palm Kernel Oil (PKO) at around 4.6-5.5%. In the production process, the Company selects suppliers that produce high-quality FFB at affordable prices to ensure optimal processing of CPO and PKO. Meanwhile, the products from processing in the Company's mills include crude palm oil, palm kernel oil, and palm kernel shell. The following are the main product derivatives from palm oil processing:

1. Crude Palm Oil: Vegetable oil extracted from the flesh of the fruit (mesocarp) of the oil palm tree, specifically the Elaeis guineensis species, as well as a small portion from the Elaeis oleifera and Attalea maripa species.

2. Palm Kernel Oil: Edible vegetable oil derived from the extraction of the kernel of the palm fruit.

3. Cangkang Sawit (*Palm Kernel Shell*): Sisa pecahan tempurung yang didapat setelah biji sawit dikeluarkan dan dihancurkan di pabrik pengolahan (*palm oil mill)*.

Kemudian, dari produk minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit dapat dikembangkan menjadi bermacam-macam produk industri hilir.

3. Palm Kernel Shell: The remaining shell fragments obtained after the palm kernels are removed and crushed in a processing plant (palm oil mill).

Then, palm oil and palm kernel products can be developed into various downstream industrial products.

Pengolahan dari Kelapa Sawit
Palm Oil Processing

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan melalui Entitas Anak mengolah TBS menjadi produk turunan kelapa sawit. Perseroan mengoperasikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas pengolahan sebesar 30 ton per jam, yang difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan minyak dan inti sawit.

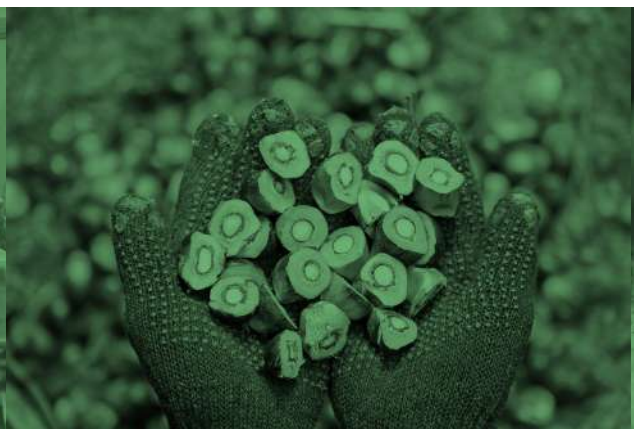
In carrying out its operational activities, the Company, through its subsidiaries, processes fresh fruit bunches into palm oil derivative products. The Company operates a Palm Oil Mill with a processing capacity of 30 tons per hour, focused on optimizing the utilization of palm oil and palm kernel.

Produk Pupuk Organik
Organic Fertilizer Product

Melalui anak usahanya, PT Menthobi Hijau Lestari (MHL) berhasil mengolah limbah cair dan padat dari hasil samping pabrik kelapa sawit menjadi pupuk organik. Inovasi ini memanfaatkan tandan kosong kelapa sawit atau janjangan kosong (jangkos) yang diolah menjadi pupuk organik berbentuk granula (butiran padat dan kering). Terobosan tersebut menjadikan MHL sebagai pionir dalam memproduksi pupuk organik padat berbasis jangkos di industri ini.

Through its subsidiary, PT Menthobi Hijau Lestari (MHL), has successfully processed liquid and solid waste from palm oil mill byproducts into organic fertilizer. This innovation utilizes empty fruit bunches (jangkos), which are processed into granular organic fertilizer (solid, dry granules). This breakthrough makes MHL a pioneer in producing empty fruit bunches-based solid organic fertilizer in the industry.





Pengolahan *Kernel Crushing Plant* (KCP)
Kernel Crushing Plant (KCP) Processing

Perseroan memiliki fasilitas *Kernel Crushing Plant* (KCP) dengan memeroses inti sawit menjadi minyak inti sawit yang memiliki nilai jual tinggi. Fasilitas KCP ini memiliki kapasitas 60 ton per hari, untuk mengolah kernel menjadi *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO), sehingga mampu menghasilkan sebesar 7.400 ton CPKO. Fasilitas ini mampu memaksimalkan utilitas *Kernel Crushing Plant* (KCP) guna meningkatkan produksi *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) dan *Palm Kernel Cake*, sehingga dapat menghasilkan produk turunan kelapa sawit. Produk CPKO tidak dipungkiri memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan kernel mentah.

The Company operates a Kernel Crushing Plant (KCP) facility that processes palm kernels into high-value palm kernel oil. This facility has a capacity of 60 tons per day to process kernels into Crude Palm Kernel Oil (CPKO), resulting in a total production of 7,400 tons. This facility maximizes the utilization of the Kernel Crushing Plant (KCP) to increase the production of Crude Palm Kernel Oil (CPKO) and Palm Kernel Cake, thus producing palm oil derivative products. CPKO products undoubtedly have a higher economic value than raw kernels.

Pengolahan Produk Biomassa EFB Pellet
EFB Pellet Biomass Products Processing

PT Menthobi Hijau Lestari (Entitas Anak) membangun pabrik biomassa EFB *Pellet* (pelet dari tandan kosong kelapa sawit). Pabrik ini mengolah janjang kosong menjadi biopelet sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berpotensi menggantikan batubara. Keberadaan pabrik ini menjadi solusi bagi industri kelapa sawit dalam mengatasi permasalahan limbah tandan kosong (jangkos).

PT Menthobi Hijau Lestari (a Subsidiary) built a biomass EFB Pellet plant (pellets from empty oil palm fruit bunches). This plant processes empty fruit bunches into biopellets, a more environmentally friendly alternative fuel that could replace coal. This plant provides a solution for the palm oil industry in addressing the problem of empty fruit bunch waste (jangkos).

Perseroan juga memastikan pelet biomassa ini memenuhi standar industri, termasuk kalori tinggi untuk efisiensi energi, Kadar potasium dan klorin rendah guna mencegah korosi pada *boiler*, Kadar kelembaban optimal agar pembakaran lebih efisien, dan Keamanan penggunaan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Produk biomassa EFB *Pellet* mampu meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan serta mendukung target transisi energi hijau nasional.

The Company ensures these biomass pellets meet industry standards, including high calorie content for energy efficiency, low potassium and chlorine content to prevent boiler corrosion, optimal moisture content for more efficient combustion, and safety for use in Steam Power Plants (PLTU). EFB Pellet biomass products can improve the company's sustainable performance and support the national green energy transition target.



Wilayah Operasional

Operational Area

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan melalui entitas anak (PT Menthobi Makmur Lestari) memiliki 1 (satu) perkebunan kelapa sawit dan dua Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Seluruh operasional ini terpusat di Desa Kujan dan Guci, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, dengan total konsesi lahan berdasarkan izin lokasi mencapai ± **12.000 hektare.**

Selain itu, PT Menthobi Hijau Lestari yang juga salah satu Entitas Anak memiliki 2 (dua) unit produksi pupuk kompos granul yang wilayah operasional berada di Desa Kujan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah dan Desa Sukemanang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

By the end of 2025, the Company, through its subsidiary (PT Menthobi Makmur Lestari), owned one oil palm plantation and two palm oil mills (PKS). All operations are centered in Kujan and Guci Villages, Lamandau Regency, Central Kalimantan, with a total land concession area based on location permits of approximately **12,000 hectares.**

Moreover, PT Menthobi Hijau Lestari, which is also a Subsidiary, has 2 (two) granular compost fertilizer production units, with operational areas located in Kujan Village, Lamandau Regency, Central Kalimantan, and Sukemanang Village, Muara Enim Regency, South Sumatra.



Pabrik Pupuk Kompos Granul
Granule Compost Fertilizer Plant
Desa Sukamenang, Kec. Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kode Pos: 31171.z

Pabrik Pupuk Kompos Granul
Granule Compost Fertilizer Plant
Jalan Trans Kalimantan KM 11,5 Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah 74612.

Perkebunan Kelapa Sawit
Palm Oil Plantation
Jalan Trans Kalimantan KM 11,5 Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah 74612.

Kantor Pusat
Head Office
Wisma Maktour Lt. 4 Jalan Otista Raya No. 80 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Adminstrasi Jakarta Timur, DKI jakarta 13330.

Pabrik Kelapa Sawit KSO
KSO Palm Oil Mill
Jalan Kujan, Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Lamandau, Kalimantan Tengah 74612.

Pabrik Kelapa Sawit MMAL
MMAL Palm Oil Mill
Jalan Kujan, Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Lamandau, Kalimantan Tengah 74612.

Untuk Pabrik Pupuk Kompos Granul yang berada di wilayah Sumatera Selatan merupakan hasil kerja sama PT Menthobi Hijau Lestari dengan PT Berlian Inti Mekar (entitas anak dari PT Mahkota Group Tbk) pada 1 Oktober 2024.

Pada area pabrik yang diperuntukkan industri pengolahan Kelapa Sawit maupun pengolahan produk pupuk kompos granul memiliki aset yang terdiri dari tanah, bangunan dan sarana pelengkapnya serta mesin-mesin dan peralatannya.

The Granular Compost Fertilizer Plant in the South Sumatra region was established through a collaboration between PT Menthobi Hijau Lestari and PT Berlian Inti Mekar (a subsidiary of PT Mahkota Group Tbk) on October 1, 2024.

In the plant area designated for the palm oil processing industry and the processing of granulated compost fertilizer products, there are assets comprising land, buildings, supporting facilities, and machines and equipment.

Kantor Pusat Head Office	**Perkebunan Kelapa Sawit** Palm Oil Plantation	**Pabrik Kelapa Sawit** Palm Oil Mills	**Pabrik Pupuk Kompos Granul** Granule Compost Fertilizer Plants
Wisma Maktour Lt. 4 Jalan Otista Raya No. 80 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Adminstrasi Jakarta Timur, DKI jakarta 13330.	Jalan Trans Kalimantan KM 11,5 Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah 74612.	• Jalan Trans Kalimantan KM 11,5 Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah 74612; dan • Jalan Kujan, Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah 74612.	• Jalan Trans Kalimantan KM 11,5 Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah 74612; dan • Desa Sukamenang, Kec. Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kode Pos: 31171.*

Keterangan : pada 7 Februari 2025, melalui Entitas Anak (PT Menthobi Hijau Lestari) bekerjasama dengan PT Suar Energi Futura untuk membangun pabrik pengolahan janjang kosong (*Empty Bunch Press*) menjadi Pellet dengan kapasitas 10 ton per jam di Provinsi Sumatera Selatan.

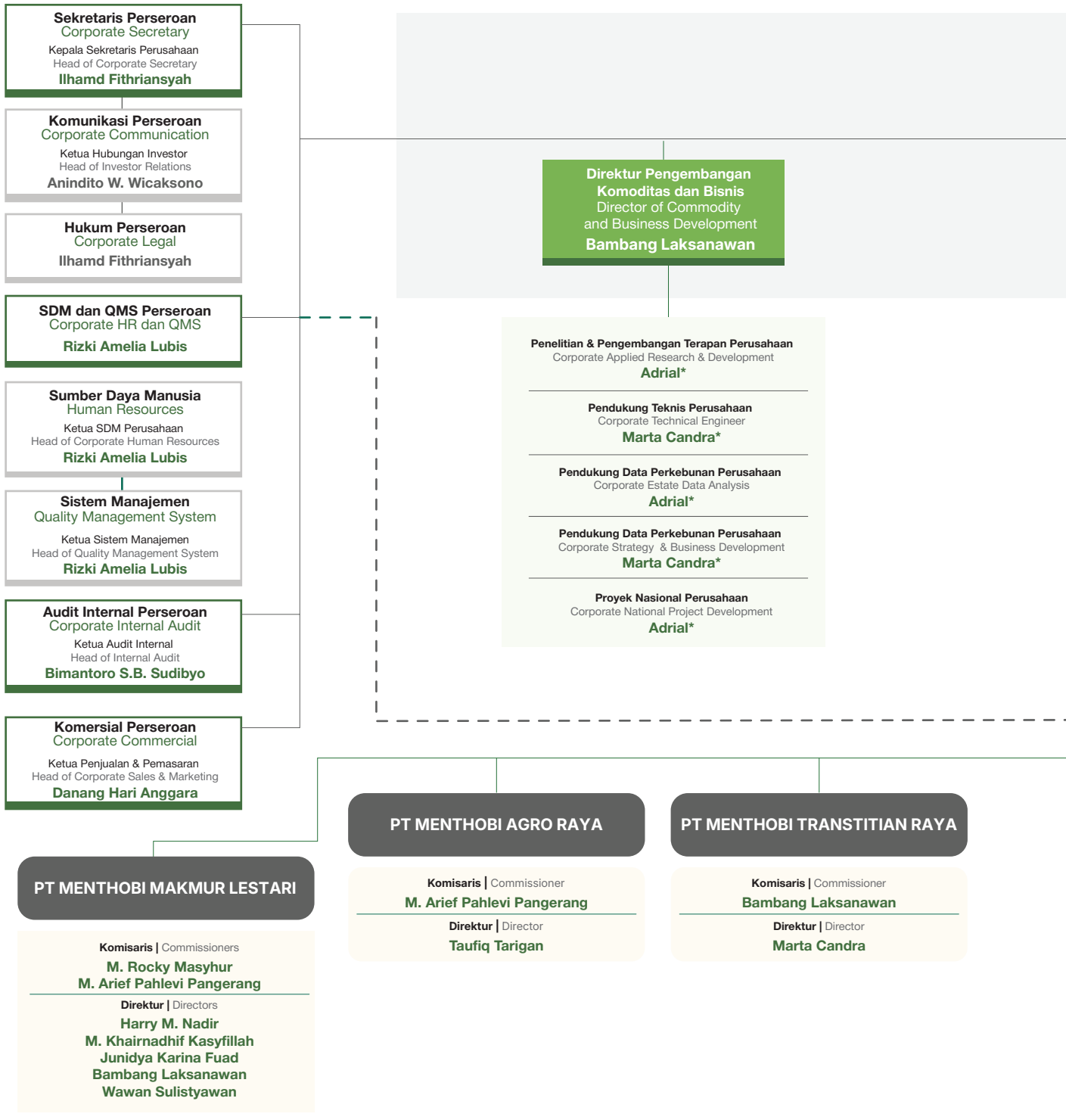
Description: On February 7, 2025, through its Subsidiary (PT Menthobi Hijau Lestari), in collaboration with PT Suar Energi Futura, the Company built an empty bunch processing plant (Empty Bunch Press) into pellets with a capacity of 10 tons per hour in the Province of South Sumatra.

Struktur Organisasi

Organizational Structure

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 42/SK-Dirut/MKTR/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024, Perseroan telah menetapkan struktur organisasi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk yang baru. Adapun bagan susunan organisasi tersebut dipaparkan sebagai berikut:

Based on the Decree of the Board of Directors No. 42/SK-Dirut/MKTR/X/2024 dated October 10, 2024, the Company has established the new organizational structure of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. The organizational structure chart is presented as follows:



Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Komisaris Utama | President Commissioner
M. Rocky Masyhur
Komisaris | Commissioner
M. Khairnadhif Kasyfillah
Komisaris Independen | Independent Commissioner
Bambang Widodo

Komite Audit
Audit Committee

Ketua | Chairman
Bambang Widodo
Anggota | Members
Tulus Setiawan
Lilik Qusairy

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

Ketua | Chairman
Bambang Widodo
Anggota | Members
Rizki Amelia Lubis
Rudi Sarwono

Direktur Utama
President Director
Harry M. Nadir

Wakil Direktur Utama
Deputy President Director
Junidya Karina Fuad

Direktur Keberlanjutan dan Kemitraan
Director of Sustainability and Partnership
M. Arief Pahlevi Pangerang

Direktur Keuangan dan Investasi
Director of Finance and Investment
Wawan Sulistyawan

Pengembangan Sistem Keamanan dan Komunitas Perusahaan
Corporate Partnership & Community Development
Taufiq Tarigan*

(Kepala Unit Bisnis Lingkungan | Business Unit Head Green Business)
Corporate Sustainability
Keberlanjutan Perusahaan
Dadan Ramdhani *

(Kepala Unit Usaha Benih Agro | Business Unit Head Seed Agro)
Koordinasi Plasma Perusahaan
Corporate Plasma Coordination
Taufiq Tarigan*

(Kepala Hubungan Investor | Head of Investor Relations)
Corporate Instituional Relation
Hubungan Kelembagaan Perusahaan
Anindito W. Wicaksono*

Corporate Security System
Sistem Keamanan Perusahaan
Ilhamd Fithriansyah *

(Kepala Pelaporan dan Pengawasan Perusahaan | Head of Corporate Reporting & Control)
Pelaporan & Pengawasan Perusahaan
Corporate Reporting & Control
Fandi Yuniawan

(Kepala Keuangan & Pajak Perusahaan | Head of Corporate Finance & Tax)
Keuangan & Pajak Perusahaan
Corporate Finance & Tax
Muhammad Faizal Islami

Investasi Perusahaan
Corporate Investment
Vacant

(Kepala Sistem Informasi Perusahaan | Head of Corporate Information System)
Sistem Informasi Perusahaan
Corporate Information System
Bimantoro S.B. Sudibyo

(Kepala Logistik & Pengadaan Perusahaan | Head of Corporate Logistic & Procurement)
Pengadaan Perusahaan
Corporate Procurement
Ricky Wilastra

PT MENTHOBI HIJAU LESTARI

Komisaris | Commissioner
Wawan Sulistyawan

Direktur | Director
Dadan Ramdhani

PT KHATULISTIWA SINERGI OMNIDAYA

Komisaris | Commissioners
Noval Lukman
Junidya Karina Fuad

Direktur | Director
Danang H. Anggara

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Changes to the Board of Commissioners and Board of Directors Composition

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2025, tidak mengalami perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Berikut ini adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah RUPST tanggal 30 April hingga 31 Desember 2025. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

At the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) held on April 30, 2025, there was no change in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors. The following is the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors after the meeting on April 30 to December 31, 2025. The composition and basis for the appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors are shown in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan 2025
Table of Composition and Basis of Appointment for Board of Commissioners After Annual GMS 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Muhammad Rocky Masyhur	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 31 Maret 2021. Extraordinary GMS Resolution dated March 31, 2021.
Bambang Widodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 5 Agustus 2022. Extraordinary GMS Resolution dated August 5, 2022.
M. Khairnadhif Kasyfillah	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 6 September 2023. Extraordinary GMS Resolution dated September 6, 2023.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan DireksiSetelah RUPS Tahunan 2025
Table of Composition and Basis of Appointment for Board of Directors After Annual GMS 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Harry M. Nadir	Direktur Utama President Director	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 31 Maret 2021. Extraordinary GMS Resolution dated March 31, 2021.
Wawan Sulistyawan	Direktur Director	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 31 Maret 2021. Extraordinary GMS Resolution dated March 31, 2021.
Bambang Laksanawan	Direktur Director	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 31 Maret 2021. Extraordinary GMS Resolution dated March 31, 2021.
M. Arief Pahlevi Pangerang	Direktur Director	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 5 Agustus 2022. Extraordinary GMS Resolution dated August 5, 2022.



Profil
Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Muhammad
Rocky Masyhur
Komisaris Utama
President Commissioner

M. Khairnadhif
Kasyfillah
Komisaris
Commissioner

Bambang
Widodo
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Muhammad Rocky Masyhur

Komisaris Utama
President Commissioner



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia.
Domisili Domicile	Jakarta.
Tempat dan Tahun Lahir Place and Year of Birth	Jakarta, 1953.
Usia Age	72 tahun pada akhir tahun buku 2024. 72 years old at the end of the 2024 financial year.

Masa Jabatan Term of Office	31 Maret 2021 – Sekarang (Periode Pertama).	March 31, 2021 – Present (First Term).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Rapat No. 32 tertanggal 31 Maret 2021.	Served as the Company's President Commissioner, based on the Deed of Shareholders' Meeting Resolution No. 32 dated March 31, 2021.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Beliau menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAK Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, pada tahun 1971.	He completed his High School education at SMAK Ujung Pandang in South Sulawesi in 1971.
Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	*Indonesia International Sustainability Forum* 2025, IPOC.	Indonesia International Sustainability Forum 2025, IPOC.
Riwayat Jabatan Career History	Beliau memulai perjalanan kariernya dengan mengemban berbagai posisi strategis di berbagai Perusahaan, sebagaimana yang telah dirinci dalam bagian informasi rangkap jabatan.	He began his career by holding strategic positions at several companies, as detailed in the concurrent position section.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Hingga saat ini, beliau masih aktif menjalankan tanggung jawab kepemimpinan di berbagai sektor industri yakni sebagai: • Direktur di PT Trinunggal Kharisma (Tahun 1986 – sekarang); • Presiden Direktur di PT Hikmah Perdana Tours (Tahun 1992 – sekarang); • Direktur di PT Maktour Bangun Persada (Tahun 2014 – sekarang); dan • Komisaris di PT Menthobi Makmur Lestari sejak (Tahun 2016 – sekarang).	To date, he is still actively carrying out leadership responsibilities in various industrial sectors, including: • Director at PT Trinunggal Kharisma (1986 – Present). • President Director at PT Hikmah Perdana Tours (1992 – Present). • Director at PT Maktour Bangun Persada (2014 – Present). • Commissioner at PT Menthobi Makmur Lestari (2016 – Present).
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dan utama baik langsung maupun tidak langsung, tetapi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya.	He has affiliations with controlling and major shareholders, both directly and indirectly, but does not have affiliations with other members of the Board of Directors or Board of Commissioners.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Beliau memiliki saham di Perseroan sebanyak 1.187.354 lembar saham.	He owns 1,187,354 shares in the Company.

Bambang Widodo

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia.
Domisili Domicile	Bekasi, Jawa Barat. Bekasi, West Java.
Tempat dan Tahun Lahir Place and Year of Birth	Jakarta, 1953.
Usia Age	72 tahun pada akhir tahun buku 2024. 72 years old at the end of the 2024 financial year.

Masa Jabatan Term of Office	5 Agustus 2022 – Sekarang (Periode Pertama).	August 5, 2022 – Present (First Term)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sesuai Akta Keputusan para Pemegang Saham No. 1 tanggal 5 Agustus 2022.	Served as Independent Commissioner of the Company in accordance with the Deed of Shareholders' Meeting Resolution No. 1 dated August 5, 2022.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Menyelesaikan Pendidikan Strata I Ekonomi di Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, pada Tahun 1985.	Completed his Bachelor of Economics education at the Faculty of Economics and Business, Gadjah Mada University, in 1985.
Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	*Indonesia International Sustainability Forum* 2025, IPOC.	Indonesia International Sustainability Forum 2025, IPOC.
Riwayat Jabatan Career History	Beliau memiliki rekam jejak dalam menduduki berbagai posisi strategis di industri pasar modal, antara lain: • 2016 - 2017: Anggota Komite Audit di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; • 2009 - 2015: Direktur di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; • 1992 - 2009: Jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Keanggotaan di PT Bursa Efek Jakarta/Indonesia; • 1989 - 1991: Jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi di PT Bursa Efek Surabaya; dan • 1986 – 1989: Staf Bagian Analisa Laporan Keuangan, Biro Pendaftaran Emisi & Akuntansi di Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM).	He has a track record of holding various strategic positions in the capital market industry, including: • 2016 - 2017: Member of the Audit Committee at PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. • 2009 - 2015: Director at PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. • 1992 - 2009: Last position as Head of Membership Division at PT Bursa Efek Jakarta/Indonesia. • 1989 - 1991: Last position as Head of the Finance and Accounting Section at PT Bursa Efek Surabaya. • 1986 – 1989: Staff of the Financial Statement Analysis Section, Issuance Registration & Accounting Bureau at the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM).
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Saat Ini, Beliau mengemban tugas sebagai Komisaris di PT Penilai Harga Efek Indonesia sejak 2016 dan menjabat sebagai Ketua Komite Audit serta Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2022.	He has served as a Commissioner at PT Penilai Harga Efek Indonesia since 2016 and as Chairman of the Audit Committee and the Company's Nomination and Remuneration Committee since 2022.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	He has no affiliations with any members of the Board of Directors, any other members of the Board of Commissioners, or the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Beliau tidak memiliki saham di Perseroan.	He does not have any shares in the Company.
Independensi Independence	Beliau belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Komisaris Independen. Adapun Komisaris Independen Perseroan, tidak memiliki benturan kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.	He has not served more than 2 (two) terms as an Independent Commissioner. The Company's Independent Commissioners do not have any conflicts of interest/ personal affiliations that could negatively impact the Company, and they have fulfilled the requirements to be appointed as Independent Commissioners in accordance with applicable laws and regulations.

M. Khairnadhif Kasyfillah

Komisaris
Commissioner



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia.
Domisili Domicile	Jakarta.
Tempat dan Tahun Lahir Place and Year of Birth	Jakarta, 1994.
Usia Age	31 tahun per 31 Desember 2025. 31 years old as of December 31, 2025.

Masa Jabatan Term of Office	September 2023 – Sekarang (Periode Pertama).	September 2023 – Present (First Term).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 06 pada tanggal 6 September 2023.	Served as Commissioner of the Company based on the Deed of Decision of Shareholders No. 06 on September 6, 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Menyelesaikan Pendidikan Strata I Ekonomi di Prasetiya Mulya Business School Jakarta pada tahun 2016.	Completed his Bachelor of Economics at Prasetiya Mulya Business School, Jakarta, in 2016.
Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	*Indonesia International Sustainability Forum* 2025, IPOC.	Indonesia International Sustainability Forum 2025, IPOC.
Riwayat Jabatan Career History	Memulai perjalanan kariernya sebagai Marketing Communication di The Ritz-Carlton Jakarta pada 2015. Beliau telah memiliki rekam jejak yang kuat di bidang pemasaran dengan menduduki jabatan sebagai Marketing Director di PT River Stone KOI Farm dan PT ABC Nice sejak tahun 2015.	Starting his career in Marketing Communication at The Ritz-Carlton Jakarta in 2015. He has a strong track record in marketing, having held the position of Marketing Director at PT River Stone KOI Farm and PT ABC Nice since 2015.
ngkap Jabatan ncurrent sitions	Selain menjabat anggota Dewan Komisaris Perseroan, beliau juga merangkap jabatan di berbagai Perusahaan diantaranya sebagai : • Direktur di PT Persada Perkasa Airnesia (Tahun 2023 – sekarang); • Direktur di PT Menthobi Makmur Lestari (Tahun 2023 – sekarang); • Direktur di Global Sadian Resources Pte. Ltd (Tahun 2022 – sekarang); • Komisaris di PT Visinesia Digital Media (Tahun 2022 – sekarang); • Komisaris di PT Bersama Membangun Negeri (Tahun 2022 – sekarang); • Direktur di PT Jayabaya Pratama (Tahun 2022 – sekarang); • Komisaris di PT Nimata Bumi Persada (Tahun 2021 – sekarang); dan • Direktur di PT Syailendra Pangan Indonesia (Tahun 2019 – sekarang).	He currently also holds other positions in various companies: • Director at PT Persada Perkasa Airnesia (2023 – Present). • Director at PT Menthobi Makmur Lestari (2023 – Present). • Director at Global Sadian Resources Pte. Ltd (2022 – Present). • Commissioner at PT Visinesia Digital Media (2022 – Present). • Commissioner at PT Bersama Membangun Negeri (2022 – Present). • Director at PT Jayabaya Pratama (2022 – Present). • Commissioner at PT Nimata Bumi Persada (2021 – Present). • Director at PT Syailendra Pangan Indonesia (2019 – Present).
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dan utama baik langsung maupun tidak langsung, tetapi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya.	He has affiliations with controlling and major shareholders, both directly and indirectly, but does not have affiliations with other members of the Board of Directors or Board of Commissioners.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Beliau tidak memiliki saham di Perseroan.	He does not have any shares in the Company.

Profil Direksi

Board of Director Profile



Harry
M. Nadir
Direktur Utama
President Director



M. Arief Pahlevi
Pangerang
Direktur Partnership & Sustainability
Director of Partnership & Sustainability



Wawan
Sulistyawan
Direktur Finance & Investment
Director of Finance & Investment



Junidya
Karina Fuad
Wakil Direktur Utama
Deputy President Director



Bambang
Laksanawan
Direktur Commodity & Business Development
Director of Commodity & Business Development

Harry M. Nadir

Direktur Utama
President Director



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia.
Domisili Domicile	Jakarta.
Tempat dan Tahun Lahir Place and Year of Birth	Jakarta, 1953.
Usia Age	65 tahun per 31 Desember 2025. 65 years old as of December 31, 2025.

Masa Jabatan Term of Office	31 Maret 2021 – Sekarang (Periode Pertama).	March 31, 2021 – Present (First Term)
Tugas dan Tanggung jawab Duty and Responsibility	Direktur Utama Perseroan mempunyai tugas memimpin dan mengawasi jalannya Perseroan, mengatur strategi, rencana, dan arah Perseroan serta bertanggung jawab penuh atas masa depan Perseroan.	The Company's President Director has the task of leading and supervising the running of the Company, setting the Company's strategy, plans, and direction, and is fully responsible for the Company's future.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat yang dituangkan dalam Akta No. 32 tanggal 31 Maret 2021.	Served as President Director of the Company based on the Meeting Resolution set out in Deed No. 32 dated March 31, 2021.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Menyelesaikan pendidikan Diploma IV dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1989.	Completed Diploma IV education from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) in 1989.
Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	*Indonesia International Sustainability Forum* 2025, IPOC.	Indonesia International Sustainability Forum 2025, IPOC.
Riwayat Jabatan Career History	Beliau memiliki rekam jejak kepemimpinan di berbagai Perusahaan, yakni antara lain: • Tahun 2013 - 2016: Direktur Keuangan di PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.; • Tahun 2012 - 2013: Direktur Utama di PT ASD Bakrie Plam Oil Seeds; dan • Tahun 2002 - 2012: Direktur Keuangan di PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk.	He has held strategic positions in various companies: • 2013 - 2016: Director of Finance at PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. • 2012 - 2013: President Director at PT ASD Bakrie Oil Palm Seed Indonesia. • 2002 - 2012: Director of Finance at PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Selain menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, beliau juga merangkap jabatan sebagai Direktur Utama di PT Menthobi Makmur Lestari (Entitas Anak) sejak 2016 hingga saat ini.	In addition to serving as the Company's President Director, he also holds the concurrent position of President Director at PT Menthobi Makmur Lestari (Subsidiary) since 2016 to date.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	He has no affiliations with any members of the Board of Commissioners, any other members of the Board of Directors, or the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Kepemilikan saham Beliau di Perseroan tercatat sebanyak 6.535.948 lembar saham.	He owns 6,535,948 shares in the Company.

Wawan Sulistyawan

Direktur Finance & Investment
Director of Finance & Investment



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia.
Domisili Domicile	Bekasi, Jawa Barat. Bekasi, West Java.
Tempat dan Tahun Lahir Place and Year of Birth	Kediri, 1970.
Usia Age	55 tahun per 31 Desember 2025. 55 years old as of December 31, 2025.

Masa Jabatan Term of Office	31 Maret 2021 – Sekarang. (Periode Pertama)	March 31, 2021 – Present (First Term)
Tugas dan Tanggung jawab Duty and Responsibility	Direktur Finance & Investment memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan operasional Keuangan, Pelaporan, Sistem Teknologi Informasi hingga Umum & Pengadaan untuk mendukung tercapainya produktivitas kerja serta sasaran pertumbuhan bisnis Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.	Director of Finance & Investment has the authority and responsibility to manage operational activities from Finance, Reporting, Information Technology Systems, General & Procurement to support the achievement of work productivity and the Company's business growth targets in accordance with the established provisions.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 29 Maret 2021 berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 32 tanggal 31 Maret 2021.	Served as Director of the Company since March 29, 2021, based on Deed of Meeting Resolution No. 32 dated March 31, 2021.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Menyelesaikan Pendidikan Strata I Ekonomi di Prasetiya Mulya Business School Jakarta pada tahun 2016.	Completed his Bachelor of Economics at Prasetiya Mulya Business School, Jakarta, in 2016.
Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	*Indonesia International Sustainability Forum* 2025, IPOC.	Indonesia International Sustainability Forum 2025, IPOC.
Riwayat Jabatan Career History	Beliau pernah menduduki posisi strategis di berbagai Perusahaan diantaranya: • 2011 – 2017: Vice President (VP) Finance and Reporting di PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk.; • 2007 – 2011: Division Head of Internal Audit & Risk Management PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk; dan • 2006 – 2007: Manager Accounting Senior Specialist di PT Rajawali Nusantara Indonesia.	He has held strategic positions in various companies: • 2011 – 2017: Vice President (VP) Finance and Reporting at PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk. • 2007 – 2011: Division Head of Internal Audit & Risk Management at PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk. • 2006 – 2007: Manager Accounting Senior Specialist at PT Rajawali Nusantara Indonesia.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Di samping tanggung jawabnya sebagai Direktur Perseroan, beliau saat ini juga merangkap jabatan pada Entitas Anak sebagai berikut: • Direktur Keuangan PT Menthobi Makmur Lestari sejak tahun 2017. • Komisaris PT Menthobi Hijau Lestari sejak tahun 2022.	In addition to his responsibility as Director of the Company, he currently also holds concurrent positions in the following Subsidiaries: • Finance Director of PT Menthobi Makmur Lestari since 2017. • Commissioner of PT Menthobi Hijau Lestari since 2022.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	He has no affiliations with any members of the Board of Commissioners, any other members of the Board of Directors, or the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Beliau tercatat memiliki kepemilikan saham di Perseroan sebanyak 4.159.239 lembar saham.	He owns 4,159,239 shares in the Company.

Bambang
Laksanawan

Direktur Commodity & Business Development
Director of Commodity & Business Development



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia.
Domisili Domicile	Jakarta.
Tempat dan Tahun Lahir Place and Year of Birth	Magelang, September 1971.
Usia Age	54 tahun per 31 Desember 2025. 54 years old as of December 31, 2025.

Masa Jabatan Term of Office	31 Maret 2021 – Sekarang. (Periode Pertama)	March 31, 2021 – Present. (First Term)
Tugas dan Tanggung jawab Duty and Responsibility	Direktur Commodity & Business Development memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyusun strategi pengembangan bisnis dan produk untuk mendukung sasaran pertumbuhan bisnis Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.	Director of Commodity & Business Development has the authority and responsibility to develop business and product development strategies to support the Company's business growth targets in accordance with established provisions.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 32 tanggal 31 Maret 2021.	Served as Director of the Company based on Deed of Meeting Resolution No. 32 dated March 31, 2021.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Menyelesaikan pendidikan S2 bidang Agrobisnis dari Institut Pertanian Bogor yang diperoleh pada tahun 2012, serta memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang pada tahun 1998.	Completed his Master's degree in Agribusiness from Bogor Agricultural Institute in 2012, and obtained a Bachelor's degree in Civil Engineering from University of 17 Agustus 1945, Semarang, in 1998.
Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	*Indonesia International Sustainability Forum* 2025, IPOC.	Indonesia International Sustainability Forum 2025, IPOC.
Riwayat Jabatan Career History	Beliau memiliki rekam jejak karier di berbagai posisi strategis, terutama di sektor agribisnis yakni antara lain: • Juni - November 2016: General Manager wilayah Sumut di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk., • 2014 – 2016: General Manager wilayah Kalteng di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk., • 2012 – 2014: Kepala Divisi Procurement di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk., • 2010 – 2012: Kepala Divisi Procurement & Logistic Oleochemical di PT Domba Mas, • 2008 – 2010: Manager Business Development di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk., • 2007 – 2008: Project Manager Pembangunan Kebun Jambi di di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk., • 2002 – 2007: Assistant – Manager Konversi Bina Program Plasma Sawit di PT Agrowiyana, Jambi, • 2000 – 2002: Teknis Survey & Perencanaan HPHA di PT Anugerah Alam Barito; serta • 1998 – 2000: Konsultan Perencanaan Program P3DT BAPPENAS.	He has a career track record in various strategic positions, especially in the agribusiness sector, including: • Juni - November 2016: General Manager for the North Sumatra region at PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. • 2014 – 2016: General Manager for the Central Kalimantan region at PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. • 2012 – 2014: Head of Procurement Division at PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. • 2010 – 2012: Head of Procurement & Logistic Oleochemical Division at PT Domba Mas. • 2008 – 2010: Business Development Manager at PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. • 2007 – 2008: Project Manager for the Development of Jambi Plantation at PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. • 2002 – 2007: Assistant-Manager for the Conversion of Plasma Palm Oil Program at PT Agrowiyana, Jambi. • 2000 – 2002: Technical Survey & Planning of HPHA at PT Anugerah Alam Barito. • 1998 – 2000: Planning Consultant for the P3DT Program at BAPPENAS.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, saat ini, beliau juga merangkap jabatan di Entitas Anak yakni sebagai Direktur Operasional di PT Menthobi Makmur Lestari (sejak 2016) serta sebagai Komisaris di PT Menthobi Transtitian Raya (sejak 2022).	In addition to serving as Director of the Company, he currently holds concurrent positions in Subsidiaries as Operational Director at PT Menthobi Makmur Lestari (since 2016) and as Commissioner at PT Menthobi Transtitian Raya (since 2022).
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	He has no affiliations with any members of the Board of Commissioners, any other members of the Board of Directors, or the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Beliau memiliki saham di Perseroan sebesar 4.059.239 lembar saham.	He owns 4,059,239 shares in the Company.

M. Arief Pahlevi Pangerang

Direktur Partnership & Sustainability
Director of Partnership & Sustainability



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia.
Domisili Domicile	Bekasi, Jawa Barat. Bekasi, West Java.
Tempat dan Tahun Lahir Place and Year of Birth	Ujung Pandang, 1968.
Usia Age	57 tahun per 31 Desember 2025. 57 years old as of December 31, 2025.

Masa Jabatan Term of Office	5 Agustus 2022 – Sekarang. (Periode Pertama)	August 5, 2022 – Present. (First Term)
Tugas dan Tanggung jawab Duty and Responsibility	Direktur Partnership & Sustainability memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola dampak dan tinjauan risiko pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial yang timbul akibat operasi Perseroan.	Duty and Responsibility: Director of Partnership & Sustainability has the authority and responsibility to manage the impacts and review the risks arising from the Company's operations across the economic, environmental, and social aspects.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 1 tanggal 5 Agustus 2022.	Served as Director of the Company in accordance with the Deed of Shareholders' Resolution No. 1 dated August 5, 2022.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1986.	Completed his undergraduate education in Economics from Trisakti University in 1986.
Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	*Indonesia International Sustainability Forum* 2025, IPOC.	Indonesia International Sustainability Forum 2025, IPOC.
Riwayat Jabatan Career History	Beliau memiliki rekam jejak dalam menduduki posisi strategis di berbagai sektor diantaranya sebagai: • 2014 – 2019: Ketua Komite Pembinaan Lembaga dan Badan-Badan Khusus di Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN); • 2013 – 2014: Ketua Umum di Induk Koperasi Unit Desa (INKUD); • 2015 - 2017: Ketua Umum di Koperasi Umrah dan Haji Indonesia (KUHINDO); • 2008 - 2012: Wakil Ketua Komite Tetap Industri UKM dan Industri Kreatif di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN); • 2004 – 2008: Wakil Ketua Komite Tetap Industri Perhotelan dan Restoran di KADIN; • 2000 – 2004: Wakil Ketua Komite Tetap Kelembagaan Pendanaan di KADIN.	He has a track record of holding strategic positions in various sectors, including: • 2014 – 2019: Chairman of the Committee for the Development of Institutions and Special Bodies at the Indonesian Cooperative Council (DEKOPIN). • 2013 – 2014: Chairman of Village Unit Cooperative Parent (INKUD). • 2015 - 2017: Chairman of Umrah and Haji Indonesia Cooperative (KUHINDO). • 2008 - 2012: Vice Chairman of the Permanent Committee for SMEs and Creative Industries at the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN). • 2004 – 2008: Vice Chairman of the Permanent Committee for the Hospitality and Restaurant Industry at KADIN. • 2000 – 2004: Vice Chairman of the Permanent Institutional Funding Committee at KADIN.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Selain menjabat Direktur Perseroan, saat ini, beliau juga merangkap jabatan di berbagai sektor agrobisnis dan perkoperasian diantaranya sebagai: • Komisaris di PT Menthobi Agro Raya (sejak 2023 – sekarang); • Komisaris di PT Menthobi Makmur Lestari (sejak 2022); • Ketua Umum di Koperasi Ika Teladan (Koptel) (sejak 2021 – sekarang); • Ketua Umum di Koperasi Umroh Haji Indonesia (Kuhindo) (sejak 2018 – sekarang); • Komisaris di PT Menthobi Makmur Lestari (sejak 2016 – sekarang); serta • Managing Director di PT Trinuggal Kharisma (sejak 2007 – sekarang).	In addition to serving as Director of the Company, he currently holds concurrent positions in various agribusiness and cooperative sectors, including: • Commissioner at PT Menthobi Agro Raya (since 2023 – Present). • Commissioner at PT Menthobi Makmur Lestari (since 2022); • Chairman of Ika Teladan Cooperative (Koptel) (since 2021 – Present). • Chairman of Umroh Haji Indonesia Cooperative (Kuhindo) (since 2018 – Present). • Commissioner at PT Menthobi Makmur Lestari (since 2016 – Present). • Managing Director at PT Trinuggal Kharisma (since 2007 – Present).
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	He has no affiliations with any members of the Board of Commissioners, any other members of the Board of Directors, or the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Beliau memiliki saham di Perseroan sebesar 4.159.239 lembar saham.	He owns 4,159,239 shares in the Company

Profil di Bawah Direksi

Profile Under The Board of Directors

Profil Wakil Direktur Utama

Deputy President Director Profile

Junidya Karina Fuad

Wakil Direktur Utama
Deputy President Director



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia.	
Domisili Domicile	Jakarta.	
Tempat dan Tahun Lahir Place and Year of Birth	Ujung Pandang, 1983.	
Usia Age	42 tahun per 31 Desember 2025. 42 years old as of December 31, 2025.	

Masa Jabatan Term of Office	23 Oktober 2024 – Sekarang. (Periode Pertama)	October 23, 2024 – Present. (First Term)
Tugas dan tanggung jawab Duties and Responsibilities	Bertanggung jawab untuk mendukung dan membantu Direktur Utama dalam menjalankan strategi bisnis, memastikan efektivitas operasional, serta mengembangkan kebijakan yang sejalan dengan Visi dan Misi Perusahaan.	Responsible for supporting and assisting the President Director in implementing business strategies, ensuring operational effectiveness, and developing policies that are in line with the Company's Vision and Mission.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 44 tanggal 23 Oktober 2024.	Served as Deputy President Director, in accordance with the Board of Directors Decree No. 44 dated October 23, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Hukum dari Universitas Trisakti pada tahun 2005, kemudian meraih gelar International Commercial Law dari University of Nottingham, Inggris, pada tahun 2009.	Completed her undergraduate education in Law from Trisakti University in 2005, then earned a degree in International Commercial Law from the University of Nottingham, England, in 2009.
Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	*Indonesia International Sustainability Forum* 2025, IPOC.	Indonesia International Sustainability Forum 2025, IPOC.
Riwayat Jabatan Career History	Sebelum mengemban jabatannya saat ini, beliau telah menduduki berbagai posisi strategis, yakni sebagai Deputy Chief Finance Officer (2020–2024) serta Chief Commercial Officer (2017–2020) di PT Menthobi Makmur Lestari. Selain itu, beliau juga memiliki rekam jejak profesional di bidang hukum sebagai Trademark and Litigation di Lawfirm Biro Oktroi Rooseno pada periode 2010–2014.	Before assuming her current position, she held various strategic positions, including Deputy Chief Finance Officer (2020–2024) and Chief Commercial Officer (2017–2020) at PT Menthobi Makmur Lestari. She also holds a professional legal record as a Trademark and Litigation Officer at Oktroi Rooseno Law Firm from 2010 to 2014.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Selain mengemban tugas sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, saat ini beliau juga memegang posisi strategis lainnya sebagai Direktur di PT Menthobi Makmur Lestari (sejak 2024) serta Komisaris di PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya (sejak 2023).	In addition to serving as Deputy President Director of the Company, she currently holds other strategic positions as Director at PT Menthobi Makmur Lestari (since 2024) and Commissioner at PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya (since 2023).
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dan utama baik langsung maupun tidak langsung, tetapi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya.	She has affiliations with controlling and major shareholders, both directly and indirectly, but does not have affiliations with other members of the Board of Directors or Board of Commissioners.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Beliau tidak memiliki saham di Perseroan.	She does not have any shares in the Company.

Profil Pejabat Eksekutif

Executive Officers Profile

Merujuk pada Struktur Organisasi terakhir, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk tidak mengalami perubahan susunan Pejabat Eksekutif selama tahun buku 2025. Adapun komposisi pejabat tersebut adalah sebagai berikut:

Referring to the latest Organizational Structure, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk did not experience any changes in the composition of Executive Officers during the 2025 financial year. The composition of these officers is as follows:



Ilhamd Fithriansyah

Head of Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta dan berusia 50 tahun per 31 Desember 2025. Saat ini, beliau menjabat sebagai Head of Corporate Secretary berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.002/Dir/MKTR/III/2022 tanggal 21 Maret 2022. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1999.

Selain Head of Corporate Secretary, saat ini, beliau juga mengemban tugas sebagai Corporate Legal Perseroan (sejak 2022) dan Head of Legal Department di PT Menthobi Makmur Lestari (sejak 2018). Pengalaman profesional beliau sebelumnya mencakup peran sebagai Head of Legal Department di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (2010–2018) serta Senior Associate di Konsultan Hukum Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co. (2002–2009). Beliau memiliki sertifikasi dan keahlian di bidang Legal dan Legitimasi, *Corporate Secretary*, serta Auditor ISPO.

Indonesian citizen residing in Jakarta, 50 years old as of December 31, 2025. He currently serves as Head of Corporate Secretary, as per the Board of Directors' Decree No. 002/Dir/MKTR/III/2022 dated March 21, 2022. He earned his Bachelor of Laws degree from the University of Indonesia in 1999.

In addition to being the Head of Corporate Secretary, he also serves as the Company's Corporate Legal (since 2022) and Head of Legal Department at PT Menthobi Makmur Lestari (since 2018). His previous professional experience includes roles as Head of Legal Department at PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (2010–2018) and Senior Associate at Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co. Legal Consultant (2002–2009). He holds certifications and expertise in Legal and Legitimacy, Corporate Secretary, and ISPO Auditor.



Anindito W. Wicaksono

Head of Corporate Communication

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Depok, dan berusia 42 tahun per 31 Desember 2025. Beliau resmi menjabat sebagai Head of Corporate Communication berdasarkan sejak November 2022. Beliau telah memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017.

Sebelum bergabung di Perseroan, beliau pernah menduduki jabatan di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk dengan berbagai posisi strategis dari tahun 2008–2016 seperti sebagai Corporate Procurement, Logistik Divisi Oleo Kimia, hingga Strategic Portfolio Investment & Business Development Analyst. Beliau juga memiliki keahlian dan tersertifikasi pada bidang *Investor Relation* yakni *Certified Investor Relation* (CIR) serta memperoleh *Certified Supply Chain Management* (CSCM) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Indonesian citizen residing in Depok, 42 years old as of December 31, 2025. He officially serves as Head of Corporate Communication since November 2022. He obtained a Master of Business Administration (MBA) degree from Gadjah Mada University in 2017.

Before joining the Company, he held various strategic positions at PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk from 2008 to 2016, including Corporate Procurement, Logistics of the Oleo Chemical Division, and Strategic Portfolio Investment & Business Development Analyst. He is also skilled and certified in Investor Relations, holding the Certified Investor Relations (CIR) designation, and has obtained the Certified Supply Chain Management (CSCM) designation from the National Professional Certification Agency (BNSP).



Rizki Amelia Lubis

Head of Corporate Human Resources & Quality Management System

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, dan berusia 47 tahun per 31 Desember 2025. Beliau menjabat sebagai Head of Corporate Human Resources berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 03/MKTR/SO-PRESDIR/I/2022 tanggal 01 Januari 2022. Beliau meraih gelar Master of Science di bidang Agronomi dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2008.

Saat ini, beliau juga mengemban tugas sebagai Head of HR & QMS di PT Menthobi Makmur Lestari sejak tahun 2016. Beliau menduduki berbagai posisi strategis seperti Marketing Manager di PT ASD-Bakrie Oil Palm Seed Indonesia (2015–2016) dan Manager of Strategic Investment Portfolio di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (2011–2016). Beliau memiliki keahlian di bidang Sumber Daya Manusia, dengan dukungan berbagai sertifikasi yang relevan.

Indonesian citizen residing in Jakarta, 47 years old as of December 31, 2025. She serves as Head of Corporate Human Resources pursuant to the Board of Directors' Decree Number 03/MKTR/SO-PRESDIR/I/2022 dated January 1, 2022. She earned a Master of Science degree in Agronomy from the Bogor Agricultural Institute in 2008.

She also serves as Head of HR & QMS at PT Menthobi Makmur Lestari since 2016. She held various strategic positions, including Marketing Manager at PT ASD-Bakrie Oil Palm Seed Indonesia (2015–2016) and Manager of the Strategic Investment Portfolio at PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (2011–2016). She has expertise in Human Resources, supported by various relevant certifications.



Bimantoro S.B. Sudibyo

Head of Corporate Internal Audit

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Yogyakarta dan berusia 41 tahun per 31 Desember 2025. Sejak tahun 2024, beliau dipercaya menjabat sebagai Head of Corporate Internal Audit di Perseroan. Beliau meraih gelar Sarjana Pertanian di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008.

Saat ini, beliau juga mengemban tugas sebagai Head Corporate Information System (sejak 2022) serta Head of Management Information System di PT Menthobi Makmur Lestari (sejak 2017). Sebelumnya beliau pernah menduduki posisi jabatan sebagai Surveyor Officer di PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk (2014–2017) dan Surveyor di Menthobi Makmur Lestari (2013–2014). Beliau memiliki keahlian dan telah tersertifikasi di bidang Internal Audit dan *Information System*.

Indonesian citizen residing in Yogyakarta, 41 years old as of December 31, 2025. Since 2024, he has been appointed Head of Corporate Internal Audit at the Company. He earned his Bachelor of Agriculture degree from Gadjah Mada University in 2008.

He also serves as Head of Corporate Information System (since 2022) and Head of Management Information System at PT Menthobi Makmur Lestari (since 2017). Previously, he held positions as a Surveyor Officer at PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk (2014–2017) and as a Surveyor at Menthobi Makmur Lestari (2013–2014). He has expertise and is certified in Internal Audit and Information Systems.



Danang Hari Anggara

Head of Corporate Commercial

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Kalimantan Tengah, dan berusia 49 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Head of Corporate Commercial Perseroan sejak Oktober 2024. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Merdeka, Malang pada tahun 1998.

Saat ini, beliau juga mengemban tugas sebagai Direktur di PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya (sejak 2023) dan sebagai Accounting Head di PT Menthobi Makmur Lestari (sejak 2007). Beliau memulai perjalanan kariernya di PT Agrowiyana sebagai Asisten Pembelian (2000–2003) dan Asisten Gudang (2004–2006). Selain itu, beliau memiliki keahlian serta sertifikasi khusus di bidang *Marketing*.

Indonesian citizen residing in Central Kalimantan, 49 years old as of December 31, 2025. He serves as Head of Corporate Commercial of the Company since October, 2024. He earned a Bachelor of Economics degree from Merdeka University in Malang in 1998.

He also serves as Director at PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya (since 2023) and as Accounting Head at PT Menthobi Makmur Lestari (since 2007). He started his career path at PT Agrowiyana as Purchasing Assistant (2000–2003) and Warehouse Assistant (2004–2006). In addition, he has specialized expertise and certifications in Marketing.



Adrial

General Manager Operational

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jambi dan berusia 55 tahun per 31 Desember 2025. Beliau menjabat sebagai General Manager Operasional sejak 2022. Beliau meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1993.

Saat ini, beliau juga mengemban tugas sebagai Manager Kebun di PT Menthobi Makmur Lestari sejak 2017. Sebelumnya, beliau memiliki pengalaman yang panjang sebagai Manager Kebun di PT Citra Borneo Indah (2014–2017) serta di Sinar Mas Group (2012–2014). Beliau memiliki keahlian serta memiliki sertifikasi di bidang pengelolaan agribisnis.

Indonesian citizen residing in Jambi, 55 years old as of December 31, 2025. He serves as General Manager of Operations since 2022. He earned a Bachelor of Agriculture degree from the University of North Sumatra in 1993.

He also serves as Plantation Manager at PT Menthobi Makmur Lestari since 2017. He previously held extensive experience as Plantation Manager at PT Citra Borneo Indah (2014–2017) and at Sinar Mas Group (2012–2014). He is skilled and certified in agribusiness management.



Taufiq Tarigan

Business Unit Head Seed Agro

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Sumatera Utara dan berusia 57 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Business Unit Head Seed Agro sejak 2022. Beliau meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 1993.

Saat ini, beliau juga mengemban tugas sebagai Head of Estate Agro Plasma Development di PT Menthobi Makmur Lestari (sejak 2018) dan Direktur PT Menthobi Agro Raya (sejak 2022). Sebelumnya di Perseroan, beliau menduduki berbagai jabatan di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, di antaranya sebagai General Manager Business Development and Strategic Investment Portfolio Project (2017) dan sebagai Seed Garden Division Head (2013–2017). Beliau memiliki keahlian dan tersertifikasi di bidang pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan pembibitan.

Indonesian citizen residing in North Sumatra, 57 years old as of December 31, 2025. He serves as Business Unit Head Seed Agro since 2022. He earned a Bachelor of Agriculture degree from the Islamic University of North Sumatra in 1993.

He also serves as Head of Estate Agro Plasma Development at PT Menthobi Makmur Lestari (since 2018) and Director of PT Menthobi Agro Raya (since 2022). Previously, he held various positions at PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, including General Manager of Business Development and Strategic Investment Portfolio Project (2017) and Head of Seed Garden Division (2013–2017). He is skilled and certified in oil palm plantation and nursery management.



Marta Candra

Business Head of Transportation

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jambi dan berusia 52 tahun per 31 Desember 2025. Beliau dipercaya menjabat sebagai Business Unit Head Transportation sejak 2022. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Bung Hatta pada tahun 1998.

Saat ini, beliau juga mengemban tugas sebagai Corporate Technical Engineer serta sebagai Corporate Strategy & Business Development di Perseroan (sejak 2023). Selain itu, Beliau juga menjabat sebagai Direktur di Entitas Anak yakni PT Menthobi Transtitian Raya sejak 2022. Beliau memiliki rekam jejak dalam bertugas di industri kelapa sawit, termasuk posisi strategis di PT SMART Tbk yakni sebagai Central Document and License Coordinator (2014–2015) dan Document and License Manager di PT Bahana Karya Semesta (2012–2014). Beliau juga pernah mendedikasikan kariernya di PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk pada berbagai posisi sejak tahun 2000. Beliau memiliki spesialisasi dan sertifikasi keahlian di bidang *engineering.*

Indonesian citizen residing in Jambi, 52 years old as of December 31, 2025. He was appointed as Business Unit Head of Transportation since 2022. He earned a Bachelor of Engineering degree from Bung Hatta University in 1998.

He also serves as Corporate Technical Engineer and as Corporate Strategy & Business Development at the Company (since 2023). In addition, he has been serving as Director of the Company's Subsidiary, PT Menthobi Transtitian Raya, since 2022. He has a track record in working on the palm oil industry, including strategic positions at PT SMART Tbk as Central Document and License Coordinator (2014–2015) and at PT Bahana Karya Semesta (2012–2014) as Document and License Manager. He has also been dedicating his career to PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk in various positions since 2000. He holds a specialization and expertise certification in engineering.



Dadan Ramdhani

Business Unit Head Green Business

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, dan berusia 40 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Business Unit Head Green Business di Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 03/MKTR/ SO/ IX/2023. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2010 serta Magister Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia pada tahun 2017.

Saat ini, beliau juga merangkap sebagai QHSE & Sustainability Section Head di PT Menthobi Makmur Lestari sejak 2017. Beliau memiliki pengalaman di bidang *Quality*, *Health*, *Safety*, *and Environment* (QHSE), seperti sebagai QHSE & Sustainability Specialist (2013–2017) dan QHSE Officer (2010–2013) di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Beliau memiliki keahlian dan tersertifikasi di bidang QHSE dan *Sustainability Specialist*.

Indonesian citizen residing in Jakarta, 40 years old as of December 31, 2025. He serves as Business Unit Head Green Business in the Company pursuant to the Board of Directors' Decree Number 03/ MKTR/ SO/IX/2023 He earned a Bachelor's degree in Chemical Engineering from the Islamic University of Indonesia in 2010 and a Master's degree in Environmental Science from the University of Indonesia in 2017.

He also serves as QHSE & Sustainability Section Head at PT Menthobi Makmur Lestari since 2017. He has experience in Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE), including as a QHSE & Sustainability Specialist (2013–2017) and a QHSE Officer (2010–2013) at PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. He has expertise and is certified as a QHSE and Sustainability Specialist.



Fandi Yuniawan

Head of Corporate Reporting & Control

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor dan berusia 42 tahun per 31 Desember 2025. Beliau menjabat sebagai Head of Corporate Reporting Control sejak 2023. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2006.

Saat ini, beliau juga mengemban tugas sebagai Reporting & Control Head di PT Menthobi Makmur Lestari (sejak 2021). Beliau pernah menduduki berbagai jabatan seperti Finance Operating & Tax Head, PT Menthobi Makmur Lestari (2014 – 2021) serta Finance Operating & Tax Head, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (2014 – 2016). Beliau memiliki keahlian dan tersertifikasi di bidang *Finance* dan *Reporting Control.*

Indonesian citizen residing in Bogor, 42 years old as of December 31, 2025. He serves as Head of Corporate Reporting Control since 2023. He earned a Bachelor of Economics degree from the Islamic University of Indonesia in 2006.

He also serves as Head of Reporting & Control at PT Menthobi Makmur Lestari (since 2021). He has held various positions, including Finance Operating & Tax Head at PT Menthobi Makmur Lestari (2014–2021) and at PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (2014–2016). He is skilled and certified in Finance and Reporting Control.



Mohammad Faizal Islami

Head of Corporate Finance & Tax

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bekasi, berusia 42 tahun per 31 Desember 2025. Beliau mengemban tugas sebagai Head of Corporate Finance & Tax sejak 2022. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE YKPN Yogyakarta pada tahun 2005.

Sebelumnya bergabung di Perseroan, beliau memiliki rekam jejak di bidang finance seperti Head of Corporate Finance di PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (2014–2022) dan Assistant Manager di Assurance and Advisory Business Services (AABS) di Ernst & Young (2012–2014). Beliau juga memiliki keahlian dan tersertifikasi resmi di bidang keuangan dan perpajakan.

Indonesian citizen residing in Bekasi, 42 years old as of December 31, 2025. He serves as Head of Corporate Finance & Tax since 2022. He earned a Bachelor of Economics degree from STIE YKPN Yogyakarta in 2005.

Before joining the Company, he had a track record in finance, working as Head of Corporate Finance at PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (2014–2022) and Assistant Manager of Assurance and Advisory Business Services (AABS) at Ernst & Young (2012–2014). He also holds expertise and official certifications in finance and taxation.



Ricky Wilastra
Head of Corporate Procurement

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta dan berusia 38 tahun per 31 Desember 2025. Beliau mengemban tugas sebagai Head of Corporate Logistic & Procurement sejak 2023. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2010.

Saat ini, beliau juga menduduki jabatan sebagai Senior Asisten Human Resources & General Affair di Entitas Anak (PT Menthobi Makmur Lestari) sejak 2018. Sebelumnya, beliau menduduki jabatan sebagai Asisten II di PT Menthobi Makmur Lestari (2012–2017) serta sebagai MT-8 General di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (2011–2012). Beliau memiliki keahlian tersertifikasi di bidang *Supply Chain Management*.

Indonesian citizen residing in Jakarta, 38 years old as of December 31, 2025. He serves as Head of Corporate Logistics & Procurement since 2023. He obtained his Bachelor of Industrial Engineering degree from the University of North Sumatra in 2010.

He also serves as Senior Assistant for Human Resources & General Affairs at the Company's Subsidiary (PT Menthobi Makmur Lestari) since 2018. Previously, he held the position of Assistant II at PT Menthobi Makmur Lestari (2012–2017) and MT-8 General at PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (2011–2012). He has certified expertise in Supply Chain Management.

Informasi Pemegang Saham
Shareholder Information

Komposisi Pemegang Saham Perseroan
Composition of The Company's Shareholders

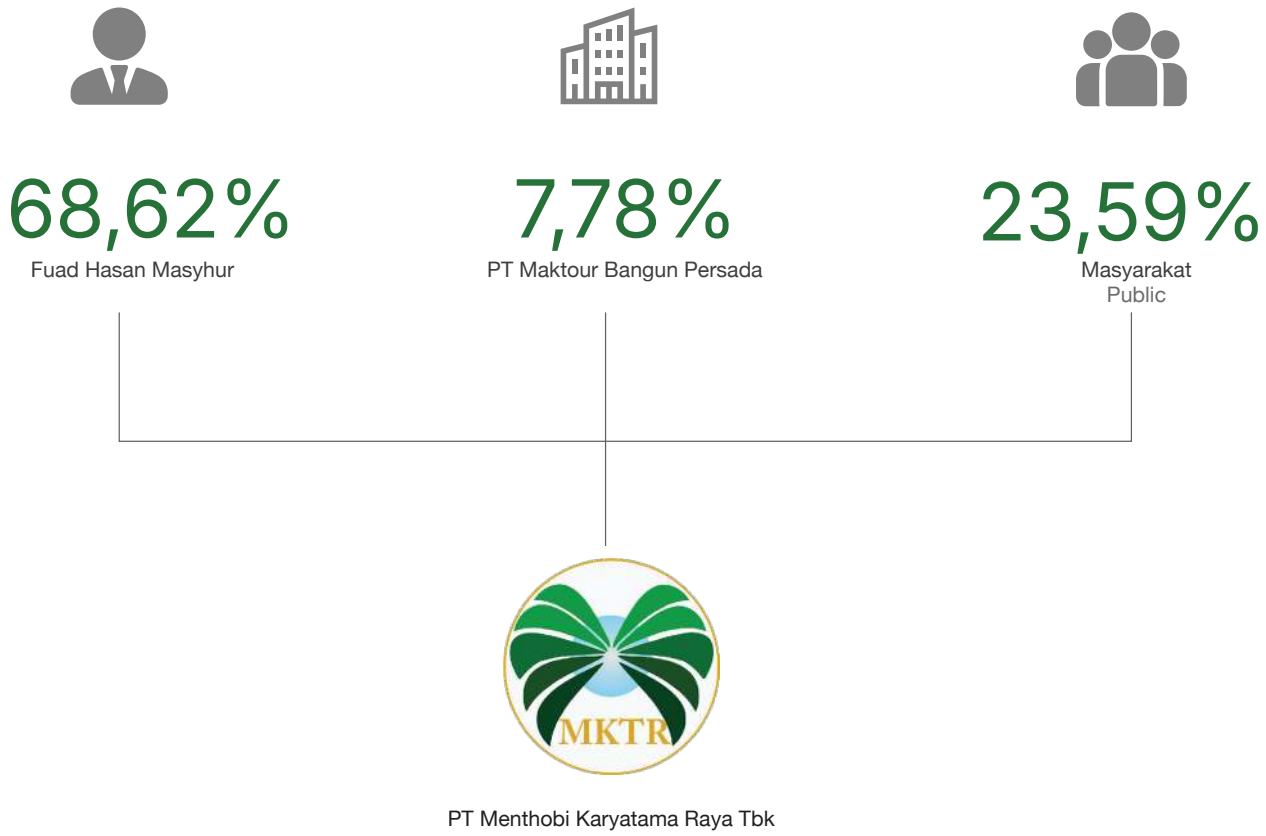
Per 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025 mengalami perubahan komposisi kepemilikan saham MKTR, berikut perubahan komposisi yang disampaikan pada tabel di bawah ini:

From January 1, 2025, to December 31, 2025, MKTR's share ownership composition changed. The following changes are presented in the table below:

Nama Pemegang Saham Shareholder Name	31 Desember 2024 December 31, 2024		31 Desember 2025 December 31, 2025	
	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares
Fuad Hasan Masyhur*	8.276.210.000	68,97%	8.276.210.000	68,62%
PT Maktour Bangun Persada*	938.790.000	7,82%	938.790.000	7,78%
Masyarakat** Public	2.831.509.169	22,41%	2.845.428.584	23,59%
Total	**12.052.397.422**	**100,00%**	**12.060.428.584**	**100,00%**

Keterangan :
* Merupakan Pemegang Saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham.
** Terdiri dari Pemegang Saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham.
Note:
* Shareholders who own 5% (five percent) or more shares.
** Shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares.

Komposisi Pemegang Saham MKTR Per 31 Desember 2025
MKTR Shareholder Composition as of December 31, 2025



Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Status Investor
Shareholders' Composition Based on Investor Status

Rincian komposisi pemegang saham berdasarkan status investor (domestik dan asing) pada awal tahun dan akhir tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Details of the shareholder composition based on investor status (domestic and foreign) at the beginning of the year and the end of 2025 are presented in the table below:

Kelompok Pemegang Saham Shareholder Group	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Total Lembar Saham Total Shares	Persentase Saham Percentage of Shares	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Total Lembar Saham Total Shares	Persentase Saham Percentage of Shares
Domestik Domestic						
Individu Individual	1.854	9.211.069.189	76,425%	2.332	9.222.153.717	76,466%
Institusi Institution	18	2.588.558.633	21,478%	19	2.631.937.367	21,823%
Subtotal	**1.872**	**11.799.627.822**	**97,903%**	**2.351**	**11.854.091.084**	**98,289%**
Asing Foreign						
Individu Individual	9	177.700	0,001%	7	209.400	0,002%
Institusi Institution	5	252.591.900	2,096%	7	206.128.100	1,709%
Subtotal	**14**	**252.769.600**	**2,097%**	**14**	**206.337.500**	**1,711%**
Total	**1.866**	**12.052.397.422**	**100,000%**	**2.365**	**12.060.428.584**	**100,000%**

Rincian komposisi pemegang saham menurut jenis investor disajikan dalam tabel berikut:

Details of the composition of shareholders by investor type are presented in the following table:

Kelompok Pemegang Saham Shareholder Group	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Total Lembar Saham Total Shares	Persentase Saham Percentage of Shares	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Total Lembar Saham Total Shares	Persentase Saham Percentage of Shares
Domestik Domestic						
Perorangan Nasional National Individual	1.854	9.211.069.189	76,43%	2.332	9.222.153.717	76,466%

Kelompok Pemegang Saham Shareholder Group	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Total Lembar Saham Total Shares	Persentase Saham Percentage of Shares	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Total Lembar Saham Total Shares	Persentase Saham Percentage of Shares
Perseroan Terbatas Limited Liability Company	17	2.588.558.533	21,43%	18	2.631.937.367	21,823%
Yayasan Dana Pensiun Pension Fund Foundation	1	100	0,00%	1	100	0,00%
Asuransi Insurance	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Lain-lain Others	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Luar Negeri **Overseas**						
Perorangan Asing Foreign Individual	9	177.700	0,001%	7	209.400	0,002%
Perseroan Terbatas Limited Liability Company	5	252.591.900	2,096%	7	206.128.100	1,709%
Total	**1.866**	**12.052.397.422**	**100,00%**	**2.365**	**12.060.428.584**	**100,000%**

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar
Composition of The 20 Largest Shareholders

Per 1 Januari hingga 31 Desember 2025, Komposisi 20 (dua puluh) Pemegang Saham terbesar disampaikan pada tabel di bawah ini:

As of January 1 to December 31, 2025, the composition of the 20 (twenty) largest shareholders is presented in the table below:

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Per 1 Januari 2025
Table of Composition of 20 Shareholders as of January 1, 2025

No.	Keterangan Description	Total Lembar Saham Total Shares	Persentase Saham Percentage of Shares
1.	Fuad Hasan Masyhur	8.276.210.000	68,67%
2.	PT Global Lasita Indonesia	578.875.000	4,80%
3.	PT Wijaya Kusuma Investasi	555.968.400	4,61%

No.	Keterangan Description	Total Lembar Saham Total Shares	Persentase Saham Percentage of Shares
4.	Adisty Ayu Pradita	439.903.800	3,65%
5.	PT Hijau Berkah Persada	419.016.500	3,48%
6.	H. Mawardi	359.948.200	2,99%
7.	Bank of Singapore Limited	155.500.000	1,29%
8.	Zurich Assets International Ltd	91.625.200	0,76%
9.	PT Gamajaya Global Grosir	36.118.467	0,30%
10.	PT Firstindo Finansial Corpora	25.000.000	0,21%
11.	PT Mitra Wiraswasta Indonesia	14.219.766	0,12%
12.	Lay Magdaleni Kartika	9.409.000	0,08%
13.	Harry M. Nadir	6.535.948	0,05%
14.	Ismail Adham	6.000.067	0,05%
15.	PT Berkah Alam Asri	5.292.700	0,04%
16.	Maybank Singapore Limited-921714000	5.000.000	0,04%
17.	M. Arief Pahlevi Pangerang	4.159.239	0,03%
18.	Wawan Sulistyawan	4.159.239	0,03%
19.	Bambang Laksanawan	4.059.239	0,03%
20.	Feisal Adli Samvara	3.946.100	0,03%

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Per 31 Desember 2025
Table of Composition of 20 Shareholders as of December 31, 2025

No.	Keterangan Description	Total Lembar Saham Total Shares	Persentase Saham Percentage of Shares
1.	Fuad Hasan Masyhur	8.276.210.000	68,67%
2.	PT Global Lasita Indonesia	572.548.200	4,75%
3.	PT Wijaya Kusuma Investasi	555.968.400	4,61%
4.	Irfah Lestari	440.503.800	3,65%

No.	Keterangan Description	Total Lembar Saham Total Shares	Persentase Saham Percentage of Shares
5.	PT Hijau Berkah Persada	395.397.200	3,28%
6.	H. Mawardi	359.948.200	2,98%
7.	SCB SG S/A Bank J. Safra Sarasin Ltd	154.500.000	1,28%
8.	PT Trukindo Persada Sejahtera	70.000.000	0,58%
9.	PT Berkah Alam Asri	58.573.300	0,49%
10.	Zurich Assets International Ltd	44.122.900	0,37%
11.	PT Firstindo Finansial Corpora	25.000.000	0,21%
12.	Lay Magdaleni Kartika	11.546.500	0,10%
13.	Haris Gunawan	9.204.500	0,08%
14.	Harry M. Nadir	6.535.948	0,05%
15.	Timotius Sahetapy	5.400.000	0,04%
16.	Maybank Singapore Limited-921714000	5.000.000	0,04%
17.	M. Arief Pahlevi Pangerang	4.159.239	0,03%
18.	Wawan Sulistyawan	4.159.239	0,03%
19.	Bambang Laksanawan	4.059.239	0,03%
20.	Martin Sunjaya	3.837.500	0,03%

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih
Composition of Shareholders With Shareholding 5% or More

Sepanjang tahun 2025, komposisi pemegang saham MKTR dengan kepemilikan saham 5% atau lebih pada awal tahun dan akhir tahun berdasarkan status kepemilikan akan disampaikan pada tabel di bawah ini.

Throughout 2025, the composition of MKTR shareholders with shareholding 5% or more at the beginning and end of the year, based on ownership status, is presented in the table below.

Nama Pemegang Saham Shareholder Name	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares
Domestik Domestic						
Pemegang Saham Kepemilikan 5% atau Lebih Shareholder with Shareholding 5% or More	2	9.215.000.000	76,46%	2	9.215.000.000	76,41%
Subtotal	**2**	**9.215.000.000**	**76,46%**	**2**	**9.215.000.000**	**76,41%**
Asing Foreign						
Pemegang Saham Kepemilikan 5% atau Lebih Shareholder with Shareholding 5% or More	-	-	-	-	-	-
Subtotal	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total	**2**	**9.215.000.000**	**76,46%**	**2**	**9.215.000.000**	**76,41%**

Sedangkan komposisi pemegang saham MKTR dengan kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih pada awal tahun dan akhir tahun akan disampaikan pada tabel berikut:

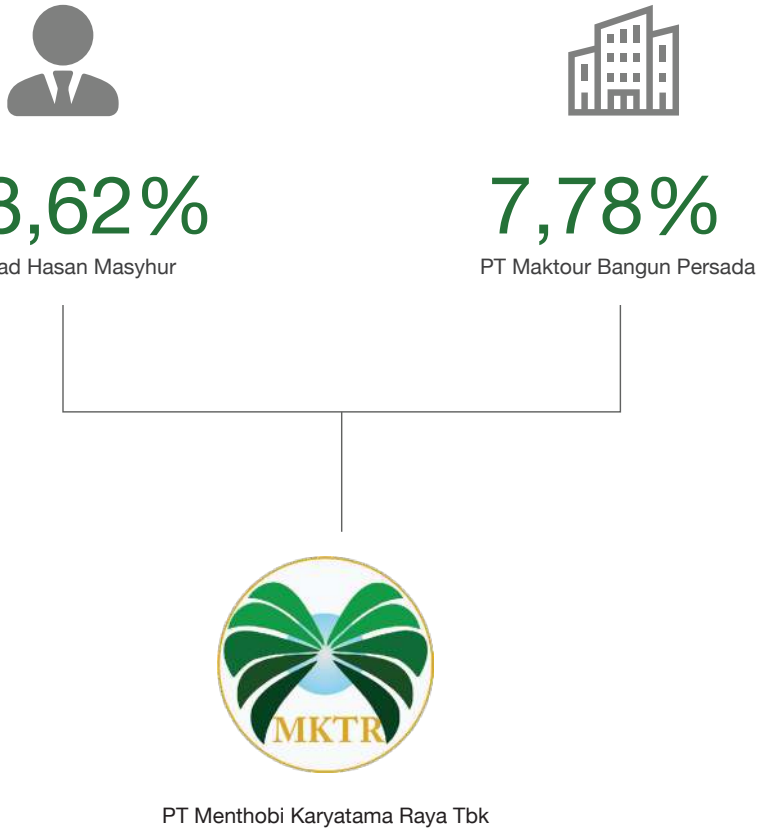
The composition of MKTR shareholders with shareholding 5% or more at the beginning and end of the year is presented in the following table:

Nama Pemegang Saham Shareholder Name	1 Januari 2025 January 1, 2025		31 Desember 2025 December 31, 2025	
	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares
Fuad Hasan Masyhur	8.276.210.000	68,67%	8.276.210.000	68,62%
PT Maktour Bangun Persada	938.790.000	7,79%	938.790.000	7,78%
Total	**9.215.000.000**	**76,46%**	**9.215.000.000**	**76,41%**

Berdasarkan data di atas, per 1 Januari hingga 31 Desember 2025, tidak ada perubahan pemegang saham pengendali Perseroan. Sepanjang tahun 2025, Bapak Fuad Hasan Masyhur, selaku Pemimpin Maktour Group merupakan Pemegang Saham Utama sekaligus Pengendali PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. Adapun struktur kepemilikan saham utama dan pengendali Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Based on the above data, there was no change in the Company's controlling shareholder from January 1 to December 31, 2025. Throughout 2025, Mr. Fuad Hasan Masyhur, as the Head of Maktour Group, was the Major Shareholder and Controller of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. The Company's major and controlling shareholding structure as of December 31, 2025, is as follows:

Struktur Kepemilikan Saham Utama dan Pengendali per 31 Desember 2025
Structure of Majority and Controlling Shareholding as of December 31, 2025



Kelompok/Klasifikasi Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan Saham Masing–Masing < 5%

Group/Classification of Public Shareholders with Respected Shareholding <5%

Selama tahun 2025, komposisi pemegang saham MKTR dengan kepemilikan saham kurang 5% pada awal tahun dan akhir tahun berdasarkan status kepemilikan disampaikan pada tabel di bawah ini.

In 2025, the composition of MKTR shareholders with shareholdings of less than 5% at the beginning and end of the year, based on ownership status, is presented in the table below.

Kelompok Pemegang Saham Shareholder Group	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares
Individu Individual						
Lokal Local	1.853	934.859.189	7,46%	2.331	945.943.717	7,85%
Asing Foreign	9	177.700	0,00%	7	209.400	0,00%
Institusi Institution						
Lokal Local	17	1.649.768.533	13,66%	18	1.693.147.367	14,04%
Asing Foreign	5	252.591.900	2,10%	7	206.128.100	1,71%
Total	**1.884**	**2.837.397.322**	**23,21%**	**2.363**	**2.845.428.584**	**23,60%**

Rincian komposisi pemegang saham < 5% menurut jenis investor disajikan dalam tabel berikut:

Details of the composition of shareholders with shareholding < 5% by investor type are presented in the following table:

Kelompok Pemegang Saham Shareholder Group	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares
Individu Individual						
Perorangan Indonesia Indonesian Individual	1.853	934.859.189	7,46%	2.331	945.943.717	7,85%
Perusahaan Company	9	177.700	0,00%	7	209.400	0,00%
Yayasan Dana Pensiun Pension Fund Foundation	9	177.700	0,00%	7	209.400	0,00%
Asuransi Insurance	9	177.700	0,00%	7	209.400	0,00%
Lain-lain Others	9	177.700	0,00%	7	209.400	0,00%

Kelompok Pemegang Saham Shareholder Group	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares
Luar Negeri Foreign						
Perorangan Asing Foreign Individual	9	177.700	0,00%	7	209.400	0,00%
Perusahaan Company	5	252.591.900	2,10%	7	206.128.100	1,71%
Total	**1.884**	**2.837.397.422**	**23,22%**	**2.363**	**2.845.428.684**	**23,60%**

Keterangan *: dihitung berdasarkan total lembar saham MKTR yang beredar sejumlah 12.052.397.422 lembar saham per 1 Januari 2025 dan sejumlah 12.060.428.584 lembar saham per 31 Desember 2025.
Sumber: Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Bima Registra.
Note *: Calculated based on MKTR's total outstanding shares of 12,052,397,422 as of January 1, 2025, and 12,060,428,584 as of December 31, 2025.
Source: Indonesia Central Securities Depository (KSEI) and PT Bima Registra.

Persentase Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Shareholding Percentage

Per 31 Desember 2025, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki 0,12% saham MKTR secara kumulatif. Berikut kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada awal tahun dan akhir tahun buku 2025 sebagaimana terlampir dalam tabel di bawah ini.

As of December 31, 2025, the Company's Board of Commissioners and Board of Directors cumulatively owned 0.12% of MKTR's shares. The following table shows the shareholdings of the Board of Commissioners and Board of Directors members in the Company, either directly or indirectly, at the beginning and end of the 2025 financial year.

Tabel Kepemilikan Saham Perseroan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Secara Langsung pada Awal Tahun dan Akhir Tahun Buku 2025
Table of Direct Ownership of Company Shares by Board of Commissioners and Board of Directors at the Beginning and End of the 2025 Financial Year

Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
		Klasifikasi Saham Share Classification	Jumlah Lembar Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares	Klasifikasi Saham Share Classification	Jumlah Lembar Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares
Dewan Komisaris Board of Commissioners							
Muhammad Rocky Masyhur	Komisaris Utama President Commissioner	Individu Individual	1.187.354	0,01%	Individu Individual	1.187.354	0,01%
Bambang Widodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Individu Individual	0	0,00%	Individu Individual	0	0,00%

Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
		Klasifikasi Saham Share Classification	Jumlah Lembar Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares	Klasifikasi Saham Share Classification	Jumlah Lembar Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares
M. Khaimadhif Kasyfillah	Komisaris Commissioner	Individu Individual	0	0,00%	Individu Individual	0	0,00%
Direksi **Board of Directors**							
Harry M. Nadir	Direktur Utama President Director	Individu Individual	6.535.948	0,05%	Individu Individual	6.535.948	0,05%
Wawan Sulistyawan	Direktur Director	Individu Individual	4.159.239	0,03%	Individu Individual	4.159.239	0,03%
Bambang Laksanawan	Direktur Director	Individu Individual	4.059.239	0,03%	Individu Individual	4.059.239	0,03%
M. Arief Pahlevi Pangerang	Direktur Director	Individu Individual	4.159.239	0,03%	Individu Individual	4.159.239	0,03%

Tabel Kepemilikan Saham Perseroan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Secara Tidak Langsung pada Awal Tahun dan Akhir Tahun Buku 2025

Tabel Kepemilikan Saham Perseroan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Secara Tidak Langsung pada Awal Tahun dan Akhir Tahun Buku 2025

Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
		Klasifikasi Saham Share Classification	Jumlah Lembar Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares	Klasifikasi Saham Share Classification	Jumlah Lembar Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**							
Muhammad Rocky Masyhur	Komisaris Utama President Commissioner	Individu Individual	Nihil None	Nihil None	Individu Individual	Nihil None	Nihil None
Bambang Widodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Individu Individual	Nihil None	Nihil None	Individu Individual	Nihil None	Nihil None
M. Khaimadhif Kasyfillah	Komisaris Commissioner	Individu Individual	Nihil None	Nihil None	Individu Individual	Nihil None	Nihil None
Direksi **Board of Directors**							
Harry M. Nadir	Direktur Utama President Director	Individu Individual	Nihil None	Nihil None	Individu Individual	Nihil None	Nihil None
Wawan Sulistyawan	Direktur Director	Individu Individual	Nihil None	Nihil None	Individu Individual	Nihil None	Nihil None
Bambang Laksanawan	Direktur Director	Individu Individual	Nihil None	Nihil None	Individu Individual	Nihil None	Nihil None
M. Arief Pahlevi Pangerang	Direktur Director	Individu Individual	Nihil None	Nihil None	Individu Individual	Nihil None	Nihil None

Kronologi Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia

Chronology of Share Listing on The Indonesia Stock Exchange

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*/IPO) dengan melepas saham pada tanggal 28 Oktober – 2 November 2022 yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 November 2022 dengan kode emiten MKTR.

Dalam melaksanakan Penawaran Umum Perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai langkah strategis dalam memperoleh akses modal ekspansi bisnis. Oleh karenanya terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka susunan modal saham dan pemegang saham MKTR sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham mengalami perubahan hingga per 31 Desember 2025, yang dapat disampaikan sebagai berikut:

The Company conducted an Initial Public Offering (IPO) on October 28 – November 2, 2022, which was listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on November 8, 2022, under the ticker MKTR.

The Initial Public Offering on the IDX is a strategic step in gaining access to capital for business expansion. Therefore, with the sale of all shares offered in the IPO, MKTR's share capital and shareholder composition before and after the Initial Public Offering changed as of December 31, 2025, as follows:

Tabel Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp10,- (Sepuluh Rupiah) Per Saham
Table of Registered Ordinary Shares with a Nominal Value of Rp10 (Ten Rupiah) Per Share

Keterangan Description	Sebelum Penawaran Umum Before Public Offering			Setelah Penawaran Umum hingga 31 Desember 2025 After Public Offering until December 31, 2025		
	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Nilai Nominar (Rp) Nominal Value (Rp)	Persentase Saham Percentage of Shares	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Nilai Nominar (Rp) Nominal Value (Rp)	Persentase Saham Percentage of Shares
Domestik Domestic						
Modal Dasar Authorized Capital	38.000.000.000	934.859.189		2.331	945.943.717	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Capital	9.500.000.000	95.000.000.000	100,00%	12.060.428.584	120.064.285.840	100,00%
Fuad Hasan Masyhur	8.276.210.000	8.276.210.000	87,12%	8.276.210.000	8.276.210.000	68,62%
PT Maktour Bangun Persada	938.790.000	9.387.900.000	9,88%	938.790.000	9.387.900.000	7,78%

Keterangan Description	Sebelum Penawaran Umum Before Public Offering			Setelah Penawaran Umum hingga 31 Desember 2025 After Public Offering until December 31, 2025		
	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Nilai Nominar (Rp) Nominal Value (Rp)	Persentase Saham Percentage of Shares	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Nilai Nominar (Rp) Nominal Value (Rp)	Persentase Saham Percentage of Shares
PT Mitra Wiraswasta Indonesia	285.000.000	2.850.000.000	3,00%	-	-	0,00%
Masyarakat Public	-	-	-	2.825.327.565	28.253.275.650	23,60%
Program ESA ESA Program	-	-	-	-	-	0,00%
Program MESOP MESOP Program	-	-	-	232.735.481	2.327.354.810	1,93%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Total Issued and Fully Paid-Up Capital	9.500.000.000	95.000.000.000	100,00%	12.060.428.584	120.064.285.840	100,00%

Adapun rincian kronologi pencatatan saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Details of the chronology of share listing before and after the Initial Public Offering are presented in the following table:

Tanggal Date	Kegiatan Utama Key Activity	Kronologi Chronology	Volume / Jumlah (Lembar) Percentage of Shares	Harga (Rp) Price (Rp)
28 Oktober – 2 Nov 2022 October 28 – November 2, 2022	IPO	Penawaran Umum Perdana Saham (Nominal Rp10) Initial Public Offering (Nominal Value of Rp10)	2.500.000.000	100 – 150
28 Oktober – 2 November 2022 October 28 – November 2, 2022	Waran Warrants	Penerbitan Waran Seri I (Nominal Rp10) Issuance of Series I Warrants (Nominal Value of Rp10)	2.500.000.000	100 – 150
28 November 2023 November 28, 2023	Konversi Waran Warrant Conversion	Pelaksanaan sisa Waran Seri I menjadi saham baru Exercise of remaining Series I Warrants into new shares	38	-
5 Juli 2024 July 5, 2024	ESA	Saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi karyawan berbasis saham Shares issued under the share-based employee compensation program	15.000.000	100 – 150

Tanggal Date	Kegiatan Utama Key Activity	Kronologi Chronology	Volume / Jumlah (Lembar) Percentage of Shares	Harga (Rp) Price (Rp)
5 Juli 2024 July 5, 2024	MESOP	Saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi manajemen berbasis saham Shares issued under the share-based management compensation program	950.000.000	100 – 150
5 Agustus 2024 August 5, 2024	PMTHMETD Private Placement	Penerbitan saham baru sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak) Memesan Efek Terlebih Dahulu. Issuance of new shares in connection with Private Placement.	285.000.000	165
Maret 2025 March 2025	Konversi Waran Warrant Conversion	Pelaksanaan sisa Waran Seri I menjadi saham baru Exercise of remaining Series I Warrants into new shares	135.403	-
Maret 2025 March 2025	MESOP	Pelaksanaan Program MESOP Implementation of the MESOP Program.	52.264.519	-

Berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 20 Maret 2025 yang dibuat oleh Notaris Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, Para pemegang saham MKTR menyetujui diantaranya sebagai berikut:

- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 135.403 lembar saham sehubungan dengan pelaksanaan konversi Waran Seri I;
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 52.264.519 lembar saham sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP.

Based on Notarial Deed No. 7 dated March 20, 2025, from Notary Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., in Jakarta, the MKTR shareholders agreed to, among other things:

- An increase in issued and fully paid-up capital of 135,403 shares in connection with the conversion of Series I Warrants;
- An increase in issued and fully paid-up capital of 52,264,519 shares in connection with the implementation of the MESOP Program.

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Listing

Sepanjang tahun buku 2025, Perseroan tidak menerbitkan instrumen keuangan lainnya seperti obligasi, sukuk, maupun obligasi konversi di bursa efek mana pun. Oleh karena itu, tidak ada informasi kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi, perubahan jumlah efek, nama bursa maupun peringkat efek lainnya.

Throughout the 2025 financial year, the Company did not issue any other financial instruments such as bonds, sukuk, or convertible bonds on any stock exchange. Therefore, there is no information on the listing chronology, types of corporate actions, changes in the number of securities, exchange names, or other security ratings.

Aksi Korporasi, Informasi Material, serta Informasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Corporate Actions, Material Information, and Information on Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions

Sepanjang tahun 2025, MKTR tidak melakukan pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus dan perubahan nilai nominal saham. Namun Perseroan melakukan pelaksanaan efek konversi dan pelaksanaan penambahan modal yang disampaikan dalam subbab Kronologi pencatatan saham dapat dilihat pada laporan tahunan ini.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 30 April 2024, Perseroan melakukan pembagian Dividen Tunai sebesar Rp18.212.913.950,-. Penjelasan terkait dividen juga diungkapkan pada subbab Pembagian Dividen.

Adapun untuk informasi transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan yang terjadi pada tahun buku 2025 dapat dilihat pada laporan tahunan ini.

Throughout 2025, MKTR did not implement stock splits, reverse stock mergers, bonus shares, or changes in share nominal value. However, the Company implemented conversion securities and capital increases, as outlined in the share listing chronology subsection can be seen in this annual report.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on April 30, 2024, the Company distributed a Cash Dividend of Rp18,212,913,950. An explanation regarding dividends is also disclosed in the Dividend Distribution sub-section.

Information on affiliated transactions and conflict-of-interest transactions that occurred in the 2025 financial year can be seen in this annual report.

Struktur Grup Perseroan dan Kepemilikan Entitas Anak

Corporate Group Structure and Ownership of Subsidiaries



PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)

99,78%

Komisaris Utama President Commissioner	:	M. Rocky Masyhur
Komisaris Commissioner	:	M. Arief Pahlevi Pangerang
Direktur Utama President Director	:	Harry M. Nadir
Direktur Directors	:	Bambang Laksanawan Wawan Sulistyawan M. Khairnadhif Kasyfillah Junidya Karina Fuad

PT Menthobi Agro Raya (MAR)

99,98%

Komisaris Commissioner	:	M. Arief Pahlevi Pangerang
Direktur Director	:	Taufiq Tarigan

PT Menthobi Hijau Lestari (MHL)

99,83%

Komisaris Commissioner	:	Wawan Sulistyawan
Direktur Director	:	Dadan Ramadhani

PT Menthobi Transititian Raya (MTR)

99,83%

Komisaris Commissioner	:	Bambang Laksanawan
Direktur Director	:	Marta Candra

PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya (KSO)

60%

Komisaris Utama President Commissioner	:	Noval Lukman M
Komisaris Commissioner	:	Junidya Karina Fuad
Direktur Director	:	Danang H. Anggara

Informasi Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
Information on Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)



Operating Since
2005

Rp1,25 Triliun
Total Assets

99,78%
Ownership

PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL) adalah anak perusahaan dengan kepemilikan saham sebesar 99,78%. Beroperasi sejak tahun 2005 di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, MMAL fokus pada kegiatan pembibitan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkualitas tinggi. Saat ini, MMAL mengelola lebih dari 6.000 hektare lahan tertanam dengan potensi pengembangan mencapai 1.800 hektar, didukung oleh profil tanaman yang produktif dengan rata-rata usia 10 tahun.

Sebagai bentuk komitmen terhadap praktik perkebunan yang berkelanjutan, MMAL telah menerapkan standar internasional sejak 2014. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan berbagai sertifikasi global, antara lain ISO 14001:2015, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, serta sertifikasi ISPO. Per 31 Desember 2025, PT Menthobi Makmur Lestari mencatatkan total aset sebesar Rp1,52 triliun.

PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL) is a subsidiary with a 99.78% shareholding. Operating since 2005 in Lamandau Regency, Central Kalimantan, MMAL focuses on cultivating and managing high-quality oil palm plantations. Currently, MMAL manages more than 6,000 hectares of planted land with development potential of up to 1,800 hectares, supported by a productive crop profile with an average age of 10 years.

As a commitment to sustainable plantation practices, MMAL has implemented international standards since 2014. This is evidenced by the ownership of various global certifications, including ISO 14001:2015, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, and ISPO certification. As of December 31, 2025, PT Menthobi Makmur Lestari recorded total assets of Rp1.52 trillion.

PT Menthobi Agro Raya (MAR)



Operating Since
2005

Rp1,52 Triliun
Total Assets

99,78%
Ownership

PT Menthobi Agro Raya (MAR) merupakan anak usaha dari PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dengan kepemilikan saham mencapai 99,98%. Beroperasi di Jakarta sejak tahun 2022, MAR fokus pada sektor perkebunan dengan spesialisasi pembibitan benih sawit bersertifikasi. Melalui kerja sama strategis dengan sumber benih resmi, Perseroan menjalankan proses pembibitan menggunakan standar kultur teknis agronomis di atas lahan milik sendiri.

Setiap benih dipelihara dan diseleksi secara cermat oleh tenaga ahli untuk menjamin produktivitas tinggi. Adapun ruang lingkup kegiatan usaha MAR meliputi:

a. **Penyediaan benih unggul** kelapa sawit bersertifikasi.
b. **Penjualan bibit kelapa sawit** siap tanam bersertifikasi.
c. **Layanan konsultasi perkebunan**, termasuk jasa foto udara dan pemetaan lahan.

Per 31 Desember 2025, total aset yang dikelola oleh PT Menthobi Agro Raya tercatat sebesar Rp9,66 miliar.

PT Menthobi Agro Raya (MAR) is a subsidiary of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, with a 99.98% stake. Operating in Jakarta since 2022, MAR focuses on the plantation sector, specializing in certified oil palm seed nurseries. Through strategic partnerships with authorized seed sources, the Company operates the nursery process using agronomic technical culture standards on its own land.

Each seed is carefully maintained and selected by experts to ensure high productivity. MAR's business activities include:

a. **Provision of** certified **superior** oil palm **seeds**.
b. **Sales of** certified ready-to-plant oil palm **seedlings**.
c. **Plantation consulting services**, including aerial photography and land mapping.

As of December 31, 2025, total assets managed by PT Menthobi Agro Raya amounted to Rp9.66 billion.

PT Menthobi Hijau Lestari (MHL)



Operating Since
2022

Rp55,94 Miliar
Total Assets

99,83%
Ownership

PT Menthobi Hijau Lestari (MHL) adalah anak perusahaan dengan kepemilikan saham sebesar 99,83% yang telah beroperasi sejak tahun 2022. Sebagai penyedia layanan terintegrasi (*Integrated Service*), MHL berfokus pada pengembangan bidang lingkungan, keberlanjutan (*sustainability*), sertifikasi, serta manajemen. Melalui pengolahan limbah yang bernilai tambah, MHL berperan strategis dalam mewujudkan industri hijau di sektor kelapa sawit. Hal ini sejalan dengan visi Perusahaan untuk menjadi "*Best Environmental Company and Sustainable Business*". Per 31 Desember 2025, total aset PT Menthobi Hijau Lestari tercatat sebesar Rp55,94 miliar.

PT Menthobi Hijau Lestari (MHL) is a subsidiary with a 99.83% shareholding that has been operating since 2022. As an integrated service provider, MHL focuses on environmental development, sustainability, certification, and management. Through value-added waste processing, MHL plays a strategic role in realizing a green industry in the palm oil sector. It aligns with the Company's vision to become the "Best Environmental Company and Sustainable Business". As of December 31, 2025, PT Menthobi Hijau Lestari's total assets amounted to Rp55.94 billion.

PT Menthobi Transtitian Raya (MTR)



Operating Since
2022

Rp28,34 Miliar
Total Assets

99,83%
Ownership

PT Menthobi Transtitian Raya (MTR) merupakan anak perusahaan dari PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dengan porsi kepemilikan saham mayoritas mencapai 99,83%. Beroperasi sejak tahun 2022, MTR mengkhususkan diri pada layanan transportasi dan penyediaan alat berat yang terintegrasi dengan teknologi manajemen transportasi modern. Peran strategisnya meliputi pengangkutan hasil produksi grup serta pengelolaan armada tangki CPO (*Crude Palm Oil*) guna memastikan efisiensi logistik Perseroan berjalan optimal. Komitmen Perusahaan dalam memperkuat infrastruktur dan kapasitas layanan logistiknya di sektor industri kelapa sawit.

Per 31 Desember 2025, PT Menthobi Transtitian Raya mencatatkan total aset sebesar Rp28,34 miliar.

PT Menthobi Transtitian Raya (MTR) is a subsidiary of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, with a 99.83% majority shareholding. Operating since 2022, MTR specializes in transportation services and heavy equipment provision, integrated with modern transportation management technology. Its strategic role includes transporting the group's production and managing its CPO (Crude Palm Oil) tank fleet to ensure optimal logistics efficiency. The Company is committed to strengthening its infrastructure and logistics service capacity in the palm oil industry.

As of December 31, 2025, PT Menthobi Transtitian Raya recorded total assets of Rp28.34 billion.

PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya (KSO)



Operating Since
2023

Rp130,68 Miliar
Total Assets

60%
Ownership

Pada tahun 2023, Perseroan resmi memperkuat portofolio bisnisnya melalui akuisisi PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya (KSO) dengan porsi kepemilikan saham sebesar 60%, sementara 40% sisanya dimiliki oleh Entitas Anak, PT Menthobi Makmur Lestari. KSO merupakan perusahaan pengolahan kelapa sawit strategis yang beroperasi di Desa Kujan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Fasilitas ini memiliki kapasitas produksi sebesar 30 TPH (Ton Per Jam) yang didukung penuh oleh infrastruktur komprehensif, mencakup lahan, bangunan sarana pelengkap, hingga rangkaian mesin dan peralatan operasional. Per 31 Desember 2025, total aset PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya tercatat sebesar Rp130,68 miliar.

The Company officially strengthened its business portfolio in 2023 through the acquisition of PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya (KSO), with a 60% shareholding, while a Subsidiary, PT Menthobi Makmur Lestari, owns the remaining 40%. KSO is a strategic palm oil processing company operating in Kujan Village, Lamandau Regency, Central Kalimantan. This facility has a production capacity of 30 TPH (Tons Per Hour) and is supported by comprehensive infrastructure, including land, buildings, supporting facilities, and a range of operational machines and equipment. As of December 31, 2025, PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya's total assets amounted to Rp130.68 billion.

Tabel Informasi Entitas Anak Per 31 Desember 2025
Table of Subsidiary Information as of December 31, 2025

No.	Nama Entitas Anak Name of Subsidiary	Bidang Usaha Line of Business	Kepemilikan Saham oleh Perseroan Share Ownership by the Company (%)	Total Aset Per 31 Desember 2024 (Juta Rupiah) Total Assets as of December 31, 2024 (Million Rupiah)	Status dan Tahun Beroperasi Status and Year of Operation	Lokasi Location
Kepemilikan Langsung **Direct Ownership**						
1.	PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)	Perkebunan dan Industri Pengolahan Plantation and Processing Industry	99,78%	1.658.769	Beroperasi, Sejak 2019 Operational since 2019	Kalimantan Tengah Central Kalimantan
2.	PT Menthobi Agro Raya (MAR)	Pembibitan dan Penjualan CPO Seed Cultivation and CPO Sales	99,98%	9.662	Beroperasi, Sejak 2023 Operational since 2023	Jakarta
3.	PT Menthobi Hijau Lestari (MHL)	Pengelolaan Limbah Waste Management	99,83%	55.492	Beroperasi, Sejak 2023 Operational since 2023	Jakarta
4.	PT Menthobi Transitian Raya (MTR)	Transportasi dan Logistik Transportation and Logistics	99,83%	28.345	Beroperasi, Sejak 2023 Operational since 2023	Jakarta
5.	PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya (KSO)	Industri Pengolahan Processing Industry	60,00%	130.682	Beroperasi, Sejak 2017 Operational since 2017	Kalimantan Tengah Central Kalimantan
Kepemilikan Tidak Langsung melalui MMAL **Indirect Ownership through MMAL**						
PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya (KSO)		Industri Pengolahan Processing Industry	40%	130.682	Beroperasi, Sejak 2017 Operational since 2017	Kalimantan Tengah Central Kalimantan

Sepanjang tahun buku 2025, Perseroan tidak memiliki entitas asosiasi maupun ventura bersama. Oleh karena itu, Laporan Tahunan ini tidak menyajikan informasi terkait nama entitas, persentase kepemilikan, bidang usaha, total aset, serta status operasional.

Throughout the 2025 financial year, the Company did not have any associated entities or joint ventures. Therefore, this Annual Report does not present information regarding the names of entities, ownership percentages, line of business, total assets, or operational status.

Alamat Kantor dan Entitas Anak

Address of Head Office and Subsidiary

Kantor Pusat
Head Office

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk.

Wisma Maktour Lt. 4
Jalan Otista Raya No. 80
Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Kode Pos: 13330
Telp: +62 21-50201035





Entitas Anak
Subsidiary

PT Menthobi Makmur Lestari

Jalan Trans Kalimantan Km 11,5, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah 74612

PT Menthobi Hijau Lestari
PT Menthobi Agro Raya
PT Menthobi Transtition Raya

Wisma Maktour Lt. 4, Jalan Otista Raya No. 80, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kode Pos: 13330.
Postal Code: 13330.
Telp: 021-50201035
Phone: 021-50201035

PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya

Desa Kujan – Batu Kotam, RT. 01, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah 74612

Keanggotaan Asosiasi

Address of Head Office and Subsidiary

Guna memastikan Perseroan senantiasa adaptif terhadap dinamika isu terkini dan memiliki sarana untuk menyampaikan aspirasi strategis, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk aktif berpartisipasi dalam berbagai asosiasi industri yang relevan. Keterlibatan ini juga ditujukan untuk mempererat sinergi dengan para pemangku kepentingan.

To ensure the Company remains adaptive to current issues and has the means to convey its strategic aspirations, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk actively participates in various relevant industry associations. This involvement also aims to strengthen synergies with stakeholders.

Per 31 Desember 2025, berikut adalah daftar asosiasi yang diikuti oleh Perseroan:

As of December 31, 2025, the following is a list of associations in which the Company is a member:

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)

Status di dalam Asosiasi : Anggota Aktif
Membership Status: Active Member
Skala : Nasional
Scale National

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)

Status di dalam Asosiasi : Anggota Aktif
Membership Status: Active Member
Skala : Nasional
Scale National

Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)

Status di dalam Asosiasi : Anggota Aktif
Membership Status: Active Member
Skala : Nasional
Scale National

Lembaga dan Profesional Penunjang Perusahaan

Institutions and Professionals Supporting The Company

Uraian Description	Nama Lembaga Penunjang Supporting Institution Name	Jasa Service	Periode Period	*Fee* (Juta Rupiah) Fee (Million Rupiah)
Akuntan Publik Public Accounting Firm	**Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno Palilingan & Rekan** (member PKF International) Kantor Pusat: 42nd Floor, UOB Plaza Building Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10, Jakarta Pusat 10230 Telp: (62-21) 29932121 (hunting) Fax: (62-21) 29932113	Melaksanakan audit laporan keuangan tahunan. Audit the annual financial statements.	Januari – Desember 2024 January – December 2024	Rp165.000.000 (Jasa Audit) (Audit Services)
Jasa yang diberikan: Melaksanakan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan memastikan laporan keuangan Perseroan telah memenuhi standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dalam pelaksanaan audit yang berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik agar hasil audit bebas dari kesalahan penyajian material. **Jasa dan *Fee* Non Audit:** Tidak Ada **Services provided:** Auditing the Company's consolidated financial statements and ensuring that they meet financial accounting standards in Indonesia. The audit refers to the Institute of Public Accountants standards to ensure the audit results are free from material misstatement. **Non-Audit Services and Fees:** None				
Notaris Notary	**Dr. Yurisa Martanti, SH, MH** Jl. Matahari I, Blok 1.3 No. 43 Malaka Asri, Duren Sawit Jakarta Timur, 13440	Menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum atau membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Prepare and make deeds in the context of a Public Offering or amend the Company's Articles of Association	Januari – Desember 2024 January – December 2024	Rp50.000.000
Jasa yang diberikan: Menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk membuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa, serta akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). **Services provided:** Preparing and drafting deeds in the context of changing all of the Company's Articles of Association, including making deeds of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) and Extraordinary GMS, as well as deeds of Statement of Meeting Resolutions (PKR).				
Pencatatan Saham Stock Listing	Bursa Efek Indonesia Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53, Jakarta 12190, Telp: (+6221) 515 0515 Fax: (+6221) 515-033	Melakukan Pencatatan saham perdana. Implement initial stock listing.	Januari – Desember 2024 January – December 2024	Rp329.626.500

Uraian Description	Nama Lembaga Penunjang Supporting Institution Name	Jasa Service	Periode Period	*Fee* (Juta Rupiah) Fee (Million Rupiah)
Jasa yang diberikan: Melakukan pengelolaan administrasi dari penerbitan saham dan waran yang telah ditawarkan kepada Publik. **Services provided:** Managing the administration of issuing shares and warrants offered to the public.				
Biro Administrasi Efek Securities Administration Bureau	**PT Bima Registra** Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 No.5, Jakarta Selatan 12950	Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data- data pemesanan Saham. Coordinate with the Underwriter and Underwriting Manager regarding the ordering data for shares.	Januari – Desember 2024 January – December 2024	Rp104.819.850

Jasa yang diberikan:
- Melakukan pemeliharaan data, penyajian Daftar Pemegang Saham (DPS), dan laporan bulanan;
- Membantu penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dalam hal penyajian DPS per *recording date*, daftar hadir, serta membantu perhitungan suara pada RUPS; dan
- Membantu pelaksanaan pembayaran dividen interim dan dividen final dalam hal penyajian DPS per *recording date*, serta penghitungan besaran dividen dan pajak untuk setiap Pemegang Saham.

Services provided:
- Maintaining data, presenting the List of Shareholders (DPS), and monthly reports;
- Assisting in organizing the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders in terms of presenting the List of Shareholders per recording date, attendance list, and assisting in counting votes at the General Meeting of Shareholders (GMS); and
- Assisting in implementing interim and final dividend payments in terms of presenting the List of Shareholders per recording date, as well as calculating the amount of dividends and taxes for each Shareholder.

Informasi Pada Jumlah Karyawan

Employee Information

Per akhir tahun 2025, jumlah tenaga kerja Perseroan dan Entitas Anak tercatat sebanyak 1.353 karyawan. Angka ini menunjukkan pertumbuhan/penurunan sebesar 1,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.328 orang. Peningkatan/Penurunan jumlah personel tersebut selaras dengan ekspansi kapasitas operasional pabrik serta pemenuhan kebutuhan manajerial di Entitas Anak.

Adapun rincian komposisi karyawan berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, kelompok usia, status kepegawaian, fungsi operasional, dan wilayah kerja disampaikan pada tabel berikut:

As of the end of 2025, the Company's and its Subsidiaries' total workforce was 1.353 employees. This figure shows a growth/decrease of 1.9% compared to the previous year, when there were 1.328 employees. This increase/decrease in personnel is in line with the expansion of factory operational capacity and the fulfillment of managerial needs at the Subsidiaries.

The following table details the employee composition based on education level, position, age group, employment status, operational function, and work area:

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Level Jabatan [S-01]
Table of Employee Composition by Position Level [S-01]

Level Jabatan Position Level	Gender	31 Desember 2025 December 31, 2025		31 Desember 2024 December 31, 2024	
		(Jumlah) (Number)	(%)	(Jumlah) (Number)	(%)
Entry Level	Laki-Laki Male	1.013	92,94%	994	74,85%
	Perempuan Female	256	23,49%	250	18,83%
Mid Level	Laki-Laki Male	49	4,5%	49	3,69%
	Perempuan Female	5	0,46%	5	0,38%
Senior Level	Laki-Laki Male	21	1,93%	21	1,58%
	Perempuan Female	1	0,09%	1	0,08%
Executive Level	Laki-Laki Male	7	0,64%	7	0,53%
	Perempuan Female	0	0%	0	0,00%
Total Seluruh Karyawan **Total Number of Employees**		**1.352**		**1.328**	

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status Hubungan Kerja
Table of Employee Composition by Employment Status

Jenjang Hubungan Kerja Employment Status	31 Desember 2025 December 31, 2025						31 Desember 2024 December 31, 2024					
	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	KSO	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	KSO
Tetap Permanent	20	409	2	2	30	67	20	437	3	2	32	73
Tidak Tetap Non-Permanent	2	692	42	21	55	11	2	640	42	24	44	9
Total Karyawan Per Perusahaan **Total Employees Per Company**	22	1.101	44	23	85	78	**22**	**1.077**	**45**	**26**	**76**	**82**
Total Seluruh Karyawan **Total Number of Employees**	**1.353**						**1.328**					

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan
Table of Employee Composition by Education Level

Jenjang Pendidikan Education Level	31 Desember 2025 December 31, 2025						31 Desember 2024 December 31, 2024					
	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	KSO	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	KSO
Pasca Sarjana (S2) Postgraduate (Master's Degree)	3	3	2	0	0	0	3	1	2	0	0	0
Sarjana (S1) Bachelor's Degree	17	66	6	3	3	5	17	66	6	3	3	5
Diploma III	2	9	1	0	1	0	2	9	1	0	1	0
Diploma II	0	4	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1
Diploma I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SMA High School	0	322	0	16	71	42	0	313	0	18	62	44
SMP Junior High School	0	89	28	3	6	26	0	81	28	4	6	28
SD Elementary School	0	608	7	1	4	4	0	603	8	1	4	4
Total Karyawan Per Perusahaan **Total Employees Per Company**	22	1.101	44	23	85	78	**22**	**1.077**	**45**	**26**	**76**	**82**
Total Seluruh Karyawan **Total Number of Employees**	**1.353**						**1.328**					

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen
Table of Employee Composition by Management Level

Jenjang Manajemen Management Level	31 Desember 2025 December 31, 2025						31 Desember 2024 December 31, 2024					
	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	KSO	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	KSO
Executive Level	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Kepala Divisi Head of Division	2	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	0
Kepala Departemen Head of Department	8	12	1	0	1	1	8	12	1	0	1	1
Staf Support Support Staff	2	36	1	1	1	4	2	36	1	1	1	4
Staf Operasional Operational Staff	3	34	1	1	0	5	3	34	1	1	0	5

Jenjang Manajemen Management Level	31 Desember 2025 December 31, 2025						31 Desember 2024 December 31, 2024					
	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	KSO	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	KSO
Supervisi Operasional Operational Supervision	0	43	2	3	5	4	0	43	2	3	4	4
Tenaga Operasional Operational Workforce	0	975	38	17	77	64	0	951	39	20	69	68
Total Karyawan Per Perusahaan **Total Employees Per Company**	22	1.101	44	23	85	78	**15**	**1.077**	**45**	**26**	**76**	**82**
Total Seluruh Karyawan **Total Number of Employees**	**1.353**						**1.328**					

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia [S-02]
Table of Employee Composition by Age Level [S-02]

Jenjang Usia Age Level	31 Desember 2025 December 31, 2025						31 Desember 2024 December 31, 2024					
	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	KSO	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	KSO
> 55 Tahun > 55 Years old	9	31	1	1	2	1	9	28	1	1	2	1
45-55 Tahun 45-55 Years old	9	266	5	4	13	17	8	262	5	4	12	18
35-44 Tahun 35-44 Years old	4	448	25	7	28	31	5	441	25	8	26	32
25-34 Tahun 25-34 Years old	0	324	13	11	39	27	0	317	14	13	34	29
18-24Tahun 18-24 Years old	0	32	0	0	3	2	0	29	0	0	2	2
Total Karyawan Per Perusahaan **Total Employees Per Company**	22	1.101	44	23	85	78	**22**	**1.077**	**45**	**26**	**76**	**82**
Total Seluruh Karyawan **Total Number of Employees**	**1.353**						**1.328**					

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia dan Level Jabatan [S-02]
Table of Employee Composition by Age Level and Position Level [S-02]

Jenjang Usia Age Level	31 Desember 2025 December 31, 2025								Total Karyawan Total Employees
	Entry Level		*Mid-Level*		*Senior-Level*		*Executive Level*		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
> 55 Tahun > 55 Years old	19	6	0	0	3	0	7	0	35
45-55 Tahun 45-55 Years old	125	34	12	0	10	1	0	0	182
35-44 Tahun 35-44 Years old	316	102	25	4	9	0	0	0	456
25-34 Tahun 25-34 Years old	416	93	19	2	0	0	0	0	530
18-24 Tahun 18-24 Years old	123	27	0	0	0	0	0	0	150

Jenjang Usia Age Level	31 Desember 2024 December 31, 2024								Total Karyawan Total Employees
	Entry Level		*Mid-Level*		*Senior-Level*		*Executive Level*		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
> 55 Tahun > 55 Years old	19	6	0	0	3	0	7	0	35
45-55 Tahun 45-55 Years old	125	34	10	0	10	1	0	0	180
35-44 Tahun 35-44 Years old	314	99	23	3	8	0	0	0	447
25-34 Tahun 25-34 Years old	410	91	17	1	0	0	0	0	519
18-24 Tahun 18-24 Years old	121	26	0	0	0	0	0	0	147

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama
Table of Employee Composition by Key Activity

Aktivitas Utama Key Activity	31 Desember 2025 December 31, 2025						31 Desember 2024 December 31, 2024					
	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	KSO	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	KSO
Executive Management	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Produksi Production	0	821	37	19	62	62	0	805	38	21	59	64
Sales & Marketing	1	3	1	0	0	1	1	3	1	0	0	1
Accounting & Finance	4	15	1	1	1	1	4	15	1	1	1	1
HRD & GA (Human Resources Development & General Affairs)	2	26	0	0	0	1	2	26	0	0	0	1
Legal	2	4	0	0	0	1	2	4	0	0	0	1
Logistics & Procurement	1	5	0	0	0	2	1	5	0	0	0	2
Lain-lain Others	5	227	5	3	22	10	5	219	5	4	16	12
Total Karyawan Per Perusahaan **Total Employees Per Company**	22	1.101	44	23	85	78	**15**	**1.077**	**45**	**26**	**76**	**82**
Total Seluruh Karyawan **Total Number of Employees**	**1.353**						**1.328**					

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi
Table of Employee Composition by Location

Lokasi Location	31 Desember 2025 December 31, 2025						31 Desember 2024 December 31, 2024					
	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	KSO	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	KSO
Jakarta	20	25	2	2	2	0	20	25	2	2	2	0
Kalimantan	1	1.077	42	21	83	78	1	1.052	44	24	74	82
Total Karyawan Per Perusahaan **Total Employees Per Company**	21	1.102	44	23	85	78	**21**	**1.077**	**46**	**26**	**76**	**82**
Total Seluruh Karyawan **Total Number of Employees**	**1.353**						**1.328**					

Komposisi Karyawan Menurut Jenis Kelamin
Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin Gender	31 Desember 2025 December 31, 2025						31 Desember 2024 December 31, 2024					
	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	KSO	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	KSO
Laki-Laki Male	18	867	41	18	77	72	18	848	42	20	72	75
Perempuan Female	4	234	3	5	8	6	4	229	3	6	4	7
Total Karyawan Per Perusahaan **Total Employees Per Company**	22	1.101	44	23	85	78	**22**	**1.077**	**45**	**26**	**76**	**82**
Total Seluruh Karyawan **Total Number of Employees**	**1.353**						**1.328**					

Adapun penjelasan singkatan pada nama Perusahaan yakni:
Below are the abbreviations and full names:

MKTR : PT Menthobi Karyatama Raya Tbk.
MMAL : PT Menthobi Makmur Lestari.
MHL : PT Menthobi Hijau Lestari.
MAR : PT Menthobi Agro Raya.
MTR : PT Menthobi Transtitian Raya.
KSO : PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Training and Competency Development

Sebagai bentuk komitmen dalam menghadapi tantangan industri dan pemenuhan aspek profesionalisme, Perseroan telah membekali jajaran manajemen dan unit pendukung dengan pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2025. Partisipasi Dewan Komisaris, Direksi, serta organ pendukung lainnya terangkum dalam tabel berikut:

As a commitment to addressing industry challenges and upholding professionalism, the Company has provided competency development for its management and supporting units throughout 2025. The participation of the Board of Commissioners, Board of Directors, and other supporting bodies is outlined in the following table:

Pengembangan Kompentensi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Competency Development

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Sepanjang Tahun 2025
Table of Board of Commissioners Competency Development Throughout 2025

No.	Nama Peserta Participant Name	Nama Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Penyelenggara Organizer	Periode Penyelenggara Participation Period
1.	M. Rocky Masyhur	*Indonesia Palm Oil Conference* 2025, IPOC	GAPKI	12-14 November 2025 November 12-14, 2025
2.	Bambang Widodo	*Good Corporate Governanace*	GAPKI	12-14 November 2025 November 12-14, 2025
3.	M. Khairnadhif Kasyfillah	*Indonesia Palm Oil Conference* 2025, IPOC	GAPKI	12-14 November 2025 November 12-14, 2025

Pengembangan Kompentensi Direksi
Board of Directors Competency Development

Tabel Pengembangan Kompetensi Direksi Sepanjang Tahun 2025
Table of Board of Directors Competency Development Throughout 2025

No.	Nama Peserta Participant Name	Nama Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Penyelenggara Organizer	Periode Penyelenggara Participation Period
1.	Harry M. Nadir	*Indonesia Palm Oil Conference* 2025, IPOC	GAPKI	12-14 November 2025 November 12-14, 2025
2.	Bambang Laksanawan	*Indonesia Palm Oil Conference* 2025, IPOC	GAPKI	12-14 November 2025 November 12-14, 2025
3.	Wawan Sulistyawan	*Indonesia Palm Oil Conference* 2025, IPOC	GAPKI	12-14 November 2025 November 12-14, 2025
4.	M. Arief Pahlevi Pangerang	*Indonesia Palm Oil Conference* 2025, IPOC	GAPKI	12-14 November 2025 November 12-14, 2025
		Conference Indonesia International Sustainability Forum.	ISF (*Indonesia Sustainability Forum*)	10-11 Oktober 2025 October 10-11, 2025

Pengembangan Kompentensi Komite Audit
Audit Committee Competency Development

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Audit Sepanjang Tahun 2025
Table of Audit Committee Competency Development Throughout 2025

No.	Nama Peserta Participant Name	Nama Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Penyelenggara Organizer	Periode Penyelenggara Participation Period
1.	Bambang Widodo	Pengembangan kompetensi beliau telah dijelaskan pada bagian pengembangan kompetensi Dewan Komisaris pada laporan tahunan ini. His competency development has been explained in the Board of Commissioners competency development section of this annual report.		

No.	Nama Peserta Participant Name	Nama Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Penyelenggara Organizer	Periode Penyelenggara Participation Period
2.	Tulus Setiawan	*Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)*	Eksternal External	2025
		International tax conference 2025 - navigating international tas complexities in the age of technology innovation and economic volatility	Eksternal External	2025
3.	Lilik Qusairy	Konservasi Tanah dan Air serta Manajemen Unsur Hara Untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa Sawit Soil and Water Conservation and Nutrient Management to Increase Oil Palm Production	IPB	8 April 2025 April 8, 2025

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Competency Development

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi Sepanjang Tahun 2025
Table of Nomination and Remuneration Committee Competency Development Throughout 2025

No.	Nama Peserta Participant Name	Nama Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Penyelenggara Organizer	Periode Penyelenggara Participation Period
1.	Rudi Sarwono	Renumerasi Berbasis Kinerja Performance-Based Compensation	Internal	6 Oktober 2025 October 6, 2025
		Remuneration Management Training	Internal	2024
2.	Rizki Amelia Lubis	*Conference Indonesia International Sustainability Forum.*	ISF (*Indonesia Sustainability Forum*)	10-11 Oktober 2025 October 10-11, 2025
		Renumerasi Berbasis Kinerja Performance-Based Compensation	Internal	6 Oktober 2025 October 6, 2025

Pengembangan Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Development

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Sepanjang Tahun 2025
Table of Corporate Secretary Competency Development Throughout 2025

No.	Nama Peserta Participant Name	Nama Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Penyelenggara Organizer	Periode Penyelenggara Participation Period
1.	Ilhamd Fithriansyah	Peran dan strategi *corporate secretary* The Role and Strategies of the Corporate Secretary	ICSA	2024
2.	Anindito W Wicaksono	Peran *Corporate Secretary* dalam Era AI dan Reputasi Digital The Role of the Corporate Secretary in the Age of AI and Digital Reputation	ICSA	20 November 2025 November 20,2025

Pengembangan Unit Internal Audit
Internal Audit Development

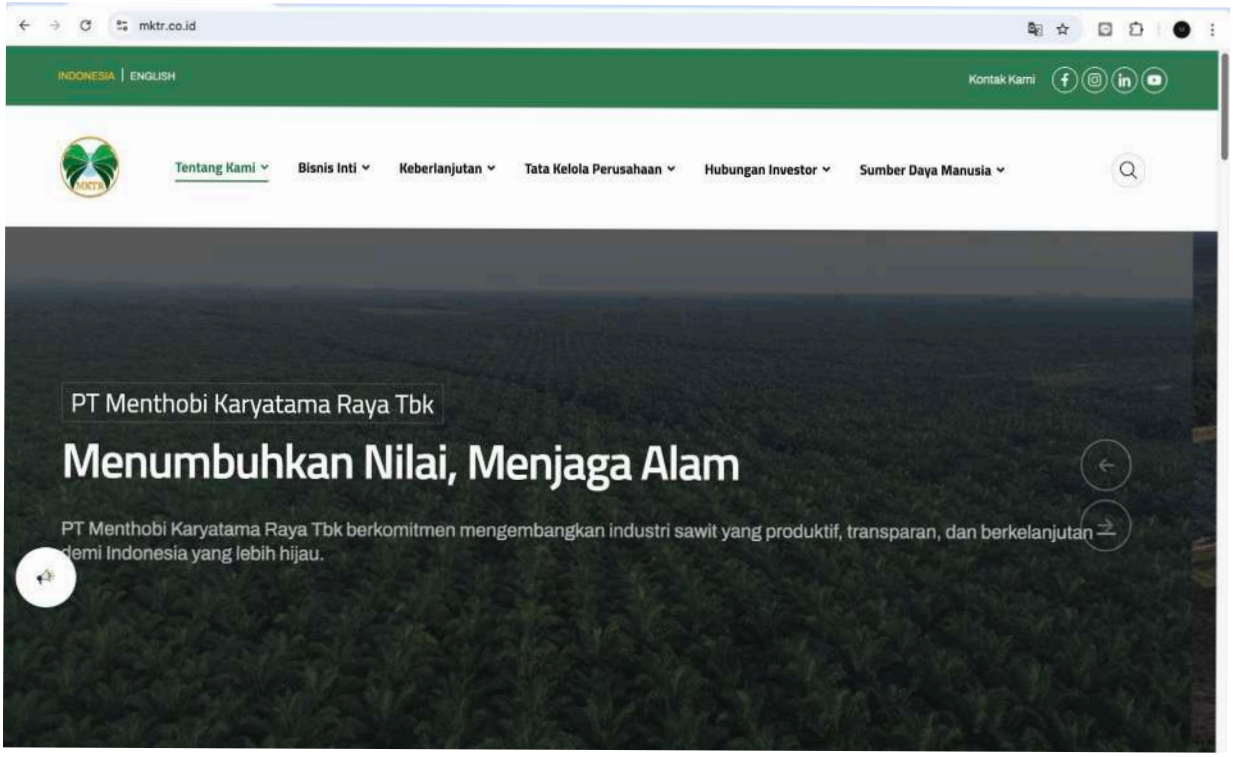
Tabel Pengembangan Kompetensi Unit Internal Audit Sepanjang Tahun 2025
Table of Internal Audit Competency Development Throughout 2025

No.	Nama Peserta Participant Name	Nama Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Penyelenggara Organizer	Periode Penyelenggara Participation Period
1.	Bimantoro SB Sudibyo	Pelatihan Bimtek internal audit Internal Audit Training Workshop	Internal MKTR	13 November 2025 November 13,2025



Informasi Pada *Website* Perseroan

Information on The Company's Website



www.mktr.co.id

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan berkomitmen penuh terhadap transparansi informasi. Perseroan menyajikan data komprehensif yang mencakup kinerja keuangan, operasional, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan melalui situs resmi *www.mktr.co.id*.

Untuk memudahkan akses bagi seluruh pemangku kepentingan, situs web Perseroan hadir dengan desain interaktif dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) yang senantiasa diperbarui secara berkala. Inisiatif keterbukaan informasi ini merupakan langkah strategis Perseroan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat dan para pemegang saham. Adapun informasi yang tersedia meliputi:

In accordance with OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies, the Company is fully committed to information transparency. The Company presents comprehensive data covering financial performance, operations, and corporate social responsibility programs through its official website at www.mktr.co.id.

To facilitate access for all stakeholders, the Company's website features an interactive design in two languages (Indonesian and English) and is regularly updated. This information disclosure initiative is a strategic step for the Company to strengthen public and shareholder trust. The information available includes:

Informasi Kanal Web Page Information	Penjelasan Description	Poin-Poin Kanal Channel Points

Tentang Kami
About Us
	Kanal ini menyajikan informasi komprehensif mengenai profil perusahaan, mulai dari visi, misi, nilai-nilai, hingga sejarah pencapaian penting Perseroan. Selain itu, tersedia pula mengenai struktur organisasi dan kepemilikan, struktur grup terdiri: profil jajaran Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat pula informasi anak perusahaan, hingga perolehan penghargaan dan keanggotaan dalam berbagai asosiasi nasional.
	
	This channel provides comprehensive information about the company's profile, including its vision, mission, and values, as well as its history of significant achievements. It also includes information about the company's organizational structure and ownership, including profiles of the Board of Commissioners and Board of Directors. It also provides information about subsidiaries, awards, and membership in various national associations.
		Profil Perusahaan
		• Profil Kami
		• Logo Kami
		• Visi, Misi, dan Nilai
		• Peristiwa Penting
		• Struktur Kepemilikan
		• Struktur Organisasi
		• Struktur Grup
		Struktur Organisasi
		• Dewan Komisaris terdiri dari:
		  • Komisaris Utama;
		  • Komisaris;
		  • Komisaris Independen;
		• Direksi terdiri dari:
		  • Direktur Utama;
		  • Direktur;
		  • Deputi Presiden Direktur;
		Entitas Anak & Afiliasi
		• Anak Perusahaan terdiri dari:
		  • PT Menthobi Agro Raya;
		  • PT Menthobi Transtitian Raya;
		  • PT Menthobi Makmur Lestari; dan
		  • PT Menthobi Hijau Lestari;
		• **Penghargaan & Pengakuan;**
		• **Keanggotaan Asosiasi.**
		
		Company Profile
		• Our Profile
		• Our Logo
		• Vision, Mission, and Values
		• Key Events
		• Ownership Structure
		• Organizational Structure
		• Group Structure
		Organizational Structure
		• Board of Commissioners:
		  • President Commissioner
		  • Commissioner
		  • Independent Commissioner
		• Board of Directors:
		  • President Director
		  • Director
		  • Director
		  • Director
		  • Deputy President Director
		Subsidiary & Affiliate
		• Subsidiaries:
		  • PT Menthobi Agro Raya;
		  • PT Menthobi Transtitian Raya;
		  • PT Menthobi Makmur Lestari; dan
		  • PT Menthobi Hijau Lestari;
		• **Awards & Recognition**
		• **Association Membership**

Informasi Kanal Web Page Information	Penjelasan Description	Poin-Poin Kanal Channel Points
Bisnis Inti Core Business	Kegiatan usaha yang dipaparkan dalam portal ini meliputi sektor Perkebunan Sawit, Jasa Logistik & Alat Berat, Konsultasi Agribisnis, hingga Manajemen Pengolahan Limbah. The business activities presented in this portal include Palm Oil Plantation, Logistics & Heavy Equipment Services, Agribusiness Consulting, and Waste Management.	**1. Budidaya dan Pengolahan Sawit** Fokus pada manajemen tanaman dan hasil produksi untuk memastikan kualitas *output* yang maksimal. • **Jenis Tanaman dan Perkebunan:** Pemilihan jenis tanaman dan standar perkebunan. • **Siklus Produksi:** Manajemen siklus produksi tanaman sawit (MKTR) yang sistematis dan efisien. • **Pengolahan Hasil Panen:** Teknik pengolahan hasil panen dari proses hulu ke hilir hingga proses pengolahan limbah sawit. **2. Logistik dan Infrastruktur Alat Berat** Penyediaan layanan transportasi dan alat berat, termasuk layanan logistik dalam rantai pasok kelapa sawit — mulai dari ketersediaan Tandan Buah Segar (TBS) hingga pengangkutan CPO ke pelanggan. **3. Konsultasi Agribisnis dan Teknologi** Layanan strategis untuk meningkatkan produktivitas melalui konsultasi pertanian/perkebunan, pemetaan lahan dan verifikasi bibit, guna meningkatkan efisiensi dan akurasi data untuk pengambilan keputusan. **4. Pengelolaan Limbah** Komitmen terhadap keberlanjutan melalui sistem manajemen limbah yang komprehensif. • **Manajemen Limbah Cair:** Pengolahan *Palm Oil Mill Effluent* (POME). • **Manajemen Limbah Padat & B3:** Penanganan limbah padat serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3). • **Sirkular Ekonomi:** Penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) menuju target *Zero Waste.* • **Kepatuhan:** *Monitoring* rutin untuk memastikan operasional sesuai dengan standar regulasi lingkungan. **1. Palm Oil Cultivation and Processing** Focusing on crop management and production yields to ensure maximum output quality. • **Plant Types and Plantations:** Selection of crop types and plantation standards. • **Production Cycle:** Systematic and efficient management of the palm oil production cycle (MKTR). • **Harvest Processing:** Harvest processing techniques from upstream to downstream processes, including palm oil waste management.

Informasi Kanal Web Page Information	Penjelasan Description	Poin-Poin Kanal Channel Points
		2. **Logistics and Heavy Equipment Infrastructure** Provision of transportation and heavy equipment services, including logistics services in the palm oil supply chain—from the availability of Fresh Fruit Bunches (FFB) to the transportation of CPO to customers. 3. **Agribusiness and Technology Consulting** Strategic services to increase productivity through agricultural/plantation consulting, land mapping, and seed verification, to improve efficiency and data accuracy for decision-making. 4. **Waste Management** Commitment to sustainability through a comprehensive waste management system. • **Liquid Waste Management:** Palm Oil Mill Effluent (POME) Treatment. • **Solid & Hazardous Waste Management:** Solid waste management and hazardous and toxic materials (B3) management. • **Circular Economy:** Implementation of the 3R principle (Reduce, Reuse, Recycle) towards the Zero Waste target. • **Compliance:** Regular monitoring to ensure operations comply with environmental regulatory standards.
Keberlanjutan Sustainability	Kanal ini menyajikan informasi komprehensif mengenai inisiatif keberlanjutan perusahaan, mulai dari komitmen dan tata kelola hingga kebijakan operasional. Cakupan informasi meliputi pengelolaan rantai pasok, konservasi keanekaragaman hayati, efisiensi sumber daya, mitigasi perubahan iklim, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, terdapat pula informasi terkait prosedur penanganan keluhan dan keselamatan produk secara transparan. This channel provides comprehensive information on corporate sustainability initiatives from commitments and governance to operational policies. Coverage includes supply chain management, biodiversity conservation, resource efficiency, climate change mitigation, and community empowerment. It also provides transparent information on complaint handling procedures and product safety.	• Komitmen Keberlanjutan; • Kebijakan Keberlanjutan; • Kebijakan dan Pedoman Berkelanjutan; • Panduan Implementasi Kebijakan Berkelanjutan; • Tata Kelola Keberlanjutan; • Laporan Dampak Perusahaan; • Rantai Pasok; • Hutan, Keanekaragaman Hayati & Konservasi, • Efisien Sumber Daya dan Perubahan Iklim; • Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat; • Komunikasi dan Penangan Keluhan; • Kesehatan dan Keselamatan Produk; • Sertifikasi, • Laporan Keberlanjutan, Insiatif Transparansi. • Sustainability Commitment; • Sustainability Policy; • Sustainability Policy and Guidelines; • Sustainability Policy Implementation Guide; • Sustainability Governance; • Corporate Impact Report; • Supply Chain; • Forests, Biodiversity & Conservation; • Resource Efficiency and Climate Change; • Community Engagement and Development; • Communication and Complaint Handling; Product Health and Safety; • Certification; • Sustainability Report; Transparency Initiative.

Informasi Kanal Web Page Information	**Penjelasan** Description	**Poin-Poin Kanal** Channel Points
Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	Kanal ini menyajikan informasi komprehensif mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Cakupan informasi meliputi komitmen tata kelola yang baik, Anggaran Dasar, struktur tata kelola, kebijakan dan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlaku, manajemen risiko, serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal bentuk komitmen Perseroan pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di setiap aspek bisnis untuk memberikan nilai yang berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan. This channel provides comprehensive information on the implementation of Good Corporate Governance. The information covers the commitment to good governance, the Articles of Association, governance structure, applicable Good Corporate Governance (GCG) policies and systems, risk management, and the holding of General Meetings of Shareholders (GMS). This demonstrates the Company's commitment to implementing good corporate governance principles across every aspect of its business to deliver sustainable value to all stakeholders.	1. Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan; 2. Anggaran Dasar; 3. Struktur Tata Kelola Perusahaan terdiri dari: • Pedoman Dewan Komisaris; • Pedoman Direksi; • Pedoman Sekretaris Perusahaan; • Pedoman Internal Audit; • Pedoman Komite. 4. Kebijakan dan Sistem Tata Kelola; • Kebijakan GCG; • Kebijakan Etika dan Integritas; • Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS); • Kebijakan Keberlanjutan (*Sustainability Policy*); • Kebijakan Pengelolaan Risiko; 5. Sistem Tata Kelola Perusahaan terdiri dari: • Kode Etik; • Manajemen Risiko. 6. Manajemen Risiko; dan 7. Rapat Umum Pemegang Saham. 1. Commitment to Good Corporate Governance; 2. Articles of Association; 3. Corporate Governance Structure consisting of: • Board of Commissioners Guidelines; • Board of Directors Guidelines; • Corporate Secretary Guidelines; • Internal Audit Guidelines; • Committee Guidelines. 4. Governance Policies and Systems; • GCG Policy; • Ethics and Integrity Policy; • Whistleblowing System (WBS) Policy; • Sustainability Policy; • Risk Management Policy; 5. Corporate Governance System consisting of: • Code of Ethics; • Risk Management. 6. Risk Management; and 7. General Meeting of Shareholders.

Informasi Kanal Web Page Information	Penjelasan Description	Poin-Poin Kanal Channel Points
Sumber Daya Manusia Human Resources	Kanal ini menyajikan informasi komprehensif mengenai kebijakan dan regulasi terkait Manajemen Sumber Daya Manusia serta program maupun penanganan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) termasuk pengembangan SDM melalui berbagai inisiatif dalam mendukung pertumbuhan profesional. This channel provides comprehensive information on policies and regulations related to Human Resource Management, as well as Occupational Health and Safety (K3) programs and management, including HR development initiatives to support professional growth.	• Karyawan Kami; • Pemberdayaan Karyawan Kami; • Pelatihan dan Pendidikan; • Kebijakan Sumber Daya Manusia; • Program K3; • Karier. • Our Employees; • Our Employee Empowerment; • Training and Education; • Human Resources Policy; • Occupational Health and Safety Program; • Careers.

Perseroan berkomitmen menjaga aktualitas dan kelengkapan informasi pada portal resmi Perseroan. Upaya ini merupakan wujud dedikasi MKTR dalam menyajikan data yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat luas.

The Company is committed to maintaining the accuracy and completeness of the information on its official web portal. This effort demonstrates MKTR's dedication to presenting accurate, transparent, and accountable data to all stakeholders and the broader public.

4

Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Review



Sumber Daya Manusia
Human Resources

Teknologi Informasi
Information Technology



Sumber Daya Manusia

Human Resource

Bagi MKTR, SDM yang kompeten dan berkualitas adalah pilar utama dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan sekaligus memastikan tercapainya rencana strategis jangka pendek maupun jangka panjang berjalan secara efektif.

For MKTR, competent and qualified human resources are the main pillar in realizing the company's vision and mission while ensuring the effective achievement of both short-term and long-term strategic plans



Manajemen Sumber Daya Manusia
Human Resource Management

Perseroan sepenuhnya menyadari bahwa dinamika bisnis yang terus berkembang memerlukan transformasi organisasi dan penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan, hal ini sebagai fondasi dalam mengoptimalkan kinerja operasional secara menyeluruh. Pengelolaan SDM yang dilakukan MKTR memastikan kesiapan dan kapabilitas setiap personel dalam mengemban tugas secara efektif dan efisien. Perseroan juga turut mendorong kolaborasi yang aktif antar unit kerja sebagai pengerak utama dalam pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan membangun daya saing global Perseroan.

The Company fully recognizes that the ever-evolving business dynamics require organizational transformation and the continuous strengthening of Human Resource (HR) management, which serves as the foundation for optimizing overall operational performance. MKTR's HR management ensures each employee is ready and capable of carrying out their duties effectively and efficiently. The Company also encourages active collaboration between work units as a key driver of sustainable business growth and building the Company's global competitiveness.

Dengan komitmen tersebut, Perseroan menjalankan proses tata kelola SDM secara terukur, transparan, dan terencana guna menjamin keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Seluruh pengelolaan SDM merujuk sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

With this commitment, the Company implements a measurable, transparent, and planned HR governance process to ensure a balance between productivity and employee well-being. All HR management complies with applicable Indonesian labor regulations, specifically the Manpower Law No. 13 of 2003, as amended by the Job Creation Law No. 11 of 2020.

Strategi Pengelolaan SDM
Human Resource Management Strategy

Perseroan mengintegrasikan strategi pengelolaan sumber daya manusia ke dalam seluruh aspek operasional dan aktivitas bisnis guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui *Human Capital Management System* (HCMS) yang komprehensif, Perseroan menjalankan fungsi rekrutmen, penilaian kinerja, pengembangan karier, hingga hubungan industrial secara terpadu. Implementasi HCMS ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan kerja positif dan produktif, yang mampu menjaring, membina dan membentuk talenta unggul selaras dengan nilai-nilai perusahaan. Bagi MKTR, SDM yang kompeten dan berkualitas adalah pilar utama dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan sekaligus memastikan tercapainya rencana strategis jangka pendek maupun jangka panjang berjalan secara efektif.

The Company integrates its human resource management strategy into all aspects of its operations and business activities to support sustainable growth. Through a comprehensive Human Capital Management System (HCMS), the Company carries out recruitment, performance assessment, career development, and industrial relations functions in an integrated manner. The implementation of this HCMS aims to create a positive and productive work environment that attracts, develops, and retains excellent talent in line with the company's values. For MKTR, competent and qualified human resources are the main pillar in realizing the company's vision and mission while ensuring the effective achievement of both short-term and long-term strategic plans.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi. Adapun *roadmap* strategi SDM mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 149 Tahun 2020 mengenai matriks peran manajemen sumber daya manusia berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sehingga memastikan penerapan praktik pengelolaan SDM yang selaras dengan standar kompetensi nasional, kebutuhan organisasi, serta prinsip tata kelola yang baik.

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk's human resource management is implemented in a structured and integrated manner. The HR strategy roadmap refers to the Minister of Manpower Decree No. 149 of 2020 on the human resource management role matrix based on the Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI), ensuring the implementation of HR management practices aligned with national competency standards, organizational needs, and good governance principles.

Program Strategis Tahun 2025
Strategic Programs In 2025

Selama tahun 2025, Perseroan menetapkan beberapa inisiatif strategis dalam pengelolaan SDM yang selaras dengan arah pengembangan bisnis diantaranya:

1. **Optimalisasi SDM**
   Dengan fokus pada peningkatan efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan dan strategi Perseroan melalui:
   - Peningkatan kapabilitas dan produktivitas karyawan secara berkelanjutan;
   - Penyelarasan beban kerja berdasarkan kompetensi spesifik individu;
   - Implementasi sistem kerja yang lebih fleksibel berbasis teknologi;
   - Peningkatan keterampilan teknis dan nonteknis;
   - Budaya *continuous learning* untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

2. **Pengembangan Karyawan & Kepemimpinan**
   Membangun karyawan dan kepemimpinan untuk masa depan yang kompeten, inovatif, dan siap memimpin di masa depan melalui:
   - Peningkatan kemampuan strategis karyawan yang difungsikan untuk keterampilan karyawan, serta menyiapkan pemimpin perusahaan ke tingkat berikutnya;
   - Peningkatan kemampuan manajerial, dan pengambilan keputusan;
   - Peningkatan keterlibatan karyawan dalam program strategis Perseroan;
   - Program suksesi kepemimpinan yang sistematis dan terstruktur untuk mendukung keberlanjutan organisasi.

In 2025, the Company established several strategic initiatives in HR management that align with the direction of business development, including:

1. **HR Optimization**
   Focusing on improving organizational effectiveness to achieve the Company's goals and strategies through:
   - Continuously improving employee capabilities and productivity;
   - Aligning workloads based on specific individual competencies;
   - Implementing more flexible, technology-based work systems;
   - Improving technical and non-technical skills;
   - Continuous learning culture to enhance the company's competitiveness.

2. **Employee and Leadership Development**
   Building future employees and leaders who are competent, innovative, and ready to lead through:
   - Improving employee strategic capabilities, which are used to develop employee skills and prepare company leaders for the next level;
   - Improving managerial and decision-making capabilities;
   - Increasing employee involvement in the Company's strategic programs;
   - A systematic and structured leadership succession program to support organizational sustainability.

3. **Manajemen Kinerja & Keterlibatan**
   Memastikan karyawan bekerja sesuai dengan tujuan Perseroan hingga merasa dihargai dan termotivasi dalam lingkungan kerja melalui:
   - Penetapan target (KPI) yang jelas dan terukur sesuai dengan strategi bisnis Perseroan;
   - Pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada hasil (*result-oriented culture*).

4. **Kompensasi, Benefit & Retensi**
   Menjaga motivasi talenta terbaik melalui sistem penghargaan yang kompetitif melalui:
   - Evaluasi berkala pada struktur skala gaji dan insentif berbasis kinerja;
   - Melakukan *benchmarking* kepada industri terkait untuk memastikan kompensasi yang diberikan tetap relevan;
   - Meningkatkan keterlibatan karyawan untuk mempertahankan produktivitas kinerjanya;
   - Meningkatan tingkat kepuasan karyawan guna menekan angka perputaran karyawan (*turnover*).

5. **Rekrutmen Strategis**
   Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang dilakukan secara selektif berdasarkan:
   - Seleksi calon karyawan dilakukan sesuai pertumbuhan bisnis Perseroan dan Entitas Anak;
   - Analisis beban kerja yang akurat.

6. **Pengembangan Pelatihan (*Training Development*)**
   Melakukan transformasi keterampilan melalui metode pembelajaran terkini seperti:
   - Program *up-skilling* dan *re-skilling* untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang baru;
   - Melakukan keterampilan teknis dan operasional serta peningkatan kemampuan *soft skills* (*on the job training and coaching*) yang intensif;
   - Pemanfaatan pembelajaran secara digital melalui *platform e-learning* berbasis AI dan bentuk modul *micro-learning* yang fleksibel.

7. **Manajemen Karier**
   Membangun jalur perkembangan karier yang transparan bagi setiap karyawan melalui:
   - Penyusunan peta karier (*career path*) yang jelas untuk setiap posisi di organisasi;
   - Pelaksanaan *talent review meeting* bagi

3. **Performance Management and Engagement**
   Ensuring that employees work in accordance with the Company's objectives and feel appreciated and motivated in the work environment through:
   - Establishing clear and measurable targets (KPIs) in line with the Company's business strategy;
   - Developing a results-oriented work culture.

4. **Compensation, Benefits & Retention**
   Maintaining the motivation of top talent using a competitive reward system through:
   - Evaluating regularly the salary scale structure and performance-based incentives;
   - Benchmarking with related industries to ensure compensation remains relevant;
   - Increasing employee engagement to maintain productivity;
   - Increasing employee satisfaction levels to reduce employee turnover.

5. **Strategic Recruitment**
   Workforce needs are met selectively based on:
   - Selection of prospective employees in line with the business growth of the Company and its subsidiaries;
   - Accurate workload analysis.

6. **Pengembangan Pelatihan (*Training Development*)**
   Transforming skills through the latest learning methods, such as:
   - Up-skilling and re-skilling programs to improve new competencies and skills;
   - Conducting intensive technical and operational skills development and soft skills development (on-the-job training and coaching);
   - Utilizing digital learning through AI-based e-learning platforms and flexible micro-learning modules.

7. **Career Management**
   Building a transparent career development path for every employee through:
   - Developing a clear career path for each position in the organization;
   - Conducting talent review meetings for

talenta potensial;
- Melakukan penilaian untuk posisi-posisi kunci di perusahaan.

Untuk merumuskan berbagai strategi tersebut, Perseroan berkomitmen penuh untuk menyiapkan SDM yang unggul dan profesional dalam mendukung kebijakan bisnis jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui sinkronisasi fungsi organisasi dan strategi bisnis, diharapkan perencanaan SDM ini mampu meningkatkan kinerja operasional dan bisnis Perseroan.

potential talent;
- Conducting assessments for key positions within the company.

To formulate these strategies, the Company is fully committed to developing high-quality, professional human resources to support both short- and long-term business policies. By synchronizing organizational functions and business strategies, this human resource planning is expected to improve the Company's operational and business performance.

Organisasi Pengelolaan SDM
Human Resource Management Organization

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengelolaan SDM yang efektif dan optimal, MKTR membentuk Departemen Corporate Human Resources yang berada di bawah koordinasi seorang Kepala Departemen dan secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direksi Utama. Selama tahun 2025, Departemen Corporate Human Resources dipimpin oleh **Rizki Amelia Lubis**, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No. 03/MKTR/SO-PRESDIR/I/2022 tertanggal 1 Januari 2022. Adapun profil mengenai Head of Corporate Human Resources telah disampaikan pada Subab Profil Pejabat Eksekutif di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Adapun struktur organisasi Departemen Human Resources PT Menthobi Karyatama Tbk untuk tahun buku 2025 yakni:

As part of its commitment to effective and optimal HR management, MKTR established a Corporate Human Resource Department under the coordination of a Department Head and structurally responsible directly to the President Director. In 2025, the Corporate Human Resource Department was led by **Rizki Amelia Lubis**, as stated in Decree No. 03/MKTR/SO-PRESDIR/I/2022 dated January 1, 2022. The profile of the Head of Corporate Human Resources has been presented in the Executive Officer Profile Sub-section in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

The organizational structure of PT Menthobi Karyatama Tbk's Human Resource Department for the 2025 financial year is as follows:



Struktur Organisasi Departemen Human Resources
Organization Structure of the Human Resources Departement



Head of Corporate Human Resources (HR) bertanggung jawab penuh dan memberikan arahan kepada dua divisi strategis, yaitu Human Resources Operation dan Human Resources Development. Kedua divisi tersebut memiliki pembagian fungsi dan tugas masing–masing yakni:

The Head of Corporate Human Resources (HR) is fully responsible for and provides direction to two strategic divisions: Human Resource Operations and Human Resource Development. These two divisions have their own division of functions and responsibilities:

Divisi di Bawah Naungan Departemen Corporate Human Resources Divisions under the auspices of the Corporate Human Resource Department	Tugas dan Fungsi Functions and Responsibilities
Human Resource (HR) Operations	• Mengelola administrasi karyawan, termasuk dokumen rekrutmen, kontrak kerja, dan data personalia. • Mengelola proses penggajian (*payroll*), kompensasi, dan benefit karyawan. • Memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, kebijakan perusahaan, dan regulasi internal. • Menangani hubungan industrial, tindakan disiplin, dan penyelesaian keluhan karyawan. • Mengelola sistem data SDM (*Human Resource Information System*/HRIS) serta memastikan akurasi pelaporan. • Manage employee administration, including recruitment documents, employment contracts, and employee data. • Manage payroll, compensation, and employee benefits. • Ensure compliance with labor laws, company policies, and internal regulations. • Handle industrial relations, disciplinary actions, and resolve employee grievances. • Manage the HR data system (Human Resource Information System/HRIS) and ensure reporting accuracy.
Human Resource (HR) Development	• Merancang dan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan karyawan. • Melakukan asesmen kompetensi serta mendukung proses penilaian kinerja. • Mengembangkan jalur karier (*career path*), suksesi, dan manajemen talenta. • Memfasilitasi program pengembangan organisasi dan penguatan budaya perusahaan. • Melakukan *monitoring* dan evaluasi efektivitas pelatihan serta pengembangan karyawan. • Design and implement employee training and development programs. • Conduct competency assessments and support the performance appraisal process. • Develop career paths, succession plans, and talent management. • Facilitate organizational development programs and strengthen corporate culture. • Monitor and evaluate the effectiveness of employee training and development.



Rekrutmen dan *Turnover* Karyawan
Employee Recruitment and Turnover

Rekrutmen yang Adil dan Bertanggung Jawab

Seiring dengan perkembangan bisnis, Perseroan senantiasa melakukan rekrutmen guna menjaring talenta yang memiliki kompetensi dan karakteristik yang selaras dengan pertumbuhan perusahaan. Proses ini bukan sekadar pemenuhan jumlah personel, melainkan upaya strategis dalam menjaga komposisi SDM dan regenerasi insan MKTR. Dengan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan proses seleksi calon karyawan yang terstruktur dan objektif guna memastikan terpilihnya kandidat yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan nilai, budaya kerja, dan visi strategis Perusahaan.

Pada program rekrutmen, MKTR juga membuka peluang bagi lulusan baru (*fresh graduate*) dari beberapa perguruan tinggi yang memiliki potensi dan keahlian yang dibutuhkan oleh Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan berhasil merekrut 312 karyawan baru, yang terdiri dari 273 karyawan pria dan 39 karyawan wanita.

Fair and Responsible Recruitment

As its business expands, the Company continuously recruits talent with competencies and characteristics aligned with its growth. This process goes beyond simply meeting staffing needs, but also strategically aims to maintain the composition of its human resources and regenerate MKTR's workforce. To this end, the Company implements a structured, objective employee selection process to ensure candidates are selected with competencies and experience aligned with the Company's values, work culture, and strategic vision.

In its recruitment program, MKTR also opens opportunities for recent graduates from several universities who possess the potential and skills required by the Company.

Throughout 2025, the Company successfully recruited 312 new employees, comprising 273 men and 39 women.

Tabel Perekrutan Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia
Table of Employee Recruitment Based on Gender and Age

Keterangan Description	2025	Persentase Percentage (%)	2024	Persentase Percentage (%)	2023	Persentase Percentage (%)
Jenis Kelamin **Gender**						
Pria Male	273	87,50%	177	78,67%	162	87,57%
Wanita Female	39	12,50%	48	21,33%	23	12,43%
Total	**312**	**100,00%**	**225**	**100,00%**	**185**	**100,00%**
Usia **Age**						
>50 tahun | years	3	0,96%	11	4,89%	3	1,62%
30–50 tahun | years	158	50,64%	99	44,00%	85	45,95%
<30 | years	151	48,40%	115	51,11%	97	52,43%
Total	**312**	**100,00%**	**225**	**100,00%**	**185**	**100,00%**

Tabel Perekrutan Karyawan Berdasarkan Wilayah Operasional
Table of Employee Recruitment Based on Operational Area

Keterangan Description	2025	Persentase Percentage (%)	2024	Persentase Percentage (%)	2023	Persentase Percentage (%)
Wilayah Operasional Operational Area						
DKI Jakarta	3	0,96%	4	1,78%	2	1,08%
Kalimantan Tengah Central Kalimantan	309	99,04%	221	98,22%	183	98,92%
Total	**312**	**100,00%**	**225**	**100,00%**	**185**	**100,00%**

Proses rekrutmen PT Menthobi Karyatama Raya Tbk diatur secara resmi dalam Kebijakan Sumber Daya Manusia (KSDM) No.18/HR-KSDM/MKTR/I/2022 tertanggal 10 Januari 2022 mengenai perencanaan kebutuhan sumber daya manusia serta kebijakan matriks kompetensi. Untuk proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan yang dilakukan Perseroan melalui:

1. Divisi/unit kerja mengajukan permohonan kebutuhan pekerja ke Departemen Corporate Human Resources;
2. Departemen menentukan sumber dan metode rekrutmen;
3. Publikasi rekrutmen dilakukan melalui metode *headhunter* maupun *agency* perusahaan penyedia tenaga kerja;
4. Selama proses pemilihan calon karyawan dilakukan koordinasi antar divisi/unit kerja;
5. Hasil seleksi calon karyawan dilakukan sepenuhnya oleh Head of Corporate Human Resources;
6. Setelah terpilih calon karyawan, maka dilakukan dokumentasi administrasi pekerja (Surat Perjanjian Kerja).

Selain proses rekrutmen, kebijakan SDM juga mencakup perencanaan kebutuhan SDM yang komprehensif dan beretika. Hal ini mencerminkan komitmen Perseroan terhadap aspek integritas, keadilan, dan penghormatan terhadap seluruh calon tenaga kerja.

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk's recruitment process is officially regulated in Human Resource Policy No.18/HR-KSDM/MKTR/I/2022 dated January 10, 2022, concerning human resource needs planning and competency matrix policies. The Company conducts the recruitment and selection process for prospective employees through:

1. Divisions/work units submit a request for employee needs to the Corporate Human Resource Department;
2. The department determines recruitment sources and methods;
3. Recruitment is publicized through headhunters or labor agency companies;
4. Coordination is maintained between divisions/ work units during the employee selection process;
5. The Head of Corporate Human Resources handles the entire selection process for prospective employees;
6. Once the prospective employee is selected, an Employment Agreement is prepared.

In addition to the recruitment process, HR policies encompass comprehensive, ethical human resource planning. This reflects the Company's commitment to integrity, fairness, and respect for all prospective employees.

Kebijakan ini pula menjadi panduan utama, baik dalam proses rekrutmen internal maupun saat bekerja sama dengan pihak ketiga. Berikut adalah aspek–aspek dalam proses perekrutan MKTR antara lain:

1. **Rekrutmen yang Beretika**
   Perseroan menjamin perlakuan adil bagi seluruh kandidat melalui praktik rekrutmen yang selaras dengan standar etika tinggi dan kepatuhan penuh terhadap regulasi hukum yang berlaku.

2. **Perlindungan Dokumen Pribadi**
   Demi menjaga hak asasi calon pekerja, MKTR tidak menahan dokumen identitas pribadi apa pun, seperti kartu identitas, oleh Perseroan atau agen/pihak ketiga perekrutan tenaga kerja mana pun yang bertindak atas namanya.

3. **Transparansi Kontrak Kerja**
   Setiap pekerja berhak mendapatkan kontrak kerja tertulis yang transparan. Kontrak disediakan dalam Bahasa Indonesia atau format *bilingual* (Bahasa Indonesia dan Inggris) untuk memastikan setiap individu memahami sepenuhnya peran, tanggung jawab, serta hak-hak mereka sebelum bergabung.

4. **Bebas Biaya Rekrutmen**
   Perseroan menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya apa pun dalam proses rekrutmen, baik oleh internal perusahaan maupun agen tenaga kerja. Kebijakan ini bertujuan menghilangkan hambatan finansial serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua calon pekerja.

Dalam menjalin kerja sama dengan Agen Tenaga Kerja, MKTR mewajibkan seluruh mitra untuk mematuhi pedoman rekrutmen beretika yang sama. Melalui standarisasi ini, Perseroan memastikan bahwa setiap calon pekerja diperlakukan dengan bermartabat, adil, dan profesional di setiap tahapan seleksi.

Turnover Karyawan [S-03]

Selain mengelola rekrutmen talenta baru, Perseroan juga mencatat pemberhentian hubungan kerja yang disebabkan oleh berbagai faktor, meliputi masa pensiun, pengunduran diri sukarela, maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sepanjang tahun 2025, Perseroan mencatat tingkat perputaran (*turnover*) karyawan tetap dan kontrak yakni sebesar 4,4%.

This policy also serves as the primary guideline for both internal recruitment processes and collaborations with third parties. The following are aspects of the MKTR recruitment process:

1. **Ethical Recruitment**
   The Company ensures fair treatment for all candidates through recruitment practices that align with high ethical standards and full compliance with applicable legal regulations.

2. **Protection of Personal Documents**
   To protect the human rights of prospective workers, MKTR does not retain any personal identification documents, such as identity cards, by the Company or any recruitment agent/third party acting on its behalf.

3. **Transparency of Employment Contracts**
   Every worker has the right to a transparent, written employment contract. Contracts are provided in Indonesian or in a bilingual format (Indonesian and English) to ensure each individual fully understands their roles, responsibilities, and rights before joining.

4. **Free Recruitment**
   The Company emphasizes that no fees are charged during the recruitment process, either internally or through recruitment agencies. This policy aims to eliminate financial barriers and provide equal opportunities for all prospective employees.

In collaborating with recruitment agencies, MKTR requires all partners to adhere to the same ethical recruitment guidelines. Through this standardization, the Company ensures that every prospective employee is treated with dignity, fairness, and professionalism at every stage of the selection process.

Employee Turnover [S-03]

In addition to managing new talent recruitment, the Company also records terminations for various reasons, including retirement, voluntary resignation, and termination of employment (PHK). Throughout 2025, the Company recorded a 4.4% turnover rate of permanent and contract employees.

Tabel Tingkat *Turnover* Karyawan Selama Tahun 2023 - 2025
Table of Employee Turnover Rate 2023–2025

Keterangan Description	2025	2024	2023
Jumlah Karyawan Keluar (a) Number of Employees Leaving (a)	59	39	38
Jumlah Karyawan Awal Tahun (b) Number of Employees at the Beginning of the Year (b)	1.328	1.262	1.037
Jumlah Karyawan Akhir Tahun (c) Number of Employees at the End of the Year (c)	1.353	1.328	1.262
(Jumlah karyawan awal tahun + akhir tahun) x ½ (d = (b + c) x ½) Number of employees at the beginning of the year + at the end of the year) x ½ (d = (b + c) x ½)	**1.341**	**1.295**	**1.150**
Tingkat *Turnover* (%) (e = (a/d) x 100) Turnover Rate (%) (e = (a/d) x 100)	**4,4%**	**3,01%**	**3,31%**

Manajemen Karier
Career Management

Dalam upaya mendukung pengembangan karier karyawan, MKTR telah menyusun kerangka manajemen karier yang dirancang sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dan kinerja unggul setiap karyawannya. Pelaksanaan pengembangan karier di Perseroan mengacu pada *Employee Development Plan* dan perencanaan jenjang karier yang telah dipersiapkan secara sistematis. Pengaturan teknis terkait pelaksanaan pengembangan karier karyawan di PT Menthobi Karyatama Raya Tbk telah ditetapkan dalam Prosedur Manajemen SDM yang berada di bawah pengelolaan Departemen Corporate Human Resources, yaitu Kebijakan Sumber Daya Manusia (KSDM) Nomor MMK-H-13 tanggal 10 Januari 2018 tentang Prosedur Promosi dan *People Review.*

Adapun prosedur tersebut mengatur tentang tahapan pengembangan karier bagi setiap insan MKTR yang terukur dan komprehensif, yang bertujuan untuk memperkuat posisi dan kedudukan karyawan selama masa karyawan bekerja. Perseroan juga memiliki *career path system* yang merupakan sistem peningkatan karier jabatan melalui peningkatan level atau kenaikan golongan pada setiap karyawan. Tahapan awal pengembangan karier diawali dengan proses seleksi dan pengklasifikasian kompetensi karyawan. Melalui mekanisme tersebut, Perseroan dapat merancang program pengembangan yang tepat sasaran serta menempatkan karyawan pada jabatan yang selaras dengan keahlian dan

In an effort to support employee career development, MKTR has developed a career management framework as a form of appreciation for each employee's contributions and excellent performance. The Company's career development comprises the Employee Development Plan and systematic career ladder planning. Technical arrangements for the implementation of employee career development at PT Menthobi Karyatama Raya Tbk have been stipulated in HR Management Procedures, under the management of the Corporate Human Resource Department, i.e., Human Resource Policy Number MMK-H-13 dated January 10, 2018, concerning Promotion and People Review Procedures.

The procedure outlines measurable, comprehensive career development stages for each MKTR employee, aimed at strengthening their position and standing throughout their tenure. The Company also has a career path system that provides career advancement through level or rank increases for each employee. The initial stage of career development begins with the selection process and classification of employee competencies. Through this mechanism, the Company can design targeted development programs and place employees in positions that align with their skills and capacities. The Company implements employee career development, providing equal opportunities to all

kapasitasnya. Pengembangan karier karyawan dilaksanakan Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap insan karyawan tanpa membeda-bedakan rasa, suku, agama serta jenis kelamin.

employees without discrimination based on race, ethnicity, religion, or gender.

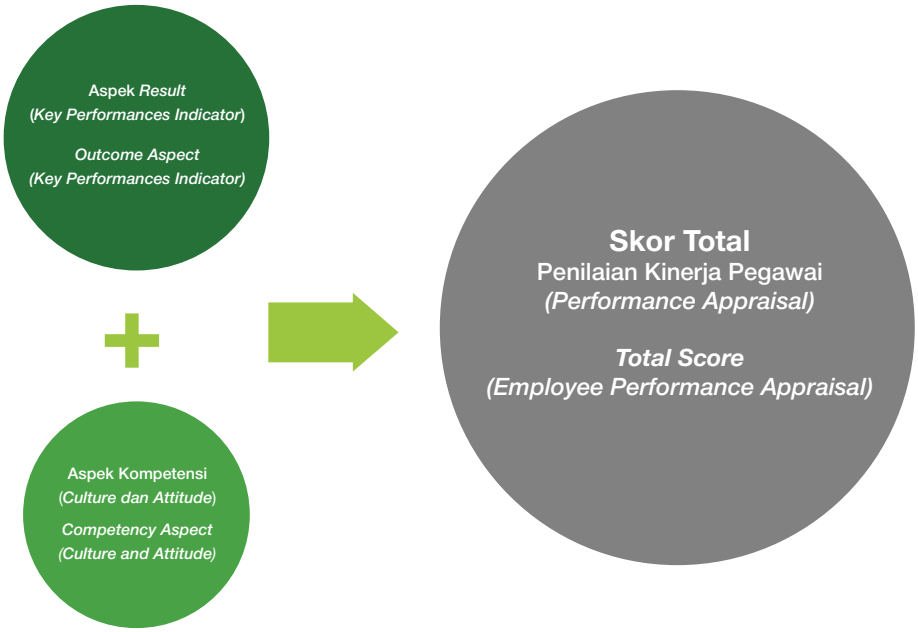
Penilaian Kinerja
Performance Assessment

Untuk menjaga produktivitas SDM, Perseroan secara konsisten menerapkan sistem penilaian kinerja individu sebagai sarana evaluasi dan pemberian umpan balik (*feedback*). Proses ini bertujuan mengukur pencapaian kinerja karyawan dalam periode tertentu sekaligus memetakan kompetensi bagi karyawan secara akurat.

Pelaksanaan manajemen kinerja ini berpedoman pada **Kebijakan Sumber Daya Manusia (KSDM) No. 20/HR-KSDM/MKTR/I/2022** tentang *Performance Management*. Dalam implementasi penilaian kinerja karyawan, MKTR menggunakan instrumen *Key Performance Indicator* (KPI) yang diselaraskan dengan target strategis Perseroan setiap tahunnya. Berikut metode penilaian kinerja yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

To maintain human resource productivity, the Company consistently implements an individual performance appraisal system to provide evaluation and feedback. This process aims to measure employee performance achievements over a specific period and accurately map employee competencies.

The implementation of performance management is guided by **Human Resource Policy No. 20/HR-KSDM/MKTR/I/2022** concerning Performance Management. In implementing employee performance assessments, MKTR uses Key Performance Indicators (KPIs) aligned with the Company's annual strategic targets. The following performance assessment method is presented in the image below:



Dalam menilai kinerja karyawan, Perseroan menerapkan dua indikator utama: ***Key Performance Indicator*** **(KPI)** untuk mengukur hasil kerja (*job result*) secara objektif, serta **Aspek Kompetensi** untuk mengevaluasi kapabilitas atau kemampuan individu dalam mencapai performa yang optimal.

Evaluasi ini dilakukan secara berkala setiap tiga bulan guna memastikan kontribusi dan produktivitas karyawan terpantau secara akurat. Hasil penilaian tersebut nantinya dimanfaatkan sebagai basis strategi pengembangan dan pembinaan SDM secara terukur, demi mencapai strategi maupun tujuan Perseroan secara berkelanjutan.

In assessing employee performance, the Company uses two main indicators: **Key Performance Indicators (KPIs)** to objectively measure job results, and **Competency Aspects** to evaluate individual capabilities in achieving optimal performance.

This evaluation is conducted quarterly to ensure accurate monitoring of employee contributions and productivity. The results of this assessment will then be used as the basis for measurable HR development and coaching strategies, aimed at achieving the Company's strategies and objectives sustainably.

Pengembangan dan Pelatihan Karyawan
Employee Development and Training

Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Sebagai wujud tanggung jawab terhadap kualitas operasional, MKTR menyelenggarakan program pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang komprehensif. Dalam rangka memastikan efektivitas implementasi tersebut, Departemen Corporate Human Resources berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Nomor MKTRMS-HRD-01 tertanggal 30 April 2025 mengenai prosedur rencana kebutuhan pelaksanaan dan evaluasi pelatihan dan pengembangan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi bagi Insan MKTR.

Perseroan menyediakan dua jenis program pendidikan dan pelatihan, yaitu *Self Learning* dan *Corporate Learning*. Kedua program tersebut dirancang untuk memperluas kompetensi, memperdalam pengetahuan, dan mengasah keterampilan guna mendukung kinerja optimal. Program *Self Learning* yakni metode pembelajaran mandiri secara proaktif tanpa tatap muka dapat dilaksanakan secara *online*. Sedangkan, program *Corporate Learning* yakni metode pembelajaran yang diadakan oleh Perusahaan baik bersifat reguler maupun *workshop*.

Tujuan Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi bertujuan meningkatkan kapabilitas SDM sehingga mampu menjawab tantangan

Competency Development Policy

As part of its responsibility for operational quality, MKTR organizes a competency development program through comprehensive education and training. To ensure effectiveness, the Corporate Human Resource Department is guided by the Board of Directors Decree MKTRMS-HRD-01 dated April 30, 2025, on Planning Procedures for the Implementation and Evaluation of Training and Development, which serves as the basis for implementing the competency development policy for MKTR employees.

The Company offers two types of education and training programs: Self-Learning and Corporate Learning. Both programs are designed to broaden competencies, deepen knowledge, and hone skills to support optimal performance. The Self-Learning program is a proactive, independent learning method that can be implemented online without face-to-face meetings. Meanwhile, the Corporate Learning program is a learning method conducted by the Company, either regularly or through workshops.

Training Objective

The implementation of training and competency development aims to improve human resource capabilities to meet the challenges of a dynamic

lingkungan kerja yang dinamis. Program pelatihan yang dirancang secara sistematis menjadi sarana bagi Perseroan untuk menumbuhkan budaya inovatif, meningkatkan adaptabilitas, dan memastikan kesiapan pekerja dalam merespons dinamikan dan tuntutan industri.

Dengan demikian, Perseroan tidak hanya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga menghadirkan lingkungan kerja yang produktif dan berdaya saing tinggi, sekaligus memastikan peningkatan kompetensi umum dan spesifik secara proporsional kepada setiap karyawan.

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan Perseroan disusun berdasarkan *Training Need Analysis* (TNA) dengan memprioritaskan pelatihan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian bisnis serta kebutuhan teknis pekerjaan. Pengembangan kompetensi ini mencakup aspek *hard competency* dan *soft competency*, dengan menjamin kesetaraan akses bagi setiap karyawan untuk memperoleh program pelatihan maupun pendidikan. Dalam hal ini, MKTR memastikan pengembangan SDM bebas dari diskriminasi, sehingga setiap karyawan dapat berkembang sesuai potensi, kemampuan dan keterampilannya demi mencapai kinerja maksimal.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan dengan komposisi yang seimbang antara metode daring dan luring. Untuk materi pelatihan yang bersifat teoritis dapat disampaikan melalui *platform* daring, sementara pelatihan berbasis praktik dilaksanakan secara tatap muka (luring). Program pengembangan kompetensi ini terbagi menjadi 6 (enam) kategori utama, yaitu Sumber Daya Manusia, Operasional, Keuangan, Teknologi Informasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Unit Pendukung Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

work environment. Systematically designed training programs serve as a means for the Company to foster a culture of innovation, increase adaptability, and ensure employee readiness to respond to industry dynamics and demands.

Thus, the Company not only develops high-quality human resources but also provides a productive, highly competitive work environment, while ensuring proportional improvement in general and specific competencies for each employee.

Implementation of Competency Development

The Company's competency development is structured based on a Training Needs Analysis (TNA), prioritizing training that significantly impacts business performance and technical job requirements. This competency development encompasses both hard and soft competencies, ensuring equal access to training and educational programs for every employee. MKTR ensures that human resource development is free from discrimination, allowing each employee to develop according to their potential, abilities, and skills to achieve maximum performance.

In 2025, the Company conducted education and training programs with a balanced mix of online and offline methods. Theoretical training materials were delivered online, while practice-based training was done face-to-face (offline). This competency development program is divided into six main categories: Human Resources, Operations, Finance, Information Technology, Occupational Health and Safety (OHS), and Other Supporting Units, with the following details:

Tabel Pelaksanaan Program Berdasarkan Jenis Pelatihan
Table of Program Implementation Based on Training Type

Kategori Category	Nama Pelatihan Training Title	Total Peserta Total Participants	Penyelenggara Organizer
	Sumber Daya Manusia **Human Resources**		
Pelatihan Training	Rekrutmen efektif di industri kelapa sawit Effective recruitment in palm oil industry	3 orang 3 people	Hipkasi
	Operasional **Operations**		
Sertifikasi Certification	Damkar C. Fire Fighting Team Class C	1 orang 1 people	PT Sinergi Solusi Indonesia
Sertifikasi Certification	Sertifikasi K3 Operator Alat Berat Heavy Equipment Operator OHS Certification	1 orang 1 people	PT Sepakat Jaya Pertama
Sertifikasi Certification	Sertifikasi K3 Operator Alat Berat Kelas 1 Heavy Equipment Operator Class 1	1 orang 1 people	PT Sepakat Jaya Pertama
Sertifikasi Certification	Penanggung Jawab pengendalian pencemaran air (PPPA) Water Pollution Control Officer (PPPA)	1 orang 1 people	Bidang Pelatihan & Kerjasama Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM
Sertifikasi Certification	Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPA) Wastewater Treatment Operations Officer (POPA)	1 orang 1 people	Bidang Pelatihan & Kerjasama Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM
Sertifikasi Certification	Operator PPA PPA Operator	1 orang 1 people	PT Polaris
Sertifikasi Certification	Operator PPU PPU Operator	1 orang 1 people	PT Polaris
Sertifikasi Certification	Penanggung Jawab pengendalian pencemaran air (PPPA) Water Pollution Control Officer (PPPA)	1 orang 1 people	PT Polaris
Sertifikasi Certification	Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPA) Wastewater Treatment Operations Officer (POPA)	1 orang 1 people	PT Polaris
Pelatihan Training	*Awareness* & Implementasi K3 di Tempat Kerja OHS Awareness & Implementation in Workplace	5 orang 5 people	City Training
Seminar	*Indonesia Internasional Sustainbility Forum* 2025	3 orang 3 people	*International Sustainability Forum* (ISF)
Conference	*Indonesian Palm Oil Conference*	7 orang 7 people	GAPKI
Pelatihan Training	*Effective Leadership*	1 orang 1 people	PPM Manajemen
Workshop dan Pelatihan Training and Workshop	*The 3 Habits For Managers*	3 orang 3 people	BPI Bogor

Kategori Category	Nama Pelatihan Training Title	Total Peserta Total Participants	Penyelenggara Organizer
	Keuangan **Finance**		
Pelatihan Training	*Maximising Big Data For Accouting*	1 orang 1 people	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
Pelatihan Training	IAI *Cash Flow*	1 orang 1 people	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
	Teknologi Informasi **Information Technology**		
Pelatihan Training	DIPSY IT GIS (*Information Technology* dan *Geographic Information System*) DIPSY IT GIS (Information Technology and Geographic Information System)	1 orang 1 people	Hipkasi
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) **Occupational Health and Safety (OHS)**		
Pelatihan Training	*Awareness* & implementasi K3 di tempat kerja OHS Awareness & Implementation in Workplace	5 orang 5 people	City Training
	Unit Pendukung Lainnya **Other Supporting Units**		
Conference	Simposium Mekanisasi Digitalisasi Teknologi Industri Kelapa sawit di indonesia dan malaysia Symposium on Digitalization of Palm Oil Industry Technology Mechanization in Indonesia and Malaysia	3 orang 3 people	Sawit Indonesia
Pelatihan Training	*Training Leadership Camp*	53 orang 53 people	Internal Perseroan Internal Company

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan 21 (dua puluh satu) program pendidikan dan pelatihan yang melibatkan 95 (sembilan puluh lima) peserta. Adapun total biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan SDM mencapai Rp335 juta, mencatatkan kenaikan sebesar 42,55% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang berjumlah Rp235 juta.

Throughout 2025, the Company has implemented 21 (twenty-one) education and training programs involving 95 (ninety-five) participants. The total costs incurred to organize various HR education and training programs reached Rp335 million, increasing 42.55% from Rp235 million in the previous year.

Kenaikan biaya program pendidikan dan pelatihan merupakan dampak dari meningkatnya aktivitas bisnis perusahaan, sehingga menuntut peningkatan kompetensi serta wawasan bagi karyawan agar selaras dengan bidang kerja yang dijalankan.

The increase in the cost of education and training programs is a result of the company's expanding business activities, which require employees to develop greater competence and insight to remain aligned with the work they are doing.

Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan
Remuneration and Employee Welfare

Remunerasi

Perseroan berkomitmen penuh untuk mematuhi regulasi ketenagakerjaan serta ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Kota/Kabupaten di wilayah operasional. Selain itu, Perseroan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dengan tidak membedakan gender dalam pemberian remunerasi. Sejak hari pertama bergabung, Perseroan memastikan upah karyawan berada pada tingkat yang setara atau di atas standar minimum yang berlaku. Selain gaji pokok dan tunjangan, Perseroan juga memberikan bonus tambahan sebagai apresiasi atas pencapaian kinerja individu.

Remuneration

The Company is fully committed to complying with labor regulations and the Provincial and City/Regency Minimum Wage provisions in its operational areas. Furthermore, the Company upholds the principle of equality by not discriminating based on gender in its remuneration. From the first day of joining, the Company ensures that employee wages are at or above the applicable minimum standard. In addition to base salary and allowances, the Company provides additional bonuses as a token of appreciation for individual performance.

Kebijakan Pemberian Penghargaan

Bagi MKTR, kinerja dan loyalitas pekerja merupakan aset bernilai dalam mendorong produktivitas serta daya saing Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas peran dan pencapaian yang signifikan bagi organisasi. Salah satu implementasi kebijakan pemberian apresiasi melalui pemberian penghargaan yang dilakukan dengan pemberian insentif kepada pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. Kebijakan tersebut juga tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 09/Dir-MKTR/HR/JKT/II/2025 tanggal 15 Februari 2025 perihal Pemberian Apresiasi Kinerja.

Rewards Policy

For MKTR, employee performance and loyalty are valuable assets in driving the Company's productivity and competitiveness. In this regard, the Company implements a rewards policy to recognize significant roles and achievements within the organization. One implementation of the appreciation policy is the provision of rewards and incentives to employees in accordance with the regulations applicable within PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. This policy is also stated in the Board of Directors Decree No. 09/Dir-MKTR/HR/JKT/II/2025 dated February 15, 2025, on the Provision of Performance Appreciation.

Perlindungan Jiwa dan Kesehatan Karyawan

Selain sistem remunerasi yang kompetitif, Perseroan berkomitmen penuh untuk menjaga kesejahteraan karyawan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menghadapi dinamika bisnis. MKTR meyakini bahwa kesejahteraan yang optimal merupakan kunci dalam memotivasi karyawan untuk terus tumbuh dan memberikan kinerja terbaik bagi Perseroan. Berikut adalah rincian fasilitas serta manfaat yang telah disalurkan Perseroan selama periode 2023–2025:

Employee Life and Health Protection

In addition to a competitive remuneration system, the Company is fully committed to maintaining employee welfare as a form of appreciation for their contributions to the business. MKTR believes that optimal welfare is key to motivating employees to continue growing and delivering their best performance for the Company. The following details the facilities and benefits provided by the Company from 2023 to 2025:

Tabel Pemeriksaan Kesehatan yang diberikan oleh Karyawan MKTR
Health Checks Provided by MKTR Employees

Keterangan Explanation	2024	2023	2022
Jumlah karyawan yang melakukan *Medical Check Up* Number of employees who underwent a Medical Check Up	176	188	183
Persentase karyawan ikut dalam asuransi kesehatan dan BPJS Kesehatan Percentage of employees participating in health insurance and BPJS Health	97%	98%	98%

Internalisasi Budaya
Internalization of Culture

Perseroan berkomitmen memperkuat budaya organisasi secara berkelanjutan melalui program internalisasi budaya perusahaan yang dilakukan setiap tahunnya. Langkah ini didasari keyakinan bahwa budaya perusahaan adalah fondasi utama bagi karyawan dalam mengimplementasikan nilai-nilai inti Perseroan pada aktivitas operasional. Untuk meningkatkan kesadaran terhadap budaya perusahaan, MKTR secara berkala mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi kepada seluruh karyawan agar senantiasa relevan dalam setiap tindakan maupun perilakunya.

Salah satu program unggulan pada internalisasi budaya perusahaan adalah pelatihan kode etik yang dinamakan '***Know the Work Culture***' yang diselenggarakan setiap enam kali dalam setahun. Kegiatan ini juga menjadi sarana orientasi bagi karyawan baru untuk memahami *Corporate Values* MKTR. Melalui upaya terintegrasi ini, Perseroan optimis dapat membangun budaya kerja yang bermakna dan positif, yang pada akhirnya akan memperkuat strategi bisnis perusahaan serta memelihara kepercayaan para pemangku kepentingan.

The Company is committed to continuously strengthening its organizational culture through an annual corporate culture internalization program. This initiative is based on the belief that corporate culture is the primary foundation for employees to implement the Company's core values in their operational activities. To raise awareness of corporate culture, MKTR regularly communicates the organization's values to all employees to ensure they remain relevant in all their actions and behaviors.

One of the Company's flagship programs for internalizing its corporate culture is the '**Know the Work Culture**' code of ethics training, held six times a year. This activity also serves as an orientation for new employees to understand MKTR's Corporate Values. Through this integrated effort, the Company is optimistic about building a meaningful, positive work culture that will ultimately strengthen its business strategy and maintain stakeholder trust.

Hubungan Industrial Karyawan dan Manajemen

Industrial Relations Between Employees and Management

Keberhasilan Perseroan tidak terlepas dari terjalinnya hubungan yang harmonis dan sinergis antara manajemen dan pekerja. Hubungan yang solid tersebut diperkuat melalui keberadaan serikat pekerja di lingkungan Perseroan, yang berperan sebagai wadah representasi pekerja dalam menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Dengan tujuan tersebut, MKTR menjaga komitmen untuk membentuk wadah komunikasi strategis antara manajemen dan karyawan melalui serikat pekerja. Serikat Pekerja ini berfungsi sebagai forum dialog yang transparan dan partisipatif, guna menyalurkan aspirasi serta menjembatani berbagai isu antara karyawan dan manajemen.

The Company's success is inseparable from the harmonious and synergistic relationship between management and employees. This solid relationship is strengthened through the existence of a labor union within the Company, which serves as a representative forum for workers to constructively convey their aspirations. To this end, MKTR maintains its commitment to establishing a strategic communication platform between management and employees through the labor union. This labor union serves as a transparent and participatory dialogue forum, channeling aspirations and bridging various issues between employees and management.

Dalam rangka menjaga hubungan industrial yang kondusif, Perseroan secara aktif memfasilitasi proses negosiasi kolektif dan dialog produktif mengenai berbagai isu ketenagakerjaan. Hingga tahun 2025, 100% karyawan di bawah naungan grup MKTR telah tercakup dalam Peraturan Perusahaan yang disepakati bersama oleh perwakilan karyawan dan manajemen. Dokumen ini telah disahkan secara resmi oleh Dinas Ketenagakerjaan/Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menjamin legalitas operasional. Dengan adanya hubungan industrial tersebut, sebagai bentuk komitmen MKTR terhadap kepatuhan hukum ketenagakerjaan, termasuk implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Komitmen ini diwujudkan melalui Peraturan Perusahaan (PP) yang menjamin perlindungan hak pekerja, kesetaraan, serta prinsip *non*-diskriminasi di seluruh wilayah operasional.

To maintain conducive industrial relations, the Company actively facilitates collective bargaining and productive dialogue on various employment issues. As of 2025, 100% of employees in the MKTR group have been covered by Company Regulations mutually agreed upon by employee representatives and management. The Manpower Office/Ministry of Manpower and Transmigration officially approved it to guarantee operational legality. In this regard, MKTR is committed to compliance with employment laws, including the implementation of the Job Creation Law No. 11 of 2020. This commitment is realized through Company Regulations (PP) that guarantee the protection of workers' rights, equality, and the principle of non-discrimination in all operational areas.

Kebijakan yang Mengatur Kesehatan dan Keselamatan Kerja [S-11]

Policies Governing Occupational Health and Safety

Keselamatan kerja merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan dan dijaga oleh Perseroan, dengan target utama yakni terwujudnya *Zero Accident*. Dalam mewujudkan target tersebut, Perseroan secara konsisten melaksanakan berbagai langkah preventif, antara lain identifikasi bahaya dan risiko kerja, analisis keselamatan pekerjaan

Occupational safety is a top priority for the Company, with the main target being achieving Zero Accidents. In achieving this target, the Company consistently implements various preventive measures, including identifying occupational hazards and risks, conducting job safety analyses, evaluating near-miss incidents, implementing safety campaigns,

(*job safety analysis*), evaluasi kejadian *near miss*, pelaksanaan *safety campaign*, penyelenggaraan pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta perbaikan terhadap kondisi kerja yang berpotensi menimbulkan risiko.

organizing Occupational Health and Safety (OHS) training, and improving work conditions that pose risks.

Untuk menegakkan kedisiplinan dalam kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan membentuk Head of Divisi Quality Management System yang berfungsi untuk menumbuhkan semangat karyawan untuk kesadaran dan kepedulian pada penerapan keamanan dan keselamatan kerja di semua proses dan di seluruh lini bisnis Perseroan.

To enforce discipline in occupational health and safety, the Company has established a Head of Quality Management System Division whose function is to foster employee enthusiasm for awareness and concern regarding the implementation of occupational safety and security across all processes and lines of the Company's business.

Untuk memperkuat implementasi K3, Perseroan memiliki kebijakan yang mengatur tentang keselamatan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3, fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, serta informasi mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi pekerja. Ketentuan ini mengacu pada Kebijakan Mutu & Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) PT Menthobi Karyatama Raya Tbk yang disahkan 10 Juli 2024 dan Manual Sistem Manajemen QHSSE No. Dokumen: MKTRMS-QMS-12 tertanggal 10 Juli 2024.

To strengthen OHS implementation, the Company has policies that regulate occupational safety, OHS management, OHS certification, health facilities in the work environment, and information on the presence of certain levels of danger for workers. These provisions refer to the Quality Policy & Quality Management System, Occupational Health, Safety, and Environment (OHSE or HSE) of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, ratified on July 10, 2024, and the QHSSE Management System Manual No. Document: MKTRMS-QMS-12 dated July 10, 2024.

Selain itu, Perseroan juga memberikan jaminan perlindungan berupa asuransi kesehatan bagi pekerja dan keluarganya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk No. 01/KSDM/I/2019 tanggal 28 Januari 2023 tentang Perawatan dan Pengobatan Pekerja.

The Company also provides health insurance for workers and their families, as regulated by PT Menthobi Karyatama Raya Tbk's Board of Directors Decree No. 01/KSDM/I/2019 dated January 28, 2023, on Care and Treatment of Workers.

Program *Engagement* Karyawan
Employee Engagement Program

Dalam rangka mengukur tingkat keterlibatan, evaluasi, dan kepuasan karyawan terhadap Perseroan, MKTR melaksanakan *Employee Engagement Survey* (EES). Survei ini menjadi sarana umpan balik atas berbagai inisiatif yang telah dijalankan sekaligus menjadi dasar penyusunan dan penyempurnaan program-program SDM ke depan.

To measure employee engagement, satisfaction, and evaluation towards the Company, MKTR conducted the Employee Engagement Survey (EES). This survey provides feedback on various initiatives implemented and serves as a basis for developing and refining future HR programs.

Adapun hasil survei EES yang dilakukan pada tahun 2025 mencapai 93% mencerminkan bahwa mayoritas karyawan merasa dilibatkan secara aktif dalam proses perbaikan di unit kerja masing-masing.

The EES survey conducted in 2025 reached 93% reflecting that the majority of employees feel actively involved in the improvement process in their respective work units.

Sebagai upaya membangun hubungan yang semakin solid antara seluruh karyawan dan manajemen, Perseroan menginisiasi sejumlah program yang bertujuan menumbuhkan loyalitas dan rasa memiliki dalam lingkungan kerja yakni antara lain:

- *Employee Recognition Program*: pemberian apresiasi bagi individu berprestasi;
- *Wellness & Mental Health Program*: program konseling dan olahraga untuk keseimbangan fisik dan mental karyawan;
- Program Gugus Kendali Mutu: kegiatan mendorong partisipasi karyawan dalam memberikan kontribusi pada perbaikan proses dan inovasi di perusahaan, menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan (*continous improvement*), serta meningkatkan komunikasi serta kolaborasi);
- *Employee Gathering* 2025: kegiatan Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan informal serta membangun kekompakan antar tim;
- Program Kajian Rutin: kegiatan rutin yang dilaksanakan secara berkala yakni 6 (enam) kali dalam setahun.

Melalui sinergi program ini, Perseroan tidak hanya menyerap aspirasi karyawan, tetapi juga mengidentifikasi peluang perbaikan dan meningkatkan produktivitas karyawan. Perseroan juga berupaya menciptakan lingkungan kerja yang positif sebagai faktor penting dalam mempertahankan pekerja berkualitas. Melalui penerapan *Employer Value Proposition* (EVP) terutama pemberian kesempatan untuk mengembangkan karier dan pembelajaran, MKTR mendorong terbentuknya suasana kerja yang sportif dan mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Berbagai program SDM dirancang untuk memperkuat komitmen karyawan dan mendorong kontribusi optimal dalam mencapai tujuan perusahaan.

As an effort to build increasingly solid relationships between all employees and management, the Company has initiated several programs aimed at fostering loyalty and a sense of belonging in the work environment, including:

- Employee Recognition Program: a reward program for high-achieving individuals;
- Wellness & Mental Health Program: a counseling and exercise program to maintain employee physical and mental balance;
- Quality Control Program: activities to encourage employee participation in contributing to process improvement and innovation in the company, creating a culture of continuous improvement, and improving communication and collaboration);
- Employee Gathering 2025: an activity to build more open and informal communication and foster team cohesion;
- Routine Study Program: a routine activity held periodically, six times a year.

Through this program synergy, the Company not only absorbs employee aspirations but also identifies opportunities for improvement and increases employee productivity. The Company also strives to create a positive work environment as a crucial factor in retaining qualified employees. By implementing the Employer Value Proposition (EVP), particularly by providing opportunities for career development and learning, MKTR fosters a supportive work environment and continuous performance improvement. Various HR programs are designed to strengthen employee commitment and encourage optimal contributions to achieving company goals.

Program Pensiun
Retirement Program

Selain fokus pada pengelolaan SDM yang masih aktif, Perseroan juga berkomitmen menjaga kesejahteraan karyawan secara jangka panjang melalui program Masa Persiapan Pensiun (MPP). Inisiatif ini dirancang untuk membekali karyawan agar siap menghadapi purnabakti. Landasan program MPP ini mengacu pada Kebijakan Sumber Daya Manusia (KSDM) No. HR-MMK-14 Tahun 2022 serta Peraturan Perusahaan yang menjamin hak Jaminan Pensiun (JP) sebagai tabungan yang diterima ketika usia pensiun. Perseroan juga berkolaborasi dengan pihak eksternal untuk menyelenggarakan pelatihan khusus bagi calon purnabakti guna memastikan kesiapan di masa depan.

In addition to managing active human resources, the Company is also committed to maintaining employees' long-term welfare through the Retirement Preparation Period program. This initiative is designed to equip employees to prepare for retirement. The Retirement Preparation Period program is based on Human Resource Policy No. HR-MMK-14 of 2022 and Company Regulations, which guarantee the right to Pension Guarantee as savings received upon retirement. The Company also collaborates with external parties to provide specialized training for prospective retirees to ensure future preparedness.

Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia ke Depannya
Future Human Resource Development Plan

Perseroan berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas SDM yang kompeten sebagai pilar utama dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Dalam pelaksanaannya, MKTR senantiasa mengoptimalkan pengelolaan SDM yang komprehensif dan matang. Untuk tahun 2026, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk telah menyusun peta jalan pengelolaan dan pengembangan SDM yang mencakup pengembangan teknologi informasi yang terkini, peningkatan kompetensi di bidang perindustrian kelapa sawit, serta penguatan kualitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan dinamika industri global.

Sebagai wujud komitmen nyata, MKTR memastikan pengelolaan SDM dilakukan secara menyeluruh, terukur, dan terstruktur. Upaya ini bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang unggul dan bernilai tinggi, yang pada akhirnya akan mendorong performa berkelanjutan bagi seluruh grup perusahaan.

The Company is fully committed to enhancing the quality of its competent workforce as the cornerstone of realizing the company's vision and mission. In practice, MKTR consistently optimizes comprehensive and well-developed human resource management. For the year 2026, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk has developed a roadmap for human resource management and development that includes the adoption of the latest information technology, enhancing competencies in the palm oil industry, and strengthening the quality of human resources to ensure they can adapt to the dynamics of the global industry.

As a concrete manifestation of its commitment, MKTR ensures that human resource management is carried out comprehensively, measurably, and in a structured manner. This effort aims to produce an excellent, highly valued workforce that will ultimately drive sustainable performance across the entire corporate group.

Teknologi Informasi

Information Technology

Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna menjadi fondasi Perseroan dalam meningkatkan kinerja operasional sekaligus mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang

The appropriate use of information technology is the foundation for the Company in improving operational performance while supporting long-term business sustainability.





Pesatnya perkembangan dan transformasi teknologi informasi (TI) berperan signifikan dalam mendorong kemajuan dan daya saing industri agribisnis. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan agribisnis, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit, antara lain melalui penerapan konsep *Smart Farming*. Metode *Smart farming* ini merupakan konsep pertanian berbasis *precision agriculture* (pendekatan pertanian modern) yang mengintegrasikan otomatisasi teknologi, *big data*, kecerdasan buatan, dan *Internet of Things* (IoT) untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi secara optimal melalui pemanfaatan sumber daya lahan, teknologi budidaya, SDM, serta sumber daya produksi lainnya.

Berikut uraian berbagai jenis teknologi *smart farming* 4.0 pada industri kelapa sawit yakni antara lain:

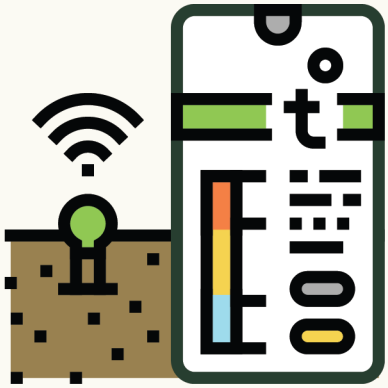
The rapid development and transformation of information technology (IT) play a significant role in driving the progress and competitiveness of the agribusiness industry. The use of information technology has become an integral part of agribusiness management, particularly in the palm oil plantation sector, including through Smart Farming. This Smart Farming method is a precision agriculture-based agricultural concept (a modern agricultural approach) that integrates technological automation, big data, artificial intelligence, and the Internet of Things (IoT) to optimally increase the quantity and quality of production through the utilization of land resources, cultivation technology, human resources, and other production resources.

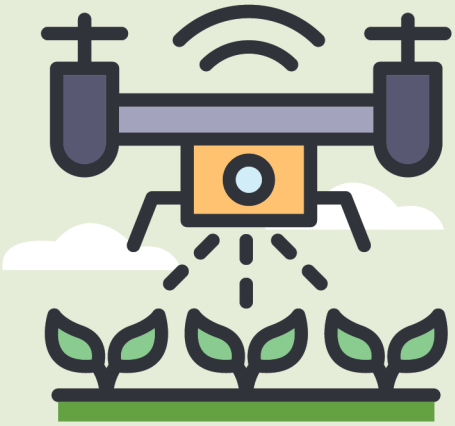
The following is a description of various types of smart farming 4.0 technology in the palm oil industry, including:

1. *Internet of Things* (IoT)

Pemanfaatan sensor cuaca, dan sensor kelembapan untuk memantau kondisi kebun kelapa sawit secara *real time*.

Utilization of weather sensors and humidity sensors to monitor the condition of oil palm plantations in real time.





2. *Drone* dan Citra Satelit
Drones and Satellite Imagery

Digunakan untuk pemetaan kebun, pemantauan kesehatan tanaman, deteksi dini serangan hama, serta pengawasan kondisi tanaman secara menyeluruh dan berkala.

Used for garden mapping, plant health monitoring, early detection of pest attacks, and comprehensive and regular monitoring of plant conditions.

3. Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS)
Geographic Information Systems (GIS)

Mendukung pengelolaan data spasial kebun, termasuk zonasi lahan, pemantauan produktivitas per blok, serta perencanaan pemupukan dan *replanting* secara presisi.

Supporting spatial plantation data management, including land zoning, block-by-block productivity monitoring, and precise fertilization and replanting planning.





4. Otomatisasi dan Mekanisasi Pertanian
Agricultural Automation and Mechanization

Penerapan alat dan mesin pertanian berbasis teknologi, seperti sistem pemupukan presisi, irigasi otomatis, dan peralatan panen berbantuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan keselamatan tenaga kerja.

The application of technology-based agricultural tools and machinery, such as precision fertilization systems, automatic irrigation, and technology-assisted harvesting equipment, to improve work efficiency and worker safety.

5. *Big Data Analytics*

Mengintegrasikan data historis dan *real time* dari kebun, pabrik, dan rantai pasok guna meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, serta ketepatan strategi pengelolaan kebun kelapa sawit.

Integrating historical and real-time data from plantations, mills, and the supply chain to improve operational efficiency, productivity, and the accuracy of oil palm plantation management strategies.





6. Teknologi *Traceability* dan *Blockchain*
Traceability and Blockchain Technology

Digunakan untuk memastikan ketertelusuran produk kelapa sawit dari kebun hingga konsumen, mendukung transparansi rantai pasok, serta pemenuhan standar keberlanjutan dan sertifikasi.

Used to ensure traceability of palm oil products from plantations to consumers, support supply chain transparency, and meet sustainability and certification standards.

7. Aplikasi Digital Manajemen Perkebunan
Digital Plantation Management Application

Platform digital untuk pencatatan aktivitas kebun, *monitoring* kinerja tenaga kerja, pelaporan produksi, serta pengendalian operasional secara terintegrasi.

A digital platform for recording plantation activities, monitoring workforce performance, production reporting, and integrated operational control.



Teknologi *smart farming* 4.0 memiliki dampak yang besar bagi industri kelapa sawit terutama Perseroan karena mampu memberikan efisiensi biaya, waktu proses produksi, meningkatan pendapatan serta meningkatkan produktivitas dan kualitas kelapa sawit yang dihasilkan. Penerapan transformasi teknologi informasi ini juga menjadi salah satu pendekatan strategis yang krusial untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri kelapa sawit secara berkelanjutan.

Perseroan berupaya untuk menerapkan teknologi informasi yang tepat guna, agar mampu mendukung perbaikan pengelolaan kebun, optimalisasi proses produksi, hingga peningkatan efektivitas distribusi hasil panen. Dengan demikian, pemanfaatan TI tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja operasional Perseroan, tetapi juga mendukung pencapaian keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Smart farming 4.0 technology has a significant impact on the palm oil industry, particularly on the Company, by providing cost efficiencies, reducing production time, increasing revenue, and enhancing the productivity and quality of the palm oil produced. The implementation of this information technology transformation is also a crucial strategic approach to sustainably improving the competitiveness and productivity of the palm oil industry.

The Company strives to implement appropriate information technology to support improved plantation management, optimize production processes, and increase the effectiveness of harvest distribution. Thus, IT utilization not only improves the Company's operational performance but also supports long-term business sustainability.

Peta Jalan Teknologi Informasi

Information Technology Roadmap

Perseroan menilai bahwa penerapan teknologi informasi secara optimal mampu menciptakan konektivitas yang efektif dan efisien antara kantor pusat Perseroan di Jakarta dengan seluruh unit operasional, termasuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Pemanfaatan TI memungkinkan manajemen memperoleh informasi yang akurat, terintegrasi, dan tepat waktu, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data serta meningkatkan efektivitas pengendalian operasional.

Selain itu, teknologi informasi juga berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas usaha yang selaras dengan tujuan Perusahaan. Terlebih lagi, terkait akses terhadap informasi data yang akurat dan terstruktur memungkinkan Perseroan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta merumuskan solusi yang inovatif dan tepat.

The Company believes that optimal implementation of information technology can create effective and efficient connectivity between its head office in Jakarta and all operational units, including its plantations and palm oil mills located in Central Kalimantan. The use of IT enables management to obtain accurate, integrated, and timely information, thus supporting data-driven decision-making and improving the effectiveness of operational controls.

Furthermore, information technology plays a crucial role in maintaining and improving business productivity, aligning with the Company's objectives. Moreover, access to accurate, structured data enables the Company to identify challenges and formulate innovative, appropriate solutions.

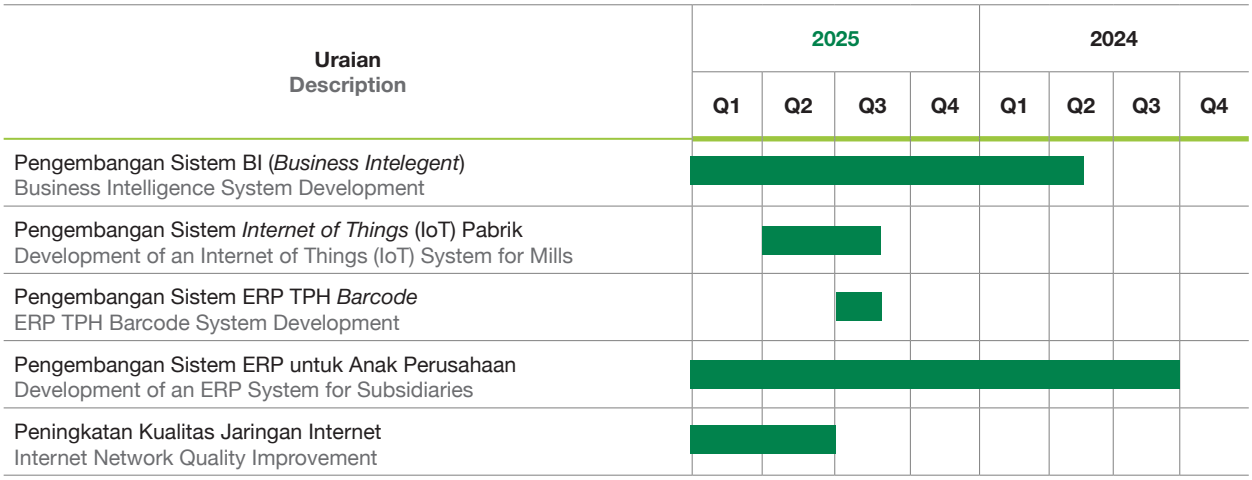
Dalam rangka memastikan penerapan teknologi informasi yang terarah dan tepat sasaran, Perseroan telah menyusun peta jalan (*roadmap*) pengembangan teknologi informasi. *Roadmap* tersebut menjadi acuan bagi Perseroan dalam menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang TI secara sistematis dan berkelanjutan. Penyusunan *roadmap* pengembangan TI Perseroan juga memperhatikan prinsip keberlanjutan industri kelapa sawit terkini.

Pada *roadmap* pengembangan teknologi informasi MKTR difokuskan pada lima bidang utama, yaitu pengembangan perangkat lunak, penguatan infrastruktur TI, pengembangan Sistem Informasi Geografis, pemanfaatan *Internet of Things* (IoT), serta aspek pemeliharaan sistem. Berikut adalah ringkasan *roadmap* pengembangan teknologi informasi Perseroan yang disampaikan pada tabel di bawah ini:

To ensure targeted and effective implementation of information technology, the Company has developed an information technology roadmap for its development. This roadmap serves as a reference for the Company in systematically and sustainably developing and implementing IT work programs. The preparation of the Company's IT development roadmap also takes into account the principles of sustainability in the palm oil industry.

MKTR's information technology development roadmap focuses on five key areas: software development, strengthening IT infrastructure, Geographic Information System development, Internet of Things (IoT) utilization, and system maintenance. The following is a summary of the Company's information technology development roadmap, presented in the table below:

***Roadmap* (*Configurable Information System*) CIS PT Menthobi Karyatama Raya Tbk**



Bidang Areas	Kegiatan Activities
Pengembangan Perangkat Lunak Software Development	• Pengembangan Rencana Uang Kerja Bulanan (RUKB) Versi 2; • Pembaruan transaksi dan penyempurnaan laporan keuangan; • Pembuatan aplikasi Android *barcode* Tempat Pengumpulan Hasil (TPH); • Pengembangan sistem notifikasi melalui aplikasi *WhatsApp*; • Pengembangan *website* untuk anak usaha; • Pengembangan aplikasi *mobile* untuk kemitraan Perseroan; • Implementasi pembaruan transaksi dan laporan keuangan; • Implementasi *barcode* TPH (*demo plot*). • Development of Monthly Work Money Plan (RUKB) Version 2; • Transaction and Financial Report Improvement Update; • Development of Android Barcode application for Harvest Collection Place (TPH); • Development of Notifications via WhatsApp; • Website Development for Subsidiaries; • Development of mobile application for Company partnerships; • Implementation of transaction and financial report update; • Implementation of TPH barcode (demo plot).

Bidang Areas	Kegiatan Activities
Infrastruktur TI IT Infrastructure	• Pembangunan sistem pemantauan CCTV; • Perluasan jaringan internet; • Pembaruan perangkat jaringan internet. • CCTV Monitoring System Development • Internet Network Expansion • Internet Network Device Update
Sistem Informasi Geografis Geographic Information System	• Pengambilan dan pembaruan foto udara di area perkebunan; • Pembaruan *vector land clearing* dan data tanam untuk kebutuhan anggaran Tahun 2025 ; • Pengolahan foto udara; • Pelaporan hasil foto udara. • Taking and updating aerial photographs of plantation areas; • Updating vector land clearing and planting data for the 2025 budget; • Processing aerial photographs; • Reporting aerial photography results.
Internet of Things (IoT)	• Analisis pengembangan sistem pemantauan *Crude Palm Oil* (CPO) ; • Penyediaan dan perakitan peralatan; • Sinkronisasi peralatan (*equipment*); • Pembuatan stasiun mini untuk pemantauan curah hujan, durasi penyinaran matahari, dan tingkat kelembapan. • Analysis of Crude Palm Oil (CPO) monitoring system development; • Provision and assembly of equipment; • Synchronization of equipment; • Construction of a mini-station for monitoring rainfall, sunshine duration, and humidity levels.
Pemeliharaan Maintenance	*Disaster Recovery Center*

Perseroan juga turut berperan aktif dalam mendukung pengembangan industri kelapa sawit melalui pengembangan *smart farming* 4.0 dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi yang terkini. Bagi MKTR, pemanfaatan *smart farming* 4.0 dapat meningkatkan efektivitas operasional, khususnya dalam pengelolaan produktivitas usaha, optimalisasi proses pengolahan di pabrik, serta peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya, termasuk dalam pemanfaatan energi yang terukur.

Penerapan teknologi informasi tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk melalui proses pengendalian dan pemantauan yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, Perseroan diharapkan dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing usaha di tengah dinamika dan persaingan industri perkebunan kelapa sawit.

The Company also plays an active role in supporting the development of the palm oil industry by advancing smart farming 4.0, leveraging the latest information technology. For MKTR, the use of smart farming 4.0 can improve operational effectiveness, particularly by managing business productivity, optimizing plant processes, and increasing the efficiency of resource utilization, including measured energy use.

The application of information technology also contributes to improved product quality through more integrated control and monitoring processes. Thus, the Company is expected to create sustainable added value while strengthening its competitiveness amidst the dynamics and competition in the palm oil plantation industry.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

Perkembangan kemajuan teknologi menuntut Perseroan untuk senantiasa melakukan penyesuaian dan pembaruan teknologi secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan dinamika lingkungan usaha. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan secara konsisten mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai inisiatif di bidang teknologi informasi (TI) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi tersebut menegaskan peran strategis teknologi informasi dalam mendukung kegiatan usaha, perdagangan, serta pertumbuhan perekonomian nasional guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Technological advancements require the Company to continuously adapt and update its technology to remain relevant to the dynamics of the business environment. In line with this, the Company consistently develops and implements various initiatives in the field of information technology (IT) while taking into account the provisions of applicable laws and regulations, including Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as amended several times, most recently by Law Number 1 of 2024. This regulation emphasizes the strategic role of information technology in supporting business activities, trade, and national economic growth to improve public welfare.

Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal merupakan salah satu faktor penting Perseroan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan operasional, termasuk dalam mendukung aktivitas kerja jarak jauh. Penerapan TI memungkinkan proses operasional Perseroan dapat berjalan lebih efisien melalui pengurangan waktu, tenaga, dan biaya, khususnya dalam aspek konektivitas dan koordinasi antar unit kerja. Selain itu, dapat memberikan ketersediaan data dan informasi yang lebih terintegrasi yang mampu memudahkan manajemen dalam merumuskan kebijakan yang cepat dan tepat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas pabrik dan perkebunan.

Optimal use of information technology is a crucial factor in enhancing the effectiveness of operational control and oversight, including supporting remote work. The implementation of IT enables the Company's operational processes to run more efficiently by reducing time, effort, and costs, particularly in terms of connectivity and coordination between work units. Furthermore, it provides more integrated data and information, facilitating management's rapid and accurate policy formulation, particularly those related to increasing factory and plantation productivity.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan strategi serta pencapaian kinerja Perseroan secara berkelanjutan, pengelolaan teknologi informasi dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan, khususnya pada Bab Sistem Teknologi Informasi Entitas Anak. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam memastikan pemanfaatan sistem TI yang optimal, sekaligus sebagai mekanisme supervisi dan pengendalian terhadap Entitas Anak agar penerapan teknologi informasi berjalan selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

To support the implementation of the Company's strategy and achieve sustainable performance, information technology management is implemented in accordance with the Guidelines for the Implementation of Corporate Governance, specifically the Chapter on Information Technology Systems for Subsidiaries. These guidelines serve as a reference for ensuring optimal utilization of IT systems, as well as a mechanism for supervising and controlling Subsidiaries to ensure that the implementation of information technology aligns with the Company's vision, mission, and values.

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Perseroan juga menetapkan panduan kebijakan teknologi informasi yang terintegrasi dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Dasar kebijakan sistem teknologi informasi Entitas Anak

1.1 Perseroan menerapkan sistem teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
1.2 Entitas Anak bersama dengan Perseroan melakukan kerjasama dan sinergi teknologi informasi sebagai standarisasi dan optimalisasi penggunaan sistem sekaligus melaksanakan supervisi terhadap Entitas Anak agar selaras dengan visi Perseroan;
1.3 Penerapan sinergi teknologi informasi dilakukan dengan memperhatikan kegiatan bisnis utama (*core business*), kebijakan internal, tata kelola dan regulasi yang berlaku di Perseroan dan Entitas Anak;
1.4 Penerapan teknologi informasi dilakukan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perseroan yang mencakup sumber daya manusia, proses bisnis terkait dan pendanaan yang tersedia untuk pengembangan TI;
1.5 Perseroan melakukan audit atas penerapan sistem teknologi informasi; dan
1.6 Perseroan melakukan koordinasi dengan Perseroan secara berkala untuk menyelaraskan arsitektur teknologi informasi dan memastikan implementasi teknologi informasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola teknologi informasi yang baik.

2. Penyampaian laporan pelaksanaan sistem teknologi informasi Perseroan

2.1 Direksi Perseroan menyampaikan laporan pelaksanaan sistem teknologi informasi kepada manajemen secara tertulis terhadap pelaksanaan laporan kinerja fungsi TI;
2.2 Laporan pelaksanaan sistem teknologi informasi dilaporkan kepada Pemegang Saham sebagai satu kesatuan dalam Laporan Manajemen dan Laporan Tahunan.

As part of the Company's commitment to implementing good corporate governance, the Company also establishes information technology policy guidelines that are integrated into the Corporate Governance Guidelines, as follows:

1. Basis for Subsidiary's Information Technology System Policy

1.1 The Company implements an information technology system in accordance with established policies;
1.2 Subsidiaries, together with the Company, carry out cooperation and synergy in information technology as a standardization and optimization of system use while also carrying out supervision of the Subsidiaries to ensure they are in line with the Company's vision;
1.3 The implementation of information technology synergy is carried out by taking into account the main business activities (core business), internal policies, governance, and regulations applicable to the Company and its Subsidiaries;
1.4 The implementation of information technology is carried out in accordance with the Company's work plan and budget, which includes human resources, related business processes, and funding available for IT development;
1.5 The Company conducts audits on the implementation of the information technology system;
1.6 The Company periodically coordinates with the Company to align the information technology architecture and ensure that information technology implementation is carried out in accordance with the principles of good information technology governance.

2. Submission of reports on the implementation of the Company's information technology system

2.1 The Company's Board of Directors submits a written report on the implementation of the information technology system to management regarding the implementation of the IT function performance report;
2.2 The report on the implementation of the information technology system is reported to Shareholders as a single unit in the Management Report and Annual Report.

3. ***Monitoring*** **dan evaluasi pelaksanaan sistem teknologi informasi Entitas Anak**
   3.1 Perseroan melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan sistem teknologi informasi Entitas Anak;
   3.2 Perseroan menyampaikan arahan dan tanggapan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas pelaksanaan sistem teknologi informasi Entitas Anak;
   3.3 Melalui *Board of Commissioners* (BOC), Direksi wajib menindaklanjuti arahan dan tanggapan dari Dewan Komisaris sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

3. **Monitoring and evaluation of the implementation of the Subsidiary's information technology system**
   3.1 The Company carries out monitoring and evaluation of the effectiveness of the implementation of the Subsidiary's information technology system;
   3.2 The Company provides direction and responses to the Board of Directors regarding increasing the effectiveness of the implementation of the Subsidiary's information technology system;
   3.3 Through the Board of Commissioners (BOC), the Board of Directors is obliged to follow up on the Board of Commissioners' directions and responses in accordance with the Company's Work Plan and Budget.

Penanggung Jawab Pengelolaan Teknologi Informasi

Party Responsible for Information Technology Management

Pengelolaan sistem teknologi informasi Perseroan dilaksanakan oleh Department of Corporate Information System sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 017/Dir-MKTR/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Struktur Corporate Information System PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. Departemen ini dipimpin oleh Head of Corporate Information System yang bertanggung jawab langsung kepada Director of Finance and Investment.

Untuk Head of Corporate Information System dijabat oleh Bapak Bimantoro Suryo Budi Sudibyo sejak Oktober 2024.

Dalam struktur organisasinya, Head of Corporate Information System membawahi tiga divisi, yaitu Divisi Enterprise Resource Planning (ERP), Divisi Information Technology (IT), dan Divisi Geographic Information System (GIS). Struktur tersebut dirancang untuk memastikan pengelolaan teknologi informasi dapat berjalan secara terkoordinasi, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan. Struktur penanggung jawab pengelolaan

The Company's information technology system is managed by the Corporate Information System Department in accordance with the Board of Directors' Decree Number 017/Dir-MKTR/I/2022 dated January 25, 2022, concerning the Corporate Information System Structure of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. The Head of Corporate Information System leads this department and reports directly to the Director of Finance and Investment.

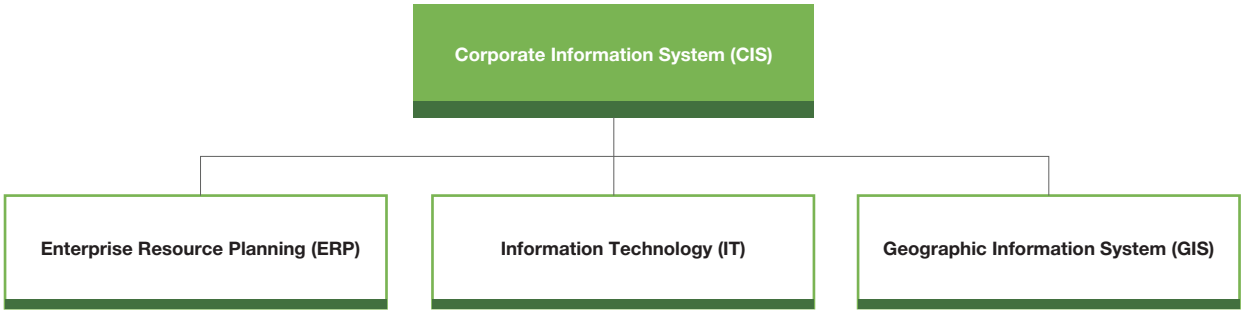
Mr. Bimantoro Suryo Budi Sudibyo has served as Head of Corporate Information Systems since October 2024.

Within its organizational structure, the Head of Corporate Information System oversees three divisions: Enterprise Resource Planning (ERP), Information Technology (IT), and Geographic Information System (GIS). This structure is designed to ensure that information technology management is coordinated, effective, and aligned with the Company's operational needs. The

teknologi informasi Perseroan pada tahun 2025 disajikan pada bagan organisasi terkait.

structure responsible for managing the Company's information technology in 2025 is presented in the relevant organizational chart.

Struktur Organisasi Divisi Corporate Information System PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Organizational Structure Corporate Information System Division PT Menthobi Karyatama Raya Tbk



Dalam menjalankan fungsi pengelolaan sistem teknologi informasi, Department of Corporate Information System menerapkan mekanisme pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing divisi, sebagai berikut:

In managing the information technology system, the Corporate Information System Department applies a clear mechanism for dividing tasks and responsibilities in each division, as follows:

No.	Divisi di bawah naungan Department of Corporate Information System Division under the auspices of the Corporate Information Systems Department	Tugas dan Fungsi Duties and Functions
1.	Enterprise Resources Planning (ERP)	a. Memastikan proses pencatatan seluruh aktivitas Perseroan dapat berjalan secara cepat, tepat, dan akurat; b. Menyediakan *support system* untuk mendukung kelancaran pencatatan dan pengolahan data aktivitas Perseroan; dan c. Melakukan pengembangan serta pembaruan sistem ERP agar senantiasa relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis Perseroan. a. Ensuring that all Company activities are recorded quickly, precisely, and accurately; b. Providing a support system to facilitate the smooth recording and processing of Company activity data; and c. Developing and updating the ERP system for it to remain relevant to technological developments and the Company's business needs.

No.	Divisi di bawah naungan Departement of Corporate Information System Division under the auspices of the Corporate Information Systems Department	Tugas dan Fungsi Duties and Functions
2.	**Information Technology**	a. Memastikan seluruh sarana dan prasarana teknologi informasi Perseroan berfungsi dengan baik dan andal; b. Melaksanakan sistem pendukung untuk memenuhi kebutuhan operasional Perseroan di bidang teknologi informasi; dan c. Melakukan pembaharuan sarana dan prasarana TI sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan Perseroan. a. Ensuring that all of the Company's information technology facilities and infrastructure are functioning correctly and reliably; b. Implementing support systems to meet the Company's operational needs in the information technology sector; and c. Upgrading IT facilities and infrastructure in accordance with technological developments and the Company's needs.
3.	**Geographic Information System**	a. Menyediakan data dan informasi terkini mengenai perkembangan luasan area berdasarkan hasil pengukuran lapangan maupun pengolahan foto udara; dan b. Memberikan dukungan data, informasi, serta tenaga pengukuran sesuai dengan kebutuhan departemen lain di lingkungan Perseroan. a. Providing up-to-date data and information regarding area developments based on field measurements and aerial photography processing; and b. Providing data, information, and measurement support as needed by other departments within the Company.

Selain Department of Corporate Information System, Perseroan juga telah membentuk Departemen Corporate Estate Data Analysis yang berfungsi untuk mengelola serta memastikan tersedianya informasi yang akurat, terpadu, dan komprehensif terkait aset dan operasional Perseroan. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar bagi manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan yang tepat dan strategis. Departemen ini dipimpin oleh Head of Corporate Estate Data Analysis yang bertanggung jawab langsung kepada Director of Commodity & Business Development.

Pada Departemen Corporate Estate Data Analysis memiliki tugas dan fungsi antara lain:

a. Mengelola dan melakukan analisis data produktivitas (yang berada di kebun dan pabrik kelapa sawit);

b. Melakukan analisis produksi berdasarkan standar pelaporan yang telah ditetapkan oleh Perseroan;

c. Merumuskan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang pengembangan bisnis Perseroan;

In addition to the Corporate Information System Department, the Company has established a Corporate Estate Data Analysis Department that manages and ensures the availability of accurate, integrated, and comprehensive information on the Company's assets and operations. This information serves as the basis for management in making appropriate and strategic decisions. The Head of Corporate Estate Data Analysis leads the department and reports directly to the Director of Commodity & Business Development.

The Corporate Estate Data Analysis Department's duties and functions include:

a. Managing and analyzing productivity data (from plantations and palm oil mills);

b. Conducting production analysis based on reporting standards established by the Company;

c. Formulating short-term and long-term strategic plans for the Company's business development;

d. Melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap implementasi strategi pengembangan bisnis Perseroan;

e. Menyediakan informasi yang terperinci untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen; dan

f. Merancang *best practice* serta standar operasional umum guna menjamin efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan produksi.

Untuk Head of Corporate Estate Data Analysis dijabat oleh Bapak Adrial berdasarkan Surat Penunjukan Head of Corporate Estate Data Analysis Nomor 43/SK-Direksi/MKTR/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024. Profil yang bersangkutan telah disajikan pada Bab Profil Perseroan, subbab Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Sepanjang tahun 2025, Departemen Corporate Estate Data Analysis telah melaksanakan berbagai program kerja, antara lain:

1. Pengembangan dan pembaruan *database* kebun dan pabrik kelapa sawit;
2. Digitalisasi dan integrasi sistem informasi data;
3. Analisis produktivitas dan efisiensi operasional;
4. Melakukan program verifikasi data lapangan dan memastikan kesesuaian antara data yang dilaporkan dengan kondisi aktual; dan
5. Memberikan data dan analisis sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan.

d. Monitoring and evaluating the implementation of the Company's business development strategy;

e. Providing detailed information to support management decision-making; and

f. Designing best practices and general operational standards to ensure production efficiency, quality, and sustainability.

Mr. Adrial serves as Head of Corporate Estate Data Analysis, as per the Letter of Appointment of Head of Corporate Estate Data Analysis Number 43/SK-Direksi/MKTR/X/2024 dated October 11, 2024. His profile is presented in the Company Profile Chapter, Executive Officer Profile sub-chapter in this Annual Report.

Throughout 2025, the Corporate Estate Data Analysis Department implemented various work programs, including:

1. Developed and updated palm oil plantation and mill databases;
2. Digitized and integrated data information systems;
3. Analyzed productivity and operational efficiency;
4. Conducted field data verification programs and ensured the consistency of reported data with actual conditions; and
5. Provided data and analysis as a basis for preparing annual work plans.

Sertifikasi Departemen Teknologi Informasi

Certification of Information Technology Department

Perseroan secara berkelanjutan menyelenggarakan berbagai program pelatihan teknis dan sertifikasi bagi karyawan di Departemen Teknologi Informasi serta Departemen Data Analysis. Program tersebut

The Company continuously organizes technical training and certification programs for employees in the Information Technology and Data Analysis Departments. These programs are implemented

dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan dan sertifikasi di bidang teknologi informasi, khususnya yang memiliki kompetensi dan relevansi dengan sektor perkebunan kelapa sawit. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan sumber daya manusia, sekaligus memastikan kesiapan Perseroan dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi yang terkini sesuai dengan kebutuhan operasional dan perkembangan industri.

in collaboration with training and certification institutions in the information technology sector, particularly those with competencies and relevance to the palm oil plantation sector. This initiative aims to improve the competence, knowledge, and skills of human resources, while ensuring the Company's readiness to adopt and develop the latest technology in line with operational needs and industry developments.

Upaya pengembangan kompetensi dan sertifikasi tersebut menjadi bagian dari strategi Perseroan untuk meningkatkan kualitas praktik operasional, sehingga mampu menghasilkan produk kelapa sawit yang bernilai tambah dan berdaya saing di masa mendatang. Dengan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi pada tahun 2025 sesuai bidang teknologi informasi yang disampaikan pada tabel berikut.

These competency development and certification efforts are part of the Company's strategy to improve operational practices, thereby enabling it to produce value-added, competitive palm oil products in the future. To this end, the Company is implementing training and certification programs in 2025 in the information technology sector, as outlined in the following table.

Tabel Pengembangan dan Sertifikasi untuk Personel Departemen Corporate Information System dan Departemen Corporate Estate Data Analysis Tahun 2025
Development and Certification for Employees of the Corporate Information System Department and Corporate Estate Data Analysis Department in 2025

No.	Nama Peserta Participant Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification	Nama Penyelenggara Organizer
Corporate Information System Department				
1.	Bimantoro Suryo Budi Sudibyo	Head of Corporate Information System	DIPSY IT GIS (*Information Technology* dan *Geographic Information System*) DIPSY IT GIS (Information Technology and Geographic Information System)	HIPKASI
			Mengelola Proyek Arsitektur Informasi Managing Information Architecture Projects	Geospasial Education
			Pelatihan *Geographic Information System* (GIS) Dasar Menggunakan QGIS secara Daring Basic Online Geographic Information System (GIS) Training Using QGIS	
			Pelatihan *Remote Sensing* Dasar Basic Remote Sensing Training	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
			Quantitative Data Analysis Using Phyton	Qunandhya Sanitra
			Certified Chief Information Officer (CIO)	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
			Mengelola Proyek Arsitektur Informasi Managing Information Architecture Projects	Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Inixindo
			Permodelan Hidrolika menggunakan HEC- RAS (*Hydrologic Engineering Center's River Analysis System*) Hydraulic Modeling using HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center's River Analysis System)	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

			Migrasi Aplikasi ArcMap ke ArcGIS Pro Migrating ArcMap Applications to ArcGIS Pro	Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Inixindo
2.	Arief Rachman	IT Assistant	*Cyber Security Course Level Basic*	ITBOX
			Certified IT System Analyst	*Certified IT System Analyst*
			Certified Secure Computer User V2	*Certified Secure Computer User*
			Quantitative Data Analysis Using Phyton	Qunandhya Sanitra
			Data Science	Digital Skola
			Certified Chief Information Officer	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
			Enterprise Resource Planning Manager Associate	Dilatih.co (PT. Motekar Edukasi Indonesia)
			Mengelola Proyek Arsitektur Informasi Managing Information Architecture Projects	Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Inixindo
3.	Ricky Sukma Dewa Oktavianto	ERP Assistant	DIPSY IT GIS (*Information Technology* dan *Geographic Information System*) DIPSY IT GIS (Information Technology and Geographic Information System)	HIPKASI
			Program Pengembangan Perangkat Lunak Software Development Program	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
Corporate Estate Data Analysis Department				
1.	Adrial	Head of Corporate estate data	DIPSY IT GIS (*Information Technology* dan *Geographic Information System*) DIPSY IT GIS (Information Technology and Geographic Information System)	HIPKASI
			Agronomic & Yield Forcasting	Smart Agriculture
			Strategic Planning & Business Development	Prasetiya Mulya *Executive Learning Institute* (Prasmul-ELI)

Penerapan Sistem Teknologi Informasi Tahun 2025

Information Technology System Implementation In 2025

Perseroan menerapkan sistem teknologi informasi (TI) secara terintegrasi dalam seluruh aktivitas operasional dan bisnis sebagai bagian dari transformasi *smart farming* 4.0. Metode tersebut salah satunya mencakup penyediaan dan pengelolaan data yang berkaitan dengan luas area perkebunan, tingkat produksi, tenaga kerja, serta berbagai data aktivitas operasional lainnya, baik di sektor perkebunan maupun industri pengolahan kelapa sawit. Data tersebut dimanfaatkan sebagai dasar perhitungan biaya dan produksi secara lebih akurat, terukur, dan berbasis data.

The Company implements an integrated information technology (IT) system across all operational and business activities as part of its smart farming 4.0 transformation. This approach includes providing and managing data on plantation area, production levels, workforce, and various other operational activities, both in the plantation sector and the palm oil processing industry. This data is used as the basis for more accurate, measurable, and data-driven cost and production calculations.

Selain itu, Perseroan memanfaatkan perangkat lunak dan basis data berbasis *web mapping* dan *open source* sebagai sistem informasi perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit yang fleksibel, mudah digunakan, serta dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan operasional. Sistem tersebut juga dirancang agar dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang berwenang. Pemanfaatan teknologi ini merupakan bagian dari proses identifikasi dan verifikasi kinerja, potensi, serta kapasitas operasional industri pengolahan yang dimiliki oleh Perseroan.

In addition, the Company utilizes web-based mapping and open-source software and databases as a flexible, easy-to-use, and updatable information system for its palm oil plantations and processing industry, adapting to operational needs. The system is also designed to be accessible to authorized stakeholders. This technology utilization is part of the process of identifying and verifying the performance, potential, and operational capacity of the Company's processing industry.

Selama tahun 2025, Perseroan telah mengimplementasikan sejumlah program teknologi informasi yang mendukung proses bisnis, antara lain sebagai berikut:

In 2025, the Company implemented information technology programs that support business processes, including the following:

1. **Sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP)**
   Sistem ERP digunakan sebagai sarana integrasi seluruh proses bisnis Perseroan, mulai dari kegiatan perkebunan, pabrik pengolahan, proses produksi, distribusi, hingga aktivitas operasional di Kantor Pusat dan Kantor Operasional. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis di seluruh wilayah operasional Perseroan.

2. ***Disaster Recovery Center* (DRC)**
   Disaster Recovery Center merupakan sistem pengelolaan data cadangan yang berfungsi

1. **Enterprise Resource Planning (ERP)**
   The ERP system integrates all of the Company's business processes, from plantation activities and processing plants to production and distribution, as well as operational activities at the Head Office and Operational Offices. The system's implementation aims to improve the effectiveness and efficiency of business processes across all of the Company's operational areas.

2. **Disaster Recovery Center (DRC)**
   The Disaster Recovery Center is a backup data management system that duplicates the

untuk menduplikasi data server Perseroan pada lokasi yang terpisah dari wilayah operasional. Sistem ini disiapkan sebagai langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi potensi gangguan, kerusakan, atau kehilangan data akibat bencana maupun kondisi darurat lainnya.

3. ***Geographic Information System*** **(GIS)**
GIS merupakan perangkat lunak pengolahan data spasial atau pemetaan digital yang dikelola oleh tim internal Perseroan. Sistem ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait luas area perkebunan, sensus pokok tanaman, serta kondisi tutupan lahan di wilayah operasional Perseroan secara lebih akurat dan terstruktur.

4. ***Realtime*** **CCTV** ***Broadcast***
Sistem *realtime* CCTV *broadcast* digunakan sebagai sarana pemantauan aktivitas operasional pada titik-titik strategis yang dianggap penting. Sistem ini mendukung pengendalian dan pengawasan atas seluruh rangkaian kegiatan operasional, mulai dari proses perolehan bahan baku hingga pengolahan di pabrik kelapa sawit.

5. ***Mini Station*** **Meteorologi**
Mini station meteorologi merupakan sistem pengamatan yang terintegrasi dengan sistem ERP dan dilengkapi dengan sensor curah hujan, radiasi matahari (*solar radiation*), serta tingkat kelembapan (*humidity*). Data yang dihasilkan oleh sensor tersebut dikirimkan secara *real-time* untuk dianalisis lebih lanjut dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

6. **Pengembangan** ***Internet of Things*** **(IoT)**, yang meliputi:
   a. **Sistem** ***Inventory Crude Palm Oil*** **(CPO)**
   Sistem ini merupakan sarana pemantauan volume CPO dengan memanfaatkan sensor yang terpasang pada *oil storage tank*. Sensor tersebut mengukur volume berdasarkan data kalibrasi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi. Selanjutnya, data volume yang direkam dikirimkan melalui jaringan internet ke sistem ERP untuk diolah menjadi informasi stok minyak yang tersedia.

Company's server data in a location separate from its operational area. This system serves as a risk mitigation measure to anticipate potential disruptions, damage, or data loss due to disasters or other emergencies.

3. **Geographic Information System (GIS)**
GIS is a spatial data processing or digital mapping software managed by the Company's internal team. This system is used to obtain more accurate, structured information on plantation area, crop census, and land cover conditions in the Company's operational areas.

4. **Realtime CCTV Broadcast**
A real-time CCTV broadcast system is used to monitor operational activities at critical strategic points. This system supports control and oversight of the entire operational chain, from raw material procurement to processing in the palm oil mill.

5. **Mini Meteorological Station**
A mini meteorological station is an observation system integrated with an ERP and equipped with sensors for rainfall, solar radiation, and humidity. The data generated by these sensors is transmitted in real time for further analysis and to serve as a basis for management decisions in oil palm plantations.

6. **Internet of Things (IoT) development,** which includes:
   a. **Crude Palm Oil (CPO) Inventory System**
   This system monitors CPO volume using sensors installed in oil storage tanks. These sensors measure volume based on calibration data issued by a certification body. The recorded volume data is then sent over the internet to an ERP system for processing into available oil stock information.

b. **Sistem Pemantauan Kinerja Mesin Pabrik Pupuk**
Sistem ini menggunakan sensor sebagai pembaca data curah hujan yang terhubung dengan jaringan internet dan terintegrasi dengan sistem ERP. Data curah hujan yang diperoleh dan diolah menjadi informasi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penerapan *best practice* agronomi.

b. **Fertilizer Plant Machine Performance Monitoring System**
This system uses sensors to collect rainfall data, connects to the internet, and integrates with an ERP system. The rainfall data collected and processed can serve as a basis for implementing agronomic best practices.

7. **Aplikasi *Mobile* Kemitraan**
Aplikasi *mobile* kemitraan dikembangkan sebagai sarana komunikasi yang memudahkan interaksi antara Perseroan dan mitra usaha. Aplikasi ini bertujuan untuk mendukung penguatan hubungan kemitraan serta mendorong pengembangan kerja sama yang berkelanjutan.

7. **Partnership Mobile Application**
The partnership mobile application was developed as a communication tool to facilitate interaction between the Company and its business partners. This application aims to strengthen partnership relations and encourage the development of sustainable collaborations.

8. **Sistem ERP Entitas Anak**
Sistem ERP Entitas Anak dirancang untuk mengintegrasikan dan mengendalikan proses bisnis di seluruh Entitas Anak, baik pada aktivitas di Kantor Pusat maupun Kantor Operasional. Melalui sistem ini, diharapkan proses bisnis Perseroan dan Entitas Anak dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan selaras.

8. **Subsidiary's ERP System**
The Subsidiary's ERP System is designed to integrate and control business processes across all Subsidiaries, both at the Head Office and Operational Offices. This system is expected to enable the Company and Subsidiaries' business processes to run more effectively, efficiently, and in harmony.

Bagi Perseroan, penerapan teknologi informasi yang semakin terintegrasi dan andal diharapkan dapat mendukung penerapan praktik berkelanjutan dalam industri kelapa sawit, meningkatkan efisiensi dan kecepatan pada rantai pasok, serta memperkuat keunggulan produk di mata konsumen.

For the Company, the implementation of increasingly integrated and reliable information technology is expected to support sustainable practices in the palm oil industry, increase efficiency and speed in the supply chain, and strengthen product superiority in consumers' eyes.

Keamanan Informasi

Information Security

Perseroan menyadari bahwa keamanan informasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam penerapan sistem teknologi informasi yang andal dan berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan sistem digital dalam proses bisnis, Perseroan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta informasi yang dikelola.

The Company recognizes that information security is a fundamental aspect of implementing a reliable and sustainable information technology system. As the use of digital systems in business processes increases, the Company is committed to maintaining the confidentiality, integrity, and availability of the data and information it manages.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, Perseroan menerapkan langkah-langkah pengamanan sistem teknologi informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan tingkat risiko yang dihadapi, antara lain melalui pengendalian akses pengguna, pengelolaan hak otorisasi, serta penerapan sistem keamanan pada infrastruktur dan perangkat *end user*. Upaya pengamanan ini juga dilakukan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan data, gangguan sistem, maupun ancaman siber yang berpotensi mengganggu kelangsungan operasional Perseroan.

To support this, the Company implements information technology security measures tailored to operational needs and the level of risk faced, including user access controls, rights management, and security systems for infrastructure and end-user devices. These security measures also minimize the risk of data misuse, system disruptions, and cyber threats that could disrupt the Company's operational continuity.

Dalam merespons meningkatnya kompleksitas risiko siber, Perseroan terus meningkatkan kapabilitas ketahanan dan keamanan siber sebagai upaya melindungi kelangsungan bisnis dari potensi gangguan (*cyber attack)* yang berpotensi menghambat pertumbuhan. Penerapan keamanan informasi tersebut, dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan internal Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In response to the increasing complexity of cyber risks, the Company continues to enhance its cybersecurity and resilience capabilities to protect business continuity from potential disruptions (cyberattacks) that could hamper growth. This information security implementation is carried out in accordance with the Company's internal policies and applicable laws and regulations.

Audit Teknologi Informasi

Information Technology Audits

Sebagai bagian dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, Perseroan melaksanakan audit atas penerapan sistem teknologi informasi untuk memastikan bahwa sistem TI telah dijalankan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan serta ketentuan yang berlaku. Audit teknologi informasi merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang terintegrasi dengan sistem pengendalian internal Perseroan.

As part of its implementation of Good Corporate Governance principles, the Company conducts audits of its information technology systems to ensure they operate effectively and efficiently, and in accordance with applicable policies and regulations. Information technology audits are part of the oversight function integrated with the Company's internal control system.

Pelaksanaan audit TI dilakukan oleh Unit Audit Internal dengan pendekatan berbasis risiko, serta dikoordinasikan dengan manajemen terkait dan Komite Audit. Adapun Audit TI ini mencakup antara lain:

IT audits are conducted by the Internal Audit using a risk-based approach and coordinated with relevant management and the Audit Committee. These IT audits include:

1. Mengevaluasi atas keandalan sistem;
2. Melakukan pemantuan terhadap kebijakan TI;
3. Mencegah adanya risiko kebocoran data;

1. Evaluate system reliability;
2. Monitor IT policies;
3. Prevent the risk of data leaks;

4. Menekan kerugian akibat kesalahan proses perhitungan;

5. Menekan kerugian akibat kehilangan data;

6. Meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan dan strategi perusahaan.

Melalui mekanisme audit TI tersebut, Perseroan berupaya memastikan bahwa pengelolaan teknologi informasi senantiasa selaras dengan strategi bisnis, mendukung transparansi, serta meminimalkan risiko operasional dan risiko teknologi.

Direksi juga memastikan proses governansi risiko pada Teknologi Informasi termasuk gangguan, keamanan *cyber*, pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

4. Reduce losses due to calculation errors;

5. Reduce losses due to data loss;

6. Minimize errors in decision-making and company strategy.

Through this IT audit mechanism, the Company strives to ensure that information technology management is consistently aligned with business strategy that supports transparency and minimizes operational and technological risks.

The Board of Directors also oversees the risk governance process in Information Technology, including disruption, cybersecurity, and disaster recovery, to ensure that all major risks are identified, managed, and reported to the Board of Commissioners through the Audit Committee.

Investasi Pengelolaan Teknologi Informasi

Investment in Information Technology Management

Dalam rangka mendukung kelangsungan dan pengembangan usaha, Perseroan secara berkelanjutan melakukan investasi di bidang teknologi informasi sebagai bagian dari strategi peningkatan efisiensi operasional, keandalan sistem, serta penguatan tata kelola perusahaan. Investasi teknologi informasi diarahkan untuk memastikan tersedianya infrastruktur dan layanan TI yang andal, aman, dan mampu mendukung kebutuhan bisnis Perseroan yang terus berkembang.

To support business continuity and development, the Company continuously invests in information technology as part of its strategy to improve operational efficiency, system reliability, and strengthen corporate governance. This information technology investment is aimed at ensuring the availability of reliable, secure IT infrastructure and services that support the Company's evolving business needs.

Rencana Bidang Teknologi Informasi Mendatang

Future Information Technology Plans

Perseroan secara berkelanjutan melakukan investasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi informasi (TI) sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan bisnis dan meningkatkan daya saing usaha. Perseroan menyadari bahwa teknologi informasi memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi Perseroan, yaitu "*menjadi perusahaan yang menghasilkan produk perkebunan terbaik dengan menjalankan best practices agronomi perkebunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan*".

Sejalan dengan visi tersebut, Perseroan telah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi untuk masa mendatang yang diarahkan pada penguatan infrastruktur, peningkatan keamanan sistem, serta optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun rencana pengembangan teknologi informasi Perseroan pada tahun 2026 antara lain meliputi:

1. Perbaikan dan/atau penggantian jaringan internet dengan memanfaatkan teknologi *fiber optic* guna meningkatkan keandalan dan kapasitas konektivitas data;
2. Pembuatan dan/atau penambahan sistem keamanan (*security*) pada *end user* sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap sistem dan data Perseroan;
3. Optimalisasi pengembangan *dashboard business intelligence* untuk mendukung penyajian data dan informasi manajemen yang lebih terintegrasi dan informatif;
4. Pengembangan sistem konsolidasi laporan keuangan guna meningkatkan efektivitas, akurasi, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan; dan
5. Pengembangan penerapan *Internet of Things* (IoT) di pabrik dalam rangka mendukung pemantauan operasional serta peningkatan efisiensi proses produksi.

The Company continuously invests in information technology (IT) research and development to maintain business continuity and enhance competitiveness. The Company recognizes that information technology plays a strategic role in supporting the achievement of its vision "*to become a company that produces the best plantation products by implementing sustainable and environmentally friendly best practice agronomy.*"

In line with this vision, the Company has developed a future information technology management and development plan to strengthen infrastructure, enhance system security, and optimize data utilization for decision-making. The Company's information technology development plan for 2026 includes:

1. Repair and/or replacement of internet networks by utilizing fiber optic technology to increase the reliability and capacity of data connectivity;
2. Create and/or add security systems for end users as an effort to strengthen the protection of the Company's systems and data;
3. Optimize the development of business intelligence dashboards to support the presentation of more integrated and informative management data and information;
4. Development of a financial reporting consolidation system to improve the effectiveness, accuracy, and timeliness of financial reporting; and
5. Development of the Internet of Things (IoT) application in plants to support operational monitoring and increase production process efficiency.



5

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja

Management Discussion and Analysis





Tinjauan Perekonomian Makroekonomi
Macroeconomic Overview

Tujuan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Review Per Business Segment

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Struktur Permodalan
Capital Structure

Dengan mengusung prinsip *Trimitra Harmony* dan *zero waste*, Perseroan mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan inovasi yang terintegrasi.

By embracing Trimitra Harmony and a zero-waste approach, the Company drives sustainable growth through enhanced productivity, efficiency, and innovation.



Tinjauan Perekonomian Global

Global Economic Overview

Sepanjang tahun 2025, ekonomi global bergerak dinamis dan sarat ketidakpastian. Proteksionisme menguat, perang dagang kembali menjadi alat tekanan geopolitik, dan arus perdagangan global semakin terfragmentasi. Kebijakan moneter di negara maju yang kerap berubah, adanya fluktuasi arus modal, serta konflik geopolitik turut memperbesar volatilitas pasar keuangan global. Hal ini memberikan dampak negatif pada keyakinan para pelaku ekonomi dan investor di berbagai negara. Lebih lanjut, kebijakan tarif menurunkan volume dan nilai perdagangan global serta semakin memperparah dampak gangguan rantai pasok dunia sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. Dengan berbagai kondisi tersebut, World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi global kian melambat berkisar 3,0-3,3% pada 2025.

Selain itu, kondisi ini juga mendorong bank-bank sentral cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan kecepatan dan waktu penurunan suku bunga kebijakannya. The Federal Reserve memangkas *Federal Funds Rate* (FFR) sebesar 25 bps pada pertemuan di Desember 2025 dan Bank of England (BoE) juga kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%, yang merupakan pemangkasan keempat sepanjang 2025. Perbedaan tingkat dan waktu penurunan suku bunga kebijakan juga terjadi di *Emerging Market Economies* (EMEs) seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina. Di sisi lain, penurunan inflasi dunia berjalan lebih lambat dari prakiraan sebelumnya, dengan prakiraan inflasi mencapai 3,9% pada 2025. Pada periode yang sama, inflasi negara maju diprakirakan sekitar 2,4% pada 2025, sementara inflasi *emerging economies* sekitar 4,8%.

Sebagian besar negara-negara anggota BRICS dalam periode Juli sampai September 2025 juga mempertahankan suku bunga acuannya seperti Brasil, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Di sisi lain, Rusia menerapkan kebijakan yang sedikit berbeda dengan menurunkan suku bunga acuan saat peralihan dari bulan Agustus sebesar 18,0% persen menjadi 17,0% pada bulan September 2025.

Throughout 2025, the global economy remained dynamic and marked by heightened uncertainty. Protectionism intensified, trade wars re-emerged as instruments of geopolitical pressure, and global trade flows became increasingly fragmented. Shifting monetary policies in advanced economies, fluctuations in capital flows, and ongoing geopolitical conflicts further amplified volatility in global financial markets. These conditions negatively affected the confidence of economic players and investors across various countries. Furthermore, tariff policies reduced both the volume and value of global trade and exacerbated disruptions in global supply chains, thereby affecting business sustainability. Amid these challenges, the World Bank projected global economic growth to moderate to approximately 3.0%–3.3% in 2025.

In addition, these conditions prompted central banks to adopt a more cautious stance in determining the pace and timing of policy rate cuts. The Federal Reserve reduced the Federal Funds Rate (FFR) by 25 basis points at its December 2025 meeting, while the Bank of England (BoE) also lowered its benchmark interest rate by 25 basis points to 3.75%, marking its fourth rate cut in 2025. Variations in the level and timing of policy rate adjustments were also observed across emerging market economies (EMEs), including China, India, South Korea, Malaysia, and the Philippines. On the other hand, the decline in global inflation progressed more slowly than previously anticipated, with global inflation projected at 3.9% in 2025. During the same period, inflation in advanced economies was estimated at around 2.4%, while inflation in emerging economies was projected at approximately 4.8%.

Most BRICS member countries maintained their benchmark interest rates during the July to September 2025 period, including Brazil, India, China, and South Africa. In contrast, Russia adopted a slightly different policy stance by lowering its benchmark interest rate from 18.0% in August to 17.0% in September 2025. This policy was implemented to maintain the monetary conditions

Kebijakan ini diambil untuk mempertahankan kondisi moneter yang diperlukan untuk mengembalikan inflasi ke targetnya pada tahun 2026 karena saat ini kondisi inflasi masih berada di atas target.

necessary to bring inflation back to its target by 2026, as inflation remained above the desired level.

Di negara *Emerging Market Economies* (EMEs), dampak kebijakan tarif AS terhadap perlambatan ekonomi terutama terjadi di Tiongkok, sementara kinerja ekonomi India dan ASEAN+5 mampu bertahan. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok mengalami tren melambat dari 5,0% pada 2024 dan 2025 menjadi 4,4%. Hal ini disebabkan tingginya kebijakan tarif AS berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekspor Tiongkok, kecuali komoditas berbasis teknologi informasi sejalan dengan kuatnya adopsi teknologi dan *Artificial Intelligence* (AI) dan didukung oleh stimulus dari Pemerintah.

In Emerging Market Economies (EMEs), the impact of U.S. tariff policies on economic slowdown was particularly evident in China, while the economic performance of India and ASEAN+5 remained relatively resilient. China's economic growth showed a moderating trend from 5.0% in 2024–2025 to 4.4%. This slowdown was largely attributed to elevated U.S. tariff policies, which affected the growth of China's exports, except for information technology-based commodities, supported by strong technology adoption and Artificial Intelligence (AI) development, as well as government stimulus measures.

Di samping itu, negara-negara anggota ASEAN memiliki kebijakan moneter yang beragam. Negara Thailand dan Filipina menurunkan suku bunga acuan pada rentang bulan Juli sampai September sebaliknya Myanmar, Malaysia, dan Vietnam mengambil kebijakan untuk mempertahankan suku bunga acuannya. Negara ini memilih mempertahankan suku bunga acuannya sebagai langkah kehati-hatian terhadap ketidakpastian ekonomi global dan inflasi yang masih cukup tinggi pada beberapa sektor.

Meanwhile, ASEAN member countries adopted varying monetary policy stances. Thailand and the Philippines reduced their benchmark interest rates during the July to September period, whereas Myanmar, Malaysia, and Vietnam maintained their policy rates. These countries opted to hold rates steady as a precautionary measure against global economic uncertainty and persistently high inflation in certain sectors.

Dari sisi harga komoditas energi cukup bervariasi, rata-rata harga minyak mentah pada triwulan III tahun 2025 sebesar USD67,5 per barel, lebih rendah 13,4% dibandingkan dengan rata-rata harga triwulan yang sama pada tahun lalu; rata-rata harga batu bara sepanjang triwulan III tahun 2025 tercatat sebesar USD110,5 per metrik ton atau melemah 21,6% dibandingkan dengan rata-rata harga triwulan yang sama pada tahun lalu; harga komoditas gas alam dalam rata-rata sepanjang triwulan III tahun 2025 sebesar USD3,0 per mmbtu atau meningkat sebesar 43,7% jika dibandingkan dengan rata- rata harga triwulan yang sama pada tahun lalu.

From the perspective of energy commodity prices, trends were relatively mixed. The average crude oil price in the third quarter of 2025 stood at USD67.5 per barrel, representing a decline of 13.4% compared to the same period in the previous year. The average coal price during the same quarter was recorded at USD110.5 per metric ton, reflecting a decrease of 21.6% year-on-year. In contrast, the average natural gas price in the third quarter of 2025 reached USD3.0 per MMBtu, marking an increase of 43.7% compared to the same period in the previous year.

Sementara itu, sebagian besar harga komoditas logam menguat. Rata-rata harga tembaga sepanjang triwulan III tahun 2025 ini sebesar USD9.808,0 per metrik ton, menguat 6,6% dibandingkan harga pada triwulan III tahun 2024; rata-rata harga nikel sepanjang triwulan III tahun 2025 ini sebesar USD15.029,6 per metrik ton, melemah 7,4% dibandingkan harga pada triwulan III tahun 2024;

Meanwhile, most metal commodity prices showed an upward trend. The average price of copper in the third quarter of 2025 reached USD9,808.0 per metric ton, increasing by 6.6% compared to the same period in 2024. In contrast, the average price of nickel stood at USD15,029.6 per metric ton, declining by 7.4% year-on-year. The average price

rata-rata harga emas mengalami penguatan sebesar 39,5% dibandingkan harga pada triwulan III tahun 2024 menjadi USD3.458,6 per troi ons.

Sebagian besar harga komoditas pertanian melemah. Rata-rata harga komoditas karet mencapai USD2,2 per kilogram, mengalami penurunan sebesar 8,6 persen dibandingkan dengan triwulan III tahun 2024; Komoditas kedelai mengalami penurunan rata-rata harga sebesar 3,2% dibandingkan dengan rata-rata harga triwulan yang sama pada tahun lalu menjadi sebesar USD407,0 per ton. Namun, rata-rata harga minyak kelapa sawit pada triwulan III tahun 2025 tercatat sebesar USD1.013,1 menguat 8,1% dibandingkan jika dibandingkan dengan rata-rata harga triwulan yang sama pada tahun lalu. Salah satu faktor terbesar yang mendorong kenaikan harga ini adalah penurunan tak terduga stok minyak sawit Malaysia sebesar 18% karena menurunnya produksi. Penurunan ini memicu para pedagang untuk melakukan pembelian secara agresif di pasar untuk mengantisipasi stok. Faktor lain yang mendorong penguatan harga adalah fenomena El Nino yang berkepanjangan di wilayah penghasil utama Indonesia, yaitu Sumatera dan Kalimantan. Fenomena ini menyebabkan pengurangan hasil panen. Meskipun curah hujan akhir-akhir ini sedikit mengurangi dampaknya, produksi secara keseluruhan masih tertekan, menambah ketidakpastian pasokan global. Di samping itu, permintaan internasional tetap kuat terutama dari importir besar seperti India dan Pakistan. Dengan meningkatnya permintaan dan risiko pasokan terkait cuaca yang masih terasa, harga minyak kelapa sawit kemungkinan akan tetap kuat dalam beberapa bulan mendatang.

Sumber:
- Siaran Pers "Stabilitas Sektor Keuangan Terjaga Dalam Menghadapi Prospek Perekonomian Tahun 2026", Otoritas Jasa Keuangan, 9 Januari 2026.
- Laporan Perekonomian Indonesia, Bank Indonesia, Februari 2026.
- Media Keuangan, Perjalanan Ekonomi Indonesia 2025 Hadapi Tahun Penuh Tekanan, 19 Januari 2026.
- Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III Tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2025.

of gold experienced a significant increase of 39.5% compared to the third quarter of 2024, reaching USD3,458.6 per troy ounce.

Most agricultural commodity prices, on the other hand, weakened. The average price of rubber was recorded at USD2.2 per kilogram, decreasing by 8.6% compared to the third quarter of 2024. Soybean prices also declined, with the average price falling by 3.2% year-on-year to USD407.0 per ton. However, the average price of crude palm oil (CPO) in the third quarter of 2025 was recorded at USD1,013.1 per ton, reflecting an increase of 8.1% compared to the same period in the previous year. One of the main factors driving this increase was an unexpected 18% decline in Malaysia's palm oil inventories due to lower production levels. This reduction prompted traders to engage in more aggressive purchasing to anticipate supply shortages. Another contributing factor was the prolonged El Niño phenomenon in key production regions of Indonesia, particularly Sumatra and Kalimantan, which led to reduced harvest yields. Although recent rainfall has somewhat mitigated the impact, overall production remains constrained, adding to global supply uncertainty. In addition, international demand remained strong, particularly from major importers such as India and Pakistan. With increasing demand and ongoing weather-related supply risks, palm oil prices are expected to remain firm in the coming months.

Sources:
- Press Release "Financial Sector Stability Maintained Amid the 2026 Economic Outlook", Financial Services Authority (OJK), 9 January 2026.
- Indonesia Economic Report, Bank Indonesia, February 2026.
- Media Keuangan, Indonesia's Economic Journey in 2025 Facing a Year Full of Pressure, January 19, 2026.
- Indonesia and World Economy Development in the Third Quarter of 2025, Ministry of National Development Planning/Bappenas, December 2025.

Tinjauan Perekonomian Nasional

National Economic Overview

Sepanjang tahun 2025, kondisi perekonomian global menghadapi tekanan yang tinggi dan belum sepenuhnya pulih. Walaupun ekonomi tetap tumbuh, tetapi kondisi ini cukup rapuh dan mudah terganggu keputusan politik dan sentimen pasar. Menjaga stabilitas ekonomi domestik dan mempertahankan momentum pertumbuhan menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Di tengah situasi global yang penuh tantangan, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 masih menunjukkan ketahanan yang relatif kuat. Meski tidak melesat tinggi, ekonomi Indonesia konsisten tumbuh dan membaik di tiap triwulannya.

Di tengah tingginya gejolak ekonomi dan geopolitik global, perekonomian Indonesia di triwulan pertama 4,67 naik di triwulan kedua 5,12 lalu di triwulan ketiga menjadi 5,04 dan di triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,39% (*y-on-y*). Selain pertumbuhan ekonomi, beberapa indikator ekonomi juga memperlihatkan kinerja yang positif. Sepanjang tahun 2025, Neraca Perdagangan surplus mencapai USD46,0 miliar atau tumbuh 46,8%. PMI Manufaktur Desember berada di 51,2% yang menggambarkan ekspansi di sektor ekonomi secara keseluruhan. Hal menggembirakan juga diperlihatkan oleh *yield* SBN yang turun 101 basis point dari 7,02% di akhir 2024 menjadi 6,01% di akhir 2025. Tren *yield* SBN yang terus menurun ini menunjukkan kepercayaan investor meningkat dan membuat pembiayaan APBN lebih efisien. Tidak hanya itu, kinerja IHSG juga menunjukkan sentimen positif, meningkat 22,1% dibanding tahun sebelumnya.

Throughout 2025, the global economic environment remained under significant pressure and had not fully recovered. Although economic growth persisted, conditions remained fragile and highly susceptible to political decisions and market sentiment. Maintaining domestic economic stability while sustaining growth momentum became a major challenge for developing countries. Amid these global challenges, Indonesia's economy in 2025 demonstrated relatively strong resilience. While growth was not exceptionally high, it remained consistent and showed gradual improvement across each quarter.

Despite heightened global economic and geopolitical volatility, Indonesia's economic growth stood at 4.67% in the first quarter, increased to 5.12% in the second quarter, slightly moderated to 5.04% in the third quarter, and reached 5.39% (year-on-year) in the fourth quarter of 2024. In addition to economic growth, several key economic indicators also showed positive performance. Throughout 2025, Indonesia recorded a trade surplus of USD46.0 billion, representing a growth of 46.8%. The Manufacturing PMI stood at 51.2% in December, indicating expansion across the broader economic sector. Positive sentiment was also reflected in the yield of government securities (SBN), which declined by 101 basis points from 7.02% at the end of 2024 to 6.01% at the end of 2025. This declining trend indicates increasing investor confidence and contributes to more efficient APBN. Furthermore, the performance of the IHSG also reflected positive sentiment, increasing by 22.1% compared to the previous year.

Indikator Ekonomi Menunjukan **Kinerja Positif**
Economic Indicators Showed **Positive Performance**

Surplus Neraca Perdagangan 2025
Trade Balance Surplus 2025

$46,0M
Jan - Des 2025
Jan - Dec 2025

46,8%
ctc Jan - Des 2025
ctc Jan - Dec 2025

PMI Manufaktur 2025
PMI Manufacturing 2025

51,2M
Des 2025
Dec 2025

ekspansif
expansive
8 dari 12 bulan
8 out of 12 months

Cadangan Devisa 2025
Foreign Exchange Reserves 2025

$156,5M

***Yield* SBN 10Y 2025**
Yield of 10Y SBN 2025

6,01%
Turun 101 *Bps*
Declined 101 bps

101 *Bps*
dari 7,02 %
di akhir 2024
from 7.02%
at the end of 2024

Kinerja IHSG 2025
JCI Performance 2025

8.646,9
Des 2025
Dec 2025

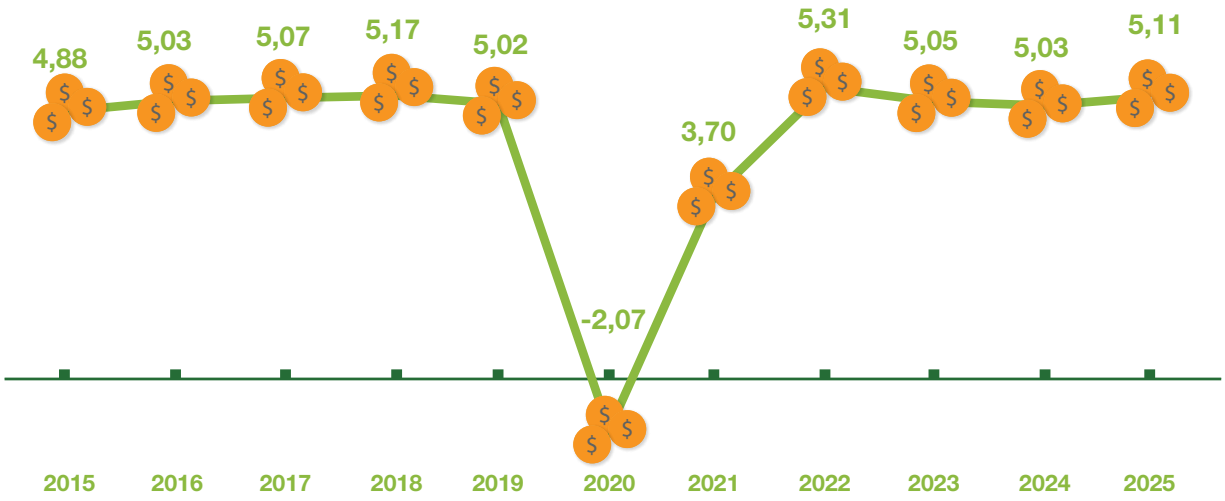
22,1%
ytd

***Base Money* 2025**

11,4%
M0 Des 2025
MO Dec 2025

Dari sisi produksi, sektor Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi yang mencapai sebesar 8,98%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,12%.

From the production side, the Transportation and Warehousing sector recorded the highest growth, reaching 8.98%. Meanwhile, from the expenditure side, Gross Fixed Capital Formation (PMTB) posted the highest growth at 6.12%.



Pertumbuhan ini dialami secara merata hampir seluruh lapangan usaha, sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan secara signifikan yaitu sebesar 8,98%; dan diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 8,71%. Begitu juga dengan Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan terhadap perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,40%.

This growth was broadly distributed across most sectors. The Transportation and Warehousing sector experienced significant growth of 8.98%, followed by Other Services at 8.71%. In addition, the Manufacturing sector, which plays a dominant role in Indonesia's economy, grew by 5.40%.

Dari sisi wilayah, Pulau Jawa berkontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia yang mencapai 56,93%; diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,22%; Pulau Kalimantan sebesar 8,12%; Pulau Sulawesi sebesar 7,22%; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,82%, serta Maluku dan Papua sebesar 2,69%.

From a regional perspective, Java contributed the largest share to Indonesia's economic growth at 56.93%, followed by Sumatra at 22.22%, Kalimantan at 8.12%, Sulawesi at 7.22%, Bali and Nusa Tenggara at 2.82%, and Maluku and Papua at 2.69%.



Dari sisi pengeluaran, PDB triwulan IV–2025 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan proporsi mencapai 53,63% yang meningkat sebesar naik 5,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pembentukan modal tetap bruto mencapai 30,02% yang meningkat sebesar 6,12% dibandingkan tahun sebelumnya dan diikuti ekspor barang dan jasa sebesar 23,08% yang meningkat sebesar 3,25% dibandingkan tahun sebelumnya.

From the expenditure side, GDP in the fourth quarter of 2025 was still dominated by household consumption, accounting for 53.63% and growing by 5.11% compared to the previous year. Meanwhile, Gross Fixed Capital Formation (GFCF) accounted for 30.02%, increasing by 6.12% year-on-year, followed by exports of goods and services at 23.08%, which grew by 3.25% compared to the previous year.

Per Desember 2025, terjadi kenaikan inflasi *year-on-year* (*y-on-y*) sebesar 2,92% akibat adanya kenaikan harga pada sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan,

As of December 2025, inflation increased by 2.92% year-on-year (y-o-y), driven by rising prices across most expenditure groups. These included the food, beverages, and tobacco group at 4.58%; clothing

minuman dan tembakau sebesar 4,58%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,66%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,62%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,20%; kelompok kesehatan sebesar 1,83%.

Terkait hal tersebut, Bank Indonesia mengambil langkah berupa penetapan kebijakan stabilitas harga melalui penurunan BI-*Rate* sebanyak lima kali sebesar 125 bps sepanjang 2025 menjadi 4,75% pada Desember 2025. Selain itu, untuk mengarahkan prakiraan inflasi ke depan agar tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1%, kebijakan suku bunga ditetapkan secara *forward-looking* dan *pre-emptive*. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengendalian inflasi.

Jika dilihat dari sisi pertumbuhan kredit, pada Desember 2025 tercatat 9,69% (*y-on-y*) dengan kredit investasi tumbuh tinggi 21,06% (*y-on-y*), namun kredit modal kerja dan kredit konsumsi masih berada dalam tren melambat masing-masing sebesar 4,52% dan 6,58% (*y-on-y*). Untuk nilai tukar Rupiah, akhir Desember 2025 tercatat Rp16.675 per dolar AS, atau melemah 3,48% dari posisi akhir Desember 2024. Walaupun demikian, pergerakan Rupiah relatif stabil dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang dan lebih kuat dibandingkan dengan mata uang negara maju selain dolar AS. Stabilisasi nilai tukar Rupiah tidak hanya ditopang oleh konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia, tetapi juga oleh peningkatan konversi valuta asing ke Rupiah oleh eksportir seiring dengan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Sumber:
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2025, Badan Pusat Statistik, Februari 2026.
- Laporan Perekonomian Indonesia, Bank Indonesia, Februari 2026.
- Media Keuangan, Perjalanan Ekonomi Indonesia 2025 Hadapi Tahun Penuh Tekanan, 19 Januari 2026.

and footwear at 0.66%; housing, water, electricity, and household fuels at 1.62%; household equipment and routine maintenance at 0.20%; and health at 1.83%.

In response to these developments, Bank Indonesia implemented price stability policies by lowering the BI-Rate five times, totaling 125 basis points throughout 2025, bringing it down to 4.75% as of December 2025. In addition, to ensure that future inflation remains within the target range of 2.5±1%, interest rate policy has been set in a forward-looking and pre-emptive manner. Bank Indonesia also continues to strengthen coordination with both central and regional governments in managing inflation.

From the credit growth perspective, as of December 2025, credit growth was recorded at 9.69% (year-on-year), with investment loans growing strongly at 21.06% (y-o-y). However, working capital loans and consumer loans showed a moderating trend, growing by 4.52% and 6.58% (y-o-y), respectively. Regarding the Rupiah exchange rate, as of the end of December 2025, it stood at Rp16,675 per US dollar, reflecting a depreciation of 3.48% compared to the end of December 2024. Nevertheless, the Rupiah remained relatively stable compared to currencies of other emerging market economies and was stronger than most developed country currencies, except for the US dollar. The stabilization of the Rupiah was supported not only by Bank Indonesia's consistent stabilization policies but also by increased foreign exchange conversion into Rupiah by exporters, in line with strengthened policies on Export Proceeds from Natural Resources (DHE SDA).

Sources:
- Indonesia Economic Growth Q4 2025, Statistics Indonesia (BPS), February 2026.
- Indonesia Economic Report, Bank Indonesia, February 2026.
- Media Keuangan, Indonesia's Economic Journey in 2025 Facing a Year Full of Pressure, January 19, 2026.

Analisis Industri Sawit

Palm Oil Industry Analysis

Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, sepanjang tahun 2025 Indonesia masih mencatat kinerja positif dengan pertumbuhan produksi dan ekspor. Industri sawit Indonesia tumbuh positif pada 2025 dengan peningkatan produksi CPO (*Crude Palm Oil*) mencapai 51,7 juta ton, naik sekitar 7,2% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 48,2 juta ton. Produksi PKO mencapai 4,893 juta ton, meningkat 6,41% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,598 juta ton. Dengan demikian, total produksi gabungan CPO dan PKO tahun 2025 mencapai 56,55 juta ton, meningkat 7,18% dari produksi tahun 2024 sebesar 52,76 juta ton.

Pertumbuhan juga terjadi pada kinerja ekspor, dimana sepanjang tahun 2025 volume ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 32,3 juta ton, meningkat 9,5% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 29,5 juta ton. Tingginya permintaan global karena harga minyak sawit lebih kompetitif dibandingkan harga minyak nabati lainnya.

Dari sisi domestik, konsumsi minyak sawit dalam negeri juga mengalami pertumbuhan. Tahun 2025, konsumsi minyak sawit tercatat sebesar 24,8 juta ton, meningkat 3,82% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 23,9 juta ton. Pertumbuhan ini didorong sektor biodiesel yang mencapai 12,704 juta ton, meningkat 10,97% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 11,447 juta ton. Hal ini juga diikuti *oleokimia* yang mencapai 2,207 juta ton, meningkat 1,22% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,234 juta ton. Sementara itu, konsumsi untuk kebutuhan pangan mengalami penurunan yang tercatat sebesar 9,834 juta ton, turun 3,64% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10,205 juta ton. Industri sawit masih menghadapi tantangan struktural, terutama penurunan produktivitas nasional di tengah meningkatnya konsumsi domestik khususnya untuk program *biofuel*.

As the world's largest palm oil producer, Indonesia continued to record positive performance throughout 2025, with growth in production and exports. The Indonesian palm oil industry saw positive growth in 2025, with crude palm oil (CPO) production reaching 51.7 million tons, rising approximately 7.2% from 48.2 million tons in 2024. Palm kernel oil (PKO) production is estimated at 4.893 million tons, reflecting a growth of 6.41% compared to 4.598 million tons in 2024. As a result, total combined production of CPO and PKO in 2025 is projected to reach 56.55 million tons, marking an increase of 7.18% from 52.76 million tons in 2024.

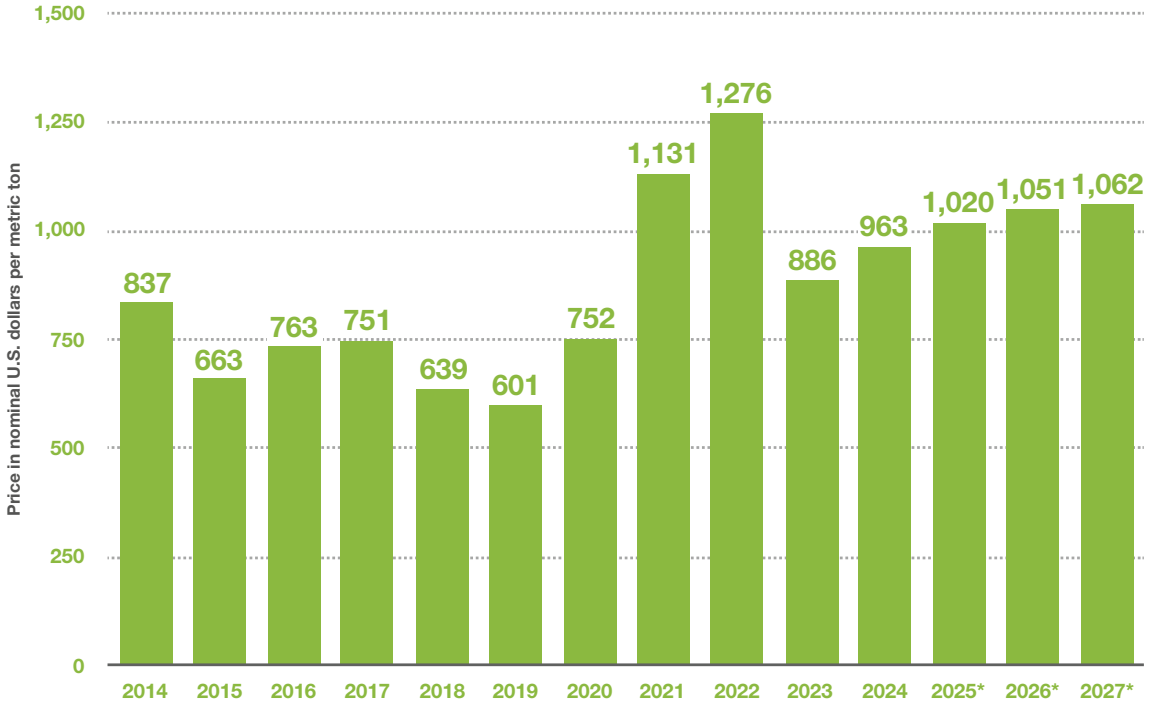
Growth is also evident in export performance, with Indonesia's palm oil export volume reaching 32.3 million tons in 2025, an increase of 9.5% compared to 29.5 million tons in 2024. This growth is driven by strong global demand, supported by the relatively more competitive pricing of palm oil compared to other vegetable oils.

From the domestic perspective, palm oil consumption also recorded growth. In 2025, domestic palm oil consumption reached 24.8 million tons, increasing by 3.82% compared to 23.9 million tons in 2024. This growth was primarily driven by the biodiesel sector, which reached 12.704 million tons, up 10.97% from 11.447 million tons in 2024. This was followed by the oleochemical sector, which reached 2.207 million tons, reflecting a slight increase of 1.22% compared to 2.234 million tons in the previous year. Meanwhile, consumption for food purposes declined to 9.834 million tons, down by 3.64% compared to 10.205 million tons in the previous year. The palm oil industry continues to face structural challenges, particularly declining national productivity amid rising domestic consumption, especially driven by biofuel programs.

Dari sisi harga, harga referensi CPO rata-rata per bulan di Indonesia sepanjang tahun 2025 mengalami fluktuasi, dibuka tinggi di awal tahun, sempat turun pada Mei, dan kembali menguat pada kuartal akhir (Oktober-November) dengan kisaran US$900–960 per metrik ton (MT). Penurunan produksi sempat memicu kenaikan harga di pertengahan tahun. Harga CPO rata-rata per bulan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

From a pricing perspective, the average monthly CPO reference price in Indonesia throughout 2025 experienced fluctuations. Prices opened at a relatively high level at the beginning of the year, declined in May, and strengthened again in the final quarter (October–November), ranging between USD900–960 per metric ton (MT). The temporary decline in production also contributed to price increases during the mid-year period. The average monthly CPO prices throughout 2025 are presented as follows:

Harga CPO rata-rata Periode 2014-2027
Average COP Price in 2014-2027
(US $/MT)



Sumber:
- Info Sawit, GAPKI: Produksi Sawit 2025 Naik 7,2%, Industri Hadapi Tantangan Tata Kelola dan Tekanan Global, 13 Maret 2026.
- GAPKI, Posisi Harga Komoditas Kelapa Sawit, 2026.
- www.statista.com, Average prices for palm oil worldwide from 2014 to 2027.

Source:
- Info Sawit, GAPKI: Palm Oil Production Rose 7.2% in 2025, Industry Faces Governance Challenges and Global Pressure, March 13, 2026.
- GAPKI, Palm Oil Commodity Price Position, 2026.
- www.statista.com, Harga rata-rata minyak sawit di seluruh dunia dari tahun 2014 hingga 2027.

Strategi Utama Perseroan Tahun 2025
Company's Key Strategies for 2025

Berbagai pencapaian yang berhasil diraih Perseroan ditahun-tahun sebelumnya, Perseroan telah merancang serangkaian strategi bisnis untuk melanjutkan pencapaian sebelumnya dan meraih pencapaian baru di tahun 2025. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, serangkaian strategi

Building on the achievements attained in previous years, the Company has formulated a series of business strategies to sustain past performance and capture new opportunities in 2025. Compared to previous years, these strategies focus on continuous productivity improvement, operational

ini mencakup peningkatan produktivitas yang berkelanjutan, efisiensi biaya operasional dan memperkuat inovasi. Namun, tahun 2025 Perseroan lebih mengedepankan prinsip *trimitra harmony* yang menjaga keseimbangan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat yang berpegang teguh pada semangat kebun *zero waste*.

Dalam menjalankan aktivitas bisnis berkelanjutan, Perseroan berupaya untuk mensinergikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan menghasilkan produk Perkebunan terbaik namun tetap bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, berikut strategis besar yang diterapkan sepanjang tahun 2025:

1. **Peningkatan Produktivitas dan kualitas serta ketelusuran**
   Pasokan *supply chain* yang tertelusur serta konsisten dengan minimal 80% dari kebutuhan pengolahan pabrik.

2. **Efisiensi Biaya**
   Penetapan harga dengan bahan baku yang sesuai dengan kualitas untuk menaikkan produksi minyak dan menekan *cost* produksi

3. ***Zero Waste* & Keberlanjutan**
   Memaksimalkan penjualan produk *waste* sesuai dengan kapasitas produksi, serta mendorong penggunaan prinsip keberlanjutan kepada supplier (internal dan eksternal).

Serangkaian strategi diatas merupakan upaya Perseroan dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis yang sesuai dengan visi dan misi Perusahaan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai Perseroan dengan terus memperhatikan lingkungan alam semesta.

cost efficiency, and strengthening innovation. However, in 2025, the Company places greater emphasis on the trimitra harmony principle, which seeks to maintain a balance between the Company, the Government, and the community, while upholding a strong commitment to a zero-waste plantation concept.

In conducting sustainable business activities, the Company strives to integrate economic, social, and environmental aspects by delivering high-quality plantation products while also providing benefits to surrounding communities and preserving the environment. To achieve these objectives, the following key strategic initiatives were implemented throughout 2025:

1. **Increased Productivity, Quality, and Traceability**
   A traceable and consistent supply chain meeting at least 80% of the plant's processing needs.

2. **Cost Efficiency**
   Pricing raw materials according to quality to increase oil production and reduce production costs.

3. **Zero Waste & Sustainability**
   Maximizing sales of waste products in accordance with production capacity and encouraging the use of sustainability principles among suppliers (internal and external).

The above strategies represent the Company's efforts to drive business growth in line with its vision and mission. This is also expected to increase the Company's value by continuing to prioritize the natural environment.

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

Seperti yang diketahui, perkembangan industri sawit terus meningkat dari tahun ke tahun baik di pasar global maupun di pasar nasional. Dalam menghadapi situasi tersebut, Perseroan harus menjaga eksistensinya dengan mengkaji aspek pemasaran lebih lanjut secara berkala. Hal ini dilakukan agar Perseroan mengetahui strategi yang tepat dalan menjalankan bisnis Perseroan. Dalam hal ini, aspek pemasaran meliputi strategi pemasaran dan pangsa pasar yang dimiliki Perseroan.

As is well recognized, the palm oil industry continues to grow steadily both in global and domestic markets. In response to these developments, the Company must maintain its market presence by periodically reviewing its marketing aspects. This approach enables the Company to determine the most appropriate strategies for conducting its business activities. In this regard, the marketing aspect encompasses both marketing strategies and the Company's market share.

Strategi Pemasaran

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah merancang beberapa strategi pemasaran untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan pertumbuhan bisnis Perusahaan, diantaranya adalah:

1. **Penguatan Pangsa Pasar Domestik**
   Menjalin kerja sama panjang dengan *buyer* utama untuk memperkuat distribusi penjualan ditengah kondisi ekonomi dan pasar global yang tidak pasti;

2. **Rasio Persediaan (Barang Jadi)**
   Memaksimalkan rasio persediaan dengan kebutuhan manajemen;

3. **Harga Pasar yang Kompetitif**
   Penyesuaian harga pasar CPO global dan nasional dengan melakukan penetapan harga dengan periodik jangka pendek serta mengoptimalisasi profit melalui efisiensi rantai pasok;

4. **Peningkatan Kualitas dan Standarisasi Produk**
   Penguatan kualitas dan standarisasi produk melalui penerapan sertifikasi serta pengendalian mutu yang ketat di seluruh proses produksi.

Penerapan strategi pemasaran dalam aktivitas bisnis berhasil menggerakkan Perseroan sesuai dengan arah dan tujuan Perusahaan. Melalui strategi ini, Perseroan lebih sigap dalam menangkap peluang, meningkatkan inovasi melalui riset dan pengembangan dan lebih dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pasar global dan nasional serta memperbaiki hal-hal yang kurang tepat di tahun sebelumnya.

Pangsa Pasar

Tahun 2025, Perseroan dan Entitas Anak masih menjalankan aktivitas bisnis yang seluruhnya ditujukan untuk pasar domestik. Produk yang dihasilkan adalah *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO). Saat ini, pangsa pasar Perseroan mencatatkan total produksi CPO tahun 2025 mengalami peningkatan 9,60% dibandingkan tahun 2024. Sedangkan tahun produksi CPO dan CPKO tahun 2025 juga mengalami kenaikan 13,51% dibandingkan tahun 2024 pada tabel berikut:

Marketing Strategy

Throughout 2025, the Company has developed several marketing strategies to address global economic challenges and support business growth, including:

1. **Strengthening Domestic Market Share**
   Establishing long-term partnerships with key buyers to strengthen sales distribution amidst uncertain global economic and market conditions;

2. **Inventory Ratio (Finished Goods)**
   Maximizing the Inventory Ratio to meet management needs;

3. **Competitive Market Pricing**
   Adjusting global and national CPO market prices by implementing short-period pricing and optimizing profits through supply chain efficiency;

4. **Improving Product Quality and Standardization**
   Strengthening product quality and standardization through the implementation of certification and strict quality control throughout the production process.

The implementation of marketing strategies in business activities has successfully propelled the Company toward its goals. Through this strategy, the Company is more agile in seizing opportunities, increasing innovation through research and development, and better understanding global and national market needs, while correcting any shortcomings from the previous year.

Market Share

In 2025, the Company and its Subsidiaries continued to operate business activities entirely for the domestic market. The products produced were Crude Palm Oil (CPO) and Crude Palm Kernel Oil (CPKO). The Company's market share increased by 9.60% in total CPO production in 2025 compared to 2024. Meanwhile, CPO and CPKO production in 2025 also increased by 13.51% compared to 2024, as shown in the following table:

Tabel Pangsa Pasar Perseroan dibandingkan Industri Sawit Nasional
Table: Company Market Share Compared to the National Palm Oil Industry

(dalam 1000 ton)
(in 1,000 tons)

Pangsa Pasar Market Share	Uraian Description	2025	2024
Produksi *Crude Palm Oil* (CPO) atau Minyak Sawit Mentah **Crude Palm Oil (CPO) Production**	Perseroan Company	**77**	70
	Nasional National	51.660	48.164
	Pangsa Pasar **Market Share**	**0,15%**	**0,15%**
Produk *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) atau Minyak Inti Sawit **Crude Palm Kernel Oil (CPKO) Production**	Perseroan Company	**7**	4
	Nasional National	4.893	4.598
	Pangsa Pasar **Market Share**	**0,14%**	**0,09%**
Total Produksi **Total Production**	Perseroan Company	**92**	84
	Nasional National	56.553	52.762
	Pangsa Pasar **Market Share**	**0,16%**	**0,16%**

Sumber: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), 2025.
Source: Indonesian Palm Oil Association (GAPKI), 2025

Perseroan optimis mampu untuk memenuhi permintaan pasar domestik yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Potensi ini menjadikan Perseroan terus berupaya meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan tanpa mengabaikan lingkungan. Penerapan strategi bisnis dan peningkatan pangsa pasar Perseroan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan yang ramah lingkungan.

The Company is optimistic about its ability to meet domestic market demand, which continues to increase year after year. This potential drives the Company to continuously strive to improve the quality of its products without compromising the environment. The implementation of business strategies and the expansion of the Company's market share are expected to drive sustainable and environmentally responsible business growth.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Implementation of Corporate Governance

Dalam menjalankan operasional usahanya, Perseroan memiliki segmen usaha yang terdiri dari Tandan Buah Segar (TBS), Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit dan Inti Kelapa Sawit. Jika ditelaah lebih jauh, produksi pada segmen usaha tersaji pada tabel di bawah ini:

In carrying out its business operations, the Company operates across several business segments, namely Fresh Fruit Bunches (FFB), Palm Oil and Palm Kernel Processing. A more detailed overview of production across these business segments is presented in the table below:

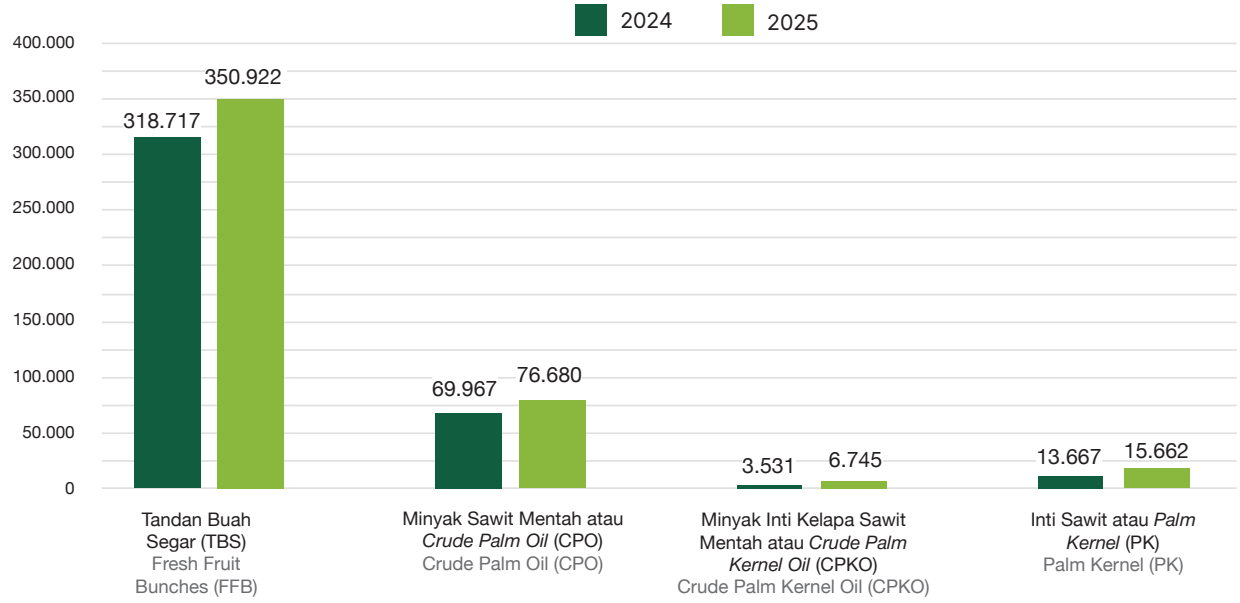
Tabel Produksi per Segmen Usaha
Table: Production by Business Segment

(dalam ton)
(in tons)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Ton)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tandan Buah Segar (TBS) Fresh Fruit Bunches (FFB)	350.922	318.717	32.305	10,10%
Minyak Sawit Mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) Crude Palm Oil (CPO)	76.680	69.967	6.713	9,60%
Minyak Inti Kelapa Sawit Mentah atau *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	6.745	3.531	3.214	91,01%
Inti Sawit atau *Palm Kernel* (PK) Palm Kernel (PK)	15.622	13.667	1.955	14,30%
Total Produksi **Total Production**	**449.969**	**405.882**	**44.084**	**10,86%**

Grafik Produksi Per Segmen Usaha (dalam Ton)

Chart: Production by Business Segment (in Tons)



Produksi Per Segmen Usaha

Sepanjang tahun 2025, Perseroan mencatatkan kinerja operasional yang solid dengan peningkatan signifikan pada hampir seluruh lini produksi. Total Tandan Buah Segar (TBS) yang diolah meningkat sebesar 10,10% menjadi 350.922 ton, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 318.717 ton. Peningkatan ini terutama berasal dari kontribusi TBS pihak ketiga yang tumbuh sebesar 17%.

Production by Business Segment

Throughout 2025, the Company recorded solid operational performance, with significant improvements across nearly all production lines. The total volume of Fresh Fruit Bunches (FFB) processed increased by 10.10% to 350,922 tons, compared to 318,717 tons in the previous year. This growth was primarily driven by third-party FFB contributions, which rose by 17%.

Produksi minyak sawit mentah (CPO) meningkat 9,60% dari 69.967 ton pada 2024 menjadi 76.680 ton pada 2025. Untuk *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) mengalami peningkatan sebesar 91% dari 3.531 ton pada 2024 menjadi 6.745 ton pada 2025. Begitu juga pada produksi inti sawit (PK) yang meningkat 14,30 % menjadi 15.622 ton dari sebelumnya 13.667 ton.

Crude Palm Oil (CPO) production increased by 9.60%, from 69,967 tons in 2024 to 76,680 tons in 2025. Meanwhile, Crude Palm Kernel Oil (CPKO) production surged by 91%, from 3,531 tons in 2024 to 6,745 tons in 2025. Similarly, Palm Kernel (PK) production grew by 14.30%, reaching 15,622 tons compared to 13,667 tons in the previous year.

Secara keseluruhan, total *output* produksi meningkat dari 405.882 ton pada 2024 menjadi 449.969 ton pada 2025, atau tumbuh sebesar 10,86%.

Overall, total production output increased from 405,882 tons in 2024 to 449,969 tons in 2025, representing a growth of 10.86%.

Sedangkan untuk tinjauan operasi Perseroan melalui pendapatan/penjualan dan laba bruto tersaji pada tabel di bawah ini:

Meanwhile, an overview of the Company's operational performance in terms of revenue/sales and gross profit is presented in the table below:

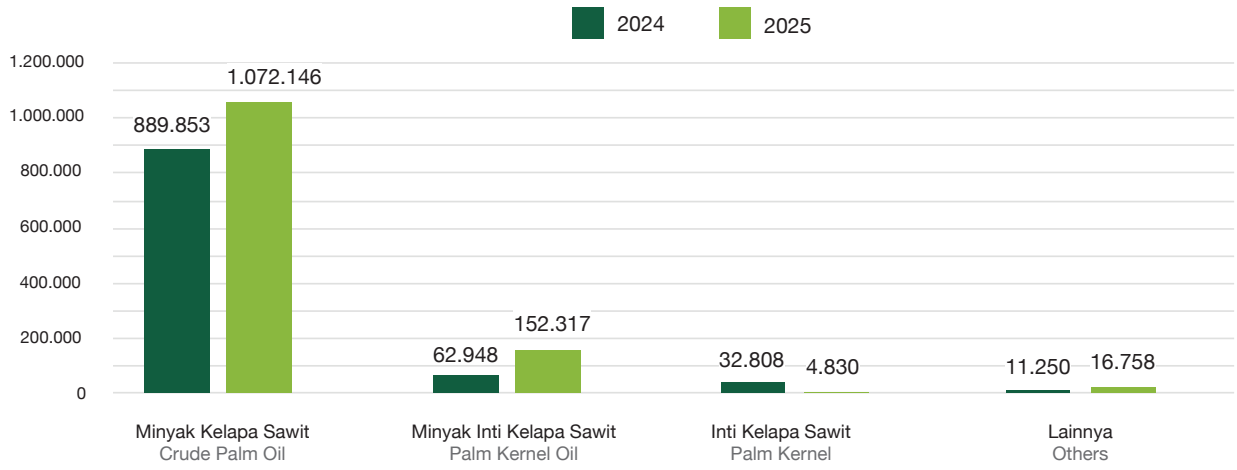
Tabel Penjualan Neto dan Laba Bruto per Segmen Usaha
Table: Net Sales and Gross Profit by Business Segment

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penjualan Neto **Net Sales**				
Minyak Kelapa Sawit Crude Palm Oil	1.072.145.795	899.852.983	172.292.812	19,15%
Minyak Inti Kelapa Sawit Palm Kernel Oil	152.317.397	62.947.662	89.369.735	141,97%
Inti Kelapa Sawit Palm Kernel	4.829.964	32.808.065	(27.978.101)	(85,28%)
Lainnya Others	16.757.708	11.249.662	5.508.046	48,96%
Jumlah dari Penjualan Neto **Total Net Sales**	**1.246.050.864**	**1.006.858.372**	**239.192.492**	**23,76%**
Laba Bruto **Gross Profit**				
Minyak Kelapa Sawit Crude Palm Oil	151.345.406	160.360.272	(9.014.866)	(5,62%)
Minyak Inti Kelapa Sawit Palm Kernel Oil	34.944.617	11.217.726	23.726.891	211,51%
Inti Kelapa Sawit Palm Kernel	241.498	5.846.633	(5.605.135)	(95,87%)
Lainnya Others	2.841.396	2.004.772	836.624	41,73%
Jumlah **Total**	**189.372.917**	**179.429.403**	**9.943.514**	**5,54%**

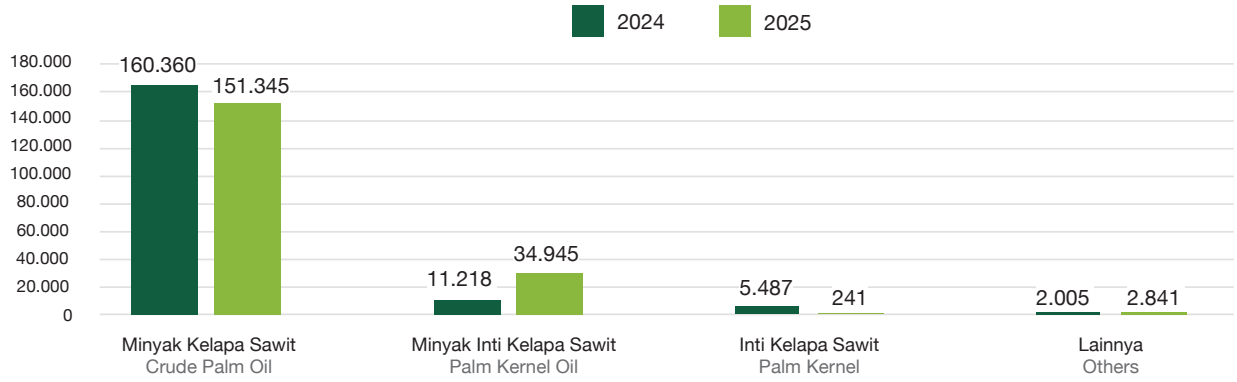
Grafik Penjualan Neto Per Segmen Usaha (dalam Jutaan Rupiah)

Chart: Net Sales by Business Segment
(in Millions of Rupiah)



Grafik Laba Bruto Per Segmen Usaha (dalam Jutaan Rupiah)

Chart: Gross Profit by Business Segment
(in Millions of Rupiah)



Penjualan Neto

Penjualan bersih pada produk minyak kelapa sawit pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 19,15% menjadi Rp1.072,15 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp899,85 miliar. Hal serupa terjadi pada penjualan bersih produk minyak inti kelapa sawit yang mencapai Rp152,32 miliar yang meningkat sangat signifikan mencapai 141,97% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp62,95 miliar. Penjualan bersih lainnya tercatat sebesar Rp16,76 miliar meningkat sebesar 48,96% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp11,25 miliar. Sedangkan penjualan bersih pada produk inti kelapa sawit mencapai Rp4,83 miliar menurun sebesar 85,28% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp32,81 miliar.

Sepanjang tahun 2025, penjualan bersih Perseroan mencapai Rp1.246,05 miliar yang tumbuh sebesar 23,76% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp1.006,86 miliar. Peningkatan ini terjadi atas kontribusi penjualan produk minyak kelapa sawit sebesar 19,15% dari total penjualan neto, penjualan produk minyak inti kelapa sawit sebesar 141,97% dari total penjualan neto dan penjualan lainnya sebesar 48,96%. Sedangkan, penjualan inti kelapa sawit mengalami penurunan sebesar 85,28% dari total penjualan neto yang dicatat oleh Perseroan. Namun, hal ini tetap menjadikan pertumbuhan penjualan secara keseluruhan meningkat.

Laba Bruto

Laba bruto pada produk minyak kelapa sawit pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 5,62% menjadi Rp151,34 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp160,36 miliar. Namun, laba bruto produk minyak inti kelapa sawit mengalami peningkatan yang sangat signifikan mencapai Rp34,94 miliar meningkat 211,51% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp11,22 miliar. Sementara itu, laba bruto produk inti kelapa sawit tercatat sebesar Rp241,50 juta yang mengalami penurunan sebesar 95,87% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp5,85 miliar. Sedangkan laba bruto lainnya tercatat sebesar Rp2,84 miliar meningkat sebesar 41,73% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp2,01 miliar.

Sepanjang tahun 2025, laba bruto Perseroan mencapai Rp189,37 miliar yang tumbuh 5,54% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp179,43 miliar. Peningkatan ini terjadi atas kontribusi laba bruto produk minyak inti kelapa sawit sebesar

Net Sales

Net sales of palm oil products in 2025 increased by 19.15% to Rp1,072.15 billion, compared to Rp899.85 billion in 2024. A similar trend was observed in net sales of palm kernel oil products, which reached Rp152.32 billion, representing a significant increase of 141.97% compared to Rp62.95 billion in 2024. Other net sales were recorded at Rp16.76 billion, reflecting an increase of 48.96% compared to Rp11.25 billion in 2024. In contrast, net sales of palm kernel products declined to Rp4.83 billion, a decrease of 85.28% compared to Rp32.81 billion in 2024.

Overall, the Company's net sales in 2025 reached Rp1,246.05 billion, representing a growth of 23.76% compared to Rp1,006.86 billion in 2024. This increase was driven by contributions from palm oil product sales, which grew by 19.15%, palm kernel oil product sales, which surged by 141.97%, and other sales, which increased by 48.96%. Meanwhile, palm kernel product sales declined by 85.28% of total net sales recorded by the Company. Nevertheless, the overall sales performance still recorded positive growth.

Gross Profit

Gross profit from palm oil products in 2025 decreased by 5.62% to Rp151.34 billion, compared to Rp160.36 billion in 2024. However, gross profit from palm kernel oil products recorded a significant increase, reaching Rp34.94 billion, up 211.51% from Rp11.22 billion in 2024. Meanwhile, gross profit from palm kernel products was recorded at Rp241.50 million, reflecting a sharp decline of 95.87% compared to Rp5.85 billion in 2024. Other gross profit amounted to Rp2.84 billion, representing an increase of 41.73% compared to Rp2.01 billion in the previous year.

Overall, the Company's gross profit in 2025 reached Rp189.37 billion, representing a growth of 5.54% compared to Rp179.43 billion in 2024. This increase was primarily driven by the significant contribution from palm kernel oil products, which

211,51% dari total laba bruto dan laba bruto produk lainnya sebesar 41,73% dari total laba bruto. Hal ini menjadikan pertumbuhan laba bruto secara keseluruhan meningkat.

grew by 211.51%, as well as other products, which increased by 41.73%. As a result, the Company recorded overall growth in gross profit.

Tinjauan Keuangan

Financial Overview

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak disusun pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang tersaji dalam Laporan Tahunan ini. Data-data keuangan yang terdapat dalam Laporan Keuangan Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno Palilingan & Rekan (member PKF International) dan telah mendapatkan opini penyajian secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dan Entitas Anak ("Grup") tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

A summary of the Company's and its Subsidiaries' key financial data is presented in the Company's Financial Statements for the years ended December 31, 2025 and 2024, as included in this Annual Report. The financial data contained in the Company's Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno Palilingan & Rekan (a member of PKF International) and have received an unqualified opinion, stating that the consolidated financial position of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk and its Subsidiaries (the "Group") as of December 31, 2025, as well as its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, are fairly presented, in all material respects, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

Kinerja Keuangan

Financial Performance

Kinerja keuangan Perseroan terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta Laporan Arus Kas Konsolidasian disajikan sebagai berikut.

The Company's financial performance consists of the Consolidated Statement of Financial Position, the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, and the Consolidated Statement of Cash Flows, which are presented as follows.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

Tabel Produksi per Segmen Usaha
Table: Production per Business Segment

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

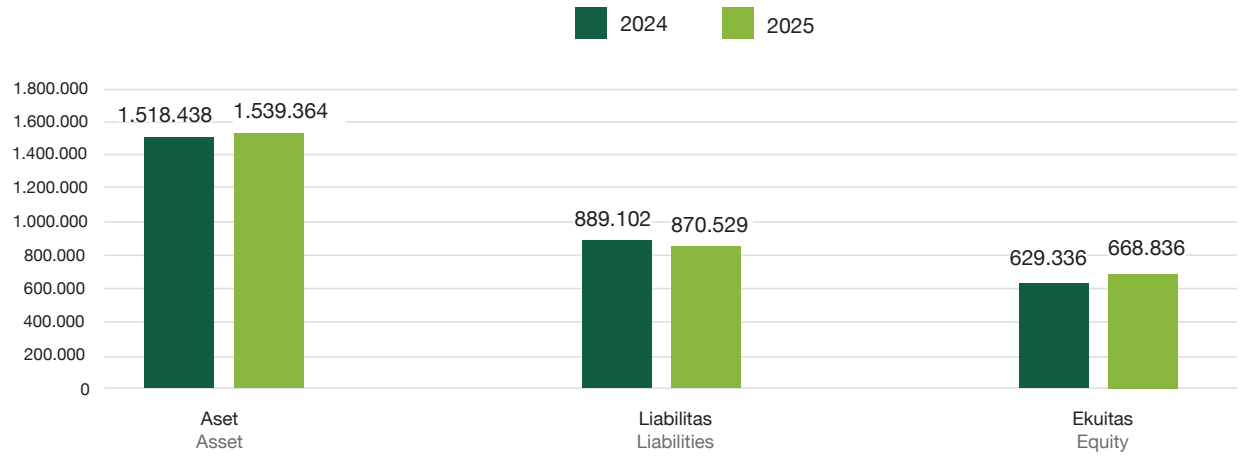
Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset **Assets**				
Aset Lancar **Current Assets**				
Kas dan bank Cash and banks	161.165.175	164.519.625	(3.354.450)	(2,04%)
Piutang usaha – pihak ketiga Account receivables – third parties	31.827.677	29.793.983	2.033.694	6,83%
Piutang lain-lain – bersih Other receivables – net	9.472.906	12.709.021	(3.236.115)	(25,46%)
Persediaan Inventories	74.158.199	46.745.699	27.412.500	58,64%
Aset biologis Biological assets	26.415.414	21.203.683	5.211.731	24,58%
Uang muka dan beban dibayar di muka Advances and prepayment	28.408.320	28.154.072	254.248	0,90%
Pajak dibayar di muka Prepaid Taxes	20.906.605	25.029.106	(4.122.501)	(16,47%)
Aset lancar lainnya Other Current Assets	340.494.500	340.602.500	(108.000)	(0,03%)
Jumlah Aset Lancar **Total Current Assets**	**692.848.796**	**668.757.689**	**24.091.107**	**3,60%**
Aset Tidak Lancar **Non-Current Assets**				
Taksiran tagihan pajak penghasilan badan Estimated claims for corporate income tax refund	59.740	59.740	-	0,00%
Piutang plasma Plasma receivables	42.669.793	43.303.116	(633.323)	(1,46%)
Pembibitan Nursery	1.585.052	1.727.180	(142.128)	(8,23%)
Aset tetap dan tanaman produktif – bersih Fixed assets and bearer plants – net	769.359.688	776.861.557	(7.501.869)	(0,97%)
Aset hak guna – bersih Right of use assets – net	5.521.448	-	5.521.448	100,00%
Aset pajak tangguhan – bersih Deferred tax assets – net	1.617.350	368.915	1.248.435	338,41%
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	25.702.384	27.360.298	(1.657.914)	(6,06%)
Jumlah Aset Tidak Lancar **Total Non-Current Assets**	**846.515.455**	**849.680.806**	**(3.165.351)**	**(0,37%)**
Jumlah Aset **Total Assets**	**1.539.364.251**	**1.518.438.495**	**20.925.756**	**1,38%**

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas dan Ekuitas **Liabilities and Equity**				
Liabilitas Jangka Pendek **Current Liabilities**				
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	20.000.000	20.000.000	-	0,00%
Utang usaha – pihak ketiga Account payables – third parties	46.770.275	36.911.506	9.858.769	26,71%
Utang lain-lain Pihak Berelasi Other payable – Related Parties	10.914.111	5.990.000	4.924.111	82,21%
Utang pajak Tax payable	30.844.799	28.527.689	2.317.110	8,12%
Beban yang masih harus dibayar Accrued expenses	13.877.189	6.750.738	7.126.451	105,57%
Uang muka penjualan Sales advances	1.419.616	536.344	883.272	164,68%
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Current portion of long-term liabilities:				
Utang pembiayaan konsumen Consumer financing payables	2.274.679	2.921.054	(646.375)	(22,13%)
Liabilitas sewa Lease liabilities	4.103.052	875.134	3.227.918	368,85%
Pinjaman bank Bank loans	68.849.667	68.928.500	(78.833)	(0,11%)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek **Total Current Liabilities**	**199.053.388**	**171.440.965**	**27.612.423**	**16,11%**
Liabilitas Jangka Panjang **Non-Current Liabilities**				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Long-term liabilities net-off current portion:				
Utang pembiayaan konsumen Consumer financing payables	940.165	1.936.307	(996.142)	(51,45%)
Liabilitas sewa Lease liabilities	2.267.354	682.285	1.585.069	232,32%
Pinjaman bank Bank loans	659.302.667	709.787.667	(50.485.000)	(7,11%)
Liabilitas pajak tangguhan – bersih Deferred tax liabilities – net	1.868.126	95.526	1.772.600	1855,62%
Cadangan imbalan pasca-kerja Allowance for post-employment benefits	7.096.943	5.159.695	1.937.248	37,55%

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-Current Liabilities**	**671.475.255**	**717.661.480**	**(46.186.225)**	**(6,44%)**
Jumlah Liabilitas **Total Liabilities**	**870.528.643**	**889.102.445**	**(18.573.802)**	**(2,09%)**
Ekuitas **Equity**				
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk **Equity attributable to owners of the parent entity**				
Modal saham Modal dasar – 38.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 10 per saham (angka penuh) Modal ditempatkan dan disetor 12.060.428.584 saham dan 12.052.397.422 saham masing-masing pada tahun 2025 dan 2024 Share capital Authorized capital - 38,000,000,000 shares with par value of Rp10 per share (full amount) Issued and paid-in capital of 12,060,428,584 shares and 12,052,397,422 shares respectively in 2025 and 2024	120.604.286	120.523.974	80.312	0,07%
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	351.252.169	350.127.806	1.124.363	0,32%
Cadangan saham program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham Management and employee stock options program share reserve	2.410.479	480.495	1.929.984	401,67%
Komponen ekuitas lainnya Other equity component	465.938	465.938	-	0,00%
Saldo laba Retained earnings				
Ditentukan penggunaanya Appropriated	32.960.390	22.553.011	10.407.379	46,15%
Belum ditentukan penggunaanya Unappropriated	159.232.952	133.484.863	25.748.089	19,29%
Sub-jumlah **Sub-total**	**666.926.214**	**627.636.087**	**39.290.127**	**6,26%**
Kepentingan *non*-pengendali **Non-controlling interests**	**1.909.394**	**1.699.963**	**209.431**	**12,32%**
Jumlah Ekuitas **Total Equity**	**668.835.608**	**629.336.050**	**39.499.558**	**6,28%**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas **Total Liabilities and Equity**	**1.539.364.251**	**1.518.438.495**	**20.925.756**	**1,38%**

Grafik Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)

Chart: Consolidated Statement of Financial Position (in millions of Rupiah)



Aset

Per 31 Desember 2025, aset Perseroan mencapai Rp1.539,36 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 1,38% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp1.518,44 miliar. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya aset lancar sebesar 3,60%.

Assets

As of December 31, 2025, the Company's total assets amounted to Rp1,539.36 billion, representing an increase of 1.38% compared to 2024, which amounted to Rp1,518.44 billion. This increase was primarily driven by a 3.60% growth in current assets.

Tabel Aset
Table: Assets

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset Lancar Current Assets	692.848.796	668.757.689	24.091.107	3,60%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	846.515.455	849.680.806	(3.165.351)	(0,37%)
Total Aset **Total Assets**	**1.539.364.251**	**1.518.438.495**	**20.925.756**	**1,38%**

Aset Lancar

Per 31 Desember 2025, aset lancar perseroan mencapai Rp692,85 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 3,60% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp668,76 miliar. Peningkatan ini berasal dari meningkatnya persediaan sebesar 58,64%; aset biologis sebesar 24,58%; piutang usaha pihak ketiga sebesar 6,83%; dan uang muka dan beban dibayar di muka sebesar 0,90%.

Current Assets

As of December 31, 2025, the Company's current assets amounted to Rp692.85 billion, representing an increase of 3.60% compared to 2024, which amounted to Rp668.76 billion. The increase was mainly attributable to higher inventories by 58.64%, biological assets by 24.58%, third-party trade receivables by 6.83%, and advances and prepaid expenses by 0.90%.

Tabel Aset Lancar
Table: Current Assets

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset **Assets**				
Aset Lancar **Current Assets**				
Kas dan bank Cash and bank	161.165.175	164.519.625	(3.354.450)	(2,04%)
Piutang usaha – pihak ketiga Account receivables – third parties	31.827.677	29.793.983	2.033.694	6,83%
Piutang lain-lain – bersih Other receivables – net	9.472.906	12.709.021	(3.236.115)	(25,46%)
Persediaan Inventories	74.158.199	46.745.699	27.412.500	58,64%
Aset biologis Biological assets	26.415.414	21.203.683	5.211.731	24,58%
Uang muka dan beban dibayar di muka Advances and prepayment	28.408.320	28.154.072	254.248	0,90%
Pajak dibayar di muka Prepaid Taxes	20.906.605	25.029.106	(4.122.501)	(16,47%)
Aset lancar lainnya Other Current Assets	340.494.500	340.602.500	(108.000)	(0,03%)
Jumlah Aset Lancar **Total Current Assets**	**692.848.796**	**668.757.689**	**24.091.107**	**3,60%**

Aset Tidak Lancar

Per 31 Desember 2025, aset tidak lancar perseroan mencapai Rp846,52 miliar yang mengalami penurunan sebesar 0,37% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp849,68 miliar. Penurunan ini berasal dari penurunan pembibitan sebesar 8,23%; aset tidak lancar lainnya sebesar 6,06%; piutang plasma sebesar 1,46%; dan aset tetap dan tanaman produktif sebesar 0,97%.

Non-Current Assets

As of December 31, 2025, the Company's non-current assets amounted to Rp846.52 billion, representing a decrease of 0.37% compared to 2024, which amounted to Rp849.68 billion. The decrease was mainly due to reductions in nurseries by 8.23%, other non-current assets by 6.06%, plasma receivables by 1.46%, and fixed assets and bearer plants by 0.97%.

Tabel Aset Tidak Lancar
Table: Non-Current Assets

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset Tidak Lancar **Non-Current Assets**				
Taksiran tagihan pajak penghasilan badan Estimated claims for corporate income tax refund	59.740	59.740	-	0,00%
Piutang plasma Plasma receivables	42.669.793	43.303.116	(633.323)	(1,46%)
Pembibitan Nursery	1.585.052	1.727.180	(142.128)	(8,23%)
Aset tetap dan tanaman produktif – bersih Fixed assets and bearer plants – net	769.359.688	776.861.557	(7.501.869)	(0,97%)
Aset hak guna – bersih Right of use assets – net	5.521.448	-	5.521.448	100,00%
Aset pajak tangguhan – bersih Deferred tax assets – net	1.617.350	368.915	1.248.435	338,41%
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	25.702.384	27.360.298	(1.657.914)	(6,06%)
Jumlah Aset Lancar **Total Non-Current Assets**	**846.515.455**	**849.680.806**	**(3.165.351)**	**(0,37%)**

Liabilitas

Per 31 Desember 2025, liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp870,53 miliar yang mengalami penurunan sebesar 2,09% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp889,10 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka panjang Perseroan.

Liabilities

As of December 31, 2025, the Company's liabilities amounted to Rp870.53 billion, representing a decrease of 2.09% compared to 2024, which amounted to Rp889.10 billion. This decrease was primarily due to a reduction in the Company's long-term liabilities.

Tabel Liabilitas
Table: Liabilities

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	199.053.388	171.440.965	27.612.423	16,11%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	671.475.255	717.661.480	(46.186.225)	(6,44%)
Jumlah Liabilitas **Total liabilities**	**870.528.643**	**889.102.445**	**(18.573.802)**	**(2,09%)**

Liabilitas Jangka Pendek

Per 31 Desember 2025, liabilitas jangka pendek Perseroan tercatat sebesar Rp199,05 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 16,11% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp171,44 miliar. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya liabilitas sewa sebesar 368,85%; uang muka penjualan sebesar 164,68%; beban yang masih harus dibayar sebesar 105,57%; utang lain-lain pihak berelasi sebesar 82,21%; utang usaha pihak ketiga sebesar 26,71%; dan utang pajak sebesar 8,12%.

Current Liabilities

As of December 31, 2025, the Company's current liabilities amounted to Rp199.05 billion, representing an increase of 16.11% compared to 2024, which amounted to Rp171.44 billion. The increase was mainly driven by higher lease liabilities by 368.85%, advances from customers by 164.68%, accrued expenses by 105.57%, other payables to related parties by 82.21%, third-party trade payables by 26.71%, and tax payables by 8.12%.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek
Table: Current Liabilities

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas Jangka Pendek **Current Liabilities**				
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	20.000.000	20.000.000	-	0,00%
Utang usaha – pihak ketiga Account payables – third parties	46.770.275	36.911.506	9.858.769	26,71%
Utang lain-lain Pihak Berelasi Other payable – Related Parties	10.914.111	5.990.000	4.924.111	82,21%
Utang pajak Tax payable	30.844.799	28.527.689	2.317.110	8,12%
Beban yang masih harus dibayar Accrued expenses	13.877.189	6.750.738	7.126.451	105,57%
Uang muka penjualan Sales advances	1.419.616	536.344	883.272	164,68%
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Current portion of long-term liabilities:				
Utang pembiayaan konsumen Consumer financing payables	2.274.679	2.921.054	(646.375)	(22,13%)
Liabilitas sewa Lease liabilities	4.103.052	875.134	3.227.918	368,85%
Pinjaman bank Bank loans	68.849.667	68.928.500	(78.833)	(0,11%)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek **Total Current Liabilities**	**199.053.388**	**171.440.965**	**27.612.423**	**16,11%**

Liabilitas Jangka Panjang

Per 31 Desember 2025, liabilitas jangka panjang Perseroan tercatat sebesar Rp671,47 miliar yang mengalami penurunan sebesar 6,44% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp717,66 miliar. Penurunan ini terjadi karena menurunnya utang pembiayaan konsumen sebesar 51,45% dan pinjaman bank sebesar 7,11%.

Non-Current Liabilities

As of December 31, 2025, the Company's non-current liabilities amounted to Rp671.47 billion, representing a decrease of 6.44% compared to 2024, which amounted to Rp717.66 billion. The decrease was mainly attributable to reductions in consumer financing payables by 51.45% and bank loans by 7.11%.

Liabilitas Jangka Panjang
Table: Non-Current Liabilities

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas Jangka Panjang **Non-Current Liabilities**				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Long-term liabilities net-off current portion:				
Utang pembiayaan konsumen Consumer financing payables	940.165	1.936.307	(996.142)	(51,45%)
Liabilitas sewa Lease liabilities	2.267.354	682.285	1.585.069	232,32%
Pinjaman bank Bank loans	659.302.667	709.787.667	(50.485.000)	(7,11%)
Liabilitas pajak tangguhan – bersih Deferred tax liabilities – net	1.868.126	95.526	1.772.600	1855,62%
Cadangan imbalan pasca-kerja Allowance for post-employment benefits	7.096.943	5.159.695	1.937.248	37,55%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-Current Liabilities**	**671.475.255**	**717.661.480**	**(46.186.225)**	**(6,44%)**

Ekuitas

Per 31 Desember 2025, ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp668,84 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 6,28% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp629,34 miliar. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya cadangan saham program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham sebesar 401,67%; saldo laba yang ditentukan penggunaanya sebesar 46,15%; saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya sebesar 19,29%; kepentingan *non*-pengendali sebesar 12,32%; tambahan modal disetor sebesar 0,32%; dan modal saham sebesar 0,07%.

Equity

As of December 31, 2025, the Company's equity amounted to Rp668.84 billion, representing an increase of 6.28% compared to 2024, which amounted to Rp629.34 billion. This increase was driven by a rise in reserves for share-based compensation for management and employees by 401.67%, appropriated retained earnings by 46.15%, unappropriated retained earnings by 19.29%, non-controlling interests by 12.32%, additional paid-in capital by 0.32%, and share capital by 0.07%.

Tabel Ekuitas
Table: Equity

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Ekuitas **Equity**				
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk **Equity attributable to owners of the parent entity**				
Modal saham Modal dasar – 38.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 10 per saham (angka penuh) Modal ditempatkan dan disetor 12.060.428.584 saham dan 12.052.397.422 saham masing-masing pada tahun 2025 dan 2024 Share capital Authorized capital - 38,000,000,000 shares with par value of Rp10 per share (full amount) Issued and paid-in capital of 12,060,428,584 shares and 12,052,397,422 shares respectively in 2025 and 2024	120.604.286	120.523.974	80.312	0,07%
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	351.252.169	350.127.806	1.124.363	0,32%
Cadangan saham program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham Management and employee stock options program share reserve	2.410.479	480.495	1.929.984	401,67%
Komponen ekuitas lainnya Other equity component	465.938	465.938	-	0,00%
Saldo laba Retained earnings				
Ditentukan penggunaanya Appropriated	32.960.390	22.553.011	10.407.379	46,15%
Belum ditentukan penggunaanya Unappropriated	159.232.952	133.484.863	25.748.089	19,29%
Sub-jumlah **Sub-total**	**666.926.214**	**627.636.087**	**39.290.127**	**6,26%**
Kepentingan *non*-pengendali **Non-controlling interests**	**1.909.394**	**1.699.963**	**209.431**	**12,32%**
Jumlah Ekuitas **Total Equity**	**668.835.608**	**629.336.050**	**39.499.558**	**6,28%**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Table: Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

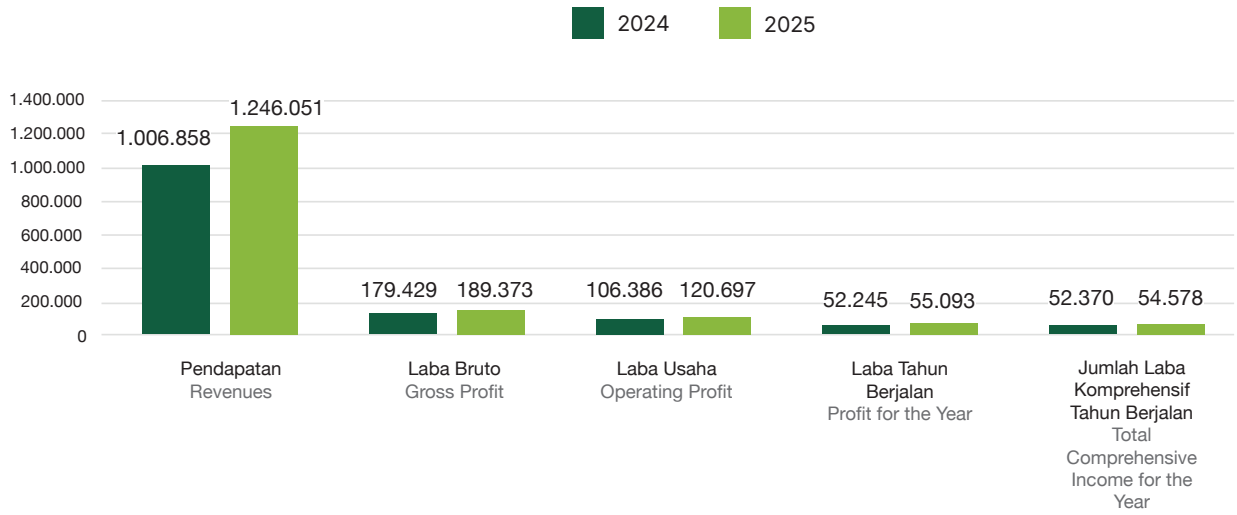
(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan **Revenues**	**1.246.050.864**	**1.006.858.372**	**239.192.492**	**23,76%**
Beban Pokok Penjualan **Cost of Revenues**	**(1.056.677.947)**	**(827.428.969)**	**(229.248.978)**	**27,71%**
Laba Bruto **Gross Profit**	**189.372.917**	**179.429.403**	**9.943.514**	**5,54%**
Beban Usaha **Operating Expenses**	**(68.675.940)**	**(73.043.130)**	**4.367.190**	**(5,98%)**
Laba Usaha **Operating Profit**	**120.696.977**	**106.386.273**	**14.310.704**	**13,45%**
Penghasilan (Beban) Lain-lain **Other Income (expenses)**				
Penghasilan keuangan Finance Income	5.739.978	5.599.278	140.700	2,51%
(Kerugian) keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis Loss) gain on changes in fair value of biological assets	5.211.731	2.958.773	2.252.958	76,15%
Keuntungan atas penjualan dan penghapusan aset tetap – bersih Gain on sales and disposal of fixed assets – net	265.860	1.257.900	(992.040)	(78,86%)
Beban keuangan Finance Cost	(46.188.449)	(39.651.066)	(6.537.383)	16,49%
(Beban) pemulihan cadangan opsi saham Share option (expense)	(1.929.984)	2.724.772	(4.654.756)	(170,83%)
Kerugian penurunan nilai persediaan Impairment losses of inventories	(2.456.092)	-	(2.456.092)	100,00%
Kerugian penurunan nilai piutang lain-lain Impairment losses of other receivable	(1.750.000)	-	(1.750.000)	100,00%
Rupa-rupa – bersih Miscellaneous – net	2.156.865	778.419	1.378.446	177,08%
Jumlah Beban Lain-lain – Bersih **Total Other Expenses – Net**	**(38.950.091)**	**(26.331.924)**	**(12.618.167)**	**47,92%**
Laba Sebelum Pajak Penghasilan **Profit Before Income Tax**	**81.746.886**	**80.054.349**	**1.692.537**	**2,11%**
Pajak Penghasilan **Income tax**				
Kini Current	(25.984.082)	(26.054.483)	70.401	(0,27%)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tangguhan Deferred	(669.547)	(1.754.403)	1.084.856	(61,84%)
Jumlah Pajak Penghasilan – Bersih **Total Income Tax – Net**	**(26.653.629)**	**(27.808.886)**	**1.155.257**	**(4,15%)**
Laba Tahun Berjalan **Profit for the year**	**55.093.257**	**52.245.463**	**2.847.794**	**5,45%**
Penghasilan Komprehensif Lain **Other Comprehensive Income**				
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi **Items that Will Not be Reclassified to Profit or Loss**				
Pengukuran kembali atas imbalan pasca-kerja Remeasurement of post-employment benefit	(660.826)	160.221	(821.047)	(512,45%)
Pajak penghasilan terkait komponen penghasilan komprehensif lain Income tax relating to components of other comprehensive income	145.382	(35.249)	180.631	(512,44%)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain **Total Other Comprehensive Income**	**(515.444)**	**124.972**	**(640.416)**	**(512,45%)**
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan **Total Comprehensive Income for the Year**	**54.577.813**	**52.370.435**	**2.207.378**	**4,21%**
Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada: **Profit for the year Attributable to:**				
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	54.882.631	52.036.897	2.845.734	5,47%
Kepentingan *non*-pengendali Non controlling interest	210.626	208.566	2.060	0,99%
Jumlah **Total**	**55.093.257**	**52.245.463**	**2.847.794**	**5,45%**
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada: **Comprehensive Income for the Year Attributable to:**				
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	54.368.382	52.161.815	2.206.567	4,23%
Kepentingan *non*-pengendali Non controlling interest	209.431	208.620	811	0,39%
Jumlah **Total**	**54.577.813**	**52.370.435**	**2.207.378**	**4,21%**
Laba Per Saham Dasar (Angka Penuh) **Basic Earning per Share (Full Amount)**	**4,55**	**4,33**	**0,22**	**5,08%**

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)

Chart: Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in millions of Rupiah)



Pendapatan

Per 31 Desember 2025, pendapatan Perseroan mencapai Rp1.246,05 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 23,76% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp1.006,86 miliar. Peningkatan ini berasal dari meningkatnya penjualan minyak inti kelapa sawit sebesar 141,97%; penjualan inti ampas sawit sebesar 136,14%; penjualan minyak kelapa sawit sebesar 19,15% dan pendapatan lainnya sebesar 121,44%.

Beban Pokok Penjualan

Per 31 Desember 2025, beban pokok penjualan Perseroan tercatat sebesar Rp1.056,68 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 27,71% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp827,43 miliar. Peningkatan ini berasal dari pembelian tandan buah segar yang meningkat sebesar 38,52% dan biaya produksi sebesar 3,75%.

Revenues

As of December 31, 2025, the Company's revenues reached Rp1,246.05 billion, representing an increase of 23.76% compared to 2024, which amounted to Rp1,006.86 billion. The increase was mainly attributable to higher sales of palm kernel oil by 141.97%, palm kernel expeller by 136.14%, crude palm oil by 19.15%, and other income by 121.44%.

Cost of Revenues

As of December 31, 2025, the Company's cost of revenues amounted to Rp1,056.68 billion, representing an increase of 27.71% compared to 2024, which amounted to Rp827.43 billion. The increase was mainly due to higher purchases of fresh fruit bunches by 38.52% and an increase in production costs by 3.75%.

Laba Bruto

Per 31 Desember 2025, Laba bruto Perseroan mencapai Rp189,37 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 5,54% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp179,43 miliar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendapatan Perseroan lebih besar dari beban pokok pendapatan.

Beban Usaha

Per 31 Desember 2025, Beban usaha Perseroan tercatat sebesar Rp68,68 miliar yang mengalami penurunan sebesar 5,98% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp73,04 miliar. Penurunan ini dikarenakan turunnya beban pajak dan perijinan sebesar 55,75%; beban kantor sebesar 40,88%; pemeliharaan sebesar 37,53%; gaji dan tunjangan sebesar 3,51%; jasa tenaga ahli sebesar 1,57% dan lain-lain sebesar 10,86%.

Laba Usaha

Per 31 Desember 2025, laba usaha Perseroan mencapai Rp120,70 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 13,45% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp106,39 miliar. Peningkatan ini berasal dari pendapatan penjualan yang lebih tinggi dibandingkan beban pokok penjualan dan beban usaha.

Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Per 31 Desember 2025, beban lain-lain Perseroan tercatat sebesar Rp38,95 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 47,92% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp26,33 miliar. Peningkatan ini berasal dari meningkatnya beban keuangan sebesar 16,49%; penurunan nilai persediaan sebesar 100%; penurunan nilai piutang lain-lain sebesar 100%; beban pemulihan cadangan opsi saham mengalami peningkatan sebesar 170,83%; dan diikuti dengan penurunan pada keuntungan atas penjualan dan penghapusan aset tetap–bersih sebesar 78,86%.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Per 31 Desember 2025, rugi komprehensif lain Perseroan tercatat sebesar Rp 515,44 juta yang mengalami penurunan sebesar 512,45% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat laba komprehensif lain sebesar Rp124,97 juta. Penurunan ini berasal dari pengukuran kembali atas imbalan pasca-kerja sebesar 512,45%.

Gross Profit

As of December 31, 2025, the Company's gross profit amounted to Rp189.37 billion, representing an increase of 5.54% compared to 2024, which amounted to Rp179.43 billion. This increase indicates that the Company's revenue exceeded its cost of revenue.

Operating Expenses

As of December 31, 2025, the Company's operating expenses amounted to Rp68.68 billion, representing a decrease of 5.98% compared to 2024, which amounted to Rp73.04 billion. The decrease was mainly attributable to tax expense and licensing by 55.75%, office expenses by 40.88%, maintenance expenses by 37.53%, salaries and allowances by 3.51%, professional fees by 1.57%, and other expenses by 10.86%.

Operating Profit

As of December 31, 2025, the Company's operating profit amounted to Rp120.70 billion, representing an increase of 13.45% compared to 2024, which amounted to Rp106.39 billion. This increase was driven by higher sales revenue compared to the cost of goods sold and operating expenses.

Other Income (Expenses)

As of December 31, 2025, the Company recorded other expenses amounting to Rp38.95 billion, representing an increase of 47.92% compared to 2024, which amounted to Rp26.33 billion. This increase was primarily attributable to higher finance costs by 16.49%, inventory impairment by 100%, impairment of other receivables by 100%, and an increase in expenses related to the reversal of share option reserves by 170.83%, partially offset by a decrease in gains on the sale and disposal of fixed assets–net by 78.86%.

Other Comprehensive Income (Loss)

As of December 31, 2025, the Company recorded other comprehensive loss of Rp515.44 million, representing a decrease of 512.45% compared to 2024, which recorded other comprehensive income of Rp124.97 million. This decrease was mainly due to remeasurement of post-employment benefits amounting to 512.45%.

Laba Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2025, laba tahun berjalan Perseroan mencapai Rp55,09 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 5,45% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp52,24 miliar. Peningkatan ini berasal dari berasal dari peningkatan laba usaha Perseroan.

Profit for The Year

As of December 31, 2025, the Company's profit for the year amounted to Rp55.09 billion, representing an increase of 5.45% compared to 2024, which amounted to Rp52.24 billion. This increase was mainly driven by higher operating profit achieved by the Company.

Tabel Laba Rugi Tahun Berjalan
Table: Profit or Loss for the Year

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousands of Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada: **Profit for the year attributable to:**				
Pemilik Entitas Induk Owners of the parent entity	54.882.631	52.036.897	2.845.734	5,47%
Kepentingan *non*-pengendali Non controlling interest	210.626	208.566	2.060	0,99%
Jumlah **Total**	**55.093.257**	**52.245.463**	**2.847.794**	**5,45%**

Per 31 Desember 2025, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp54,88 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 5,47% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp52,04 miliar. Demikian pula pada laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan *non*-pengendali mencapai Rp210,63 juta yang mengalami peningkatan sebesar 0,99% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp208,57 juta.

As of December 31, 2025, profit for the year attributable to owners of the parent entity amounted to Rp54.88 billion, representing an increase of 5.47% compared to 2024, which amounted to Rp52.04 billion. Meanwhile, profit attributable to non-controlling interests amounted to Rp210.63 million, representing an increase of 0.99% compared to 2024, which amounted to Rp208.57 million.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2025, laba komprehensif tahun berjalan Perseroan mencapai Rp54,58 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 4,21% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp52,37 miliar.

Comprehensive Income for The Year

As of December 31, 2025, the Company's comprehensive income for the year amounted to Rp54.58 billion, representing an increase of 4.21% compared to 2024, which amounted to Rp52.37 billion.

Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Table: Profit or Loss for the Year

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousands of Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada: **Comprehensive Income for the Year Attributable to:**				
Pemilik Entitas Induk Owners of the parent entity	54.368.382	52.161.815	2.206.567	4,23%
Kepentingan *non*-pengendali Non controlling interest	209.431	208.620	811	0,39%
Jumlah **Total**	**54.577.813**	**52.370.435**	**2.207.378**	**4,21%**

Per 31 Desember 2025, laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp54,37 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 4,23% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp52,17 miliar. Demikian pula pada laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali mencapai Rp209,43 juta yang mengalami peningkatan sebesar 0,39% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp208,62 juta.

As of December 31, 2025, comprehensive income attributable to owners of the parent entity amounted to Rp54.37 billion, representing an increase of 4.23% compared to 2024, which amounted to Rp52.17 billion. Meanwhile, comprehensive income attributable to non-controlling interests amounted to Rp209.43 million, representing an increase of 0.39% compared to 2024, which amounted to Rp208.62 million.

Laba Per Saham Dasar

Kinerja pada hasil-hasil usaha yang diperoleh menyebabkan Perseroan mencatatkan laba per saham dasar di tahun 2025 sebesar 4,55/lembar saham (nilai penuh), meningkat 5,08% dibandingkan tahun sebelumnya.

Basic Earnings Per Share

The Company recorded basic earnings per share of 4.55 per share (full amount) in 2025, representing an increase of 5.08% compared to the previous year, reflecting improved business performance.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statement of Cash Flows

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Table: Consolidated Statement of Cash Flows

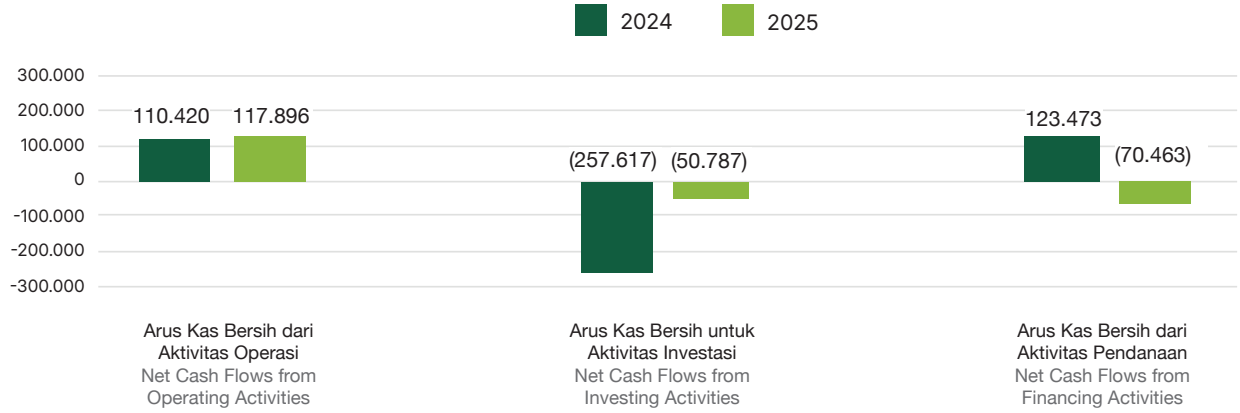
(dalam ribuan Rupiah)
(in thousands of Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi Net cash flows from operating activities	117.896.145	110.419.974	7.476.171	6,77%
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi Net cash flows from investing activities	(50.787.330)	(257.617.181)	206.829.851	(80,29%)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Net cash flows from financing activities	(70.463.265)	123.473.034	(193.936.299)	(157,07%)
Penurunan Bersih Kas dan Bank **Net decrease in cash and bank**	**(3.354.450)**	**(23.724.173)**	**20.369.723**	**(85,86%)**
Kas dan Bank Pada Awal Tahun **Cash and Bank at Beginning of Year**	**164.519.625**	**188.243.798**	**(23.724.173)**	**(12,60%)**
Kas dan Bank Pada Akhir Tahun **Cash and Bank at End of Year**	**161.165.175**	**164.519.625**	**(3.354.450)**	**(2,04%)**

Grafik Laporan Arus Kas Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)

Chart: Consolidated Statement of Cash Flows (in millions of Rupiah)



Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2025, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mencapai Rp117,90 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 6,77% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp110,42 miliar. Peningkatan ini berasal dari meningkatnya penerimaan dari pelanggan sebesar 24,22%; dan penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar 2,51%.

Net Cash Flows from Operating Activities

As of December 31, 2025, net cash flows generated from operating activities amounted to Rp117.90 billion, representing an increase of 6.77% compared to 2024, which amounted to Rp110.42 billion. This increase was mainly driven by higher receipts from customers by 24.22% and income from financial activities by 2.51%.

Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2025, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mencapai Rp50,79 miliar yang mengalami penurunan sebesar 80,29% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp257,62 miliar. Penurunan ini dikarenakan menurunnya perolehan aset tetap sebesar 76,71%; pembibitan sebesar 27,25%; tanaman belum menghasilkan sebesar 23,48%; selain itu, meningkatnya kenaikan aset tidak lancar lainnya sebesar 44,85%.

Net Cash Flows From Investing Activities

As of December 31, 2025, net cash flows from investing activities amounted to Rp50.79 billion, representing a decrease of 80.29% compared to 2024, which amounted to Rp257.62 billion. This decrease was due to a 76.71% decrease in fixed asset acquisition, nurseries by 27.25%, immature plantations by 23.48%, partially offset by an increase in other non-current assets by 44.85%.

Arus Kas Bersih (untuk) dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2025, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan mencapai Rp70,46 miliar, yang berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya dimana arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mencapai Rp123,47 miliar. Hal ini dikarenakan menurunnya penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar 94,35%, diikuti meningkatnya pembayaran liabilitas sewa sebesar 504,90%; pembayaran dividen kas sebesar 51,77%; dan utang lain-lain–pihak berelasi sebesar 25,95%.

Net Cash Flows (for) from Financing Activities

As of December 31, 2025, the Company's net cash flow used in financing activities reached Rp70.46 billion, compared with the Rp123.47 billion obtained in the previous year. This was due to a 94.35% decrease in proceeds from long-term bank loans, followed by a 504.90% increase in repayment of lease liabilities, a 51.77% increase in payment of cash dividend, and a 25.95% increase in other payable - related parties.

Rasio Keuangan

Di tahun 2025, rasio keuangan Perseroan mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2024. Rasio keuangan Perseroan disajikan pada tabel berikut.

Financial Ratios

In 2025, the Company's financial ratios experienced significant changes compared to 2024. The Company's financial ratios are presented in the following table.

Rasio Keuangan
Table: Financial Ratios

Uraian Description	2025	2024
Rasio Solvabilitas (%) **Solvency Ratios**		
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas Total Liabilities / Total Equity	130,16	141,28
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset Total Liabilities / Total Assets	56,55	58,55
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Assets / Total Current Liabilities	348,07	390,08
Jumlah Aset Tidak Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Assets / Total Non-Current Liabilities	126,07	118,4

Uraian Description	2025	2024
Rasio Profitabilitas (%) **Profitability Ratios**		
Laba Bruto / Penjualan Neto Gross Profit / Net Sales	15,20	17,82
Laba Tahun Berjalan / Penjualan Neto Profit for the Year / Net Sales	4,42	5,19
Return on Asset (ROA)	3,58	3,45
Return on Equity (ROE)	8,24	8,32
Rasio Likuiditas **Liquidity Ratio**		
Rasio Lancar (%) Current Ratio	348,07	390,08
Rasio Kas (%) Cash Ratio	80,97	95,96
Debt Service Coverage Ratio	129,40	123,07
Interest Coverage Ratio	379,54	399,08
Rasio Keuangan Lainnya **Other Financial Ratios**		
Jumlah Ekuitas / Jumlah Aset Total Equity / Total Assets	0,43	0,41
Rasio Kolektabilitas Piutang (hari) Receivables Collectibility Period (days)	12	15

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang
Debt Servicing Capability and Receivable Collectibility

Dalam menjaga kepercayaan dari kreditor, Perseroan berkomitmen penuh dalam memenuhi seluruh kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang secara tepat waktu. Dalam mengukur kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban tersebut, Perseroan menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

To maintain creditors' trust, the Company is fully committed to fulfilling all obligations, both short-term and long-term, in a timely manner. In measuring its ability to meet these obligations, the Company uses liquidity and solvency ratios.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang kurang dari 1 tahun. Rasio likuiditas Perseroan diukur menggunakan rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*).

Liquidity Ratios

Liquidity ratios describe the Company's ability to meet short-term financial obligations (within one year). The Company measures liquidity using the current ratio, cash ratio, and quick ratio.

Tabel Likuiditas
Table: Liquidity

Uraian Description	2025	2024
Rasio Lancar (*Current Asset*) Current Ratio	348,07	390,08
Rasio Kas (*Cash Ratio)* Cash Ratio	80,97	95,96

Pada tahun 2025, rasio kas Perseroan tercatat sebesar 80,97 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 95,96. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya pembayaran pinjaman atas fasilitas bank dan meningkatnya liabilitas atas pembelian ke *supplier*.

In 2025, the Company's cash ratio was recorded at 80.97, lower than 95.96 in 2024. This decrease was primarily due to loan repayments on bank facilities and increased liabilities for purchases from suppliers.

Secara keseluruhan, likuiditas Perseroan cukup baik, hal ini terlihat dari rasio lancar yang masih memiliki angka lebih besar dari 100%. Oleh karena itu, Perseroan memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh liabilitas jangka pendeknya dengan aset lancarnya.

Overall, the Company's liquidity remains sound, as reflected in its current ratio which remains above 100%. Therefore, the Company has the ability to settle all its short-term liabilities using its current assets.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas Perseroan diukur melalui rasio utang terhadap aset (*Debt to Assets Ratio*/DAR) dan rasio utang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio*/DER).

Solvency Ratios

Solvency ratios are used to measure the Company's ability to meet both its short-term and long-term obligations. The Company's solvency is assessed through the Debt to Assets Ratio (DAR) and the Debt to Equity Ratio (DER).

Tabel Solvabilitas
Table: Solvency

Uraian Description	2025	2024
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas Total Liabilities / Total Equity	130,16	141,28
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset Total Liabilities / Total Assets	56,55	58,55

Sampai dengan akhir 2025, rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan tercatat sebesar 130,16 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 141,28. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan liabilitas Perseroan dan peningkatan ekuitas Perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnis, Perseroan mengurangi pinjaman luar dan lebih meningkatkan modal sendiri dalam mendanai aktivitas bisnis tersebut. Begitu juga dengan rasio liabilitas terhadap aset yang tercatat sebesar 56,55

As of the end of 2025, the Company's debt to equity ratio was recorded at 130.16, lower than 141.28 in 2024. This decrease was mainly driven by a reduction in the Company's liabilities and an increase in its equity. This indicates that in conducting its business activities, the Company has reduced external borrowings and increasingly relied on its own capital to finance operations. Similarly, the Company's debt to assets ratio was recorded at 56.55, lower than 58.55 in 2024. This decline was also attributable to lower liabilities and higher total

lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 58,55. Penurunan ini juga disebabkan penurunan liabilitas Perseroan dan peningkatan aset Perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan mengurangi pendanaan melalui utang dan lebih memilih untuk menggunakan modal Perseroan.

Secara keseluruhan, rasio solvabilitas Perseroan sangat baik karena utang Perseroan lebih kecil dari aset Perseroan, sehingga utang Perseroan dapat ditutup dengan aset Perseroan.

Rasio Profitabilitas

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan profit diukur dengan rasio profitabilitas. Adapun rasio profitabilitas terdiri dari Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset (*Return on Asset*/ROA), Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas (*Return on Equity*/ROE), dan Rasio Laba (Rugi) terhadap Penjualan (*Net Profit Margin*/NIM).

assets. It reflects the Company's strategy to reduce debt financing and prioritize the use of internal funding sources.

Overall, the Company's solvency position remains strong, as its total liabilities are lower than its total assets, indicating that all liabilities can be adequately covered by its assets.

Profitability Ratios

The Company's ability to generate profit is measured through profitability ratios. Profitability ratios consist of Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Net Profit Margin (NPM).

Tabel Profitabilitas
Table: Profitability Ratios

Uraian Description	2025	2024
Return on Asset (ROA)	3,58	3,45
Return on Equity (ROE)	8,24	8,32
Laba Tahun Berjalan / Penjualan Neto Profit for the Year / Net Sales	4,42	5,19

Pada tahun 2025, rasio profitabilitas yang digambarkan oleh ROA tercatat sebesar 3,58%; ROE tercatat sebesar 8,24%; dan rasio laba tahun berjalan terhadap penjualan neto tercatat sebesar 4,42%. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan Perseroan dalam melakukan efisiensi untuk menghasilkan laba bersih atas aset yang dimiliki dan penggunaan modal Perseroan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi rasio laba tahun berjalan terhadap penjualan neto, Perseroan juga behasil memperoleh laba walaupun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

In 2025, the profitability ratios, as reflected by ROA and ROE, were 3.58% and 8.24%, respectively, and the ratio of profit for the year to net sales was 4.42%. This illustrates that the Company's ability to generate net profit on its assets and to utilize capital efficiently has increased compared to the previous year. In terms of the ratio of profit for the year to net sales, the Company also achieved a profit, although slightly lower than the previous year.

Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang menunjukkan waktu (hari) yang dibutuhkan Perseroan dalam melakukan penagihan terhadap piutangnya. Kemampuan Perusahaan dalam menagih piutang dapat diketahui dengan menghitung periode penagihan (*collecting period*). Semakin kecil nilai *collecting period* menggambarkan kecepatan Perseroan dalam mengumpulkan piutang.

Receivable Collectibility

The receivable collectibility level indicates the number of days required by the Company to collect its receivables. The Company's ability to collect receivables is measured by the collecting period. A shorter collecting period reflects a faster receivable collection process.

Tabel Rata-Rata Periode Kolektibilitas Piutang
Table: Average Receivables Collection Period

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan 2023-2024 Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Piutang usaha dan piutang lain-lain Account receivables and other receivables	41.300.583	42.503.004	(1.202.421)	(2,83%)
Pendapatan usaha Revenues	1.246.050.864	1.006.858.372	239.192.492	23,76%
Rata-rata kolektibilitas piutang (hari) Average receivables collection period (days)	12	15		

Dalam menghitung rata-rata periode kolektibilitas piutang, Perseroan menggunakan jumlah piutang usaha yang dibagi dengan pendapatan usaha dikali 365 hari. Berdasarkan hitungan tersebut, periode kolektibilitas rata-rata selama tahun 2025 adalah 12 hari, meningkat dibandingkan dengan periode kolektibilitas rata-rata selama tahun 2024 yang sebesar 15 hari. Berdasarkan hasil di atas, tingkat kolektibilitas piutang Perseroan berada dalam kategori lancar sehingga menunjukkan Perseroan mampu dalam mengelola piutang usahanya dengan pihak ketiga.

In calculating the average collecting period, the Company divides trade receivables by operating revenue and multiplies the result by 365 days. Based on this calculation, the average collecting period in 2025 was 12 days, improving compared to 15 days in 2024. Based on these results, the Company's receivable collectibility is categorized as performing, indicating that the Company is effective in managing its trade receivables from third parties.

Struktur Permodalan
Capital Structure

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Management Policy on Capital Structure

Kebijakan pengelolaan modal Perseroan adalah upaya Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha dengan memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perseroan beserta entitas anak secara berkala menelaah atas pengelolaan struktur permodalan dengan mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan dengan permodalan.

The Company's capital management policy aims to ensure business continuity while maximizing value for shareholders and other stakeholders. The Company and its subsidiaries periodically review their capital structure by considering the cost of capital and associated risks.

Dalam menyesuaikan struktur modal, Perseroan beserta entitas anak dapat melakukan evaluasi melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*)

In managing its capital structure, the Company and its subsidiaries evaluate the gearing ratio, which is calculated by dividing net debt by total equity. Net

dengan membagi antara utang neto dengan modal. Utang neto adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi dengan jumlah kas dan setara kas. Sedangkan modal meliputi seluruh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas Perseroan.

debt is defined as total liabilities as presented in the consolidated statement of financial position, minus cash and cash equivalents. Equity includes all components attributable to the Company's shareholders.

Selain itu, Perseroan bersama Entitas Anak juga melakukan monitoring agar dapat memproyeksikan kebutuhan modal di masa depan, efisiensi modal serta proyeksi peluang investasi yang strategis. Modal terdiri dari seluruh komponen ekuitas yang ada sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

In addition, the Company and its Subsidiaries continuously monitor capital requirements to project future funding needs, improve capital efficiency, and identify strategic investment opportunities. Capital consists of all equity components as presented in the consolidated statement of financial position.

Struktur Modal Perusahaan

Company's Capital Structure

Struktur modal menggambarkan perbandingan antara modal dan utang yang digunakan Perusahaan dalam menjalankan pertumbuhan usaha. Dalam mengelola permodalan Perusahaan, Perseroan berusaha dalam mengoptimalisasikan saldo utang dan ekuitas agar dapat memaksimalkan keuntungan Perusahaan. Hal ini juga tidak lepas dari pantauan Direksi yang secara berkala melakukan *review* terhadap biaya permodalan dan risiko keuangan. Dalam mengkaji ulang dan mengevaluasi struktur modal, Perseroan menggunakan *gearing ratio* yang membandingkan rasio utang terhadap modal.

Capital structure reflects the proportion between equity and debt used by the Company to support its business growth. In managing its capital, the Company strives to optimize the balance between debt and equity to maximize profitability. This process is closely monitored by the Board of Directors, which regularly reviews the cost of capital and financial risks. In evaluating its capital structure, the Company uses the gearing ratio, which compares debt to equity.

Pada tahun 2025, komposisi struktur modal Perseroan terdiri dari ekuitas sebesar Rp668,84 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 6,28% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp629,34 miliar. Komposisi struktur modal Perseroan memiliki ekuitas lebih kecil dibandingkan liabilitas yang tercatat. Namun, *gearing ratio* Perseroan di tahun 2025 sebesar 1,06 kali, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,15 kali. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan perlu mempertimbangkan alternatif pembiayaan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan di masa yang akan datang.

In 2025, the Company's capital structure consisted of equity amounting to RP668.84 billion, representing an increase of 6.28% compared to 2024, which amounted to RP629.34 billion. Although the Company's equity remained lower than its recorded liabilities, the gearing ratio in 2025 improved to 1.06% times, lower than 1.15% times in 2024. This indicates that the Company may need to consider alternative financing strategies to support future operational activities and business expansion.

Tabel Rincian Struktur Modal
Table: Details of Capital Structure

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024
Liabilitas Liabilities	870.528.643	889.102.445
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	161.165.175	164.519.625
Utang Bersih Net Payables	709.363.468	724.582.820
Ekuitas Equity	668.835.608	629.336.050
Rasio utang terhadap modal (*Gearing Ratio*) **Debt-to-Equity Ratio (Gearing Ratio)**	**1,06**	**1,15**

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Material Commitments Related to Capital Expenditure Investments

Tahun 2025 mencatatkan ikatan material terkait investasi barang modal yang dilakukan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- **PT Menthobi Karyatama Raya Tbk**, berdasarkan Perjanjian No. 04/024-3/SP3/CB3 tanggal 27 Desember 2024 memperoleh fasilitas *Mudharabah Muqayyadah* dari BSI dengan batas maksimum kredit sebesar Rp20.000.000 untuk operasional dan pengembangan usaha. Nisbah bagi hasil yang disepakati untuk fasilitas tersebut sebesar 1,07% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2025. Perjanjian kredit tersebut kemudian diubah dengan perjanjian No. 05/ADD-008/CB3-FOG/IX/2025/MMOB tanggal 19 September 2025, dimana Perseroan dan PT Bank Syariah Indonesia Indonesia Tbk sepakat untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 23 Maret 2026. Pinjaman bank tersebut dijamin dengan deposito atas nama Perseroan sebesar Rp20.000.000 Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman tersebut adalah sebesar Rp20.000.000.

- **PT Menthobi Hijau Lestari (MHL)**, salah satu Anak Perusahaan dari PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 04/027- 3/SP3/CB3 tanggal 28 Oktober 2024, memperoleh fasilitas *Musyarakah* dari BSI dengan batas maksimum kredit sebesar Rp20.000.000 untuk tujuan pembangunan *bio*

In 2025, material commitments related to capital goods investments made by PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) and its Subsidiaries were recorded as follows:

- **PT Menthobi Karyatama Raya Tbk**, based on Agreement No. 04/024-3/SP3/CB3 dated December 27, 2024, the Company obtained a Mudharabah Muqayyadah financing facility from PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) with a maximum limit of Rp20,000,000 for operational and business development purposes. The agreed profit-sharing ratio for this facility is 1.07% per annum, with a tenor of 1 (one) year, maturing on December 27, 2025. The agreement was subsequently amended through Agreement No. 05/ADD-008/CB3-FOG/IX/2025/MMOB dated September 19, 2025, whereby the Company and BSI agreed to extend the loan maturity until March 23, 2026. The loan is secured by a time deposit under the Company's name amounting to Rp20,000,000. As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding loan balance remained at Rp20,000,000.

- **PT Menthobi Hijau Lestari (MHL)**, as a subsidiary of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, based on Credit Facility Agreement No. 04/027-3/SP3/CB3 dated October 28, 2024, MHL obtained a Musyarakah financing facility from BSI with a maximum limit of Rp20,000,000, intended for the construction of a bio pellet

pellet empty bunch mill. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati untuk fasilitas tersebut sebesar 3,90% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 108 (seratus depalan) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2033. Pinjaman bank tersebut dijamin dengan deposito atas nama PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL) sebesar Rp20.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp19.930.000 dan Rp19.990.000.

empty bunch mill. The agreed profit-sharing ratio is 3.90% per annum, with a tenor of 108 (one hundred eight) months, maturing on October 28, 2033. The loan is secured by a time deposit under the name of PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL) amounting to Rp20,000,000. As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding loan balances amounted to Rp19,930,000 and Rp19,990,000 respectively.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, salah satu Anak Perusahaan dari PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 03/033/CB3- FOG/III/2023/ MSYR tanggal 30 Maret 2023 memperoleh fasilitas *Musyarakah* dari BSI dengan batas maksimum kredit sebesar Rp375.000.000 untuk tujuan operasional Perusahaan dari *capital expenditures* (CAPEX) terkait dengan pembangunan *Kernel Crushing Plant* dan *Power Plant*. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati untuk fasilitas tersebut sebesar 24,37% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 108 (seratus delapan) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2032. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp243.750.000 dan Rp289.687.500.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, as a subsidiary of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, based on Credit Facility Agreement No. 03/033/CB3-FOG/III/2023/MSYR dated March 30, 2023, MMAL obtained a Musyarakah financing facility from BSI with a maximum limit of Rp375,000,000. The facility is intended for operational purposes, particularly capital expenditures (CAPEX) related to the development of a Kernel Crushing Plant and Power Plant. The agreed profit-sharing ratio is 24.37% per annum, with a tenor of 108 (one hundred eight) months, maturing on March 20, 2032. As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding loan balances amounted to Rp243,750,000 and Rp289,687,500, respectively.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, salah satu Anak Perusahaan dari PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 03/005-3/SP3/CB3 tanggal 28 Maret 2023 memperoleh fasilitas pembiayaan dari BSI yang terdiri dari:

  a. Fasilitas I, berupa fasilitas *Musyrakah* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp100.000.000 untuk operasional dan pengembangan usaha. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati untuk fasilitas tersebut sebesar 2,80% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2025. Pinjaman bank tersebut dijamin dengan deposito atas nama MMAL sebesar Rp99.979.000. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp99.967.000 dan Rp99.979.000.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, as a subsidiary of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, based on Credit Facility Agreement No. 03/005-3/SP3/CB3 dated March 28, 2023, MMAL obtained financing facilities from PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) consisting of:

  a. Fasilitas I, a Musyarakah facility with a maximum credit limit of Rp100,000,000 for operational and business development purposes. The agreed profit-sharing ratio is 2.80% per annum, with a tenor of 24 (twenty-four) months, maturing on March 23, 2025. The loan is secured by a time deposit under MMAL's name amounting to Rp99,979,000. As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding loan balances amounted to Rp99,967,000 and Rp99,979,000, respectively.

b. Fasilitas II, berupa fasilitas *Musyrakah* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 125.000.000 untuk operasional dan pengembangan usaha. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati untuk fasilitas tersebut sebesar 2,92% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 18 (delapan belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 September 2024. Pinjaman bank tersebut dijamin dengan deposito atas nama MMAL sebesar Rp125.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2024, pinjaman tersebut telah dilunasi seluruhnya.

Perjanjian kredit tersebut kemudian di ubah dengan perjanjian No. 04/ADD-160/CB3/FOG/XII/2024/MSYR tanggal 27 Desember 2024, dimana MMAL dan BSI sepakat untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 27 Maret 2027.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, salah satu Anak Perusahaan dari PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 43/DIR-MMAL/EXT/IX/2023 tanggal 25 September 2023 memperoleh fasilitas *Musyarakah* dari BSI dengan batas maksimum kredit sebesar Rp90.000.000 untuk operasional dan pengembangan usaha. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati untuk fasilitas tersebut sebesar 2,52% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 20 (dua puluh) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2025. Pinjaman bank tersebut dijamin dengan deposito atas nama MMAL sebesar Rp 89.985.000. Perjanjian kredit tersebut kemudian di ubah dengan perjanjian No. 04/ADD-159/CB3/FOG/XII/2024/MSYR tanggal 27 Desember 2024, dimana MMAL dan BSI sepakat untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 23 Mei 2027. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp89.973.000 dan Rp89.985.000.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, salah satu Anak Perusahaan dari PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 44/DIR-MMAL/EXT/IX/2023 tanggal 26 September 2023 memperoleh fasilitas *Musyarakah* dari BSI dengan batas maksimum kredit sebesar Rp110.000.000 untuk operasional dan pengembangan usaha. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati untuk fasilitas tersebut sebesar 8,50% per tahun dengan

b. Fasilitas II, a Musyarakah facility with a maximum credit limit of Rp125,000,000 for operational and business development purposes. The agreed profit-sharing ratio is 2.92% per annum, with a tenor of 18 (eighteen) months, maturing on September 23, 2024. The loan is secured by a time deposit under MMAL's name amounting to Rp125,000,000. As of December 31, 2024, this loan had been fully repaid.

The credit agreement was subsequently amended through Agreement No. 04/ADD-160/CB3/FOG/XII/2024/MSYR dated December 27, 2024, whereby MMAL and BSI agreed to extend the loan maturity until March 27, 2027.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, a subsidiary of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, Based on Credit Facility Agreement No. 43/DIR-MMAL/EXT/IX/2023 dated September 25, 2023, MMAL obtained a Musyarakah facility from BSI with a maximum credit limit of Rp90,000,000 for operational and business development purposes. The agreed profit-sharing ratio is 2.52% per annum, with a tenor of 20 (twenty) months, maturing on May 23, 2025. The loan is secured by a time deposit under MMAL's name amounting to Rp89,985,000. The agreement was later amended through Agreement No. 04/ADD-159/CB3/FOG/XII/2024/MSYR dated December 27, 2024, whereby MMAL and BSI agreed to extend the loan maturity until May 23, 2027. As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding loan balances amounted to Rp89,973,000 and Rp89,985,000, respectively.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, a subsidiary of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, based on Credit Facility Agreement No. 44/DIR-MMAL/EXT/IX/2023 dated September 26, 2023, MMAL obtained a Musyarakah facility from BSI with a maximum credit limit of Rp110,000,000 for operational and business development purposes. The agreed profit-sharing ratio is 8.50% per annum, with a tenor of 103 (one hundred three) months, maturing on March

jangka waktu kredit selama 103 (seratus tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2032. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp78.100.000 dan Rp92.125.000.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, salah satu Anak Perusahaan dari PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, berdasarkan Akad Pembiayaan *Musyarakah* No. 04/021/CB3-FOG/II/2024/MSYR tanggal 28 Februari 2024, MMAL, entitas anak, memperoleh fasilitas Musyarakah dari BSI dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 25.000.000 untuk tujuan Pembangunan *Kernel Crushing Plant* (KCP) dan *Power Plant*. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati untuk fasilitas tersebut sebesar 1,63% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 97 (sembilan puluh tujuh) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2032. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp19.041.667 dan Rp22.291.666.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, salah satu Anak Perusahaan dari PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 04/069-3/SP2/CB3 tanggal 25 September 2024, MMAL, entitas anak, memperoleh fasilitas *Musyarakah* dari BSI dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 50.000.000 untuk operasional dan pengembangan usaha. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati untuk fasilitas tersebut sebesar 11,74% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 120 (seratus tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 September 2034. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 43.750.000 dan Rp 48.750.000.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, salah satu Anak Perusahaan dari PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 04/077-3/SP2/CB3 tanggal 24 Oktober 2024 memperoleh fasilitas *Musyarakah* dari BSI dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 6.000.000 untuk operasional dan pengembangan usaha. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati untuk fasilitas tersebut sebesar 1,41% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 120 (seratus dua puluh) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 20, 2032. As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding loan balances amounted to Rp78,100,000 and Rp92,125,000, respectively.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, sas a subsidiary of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, based on Musyarakah Financing Agreement No. 04/021/CB3-FOG/II/2024/MSYR dated February 28, 2024, MMAL obtained a Musyarakah facility from PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) with a maximum credit limit of Rp25,000,000 for the construction of a Kernel Crushing Plant (KCP) and Power Plant. The agreed profit-sharing ratio is 1.63% per annum, with a tenor of 97 (ninety-seven) months, maturing on March 20, 2032. As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding loan balances amounted to Rp19,041,667 and Rp22,291,666, respectively.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, as a subsidiary of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, based on Credit Facility Agreement No. 04/069-3/SP2/CB3 dated September 25, 2024, MMAL obtained a Musyarakah facility from BSI with a maximum credit limit of Rp50,000,000 for operational and business development purposes. The agreed profit-sharing ratio is 11.74% per annum, with a tenor of 120 (one hundred twenty) months, maturing on September 23, 2034. As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding loan balances amounted to Rp43,750,000 and Rp48,750,000, respectively.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, as a subsidiary of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, based on Credit Facility Agreement No. 04/077-3/SP2/CB3 dated October 24, 2024, MMAL obtained a Musyarakah facility from BSI with a maximum credit limit of Rp6,000,000 for operational and business development purposes. The agreed profit-sharing ratio is 1.41% per annum, with a tenor of 120 (one hundred twenty) months, maturing on October 23, 2034. As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding loan balances amounted to Rp5,300,000 and Rp5,900,000, respectively.

2034. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp5.300.000 dan Rp5.900.000.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, salah satu Anak Perusahaan dari PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 04/078-3/SP2/CB3 tanggal 11 November 2024, memperoleh fasilitas *Musyarakah* dari BSI dengan batas maksimum kredit sebesar Rp50.000.000 untuk operasional dan pengembangan usaha. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati untuk fasilitas tersebut sebesar 1,36% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 84 (delapan puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2031. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp49.987.000 dan Rp49.999.000.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, salah satu Anak Perusahaan dari PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 04/243/CB3-FOG/XI/2024/MSYR tanggal 19 November 2024 memperoleh fasilitas *Musyarakah* dari BSI dengan batas maksimum kredit sebesar Rp60.000.000 untuk operasional dan pengembangan usaha. Nisbah bagi hasil yang disepakati untuk fasilitas tersebut sebesar 1,64% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 84 (delapan puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2031. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp59.987.000 dan Rp59.999.000.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, salah satu Anak Perusahaan dari PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, berdasarkan perjanjian Fasilitas Kredit No. 05/995/CB3-FOG/VIII/2025/MSYR tanggal 14 Agustus 2025 memperoleh fasilitas *Musyarakah* dari BSI dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 19.000.000 untuk operasional dan pengembangan usaha. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati untuk fasilitas tersebut sebesar 4,33% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 120 (delapan puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2035. Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman tersebut sebesar Rp18.366.667. Pinjaman bank tersebut dijamin dengan:

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, as a subsidiary of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, based on Credit Facility Agreement No. 04/078-3/SP2/CB3 dated November 11, 2024, MMAL obtained a Musyarakah facility from BSI with a maximum credit limit of Rp50,000,000 for operational and business development purposes. The agreed profit-sharing ratio is 1.36% per annum, with a tenor of 84 (eighty-four) months, maturing on November 23, 2031. As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding loan balances amounted to Rp49,987,000 and Rp49,999,000, respectively.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, as a subsidiary of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, based on Credit Facility Agreement No. 04/243/CB3-FOG/XI/2024/MSYR dated November 19, 2024, MMAL obtained a Musyarakah facility from PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) with a maximum credit limit of Rp60,000,000 for operational and business development purposes. The agreed profit-sharing ratio is 1.64% per annum, with a tenor of 84 (eighty-four) months, maturing on November 23, 2031. As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding loan balances amounted to Rp59,987,000 and Rp59,999,000, respectively.

- **PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)**, as a subsidiary of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, based on Credit Facility Agreement No. 05/995/CB3-FOG/VIII/2025/MSYR dated August 14, 2025, MMAL obtained a Musyarakah facility from BSI with a maximum credit limit of Rp19,000,000 for operational and business development purposes. The agreed profit-sharing ratio is 4.33% per annum, with a tenor of 120 (one hundred twenty) months, maturing on August 23, 2035. As of December 31, 2025, the outstanding loan balance amounted to Rp18,366,667. The loan is secured by the following collateral:

1. Tanah seluas 4.372,5 Ha. termasuk tanaman kelapa sawit, infrastruktur, bangunan, sarana dan prasarana yang berlokasi di Desa Kujan dan Guci, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama PT Menthobi Makmur Lestari, entitas anak.

2. Tanah seluas 3.051,6 Ha. termasuk tanaman kelapa sawit, infrastruktur, bangunan, sarana dan prasarana yang berlokasi di Desa Kujan dan Guci, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama PT Menthobi Makmur Lestari, entitas anak.

3. Tanah seluas 13,6 Ha. termasuk bangunan, mesin, sarana dan prasarana yang berlokasi di Desa Guci, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama PT Menthobi Makmur Lestari, entitas anak.

4. Tanah seluas 51,77 Ha. termasuk bangunan, mesin, sarana dan prasarana yang berlokasi di Desa Kujan, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya, entitas anak.

5. *Letter of Undertaking* yang mencakup Cash Defisit Guarantee dari PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dan PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya.

6. *Corporate Guarantee* dari PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dan PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya.

Tujuan Ikatan

Perseroan memiliki total penyaluran dana investasi dari pembiayaan di atas dengan tujuan untuk tujuan modal kerja dan CAPEX Perseroan.

Sumber Dana

Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan yang material terkait investasi, berasal dari instrumen pembiayaan.

1. Land covering an area of 4,372.5 hectares, including oil palm plantations, infrastructure, buildings, and supporting facilities located in Kujan and Guci Villages, Lamandau Regency, Central Kalimantan Province, under the name of PT Menthobi Makmur Lestari.

2. Land covering an area of 3,051.6 hectares, including oil palm plantations, infrastructure, buildings, and supporting facilities located in Kujan and Guci Villages, Lamandau Regency, Central Kalimantan Province, under the name of PT Menthobi Makmur Lestari.

3. Land covering an area of 13.6 hectares, including buildings, machinery, and supporting facilities located in Guci Village, Lamandau Regency, Central Kalimantan Province, under the name of PT Menthobi Makmur Lestari.

4. Land covering an area of 51.77 hectares, including buildings, machinery, and supporting facilities located in Kujan Village, Lamandau Regency, Central Kalimantan Province, under the name of PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya.

5. A Letter of Undertaking covering a Cash Deficit Guarantee from PT Menthobi Karyatama Raya Tbk and PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya.

6. Corporate Guarantees from PT Menthobi Karyatama Raya Tbk and PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya.

Purpose of Commitments

The Company has allocated investment funds from the aforementioned financing facilities primarily for working capital purposes and the Company's CAPEX.

Source of Funds

The source of funds to fulfill these material investment commitments is derived from financing instruments.

Mata Uang dan Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang

Mata uang yang menjadi denominasi ikatan material tersebut adalah mata uang Rupiah Indonesia. Sehingga Manajemen Perseroan tidak menyiapkan langkah-langkah untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing terkait transaksi lindung nilai.

Currency and Foreign Exchange Risk Management

The currency denomination of these material commitments is Indonesian Rupiah. Therefore, the Company's Management has not established specific measures to hedge against foreign exchange risks related to such transactions.

Investasi Barang Modal

Capital Expenditure Investment

Investasi berupa barang modal merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap, yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi Perseroan di masa mendatang.

Capital expenditure investment represents the allocation of funds used to acquire fixed assets or enhance the value of existing fixed assets, which are expected to generate future economic benefits for the Company.

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Jenis dan investasi barang modal disajikan dalam tabel berikut.

Type and Value of Capital Expenditure Investment

The types and values of capital expenditure investments are presented in the following table.

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal – Aset Tetap
Table: Types and Values of Capital Goods Investments – Fixed Assets

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousands of Rupiah)

Jenis Type	Nilai Investasi 2025 2025 Investment Value
Tanah Land	6.945.724
Bangunan dan infrastruktur Building and infrastructure	1.196.804
Perlengkapan dan perabotan Equipment and furnishings	232.790
Mesin dan peralatan Machinery and equipment	1.326.181
Kendaraan dan alat berat Vehicles and heavy equipment	2.447.474
Total	**12.148.973**

Grup menerapkan perubahan atas PSAK No. 216 "Aset tetap". Perubahan atas PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi untuk agrikultur-tanaman produktif. Tanaman produktif dikelompokkan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit milik grup (perkebunan) termasuk alokasi biaya tidak langsung, yang meliputi biaya umum dan administrasi untuk pengembangan tanaman belum menghasilkan, disampaikan sebagai berikut:

The Group has implemented amendments to PSAK No. 216 "Fixed assets". These amendments regulate the accounting treatment for agriculture—bearer plants. Bearer plants are classified into immature plantations and mature plantations. All costs related to the development of the Group's oil palm plantations, including the allocation of indirect costs such as general and administrative expenses for the development of immature plantations, are presented as follows:

Tabel Tanaman belum menghasilkan
Table: Plantation under development

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousands of Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Saldo awal Beginning Balance	25.360.490	13.473.242	11.887.248	88,23%
Biaya pengembangan Development Costs	9.096.067	11.887.248	(2.791.181)	(23,48%)
Dipindahkan ke tanaman menghasilkan Transferred Out to Mature Plantations	(201.748)	-	(201.748)	(100,00%)
Jumlah **Total**	**34.254.809**	**25.360.490**	**8.894.319**	**35,07%**

Tujuan Investasi Barang Modal

Investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan di tahun 2025.

Rencana Belanja Modal Kerja di Tahun Mendatang

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, belanja modal Perseroan (*Capital expenditure* atau "Capex") berjumlah Rp12,15 miliar. Belanja tersebut mayoritas digunakan untuk penambahan aset berupa tanah, bangunan, dan infrastruktur serta belanja modal mesin dan peralatan. Belanja modal yang digunakan Perseroan bersumber dari arus kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi Perseroan menggunakan mata uang Rupiah sehingga tidak diperlukan/diharuskan meminimalisir risiko terhadap valuta asing dengan memantau fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Rencana Belanja Modal Pada Tahun 2026

Untuk tahun 2026, Perseroan telah menganggarkan sejumlah dana yang akan digunakan untuk belanja modal sebesar Rp54,16 miliar yang berasal dari kas internal Perseroan. Rencana belanja modal ini tentunya digunakan untuk mendukung aktivitas Perseroan dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis Perseroan. Rencana belanja modal Perseroan tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Purpose of Capital Expenditure

The capital expenditure is intended to support the smooth execution of the Company's operational activities in 2025.

Capital Expenditure Plan for the Upcoming Year

Realization of Capital Expenditure in 2025

Throughout 2025, the Company's capital expenditure ("Capex") amounted to Rp12.15 billion. The majority of this expenditure was allocated for the addition of assets such as land, buildings, and infrastructure, as well as machinery and equipment. The Company's capital expenditure was funded from cash flows generated from its investment activities and denominated in Indonesian Rupiah. Therefore, no specific measures were required to mitigate foreign exchange risk arising from currency fluctuations.

Capital Expenditure Plan for 2026

For 2026, the Company has budgeted capital expenditure amounting to Rp54.16 Billion which will be sourced from the Company's internal cash. This planned capital expenditure is intended to support the Company's business activities in driving future growth. The detailed capital expenditure plan for 2026 is as follows:

No.	Uraian Description	*Consolidated*
1.	Tanah Land	-
2.	Bangunan Buildings	6.570.890.506
3.	Infrastruktur Infrastructure	15.273.403.00
4.	*Office Equipment*	3.657.425.000
5.	*Machine & Electrical*	25.698.626.640
6.	*Vehicles & Heavy Equipment*	2.956.869.892
7.	*Intangible Assets*	-
Total		**54.157.215.038**

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang/Modal

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/ Capital Restructuring

Investasi

Sepanjang tahun 2025, Perseroan melalui Entitas Anak yakni PT Menthobi Hijau Lestari (MHL) bekerja sama dengan PT Suar Energi Futura. Kerja sama ini adalah berupa pengolahan janjang kosong (*Empty Bunch Press*) yang dihasilkan Pabrik Kelapa Sawit menjadi *pellet* dengan kapasitas 10 ton per jam. Pabrik ini berada di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Ekspansi

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melakukan kegiatan ekspansi.

Divestasi

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melakukan kegiatan divestasi.

Restrukturisasi Hutang /Modal

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melakukan restrukturisasi hutang maupun restrukturisasi modal.

Investment

Throughout 2025, the Company, through its subsidiary PT Menthobi Hijau Lestari (MHL), collaborated with PT Suar Energi Futura. This collaboration involves the processing of empty fruit bunches (Empty Bunch Press) generated by palm oil mills into pellets with a production capacity of 10 tons per hour. The plant is located in Palembang, South Sumatra.

Expansion

Throughout 2025, the Company did not undertake any expansion activities.

Divestment

Throughout 2025, the Company did not undertake any divestment activities.

Debt/Capital Restructuring

Throughout 2025, the Company did not undertake any debt or capital restructuring.

Akuisisi

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melakukan kegiatan akuisisi.

Acquisition

Throughout 2025, the Company did not undertake any acquisition activities.

Komitmen dan Kontinjensi
Commitments and Contingencies

Uraian mengenai kontinjensi yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan laporan keuangan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

- **Perjanjian Plasma PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL) dan Koperasi Berkah Kujan Bersatu;**
  Pada tanggal 22 Februari 2017, MMAL dan Koperasi Berkah Kujan Bersatu ("Berkah Kujan Bersatu") menyetujui perjanjian pengelolaan kebun sawit yang terletak di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan perjanjian tersebut MMAL ditunjuk oleh Berkah Kujan Bersatu untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kebun sawit dengan pola kemitraan. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 1 (satu) siklus tanam.

- **Perjanjian Plasma PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL) dan Koperasi Maspati Jaya Desa Guci;**
  Pada tanggal 30 November 2017, MMAL dan Koperasi Maspati Jaya Desa Guci ("Maspati Jaya") menyetujui perjanjian pengelolaan kebun sawit yang terletak di Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan perjanjian tersebut MMAL ditunjuk oleh Maspati Jaya untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kebun sawit dengan pola kemitraan. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 1 (satu) siklus tanam.

- **Perjanjian Plasma PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL) dan Mandiri Mitra Sejahtera;**
  Pada tanggal 30 Januari 2019, MMAL dan Koperasi Mandiri Mitra Sejahtera ("Mandiri Mitra Sejahtera") menyetujui perjanjian pengelolaan kebun sawit yang terletak di Desa Batu Hambawang, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan perjanjian tersebut MMAL ditunjuk oleh Mandiri Mitra Sejahtera untuk

A description of contingencies undertaken by the Company and its Subsidiaries as of December 31, 2025 is as follows:

- **Plasma Agreement between PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL) and Berkah Kujan Bersatu Cooperative;**
  On February 22, 2017, MMAL and Berkah Kujan Bersatu Cooperative ("Berkah Kujan Bersatu") entered into an agreement for the management of oil palm plantations located in Kujan Village, Bulik District, Lamandau Regency, Central Kalimantan Province. Under this agreement, MMAL was appointed by the cooperative to develop and manage the plantation under a partnership scheme. The agreement is valid for one planting cycle.

- **Plasma Agreement between PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL) and Maspati Jaya Cooperative (Guci Village)**
  On November 30, 2017, MMAL and Maspati Jaya Cooperative in Guci Village ("Maspati Jaya") entered into an agreement for the management of oil palm plantations located in Guci Village, Bulik District, Lamandau Regency, Central Kalimantan Province. Under this agreement, MMAL was appointed to develop and manage the plantation under a partnership scheme. The agreement is valid for one planting cycle.

- **Plasma Agreement between PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL) and Mandiri Mitra Sejahtera Cooperative**
  On January 30, 2019, MMAL and Mandiri Mitra Sejahtera Cooperative ("Mandiri Mitra Sejahtera") entered into an agreement for the management of oil palm plantations located in Batu Hambawang Village, Sematu Jaya District, Lamandau Regency, Central Kalimantan Province. MMAL was appointed to develop

melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kebun sawit dengan pola kemitraan. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 1 (satu) siklus tanam.

and manage the plantation under a partnership scheme. The agreement is valid for one planting cycle.

- **Perjanjian Plasma PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL) dan Koperasi Putra Lamandau Jaya;**
  Pada tanggal 24 November 2020, MMAL dan Koperasi Putra Lamandau Jaya ("Putra Lamandau Jaya") menyetujui perjanjian pengelolaan kebun sawit yang terletak di Kecamatan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan perjanjian tersebut MMAL menunjuk Putra Lamandau Jaya untuk melaksanakan pengembangan dan pengelolaan kebun sawit dengan pola kemitraan. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 5 (lima) tahun.

- **Plasma Agreement between PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL) and Putra Lamandau Jaya Cooperative**
  On November 24, 2020, MMAL and Putra Lamandau Jaya Cooperative ("Putra Lamandau Jaya") entered into an agreement for the development and management of oil palm plantations located in Nanga Bulik District, Lamandau Regency, Central Kalimantan Province. The agreement is valid for 5 (five) years.

- **Operasi Bersama PT Menthobi Hijau Lestari (MHL) dan PT Berlian Inti Mekar (BIM);**
  Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 007/ BIMP/IV/2024 tanggal 30 April 2024, MHL melakukan perjanjian operasi bersama dengan PT Berlian Inti Mekar (BIM) untuk pembangunan dan pengelolaan pabrik pupuk organik yang berlokasi di Kelurahan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan perjanjian operasi bersama tersebut, Perseroan memiliki kewajiban, antara lain, mendirikan pabrik dan instalasi pabrik pupuk organik di sekitar wilayah pabrik kelapa sawit milik BIM, membangun fasilitas penunjang, mengelola pabrik, dan menjual hasil pengolahan sementara BIM menyediakan lahan dan bahan baku. Pembagian hasil penjualan disetujui berdasarkan persentase tertentu atas keuntunganoperasi bersama.

- **Joint Operation between PT Menthobi Hijau Lestari (MHL) and PT Berlian Inti Mekar (BIM)**
  Based on Cooperation Agreement No. 007/ BIMP/IV/2024 dated April 30, 2024, MHL entered into a joint operation agreement with PT Berlian Inti Mekar (BIM) for the construction and operation of an organic fertilizer plant located in Gelumbang Subdistrict, Muara Enim Regency, South Sumatra Province. Under this agreement, the Company is responsible for, among others, constructing the plant and its installations, developing supporting facilities, managing the plant, and marketing the output. BIM is responsible for providing land and raw materials. Profit sharing is agreed based on a certain percentage of joint operation profits.

Pencapaian Target dan Target ke Depan

Achievement of Targets and Future Targets

Banyak tantangan bisnis yang terjadi sepanjang tahun 2025 baik dari sisi produksi, iklim, hambatan dagang yang mempengaruhi realisasi dan target-target Perseroan di tahun ini. Realisasi rencana bisnis 2025 adalah dengan membandingkan antara target dan pencapaian kinerja Perseroan yang tersaji dalam laporan tahunan ini.

Throughout 2025, the Company faced various business challenges, including those related to production, climate conditions, and trade barriers, which affected the realization of its targets. The realization of the 2025 business plan is measured by comparing the Company's targets and actual performance as presented in this Annual Report.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan
Table: Comparison of Financial Targets and Realization

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand of Rupiah)

No	Pos-pos Keuangan Utama Key Financial Items	Target 31 Desember 2025 December 31, 2025 Target	Realisasi 31 Desember 2025 December 31, 2025 Realization	Pencapaian Achievement
1	2	3	4	5=4/3*100%
Laba Rugi Komprehensif **Comprehensive Income or Loss**				
1.	Penjualan/Pendapatan Sales/Revenues	1.441.850.090	1.246.050.864	86%
2.	Laba Bruto Gross Profit	332.597.461	189.372.917	56%
3.	Laba Usaha Operating Income	261.755.260	120.696.977	46%
4.	Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	179.335.774	55.093.257	30%
Struktur Modal **Capital Structure**				
1.	Liabilitas Liabilities	819.102.446	870.528.643	106%
2.	Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	125.592.857	161.165.175	128%
3.	Utang Bersih Net Payables	693.509.589	709.363.468	102%
4.	Ekuitas Equity	702.520.667	668.835.608	95%
5.	**Rasio utang terhadap modal (*Gearing Ratio*)** **Debt to Equity Ratio (Gearing Ratio)**	**1,17**	**1,06**	**90%**
Rasio Keuangan (%) **Financial Ratios (%)**				
1.	Laba Tahun Berjalan / Penjualan Neto Profit for the Year / Net Sales	5,54	4,42	80%
2.	*Return on Asset* (ROA)	4,81	3,58	74%
3.	*Return on Equity* (ROE)	10.42	8,24	79%
4.	Rasio Lancar (*Current Asset*) Current Ratio	351,1	348,0	99%
5.	Rasio Kas (*Cash Ratio*) Cash Ratio	73,26	80,97	111%

Sepanjang tahun 2025, realisasi penjualan Perseroan tercatat sebesar Rp1.246,05 miliar atau sebesar 86% dari terget yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1.441,85 miliar. Di tahun yang sama, realisasi laba bruto tercatat sebesar Rp189,37 miliar atau sebesar 56% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp332,60 miliar. Realisasi laba usaha tercatat sebesar Rp120,70 miliar atau 46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp261,75 miliar, sedangkan realisasi laba tahun berjalan tercatat

Throughout 2025, the Company's sales revenue reached Rp1,246.05 billion, or 86% of the set target of Rp1,441.85 billion. In the same year, gross profit reached Rp189.37 billion, or 56% of the set target of Rp332.60 billion. Operating profit reached Rp120.70 billion, or 46% of the set target of Rp261.75 billion. Profit for the year reached Rp55.09 billion, or 30% of the set target of Rp179.33 billion.

sebesar Rp55,09 miliar atau sebesar 30% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp179, 33 miliar.

Dari sisi struktur modal, sepanjang tahun 2025, liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp870,53 miliar atau sebesar 106% dari target yang ditetapkan yaitu Rp819,10 miliar. Realisasi kas dan setara kas tercatat sebesar Rp161,16 miliar atau sebesar 128% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp125,59 miliar. Utang bersih tercatat sebesar Rp709,36 miliar atau 102% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp693,51 miliar, dan realisasi ekuitas tercatat sebesar Rp668,84 miliar atau sebesar 95% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp702,52 miliar. Struktur modal Perusahaan melalui nilai gearing ratio masih lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 1,17%. Meskipun nilai struktur modal Perusahaan belum melampaui target yang ditetapkan, akan tetapi Perseroan berada dalam kondisi usaha yang tidak memiliki resiko tinggi dikarenakan perolehan nilai gearing ratio masih tetap aman tercatat sebesar 1,06%.

Regarding capital structure, throughout 2025, the Company's liabilities reached Rp870.53 billion, or 106% of the set target of Rp819.10 billion. Cash and cash equivalents were realized at Rp161.16 billion, or 128% of the set target of Rp125.59 billion. Net debt was recorded at Rp709.36 billion or 102% of the set target or Rp693.51 billion, and equity realization was recorded at Rp668.84 billion or 95% of the set target of Rp702.52 billion. The Company's capital structure, as indicated by the gearing ratio, remained below the target of 1.17%. Although the value of the Company's capital structure has not exceeded the target, the Company's business condition was not high risk, as the gearing ratio remained safe at 1.06%.

Tabel Produktivitas per Segmen Usaha
Table: Productivity by Business Segment

(dalam ton)
(in Tons)

No	Keterangan Description	Target 31 Desember 2025 December 31, 2025 Target	Realisasi 31 Desember 2025 December 31, 2025 Realization	Pencapaian Achievement
1	2	3	4	5=4/3*100%
1.	Inti Kelapa Sawit Palm Kernel	16.916	15.622	92%
2.	Minyak Kelapa Sawit Palm Kernel Oil	82.877	76.680	92%
Total Produksi Total Production		**99.792**	**92.302**	**92%**

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah memproduksi minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit sebesar 92.302 ton atau sebesar 92% dari target yang ditetapkan, masih lebih rendah dari target produksi yang ditetapkan sebesar 99.792 ton.

Throughout 2025, the Company produced 92,302 tons of palm oil and palm kernel, or 92% of the target, which was still below the target of 99,792 tons.

Ke depannya, Perseroan akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi yang ditetapkan. Hal ini agar kinerja Perseroan dapat mencapai target yang ditetapkan dari sisi keuangan maupun sisi produksi di masa yang akan datang.

Going forward, the Company will continue to evaluate the implementation of its established strategies to ensure that performance targets—both financial and operational—can be achieved in the future.

Tabel Penjualan Neto dan Laba Bruto per Segmen Usaha
Table: Net Sales and Gross Profit by Business Segment

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	Target 31 Desember 2025 December 31, 2025 Target	Realisasi 31 Desember 2025 December 31, 2025 Realization	Pencapaian Achievement
2	3	4	5=4/3*100%
Penjualan/Pendapatan Neto **Net Sales/Revenues**			
Minyak Kelapa Sawit Crude Palm Oil	1.079.880.795	1.072.145.795	99,28%
Minyak Inti Kelapa Sawit Palm Kernel Oil	146.104.248	152.317.397	104,25%
Inti Kelapa Sawit Palm Kernel	-	4.829.964	100%
Lainnya Others	215.865.047	16.757.708	7,76%
Jumlah **Total**	**1.441.850.090**	**1.246.050.864**	**86,42%**
Laba Bruto **Gross Profit**			
Minyak Kelapa Sawit Crude Palm Oil	249.100.522	151.345.406	60,76%
Minyak Inti Kelapa Sawit Palm Kernel Oil	33.702.464	34.944.617	103,69%
Inti Kelapa Sawit Palm Kernel	-	241.498	100%
Lainnya Others	49.794.473	2.841.396	5,71%
Jumlah **Total**	**332.597.461**	**189.372.917**	**56,94%**

Prospek Usaha dan Strategi 2026

Business Prospects and Strategy for 2026

Kementerian optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai angka 6% pada tahun 2026. Hal ini ditunjukkan dengan perbaikan ekonomi yang sudah terlihat sejak triwulan IV tahun lalu yang tumbuh 5,39%, berbalik dari tren perlambatan sebelumnya. Dalam mencapai target tersebut, Pemerintah mengaktifkan dua mesin pertumbuhan sekaligus yaitu sektor swasta dan dilengkapi stimulus pemerintah. Ke depan, pemerintah akan memastikan kedua mesin tersebut berjalan bersamaan, melalui peningkatan likuiditas, perbaikan iklim investasi, serta optimalisasi belanja negara. Untuk mendorong investasi, Pemerintah telah membentuk Satgas *Debottlenecking* guna menyelesaikan hambatan usaha. Di sisi lain, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap barang ilegal yang masuk ke pasar

The Government remains optimistic that Indonesia's economic growth will reach approximately 6% in 2026. This optimism is supported by economic recovery observed since the fourth quarter of the previous year, which recorded growth of 5.39%, reversing the earlier slowdown trend. To achieve this target, the Government is activating two key growth engines simultaneously, namely the private sector and government stimulus. Going forward, the Government will ensure both engines operate in tandem through increased liquidity, an improved investment climate, and optimization of state spending. To further encourage investment, the Government has established a Debottlenecking Task Force to address business constraints. At the same time, stricter supervision is being implemented to control the entry of illegal goods into the domestic

domestik. Menteri Keuangan juga memastikan bahwa stimulus fiskal akan tetap diberikan untuk menjaga daya beli termasuk alokasi Rp55 triliun untuk dukungan Lebaran dan Gaji ke-13. Saat ini, ekonomi Indonesia tengah memasuki fase ekspansi yang dapat berlangsung hingga 2030-2033 menuju ke arah Indonesia Emas.

Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia diperkirakan masih mencatat pertumbuhan produksi moderat. Produksi sawit Indonesia diproyeksikan tumbuh sekitar sekitar 4%–5% di tahun 2026 dengan kenaikan terutama berasal dari perbaikan produktivitas dan maturasi tanaman, bukan dari ekspansi lahan baru. Pada tahun 2025, mandat biodiesel Indonesia menjadi penggerak utama perubahan struktur permintaan. Penerapan B40 secara nasional menyerap sekitar 15,6 juta kiloliter biodiesel, setara dengan kira-kira 14 juta ton CPO. Diskusi kebijakan menunjukkan rencana bertahap menuju B45–B50 dalam periode 2026–2027. Setiap kenaikan campuran akan menyerap lebih banyak CPO di dalam negeri, mengurangi ketersediaan ekspor dan tetap menopang harga. Secara historis, harga minyak sawit global masih berada di level tinggi berkisar sekitar USD 1.050–1.100/ton. Pada paruh pertama 2026, proyeksi konsensus pelaku industri mengindikasikan harga yang tetap kuat dengan kisaran sekitar USD 1.050–1.150/ton, tergantung realisasi cuaca, kebijakan biofuel, dan perkembangan ekonomi global.

Secara makro, permintaan minyak nabati termasuk sawit tetap didukung oleh beberapa hal seperti pertumbuhan penduduk dan pendapatan di negara berkembang, pemulihan pasca pandemi, dan kebijakan energi terbarukan yang memperluas penggunaan minyak nabati sebagai bahan baku biofuel. Namun, terdapat tren yang kuat menuju nasionalisme pangan dan energi. Banyak negara besar mendorong kemandirian minyak nabati yang mempengaruhi arus perdagangan CPO, RBD *olein*, dan fraksi turunan. Selain itu, regulasi lingkungan yang dicetuskan Uni Eropa berdampak langsung ke industri sawit Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia bersama Malaysia merespons lewat *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC), forum ASEAN, hingga kerja sama dengan BRICS, untuk mendorong standar keberlanjutan yang "adil" yang tidak mengorbankan pembangunan di negara produsen.

market. The Minister of Finance has also confirmed that fiscal stimulus will continue to be provided to maintain purchasing power, including an allocation of Rp55 trillion for Eid-related support and the 13th-month salary. Currently, Indonesia's economy is entering an expansion phase, which is expected to continue until 2030–2033, aligning with the vision of "Golden Indonesia."

As the world's largest palm oil producer, Indonesia is expected to maintain moderate production growth. Palm oil production is projected to grow by approximately 4%–5% in 2026, primarily driven by improved productivity and crop maturation rather than land expansion. In 2025, Indonesia's biodiesel mandate became a key driver of demand structure changes. The nationwide implementation of B40 absorbed approximately 15.6 million kiloliters of biodiesel, equivalent to around 14 million tons of crude palm oil (CPO). Policy discussions indicate a gradual transition toward B45–B50 during 2026–2027. Each increase in the blending mandate is expected to absorb more domestic CPO, reduce export availability, and support price stability. Historically, global palm oil prices have remained at relatively high levels, ranging between USD 1,050–1,100 per ton. In the first half of 2026, industry consensus projections suggest a continued strong pricing in the range of USD 1,050–1,150 per ton, depending on weather conditions, biofuel policies, and global economic developments.

From a macroeconomic perspective, demand for vegetable oils, including palm oil, continues to be supported by several factors such as population and income growth in developing countries, post-pandemic recovery, and renewable energy policies that expand the use of vegetable oils as biofuel feedstock. However, there is a growing trend toward food and energy nationalism. Many major countries are promoting self-sufficiency in vegetable oils, which in turn affects trade flows of CPO, RBD olein, and its derivative products. In addition, environmental regulations introduced by the European Union have had a direct impact on Indonesia's palm oil industry. In response, Indonesia, together with Malaysia, has strengthened collaboration through the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), ASEAN forums, and partnerships with BRICS, aiming to promote "fair" sustainability standards that do not hinder development in producing countries.

Secara volume, pusat gravitasi permintaan sawit terus bergeser. Di Uni Eropa, volume impor sawit cenderung turun, dan diarahkan hanya untuk segmen niche dan produk tersertifikasi tinggi. India, Tiongkok, dan negara Asia lain tetap menjadi motor utama permintaan, meski dengan pola perdagangan yang dinamis. Timur Tengah dan Afrika muncul sebagai pasar pertumbuhan baru, seiring peningkatan populasi dan perkembangan industri makanan. Diversifikasi pasar ini memperkuat ketahanan permintaan bagi Indonesia. Pada Januari–Agustus 2025, terjadi pemulihan kuat, dengan produksi naik ~13% *year-on-year*. Proyeksi tahunan menempatkan produksi di kisaran 56–57 juta ton (naik sekitar 10% dari 2024). Tahun 2026, diperkirakan tumbuh sekitar 4–5%, seiring membaiknya produktivitas kebun yang memasuki fase puncak produksi, *replanting* yang mulai berbuah, dan cuaca yang relatif normal.

In terms of volume, the center of gravity of palm oil demand continues to shift. In the European Union, palm oil import volumes have tended to decline and are increasingly directed toward niche and highly certified products. Meanwhile, India, China, and other Asian countries remain the primary drivers of demand, albeit with dynamic trade patterns. The Middle East and Africa are emerging as new growth markets, driven by population growth and the expansion of the food industry. This market diversification strengthens the resilience of Indonesia's palm oil demand. During the January–August 2025 period, a strong recovery was observed, with production increasing by approximately 13% year-on-year. Annual projections place production in the range of 56–57 million tons (an increase of around 10% compared to 2024). In 2026, production is expected to grow by approximately 4%–5%, supported by improved plantation productivity entering peak production phases, maturing replanting areas, and relatively normal weather conditions.

Dari sisi permintaan Internasional, tahun 2025 India masih menjadi importir minyak sawit terbesar dunia dan pasar utama minyak sawit bagi Indonesia. Total impor minyak nabati India berkisar 16–17 juta ton per tahun. Setelah India, Tiongkok adalah importir minyak sawit terbesar kedua, impor minyak sawit Tiongkok berada di kisaran 4,5 juta ton per tahun. Tahun 2026 diperkirakan konsumsi minyak nabati per kapita India tetap positif dan permintaan sawit cenderung *moderat-bullish*. Untuk Tiongkok, volume total terkait sawit (impor langsung ditambah produk turunan) diperkirakan cenderung stabil ke sedikit naik, tetapi komposisinya makin bergeser ke produk hilir dan *feedstock biofuel*.

From the international demand perspective, in 2025 India remained the world's largest palm oil importer and the primary market for Indonesia's palm oil. India's total vegetable oil imports are estimated at approximately 16–17 million tons per year. Following India, China is the second-largest palm oil importer, with imports reaching around 4.5 million tons annually. In 2026, India's per capita vegetable oil consumption is expected to remain positive, with palm oil demand showing a moderately bullish trend. Meanwhile, in China, total palm-related volumes (direct imports plus derivative products) are projected to remain stable to slightly increase, with a growing shift toward downstream products and biofuel feedstock.

Dari sisi permintaan domestik, Tahun 2025 kebijakan biodiesel Indonesia telah menjadi *game changer* bagi struktur permintaan sawit nasional. Indonesia menjalankan program B40 secara luas, selain itu konsumsi biodiesel mencapai sekitar 15,6 juta kiloliter yang menggunakan kira-kira 14 juta ton CPO artinya sekitar sepertiga produksi sawit nasional terserap domestik untuk energi, bukan diekspor dalam bentuk CPO atau produk olahan biasa. Tahun 2026, harga minyak sawit diperkirakan berada di level tinggi mengingat pertumbuhan permintaan minyak nabati global lebih cepat dari tambahan pasokan, produksi sawit Indonesia dan Malaysia tumbuh moderat, pengaruh Biofuel B40–

From the domestic demand perspective, Indonesia's biodiesel policy in 2025 has become a game changer for the national palm oil demand structure. The widespread implementation of the B40 program resulted in biodiesel consumption of approximately 15.6 million kiloliters, equivalent to around 14 million tons of CPO. This indicates that roughly one-third of national palm oil production is absorbed domestically for energy purposes rather than being exported as CPO or conventional processed products. In 2026, palm oil prices are expected to remain at elevated levels, supported by global vegetable oil demand growth outpacing supply increases. Palm oil production in Indonesia

B50 di Indonesia diikuti *renewable* diesel di AS serta SAF dan HVO di Eropa dan Asia.

Besarnya peningkatan kebutuhan terhadap CPO, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong hilirisasi nasional. Serangkaian program strategis nasional terutama kebijakan tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan yang akan diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi dan Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (SANAS KSB) Tahun 2025-2029. Dalam jangka pendek (2024–2026), beberapa langkah strategis yang bisa segera diambil antara lain mempercepat *replanting* dengan bibit unggul, memperkuat praktik agronomi cerdas iklim (*climate-smart*), mengakselerasi hilirisasi di dalam negeri. Untuk jangka panjang, perspektif 2030–2035, visi strategis industri sawit Indonesia mencakup *yield revolution* tanpa ekspansi besar lahan, integrasi *smallholders* ke rantai pasok modern, adopsi teknologi industri 4.0 di pabrik dan rantai pasok, monetisasi jasa lingkungan dan karbon, dan penguatan kelembagaan dan *brand* "sawit indonesia berkelanjutan".

Sumber:
- https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik
- https://gapki.id/news/2025

Dalam melihat kondisi di atas, manajemen Perseroan telah menyusun Rencana Bisnis Perseroan dan strategi bisnis Perseroan untuk tahun 2026 dengan mempertimbangkan beberapa kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2026-2027 serta asumsi-asumsi makro maupun mikro tersaji sebagai berikut.

and Malaysia is projected to grow moderately, while demand will continue to be driven by biofuel policies such as B40–B50 in Indonesia, as well as renewable diesel in the United States and Sustainable Aviation Fuel (SAF) and Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) initiatives in Europe and Asia.

With the increasing in demand for CPO, the Government continues to enhance productivity and promote downstream development at the national level. A series of national strategic programs—particularly policies on sustainable palm oil governance—will be formalized through a Presidential Regulation (Perpres) on the National Strategy and Action Plan for Sustainable Palm Oil (SANAS KSB) 2025–2029. In the short term (2024–2026), several strategic measures can be undertaken, including accelerating replanting with superior seedlings, strengthening climate-smart agronomic practices, and accelerating domestic downstream processing. In the long term, with a 2030–2035 perspective, the strategic vision for Indonesia's palm oil industry includes achieving a yield revolution without significant land expansion, integrating smallholders into modern supply chains, adopting Industry 4.0 technologies in mills and supply chains, monetizing environmental services and carbon, and strengthening institutional frameworks as well as the "sustainable Indonesian palm oil" brand.

Sources:
- https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik
- https://gapki.id/news/2025

In view of the above conditions, the Company's management has formulated the Company's Business Plan and business strategies for 2026 by taking into account current economic conditions, economic projections for 2026–2027, as well as macroeconomic and microeconomic assumptions, as presented below.

Proyeksi Indikator Makro Indonesia di Tahun 2025-2026
Projection of Indonesia's Macroeconomic Indicators for 2026–2027

No.	Indikator Ekonomi Economic Indicators	APBN 2026 State Budget 2026	RAPBN 2027 State Budget 2027
1.	Pertumbuhan Ekonomi Economic Growth	5,4%	5,3 – 5,9%
2.	Inflasi Inflation	2,5%	1,5 – 3,5%
3.	Nilai Tukar (Rp/ 1 USD) Exchange Rate (Rp/1 USD)	16.500	15.700-16.900

No.	Indikator Ekonomi Economic Indicators	APBN 2026 State Budget 2026	RAPBN 2027 State Budget 2027
4.	Tingkat Suku Bunga SUN 10 tahun (%) 10-year Government Bond Interest Rate (%)	7,0%	6,3 – 7,3%
5.	Harga minyak mentah Indonesia (US$/barrel) Indonesian Crude Oil Price (US$/barrel)	6,9%	6,3-7,0%
6.	*Lifting* minyak mentah (ribu barrel per hari) Crude Oil Lifting (thousand barrels per day)	70	60-80
7.	*Lifting* gas (ribu barrel setara minyak per hari) Gas Lifting (thousand barrels of oil equivalent per day)	610	599-685

Sumber | Source :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Source: State Budget (APBN) for Fiscal Year 2026 and Draft State Budget (RAPBN) for Fiscal Year 2027.

Tabel Proyeksi Keuangan
Table: Financial Projections

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

No	Pos-pos Keuangan Utama Main Financial Cost	Proyeksi 2026 Projection for 2026
Laba Rugi Komprehensif **Comprehensive Profit or Loss**		
1.	Penjualan/Pendapatan Sales/Revenue	1.390.317.113
2.	Laba Bruto Gross Profit	281.102.853
3.	Laba Usaha Operating Profit	205.610.318.
4.	Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	128.056.687
Struktur Modal **Capital Structure**		
1.	Liabilitas Liabilities	765.528.640
2.	Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	182.388.548
3.	Utang Bersih Net Payables	583.140.092
4.	Ekuitas Equity	794.471.337
5.	**Rasio utang terhadap modal (*Gearing Ratio*)** **Debt to capital ratio (Gearing Ratio)**	0,96
Rasio Keuangan (%) **Financial Ratios (%)**		
1.	Laba Tahun Berjalan / Penjualan Neto Profit for the Year / Net Sales	9,2
2.	*Return on Asset* (ROA)	8,21
3.	*Return on Equity* (ROE)	16,1.

No	Pos-pos Keuangan Utama Main Financial Cost	Proyeksi 2026 Projection for 2026
4.	Rasio Lancar (*Current Asset*) Current Ratio	348,23
5.	Rasio Kas (*Cash Ratio*) Cash Ratio	91,63
6.	DER (*Debt to Equity Ratio*) Debt to Equity Ratio	96,36

Tabel Penjualan Neto dan Laba Bruto per Segmen Usaha
Table: Net Sales and Gross Profit by Business Segment

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

No	Uraian Description	Proyeksi 2026 Projection for 2026
1.	Minyak Kelapa Sawit Crude Palm Oil	1.081.052.285
2.	Inti Kelapa Sawit Palm Kernel	-
3.	Minyak Inti Kelapa Sawit Palm Kernel Oil	171.333.366
4.	Bungkil Kelapa Sawit Palm Kernel Cake	8.290.045
5.	Lainnya Others	129.641.415
Total Penjualan Neto **Total Net Sales**		**1.390.317.113**
1.	Minyak Kelapa Sawit Crude Palm Oil	218.573.790.
2.	Inti Kelapa Sawit Palm Kernel	-
3.	Minyak Inti Kelapa Sawit Palm Kernel Oil	34.641.232
4.	Bungkil Kelapa Sawit Palm Kernel Cake	1.676.132
5.	Lainnya Others	26.211.697
Total Laba Bruto **Total Gross Profit**		**281.102.853**

Tabel Produktivitas per Segmen Usaha
Table: Productivity by Business Segment

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

No	Uraian Description	Proyeksi 2026 Projection for 2026
1.	Tandan Buah Segar (TBS) Fresh Fruit Bunches (FFB)	336.400
2.	Minyak Sawit Mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) Crude Palm Oil (CPO)	73.292
3.	Inti Sawit atau *Palm Kernel* Palm Kernel	15.031

No	Uraian Description	Proyeksi 2026 Projection for 2026
4.	Minyak Inti Kelapa Sawit Palm Kernel Oil	6.764
5.	Bungkil Kelapa Sawit Palm Kernel Meal	7.516
Total		**439.003**

Informasi Keberlangsungan Usaha

Melihat dari sisi target dan realisasi kinerja Perseroan di tahun 2025, terdapat potensi besar yang dimiliki Perseroan untuk mengembangkan usaha di industri kelapa sawit menjadi lebih luas lagi. Permintaan domestik dan global yang meningkat merupakan peluang besar bagi Perseroan dalam memperluas pangsa pasar di industri kelapa sawit. Selain itu, Perseroan juga harus terus menerapkan inovasi-inovasi baru yang ramah lingkungan agar sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah.

Dari sisi struktur permodalan, terlihat bahwa kondisi modal Perseroan sangat sehat sehingga sangat memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dan memperkuat pondasi Perseroan dalam menghadapi berbagai tantangan kedepannya.

Hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Sepanjang tahun 2025, tidak terjadi hal negative yang memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan operasional Perseroan, baik yang berasal dari internal ataupun eksternal. Hal tersebut tidak terlepas dari semakin baiknya pengelolaan risiko yang telah dijalankan oleh Perseroan.

Assessment Manajemen untuk Mengelola Potensi yang Berpengaruh Signifikan

Dengan mengacu pada strategi pengembangan usaha tahun 2025 yang telah dirancang, manajemen telah melakukan peninjauan atas kapabilitas Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya di masa yang akan datang. Manajemen berpendapat bahwa tidak ditemukan hal material yang berpotensi menghambat kemampuan Perseroan untuk melanjutkan operasionalnya.

Information on Business Continuity

Based on the Company's performance targets and realization in 2025, the Company has significant potential to further expand its operations within the palm oil industry. Increasing domestic and global demand presents substantial opportunities for the Company to broaden its market share in the palm oil sector. In addition, the Company must continue to implement environmentally friendly innovations in line with Government policy directions.

From a capital structure perspective, the Company's financial position remains strong, providing a solid foundation for sustainable growth and strengthening the Company's resilience in facing future challenges.

Factors with Significant Impact on Business Continuity

Throughout 2025, there were no adverse events that significantly affected the Company's operational activities, either from internal or external factors. This condition reflects the effective implementation of the Company's risk management practices.

Management Assessment in Managing Potential Significant Impacts

With reference to the business development strategy for 2025, management has conducted an assessment of the Company's capability to maintain business continuity in the future. Management believes that there are no material issues that could hinder the Company's ability to continue its operations.

Dalam melakukan *assessment*, manajemen menggunakan sejumlah asumsi, antara lain:

1. Kinerja operasional;
2. Kinerja keuangan;
3. Regulasi; dan
4. Berbagai risiko seperti: risiko operasional, keuangan, bisnis dan risiko–risiko lainnya yang disebabkan oleh faktor eksternal.

In conducting the assessment, management considered several key assumptions, including:

1. Operational performance;
2. Financial performance;
3. Regulatory environment; and
4. Various risks, including operational, financial, business, and other risks arising from external factors.

Dari sisi struktur permodalan, terlihat bahwa kondisi modal Perseroan sangat sehat sehingga sangat memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dan memperkuat pondasi Perseroan dalam menghadapi berbagai tantangan kedepannya.

From a capital structure perspective, the Company maintains a strong capital position, enabling sustainable growth and reinforcing its foundation to navigate future challenges.

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts After the Auditor's Report Date

Berada dalam ketidakpastian global, Perseroan menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing yang terjadi akibat fluktuasi. Menyikapi hal tersebut, Direksi Perseroan mengeluarkan kebijakan berupa batas tingkat eksposur berdasarkan mata uang yang terus dimonitor secara berkala.

Amid ongoing global uncertainty, the Company is exposed to foreign exchange risk arising from currency fluctuations. In response, the Board of Directors has established policies to limit exposure levels by currency, which are monitored regularly.

Sepanjang tahun 2025, transaksi-transaksi Perseroan yang menggunakan mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada akhir periode pelaporan, transaksi penggunaan mata uang asing dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs penutup yaitu kurs tengah Bank Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang tersaji pada Laporan Tahunan ini.

Throughout 2025, the Company's foreign currency transactions were recorded using exchange rates prevailing at the transaction dates. At the end of each reporting period, foreign currency balances are translated into Rupiah using the closing rate, namely Bank Indonesia's middle rate, as of December 31, 2025 and 2024, as presented in this Annual Report.

Uraian Description	2025	2024
	Rupiah	
Dollar Amerika Serikat per 1/Rupiah Rupiah / 1 US Dollar	16.782	16.162

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi. Seluruh eksposur adalah dalam Dolar AS, tidak terdapat eksposur risiko mata uang asing selain dalam Dolar AS.

Foreign exchange differences arising from the settlement of monetary items and from the translation of monetary items denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss. All exposures are in US Dollars, and there are no foreign exchange risk exposures other than those denominated in US Dollars.

Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Dividend Policy, Announcement, and Payment

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen Perseroan merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana Perseroan berhak membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen juga dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif dengan mempertimbangkan laba, kondisi keuangan dan likuiditas yang dimiliki oleh Perseroan.

Besaran dividen yang akan dibagikan tergantung dari laba tahun berjalan yang dikurangi cadangan wajib minimal 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor. Penetapan besaran dividen yang ditetapkan oleh Direksi harus telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika Perseroan mengalami kerugian pada saat berakhirnya tahun buku, maka dividen yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Adapun Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan, Perseroan melaksanakan pengumuman dan pembagian dividen sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Perseroan pada tanggal 30 April 2025 yang diaktakan dengan Akta Notaris Yurisa Martanti, S.H, M.H No. 5, para Pemegang Saham menyetujui penyisihan saldo laba sebesar Rp10.407.379 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”). Selain itu, pemegang saham setuju untuk membagikan dividen tunai sejumlah Rp18.212.913.950 atau 35% dari laba bersih Perusahaan di tahun 2024.

Dividend Policy

The Company’s dividend policy refers to the Indonesian Company Law, which allows the Company to distribute interim dividends prior to the end of the financial year, provided such distribution is stipulated in the Company’s Articles of Association. Dividend distribution is also subject to approval at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), and the Company may only distribute cash dividends if it has a positive retained earnings balance, taking into account profitability, financial condition, and liquidity.

The amount of dividends to be distributed depends on the current year’s profit after deducting the statutory reserve of at least 20% of the issued and paid-up capital. The determination of dividend distribution by the Board of Directors must obtain approval from the Board of Commissioners. In the event the Company incurs losses at the end of the financial year, any interim dividends distributed must be returned by the shareholders to the Company. The Board of Commissioners and the Board of Directors shall be jointly and severally liable for such repayment if the interim dividends are not returned by the shareholders.

Dividend Announcement and Payment

Based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders, the Company announced and distributed dividends as follows.

Pursuant to the resolution of the General Meeting of Shareholders held on April 30, 2025, as notarized under Deed No. 5 of Notary Yurisa Martanti, S.H., M.H., the shareholders approved the allocation of retained earnings amounting to Rp10,407,379 in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In addition, the shareholders approved the distribution of cash dividends amounting to Rp18,212,913,950 or 35% of the Company’s net profit for the 2024 financial year.

Dividen yang Disetor atas Kinerja Tahun 2024
Dividends Paid for the 2024 Financial Year Performance

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Uraian Description		Tahun Buku 2024 2024 Financial Year
Laba Bersih Diatribusikan **Net Profit Attributable to**		
Persentase Pembayaran Dividen Percentage of Dividend Payment	35%	Rp18.212.913.950
Dividen yang Dibayarkan* **Dividends Paid out**		
Fuad Hasan Masyhur	68,62%	12.497.701.552
PT Maktour Bangun Persada	7,78%	1.416.964.705
PT Mitra Wiraswasta Indonesia	0,11%	20.034.205
Harry Mohamad Nadir	0,05%	9.106.457
Wawan Sulistyawan	0,03%	5.463.874
M. Arief Pahlevi Pangerang	0,03%	5.463.874
Bambang Laksanawan	0,03%	5.463.874
Muhammad Rocky Masyhur	0,01%	1.821.291
Masyarakat Public	23,34%	4.250.894.116
Pembayaran **Payment**		**18.212.913.950**

Keterangan: Dividen untuk tahun buku 2024 akan disetorkan pada tanggal 28 Mei 2025.
Description: Dividends for the financial year 2024 will be deposited on 28 May 2025.

Dividen yang Disetor atas Kinerja Tahun 2025 dan 2024
Dividends Paid Based on Performance for Fiscal Years 2025 and 2024

Uraian Description	Tahun Pembagian Dividen Dividend Distribution Year	
	2025 **(untuk hasil usaha tahun 2024)** **(for financial performance in 2024)**	**2024** **(untuk hasil usaha tahun 2023)** **(for financial performance in 2023**
Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk di Tahun Sebelumnya (Rp - nilai penuh) Profit for the year Attributable to Owners of the Parent Entity in the Previous Year (Rp - full value)	54.882.631.000	51.375.410.000
Dividen Kas yang dibagikan (Rp - nilai penuh) Cash Dividends Distributed (Rp – full amount)	18.212.913.950	12.000.123.702
Dividen per Lembar Saham Dividend per Share	1	1,51
Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Payout Ratio (%)	35%	23,42%
Tanggal Pengumuman Announcement Date	30 April 2025 April 30, 2025	26 April 2024 April 26, 2024
Tanggal Pembayaran Payment date	28 Mei 2025 May 28, 2025	22 Mei 2024 May 22, 2024

Uraian Description	Tahun Pembagian Dividen Dividend Distribution Year	
	2025 (untuk hasil usaha tahun 2024) (for financial performance in 2024)	2024 (untuk hasil usaha tahun 2023) (for financial performance in 2023
Keputusan RUPS GMS Resolutions	Akta Notaris Yurisa Martanti, S.H, M.H, No. 5 tanggal 30 April 2025 Notarial Deed No. 5 of Yurisa Martanti, S.H., M.H., dated April 30, 2025	Akta Notaris Yurisa Martanti, S.H, M.H, No. 7 tanggal 24 April 2024 Notarial Deed No. 7 of Yurisa Martanti, S.H., M.H., dated April 24, 2024

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan

Long-Term Performance-Based Compensation Policy for Managementa and/or Employees

Terkait kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan, para pemegang saham Perseroan menyetujui atas penerbitan opsi saham yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor:17/Dir-MKTR/VIII/2022 tentang *Management Stock Option Program* (MSOP) serta Akta Notaris No. 1 tanggal 5 Agustus 2022 dari Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Kebijakan ini ditujukan kepada kepada Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan pada jenjang tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Program Opsi Saham Manajemen dan Karyawan (MESOP).

Jumlah keseluruhan saham yang disetujui untuk diterbitkan adalah maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan atau sebanyak 950.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp10 per saham, dalam periode 3 (tiga) tahun tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham lama.

Berikut 3 (tiga) tahap penerbitan opsi saham yang telah disetujui:

- Tahap pertama sebesar maksimal 30% dari jumlah MESOP yang telah disetujui atau sebanyak-banyaknya 285.000.000 saham dengan harga eksekusi yang akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berlaku hingga tanggal 7 Juli 2023.

With respect to the policy on granting long-term performance-based compensation to management and/or employees, the Company's shareholders have approved the issuance of stock options to be implemented in three (3) phases. This is stipulated in Decree Number 17/Dir-MKTR/VIII/2022 concerning the Management Stock Option Program (MSOP) and Notarial Deed No. 1 dated August 5, 2022, drawn up by Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notary in Jakarta. This policy is intended for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees at certain levels who meet the requirements set forth under the Management and Employee Stock Option Program (MESOP).

The total number of shares approved for issuance is a maximum of 10% (ten percent) of the Company's issued and fully paid-up capital, or 950,000,000 shares with a nominal value of Rp10 per share, to be issued over a period of three (3) years without Pre-emptive Rights (Non-Pre-emptive Rights Issue).

The three (3) approved phases of stock option issuance are as follows:

- Phase I: A maximum of 30% of the approved MESOP allocation, or up to 285,000,000 shares, with an exercise price to be determined in accordance with the regulations of the Indonesia Stock Exchange (IDX), valid until July 7, 2023.

- Tahap kedua sebesar maksimal 30% dari jumlah MESOP yang telah disetujui atau sebanyak-banyaknya 285.000.000 saham dengan harga eksekusi yang akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan BEI dan berlaku hingga tanggal 7 Juli 2024.

- Tahap ketiga sebesar maksimal 40% dari jumlah MESOP yang telah disetujui atau sebanyak-banyaknya 380.000.000 saham dengan harga eksekusi yang akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan BEI dan berlaku hingga tanggal 7 Juli 2025.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia melalui surat No. 11/Dir-MKTR/V/2023 tanggal 15 Juni 2023, terkait pelaksanaan MESOP Tahap I, Perusahaan menetapkan harga pelaksanaan mengacu pada Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan I-A Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. 305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004. Pelaksanaan Program MESOP tahap I secara pra-pencatatan dilakukan sebanyak-banyaknya 285.000.000 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp165 per saham dengan periode pelaksanaan yang akan dilakukan secara bertahap sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2026.

Pelaksanaan Program MESOP tahap II secara pra pencatatan dilakukan sebanyak-banyaknya 285.000.000 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp120 per saham dengan periode pelaksanaan yang akan dilakukan secara bertahap sejak tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2027.

Pelaksanaan Program MESOP tahap III secara pra pencatatan dilakukan sebanyak-banyaknya 232.735.481 saham dengan periode pelaksanaan yang akan dilakukan secara bertahap berlaku hingga tanggal 30 Juli 2025.

- Phase II: A maximum of 30% of the approved MESOP allocation, or up to 285,000,000 shares, with an exercise price to be determined in accordance with IDX regulations, valid until July 7, 2024.

- Phase III: A maximum of 40% of the approved MESOP allocation, or up to 380,000,000 shares, with an exercise price to be determined in accordance with IDX regulations, valid until July 7, 2025.

Based on the information disclosure submitted to the Indonesia Stock Exchange through Letter No. 11/Dir-MKTR/V/2023 dated June 15, 2023, regarding the implementation of MESOP Phase I, the Company determined the exercise price by referring to Item V.2.2 of Listing Regulation I-A as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. 305/BEJ/07-2004 dated July 19, 2004. The implementation of MESOP Phase I in the pre-listing stage covers up to 285,000,000 shares with an exercise price of Rp165 per share, to be executed in stages from July 1, 2024 until November 2, 2026.

The implementation of MESOP Phase II in the pre-listing stage covers up to 285,000,000 shares with an exercise price of Rp120 per share, to be executed in stages from July 1, 2025 until August 11, 2027.

The MESOP Program phase III, implemented through pre-registration, covered up to 232,735,481 shares and ran in stages until July 30, 2025.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Use of Proceeds From the Public Offering

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib melaporkan dana dan hasil penawaran umum perdana saham kepada regulator. Perseroan telah melakukan penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 di Bursa Efek Indonesia.

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.05/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings, the Company is required to report the utilization of funds raised from its Initial Public Offering (IPO) to the regulator. The Company conducted its IPO on the Indonesia Stock Exchange in 2022.

Dana hasil penawaran umum tersebut telah digunakan seluruhnya untuk pengembangan usaha dan telah dilaporkan ke regulator terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

The proceeds from the public offering have been fully utilized for business development purposes and have been duly reported to the relevant regulator, namely the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK).

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Material Transaction Information Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Perseroan telah mengungkapkan seluruh sifat dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai bagian dari kebijakan akuntansi penting terkait hubungan afiliasi (pihak berelasi), yang dapat dilihat pada Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2024. Selain itu, pelaksanaan transaksi dengan pihak afiliasi yang dilakukan Perseroan juga telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam POJK No. 42/POJK.04/2020. Perseroan tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan sepanjang tahun 2025, dan telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 30 April 2025.

Material Transactions Involving Conflicts of Interest

The Company has disclosed the nature of relationships and transactions with related parties as part of its significant accounting policies concerning related party relationships, as presented in the 2024 Consolidated Financial Statements. Apart from that, the Company's transactions with affiliated parties are also in accordance with the provisions of POJK No. 42/POJK.04/2020. Throughout 2025, the Company did not engage in any material transactions involving conflicts of interest. The Company did not engage in any material transactions involving conflicts of interest throughout 2025, and the General Meeting of Shareholders (GMS) approved this on April 30, 2025.

Informasi Mengenai Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No.30 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
    a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
    b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

Information Regarding Transactions with Related Parties

Throughout 2025, the Company has conducted transactions with related parties as defined in PSAK No. 30 concerning "Related Party Disclosures". Related parties are individuals or entities that are related to the reporting entity:

1. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
    a. Has control or joint control over the reporting entity;
    b. Has significant influence over the reporting entity; or

c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);

b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka a);

g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1)(a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci pada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

c. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

2. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

a. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiary is related to the others);

b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);

c. Both entities are joint ventures of the same third party;

d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity itself is such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in point (1);

g. A person identified in point (1)(a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity);

h. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether conducted under terms and conditions similar to those with third parties or otherwise, are disclosed in the financial statements.

Pihak-pihak Berelasi dan Sifat Transaksi

Transaksi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi. Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan merupakan pihak tidak berelasi.

Related Parties and Nature of Transactions

Transactions are conducted under terms agreed to by both parties, which may differ from those of other transactions with unrelated parties. Material transactions and balances with related parties. Unless specifically disclosed as related parties, other parties mentioned in the notes to the financial statements are unrelated parties.

Nama Pihak yang Bertransaksi dan Sifat Hubungan

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Adapun nama dan sifat hubungan berelasi disajikan sebagai berikut.

Names of Transacting Parties and Nature of Relationship

All transactions with related parties have been conducted based on mutually agreed policies and terms. The names of related parties and the nature of their relationships are presented as follows:

Tabel Pihak Berelasi
Table: Related Parties

No.	Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	Sifat dan Hubungan Nature and Relationships	Transaksi Transaction
1.	PT Maktour Bangun Persada	Pemegang saham Shareholder	Piutang lain-lain dan utang lain-lain Other receivables and other payables
2.	PT Mitra Wiraswasta Indonesia	Pemegang saham Shareholder	Piutang lain-lain Other receivables

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Kewajaran transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar sesuai peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2025, seluruh transaksi dilakukan Perseroan dengan pihak berelasi, atas dasar alasan kebutuhan Perseroan dan bebas dari konflik kepentingan. Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama

Fairness and Rationale for the Transactions

The fairness of transactions with related parties has been carried out in accordance with applicable laws and regulations. Throughout 2025, all transactions conducted by the Company with related parties were based on the Company's operational needs and were free from any conflicts of interest. All transactions with related parties have been carried out in accordance with mutually agreed terms and conditions.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Perseroan telah memenuhi peraturan dan ketentuan terkait:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; serta

Compliance with Relevant Laws and Regulations

The Company has complied with the following laws and regulations:

1. Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions; and

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

2. Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

Alasan Dilakukannya Transaksi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan alasan yang sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan pengembangan aktivitas operasional dan bisnis.

Reasons for the Transaction

The Company enters into transactions with related parties for the same reasons as it does with third parties, i.e., to meet the needs of expanding operational and business activities.

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Tabel berikut menunjukkan jumlah agregat dari transaksi pihak yang berelasi (selain manajemen kunci) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Realization of Related Party Transactions

The following table presents the aggregate amounts of transactions with related parties (excluding key management personnel) as of December 31, 2025 and 2024:

Tabel Transaksi dengan Pihak Berelasi
Table: Transactions with Related Parties

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousands of Rupiah)

Keterangan Description	31 Desember 2025 December 31, 2025	31 Desember 2024 December 31, 2024
Piutang lain-lain **Other receivables**		
PT Maktour Bangun Persada	5.228.783	3.311.515
PT Mitra Wiraswasta Indonesia	-	5.000.000
Jumlah **Total**	**5.228.783**	**8.311.515**
Persentase terhadap total aset **Percentage to total assets**	**0,53%**	**0,54%**
Utang lain-lain **Other payables**		
PT Maktour Bangun Persada	10.914.111	5.990.000
Persentase terhadap liabilitas **Percentage to liabilities**	**1,25%**	**0,67%**

Kebijakan Mekanisme Reviu Atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) dan interpretasi

Policy and Review Mechanism for Transactions and Compliance with Applicable Laws and Regulations

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which include Statements of Financial Accounting

standar akuntansi keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh dewan standar akuntansi keuangan-ikatan akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Adapun mekanisme reviu atas transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi Perusahaan telah diaudit oleh Auditor.

Seperti telah disampaikan pada bagian transaksi benturan kepentingan, Perseroan telah memiliki kebijakan mengenai transaksi benturan kepentingan, termasuk transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi material diputuskan oleh pejabat tertinggi di setiap level terkait dan dalam rapat Direksi untuk situasi benturan kepentingan yang terkait dengan Direksi. Transaksi material dengan pihak berelasi diputuskan dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan independen telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terutama Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, serta PSAK No. 30 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Dewan Komisaris dalam fungsi pelaksanaan tugasnya yakni untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi baik secara langsung maupun melalui Komite Audit telah melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi/berelasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

Selama tahun 2025, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK–IAI).

The review mechanism for transactions with affiliated/related parties is conducted through an audit process involving both internal and external auditors. To ensure the fairness of transactions and compliance with generally accepted accounting standards in Indonesia, the Company's affiliated transaction reports have been audited by an auditor.

As disclosed in the section on conflict of interest transactions, the Company has established policies governing conflict of interest transactions, including transactions with related parties. Material transactions are decided by the highest-ranking officials at each respective level, and by the Board of Directors in cases involving conflicts of interest related to the Board of Directors. Material transactions with related parties are determined by consistently applying the principles of prudence and independence and by complying with the provisions of the Financial Services Authority, especially OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and PSAK No. 30 concerning Related Party Disclosures.

The Board of Commissioners, in carrying out its duties to supervise and provide advice to the Board of Directors, both directly and through the Audit Committee, has carried out adequate procedures to ensure that affiliated/related transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, including by complying with the arm's length principle.

Throughout 2025, there were no violations of laws and regulations related to transactions with related parties, and no transactions involving conflicts of interest were identified.

Transaksi Pihak Berelasi yang Menghasilkan Pendapatan Usaha dan Dijalankan Secara Rutin, Berulang, dan/atau Berkelanjutan

Pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi yang merupakan bagian dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/berkelanjutan, Perseroan telah mengungkapkannya sebagaimana penjelasan realisasi saldo dan transaksi dengan pihak berelasi di atas sejalan dengan informasi yang tertuang dalam Catatan No.30 Laporan Keuangan audited terkait Informasi mengenai Pihak–Pihak Berelasi tahun buku 2025.

Adapun, Transaksi afiliasi adalah kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dalam laporan No.00686/2.1133/AU.1/01/1683-4/1/III/202 tanggal 27 Maret 2025.

Related Party Transactions Generating Operating Revenues and Conducted in the Ordinary Course of Business

The disclosure of related party transactions that form part of the Company's business activities aimed at generating operating revenues, and which are conducted on a routine, recurring, and/or continuous basis, has been presented in line with the explanation of balances and transactions with related parties above. This disclosure is consistent with the information set forth in Note No. 30 of the audited Financial Statements concerning Related Party Information for the financial year 2025.

Affiliate transactions are business activities undertaken to generate income. The transactions are carried out routinely, repeatedly, and/or continuously, based on the annual financial report audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan in its report No. 00686/2.1133/AU.1/01/1683-4/1/III/2026 dated March 27, 2025.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Perseroan

Changes in Laws and Regulations and Their Impact on the Company

Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat perubahan terhadap peraturan perundang-undangan pada tahun buku yang berpengaruh atau memberikan dampak signifikan kepada Perseroan terutama kegiatan bisnis dan kinerja operasional. Selama periode pelaporan tersebut, Perseroan tetap menjalankan operasional dan kegiatan keberlanjutan dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

As of December 31, 2025, there were no changes to laws and regulations during the fiscal year that significantly impacted or affected the Company, particularly its business activities and operational performance. During the reporting period, the Company continued to conduct its operations and sustainability activities in accordance with applicable regulations.

Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya

Selama tahun 2025, tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Pelaporan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasi.

Changes in Accounting Policies and Their Impact

Throughout 2025, there were no significant changes to the Company's accounting policies, and no material impact on the amounts reported in the consolidated financial statements.

Kontribusi Kepada Negara
Contribution to the State

Perseroan berpegang teguh terhadap komitmennya dalam mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku begitu juga terhadap pajak maupun PNBP. Berdasarkan kinerja tahun 2025, pajak yang dibayarkan Perseroan kepada negara tercatat sebesar Rp30.844.799.000.

The Company remains firmly committed to complying with prevailing laws and regulations, including tax obligations and non-tax state revenues (PNBP). Based on its 2025 performance, the total tax paid by the Company to the State amounted to Rp30,844,799,000.

Pembayaran Pajak kepada Negara
Tax Payments to the State

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	Realisasi 31 Desember 2025 Realization December 31, 2025	Realisasi 31 Desember 2024 Realization December 31, 2024
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Value Added Tax (VAT)	20.906.605	25.029.106
PPh. Pasal 4 (2) Final Income Tax Article 4 (2) – Final	12.925	16.808
Pajak Penghasilan Pasal 21 Income Tax Article 21	5.579.864	8.663.614
Pajak Penghasilan Pasal 22 Income Tax Article 22	741.224	523.598
Pajak Penghasilan Pasal 23 Income Tax Article 23	131.348	129.636
Pajak Penghasilan Pasal 25 Income Tax Article 25	16.328.365	10.712.873
Pajak Penghasilan Pasal 29 - Tahun Fiskal 2025 Income Tax Article 29 – Fiscal Year 2025	5.852.036	-
Pajak Penghasilan Pasal 29 - Tahun Fiskal 2024 Income Tax Article 29 – Fiscal Year 2024	-	6.835.007
Pajak Penghasilan Pasal 29 - Tahun Fiskal 2020 Income Tax Article 29 – Fiscal Year 2020	-	1.560.226
Pajak Penghasilan Pasal 29 - Tahun Fiskal 2019 Income Tax Article 29 – Fiscal Year 2019	-	8.387
Pajak Pertambahan Nilai – Keluaran Value Added Tax - Output	2.199.037	77.540
Jumlah **Total**	**30.844.799**	**28.527.689**

Kesiapan Perusahaan dalam Pelaporan Keberlanjutan Berbasis IFRS S1 & S2

Persiapan yang telah dilakukan oleh MKTR, termasuk kesiapan prosedur dan sistem informasi Perseroan, untuk menyusun laporan keberlanjutan yang mengacu pada IFRS S1 dan IFRS S2, terutama terkait pengungkapan atas empat pilar (*Governance, Strategy, Risk Management*, serta *Metrics & Target*).

Untuk penerapan IFRS S1 dan S2 di Indonesia yang diadopsi pada Pernyataan Standar Pelaporan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan 2, dan baru akan efektif diberlakukan mulai 1 Januari 2027. Akan tetapi, Perseroan sudah melakukan langkah-langkah persiapan salah satunya dengan mengikuti sosialisasi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk penyusunan laporan keberlanjutan yang mengacu pada IFRS S1 dan IFRS S2.

Perusahaan Memastikan Keandalan, Konsistensi dan Kredibilitas Pelaporan

Selain itu, Perseroan memastikan keandalan, konsistensi, dan kredibilitas pelaporan keuangan laporan tahunan serta pengungkapan keberlanjutan melalui sistem pengendalian internal, dan pengawasan yang efektif sehingga mendukung pelaporan yang berintergritas, transparan, dan akuntabel serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dalam penciptaan nilai jangka panjang,

Dalam praktik bisnis, integritas juga didukung melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, review kinerja secara berkala, penerapan sistem yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta komunikasi yang terbuka dengan para pemangku kepentingan. Perseroan meyakini bahwa dengan menjaga integritas, tata kelola perusahaan yang baik melalui pelaporan yang transparan dapat mendukung citra perusahaan yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan juga menerapkan prinsip GCG secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam budaya organisasi dan sistem operasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa MKTR tidak hanya memenuhi kewajiban hukum dan regulasi, tetapi juga mengokohkan komitmen Perusahaan untuk terus berinovasi yang berwawasan lingkungan, serta bertanggung jawab secara sosial.

Company Readiness for IFRS S1 & IFRS S2-Based Sustainability Reporting

MKTR has made preparations, including the Company's procedures and information systems, to produce sustainability reports in accordance with IFRS S1 and IFRS S2, particularly regarding the disclosure of the four pillars (Governance, Strategy, Risk Management, and Metrics & Targets).

The implementation of IFRS S1 and S2 in Indonesia, adopted in Sustainability Reporting Standards Statements (PSPK) 1 and 2, will only be effective starting January 1, 2027. However, the Company has taken preparatory steps, including attending a socialization session by the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) on the preparation of sustainability reports in accordance with IFRS S1 and IFRS S2.

The Company Ensures Reliability, Consistency, and Credibility of Reporting

The Company ensures the reliability, consistency, and credibility of its annual financial reporting and sustainability disclosures through an effective internal control system and oversight, supporting reporting with integrity, transparency, and accountability and strengthening stakeholder trust in long-term value creation.

In business practices, integrity is also supported through active oversight by the Board of Commissioners, regular performance reviews, the implementation of systems that encourage transparency and accountability, and open communication with stakeholders. The Company believes that maintaining integrity and good corporate governance through transparent reporting can support a positive corporate image for all stakeholders.

The Company also implements GCG principles in an integrated and sustainable manner within its organizational culture and operational systems, from planning, implementation, monitoring, evaluation, and reporting. This demonstrates that MKTR not only fulfills legal and regulatory obligations but also reinforces the Company's commitment to continuous innovation with environmental awareness and social responsibility.



6

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance





Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Implementation of Corporate Governance

Kerangka Kerja Governansi Korporat
Corporate Governance Framework

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Direksi
Board of Directors

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris
Organs and Committees under the Board of Commissioners

Organ dan Komite di bawah Direksi
Organs and Committees under the Board of Directors

Audit Eksternal
External Audit

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Diversity

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Manajemen Risiko
Risk Management

Perkara Hukum
Legal Matters

Sanksi Administrasi
Administrative Sanctions

Klaim Hak atas Kepemilikan Tanah
Land Ownership Claims

Insider Trading

Kebijakan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Kreditur
Policy on Fulfillment of Creditors' Rights

Kode Etik
Code of Ethics

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen
Management and Employee Stock Ownership Program

Whistleblowing System

Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi
Anti-Corruption and Gratification Control

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company Information and Data

Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services

Pedoman Kebijakan Komunikasi
Communication Policy Guidelines

Pedoman Transaksi Afiliasi
Affiliated Transactions Guidelines

Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Public Company Governance

Perseroan secara konsisten memperkuat ketahanan bisnis berkelanjutan melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

The Company consistently strengthens sustainable business resilience through the comprehensive implementation of Good Corporate Governance, grounded in transparency, accountability, and integrity.



Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Company Commitment to GCG Implementation

Perseroan meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) merupakan fondasi utama dalam mendukung efektivitas pengelolaan bisnis dan operasional. Oleh karena itu, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) secara konsisten mengintegrasikan penerapan GCG sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses pengelolaan perusahaan guna memastikan praktik tata kelola yang optimal.

The Company believes that implementing Good Corporate Governance (GCG) principles is the primary foundation for supporting effective business and operational management. Therefore, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) consistently integrates GCG implementation into all company management processes to ensure optimal governance practices.

Pelaksanaan GCG tidak hanya bertujuan untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap regulasi, namun juga untuk meningkatkan kualitas transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perseroan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan *soft structure* GCG yang berfungsi sebagai pedoman bagi organ-organ Perseroan dalam menerapkan GCG secara menyeluruh, antara lain Kode Etik, Piagam Dewan Komisaris, Piagam Direksi, Piagam Komite Audit, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Piagam Unit Audit Internal, serta berbagai kebijakan dan prosedur pendukung lainnya.

The implementation of GCG not only aims to meet regulatory compliance requirements but also to improve transparency and accountability, and strengthen stakeholder trust in the Company. This commitment is realized through the development and implementation of a GCG soft structure that serves as a guideline for all Company organs in implementing GCG comprehensively. It includes the Code of Ethics, Board of Commissioners Charter, Board of Directors Charter, Audit Committee Charter, Nomination and Remuneration Committee Charter, Internal Audit Unit Charter, and various other supporting policies and procedures.

Sejalan dengan upaya penerapan GCG yang mengacu pada *best practices*, dengan berpegang pada lima prinsip utama GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Perseroan juga secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan perubahan regulasi serta praktik tata kelola yang berlaku, guna memastikan bahwa implementasi GCG senantiasa relevan, mutakhir, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

In line with GCG implementation efforts that adhere to best practices, adhering to the five main principles of GCG: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, the Company also continuously monitors developments and changes in applicable regulations and governance practices to ensure that GCG implementation remains relevant, up-to-date, and compliant with applicable regulations.

Dalam rangka memperkuat praktik tata kelola yang berintegritas, Perseroan secara konsisten menginternalisasikan prinsip etika bisnis dan Pedoman Perilaku kepada seluruh lini organisasi. Perseroan meyakini dengan implementasi GCG yang komprehensif dan berkelanjutan tidak akan memperkuat keberlanjutan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

To strengthen its integrity-based governance practices, the Company consistently internalizes business ethics principles and the Code of Conduct throughout the organization. The Company believes that comprehensive and sustainable GCG implementation will strengthen the Company's long-term business sustainability.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Principles

Sebagai Perusahaan Terbuka, Perseroan menerapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang disusun selaras dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015, yang memuat lima (5) prinsip dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG). Adapun uraian mengenai masing-masing prinsip dasar tersebut disajikan dalam tabel berikut.

As a Public Company, the Company implements the Public Company Governance Guidelines, formulated in accordance with the provisions of the Financial Services Authority (OJK) Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015, which outlines 5 (five) basic principles for the implementation of Good Corporate Governance (GCG). Each of these basic principles is outlined in the following table.

No.	Prinsip Dasar Basic Principles	Penjelasan Explanation	Komitmen Perseroan Company's Commitment
1.	Transparansi Transparency	Perseroan menegaskan pentingnya penyediaan akses terhadap informasi yang memadai, akurat, dan mudah dipahami oleh Pemangku Kepentingan. Dalam penerapannya, Perseroan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan informasi tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. The Company emphasizes the importance of providing stakeholders with access to adequate, accurate, and easily understood information. In implementing this, the Company maintains the confidentiality of certain information in accordance with applicable regulations.	1. Mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan haknya; 2. Menerapkan prinsip keterbukaan dengan tetap memperhatikan ketentuan Perseroan; 3. Mengkomunikasikan kebijakan Perseroan kepada pemangku kepentingan; serta 4. Menerbitkan laporan tahunan yang berisi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan. 1. Disclose information in a timely, adequate, clear, and accurate manner to stakeholders in accordance with their rights; 2. Implement the principle of openness while still paying attention to Company regulations; 3. Communicate Company policies to stakeholders; and 4. Publish an annual report containing the company's financial and nonfinancial conditions.
2.	Akuntabilitas Accountability	Perseroan melaksanakan pertanggung-jawaban kinerja secara transparan dan wajar dengan mengacu pada kejelasan fungsi, struktur, sistem, serta tanggung jawab setiap unit kerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya sistem pengelolaan perusahaan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. The Company carries out performance accountability transparently and fairly, adhering to clear functions, structures, systems, and responsibilities for each work unit. It aims to ensure an effective and accountable corporate management system.	1. Perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*; 2. Perseroan memiliki ukuran kinerja yang disepakati sejalan dengan nilai-nilai Perseroan, sasaran usaha dan strategi Perseroan; 3. Perseroan memastikan bahwa semua organ Perseroan memiliki kompetensi yang sesuai tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam penerapan tata kelola.

No.	Prinsip Dasar Basic Principles	Penjelasan Explanation	Komitmen Perseroan Company's Commitment
			1. The Company sets business targets and strategies that can be accounted for to stakeholders; 2. The Company has agreed on performance measures in line with company values, business goals, and company strategies; 3. The Company ensures that all company organs have the appropriate competencies for their responsibilities and understand their role in implementing good corporate governance.
3.	Tanggung Jawab Responsibility	Perseroan senantiasa melaksanakan tanggung jawab sosial dan hukum dengan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam menjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang. The Company consistently fulfills its social and legal responsibilities by complying with all relevant laws and regulations and adhering to healthy corporate principles. This effort is part of the Company's commitment to maintaining long-term business continuity.	1. Perseroan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 2. Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 1. The Company guarantees compliance with laws and regulations; 2. The Company carries out social and environmental responsibilities.
4.	Independensi Independence	Dalam mengoptimalkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan dikelola secara independen guna menciptakan korporasi yang sehat serta memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Prinsip ini diterapkan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan maupun benturan kepentingan. To optimize the implementation of Good Corporate Governance principles, the Company is managed independently to create a healthy corporation and ensure objective decision-making. This principle is implemented to avoid conflicts of interest.	1. Perseroan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta terbebas dari benturan kepentingan; 2. Perseroan mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun. 1. The Company avoids unfair domination by stakeholders and is not influenced by unilateral interests, and is free from conflicts of interest; 2. The Company makes decisions objectively and free from pressure from any party.
5.	Kesetaraan dan Kewajaran Equality and Fairness	Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan Pemangku Kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, guna memastikan perlakuan yang adil serta perlindungan terhadap hak-hak seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. The Company always pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders, based on the principles of fairness and equality, to ensure fair treatment and the protection of the rights of all parties involved in the Company's business activities.	1. Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* dengan asas kesetaraan dan kewajaran; 2. Perseroan memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. 1. The Company pays attention to the interests of all stakeholders based on equality and fairness; 2. The Company provides stakeholders with the opportunity to provide input and express opinions for the benefit of the Company and to access

Dalam rangka memperkuat daya saing dan mendukung keberlanjutan usaha, Perseroan terus mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip GCG dengan mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia (PUGKI) 2021 yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari PUGKI 2019 dengan menyesuaikan prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness*) yang lebih relevan dengan kondisi terkini. PUGKI 2021 menguraikan 4 (empat) pilar utama tata kelola yang menjadi dasar implementasi di Perseroan, yaitu:

To strengthen competitiveness and support business sustainability, the Company continues to optimize the implementation of GCG principles by referring to the 2021 Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) prepared by the National Committee for Governance Policy (KNKG). These guidelines are a refinement of the 2019 PUGKI, adapting the TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness) principles to reflect current conditions better. The 2021 PUGKI outlines 4 (four) main pillars of governance that form the basis for implementation in the Company, which are:

Prinsip Dasar Basic Principles	**Penjelasan** Explanation	**Komitmen Perseroan** Company's Commitment
Perilaku Beretika Ethical Behavior	Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. In carrying out its activities, the corporation always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills its commitments, and consistently upholds moral values and trust. The corporation considers the interests of shareholders and other stakeholders in accordance with the principles of fairness and equality. It is managed independently so that each Company's organ does not dominate the others and cannot be interfered with by other parties.	• Perseroan memiliki Kode Etik (Pedoman Perilaku) sebagai panduan dalam mengarahkan perilaku dan tindakan di dalam Perseroan, termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan; • Perseroan menerapkan kebijakan anti korupsi dan gratifikasi untuk mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap, dan/atau gratifikasi. • The Company has a Code of Ethics (Behavior Guidelines) as a guide for guiding behavior and actions within the Company, including interactions with stakeholders; • The Company implements an anti-corruption and gratification policy to address corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratification.
Akuntabilitas Accountability	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. Corporations can be transparently and fairly accountable for their performance. Therefore, corporations must be managed properly, measured, and aligned with corporate interests, while still taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.	• Perseroan secara berkala melaporkan kinerja Perusahaan kepada Pemegang Saham; • Pelaksanaan audit atas laporan keuangan Perseroan dilakukan oleh auditor eksternal; • Perseroan senantiasa melakukan pelaksanaan RUPS serta penyampaian laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan. • The Company regularly reports its performance to shareholders; • External auditors conduct audits of the Company's financial statements; • The Company consistently holds GMS meetings and submits annual reports to demonstrate accountability to company management.

Prinsip Dasar Basic Principles	Penjelasan Explanation	Komitmen Perseroan Company's Commitment
Transparansi Transparency	Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. To maintain objectivity in its business operations, the Company provides material and relevant information in a manner that is easily accessible and understandable to stakeholders. It takes the initiative to disclose not only matters required by law but also those important to decision-making by shareholders, creditors, and other stakeholders.	• Perseroan secara rutin mengirimkan laporan keuangan dan informasi terkait kepada OJK dan BEI untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi; • MKTR menyediakan Informasi mengenai perusahaan tersedia di *website* yang dapat diakses oleh publik; • Perseroan menyediakan media pelaporan pelanggaran yang dapat diakses melalui *email* maupun platform yang telah disediakan. • The Company regularly submits financial reports and related information to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian Stock Exchange (IDX) to fulfill its information disclosure obligations; • MKTR provides information about the Company on its website, accessible to the public; • The Company provides a reporting platform for violations, accessible via email or through its designated platform.
Keberlanjutan Sustainability	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. The Company complies with laws and regulations and is committed to fulfilling its responsibilities to society and the environment, contributing to sustainable development through collaboration with all stakeholders related to its business interests and the Sustainable Development Agenda.	• Perseroan senantiasa melaksanakan program CSR untuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya. • Perseroan menjalankan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola atau *Environmental*, *Social and Governance* (ESG) dan *Sustainable Development Goals* (SDG's) • The Company consistently implements CSR programs to demonstrate social responsibility towards the surrounding community; • The Company adheres to environmental, social, and governance (ESG) principles and the Sustainable Development Goals (SDGs).

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Guidelines

Dalam menjalankan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), seluruh kegiatan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan dari pemerintah dan regulator terkait, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), Pedoman Umum

In implementing Good Corporate Governance (GCG) practices, all activities of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk consistently adhere to applicable laws and regulations, government regulations, and relevant regulators, including the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange

GCG Indonesia, serta Anggaran Dasar Perseroan. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan telah mengimplementasikan berbagai aspek GCG sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;

(IDX), the Indonesian GCG General Guidelines, and the Company's Articles of Association. In line with this, the Company has implemented various aspects of GCG as outlined below:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets;
3. Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Guidelines for Public Company Governance;
4. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers and Public Companies;
5. Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
6. Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies;
7. Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee;
8. Financial Services Authority Regulation Number 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charters;
9. Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.04/2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies;
10. Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies;
11. Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.04/2017 concerning Reports of Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies;

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;

14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; serta

15. Anggaran Dasar Perseroan.

Penerapan GCG di Perseroan tercermin melalui pemanfaatan visi, misi, filosofi, dan budaya perusahaan, serta penerapan Panduan Kode Etik, tanggung jawab profesional, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai kerangka acuan pendukung dalam mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan.

12. Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies;

13. Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies;

14. Circular Letter of the Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance; and

15. Company Articles of Association.

The implementation of GCG in the Company is reflected through the use of the Company's vision, mission, philosophy, and culture, as well as the Code of Ethics Guidelines, professional responsibilities, and Standard Operating Procedures (SOPs) as supporting reference frameworks for comprehensively and continuously implementing GCG.

Tujuan dan Manfaat Penerapan GCG

Goals and Benefits of GCG Implementation

Perseroan mengimplementasikan GCG sebagai strategi utama dalam mendukung proses transformasi perusahaan guna mewujudkan Perseroan sebagai korporasi yang berkelanjutan (*sustainable company*). Melalui penerapan GCG, Perseroan bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai-nilai perusahaan dalam rangka membangun daya saing yang kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberlangsungan usaha serta mencapai maksud dan tujuan Perseroan secara berkelanjutan;

2. Mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, efisien, dan efektif, sekaligus memberdayakan fungsi serta meningkatkan kemandirian organ-organ perusahaan;

The Company implements GCG as a primary strategy to support its transformation and realize itself as a sustainable corporation. Through the implementation of GCG, the Company aims to:

1. Optimize corporate values to build strong competitiveness, both nationally and internationally, thereby maintaining business continuity and achieving the Company's goals and objectives sustainably;

2. Promote professional, efficient, and effective corporate management, while empowering the functions and enhancing the independence of corporate organs;

3. Menciptakan citra perusahaan yang positif melalui peningkatan kepercayaan Pemangku Kepentingan;

4. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui pelaksanaan program-program efisiensi yang terbentuk dari internalisasi budaya GCG;

5. Menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan serta kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional;

6. Meningkatkan kontribusi Perseroan terhadap perekonomian daerah maupun nasional;

7. Menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi di tingkat daerah dan nasional; serta

8. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

3. Create a positive corporate image by increasing stakeholder trust;

4. Improve corporate performance through the implementation of efficiency programs formed from the internalization of GCG culture;

5. Raise awareness of corporate social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability in the operational areas;

6. Increase the Company's contribution to the regional and national economy;

7. Create a conducive climate for investment development at the regional and national levels; and

8. Prevent irregularities in company management.

Kebijakan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Terintegrasi

Integrated Good Corporate Governance Implementation Policy

Sebagai perusahaan induk yang memiliki beberapa Entitas Anak, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) secara konsisten dan komprehensif di seluruh lingkungan Entitas Anak sebagaimana diatur dalam Pedoman GCG.

Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan praktik terbaik (*best practices*) penerapan GCG di industri sejenis.

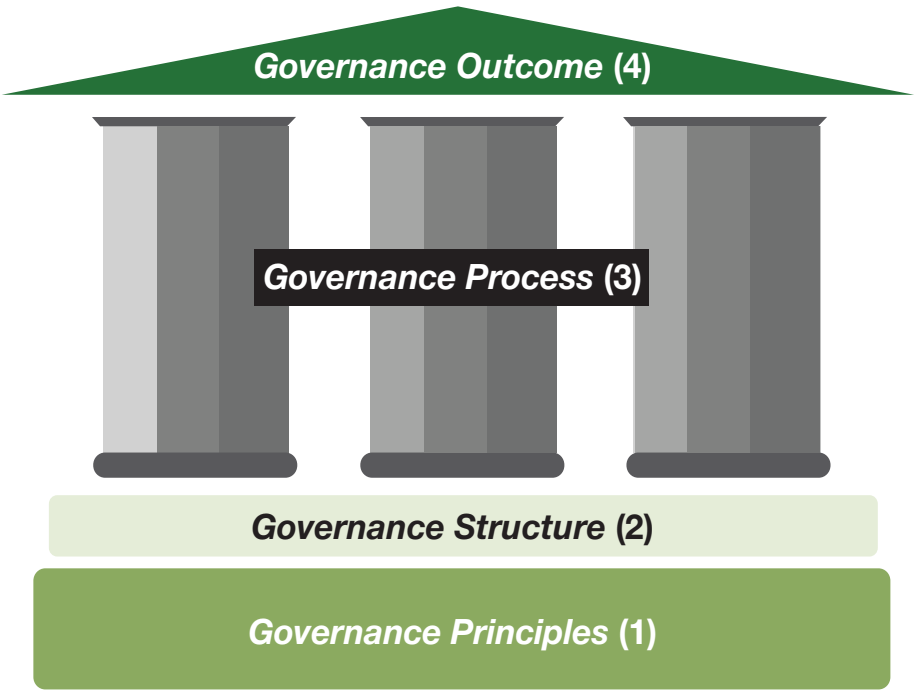
As a holding company with several Subsidiaries, the Company is committed to consistently and comprehensively implementing Good Corporate Governance (GCG) principles across all Subsidiaries, as stipulated in the GCG Guidelines.

This commitment is part of the Company's efforts to ensure that all business activities carried out by the Company and its Subsidiaries comply with applicable laws and regulations and align with best practices for GCG implementation in similar industries.

Governance Framework

Sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik GCG, Perseroan menetapkan *governance framework* sebagai kerangka tata kelola yang mencerminkan kesinambungan antara fondasi tata kelola dengan pencapaian visi dan tujuan Perseroan. Adapun *governance framework* disampaikan dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

As part of its commitment to GCG practices, the Company has established a governance framework that reflects the continuity between the foundation of governance and the achievement of the Company's vision and objectives.



1. **Prinsip Tata Kelola (*Governance Principle*)** yakni Perseroan menerapkan prinsip-prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan tata kelola yaitu 5 (lima) Prinsip Tata Kelola Perusahaan dan TARIF;

2. **Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)** yakni Perseroan merancang struktur yang mengatur fungsi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, kewenangan, serta fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan;

3. **Proses Tata Kelola (*Governance Process*)** yakni Perseroan menerapkan serangkaian standar dan prosedur yang digunakan dalam mengimplementasi pelaksanaan GCG yang komprehensif, tepat dan terencana yang sesuai dengan pedoman, kebijakan dan aturan yang berlaku;

1. **Governance Principle**: The Company applies the principles underlying the implementation and enforcement of corporate governance, i.e., the 5 (five) Principles of Corporate Governance and TARIF;

2. **Governance Structure**: The Company designs a structure that regulates the functions of carrying out duties and responsibilities, authority, and oversight of the Company's management;

3. **Governance Process**: The Company applies a series of standards and procedures used in implementing comprehensive, appropriate, and planned GCG in accordance with applicable guidelines, policies, and regulations;

4. **Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)** yakni Perseroan memastikan bahwa penerapan GCG berjalan secara konsisten sebagai bagian dari upaya membangun reputasi, integritas, dan kredibilitas Perseroan.

4. **Governance Outcome**: The Company ensures that GCG implementation is carried out consistently as part of its efforts to build the Company's reputation, integrity, and credibility.

Kerangka Kerja Governansi Korporat

Corporate Governance Framework

Perseroan mewujudkan komitmennya dalam menerapkan praktik terbaik dalam governansi korporat melalui penyusunan dan penerapan kerangka kerja tata kelola (*governance framework)* sebagai landasan utama di lingkungan Perseroan. Kerangka kerja ini berfungsi sebagai fondasi bagi seluruh kebijakan, proses, dan tindakan Perseroan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dan berkelanjutan.

The Company demonstrates its commitment to implementing best practices in corporate governance by developing and implementing a governance framework as the primary foundation within the Company. This framework serves as the foundation for all Company policies, processes, and actions in consistently and sustainably implementing governance principles.

Adapun kerangka kerja tata kelola tersebut terdiri atas 3 (tiga) elemen pokok dan penjelasan, yaitu

The governance framework consists of three main elements, each with its description as follows:



A. Governance Structure

Governance Structure berkaitan dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan guna memastikan bahwa proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan. Struktur organ tata kelola mencakup Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite, serta satuan kerja perusahaan. Adapun infrastruktur tata kelola meliputi kebijakan, prosedur, serta penetapan tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

B. Governance Process

Governance Process merupakan efektivitas proses penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan. Proses ini bertujuan untuk

A. Governance Structure

Governance Structure relates to the adequacy of the corporate governance structure and infrastructure to ensure that the process of implementing Good Corporate Governance principles produces outcomes that align with stakeholder expectations. The governance structure includes the Board of Commissioners, the Board of Directors, committees, and the Company's work units. The governance infrastructure encompasses policies, procedures, and the determination of the main duties and functions of each organizational structure.

B. Governance Process

The Governance Process is the effective implementation of Good Corporate Governance principles, supported by an adequate corporate governance structure and infrastructure. This

menghasilkan *output* yang selaras dengan harapan seluruh Pemangku Kepentingan melalui pelaksanaan tata kelola yang konsisten, terukur, dan berkesinambungan.

C. *Governance Outcome*

Governance Outcome yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan dapat dicapai melalui proses penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan. Dengan demikian, *governance outcome* merupakan hasil akhir dari pelaksanaan *governance process* serta dukungan yang memadai dari *governance structure*. Perseroan secara berkala melakukan penilaian tata kelola untuk menentukan kualitas hasil penerapan GCG. Penilaian tersebut mencakup faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif serta bertujuan untuk memastikan bahwa struktur dan proses tata kelola telah dijalankan secara efektif, sehingga menghasilkan implementasi GCG yang optimal.

process aims to produce outputs that align with the expectations of all stakeholders through consistent, measurable, and sustainable governance implementation.

C. Governance Outcome

Governance outcomes that meet stakeholder expectations can be achieved through the implementation of Good Corporate Governance, supported by adequate corporate governance structures and infrastructure. Therefore, governance outcomes are the end result of implementing the governance process and receiving adequate support from the governance structure. The Company periodically conducts governance assessments to assess the quality of GCG implementation. These assessments encompass qualitative and quantitative factors and aim to ensure that the governance structure and processes have been implemented effectively, resulting in optimal GCG implementation.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure

Dalam rangka memastikan penerapan GCG yang efektif, MKTR telah menyusun kebijakan dan pedoman tertulis sebagai acuan penerapan GCG dengan berlandaskan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta *best practices* tata kelola perusahaan. Melalui pedoman ini, Perseroan menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur operasional sebagai panduan bagi seluruh lini organisasi untuk memastikan keseimbangan fungsi kontrol serta penerapan GCG agar berjalan efektif sesuai standar penerapan GCG yang terbaik. Adapun *soft structure* GCG yang diterapkan di MKTR meliputi:

To ensure the effective implementation of GCG, MKTR has developed written policies and guidelines as a reference for GCG implementation, based on the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, and corporate governance best practices. Through these guidelines, the Company establishes operational policies and procedures to guide all levels of the organization and ensure a balance between control functions and effective GCG implementation in accordance with the best GCG standards. The soft GCG structure implemented at MKTR includes:

Kebijakan MKTR MKTR Policy	Pemberlakuan Enforcement
Anggaran Dasar Perusahaan **Company Articles of Association**	Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 20 Maret 2025 dari Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0089184 tanggal 24 Maret 2025. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on Notarial Deed No. 7 dated March 20, 2025, of Notary Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., in Jakarta. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.03-0089184 dated March 24, 2025.
Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code*) **Corporate Governance Policy (GCG Code)**	Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Menthobi Karyatama Raya Tbk tanggal 12 Juli 2022. Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dated July 12, 2022.
Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi **Board of Commissioners and Board of Directors Work Guidelines**	Piagam Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Menthobi Karyatama Raya Tbk tanggal 21 Maret 2021. Charter of the Board of Directors and Board of Commissioners (Board Manual) of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dated March 21, 2021.
Prinsip Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan (Kode Etik Perusahaan) **Principles of Business Ethics and Corporate Work Ethics (Corporate Code of Ethics)**	Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 21 Maret 2021 tentang Prinsip Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. Decree of the Board of Commissioners and Directors dated March 21, 2021, concerning the Principles of Business Ethics and Work Ethics of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk.
Piagam Komite Audit **Audit Committee Charter**	Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 21 Maret 2022 tentang Piagam Komite Audit PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. Decree of the Board of Commissioners dated March 21, 2022, concerning the Audit Committee Charter of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk.
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi **Nomination and Remuneration Committee Charter**	Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 21 Maret 2022 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. Decree of Board of Commissioners dated March 21, 2022, concerning the Nomination and Remuneration Committee Charter of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk.
Piagam Sekretaris Perusahaan **Corporate Secretary Charter**	Surat Keputusan Direksi tanggal 21 Maret 2022 tentang Piagam Sekretaris Perusahaan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. Decree of the Board of Directors dated March 21, 2022, concerning the Corporate Secretary Charter of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk.
Piagam Audit Internal **Internal Audit Charter**	Piagam Unit Audit Internal PT Menthobi Karyatama Raya Tbk tanggal 21 Maret 2022. Internal Audit Unit Charter of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dated March 21, 2022.
Kebijakan Penerapan *Whistleblowing System* **Whistleblowing System Implementation Policy**	Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Menthobi Karyatama Raya Tbk tanggal 12 Juli 2022 dan Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi Eksternal - Internal No. MKTRMS-LLP-01.

Kebijakan MKTR MKTR Policy	Pemberlakuan Enforcement
	Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dated July 12, 2022, and Procedures for Communication, Participation and External - Internal Consultation No. MKTRMS-LLP-01.
Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) **Human Resources (HR) Policy**	Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) PT Menthobi Karyatama Raya Tbk No. 18/HR-KSDM/MKTR/I/292 tanggal 10 Januari 2022. Human Resources Policy of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk No. 18/HR-KSDM/MKTR/I/292 dated January 10, 2022.
Kebijakan Pengelolaan Gratifikasi dan Anti Korupsi **Gratification Management and Anti-Corruption Policy**	Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 21 Maret 2021 tentang Prinsip Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. Decree of Board of Commissioner and Director dated March 21, 2021, concerning the Principles of Business Ethics and Work Ethics of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan

Structure of Corporate Governance Organs

Dalam menjalankan tata kelola yang baik, MKTR mengacu pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku. Untuk pengelolaan GCG yang efektir, MKTR memiliki struktur organ tata kelola yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya, yang menetapkan bahwa Organ Utama Perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

- **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** merupakan Organ Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

- **Direksi** merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

In implementing good governance, MKTR refers to the principles established in applicable regulations. For effective GCG management, MKTR has a governance organ structure in accordance with the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its amendments, which stipulates that the Company's Main Organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors.

- **The General Meeting of Shareholders (GMS)** is a Company Organ that has authority not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits determined by law and/or the Company's Articles of Association.

- **The Board of Directors** is a Company Organ that has the authority and full responsibility for managing the Company for the benefit of the Company, in accordance with the Company's purposes and objectives, and represents the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

- **Dewan Komisaris** merupakan Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap pengurusan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Untuk pelaksanaan hubungan tata kelola, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya dengan didukung oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sementara itu, Direksi melaksanakan fungsi pengelolaan Perseroan dengan dukungan Unit Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan. Perseroan juga memastikan bahwa penerapan GCG berjalan secara konsisten dan efektif, seluruh organ Perseroan wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada setiap jenjang organisasi serta dalam seluruh aktivitas operasional Perseroan.

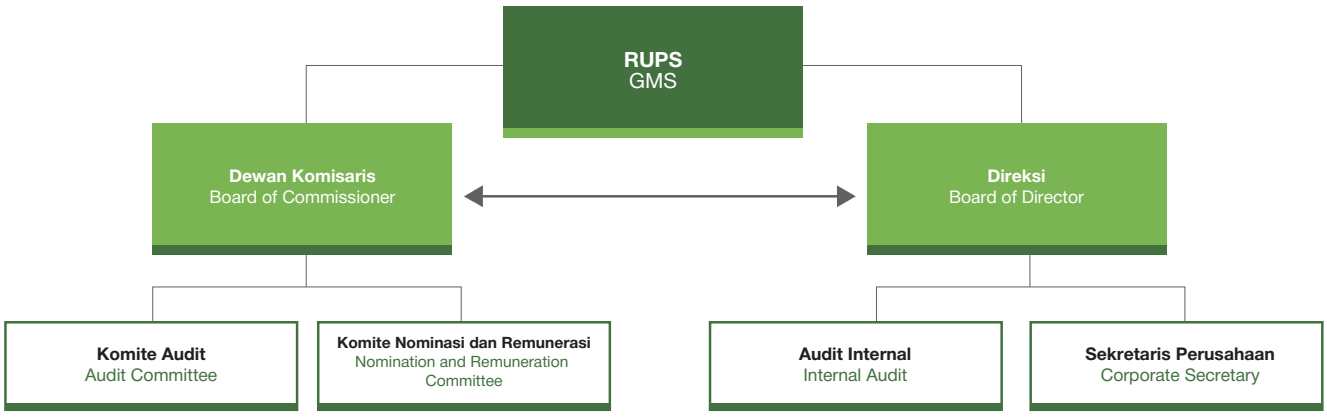
Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Dengan adanya pemisahan yang jelas antara fungsi pengawasan dan fungsi pengambilan keputusan dalam aktivitas Perseroan, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk membentuk struktur GCG sebagaimana disajikan dalam bagan berikut.

- **The Board of Commissioners** is a Company Organ tasked with carrying out general and/or specific supervision of the Company's management in accordance with the Articles of Association, and providing advice to the Board of Directors.

To implement good corporate governance, the Board of Commissioners carries out its supervisory function, supported by the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee. Meanwhile, the Board of Directors carries out the Company's management function with the support of the Internal Audit Unit and the Corporate Secretary. The Company also ensures that GCG implementation is consistent and effective. All Company organs are required to implement GCG principles at every organizational level and in all Company operational activities.

The Board of Commissioners and the Board of Directors are each accountable to the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with the authorities and responsibilities stipulated in laws and regulations and the Company's Articles of Association. With a clear separation between supervisory and decision-making functions in the Company's activities, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk has established a GCG structure as presented in the following chart.

Struktur Organ *Good Corporate Governance*
Good Corporate Governance Organ Structure
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk



Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen penuh untuk membangun dan menerapkan sistem perusahaan yang sehat, kokoh, dan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja Perseroan melalui penerapan prinsip GCG dalam seluruh aspek pengelolaan.

Penerapan GCG tersebut juga bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan fungsi Organ Perseroan, mengoptimalkan nilai Perseroan, serta menciptakan hubungan yang semakin selaras dan harmonis dengan para Pemangku Kepentingan, sehingga mendukung pencapaian pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

The Board of Commissioners and Board of Directors are fully committed to building and implementing a healthy, robust, and sustainable corporate system to improve the Company's performance by applying GCG principles across all aspects of management.

The implementation of GCG also aims to strengthen the Company's organs' empowerment, optimize the Company's value, and foster increasingly harmonious relationships with stakeholders, thereby supporting sustainable business growth.

Penilaian Implementasi Governansi Korporat

Corporate Governance Implementation Assessment

MKTR cara konsisten menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21/POJK.04/2015 serta Surat Edaran POJK (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pada tahun 2025, MKTR mewujudkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) secara optimal melalui pelaksanaan assessment atau penilaian atas implementasi tata kelola perusahaan. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan GCG Perseroan dengan persyaratan tata kelola perusahaan yang berlaku.

Setelah melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), Perseroan melakukan proses penilaian penerapan GCG melalui mekanisme *self-assessment* yang dilaksanakan oleh *assessor* internal yang telah memiliki kompetensi yang memadai dan secara resmi ditunjuk oleh Perseroan.

MKTR consistently implements the principles of Good Corporate Governance (GCG) in accordance with the provisions stipulated in Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 21/POJK.04/2015 and OJK Circular Letter (SEOJK) Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.

In 2025, MKTR optimally implemented Good Corporate Governance (GCG) through an assessment of its corporate governance implementation. This assessment was conducted to measure the Company's compliance with applicable corporate governance requirements in its GCG implementation.

Following its Initial Public Offering (IPO), the Company conducted a self-assessment of its GCG implementation through an internal assessor with sufficient competence, officially appointed by the Company.

Tujuan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Purpose of GCG Implementation Assessment

Tujuan pelaksanaan penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah sebagai berikut:

a. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian tingkat pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan yang baik terhadap kondisi nyata yang diterapkan di Perseroan, dengan memberikan skor atau nilai atas implementasi GCG serta menetapkan kategori kualitas penerapannya;

b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penerapan GCG, serta merumuskan rekomendasi perbaikan guna mengurangi kesenjangan (*gap*) antara kriteria tata kelola perusahaan yang baik dan praktik yang diterapkan di Perseroan;

c. Memonitor konsistensi penerapan GCG di Perseroan serta memperoleh masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan.

The purpose of the Good Corporate Governance implementation assessment is as follows:

a. To measure the quality of GCG implementation by assessing the level of compliance with good corporate governance criteria against the actual conditions implemented in the Company, by assigning a score or value to GCG implementation, and determining the quality category of its implementation;

b. Identify strengths and weaknesses in GCG implementation and formulate recommendations for improvement to reduce the gap between good corporate governance criteria and practices implemented within the Company;

c. Monitor the consistency of GCG implementation across the Company and obtain constructive input to support the continuous improvement and development of corporate governance policies.

Pihak Penilai

Assessor

Tata kelola Perseroan dievaluasi melalui pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh Perseroan. Penilaian mandiri tersebut dilaksanakan setiap tahun dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 serta Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Evaluasi ini dilakukan melalui pengukuran tingkat penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan, yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dalam seluruh kegiatan operasional Perseroan.

The Company's governance is evaluated through a self-assessment. This self-assessment is conducted annually in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 21/POJK.04/2015 and OJK Circular Letter (SEOJK) Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.

This evaluation measures the level of implementation of GCG principles within the Company, including transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness across all of the Company's operational activities.

Kriteria Penilaian GCG
GCG Assessment Criteria

Perseroan telah melaksanakan penilaian dan evaluasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) secara tahunan dengan mengacu pada Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Terbuka. Parameter tersebut mencakup 10 (sepuluh) aspek utama, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Pelaksanaan dan penyelesaian tugas Komite;
4. Penerapan fungsi audit internal;
5. Penerapan fungsi audit eksternal;
6. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal;
7. Penanganan benturan kepentingan dan gratifikasi;
8. Transparansi, laporan implementasi GCG dan pelaporan internal; serta
9. Rencana strategis Perseroan; dan
10. Aspek lainnya, meliputi praktik Tata Kelola Perusahaan yang menjadi contoh bagi perusahaan lain di Indonesia.

The Company has conducted an annual assessment and evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) based on the Assessment and Evaluation Parameters for the Implementation of Good Corporate Governance for Public Companies. These parameters cover 10 (sepuluh) main aspects, namely:

1. Implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities;
2. Implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities;
3. Implementation and completion of Committee duties;
4. Implementation of the internal audit function;
5. Implementation of the external audit function;
6. Implementation of risk management, including the internal control system;
7. Handling of conflicts of interest and gratification;
8. Transparency, GCG implementation reports, and internal reporting; and
9. The Company's strategic plan; and
10. Other aspects, including Corporate Governance practices that serve as an example for other companies in Indonesia.

Hasil Penilaian GCG
GCG Assessment Results

Penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dilaksanakan melalui mekanisme penilaian mandiri (*self-assessment*). Adapun hasil penilaian penerapan GCG Perseroan disajikan sebagai berikut:

The assessment of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is conducted through a self-assessment mechanism. The results of the Company's GCG implementation assessment are presented as follows:

No.	Aspek Governance Governance Aspects	Bobot Weight	Capaian Achievements	
			Aktual Actual	%
I.	Hak – hak Pemegang Saham Shareholder Rights	20%	81	19,06%
II.	Kebijakan *Corporate Governance* Corporate Governance Policy	15%	54	11,57%
III.	Praktek – praktek *Corporate Governance* Corporate Governance Practices	30%	133	18,14%
IV.	Pengungkapan (*Disclosure*) Disclosure	20%	86	19,11%
V.	Pelaksanaan dan Penerapan Audit Audit Implementation and Application	15%	36	13,50%
Total		**100%**	**390**	**81,38%**

Keterangan : 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik
Information: 0-50 : Bad | 50-60 : Not Good | 60-75 : Adequate | 75-85 : Good | 85-100 : Excellent

Berdasarkan ringkasan hasil penilaian (*assessment*) atas penerapan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/ GCG) yang telah dilakukan selama Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa tingkat penerapan GCG pada PT Menthobi Karyatama Raya Tbk berada pada kategori dengan predikat "**Baik**".

Based on the summary of the assessment results for the implementation of Good Corporate Governance (GCG) practices conducted in 2025, it can be concluded that the level of GCG implementation at PT Menthobi Karyatama Raya Tbk is in the "**Good**" category.

Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk akan terus melakukan peninjauan dan penyempurnaan praktik GCG untuk memperkuat struktur tata kelola serta mendukung keberlanjutan nilai Perseroan dalam jangka panjang.

As part of its ongoing commitment, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk will continue to review and refine its GCG practices to strengthen its governance structure and support the long-term sustainability of the Company's value.

Sosialisasi GCG
GCG Socialization

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait implementasi GCG di lingkungan IPCM, Perseroan secara konsisten menyelenggarakan kegiatan sosialisasi secara berkala. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai forum resmi, rapat, dan kegiatan kebersamaan, serta didukung oleh berbagai media komunikasi internal. Selain itu, sosialisasi GCG juga disampaikan melalui portal internal dan *website* Perseroan. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan setiap insan MKTR memahami dan mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan.

To enhance understanding of GCG implementation within IPCM, the Company regularly conducts outreach activities. These activities are conducted through various official forums, meetings, and community events, and are supported by various internal communication channels. GCG outreach is also disseminated through internal portals and the Company's website. These steps aim to ensure that every MKTR employee understands and supports the ongoing implementation of good corporate governance.

Strategi Penguatan GCG

Strategy for Strengthening GCG

Tujuan strategis tata kelola Perusahaan adalah untuk memastikan implementasi prinsip tata kelola yang baik dapat berjalan secara optimal dan efektif. Tujuan strategis ini untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengelolaan risiko, serta memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, guna menciptakan nilai yang berkelanjutan dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka Panjang sesuai dengan visi dan misi Perseroan.

MKTR menetapkan visi perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan kinerja bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, seluruh organ Perseroan didorong untuk mengedepankan praktik governansi berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan. Perseroan memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan diperlakukan secara adil dan setara berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Selain itu, Perseroan dikelola secara independen untuk menjamin bahwa setiap organ Perseroan menjalankan perannya secara profesional tanpa adanya dominasi maupun intervensi pihak lain.

The strategic objective of corporate governance is to ensure the optimal and effective implementation of good governance principles. This strategic objective is to improve operational efficiency, optimize risk management, and strengthen relationships with internal and external stakeholders to create sustainable value and enhance long-term company performance in accordance with the Company's vision and mission.

MKTR establishes a corporate vision oriented toward sustainable business performance. In line with this, all corporate organs are encouraged to prioritize sustainable governance practices while taking into account stakeholder interests. The Company ensures that the interests of shareholders and all stakeholders are treated fairly and equally, in accordance with the principles of fairness and equality. Furthermore, the Company is managed independently to ensure that each corporate organ performs its role professionally without domination or intervention by other parties.

Pemegang Saham dalam RUPS

Shareholders at General Meetings

Pemegang Saham dan Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali Hingga Entitas Pemilik Akhir

Shareholders and Information About Major/Controlling Shareholders and Ultimate Owners

Pemegang Saham merupakan individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perseroan. Pemegang Saham diperbolehkan untuk tidak melakukan intervensi pada fungsi, tugas, serta wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Struktur kepemilikan saham MKTR terdiri dari Pemegang Saham Utama/Pengendali serta Pemegang Saham lainnya yang merupakan pendiri Perseroan. Adapun

Shareholders are individuals or legal entities that legally own shares in the Company. Shareholders are permitted not to intervene in the functions, duties, and authorities of the Board of Commissioners and Board of Directors. MKTR's share ownership structure consists of the Major/Controlling Shareholder and other Shareholders who are the Company's founders. The shareholding

komposisi kepemilikan saham di lingkungan Perseroan, yaitu PT Fuad Hasan Masyhur sebesar 68,62%, PT Maktour Bangun Persada sebesar 7,78% dan Publik sebesar 23,59%. Adapun informasi lebih lanjut mengenai struktur serta rincian Pemegang Saham Utama dan Pengendali dapat ditemukan dalam bagian "Komposisi Pemegang Saham" pada Bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

composition within the Company is as follows: PT Fuad Hasan Masyhur (68.62%), PT Maktour Bangun Persada (7.78%), and the Public (23.59%). Further information regarding the structure and details of Major and Controlling Shareholders is available in the "Shareholder Composition" section in the Company Profile chapter of this annual report.

Hak dan Wewenang Pemegang Saham dalam RUPS

Shareholders' Rights and Authorities in General Meetings

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perseroan. Pemegang Saham, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham Perseroan, atau Dewan Komisaris, berhak meminta Direksi untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

According to the Financial Services Authority (OJK), a Shareholder is an individual or legal entity that legally owns shares in the Company. Shareholders, either individually or collectively, who represent at least 1/10 (one-tenth) of the Company's total shares, or the Board of Commissioners, have the right to request the Board of Directors to convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

Permintaan tersebut harus diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dengan mencantumkan agenda atau hal-hal yang akan dibahas, disertai dengan alasan yang jelas, serta memenuhi ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Such a request must be submitted in writing to the Board of Directors, stating the agenda or matters to be discussed, accompanied by clear reasons, and in compliance with the other provisions stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

Wewenang Pemegang Saham

Wewenang yang dimiliki Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain meliputi:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, serta anggota Dewan Pengawas Syariah;
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan; dan
4. Memutuskan hal-hal lain yang diajukan secara sah dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Shareholders Authorities

Shareholders' authorities through the General Meeting of Shareholders (GMS) include:

1. Approving amendments to the Company's Articles of Association;
2. Appointing and dismissing members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board;
3. Appointing a Public Accounting Firm to provide audit services for the Company's annual historical financial information; and
4. Resolving other matters lawfully proposed at the GMS in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

Hak Pemegang Saham

Pemegang Saham, baik yang hadir secara langsung maupun yang diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah, berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang ditetapkan sebelum pemanggilan RUPS.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham memiliki hak-hak dasar sebagai berikut:

a. **Hak Perseorangan**
   Hak bagi Pemegang Saham untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri apabila yang bersangkutan dirugikan akibat tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, yang timbul sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

b. **Hak Menilai Harga Saham (*Appraisal Right*)**
   Hak setiap Pemegang Saham untuk meminta agar saham miliknya dibeli oleh Perseroan dengan harga yang wajar apabila Pemegang Saham tersebut tidak menyetujui tindakan Perseroan yang dianggap merugikan Pemegang Saham atau Perseroan.

c. **Hak Meminta Didahulukan (*Pre-emptive Right*)**
   Hak setiap Pemegang Saham untuk memperoleh penawaran terlebih dahulu atas seluruh saham yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal, secara seimbang dengan jumlah kepemilikan sahamnya untuk klasifikasi saham yang sama.

d. **Hak Pemeriksaan**
   Hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan, yang dapat diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, serta pihak lain sebagaimana ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau perjanjian dengan Perseroan.

Shareholders Rights

Shareholders, whether present in person or represented by a valid power of attorney, have the right to attend the General Meeting of Shareholders (GMS). Shareholders entitled to attend the GMS are those whose names are registered in the Company's Shareholder Register on the recording date determined before the notice of the GMS.

In accordance with the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Shareholders have the following basic rights:

a. **Individual Right**
   Shareholders have the right to file a lawsuit in the district court if the Company's actions toward them are deemed unfair and without reasonable justification, arising from decisions of the GMS, the Board of Directors, and/or the Board of Commissioners.

b. **Appraisal Right**
   Every Shareholder has the right to request that the Company purchase their shares at a fair price if they disagree with the Company's actions deemed detrimental to them or the Company.

c. **Preemptive Right**
   The right of every Shareholder to receive a preemptive offer on all shares issued for the purpose of increasing capital, in proportion to the number of shares held for the same share classification.

d. **Right of Inspection**
   The right to submit a request for an inspection of the Company, which may be submitted by one or more Shareholders representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with voting rights, as well as other parties as determined by laws and regulations, the Articles of Association, and/or agreements with the Company.

e. **Hak Meminta Penyelenggaraan RUPS**
Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS oleh satu orang atau lebih Pemegang Saham yang secara bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah yang lebih kecil.

f. **Hak Meminta Pembubaran Perseroan**
Hak bagi Direksi dan Dewan Komisaris atau satu orang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.

e. **Right to Request a GMS**
The right to request a GMS is granted by one or more Shareholders who collectively represent at least 1/10 (one-tenth) of the total shares with voting rights, unless the Company's Articles of Association stipulate a smaller number.

f. **Right to Request the Dissolution of the Company**
The right of the Board of Directors and the Board of Commissioners or one or more Shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the total shares with voting rights to submit a proposal to the GMS to dissolve the Company.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dalam batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Kewenangan tersebut antara lain mencakup permintaan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas pengelolaan Perseroan, perubahan Anggaran Dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, penetapan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi, serta kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RUPS juga merupakan wadah bagi para Pemegang Saham untuk berperan serta dalam pembangunan dan pengembangan Perseroan melalui pengambilan keputusan serta pemberian arahan strategis yang disampaikan dalam forum RUPS.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Perusahaan Terbuka,

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ of the Company, possessing powers not granted to the Board of Commissioners or the Board of Directors, within the limits established by laws and regulations and the Company's Articles of Association. These powers include, among other things, holding the Board of Commissioners and the Board of Directors accountable for the management of the Company, amending the Articles of Association, appointing and dismissing members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, determining the division of duties and management authority among members of the Board of Directors, and other powers in accordance with applicable regulations.

The GMS also serves as a forum for Shareholders to participate in the development and advancement of the Company through decision-making and the provision of strategic direction conveyed at the GMS.

Referring to Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company's Articles of Association, and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 15/POJK.04/2020 concerning the

RUPS dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders for Public Companies, there are two types of GMS: the Annual GMS and the Extraordinary GMS.

Proses Penyelenggaraan RUPS
GMS Holding Process

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perseroan. Sementara itu, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diselenggarakan di luar jadwal RUPST.

The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) is held at least once a year and must be held no later than 6 (six) months after the end of the Company's fiscal year. Meanwhile, an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) may be held outside the AGMS schedule.

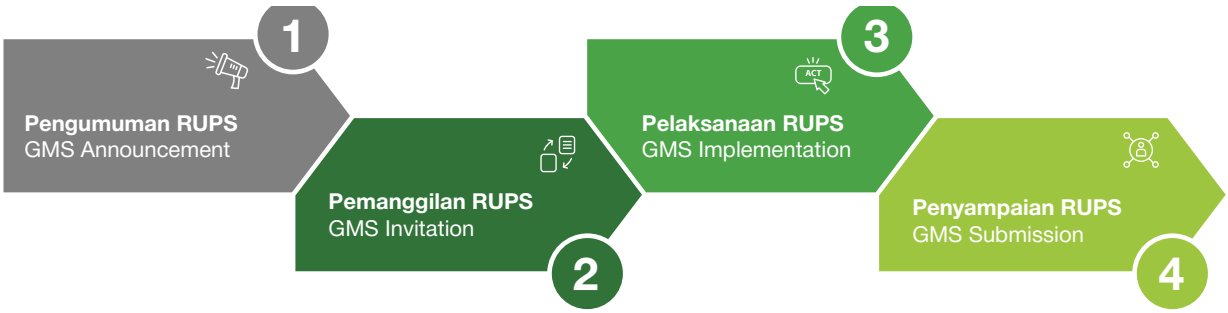
RUPSLB dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu untuk membahas dan memutuskan hal-hal penting tertentu yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dan tidak dapat menunggu penyelenggaraan RUPST.

An EGMS may be held at any time if deemed necessary to discuss and decide on certain important matters related to the interests of the Company, and that cannot await the AGMS.

Tahapan Pelaksanaan RUPS
GMS Implementation Stages

Perseroan menyelenggarakan RUPS melalui tahapan yang terstruktur sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Setiap tahapan dipersiapkan secara komprehensif, baik dari aspek waktu maupun kelengkapan dokumen, guna memastikan RUPS berjalan dengan tertib dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah standar yang diterapkan dalam proses pelaksanaan RUPS di Perseroan, yaitu:

The Company holds a General Meeting of Shareholders (GMS) in a structured series of stages in accordance with applicable regulations. Each stage is thoroughly prepared, in terms of timing and document completeness, to ensure the GMS runs smoothly and effectively. The following are the standard steps implemented in the Company's GMS implementation process:



Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Pengajuan Pertanyaan

Decision-Making and Q&A Mechanism

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Perseroan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat terkait setiap mata acara yang dibahas dalam rapat.

As mandated by Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in holding a General Meeting of Shareholders (GMS), the Company provides Shareholders with the opportunity to ask questions and/or express opinions regarding each agenda item discussed at the meeting.

RUPS dinyatakan sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

A GMS is deemed valid and may be held if attended by Shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

Seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

All resolutions at the GMS are made through deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is not successful, decisions are made by voting, with a majority of the validly cast votes at the meeting.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2025

Implementation of The 2025 General Meeting of Shareholders (GMS)

Sepanjang tahun 2025, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk telah menyelenggarakan satu (1) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Adapun rincian penyelenggaraan RUPST tersebut adalah sebagai berikut:

Throughout 2025, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk held one (1) Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). The details of the AGMS are as follows:

Jenis RUPS **Type of GMS**	**Tanggal Pelaksanaan** **Meeting Date**	**Tempat Pelaksanaan** **Venue**
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders	30 April 2025 April 30, 2025	Gedung Wisma Maktour Jalan Otista Raya Nomor 80 Jakarta 13330 Indonesia

RUPS Tahunan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI).

The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) is also held electronically through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) application.

Tahapan Pelaksanaan RUPS

GMS Implementation Stages

Pengumuman Announcement	Pemanggilan Invitation	Pelaksanaan Implementation	Risalah RUPS Minutes of the GMS
	8 April 2025	**30 April 2025**	**30 April 2025**
24 Maret 2025 Pemberitahuan/ pengumuman Rencana RUPS Tahunan kepada Pemegang Saham	Pemanggilan RUPS Tahunan kepada Pemegang Saham	Pelaksanaan RUPS Tahunan di Gedung Wisma Maktour Jalan Otista Raya Nomor 80 Jakarta 13330.	Berita Acara RUPS Tahunan dimuat dalam Risalah RUPS Tahunan No. 05 tanggal 30 April 2025.
March 24, 2025 Notification/ Announcement of the Planned Annual General Meeting to Shareholders	**April 8, 2025** Notice of Annual General Meeting to Shareholders	**April 30, 2025** Annual General Meeting of Shareholders held at Gedung Wisma Maktour, Jalan Otista Raya Nomor 80, Jakarta 13330.	**April 30, 2025** Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders contained in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 05 dated April 30, 2025.

Ketentuan Kuorum

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk setiap mata acara yang diputuskan dalam RUPS ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Anggaran Dasar Perseroan. Kuorum kehadiran untuk RUPST Tahun Buku 2025 telah terpenuhi, sehingga Rapat dinyatakan sah dan berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah serta mengikat bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan atas setiap mata acara Rapat.

Proses Perhitungan Suara

Perseroan menunjuk pihak independen yang terdiri dari Notaris dan Biro Administrasi Efek untuk melakukan serta memvalidasi proses perhitungan suara dalam Rapat. Seluruh keputusan atas setiap mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sebanyak 11.580.737.185 lembar saham atau setara dengan 96,0866% dari total 12.052.399.922 lembar saham yang memiliki hak suara dalam Rapat.

Quorum Requirements

The attendance quorum and decision quorum for each agenda item resolved at the GMS are determined in accordance with the Financial Services Authority (OJK) regulations and the Company's Articles of Association. The attendance quorum for the 2025 AGMS has been met, and the Meeting is therefore declared valid and authorized to make valid and binding decisions for all Shareholders on each agenda item.

Vote Counting Process

The Company has appointed independent parties, including a Notary and a Securities Administration Bureau, to conduct and validate the vote-counting process at the Meeting. All decisions on each agenda item at the Meeting are made by deliberation to reach consensus.

Shareholders

The Meeting was attended by Shareholders representing 11,580,737,185 shares, equivalent to 96.0866% of the total 12,052,399,922 shares with voting rights.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Pada RUPST 2025

RUPS Tahunan Perseroan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rekapitulasi kehadiran disampaikan pada tabel berikut:

Board of Commissioners and Board of Directors Attendance at the 2025 AGMS

The Company's Annual General Meeting of Shareholders was attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors, with a summary of attendance presented in the following table:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2025
Table of Recapitulation of Attendance at the 2025 AGMS

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1.	Muhammad Rocky Masyhur	Komisaris Utama President Commissioner	Hadir Present
2.	Bambang Widodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
3.	M. Khairnadhif Kasyfillah	Komisaris Commissioner	Hadir Present
4.	Harry M. Nadir	Direktur Utama President Director	Hadir Present
5.	Wawan Sulistyawan	Direktur Director	Hadir Present
6.	Bambang Laksanawan	Direktur Director	Hadir Present
7.	M. Arief Pahlevi Pangerang	Direktur Director	Hadir Present



Hasil Keputusan RUPST 2025

Hingga diterbitkannya Laporan Tahunan ini, seluruh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Perseroan. Adapun penjelasan atas masing-masing mata acara RUPS Tahun Buku 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Results of the 2025 AGMS

As of the publication of this Annual Report, all resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2025 Fiscal Year have been fully implemented by the Company. Explanations of each agenda item of the 2025 General Meeting of Shareholders are presented in the following table:

Mata Acara Pertama
First Meeting Agenda Item

Mata Acara Agenda	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Approval and ratification of the Annual Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Report for the Financial Year ending on December 31, 2024.
Keputusan Resolutions	1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Pengesahan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk., tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; 2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Approved the Annual Report and the Board of Commissioners' Ratification Report, as well as the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2024, audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan and Partners, as stated in its report dated March 25, 2025, with the opinion that "the Financial Statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk., as of December 31, 2024, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; 2. Approved the granting of full release and discharge ("volledig acquit et decharge") to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision carried out in the 2024 financial year, provided that such management and supervision actions were reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024, and did not constitute a criminal offense or violation of the provisions of the regulations. applicable laws and regulations.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	*Abstain*: 274.000 (0,0024%) Tidak setuju | Disagree: 0 Setuju | Agree: 11.580.463.185 (99,9976%)
Realisasi Keputusan Realization of Resolutions	Sudah terealisasi. Realized.

Mata Acara Rapat Kedua
Second Meeting Agenda Item

Mata Acara Agenda	Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024. Approval and ratification of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the 2024 financial year ending December 31, 2024.

Keputusan **Resolutions**	Meyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Approved and ratified the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the 2024 financial year ending on December 31, 2024, and granted full release and discharge of responsibility ("volledig acquit et decharge") to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out in the 2024 financial year, as long as the management and supervision actions were reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024, and did not constitute a criminal act or violation of the provisions of applicable laws and regulations.
Hasil Pemungutan Suara **Voting Results**	*Abstain*: 274.000 (0,0024%) Tidak setuju | Disagree: 0 Setuju | Agree: 11.580.463.185 (99,9976%)
Realisasi Keputusan **Realization of Resolutions**	Sudah terealisasi. Realized.

Mata Acara Rapat Ketiga
Third Meeting Agenda Item

Mata Acara **Agenda**	Persetujuan penggunaan Laba Bersih tahun 2024. Approval of the use of the 2024 Net Profit.
Keputusan **Resolutions**	1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024, yaitu sebesar Rp52.036.897.000 (lima puluh dua miliar tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) yang akan digunakan dengan perincian sebagai berikut: a. Sebesar Rp10.407.379.400 (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; b. Sebesar Rp18.212.913.950 (delapan belas miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) digunakan sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham; c. Sisanya sebesar Rp23.416.603.650 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam belas juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima puluh Rupiah) sebagai cadangan lainnya. 2. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp18.212.913.950 (delapan belas miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) kepada pemegang saham yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai final; serta 3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Approved the use of the Company's net profit for the 2024 financial year, amounting to Rp52,036,897,000 (fifty-two billion thirty-six million eight hundred ninety-seven thousand Rupiah), as follows: a. Rp10,407,379,400 (ten billion four hundred seven million three hundred seventy-nine thousand four hundred Rupiah) was set aside as a mandatory reserve in accordance with applicable laws and regulations; b. Rp18,212,913,950 (eighteen billion two hundred twelve million nine hundred thirteen thousand nine hundred fifty Rupiah) was used as cash dividends to be distributed to shareholders; c. The remaining Rp23,416,603,650 (twenty-three billion four hundred sixteen million six hundred three thousand six hundred fifty Rupiah) was set aside as other reserves. 2. Approved the distribution of cash dividends amounting to Rp18,212,913,950 (eighteen billion two hundred twelve million nine hundred thirteen thousand nine hundred fifty Rupiah) to shareholders, to be paid as a final cash dividend; and

	3. Granted power and authority to the Company's Board of Directors to implement the procedures for distributing cash dividends and to announce them in accordance with applicable laws and regulations.
Hasil Pemungutan Suara **Voting Results**	*Abstain*: 274.000 (0,0024%) Tidak setuju | Disagree: 0 Setuju | Agree: 11.580.463.185 (99,9976%)
Realisasi Keputusan **Realization of Resolutions**	Sudah terealisasi. Realized.
	Mata Acara Keempat **Fourth Meeting Agenda Item**
Mata Acara **Agenda**	Penunjukan dan penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025. Appointment and determination of a Public Accountant to audit the Company's financial statements for the 2025 financial year.
Keputusan **Resolutions**	Menyetujui untuk memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025, apabila dianggap perlu, termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik sebelumnya, sepanjang memenuhi kriteria yang telah disetujui dalam rapat ini dan menetapkan honorariumnya. Approved to grant full authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2025, and other periods within the 2025 financial year, if deemed necessary, including replacing the previous Public Accounting Firm, provided it meets the criteria approved at this meeting and determines its honorarium.
Hasil Pemungutan Suara **Voting Results**	*Abstain*: 273.900 (0,0024%) Tidak setuju | Disagree: 0 Setuju | Agree: 11.580.463.285 (99,9976%)
Realisasi Keputusan **Realization of Resolutions**	Sudah terealisasi. Realized.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2024

Implementation of the 2024 General Meeting of Shareholders (GMS)

Sepanjang tahun 2024, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk telah menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2024, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk held 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), with the following details:

Jenis RUPS Type of GMS	Tanggal Pelaksanaan Meeting Date	Tempat Pelaksanaan Venue
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders	24 April 2024 April 24, 2024	Gedung Wisma Maktour Jalan Otista Raya Nomor 80 Jakarta 13330 Indonesia

RUPST tahun 2024 juga diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI).

The 2024 AGMS will also be held electronically through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) application.

Tahapan Pelaksanaan RUPS

GMS Implementation Stages

Pengumuman Announcement	Pemanggilan Invitation	Pelaksanaan Implementation	Risalah RUPS Minutes of the GMS
18 Maret 2024 Pemberitahuan/ pengumuman Rencana RUPS Tahunan kepada Pemegang Saham **March 18, 2024** Notification/ Announcement of the Planned Annual General Meeting to Shareholders	**2 April 2024** Pemanggilan RUPS Tahunan kepada Pemegang Saham **April 2, 2024** Invitation to the Annual General Meeting to Shareholders	**24 April 2024** Pelaksanaan RUPS Tahunan di Gedung Wisma Maktour Jalan Otista Raya Nomor 80 Jakarta 13330. **April 24, 2024** Implementation of the Annual General Meeting of Shareholders at Gedung Wisma Maktour, Jalan Otista Raya Nomor 80, Jakarta 13330.	**24 April 2024** Berita Acara RUPS Tahunan dimuat dalam Risalah RUPS Tahunan No. 02 tanggal 24 April 2024. **April 24, 2024** Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders contained in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 02 dated April 24, 2024.

Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPST 2024

RUPS Tahunan 2024 dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sebanyak 11.561.245.200 atau 96,3427% dari 12.000.123.702 lembar saham yang memiliki hak suara yang diterbitkan oleh Perseroan.

Shareholders Attendance at the 2024 AGMS

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) was attended by 11,561,245,200 shareholders and/or their proxies, representing 96.3427% of the 12,000,123,702 shares with voting rights issued by the Company.

Pelaksanaan RUPST 2024 dan Realisasinya

RUPS Tahunan 2024 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 yang bertempat di Kantor Pusat PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. RUPS Tahunan tersebut, dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan rekapitulasi kehadiran disampaikan pada tabel sebagai berikut:

The 2024 AGMS Implementation and Realization

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) was held on April 24, 2024, at the Head Office of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. The AGMS was attended by the Company's Board of Commissioners and Directors, with a summary of attendance presented in the following table:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran RUPST 2024
Table of Recapitulation of Attendance at the 2024 AGMS

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1.	Muhammad Rocky Masyhur	Komisaris Utama President Commissioner	Hadir Present
2.	Bambang Widodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
3.	M. Khairnadhif Kasyfillah	Komisaris Commissioner	Hadir Present
4.	Harry M. Nadir	Direktur Utama President Director	Hadir Present
5.	Wawan Sulistyawan	Direktur Director	Hadir Present

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
6.	Bambang Laksanawan	Direktur Director	Hadir Present
7.	M. Arief Pahlevi Pangerang	Direktur Director	Hadir Present

Keputusan yang diambil pada RUPST 2024 beserta realisasinya disampaikan pada tabel berikut:

The resolutions taken at the 2024 AGMS and their realization are presented in the following table:

Tabel Keputusan RUPST 2024 dan Realisasinya
Table of the 2024 AGMS Resolutions and Realization

	Mata Acara Pertama **First Meeting Agenda Item**
Mata Acara **Agenda**	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023. Approval and ratification of the Annual Report, including the Financial Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending on 12-31-2023.
Keputusan **Resolutions**	1. Menyetujui Laporan Tahunan & Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat (28-03-2024) dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk., tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku dua ribu dua puluh tiga (2023), sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan & Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 1. Approved the Annual Report & Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on the thirty-first of December two thousand and twenty-three (12-31-2023), which had been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan and Partners as stated in its report dated the twenty-eighth of March two thousand and twenty-four (3-28-2024) with the opinion that "The Financial Statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk., on the thirty-first of December two thousand and twenty-three (12-31-2023), as well as the financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia. 2. Approved the granting of full release and discharge of responsibility ("volledig acquit et decharge") to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out in the financial year two thousand twenty three (2023), as long as the management and supervision actions were reflected in the Annual Report & Financial Report of the Company for the financial year ending on the thirty-first of December two thousand twenty three (12-31-2023) and did not constitute a criminal act or violation of the provisions of applicable laws and regulations.
Hasil Pemungutan Suara **Voting Results**	*Abstain*: 0 Tidak setuju | Disagree: 0 Setuju | Agree: 11.561.245.200
Realisasi Keputusan **Realization of Resolutions**	Sudah terealisasi. Realized.

	Mata Acara Rapat Kedua **Second Meeting Agenda Item**
Mata Acara **Agenda**	Persetujuan dan pengesahan Neraca dan perhitungan laba-rugi untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Approval and ratification of the Balance Sheet and profit and loss account for the 2023 financial year ending December 31, 2023.
Keputusan **Resolution**	Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk Tahun buku dua ribu dua puluh tiga (2023) yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Approved and ratified the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the Financial Year two thousand twenty three (2023) ending on the thirty-first of December two thousand twenty three (12-31-2023) and granted full release and discharge of responsibility ("acquit et de charge") to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions of the Company that had been carried out during the Financial Year ending on the thirty-first of December two thousand twenty three (12-31-2023), as long as these actions were reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company for the Financial Year ending on the thirty-first of December two thousand twenty three and did not constitute a criminal act or violation of the provisions of applicable laws and regulations.
Hasil Pemungutan Suara **Voting Results**	*Abstain*: 0 Tidak setuju | Disagree: 0 Setuju | Agreer: 11.561.245.200
Realisasi Keputusan **Realization of Resolutions**	Sudah terealisasi. Realized.
	Mata Acara Rapat Ketiga **Third Meeting Agenda Item**
Mata Acara **Agenda**	Persetujuan penggunaan laba bersih tahun 2023. Approval of the use of the 2023 net profit.
Keputusan **Resolutions**	1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku dua ribu dua puluh tiga (2023), yaitu sebesar Rp51.241.374.000,- (lima puluh satu miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang akan digunakan dengan perincian sebagai berikut: a. Sebesar Rp10.248.274.800,- (sepuluh miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; b. Minimum sebsar Rp12.000.123.702,- (dua belas miliar seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah), digunakan sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham; dan c. Sisanya sebesar Rp28.992.975.498,- (dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagai cadangan lainnya. 2. Menyetujui pembagian dividen tunai minimum sebesar Rp12.000.123.702,- (dua belas miliar seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) atau sebesar Rp1,- (satu rupiah) per saham kepada pemegang saham yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai final; serta 3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	1. Approved the use of the Company's net profit for the Financial Year two thousand twenty three (2023), i.e., Rp51,241,374,000,- (fifty one billion two hundred forty one million three hundred seventy four thousand rupiah), with the following details: a. An amount of Rp10,248,274,800 (ten billion two hundred forty eight million two hundred seventy four thousand eight hundred rupiah) was set aside as mandatory reserves in accordance with the provisions of applicable laws and regulations; b. A minimum of Rp12,000,123,702 (twelve billion one hundred twenty three thousand seven hundred and two rupiah) was used as cash dividends distributed to shareholders; and c. The remaining Rp28,992,975,498 (twenty-eight billion nine hundred ninety two million nine hundred seventy five thousand four hundred ninety eight rupiah) was set aside as other reserves. 2. Approved the distribution of a minimum cash dividend of Rp12,000,123,702,- (twelve billion one hundred twenty three thousand seven hundred and two rupiah) or Rp1,- (one rupiah) per share to shareholders, which paid as a final cash dividend; and 3. Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Directors to implement the procedures for distributing cash dividends and announcing them in accordance with applicable laws and regulations.
Hasil Pemungutan Suara **Voting Results**	*Abstain*: 0 Tidak setuju | Disagree: 0 Setuju | Agree: 11.561.245.200
Realisasi Keputusan **Realization of Resolutions**	Sudah terealisasi. Realized.
	Mata Acara Rapat Keempat **Fourth Meeting Agenda Item**
Mata Acara **Agenda**	**Penunjukan dan penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku dua ribu dua puluh empat (2024)** **Appointment and determination of a Public Accountant to audit the Company's financial statements for the financial year two thousand twenty-four (2024).**
Keputusan **Resolution**	Menyetujui untuk memberikan kewenangan penuh kepada Dewan komisaris Perseroan dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku dua ribu dua puluh empat (2024), apabila dianggap perlu, termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik sebelumnya, sepanjang memenuhi kriteria yang telah disetujui dalam Rapat ini dan menetapkan honorariumnya. Approved to grant full authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the Financial Year ending December 31, 2024, and other periods within the Financial Year two thousand twenty-four (2024), if deemed necessary, including replacing the previous Public Accounting Firm, provided it meets the criteria approved in this Meeting and to determine its honorarium.
Hasil Pemungutan Suara **Voting Results**	*Abstain*: 0 Tidak setuju | Disagree: 0 Setuju | Agree: 11.561.245.200
Realisasi Keputusan **Realization of Resolutions**	Sudah terealisasi. Realized.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab kolektif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi, serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi terkait penetapan strategi, kebijakan, dan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Dewan Komisaris juga bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan serta jalannya pengurusan Perseroan secara umum, serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan aktivitas operasional Perseroan.

The Board of Commissioners has collective responsibility for overseeing the performance of the Board of Directors and providing recommendations and advice to the Board of Directors regarding the determination of strategies, policies, and implementation of the Company's operational activities. The Board of Commissioners is also tasked with overseeing management policies and the general running of the Company, and providing advice to the Board of Directors regarding the implementation of the Company's operational activities.

Pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban Dewan Komisaris, termasuk ketentuan lain yang berkaitan dengan Dewan Komisaris, diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang disusun dengan mengacu pada praktik terbaik (*best practices)* tata kelola perusahaan.

The appointment and dismissal, duties and authorities, rights and obligations of the Board of Commissioners, and other provisions related to the Board of Commissioners are regulated in the Company's Articles of Association and other provisions formulated with reference to best practices in corporate governance.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners Guidelines and Work Procedures

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Pedoman Dewan Komisaris yang tersedia pada situs resmi *website* Perseroan. Pedoman Dewan Komisaris ini menjadi acuan dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, yang memuat dasar pembentukan, ruang lingkup tugas, serta tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Anggaran Dasar Perseroan; dan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

The Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities in accordance with the Board of Commissioners Guidelines, available on the Company's official website. These Board of Commissioners Guidelines serve as the reference and working procedures for the Board of Commissioners, which outline the basis for its formation, scope of duties, and responsibilities in accordance with applicable laws and regulations, which are:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. The Company's Articles of Association; and
3. Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Selain itu, Dewan Komisaris Perseroan juga mengacu pada Piagam Dewan Komisaris PT Menthobi Karyatama Raya Tbk yang ditetapkan pada 21 Maret 2022, yang merupakan dokumen resmi yang mengatur antara lain struktur keanggotaan, kriteria, tata cara penyelenggaraan rapat, serta wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Piagam tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan memuat pengaturan mengenai struktur, fungsi, serta tata kerja Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten, dan independen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company's Board of Commissioners also refers to the PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Board of Commissioners Charter, established on March 21, 2022. This is an official document that regulates, among other things, the membership structure, criteria, meeting procedures, and the authority and responsibilities of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory and advisory functions to the Board of Directors.

The Charter is binding on every member of the Board of Commissioners and contains provisions regarding the structure, functions, and work procedures of the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities effectively, efficiently, transparently, competently, and independently, in accordance with applicable laws and regulations.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Board of Commissioners Duties and Responsibilities

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Piagam Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 21 Maret 2022, yakni sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi memberikan persetujuan atas rencana-rencana strategis Perseroan. Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS, serta peraturan perundangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sekali;
3. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi melalui rapat gabungan Komisaris dan Direksi;
4. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh tahun buku kepada RUPS;
5. Memberikan pendapat dan saran yang sesuai dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners are stipulated in the Company's Board of Commissioners Charter dated March 21, 2022, as follows:

1. Conduct supervision over the management of the Company by the Board of Directors to provide approval for the Company's strategic plans. Implementation of duties, authorities, and responsibilities related to the implementation of the Company's business and activities in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, GMS Decisions, and applicable laws and regulations;
2. Hold regular Board of Commissioners Meetings, at least once every 2 (two) months;
3. Submit recommendations to the Board of Directors through a joint meeting of the Commissioners and Board of Directors;
4. Provide a report on the supervisory tasks carried out during the financial year to the GMS;
5. Provide opinions and suggestions in accordance with the supervisory duties of the Board of Commissioners to the GMS regarding any other issues deemed important for the management of the Company;

6. Berkoordinasi dan melakukan evaluasi Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Perseroan, untuk kemudian diajukan sebagai usulan kepada RUPS;

7. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham;

8. Memantau efektivitas praktis GCG dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ditetapkan Perseroan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan;

9. Menentukan sistem nominasi, evaluasi kinerja, remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS; dan

10. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya di RUPS.

6. Coordinate and evaluate the Public Accountant who will conduct an audit of the Company's bookkeeping, to then be submitted as a proposal to the GMS;

7. Respond to periodic reports from the Board of Directors and at any time as necessary regarding the development of the Company and report the results of carrying out its duties to Shareholders;

8. Monitor the practical effectiveness of GCG and the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) established by the Company and make necessary adjustments;

9. Determine the nomination system, performance evaluation, and remuneration for the Board of Commissioners and Directors to be submitted for approval at the GMS; and

10. Oversee the implementation of the Annual Work Plan and Budget (RKAT) and submit assessment results and opinions at the GMS.

Wewenang Dewan Komisaris
Board of Commissioners Authority

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lain persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

2. Memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;

3. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, Berdasarkan keputusan RUPS;

4. Dewan Komisaris berhak mendapat penjelasan atas segala hal yang ditanyakan kepada Direksi;

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has the authority to take certain actions in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, including the following:

1. Request an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding issues concerning the management of the Company;

2. Provide approval and assistance to the Board of Directors in carrying out certain legal acts;

3. The Board of Commissioners, based on the decision of the GMS, may carry out management actions for the Company under certain circumstances for a certain period of time;

4. The Board of Commissioners has the right to receive an explanation regarding all matters referred to the Board of Directors;

5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

6. Menyetujui Rencana Jangka Panjang Perseroan serta Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Perseroan yang disusun oleh Direksi;

7. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

8. Dapat melakukan tindakan kepengurusan dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu;

9. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu; dan

10. Berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.

5. Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meeting;

6. Approve the Company's Long-Term Plan and the Company's Annual Budget Activity Plan (RKAT) prepared by the Board of Directors;

7. Know all policies and actions that have been and will be implemented by the Board of Directors;

8. Can carry out management actions in certain circumstances and for a certain period of time;

9. The Board of Commissioners, based on the Company's Articles of Association and the resolutions of the GMS, may carry out management actions for the Company under certain circumstances for a certain period of time; and

10. Own the right to request assistance from experts in carrying out his duties for a limited period of time at the Company's expense.

Masa Jabatan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Term of Office

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan, pengangkatan kembali pada periode selanjutnya dapat dilakukan sepanjang yang bersangkutan menyatakan tetap memenuhi kriteria independensi kepada RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dinyatakan berakhir apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:

In accordance with the Company's Articles of Association and the Board of Commissioners Charter, members of the Board of Commissioners are appointed by the General Meeting of Shareholders (GMS) for a term of 5 (five) years, without prejudice to the GMS's right to dismiss members of the Board of Commissioners at any time. Members of the Board of Commissioners may be reappointed for a subsequent term in accordance with applicable regulations.

Independent Commissioners who have served for 2 (two) terms may be reappointed for a subsequent term as long as they certify to the GMS that they still meet the independence criteria. The term of office of a member of the Board of Commissioners shall be deemed to have ended if:

1. Mengundurkan diri;
2. Masa jabatan berakhir;
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
5. Meninggal dunia dalam masa jabatannya; dan
6. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.

1. The member resigns;
2. The member's term of office ends;
3. The member no longer meets applicable legal requirements;
4. The member is dismissed pursuant to the GMS resolution;
5. The member passes away during their term of office; and
6. The member is involved in actions that are detrimental to the Company and/or the state.

Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Basis of Appointment

Penunjukan Dewan Komisaris dilakukan melalui proses yang terstruktur, mulai dari penentuan sumber kandidat, proses seleksi, penilaian kelayakan, hingga pengusulan pengangkatan. Pemegang Saham memastikan bahwa setiap calon anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan umum, antara lain memiliki profesionalisme, integritas, kapasitas kepemimpinan, reputasi yang baik, serta komitmen tinggi dalam mendukung kemajuan dan keberlanjutan Perseroan.

The appointment of the Board of Commissioners is carried out through a structured process that includes determining the source of candidates, conducting the selection process, assessing suitability, and submitting the proposal for appointment. Shareholders ensure that each prospective member of the Board of Commissioners meets the criteria and requirements set out in the applicable regulations. All members of the Company's Board of Commissioners have met the general requirements, including professionalism, integrity, leadership capacity, a good reputation, and a strong commitment to supporting the Company's progress and sustainability.

Dasar Hukum Pengangkatan dan Komposisi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Legal Basis of Appointment and Composition

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang.

Selama tahun 2025, tidak terdapat perubahan dalam susunan maupun komposisi Dewan Komisaris Perseroan. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025 terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, yang masing-masing menjabat sebagai 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang Komisaris.

The composition of the Company's Board of Commissioners complies with the provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which stipulates that the Company's Board of Commissioners must consist of at least two members.

In 2025, there were no changes to the composition of the Company's Board of Commissioners. Thus, for the period January 1 to December 31, 2025, the Board of Commissioners comprised three members: 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Independent Commissioner, and 1 (one) Commissioner.

Adapun komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan disajikan sebagai berikut:

The Company's Board of Commissioners composition is presented as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Service
Muhammad Rocky Masyhur	Komisaris Utama President Commissioner	Akta Keputusan Rapat No. 32 tanggal 31 Maret 2021. Deed of Meeting Resolution Number 32 dated March 31, 2021.	2021 – RUPS Tahun 2026 2021 – 2026 GMS	Pertama First
Bambang Widodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 1 tanggal 5 Agustus 2022. Deed of the Company's Shareholders Resolution Number 1 dated August 5, 2022.	2022 – RUPS Tahun 2027 2022 – 2027 GMS	Pertama First
M. Khairnadhif Kasyfillah	Komisaris Commissioner	Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 6 tanggal 6 September 2023. Deed of the Company's Shareholders Resolution Number 6 dated September 6, 2023.	2023 – RUPS Tahunan 2028 2023 – 2028 GMS	Pertama First

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru
Induction Program for New Commissioners

Bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, Perseroan menyelenggarakan Program Pengenalan (*Induction Program*) yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Program ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan presentasi, pertemuan, pelatihan, kunjungan ke wilayah perkebunan maupun operasional Perseroan, serta pengkajian dokumen atau bentuk kegiatan lainnya yang relevan. Program Pengenalan tersebut mencakup pelatihan antara lain:

1. Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi Perseroan;
2. Melakukan kegiatan *on site* (kunjungan) ke Kantor dan wilayah operasional Perseroan untuk bertemu dan bertatap muka langsung dengan jajaran Perseroan;
3. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan,

For newly appointed members of the Board of Commissioners, the Company conducts an Induction Program tailored to the Company's needs. This program can be implemented through presentations, meetings, training, visits to the Company's plantations and operations, document reviews, or other relevant activities.

1. Knowledge of the Company's Vision, Mission, Values, and Strategy;
2. On-site visits to the Company's offices and operational areas to meet and interact directly with the Company's staff;
3. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in the Company;

4. Mempelajari tentang Perseroan terkait dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi pasar kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;

5. Mempelajari dokumen perusahaan seperti antara lain: Anggaran Dasar Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), pedoman tata tertib Dewan Komisaris, laporan keuangan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses bisnis Perseroan; serta

6. Keterangan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan kepada audit internal dan eksternal, sistem maupun kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.

Pada tahun 2025 tidak terdapat pengangkatan anggota komisaris baru, sehingga tidak ada pelaksanaan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru.

4. Learn about the Company in relation to its objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive market position, risks, and various other strategic issues;

5. Study company documents such as: the Company's Articles of Association, the Company's Work Plan and Budget (RKAP), Board of Commissioners' code of conduct, financial reports, and laws and regulations related to the Company's business processes; and

6. Information relating to the authority delegated to internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee.

No new commissioners were appointed in 2025. Therefore, no induction program was implemented for new members of the Board of Commissioners.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Retirement Program

Dewan Komisaris Perseroan senantiasa berupaya menjaga independensi serta menghindari adanya benturan kepentingan yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas secara profesional dan objektif. Sehubungan dengan hal tersebut, informasi mengenai hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham selama Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

The Company's Board of Commissioners consistently strives to maintain its independence and avoid any conflicts of interest that could affect the professional and objective performance of its duties. In this regard, information regarding the affiliated relationships between the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Shareholders in 2023 is presented in the following table:

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Table of Board of Commissioners Affiliated Relationships

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris Board of Commissioners Affiliated Relationships											
		Hubungan Keuangan dengan Financial Ties with						Hubungan Keluarga dengan Familial Ties with					
		Dewan Komisaris lainnya Other Board of Commissioners		Dewan Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders		Dewan Komisaris Lainnya Other Board of Commissioners		Dewan Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Muhammad Rocky Masyhur	Komisaris Utama President Commissioner		√		√	√			√		√	√	

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris Financial and Family Relations of the Board of Commissioners											
		Hubungan Keuangan dengan Financial Ties With						Hubungan Keluarga dengan Familial Ties With					
		Dewan Komisaris lainnya Other Board of Commissioners		Dewan Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders		Dewan Komisaris Lainnya Other Board of Commissioners		Dewan Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Bambang Widodo	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√
M. Khairnadhif Kasyfillah	Komisaris Commissioner		√		√	√			√		√	√	

Dewan Komisaris Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain melalui ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan; serta
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

The Company's Board of Commissioners consistently upholds the principle of transparency in carrying out its duties and responsibilities, including through the following provisions:

1. Members of the Board of Commissioners are prohibited from exploiting the Company for personal, family, and/or other party interests that could harm or reduce the Company's profits; and
2. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the Company other than the remuneration and other facilities determined by the General Meeting of Shareholders (GMS).

Pembagian Tugas Dewan Komisaris
Board of Commissioners Division of Duties

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Perseroan secara efektif, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

To effectively carry out its oversight function regarding the Company's performance, the Board of Commissioners divides its duties and responsibilities as follows:

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Table of Board of Commissioners Division of Duties

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Muhammad Rocky Masyhur	Komisaris Utama President Commissioner	• Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi; • Memberikan nasihat strategis kepada Direksi dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Perseroan; serta • Menjamin efektivitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
		• Leading and coordinating the activities of the Board of Commissioners in performing its supervisory function over the Board of Directors; • Providing strategic advice to the Board of Directors in achieving the Company's vision, mission, and objectives; and • Ensuring the effective implementation of Good Corporate Governance (GCG).
Bambang Widodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Melaksanakan fungsi pengawasan secara objektif dan independen terhadap kebijakan dan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi; • Menyuarakan kepentingan pemegang saham minoritas dan pihak-pihak independen lainnya dalam proses pengambilan keputusan strategis; serta • Memastikan tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. • Carrying out an objective and independent supervisory function over the policies and management of the Company by the Board of Directors • Representing the interests of minority shareholders and other independent stakeholders in strategic decision-making processes; and • Ensuring the absence of conflicts of interest in the execution of duties by the Board of Commissioners and the Board of Directors.
M. Khairnadhif Kasyfillah	Komisaris Commissioner	• Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kinerja Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan; • Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap rencana strategis dan laporan tahunan yang disusun oleh Direksi; serta • Menilai dan memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Overseeing the implementation of policies and the performance of the Board of Directors in carrying out the Company's operational activities; • Providing input and recommendations on the strategic plans and annual reports prepared by the Board of Directors; and • Assessing and monitoring the Company's compliance with applicable laws and regulations.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Concurrent Position Policy

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014, anggota Dewan Komisaris diperkenankan untuk merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada paling banyak 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya. Selain itu, anggota Dewan Komisaris juga dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada paling banyak 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, anggota Dewan Komisaris Perseroan diperbolehkan memiliki rangkap jabatan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang Tahun 2025, rangkap jabatan yang dijalankan oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Adapun informasi mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris disajikan dalam bagian Profil Dewan Komisaris pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Based on Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 33/POJK.04/2014, members of the Board of Commissioners are permitted to hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners at a maximum of two Issuers or other Public Companies. Members of the Board of Commissioners may also hold concurrent positions as members of the Board of Directors at a maximum of two Issuers or other Public Companies.

Throughout 2025, the concurrent positions held by members of the Company's Board of Commissioners complied with these provisions. Information regarding the concurrent positions of members of the Board of Commissioners is presented in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Board of Commissioners Shareholding

Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya serta melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Perseroan maupun pada perusahaan lainnya diungkapkan secara berkala melalui daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG). Berikut disajikan informasi mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025:

In accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 11/POJK.04/2017 concerning Disclosure of Information on Certain Shareholders, members of the Board of Commissioners are required to disclose their shareholding and report to the OJK their ownership and any changes in the Company's shareholding, no later than 3 (three) days after the occurrence of ownership or any change in ownership of the Company's shares.

The shareholdings of the members of the Board of Commissioners in the Company and other companies are disclosed periodically through the Board of Commissioners' shareholding list, as a manifestation of the Company's commitment to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG). The following information presents information on the shareholding of members of the Board of Commissioners throughout 2025:

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Table of Board of Commissioners Shareholding

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Saham Percentage of Shares
Muhammad Rocky Masyhur	Komisaris Utama President Commissioner	1.187.354	0,01%
Bambang Widodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
M. Khairnadhif Kasyfillah	Komisaris Commissioner	-	-

Komisaris Independen
Independent Commissioners

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam Piagam Dewan Komisaris Perseroan. Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Direksi, serta tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who come from outside the Company and meet the independence requirements as stipulated in the Company's Board of Commissioners Charter. All Independent Commissioners have no financial, management, shareholding, and/or family relationships with Controlling Shareholders, members of the Board of Commissioners, and/or the Board of Directors, and have no financial or shareholding relationships

kepemilikan saham dengan Perseroan. Dengan demikian, Komisaris Independen dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan mendukung penerapan prinsip independensi dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen dari total 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris. Komposisi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mewajibkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Kriteria Penentuan dan Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen Perseroan diatur dalam Piagam Dewan Komisaris PT Menthobi Karyatama Raya Tbk tanggal 21 Maret 2022, yang disusun selaras dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Adapun kriteria Komisaris Independen tersebut meliputi:

1. Bukan merupakan pihak yang bekerja atau memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen;
2. Tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan

with the Company. Therefore, Independent Commissioners can perform their supervisory function objectively and support the implementation of the principle of independence in Good Corporate Governance.

As of December 31, 2025, the Company has 1 (one) Independent Commissioner out of a total of 3 (three) members of the Board of Commissioners. This composition has complied with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which requires that at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners be Independent Commissioners.

Criteria for Determining and Declaring Commissioners Independence

The criteria for the Company's Independent Commissioners are stipulated in the Board of Commissioners Charter of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dated March 21, 2022, which is formulated in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The criteria for Independent Commissioners include:

1. Not be a party working for or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of an Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner;
2. Not own shares, either directly or indirectly, in an Issuer or Public Company;
3. Not have any affiliated relationship with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Issuer or Public Company;
4. Not have any business relationship, either directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company; and

5. Pemenuhan seluruh kriteria tersebut wajib dinyatakan dalam surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris Independen yang disampaikan kepada Perseroan untuk dilakukan penelaahan dan didokumentasikan sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

5. Fulfillment of all these criteria must be stated in a statement letter from the prospective member of the Independent Board of Commissioners, which is submitted to the Company for review and documentation as part of the implementation of the Good Corporate Governance principles.

Status Independensi Komisaris Independen

Untuk tahun 2025, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen yang dijabat oleh Bapak Bambang Widodo. Komisaris Independen tersebut telah memenuhi seluruh kriteria independensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah menyampaikan pernyataan independensi untuk menegaskan status independensinya. Berikut status pernyataan independensi Komisaris Independen Tahun 2025 yakni:

Independence Status of Independent Commissioners

In 2025, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk has one Independent Commissioner, Mr. Bambang Widodo. This Independent Commissioner has met all independence criteria in accordance with applicable laws and regulations and has submitted a declaration of independence to confirm his independence status. The following is the independence status of the Independent Commissioners' statements in 2025:

Tabel Status Independensi Komisaris Independen Tahun 2025
Table of Independence Status of Independent Commissioners in 2025

Kriteria Criteria	Independensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Independence
	Bambang Widodo
Bukan anggota manajemen Perseroan. Not a member of the Company's management.	√
Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Free from business relationships and other relationships that could influence decision-making.	√
Bukan pemegang saham mayoritas Perseroan atau pekerja yang berhubungan langsung dengan pemegang saham mayoritas Perseroan. Not a majority shareholder of the Company or an employee directly related to the majority shareholder of the Company.	√
Bukan pekerja atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perseroan atau anggota perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. Not an employee or having worked as an executive at the Company or a member of an affiliated company, for at least 3 (three) years before becoming a member of the Board of Commissioners.	√
Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perseroan atau perusahaan afiliasi, atau pekerja yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. Not a professional advisor or consultant in material to the Company or affiliated companies, or an employee directly related to service providers, for at least 3 (three) years before becoming a member of the Board of Commissioners.	√

Kriteria Criteria	Independensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Independence
	Bambang Widodo
Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perseroan atau perusahaan afiliasi atau pekerja dari/ atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama. Not a major supplier or customer of the Company or affiliated companies, or an employee of/or who is directly or indirectly related to a major supplier or customer.	√
Tidak memiliki hubungan perjanjian dengan perusahaan atau perusahaan afiliasi lainnya sebagai Direksi. He has no contractual relationship with any other company or affiliated Company as a Director.	√
Seluruh Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi kriteria independensi. All of the Company's Commissioners, as mentioned above, have met the independence criteria.	√

Perseroan menjamin bahwa Dewan Komisaris senantiasa bertindak secara objektif dan independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen tersebut didukung dengan keberadaan Komisaris Independen dalam jajaran Dewan Komisaris yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di lingkungan Perseroan, khususnya pada tingkat Dewan Komisaris. Pernyataan independensi Komisaris Independen diperbarui secara berkala dan telah dinyatakan, ditandatangani, serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk pernyataan tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Company guarantees that the Board of Commissioners always acts objectively and independently in carrying out its duties and responsibilities. This commitment is supported by the presence of Independent Commissioners within the Board of Commissioners, who oversee the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles within the Company, particularly at the Board of Commissioners level. The Independent Commissioners' independence statement is updated periodically. It is declared, signed, and submitted to the Financial Services Authority (OJK) in the form of a written statement in accordance with applicable regulations.

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Widodo
Jabatan : Komisaris Independen PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk

Dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Komisaris Independen PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, saya senantiasa bertindak secara objektif, independen, profesional, dan tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat memengaruhi kemampuan saya dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Saya juga menyatakan bahwa saya berkomitmen untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan Perseroan, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan bahwa:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang dapat memengaruhi independensi saya.
2. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat memengaruhi independensi saya.
3. Tidak memiliki benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Komisaris Independen.
4. Bersedia untuk senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta kebijakan internal Perseroan.
5. Bersedia memperbarui pernyataan independensi ini secara berkala dan/atau apabila terdapat perubahan kondisi yang dapat memengaruhi independensi saya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk disampaikan kepada Perseroan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 10 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,

Bambang Widodo
Komisaris Independen

PT. MENTHOBI KARYATAMA RAYA Tbk
WISMA MAKTOUR Lt 4
Jl. Otista Raya No. 80 Jakarta Timur
13330 Phone : +6221 50201035
Mail : cooporate@mktr.co.id

Pengelolaan Benturan Kepentingan
Conflict of Interest Management

Untuk menjaga independensi dan profesionalisme, setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris wajib menghindari setiap situasi yang dapat menimbulkan benturan antara kepentingan pribadi dengan kewajibannya terhadap Perseroan;

2. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dengan Perseroan wajib segera mengungkapkan hal tersebut kepada Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta menyampaikan seluruh informasi yang relevan. Selanjutnya, Komisaris Utama wajib menginformasikan adanya benturan kepentingan tersebut kepada Direksi;

3. Setiap transaksi yang melibatkan anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan pihak terafiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan; dan

4. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan dilarang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan benturan kepentingan dimaksud.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat situasi yang mengindikasikan adanya potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusannya, serta seluruh anggota Dewan Komisaris telah menyatakan independensinya dalam Pakta Integritas yang ditandatangani pada awal pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun.

To maintain independence and professionalism, each member of the Board of Commissioners is required to comply with the following code of ethics:

1. Members of the Board of Commissioners are required to avoid any situation that could create a conflict between their personal interests and their obligations to the Company.

2. Members of the Board of Commissioners who have a conflict of interest or a potential conflict of interest with the Company are required to immediately disclose this to the President Commissioner and other members of the Board of Commissioners, and to provide all relevant information. Furthermore, the President Commissioner is required to inform the Board of Directors of the existence of such a conflict of interest.

3. Every transaction involving a member of the Board of Commissioners who has a conflict of interest must obtain the approval of the Board of Commissioners and comply with the provisions of applicable laws and regulations, particularly those related to affiliated parties and/or conflict of interest transactions; and

4. Members of the Board of Commissioners who have a conflict of interest are prohibited from being involved in the decision-making process related to the conflict of interest in question.

Throughout 2025, there were no situations indicating any potential conflict of interest faced by members of the Board of Commissioners in their decision-making, and all members of the Board of Commissioners have declared their independence in the Integrity Pact signed at the beginning of their appointment. It is renewed at the beginning of each year.

Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 dan Piagam Dewan Komisaris PT Menthobi Karyatama Raya Tbk yang ditetapkan pada 21 Maret 2022, bahwa Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat gabungan dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Dewan Komisaris merupakan sarana penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat dan rekomendasi kepada Direksi atas pengelolaan dan kegiatan operasional Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris Perseroan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, yang terdiri dari Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi (Radirkom), serta rapat komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Adapun rincian pelaksanaan rapat Dewan Komisaris selama tahun 2025, termasuk tingkat kehadiran masing-masing anggota, disajikan pada tabel berikut:

In accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 33/POJK.04/2014 and the Board of Commissioners Charter of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, stipulated on March 21, 2022, the Board of Commissioners is required to hold regular meetings at least once every two months. The Board of Commissioners is required to hold joint meetings with the Board of Directors at least once every 4 (four) months. Board of Commissioners meetings are an important tool in carrying out its supervisory function and providing advice and recommendations to the Board of Directors regarding the Company's management and operational activities.

Throughout 2025, the Company's Board of Commissioners held 6 (six) meetings, consisting of Board of Commissioners Meetings, Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors (Radirkom), and meetings of committees under the Board of Commissioners. Details of the Board of Commissioners meetings held throughout 2025, including the attendance of each member, are presented in the following table:

Tabel Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Table: Board of Commissioners Meeting Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Joint Council Meetings Commissioners and Directors			Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-Komite Joint Council Meetings Commissioners and Directors		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Muhammad Rocky Masyhur	Komisaris Utama President Commissioner	6	6	100%	9	9	100%	12	12	100%
Bambang Widodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100%	9	9	100%	12	12	100%
M. Khairnadhif Kasyfillah	Komisaris Commissioner	6	6	100%	9	9	100%	12	12	100%

Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris
Table: Agenda of Board of Commissioners' Internal Meeting

No.	Tanggal Date	Pembahasan Rapat Meeting Discussion Topics
1.	23 April 2025 April 23, 2025	Membahas persiapan RUPST Discussion of Annual GMS preparations
2.	28 Juli 2025 July 28, 2025	Membahas laporan keuangan Q2 Discussion of Q2 financial reports
3.	13 Oktober 2025 October 13, 2025	Membahas operasional Discussion of operations
4.	29 Oktober 2025 October 29, 2025	Membahas laporan keuangan Q3 Discussion of Q3 financial reports
5.	19 November 2025 November 19, 2025	Membahas Pengembangan usaha di KALTARA Discussion of business development in North Kalimantan
6.	23 Desember 2025 December 23, 2025	Pemaparan hasil audit operasional PKS Presentation of operational audit results of the Cooperation Agreement (PKS)

Keputusan dan Rekomendasi yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Resolutions and Recommendations Requiring Approval from the Board of Commissioners

Keputusan-keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebelum diimplementasikan oleh Perseroan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, antara lain meliputi:

1. Tindak lanjut atas materi rapat yang diselenggarakan Perseroan;
2. Tindak lanjut atas agenda dan materi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025;
3. Penelaahan dan pemberian persetujuan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2024;
4. Pemberian tanggapan dan rekomendasi Dewan Komisaris atas rencana kerja serta strategi Perseroan untuk tahun 2025 dan 2026;
5. Persetujuan hasil pelaksanaan Tahap I-*Windows Exercise* II dan Tahap I-*Windows Exercise* III pada Kepemilikan Saham Manajemen (*Management and Employee Stock Option Program*/MESOP) PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Pada tanggal 30 Juli 2025; serta

Resolutions that require the approval of the Board of Commissioners before being implemented by the Company, as stipulated in the Company's Articles of Association, include:

1. Follow-up on meeting materials held by the Company;
2. Follow-up on the agenda and materials for the 2025 General Meeting of Shareholders (GMS);
3. Review and approval of the Audited Financial Statements for the 2024 Fiscal Year;
4. Provision of responses and recommendations from the Board of Commissioners regarding the Company's work plan and strategies for 2025 and 2026;
5. Approval of the implementation results of Phase I-Windows Exercise II and Phase I-Windows Exercise III on the Management and Employee Stock Option Program (MESOP) of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk on July 30, 2025;

6. Penerimaan dan pembahasan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit atas pelaksanaan pemberian jasa audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Rekomendasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dan Manajemen selama tahun 2025 yakni sebagai berikut:

1. Arahan terkait dengan perbaikan *meeting* yang dilakukan dalam meeting Direksi;
2. Arahan terkait dengan proses pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan;
3. Arahan terkait dengan rencana pengembangan kegiatan usaha Anak Perusahaan;
4. Arahan terkait dengan rencana pembiayaan untuk pengembangan kegiatan usaha Anak Perusahaan.

6. Admission and discussion of the Audit Committee's Evaluation Report on the provision of audit services for Annual Historical Financial Information by a Public Accounting Firm (KAP).

The recommendations made by the Board of Commissioners to the Board of Directors and Management during 2025 are as follows:

1. Directions regarding improvements to Board of Directors meetings;
2. Directions regarding the audit process for the Company's financial statements;
3. Directions regarding plans for developing the business activities of Subsidiaries;
4. Directions regarding financing plans for developing the business activities of Subsidiaries.

Program Kerja Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Work Program

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara efektif. Peran tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan strategi Perseroan selaras dengan rencana pengembangan jangka panjang Perseroan. Melalui sinergi dengan manajemen serta *engagement* yang konstruktif dengan pemangku kepentingan, Dewan Komisaris berperan dalam mendorong penciptaan nilai berkelanjutan bagi pertumbuhan Perseroan. Adapun program kerja yang dijalankan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris;
2. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi;
3. Rapat dengan Pemegang Saham;
4. Program Kunjungan Kerja ke Lapangan;
5. Program Pengembangan dan Pelatihan Dewan Komisaris;
6. Program Pengendalian Internal.

To improve the Company's performance, the Board of Commissioners effectively carries out its supervisory and advisory functions. This role is carried out to ensure that all Company policies and strategies are aligned with the Company's long-term development plan. Through synergy with management and constructive engagement with stakeholders, the Board of Commissioners helps drive sustainable value creation for the Company's growth. The work program implemented throughout 2025 is as follows:

1. Board of Commissioners Meetings;
2. Coordination Meetings between the Board of Commissioners and Board of Directors;
3. Meetings with Shareholders;
4. Field Visit Program;
5. Board of Commissioners Development and Training Program;
6. Internal Control Program.

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris
Board of Commissioners Work Visits

Dewan Komisaris secara rutin melakukan kunjungan kerja ke wilayah Operasional seperti Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Perkebunan maupun Anak Perusahaan. Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan informasi langsung mengenai kondisi aktual operasional, tantangan, serta perkembangan kinerja masing-masing unit maupun Entitas Anak.

The Board of Commissioners regularly conducts work visits to operational areas, including Palm Oil Mills (PKS), Plantations, and Subsidiaries. These visits aim to gain a deeper understanding and first-hand information regarding the actual operational conditions, challenges, and performance developments of each unit and Subsidiary.

Selain itu, kunjungan ini juga menjadi forum untuk menyampaikan arahan, masukan, serta tanggapan terhadap isu-isu strategis maupun aktivitas operasional yang dihadapi oleh area operasional maupun Anak Perusahaan. Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan sejumlah kunjungan kerja sebagai bagian dari agenda pengawasan rutin. Adapun rincian kunjungan tersebut adalah sebagai berikut:

These visits also serve as a forum for providing direction, input, and responses to strategic issues and operational activities faced by operational areas and Subsidiaries. In 2025, the Board of Commissioners conducted several work visits as part of its routine supervisory agenda. The details of these visits are as follows:

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Competency Development

Perseroan memiliki kebijakan untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas kompetensi anggota Dewan Komisaris melalui berbagai program pengembangan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan. Perseroan memberikan akses serta kesempatan yang setara kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pengembangan kompetensi maupun berbagi wawasan kepada publik melalui berbagai media, antara lain forum diskusi, seminar, webinar, dan kegiatan sejenis lainnya.

The Company has a policy to continuously improve and expand the competency of members of the Board of Commissioners through various development programs relevant to their assigned duties and responsibilities. The Company provides equal access and opportunities to all members of the Board of Commissioners to participate in competency development programs and share insights with the public through various media, including discussion forums, seminars, webinars, and other similar activities.

Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris telah diungkapkan dan disajikan dalam bagian Profil Dewan Komisaris pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Throughout 2025, the competency development activities undertaken by members of the Board of Commissioners have been disclosed and presented in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Board of Commissioners Performance Assessment

Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Perseroan melaksanakan evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara kolegial maupun individual melalui mekanisme penilaian mandiri (*self assessment*) yang

Board of Commissioners Performance Assessment Policy

The Company conducts an annual self-assessment of the Board of Commissioners' performance, both collegially and individually, based on the

dilakukan setiap tahun, dengan mengacu pada tingkat pencapaian kinerja Perseroan. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta Piagam Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar bagi Perseroan dalam menilai kinerja Dewan Komisaris secara objektif serta sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan Perseroan.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris diukur dari ketercapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disusun pada awal tahun yang mencakup aspek perencanaan, pengawasan dan nasehat, pelaporan, dan dinamika usaha.

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris tersebut mengacu pada unsur-unsur yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Penilaian tersebut meliputi antara lain:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi;
2. Penelaahan, pemeriksaan, serta pemberian persetujuan atas Rencana Kerja Tahunan Perseroan;
3. Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam rapat-rapat Dewan Komisaris;
4. Pelaksanaan tugas khusus yang diberikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan

Company's performance achievement. This evaluation considers the Board of Commissioners' implementation of its duties and responsibilities as stipulated in applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and the Board of Commissioners' Charter.

The Board of Commissioners' performance assessment is conducted to assess the effectiveness of its supervisory and advisory functions to the Board of Directors, as determined by the General Meeting of Shareholders. The results of this assessment serve as the basis for the Company's objective assessment of the Board of Commissioners' performance and serve as considerations for improving the quality of Good Corporate Governance implementation within the Company.

Board of Commissioners Performance Assessment Criteria

Commissioners' performance is measured by the achievement of Key Performance Indicators (KPIs) established at the beginning of the year, covering aspects of planning, supervision and advice, reporting, and business dynamics.

The Board of Commissioners' performance assessment criteria refers to elements mutually agreed upon and outlined in the Annual Work Plan (RKT). This assessment includes:

1. Implementation of the supervisory function of the Company's management by the Board of Directors;
2. Review, examination, and approval of the Company's Annual Work Plan;
3. Attendance and participation in Board of Commissioners meetings;
4. Implementation of special tasks assigned in accordance with the provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders;
5. Implementation of the duties, authorities, and responsibilities of the Board of Commissioners

ketentuan Anggaran Dasar serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan

6. Kepatuhan terhadap Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran dalam menjalankan tugas.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara kolegial melalui *self assessment* dan dilaporkan dalam RUPS Tahunan, dimana hasil kinerja Dewan Komisaris dipaparkan melalui laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. Untuk penilaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara individual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan skema remunerasi dan pemberian insentif, serta sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun 2025 terhadap Dewan Komisaris Perseroan, dapat disimpulkan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta memberikan kontribusi positif bagi Perseroan melalui pandangan, masukan, dan nasihat yang disampaikan baik dalam rapat maupun melalui surat dan rekomendasi tertulis.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Pada RUPS Tahunan tahun 2025, kinerja Dewan Komisaris sebagaimana tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris telah diterima dan disetujui oleh RUPS, serta memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*).

in accordance with the provisions of the Articles of Association and decisions of the General Meeting of Shareholders; and

6. Compliance with the Articles of Association and applicable laws and regulations, as well as the application of the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness in carrying out duties.

Party Conducting Assessment

The Board of Commissioners' performance assessment is conducted collegially through self-assessment and reported at the Annual General Meeting of Shareholders. The results of the Board of Commissioners' performance are presented in a report on the implementation of the Board's duties to Shareholders. The individual performance assessment of each member of the Board of Commissioners is an integral part of determining the remuneration and incentive scheme. It serves as a basis for Shareholders' consideration.

Board of Commissioners Performance Assessment Results

Based on the results of the 2025 performance assessment of the Company's Board of Commissioners, it can be concluded that all members of the Board of Commissioners have performed their duties and responsibilities well and have made positive contributions to the Company through their views, input, and advice conveyed both in meetings and through written letters and recommendations.

As a form of accountability for the implementation of their duties and responsibilities, the results of the Board of Commissioners' performance evaluation are submitted to Shareholders through the Annual General Meeting of Shareholders and disclosed in the Company's Annual Report. At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the performance of the Board of Commissioners, as reflected in the Annual Report, Financial Statements, and Supervisory Report of the Board of Commissioners, was accepted and approved by the GMS, and the Board of Commissioners received a full release and discharge (acquit et de charge).

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris
Performance Assessment of Committees Under Board of Commissioners

Dalam melaksanakan peran dan fungsi pengawasan sehari-hari, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit. Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris dilakukan secara individual dan kolektif secara berkala setiap 1 (satu) tahun melalui mekanisme penilaian mandiri (*self-assessment*), dengan menggunakan metode evaluasi yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi kinerja anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam perpanjangan masa jabatan anggota Komite untuk periode berikutnya. Penilaian tersebut antara lain mencakup tingkat kehadiran dalam rapat, kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif antaranggota Komite, integritas, pemahaman terhadap visi, misi, dan rencana strategis Perseroan, serta kualitas saran dan rekomendasi yang diberikan terkait pelaksanaan program kerja masing-masing Komite Penunjang Dewan Komisaris.

Hasil Evaluasi Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Hasil evaluasi secara umum menunjukkan bahwa Komite Audit Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, khususnya terkait dengan penelaahan laporan keuangan. Peran tersebut mencakup pemberian rekomendasi mengenai pengangkatan, pergantian, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi audit internal dan audit eksternal, serta pengawasan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait aspek nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan

In carrying out its day-to-day supervisory role, the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee. The performance of members of the Committees Supporting the Board of Commissioners is evaluated individually and collectively, once a year, through a self-assessment mechanism using the evaluation method stipulated in the Board of Commissioners Decree.

The results of the performance evaluation of members of the Board of Commissioners' Supporting Committees are among the considerations for extending the term of office of Committee members for the next period. The assessment includes, among other things, the level of attendance at meetings, the ability to cooperate and communicate effectively among Committee members, integrity, understanding of the Company's vision, mission, and strategic plan, and the quality of advice and recommendations provided regarding the implementation of the work programs of each Board of Commissioners' Supporting Committee.

Committees Under Board of Commissioners Performance Evaluation Results

The evaluation results generally indicate that the Company's Audit Committee has performed its duties and responsibilities effectively and has supported the effective implementation of the Board of Commissioners' oversight function, particularly in the review of financial statements. This role includes providing recommendations regarding the appointment, replacement, and implementation of the duties and responsibilities of the internal and external audit functions, as well as overseeing the Company's compliance with applicable laws and regulations.

Meanwhile, the Nomination and Remuneration Committee is responsible for providing advice and recommendations to the Board of Commissioners regarding the nomination and remuneration of

Dewan Komisaris. Kriteria penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi pemberian rekomendasi mengenai kebijakan, struktur, dan praktik remunerasi, serta perencanaan suksesi Direksi dan Dewan Komisaris.

members of the Board of Directors and Board of Commissioners. The Nomination and Remuneration Committee's performance assessment criteria include recommendations on remuneration policies, structures, and practices, as well as succession planning for the Board of Directors and Board of Commissioners.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris telah berjalan secara optimal. Dengan kinerja tersebut, 2 (dua) Komite tersebut juga berperan dalam mengevaluasi, meninjau, dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Kinerja setiap komite dinilai berdasarkan pencapaian program kerja, kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan, tingkat kehadiran dalam rapat, serta kualitas rekomendasi yang dihasilkan.

Throughout 2025, the Board of Commissioners assessed that the performance of all Committees under its purview was optimal. Based on this performance, the two Committees also play a role in evaluating, reviewing, and providing recommendations to improve the quality of the Board of Directors' management. The performance of each committee is assessed based on the achievement of work programs, compliance with established plans, meeting attendance, and the quality of recommendations produced.

Direksi
Board of Directors

Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan operasional sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Direksi bertanggung jawab dalam menciptakan dan meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham. Dalam menjalankan perannya, Direksi menyusun dan melaksanakan rencana kerja yang selaras dan berimbang antara pencapaian tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang Perseroan. Setiap anggota Direksi melaksanakan tugas pengambilan keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang masing-masing, serta memimpin dan mengelola Perseroan berdasarkan visi, misi, strategi, dan tujuan Perseroan.

The Board of Directors has full authority and responsibility for carrying out operations in accordance with the established vision and mission. The Board of Directors is responsible for creating and enhancing shareholder value. In carrying out its role, the Board of Directors develops and implements a work plan that aligns and balances the achievement of the Company's short-term and long-term objectives. Each member of the Board of Directors carries out decision-making duties in accordance with their respective division of duties and authorities, and leads and manages the Company in accordance with the Company's vision, mission, strategy, and objectives.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
Board of Directors Guidelines and Work Procedures

Direksi memegang peranan strategis dalam pengelolaan dan pengendalian kegiatan usaha Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menetapkan pedoman kerja sebagai landasan utama bagi Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya guna memenuhi kepentingan Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada

The Board of Directors plays a strategic role in the management and control of the Company's business activities. In this regard, the Company has established work guidelines as the primary foundation for the Board of Directors in carrying out its duties, responsibilities, and authorities to meet the interests of Shareholders and other Stakeholders. The Board of Directors' duties and responsibilities are outlined in PT Menthobi

Piagam Direksi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk tertanggal 21 Maret 2022, pedoman tersebut juga tersedia pada situs resmi Perseroan.

Untuk Piagam Direksi yang disusun dan diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Anggaran Dasar Perseroan.

Piagam Direksi tersebut memuat hal-hal terkait:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Wewenang serta tanggung jawab Direksi;
- Struktur keanggotan Direksi;
- Kriteria Anggota Direksi; dan
- Pelaksanaan rapat.

Karyatama Raya Tbk Board of Directors' Charter dated March 21, 2022. These guidelines are also available on the Company's official website.

The Board of Directors Charter is prepared and enforced in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, and the Company's Articles of Association.

The Board of Directors Charter contains matters related to:

- Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors;
- Authority and responsibilities of the Board of Directors;
- Structure of the Board of Directors;
- Criteria for Board of Directors Members; and
- Implementation of meetings.

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi
Board of Directors Duties, Authorities, and Responsibilities

Tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Piagam Direksi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk tertanggal 21 Maret 2022. Dalam menjalankan fungsi pengurusan Perseroan, Direksi memiliki tugas dan kewenangan, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;

2. Bertindak sebagai pimpinan dalam menjalankan pengurusan Perseroan secara efektif, profesional, dan bertanggung jawab;

3. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum terkait pengurusan maupun penguasaan kekayaan Perseroan, termasuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

4. Mengelola, memelihara, dan mengamankan aset serta kekayaan Perseroan;

The duties and responsibilities of the Board of Directors are stipulated in PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Board of Directors Charter dated March 21, 2022. In carrying out its management functions for the Company, the Board of Directors has the following duties and authorities:

1. Carry out and be fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the Company's purposes and objectives as set out in the Articles of Association;

2. Act as a leader in carrying out the management of the Company effectively, professionally, and responsibly;

3. Represent the Company both inside and outside the courts, and perform all legal actions and deeds related to the management and control of the Company's assets, including binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, in accordance with the provisions of the Articles of Association;

4. Manage, maintain, and secure the Company's assets and wealth;

5. Direktur Utama dan Direktur berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; dan

6. Memberikan kuasa tertulis kepada satu atau lebih pihak untuk dan atas nama Perseroan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. The President Director and the Directors have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company. If the President Director is unavailable, other members of the Board of Directors have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company; and

6. Grant written power of attorney to one or more parties for and on behalf of the Company to perform certain legal acts in accordance with applicable laws and regulations.

Masa Jabatan Direksi
Board of Directors Term of Office

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Direksi, anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Independen dapat menjabat paling lama selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi sepenuhnya menjadi kewenangan RUPS. Adapun masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi tersebut:

1. Mengundurkan diri;
2. Masa jabatan berakhir;
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
5. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
6. Meninggal dunia dalam masa jabatannya; dan
7. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

In accordance with the Company's Articles of Association and the Board of Directors Charter, members of the Board of Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders (GMS) for a term of five years, without prejudice to the GMS's right to dismiss members of the Board of Directors at any time. Members of the Board of Directors whose terms of office have expired may be reappointed for a subsequent term in accordance with applicable regulations.

Independent Directors may serve for a maximum of two consecutive terms. The appointment and dismissal of members of the Board of Directors are entirely within the authority of the GMS. The Board of Directors member's term of office ends if:

1. The member resigns;
2. The member's term of office ends;
3. The member no longer meets the applicable legal requirements;
4. The member is dismissed based on a decision of the GMS;
5. The member is involved in actions that are detrimental to the Company and/or the state;
6. The member dies during their term of office; and
7. The member is found guilty by a court decision that has permanent legal force.

Dasar Pengangkatan Direksi
Board of Directors Basis of Appointment

Penunjukan Direksi Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui proses yang terstruktur, mulai dari penetapan sumber kandidat, penjaringan, penilaian kelayakan, hingga pengusulan pengangkatan. Setiap calon Anggota Direksi harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan serta melalui proses seleksi melalui fungsi *Talent Pool* yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

The appointment of the Company's Board of Directors is carried out in accordance with applicable regulations through a structured process, starting with determining the source of candidates, followed by recruitment, eligibility assessment, and, finally, the proposal for appointment. Each prospective member of the Board of Directors must meet the established criteria and requirements and undergo a selection process through the Talent Pool function organized by the Shareholders through the Nomination and Remuneration Committee.

Seluruh calon Anggota Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan umum yang mencakup profesionalisme, integritas, kemampuan kepemimpinan, reputasi yang baik, serta dedikasi tinggi dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

All prospective members of the Company's Board of Directors have met the general requirements, which include professionalism, integrity, leadership skills, a good reputation, and a strong dedication to driving the Company's growth and sustainability, in accordance with applicable regulations.

Dasar Hukum Pengangkatan dan Komposisi Direksi
Board of Directors Legal Basis of Appointment and Composition

Komposisi Direksi Perseroan pada 2025 telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mensyaratkan Direksi paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota, dengan 1 (satu) orang di antaranya menjabat sebagai Direktur Utama atau Presiden Direktur. Untuk tahun 2025, Komposisi Direksi Perseroan terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu 1 (satu) orang menjabat sebagai Direktur Utama dan 3 (tiga) orang menjabat sebagai Direktur.

The composition of the Company's Board of Directors in 2025 complies with the provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which requires the Board of Directors to consist of at least 2 (two) members, with 1 (one) serving as President Director. For 2025, the Company's Board of Directors consists of four members: 1 (one) President Director and 3 (three) Directors.

Sedangkan pada tahun tersebut, tidak terdapat perubahan dalam susunan Direksi Perseroan. Adapun komposisi, susunan, dan masa jabatan Direksi Perseroan sepanjang tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

There were no changes to the composition of the Company's Board of Directors during that year. The composition, structure, and terms of office of the Company's Board of Directors throughout 2025 are presented in the table below:

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi
Table: Board of Directors Composition and Basis of Appointment

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Service
Harry M. Nadir	Direktur Utama President Director	Akta Keputusan Rapat No. 32 tanggal 31 Maret 2021 Deed of Meeting Resolution No. 32 dated March 31, 2021	2021 – RUPS Tahun 2026 2021 – 2026 GMS	Pertama First
Wawan Sulistyawan	Direktur Director	Akta Keputusan Rapat No. 32 tanggal 31 Maret 2021 Deed of Meeting Resolution No. 32 dated March 31, 2021	2021 – RUPS Tahun 2026 2021 – 2026 GMS	Pertama First
Bambang Laksanawan	Direktur Director	Akta Keputusan Rapat No. 32 tanggal 31 Maret 2021 Deed of Meeting Resolution No. 32 dated March 31, 2021	2021 – RUPS Tahun 2026 2021 – 2026 GMS	Pertama First
M. Arief Pahlevi Pangerang	Direktur Director	Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 1 tanggal 5 Agustus 2022 Deed of Decision of the Company's Shareholders No. 1 dated August 5, 2022	2022 – RUPS Tahun 2027 2022 – GMS 2027	Pertama First

Program Orientasi Bagi Direksi Baru
Induction Program for New Directors

Setiap anggota Direksi yang baru diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib mengikuti Program Pengenalan (orientasi). Program ini diselenggarakan untuk mendukung proses adaptasi Direksi baru agar dapat berperan secara efektif sebagai bagian dari tim manajemen Perseroan.

Program Pengenalan Direksi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kegiatan usaha Perseroan, arah strategis, serta tanggung jawab yang melekat pada jabatan Direksi. Adapun materi Program Pengenalan bagi Direksi baru antara lain meliputi:

1. Pemahaman mengenai visi, misi, tata nilai, dan strategi Perseroan;
2. Gambaran umum mengenai kegiatan bisnis Perseroan secara menyeluruh;

Every newly appointed member of the Board of Directors, as determined by a General Meeting of Shareholders (GMS), is required to participate in an induction program. This program is designed to support the adaptation of new Directors to serve effectively as part of the Company's management team.

The Board of Directors Induction Program aims to provide a comprehensive understanding of the Company's business activities, strategic direction, and the responsibilities inherent in the position of Director. The Induction Program for new Directors includes the following:

1. Understanding the Company's vision, mission, values, and strategies;
2. General overview of the Company's overall business activities;

3. Rencana jangka menengah dan jangka panjang Perseroan;

4. Kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan; serta

5. Informasi lain yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pelaksanaan Program Pengenalan bagi Direksi yang baru menjabat dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai Perseroan. Program tersebut antara lain meliputi pemaparan oleh unit kerja di seluruh kantor Perseroan, pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi serta Dewan Komisaris lainnya untuk membahas berbagai isu strategis dan operasional Perseroan, penelaahan informasi Perseroan yang tersedia secara elektronik (*online-based presentation*), serta kunjungan ke wilayah operasional dan program-program Perseroan lainnya.

Pada tahun 2025, Perseroan tidak melakukan pengangkatan anggota Direksi baru. Dengan demikian, Program Pengenalan bagi Direksi baru tidak dilaksanakan pada tahun tersebut.

3. The Company's medium- and long-term plans;

4. The Company's operational performance and financial condition; and

5. Other information relevant to the Company's business activities.

The Induction Program for newly appointed Directors is implemented through a series of activities designed to provide a comprehensive understanding of the Company. The program includes presentations by work units across all Company offices, meetings and discussions with other members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to discuss various strategic and operational issues, a review of the Company's electronically available information (online presentations), and visits to operational areas and other Company programs. The Company did not appoint any new member

The Company did not appoint any new members to the Board of Directors in 2025. Therefore, the Induction Program for new Directors was not implemented that year.

Pembidangan Tugas Direksi
Board of Directors' Division of Duties

Pembagian tugas di antara anggota Direksi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengurusan Perseroan berjalan secara lancar, efektif, dan efisien sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing anggota Direksi, baik secara kolektif maupun individual. Sejalan dengan Struktur Organisasi Perseroan terbaru, anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pembidangan tugas sebagai berikut:

The division of duties among the members of the Board of Directors is carried out to ensure the smooth, effective, and efficient implementation of the Company's management functions, in accordance with each member's responsibilities and authorities, both collectively and individually. In line with the Company's latest Organizational Structure, members of the Board of Directors carry out their duties and responsibilities based on the following division of duties:

Tabel Pembidangan Tugas
Table: Board of Directors Division of Duties

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Division of Duties
Harry M. Nadir	Direktur Utama President Director	Secara Umum, Direktur Utama Perseroan mempunyai tugas memimpin dan mengawasi jalannya Perseroan, mengatur strategi, rencana, dan arah Perseroan serta bertanggung jawab penuh atas masa depan Perseroan. Direktur Utama yang membidangi: 1. Corporate Secretary, 2. Corporate Human Resources, 3. Corporate Internal Audit, 4. Corporate Commercial,

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Division of Duties
		5. Direktorat Partnership & Sustainability, serta 6. Direktorat Finance & Investment. In general, the Company's President Director is responsible for leading and overseeing the Company's operations, setting the Company's strategy, plans, and direction, and is fully responsible for the Company's future. The President Director oversees: 1. Corporate Secretary, 2. Corporate Human Resources, 3. Corporate Internal Audit, 4. Corporate Commercial, 5. Directorate of Commodity & Business Development, 6. Directorate of Partnership & Sustainability, and 7. Directorate of Finance & Investment.
Bambang Laksanawan	Direktur Commodity & Business Development Director of Commodity & Business Development	Direktur Commodity & Business Development memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyusun strategi pengembangan bisnis dan produk untuk mendukung sasaran pertumbuhan bisnis Perseroan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Direktur Commodity & Business Development, yang membidangi: 1. Corporate Applied Research & Development, 2. Corporate Tehnical Engineer, 3. Corporate Estate Data Analysis, 4. Corporate Strategy & Business Development, serta 5. Corporate National Project. The Director of Commodity & Business Development has the authority and responsibility to develop business and product development strategies to support the Company's business growth targets in accordance with established regulations. The Director of Commodity & Business Development oversees: 1. Corporate Applied Research & Development, 2. Corporate Tehnical Engineering, 3. Corporate Estate Data Analysis, 4. Corporate Strategy & Business Development, and 5. Corporate National Project.
M. Arief Pahlevi Pangerang	Direktur Partnership & Sustainability Director of Partnership & Sustainability	Direktur Partnership & Sustainability memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola dampak dan tinjauan risiko pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial yang timbul akibat operasi Perseroan. Direktur Partnership & Sustainability, yang membidangi: 1. Corporate Partnership & Community Development, 2. Corporate Sustainability, 3. Corporate Plasma Coordination, 4. Corporate Security System, serta 5. Corporate Institutional Relation. Director of Partnership & Sustainability has the authority and responsibility to manage the impacts and review risks on economic, environmental and social aspects arising from the Company's operations in accordance with applicable laws and regulations.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Division of Duties
		Director of Partnership & Sustainability is in charge of: 1. Corporate Partnership & Community Development, 2. Corporate Sustainability, 3. Corporate Plasma Coordination, and 4. Corporate Security System, and 5. Corporate Institutional Relation.
Wawan Sulistyawan	Direktur Finance & Investment Director of Finance & Investment	Direktur Finance & Investment memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan operasional Keuangan, Pelaporan, Sistem Teknologi Informasi hingga Umum & Pengadaan untuk mendukung tercapainya produktivitas kerja serta sasaran pertumbuhan bisnis Perseroan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Direktur Finance & Investment, yang membidangi: 1. Corporate Reporting & Control, 2. Corporate Finance & Tax, 3. Corporate Investment, 4. Corporate Information System, serta 5. Corporate Procurement. The Director of Partnership & Sustainability has the authority and responsibility to manage the impacts and review the risks arising from the Company's operations across the economic, environmental, and social dimensions. The Director of Partnership & Sustainability oversees: 1. Corporate Reporting & Control, 2. Corporate Finance & Tax, 3. Corporate Investment, 4. Corporate Information System, and 5. Corporate Procurement.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi
Board of Directors' Concurrent Position Policy

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014, anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik diperkenankan untuk merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lainnya. Selain itu, anggota Direksi juga dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, rangkap jabatan yang dijalankan oleh anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Direksi disajikan dalam bagian Profil Direksi pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Based on Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 33/POJK.04/2014, members of the Board of Directors of an Issuer or Public Company are permitted to hold concurrent positions as members of the Board of Directors at a maximum of 1 (one) issuer or other public company. Furthermore, members of the Board of Directors may also hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners at a maximum of 3 (three) issuers or other public companies, provided this does not conflict with applicable laws and regulations.

Throughout 2025, the concurrent positions held by members of the Company's Board of Directors complied with applicable OJK regulations. Information regarding concurrent positions held by members of the Board of Directors is presented in the Board of Directors' Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Independensi Direksi
Board of Directors Independence

Dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, Direksi bertindak secara independen serta terbebas dari pengaruh dan kepentingan pihak mana pun. Seluruh anggota Direksi Perseroan berkomitmen untuk menjalankan tugas secara profesional, penuh integritas, dan bertanggung jawab dengan senantiasa mengedepankan kepentingan Perseroan dan para pemangku kepentingan.

In carrying out its functions and responsibilities, the Board of Directors acts independently and is free from the influence and interests of any party. All members of the Company's Board of Directors are committed to carrying out their duties professionally, with integrity, and responsibly, always prioritizing the interests of the Company and its stakeholders.

Sikap independen tersebut diwujudkan melalui pengambilan keputusan yang objektif dan bebas dari tekanan maupun intervensi pihak mana pun, sehingga Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

This independence is demonstrated through objective decision-making free from pressure or intervention from any party, enabling the Board of Directors to optimally carry out its duties and responsibilities in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi
Conflict of Interest Management by Board of Directors

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpotensi menghadapi kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Oleh karena itu, guna menjaga independensi dan profesionalisme dalam pengambilan keputusan, setiap anggota Direksi wajib menjunjung tinggi etika kerja sebagai berikut:

1. Setiap anggota Direksi setiap waktu harus menghindari berada dalam posisi di mana kepentingan pribadinya dapat berbenturan dengan tugasnya dalam Perseroan;

2. Setiap anggota Direksi wajib segera melaporkan kepada Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya setiap benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dengan Perseroan dan wajib menyediakan seluruh informasi yang relevan dalam laporan tersebut.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors may encounter situations that could give rise to conflicts of interest. Therefore, to maintain independence and professionalism in decision-making, each member of the Board of Directors is required to uphold the following work ethics:

1. Every member of the Board of Directors must at all times avoid being in a position where their personal interests may conflict with their duties in the Company;

2. Each member of the Board of Directors is required to immediately report to the President Director and other members of the Board of Directors any conflict of interest or potential conflict of interest with the Company and is required to provide all relevant information in the report.

Perseroan senantiasa berupaya untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest)* antara Perseroan dan anggota Direksi. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan serta menerapkan ketentuan dan mekanisme yang memadai guna menghindari terjadinya benturan kepentingan di antara anggota Direksi.

The Company consistently strives to prevent conflicts of interest between the Company and its Board of Directors. The Board of Directors is responsible for establishing and implementing adequate provisions and mechanisms to prevent conflicts of interest among its members.

Independensi Direksi merupakan faktor fundamental yang harus senantiasa dijaga agar Direksi dapat bertindak secara objektif dan profesional demi kepentingan terbaik Perseroan secara keseluruhan. Setiap potensi benturan kepentingan yang timbul ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip bisnis dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang diterapkan oleh Perseroan. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat situasi yang mengindikasikan adanya potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Direksi dalam pengambilan keputusannya, serta seluruh anggota Direksi telah menyatakan independensinya dalam Pakta Integritas yang ditandatangani pada awal pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun.

The independence of the Board of Directors is a fundamental factor that must be maintained to enable the Board to act objectively and professionally in the best interests of the Company as a whole. Any potential conflict of interest is handled in accordance with applicable laws and regulations, as well as the Company's business principles and Good Corporate Governance. Throughout 2025, there were no situations indicating a potential conflict of interest affecting the Board of Directors' decision-making, and all members of the Board of Directors have declared their independence in the Integrity Pact signed at the beginning of their appointment. It is renewed at the beginning of each year.

Hubungan Afiliasi Direksi
Board of Directors Affiliated Relationships

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali. Informasi tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

In accordance with the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors have no family relationships with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Controlling Shareholders up to the second degree. This information is presented in the table below:

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi
Table: Board of Directors Affiliated Relationships

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi Board of Directors' Financial and Familial Ties											
		Hubungan Keuangan dengan Financial Ties with						Hubungan Keluarga dengan Familial Ties with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Dewan Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Dewan Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Harry M. Nadir	Direktur Utama President Director		√		√		√		√		√		√
Wawan Sulistyawan	Direktur Director		√		√		√		√		√		√
Bambang Laksanawan	Direktur Director		√		√		√		√		√		√
M. Arief Pahlevi Pangerang	Direktur Director		√		√		√		√		√		√

Kepemilikan Saham Direksi
Board of Directors Shareholding

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham serta melaporkan kepada OJK atas setiap kepemilikan dan/atau perubahan kepemilikan saham Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.

In accordance with Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.04/2017 concerning Reports of Ownership or Changes in Shareholding of Public Companies, members of the Board of Directors are required to disclose shareholding and report to the OJK any ownership and/or changes in the Company's shareholding no later than 3 (three) days after the occurrence of such ownership or any change in the Company's shareholding.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki kepemilikan saham sebesar 5% (lima persen) atau lebih pada Perseroan. Selain itu, anggota Direksi juga tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaan lainnya.

Throughout 2025, no member of the Board of Directors held a shareholding of 5% (five percent) or more in the Company. Furthermore, no member of the Board of Directors owned shares in other companies.

Tabel Kepemilikan Saham Perseroan oleh Direksi
Table of Shareholding in the Company by the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Shareholding	
		Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Saham Shares Percentage
Harry M. Nadir	Direktur Utama President Director	6.535.948	0,05%
Wawan Sulistyawan	Direktur Director	4.159.239	0,03%
Bambang Laksanawan	Direktur Director	4.059.239	0,03%
M. Arief Pahlevi Pangerang	Direktur Director	4.159.239	0,03%

Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala. Mengacu pada ketentuan Piagam Direksi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk tertanggal 21 Maret 2022 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, Direksi wajib mengadakan rapat internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

As part of carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors is required to hold regular meetings. Pursuant to the Board of Directors Charter of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dated March 21, 2022, and Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014, the Board of Directors is required to hold internal meetings at least once a month.

Selain itu, setiap kebijakan dan keputusan strategis yang berkaitan dengan Perseroan ditetapkan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

In addition, all policies and strategic decisions relating to the Company are determined through Board of Directors meetings, taking into account applicable laws and regulations and the principles of Good Corporate Governance.

Direksi juga berwenang mengundang departemen atau unit kerja terkait untuk menghadiri Rapat Direksi. Selain itu, Direksi juga dapat mengundang anggota Dewan Komisaris guna memberikan masukan dan/atau melakukan diskusi dalam Rapat Direksi sebagai bahan pertimbangan bagi Direksi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

The Board of Directors also has the authority to invite relevant departments or work units to attend Board of Directors Meetings. Furthermore, the Board of Directors may invite members of the Board of Commissioners to provide input and/or participate in discussions at Board of Directors Meetings, which the Board of Directors will consider in carrying out its functions and responsibilities.

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali serta rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam rapat tersebut disajikan sebagai berikut:

Throughout 2025, the Board of Directors held 12 (twelve) internal meetings and 9 (nine) joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners. The frequency and level of attendance of each member of the Board of Directors at these meetings are presented below:

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi
Table: Frequency and Attendance at Board of Directors Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Direksi Board of Directors Internal Meetings			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris Joint Meeting of Board of Directors and Board of Commissioners		
		Jumlah Rapat Number of meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%	Jumlah Rapat Number of meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Harry Mohamad Nadir	Direktur Utama President Director	12	12	100%	9	9	100%
Wawan Sulistyawan	Direktur Director	12	12	100%	9	9	100%
Bambang Laksanawan	Direktur Director	12	12	100%	9	9	100%
Mohammad Arief Pahlevi Pangerang	Direktur Director	12	12	100%	9	9	100%

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi wajib menyelenggarakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pursuant to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Board of Directors is required to hold regular joint meetings with the Board of Commissioners at least once every 4 (four) months.

Pengembangan Kompetensi Direksi
Board of Directors' Competency Development

Perseroan menyediakan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi untuk melakukan pengembangan kompetensi dan memperluas wawasan, khususnya

The Company provides all members of the Board of Directors with ample access and opportunities to develop their competencies and broaden their horizons, particularly in the oil palm plantation and

yang berkaitan dengan bidang perkebunan kelapa sawit dan industri kelapa sawit, serta memperoleh pengetahuan dan informasi terkini melalui berbagai media, antara lain forum diskusi, seminar, webinar, dan kegiatan pengembangan lainnya.

palm oil industry sectors. They also obtain the latest knowledge and information through various media, including discussion forums, seminars, webinars, and other development activities.

Sepanjang tahun 2025, anggota Direksi telah mengikuti berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagaimana diungkapkan dalam bagian Profil Direksi pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Throughout 2025, members of the Board of Directors participated in various training and competency development programs, as disclosed in the Directors' Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi
Board of Directors' Performance Assessment Procedures

Dalam menjalankan tugasnya, kinerja Direksi dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan visi dan tujuan Perseroan. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan dalam Laporan Manajemen, sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Prosedur Pelaksanaan Penilaian Direksi.

In carrying out its duties, the Board of Directors' performance is evaluated to ensure alignment with the Company's vision and objectives. This evaluation is conducted based on the Key Performance Indicators (KPIs) established in the Management Report, as approved by the Board of Commissioners in the Board of Directors' Assessment Implementation Procedures.

Setiap tahun, kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris berdasarkan kriteria penilaian yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Selain itu, Direksi juga melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) atas kinerjanya dengan mengacu pada pencapaian tugas dan target manajemen yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Each year, the Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors based on the assessment criteria recommended by the Nomination and Remuneration Committee. In addition, the Board of Directors also conducts a self-assessment of its performance based on the achievement of management duties and targets established at the General Meeting of Shareholders (GMS).

Pihak Penilaian Kinerja Direksi
Board of Directors' Performance Assessment Party

Untuk penilaian kinerja tersebut selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.

The performance assessment is subsequently approved by the Board of Commissioners and evaluated by Shareholders at the GMS.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi
Board of Directors' Performance Assessment Criteria

Evaluasi kinerja Direksi juga mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Kriteria penilaian kinerja Direksi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

The evaluation of the Board of Directors' performance also takes into account the implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities in accordance with applicable laws and regulations, as well as the Company's Articles of Association. The established criteria for assessing the Board of Directors' performance are as follows:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Direktur;
2. Meninjau, memeriksa, dan menyetujui rencana kerja tahunan Perseroan;
3. Melakukan tugas khusus yang diberikan kepadanya sesuai dengan Anggaran Dasar, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Kinerja keuangan dan bisnis Perseroan;
5. Implementasi GCG oleh masing-masing Direktur;
6. Tingkat kehadiran masing-masing Direktur di rapat Direksi; serta
7. Keterlibatan setiap Direktur dalam tugas-tugas tertentu.

1. Implementation of the duties and functions of each Director;
2. Reviewing, examining, and approving the Company's annual work plan;
3. Performing specific duties assigned to them in accordance with the Articles of Association, applicable laws and regulations, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders;
4. The Company's financial and business performance;
5. Implementation of GCG by each Director;
6. Attendance of each Director at Board of Directors' meetings; and
7. Involvement of each Director in specific tasks.

Pihak Melakukan Penilaian

Penilaian atas kinerja Direksi juga dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali. Dalam melakukan penilaian dan evaluasi tersebut, Pemegang Saham Pengendali turut mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

Party Conducting Assessment

The Controlling Shareholder also assesses the Board of Directors' performance. In conducting the assessment and evaluation, the Controlling Shareholders also consider the recommendations of the Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi
Board of Directors' Performance Assessment Results

Pada RUPS Tahun 2025, hasil penilaian terhadap Direksi menunjukkan bahwa Pemegang Saham telah menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang memuat kondisi operasional Perseroan serta capaian kinerja yang telah diraih. Atas dasar tersebut, RUPS memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi atas pengurusan dan operasional Perseroan selama tahun buku 2024.

Sementara itu, hasil penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja masing-masing anggota Direksi menunjukkan bahwa seluruh Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hasil penilaian kinerja tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan kebijakan remunerasi dan proses nominasi bagi masing-masing anggota Direksi pada periode berikutnya.

At the 2025 GMS, the Board of Directors' assessment indicated that Shareholders had accepted the Company's Annual Report for the 2024 financial year, which outlined the Company's operational conditions and performance achievements. Based on this, the GMS granted the Board of Directors full release and discharge (acquit et de charge) from all responsibilities for the management and operations of the Company during the 2024 financial year.

Meanwhile, the Board of Commissioners' assessment of each member of the Board of Directors indicates that all Directors have satisfactorily performed their duties and responsibilities. These performance assessments will then serve as a basis for determining the remuneration policy and nomination process for each member of the Board of Directors for the following term.

Mekanisme Penentuan Remunerasi dan Nominasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Mechanism for Determining Board of Directors and Board of Commissioners' Remuneration and Nomination

Kebijakan dan Prosedur Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Remuneration Policy and Procedures for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners

Kebijakan Nominasi dan Remunerasi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak memperoleh remunerasi dari Perseroan. Penetapan besaran remunerasi dilakukan melalui RUPS Tahunan dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi setiap tahunnya. Sedangkan mekanisme penetapan usulan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk's Nomination and Remuneration Policy is based on Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. Based on this provision, each member of the Board of Commissioners and Board of Directors is entitled to receive remuneration from the Company. Remuneration is determined at the Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which authorizes the Board of Commissioners to set remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors annually. The mechanism for determining the proposed remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

Mekanisme Penetapan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Mechanism for Determining Proposed Remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners



Bagi Perseroan, pemberian remunerasi merupakan bentuk penghargaan yang wajar atas kinerja dan kontribusi Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Remunerasi tersebut diharapkan dapat menjadi sarana motivasi untuk mendorong peningkatan kinerja, profesionalisme, serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan Perseroan di masa mendatang.

For the Company, remuneration is a fair form of appreciation for the performance and contribution of the Board of Commissioners and Directors in carrying out their duties and responsibilities. This remuneration is expected to serve as a motivating factor to improve performance and professionalism, as well as to support the Company's future growth and sustainability.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration

Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan penetapan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas Pasal 113;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Surat Keputusan Nomor 01/SK-KNM/MKTR/IV/2025 tanggal 23 April 2025 tentang Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk;
4. Anggaran Dasar Perseroan.

The Company has a Nomination and Remuneration Committee to oversee the implementation of remuneration policies for the Board of Commissioners and the Board of Directors. The remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors refers to:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Article 113;
2. Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies;
3. Decree Number 01/SK-KNM/MKTR/IV/2025 dated April 23, 2025, concerning the Remuneration Policy of the Boards of Commissioners and Directors and PT Menthobi Karyatama Raya Tbk;
4. The Company's Articles of Association.

Kriteria Penentuan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Criteria for Determining Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration

Dalam menetapkan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Penetapan remunerasi tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain:

In determining the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company refers to the provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. The determination of remuneration takes into account several indicators, including:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. *Peer group*;
4. Tingkat inflasi;
5. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan;
6. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Penetapan Remunerasi:

1. Pertumbuhan dan pengembangan usaha MKTR membawa dampak pada bertambahnya kompleksitas dari pemegang jabatan;

2. Sejalan dengan pertumbuhan, MKTR memastikan remunerasi yang dapat menunjang visi dan misi yang hendak dicapai;

3. Surat keputusan Dewan Komisaris;

4. Memperhatikan kinerja keuangan dan operasional Perseroan;

5. Mempertimbangkan profil risiko dan kondisi usaha Perseroan;

6. Mengacu pada prinsip kewajaran serta praktik industri yang berlaku.

Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Fungsi remunerasi Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris, dengan penetapan besaran remunerasi diusulkan melalui rapat Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan hasil kinerja dan pencapaian target Perseroan, tingkat pendapatan pada tahun sebelumnya, beban tugas dan tanggung jawab, serta tingkat remunerasi eksekutif pada perusahaan sejenis. Selanjutnya, Dewan Komisaris mengusulkan besaran remunerasi tahunan tersebut kepada para Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan).

Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi telah tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 01/SK-KNM/MKTR/IV/2025 tanggal 23 April 2025 tentang Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk adalah sebagai berikut:

1. Business scale;
2. Business complexity;
3. Peer group;
4. Inflation rate;
5. The Company's financial condition and capacity;
6. Other relevant factors that must not conflict with applicable laws and regulations.

Remuneration Determination Principles:

1. MKTR's business growth and development have resulted in increased complexity for position holders;

2. MKTR, in line with its growth, ensures remuneration that supports the vision and mission it seeks to achieve;

3. Decree of the Board of Commissioners;

4. Taking into account the Company's financial and operational performance;

5. Considering the Company's risk profile and business conditions;

6. Referring to the principle of fairness and prevailing industry practices.

Procedures for Determining Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration

The Board of Commissioners carries out the Company's remuneration function. The amount of remuneration is proposed through a Board of Commissioners meeting based on consideration of the Company's performance results and target achievement, revenue levels in the previous year, duties and responsibilities, and executive remuneration levels at similar companies. The Board of Commissioners then proposes the annual remuneration to the Shareholders for approval at the Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

The procedure for determining the remuneration of the Boards of Commissioners and Directors has been stated in Decree Number 01/SK-KNM/MKTR/IV/2025 dated April 23, 2025, concerning the Remuneration Policy of the Boards of Commissioners and Directors and PT Menthobi Karyatama Raya Tbk as follows:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan kajian dan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Dewan Komisaris;

2. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;

3. Dewan Komisaris menetapkan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi secara proporsional berdasarkan hasil evaluasi kinerja;

4. Dewan Komisaris mengusulkan nilai remunerasi tahunan kepada para pemegang saham melalui RUPS; dan

5. RUPS memutuskan nilai remunerasi tahunan bagi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perseroan juga menetapkan pada prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi telah tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 03/SK-KNM/MKTR/IV/2025 tanggal 23 April 2025 tentang Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dengan menyatakan bahwa prosedur perubahan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, apabila terjadi perubahan kinerja perusahaan maupun tidak tercapainya evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Untuk keputusan RUPS Tahunan tahun 2025 menetapkan bahwa remunerasi Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk bruto per bulan. RUPS juga menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS antara lain meliputi:

a. Paket remunerasi untuk Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, bonus, dan imbalan pascakerja;

1. The Nomination and Remuneration Committee conducts a review and submits written recommendations to the Board of Commissioners;

2. The Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors;

3. The Board of Commissioners determines the amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors proportionally based on the results of the performance evaluation;

4. The Board of Commissioners proposes the annual remuneration value to shareholders through the GMS;

5. The GMS determines the annual remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with applicable regulations.

The Company also establishes a procedure for determining the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors based on risk in accordance with the Decree of the Board of Directors/Decree of the Nomination and Remuneration Committee Number 03/SK-KNM/MKTR/IV/2025 dated April 23, 2025, by stating that the procedure for changing the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out if there is a change in the Company's performance or the evaluation of the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors is not achieved.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders determined that the remuneration for the Board of Commissioners would be paid in gross monthly installments. The meeting also approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration package for the Company's Board of Directors for the 2025 financial year, taking into account input from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

The remuneration policies and other benefits established by the General Meeting of Shareholders include:

a. The remuneration package for the Board of Directors consists of salary, allowances, bonuses, and post-employment benefits;

b. Paket remunerasi untuk Dewan Komisaris meliputi gaji pokok, namun tidak menerima bonus jangka pendek, bonus saham, ataupun opsi saham; serta

c. Fasilitas lain dalam bentuk natura berupa perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya.

b. The remuneration package for the Board of Commissioners includes a basic salary, but does not include short-term bonuses, stock bonuses, or stock options; and

c. Other in-kind facilities, such as housing, transportation, and health insurance.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terdiri dari:

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure

The remuneration structure for the Company's Board of Commissioners and Directors consists of:

Tunjangan-tunjangan dalam Bentuk Natura
In-Kind Benefits

Tunjangan-tunjangan lain
Other Benefits

Gaji
Salary

Bonus Diskresioner
Discretionary Bonuses

Berdasarkan hasil RUPST pada 30 April 2025, struktur remunerasi beserta komponen dan jumlah nominal masing-masing untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama Tahun Buku 2025 disampaikan sebagai berikut:

Based on the results of the AGM on April 30, 2025, the remuneration structure, including its components and respective nominal amounts for all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2025 Financial Year, is as follows:

Tabel Komponen dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025
Table: Components and Amount of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Dewan Direksi Board of Directors
Honorarium	Gaji bulanan Monthly salary
Bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk *non* - natura Bonuses, regular allowances, and other non-in-kind facilities	Bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non – natura termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) Bonuses, routine allowances, and other non-in-kind facilities, including religious holiday allowance (THR)

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Dewan Direksi Board of Directors
Fasilitas lainnya dalam bentuk *non* - natura Other non-in-kind facilities	Fasilitas lainnya dalam bentuk non - natura Other non-in-kind facilities

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah nominal remunerasi yang diterima oleh Direksi selama tahun 2025 disampaikan pada tabel berikut:

Nominal Amount/Components of Remuneration for the Board of Commissioners

The nominal amount of remuneration received by the Board of Directors in 2025 is presented in the following table:

Tabel Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Komisaris
Table: Nominal Amount/Components of Remuneration for the Board of Commissioners

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya Types of Remuneration and Other facilities	Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun Amount received in 1 (one) year	
	Orang People	Jumlah (Rupiah) Amount (Rupiah)
Remunerasi (Gaji, Bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, routine allowance, and other non-in-kind facilities)		
Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi dan kesehatan dan sebagainya): 1. yang dapat dimiliki 2. yang tidak dapat dimiliki Other non-in-kind facilities (housing, transportation, and health insurance, etc.): 1. which can be owned 2. which cannot be owned	3	Rp2.496.000.000
Total	**3**	**Rp2.496.000.000**

Remunerasi Dewan Komisaris dalam satu tahun dikelompokkan ke dalam kisaran tingkat penghasilan. Rinciannya disampaikan dalam tabel berikut:

The remuneration of the Board of Commissioners for each year is grouped into income ranges. The details are presented in the following table:

Tabel Kelompok Remunerasi Dewan Komisaris Berdasarkan Tingkat Penghasilan
Table: Board of Commissioners Remuneration Group Based on Income Level

Jumlah Remunerasi*) Amount of Remuneration *)	Jumlah Komisaris Number of Board of Commissioners
Di atas Rp2 Miliar Above Rp2 Billion	-
Di atas Rp1 Miliar - Rp2 Miliar Above Rp1 Billion - Rp2 Billion	3 orang | people
Di atas Rp500 juta - Rp1 Miliar Above Rp500 million - Rp1 Billion	-
Rp500 juta kebawah Rp500 million and below	-

*) yang diterima dalam bentuk tunai.
*) received in cash.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Direksi

Jumlah nominal remunerasi yang diterima oleh Direksi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nominal Amount/Components of Board of Directors' Remuneration

The nominal amount of remuneration received by the Board of Directors in 2025 is as follows:

Tabel Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Direksi
Table: Nominal Amount/Components of Board of Directors' Remuneration

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya Types of Remuneration and Other facilities	Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun Amount received in 1 (one) year	
	Orang People	Jumlah (Rupiah) Amount (Rupiah)
Remunerasi (Gaji, Bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, routine allowance, and other non-in-kind facilities)		
Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi dan kesehatan dan sebagainya): 1. yang dapat dimiliki 2. yang tidak dapat dimiliki Other non-in-kind facilities (housing, transportation, and health insurance, etc.): 1. which can be owned 2. which cannot be owned	4	Rp10.934.776.121
Total	**4**	**Rp 10.934.776.121**

Remunerasi Dewan Direksi dalam satu tahun dikelompokkan ke dalam kisaran tingkat penghasilan. Rinciannya disampaikan dalam tabel berikut:

The Board of Directors' remuneration for a given year is grouped into income ranges. The details are presented in the following table:

Tabel Kelompok Remunerasi Dewan Direksi Berdasarkan Tingkat Penghasilan
Table: Board of Directors' Remuneration Group Based on Income Level

Jumlah Remunerasi*) Amount of Remuneration *)	Jumlah Direksi Number of Board of Diretors
Di atas Rp2 Miliar Above Rp2 Billion	-
Di atas Rp1 Miliar - Rp2 Miliar Above Rp1 Billion - Rp2 Billion	3 orang | people
Di atas Rp500 juta - Rp1 Miliar Above Rp500 million - Rp1 Billion	-
Rp500 juta kebawah Rp500 million and below	-

*) yang diterima dalam bentuk tunai.
*) received in cash.

Kebijakan dan Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination Policy and Procedures for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners

Secara umum, kebijakan terkait nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, termasuk prosedur serta kriteria yang digunakan dalam pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi baru. Prosedur nominasi yang dijalankan Perseroan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In general, policies related to the nomination of members of the Board of Commissioners and Board of Directors are formulated by the Nomination and Remuneration Committee, including the procedures and criteria for appointing new candidates to the Board of Commissioners and/or Board of Directors. The Company's nomination procedures consistently adhere to the principles of Good Corporate Governance (GCG) in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, as well as applicable laws and regulations.

Kriteria nominasi bagi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi disusun dengan memperhatikan ketentuan dalam kebijakan internal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan Anggaran Dasar, fungsi nominasi Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan oleh RUPS. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus mempertimbangkan rekomendasi yang dihasilkan dari rapat Dewan Komisaris dengan agenda nominasi. Apabila terdapat benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris terkait usulan tersebut, maka benturan kepentingan tersebut wajib diungkapkan secara transparan.

The nomination criteria for prospective members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are formulated in accordance with the provisions of internal policies, applicable laws and regulations, and the Company's Articles of Association. In accordance with the Articles of Association, the nomination function of the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out by the GMS. Proposals for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors to the GMS must take into account the recommendations resulting from the Board of Commissioners meeting with the nomination agenda. If there is a conflict of interest among the Board of Commissioners regarding the proposal, it must be disclosed transparently.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS melalui proses pencalonan berdasarkan pedoman yang berlaku. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang disampaikan dalam kriteria dan persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi.

The appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is carried out in accordance with the principles of Good Corporate Governance: professionalism, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness. The GMS appoints members of the Board of Directors and Board of Commissioners through a nomination process in accordance with applicable guidelines. The requirements that must be met by all prospective members of the Board of Directors and Board of Commissioners are stated in the criteria and requirements for the Board of Commissioners and Board of Directors.

Perseroan juga telah menyusun program untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin melalui pengembangan kompetensi secara menyeluruh. Calon pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis (*hard skill*) yang memadai, tetapi juga kemampuan perilaku dan kepemimpinan (*soft skill*) yang cukup untuk menduduki jabatan yang diinginkan.

The Company has developed a program to prepare future leaders through comprehensive competency development. Prospective leaders are required to possess not only adequate technical abilities (hard skills), but also behavioral and leadership skills (soft skills) sufficient to hold their desired positions.

Kriteria Persyaratan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Kriteria Persyaratan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Untuk kriteria dan persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi yakni sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris:
    a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik, serta cakap melakukan perbuatan hukum;
    b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
    c. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
    d. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah hingga menyebabkan suatu Perusahaan menjadi pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan, pertanggungjawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban, dan pernah tidak menyampaikan laporan tahunan atau laporan keuangan kepada OJK;
    e. Mempunyai komitmen terhadap pengembangan Perseroan;
    f. Mempunyai komitmen dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    g. Memiliki kompetensi yang layak dan sesuai dengan kedudukannya serta berupaya mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

The criteria and requirements for the Board of Commissioners and Directors are as follows:

1. Board of Commissioners:
    a. Possess good moral character, ethics, and integrity, and be competent in carrying out legal acts;
    b. Possess a commitment to complying with laws and regulations;
    c. Possess knowledge and/or expertise in the areas required by the Company;
    d. In the 5 (five) years before appointment and during his/her term of office: they have never been declared bankrupt or been a commissioner or director found guilty or co-culpable for causing a company to go bankrupt; they have never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who, during their term of office, failed to hold an annual GMS, whose accountability report was not accepted by the GMS or who failed to provide an accountability report, and who failed to submit an annual report or financial report to the OJK;
    e. Commit to the development of the Company;
    f. Commit to complying with applicable laws and regulations;
    g. Possess appropriate competencies commensurate with their position and strive to implement these competencies in carrying out their duties and responsibilities.

2. Direksi:

   a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik, serta cakap melakukan perbuatan hukum;

   b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

   c. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;

   d. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit; tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, tidak dalam pengampuan, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan, pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi pernah tidak diterima RUPS, pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

   e. Persyaratan tambahan bagi Direktur Independen:

      i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan sebagai Direktur Independen;

      ii. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perseroan;

      iii. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;

2. Board of Directors:

   a. Possess good moral character, ethics, and integrity, and are competent to perform legal acts;

   b. Commit to complying with laws and regulations;

   c. Possess knowledge and/or expertise in the fields required by the Company;

   d. In the 5 (five) years before appointment and during his/her term of office: never been declared bankrupt, never been a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who was found guilty of causing a Company to be declared bankrupt; never been dishonorably discharged from a job, never been convicted of committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector, not under guardianship, they have never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who, during their term of office, failed to hold an annual GMS, whose accountability report was not accepted by the GMS, never caused a company that obtained a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority failed to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to the Financial Services Authority;

   e. Additional requirements for Independent Directors:

      i. Must not have any affiliated relationship with the Company's Controlling Shareholders for at least 6 (six) months before appointment as an Independent Director;

      ii. Must not have any affiliation with any other Commissioner or Director of the Company;

      iii. Must not serve concurrently as a Director at another company;

iv. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan sebagai Direktur Independen.

iv. Must not be an Insider at any capital market supporting institution or profession whose services the Company uses during the 6 (six) months before appointment as an Independent Director.

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak membentuk Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dikarenakan produk dan jasa yang dihasilkan, sistem manajemen, pengelolaan dana, serta kebijakan investasi Perseroan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Throughout 2025, the Company did not establish a Sharia Supervisory Board. This was because the Company's products and services, management systems, fund management, and investment policies did not fully implement Sharia principles.

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris
Organs and Committees Under Board of Commissioners

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Penunjang, yaitu Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh komite tersebut dipimpin oleh Komisaris Independen. Uraian masing-masing komite adalah sebagai berikut:

In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners is assisted by the Supporting Committees: the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee. Independent Commissioners lead all committees. The description of each committee is as follows:

Komite Audit
Audit Committee

Komite Audit berperan dalam membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Perseroan dikelola secara konsisten dengan menerapkan manajemen yang sehat, serta mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in carrying out its oversight function, specifically by ensuring that the Company's business activities are managed consistently, implementing healthy management practices, and complying with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and applicable laws and regulations.

Selain itu, Komite Audit juga memberikan pandangan dan pendapat yang bersifat independen kepada Dewan Komisaris atas laporan maupun hal-hal lain yang disampaikan oleh Direksi. Komite Audit terdiri dari para profesional independen dan diketuai oleh Komisaris Independen, serta menjalankan tugas

The Audit Committee also provides independent views and opinions to the Board of Commissioners on reports and other matters submitted by the Board of Directors. The Audit Committee is composed of independent professionals and is chaired by an Independent Commissioner. It carries out its duties

dan tanggung jawabnya secara independen sesuai dengan Piagam Komite Audit, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Pembentukan Komite Audit Perseroan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada 21 Maret 2022. Piagam Komite Audit tersebut menjadi pedoman kerja Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan independen. Piagam Komite Audit mengatur antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Pendahuluan;
2. Organisasi Komite Audit;
3. Hubungan Komite Audit dengan berbagai pihak terkait;
4. Pedoman kerja; dan
5. Penutup.

Kriteria Pengangkatan Anggota Komite Audit

Dalam Piagam Komite Audit, Perseroan menetapkan persyaratan untuk anggota Komite Audit, antara lain:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan/pemeriksaan;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
5. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau

and responsibilities independently in accordance with the Audit Committee Charter, the Company's Articles of Association, and applicable regulations.

Organs and Committees Under Board of Commissioners

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in carrying out its oversight function, specifically by ensuring that the Company's business activities are managed consistently, implementing healthy management practices, and complying with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and applicable laws and regulations.

The Audit Committee also provides independent views and opinions to the Board of Commissioners on reports and other matters submitted by the Board of Directors. The Audit Committee is composed of independent professionals and is chaired by an Independent Commissioner. It carries out its duties and responsibilities independently in accordance with the Audit Committee Charter, the Company's Articles of Association, and applicable regulations.

1. Introduction;
2. Audit Committee Organization;
3. Audit Committee Relations with Various Parties;
4. Work Guidelines; and
5. Closing.

Criteria for Appointment of Audit Committee Members

In the Audit Committee Charter, the Company establishes the requirements for Audit Committee members, including:

1. Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/inspection;
2. Do not have any personal interests/connections that could have a negative impact or conflict of interest in the Company;
3. Able to communicate effectively;
4. Can provide sufficient time to complete their tasks; and
5. One of the members must have an educational background or expertise in accounting

memiliki keahlian dibidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perseroan.

Ketentuan Masa Jabatan Komite Audit

Masa Jabatan Komite Audit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menyebutkan masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Sesuai dengan Pedoman Komite Audit Perseroan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun masa tugas.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit seperti yang tercantum dalam Piagam Komite Audit, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa serta menelaah hasil kerjanya;
5. Menelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

or finance, and one must understand the Company's industry/business.

Audit Committee Term of Office

The term of office of the Audit Committee is regulated in Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee, which states that the term of office of Audit Committee members may not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected for only 1 (one) subsequent term. In accordance with the Company's Audit Committee Guidelines, the term of office of Audit Committee members from independent parties is a maximum of 3 (three) years. It may be extended for another 2 (two) years.

Audit Committee Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Audit Committee, as stated in the Audit Committee Charter, include:

1. Reviewing financial information that will be issued by the Public Company to the public and/or authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the Company's financial information;
2. 2. Review compliance with laws and regulations relating to the Company's activities;
3. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Accountant regarding the services provided;
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of external auditors based on independence, scope of assignment, and service fees, and review the results of their work;
5. Review the implementation of audits by internal auditors and supervise the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on internal auditor findings;

6. Melakukan penelaahan terhadap manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;

9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; serta

10. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

Tanggung Jawab Komite Audit Dalam Pemberian Rekomendasi atas Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit merekomendasikan penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit terhadap Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Komite Audit menyampaikan rekomendasi terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Dasar Hukum Penunjukan Komite Audit

Pada tahun 2025, keanggotaan Komite Audit Perseroan telah dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK/002/Kom-MKTR/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Mentobi Karyatama Raya Tbk.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan salah satu

6. Review the risk management carried out by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;

7. Review complaints relating to the Company's accounting and financial reporting processes;

8. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest within the Company;

9. Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information; and

10. Carry out other supervisory tasks as requested by the Board of Commissioners.

Audit Committee Responsibilities in Providing Recommendations on the External Auditors' Appointment and Dismissal

In carrying out its duties, the Audit Committee recommends the appointment and dismissal of external auditors based on the Evaluation Report on the Implementation of Audit Services for Annual Historical Financial Information by Public Accountants and/or Public Accounting Firms. The Audit Committee submitted recommendations regarding the appointment of Public Accountants and/or Public Accounting Firms.

Legal Basis for Audit Committee Appointment

In 2025, the membership of the Company's Audit Committee was stipulated in the Decree of the Board of Commissioners Number SK/002/Kom-MKTR/III/2022 dated March 21, 2022, concerning the Appointment of the Chairman and Members of the Audit Committee of PT Mentobi Karyatama Raya Tbk.

Audit Committee Structure, Membership, and Expertise

Based on Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee, the Audit Committee must consist of at least 3 (three) members, one of

di antaranya merupakan Komisaris Independen Perseroan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota lainnya berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Mengacu pada ketentuan tersebut, Perseroan telah memenuhi ketentuan komposisi keanggotaan Komite Audit, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan diketuai oleh Komisaris Independen. Komposisi anggota Komite Audit seperti yang terlampir pada Surat Keputusan Penunjukkan Komite Audit Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

whom must be an Independent Commissioner of the Company. At least 2 (two) members must be independent parties not affiliated with the Company.

In accordance with this provision, the Company has complied with the requirements for Audit Committee membership composition: it consists of 3 (three) members and is chaired by an Independent Commissioner. The composition of the Audit Committee, as attached to the Decree on the Company's Audit Committee Appointment as of December 31, 2025, is as follows:

Tabel Struktur Keanggotaan Komite Audit
Table: Audit Committee Membership Structure

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Periode Jabatan Period of Service	Masa Jabatan Term of Office
Bambang Widodo	Ketua Komite Committee Chairman	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK/002/Kom-MKTR/III/2022 Board of Commissioners Decree Number SK/002/Kom-MKTR/III/2022	Pertama First	Mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris di Perseroan. In accordance with the term of office of the Board of Commissioners in the Company.
Lilik Qusairy	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK/013/Kom-MKTR/III/2023 Board of Commissioners Decree Number SK/013/Kom-MKTR/III/2023	Pertama First	2023 – 2026
Tulus Setiawan	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK 007/Kom-MKTR/V/2022 Board of Commissioners Decree Number SK 007/Kom-MKTR/V/2022	Pertama First	2022 – 2025

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit MKTR disampaikan pada tabel berikut:

Audit Committee Educational Qualifications and Work Experience

The educational qualifications and work experience of the Chairperson and Members of the MKTR Audit Committee are presented in the following table:



Bambang Widodo

Ketua Komite Audit
Chairperson of Audit Committee

Masa Jabatan Term of Office	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK/002/Kom-MKTR/III/2022.	Board of Commissioners Decree Number SK/002/Kom-MKTR/III/2022
Untuk profil domisili, kewarganegaraan, usia, serta pendidikan, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. For a complete profile regarding residence, citizenship, age, and educational background, please see the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.		
Sertifikasi Certification	Indonesia Palm Oil Conference, IPOC (2025).	Indonesia Palm Oil Conference, IPOC (2025).
Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan Work Experience and Concurrent Positions:	Telah disampaikan pada bab Profil Perusahaan dalam Sub bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	This has been presented in the Company Profile chapter of the Board of Commissioners Profile subchapter of this Annual Report.
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite lainnya, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	No affiliations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, members of other Committees, or Majority and Controlling Shareholders.



Lilik Qusairy

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK/013/Kom-MKTR/III/2023.	Board of Commissioners Decree No. SK/013/Kom-MKTR/III/2023
Domisili Residence	Jakarta.	Jakarta.
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia.	Indonesian Citizen
Usia Age	62 tahun pada akhir tahun buku 2025.	62 years old at the end of fiscal year 2025
Pendidikan Education	Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1985.	Bachelor of Agriculture, Bogor Agricultural University – 1985
Pengalaman Kerja Work Experience	• Komisaris PT Kartini Sentra Medika (Tahun 2017) • General Manager PT Graha Dura Leidong Prima (Tahun 2016) • Direktur dan Business Unit Head PT Guntung Idamannusa (Tahun 2012) • General Manager PT Guntung idamannusa (Tahun 2007); • General Manager PT Sumatera Timur Indonesia (Tahun 2002); • General Manager PT Sarana Rekreasi Alampermai (Tahun 2000); • Wakil General Manager di PT Riau Sakti United Plantations (Tahun 1999); serta • Kepala riset dan pengembangan PT Riau Sakti Transmandiri (Tahun 1992).	• Commissioner at PT Kartini Sentra Medika (2017); • General Manager at PT Graha Dura Leidong Prima (2016); • Director and Business Unit Head at PT Guntung Idamannusa (2012); • General Manager at PT Guntung Idamannusa (2007); • General Manager at PT Sumatera Timur Indonesia (2002); • General Manager at PT Sarana Rekreasi Alampermai (2000); • Deputy General Manager at PT Riau Sakti United Plantations (1999); • Head of Research and Development at PT Riau Sakti Transmandiri (1992).

Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Menjabat sebagai Direktur PT Sarana Rekreasi Alam Permai (Tahun 2000 – sekarang); serta • Sebagai Head Advisor agronomi, Riset, Seed Garden dan VGM Operasional di PT Riau Sakti United Plantations, Perkebunan kelapa, Nanas dan Kelapa Sawit (Tahun 2017 – sekarang).	• Director at PT Sarana Rekreasi Alam Permai (2000–present); • Head Advisor for Agronomy, Research, Seed Garden, and Operational VGM at PT Riau Sakti United Plantations, a Coconut, Pineapple, and Oil Palm Plantation (2017–present).
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi General Manager Development Program (2016); • Sertifikasi Integrated Management System (2011); • Sertifikasi Agronomi tanaman Kelapa Sawit , Kelapa Hybrida dan Riset Tanaman di CIRAD (Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement), Montpellier France.	• General Manager Development Program Certification (2016); • Integrated Management System Certification (2011); • Agronomy Certification for Oil Palm, Hybrid Coconut, and Plant Research at CIRAD (Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement), Montpellier, France.
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite lainnya, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	No affiliations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, members of other Committees, or Major and Controlling Shareholders.



Tulus Setiawan

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK 007/Kom-MKTR/V/2022	Board of Commissioners Decree No. SK 007/Kom-MKTR/V/2022
Domisili Residence	Jakarta.	Jakarta.
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia.	Indonesian Citizen
Usia Age	55 tahun pada akhir tahun buku 2025.	55 years old by the end of the 2025 fiscal year
Pendidikan Educational Background	Meraih gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Akuntansi dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 1996.	Bachelor of Accounting, Faculty of Economics, Sebelas Maret University – 1996
Pengalaman Kerja Work Experience	• Manajer di KAPMMA Yogyakarta Periode 2014 – 2015; • Partner Auditor di KAP Wartono Periode 2012 – 2013; • Manager Consulting di KAP Busroni Payamta Periode 2010 – 2011; dan • Direktur di TS Consulting Manado Periode 2005 – 2010.	• Manager of KAPMMA Yogyakarta from 2014 to 2015; • Partner Auditor at KAP Wartono from 2012 to 2013; • Consulting Manager at KAP Busroni Payamta from 2010 to 2011; • Director of TS Consulting Manado from 2005 to 2010.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Independent Auditor di KAP Joachim, KAP AR Utomo, dan KAP CAS tahun 2015 – sekarang; • Direktur di Matran Mitra Persada Consulting tahun 2009 – sekarang.	• Independent Auditor at KAP Joachim, KAP AR Utomo, and KAP CAS from 2015 to present; • Director at Matran Mitra Persada Consulting from 2009 to present.
Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Sertifikasi Pajak Brevet A&B terpadu. • Sertifikasi *Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR).*	• Integrated Brevet A&B Tax Certification; • Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Certification.
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite lainnya, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	No affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, other Committee members, or Majority and Controlling Shareholders.

Independensi Komite Audit

Independensi Komite Audit terjaga melalui struktur keanggotaan yang diketuai oleh seorang Komisaris Independen, serta didukung oleh dua anggota lainnya yang berasal dari pihak eksternal dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Komposisi tersebut memungkinkan Komite Audit untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif, profesional, dan independen. Seluruh Anggota Komite Audit Perseroan telah menyampaikan independensinya yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Audit Committee Independence

The independence of the Audit Committee is maintained through a membership structure, chaired by an Independent Commissioner and supported by two external members with no affiliation with the Company. This composition enables the Audit Committee to carry out its duties and responsibilities objectively, professionally, and independently. All members of the Company's Audit Committee have demonstrated their independence, as shown in the following table:

Tabel Independensi Komite Audit
Table: Audit Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Bambang Widodo	Lilik Qusairy	Tulus Setiawan
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. Has no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung di Perseroan. Has no direct or indirect shareholding in the Company.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit. Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Audit Committee.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Has no direct or indirect business relationships related to the Company's business activities.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah. Has no direct or indirect business relationships related to the Company's business activities.	√	√	√
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Has not been an employee of a Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Services Firm, or other party providing insurance, non-insurance, appraisal, and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.	√	√	√

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Informasi mengenai pengembangan kompetensi Anggota Komite Audit disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat
Mengacu pada Piagam Komite Audit, Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat dilaksanakan setiap waktu apabila dipandang perlu. Rapat Komite Audit dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit, dengan keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Frekuensi Pelaksanaan Rapat
Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali. Rincian tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat tersebut disajikan sebagai berikut:

Audit Committee Competency Development

Information regarding the competency development of Audit Committee Members is presented in the Company Profile section of this Annual Report.

Audit Committee Meetings

Meeting Policy
In accordance with the Audit Committee Charter, the Audit Committee is required to hold meetings at least once every 3 (three) months and may hold them at any time as deemed necessary. Audit Committee meetings are considered valid if attended by more than half of the Audit Committee members and if decisions are reached by deliberation to reach consensus.

Frequency of Meetings
Throughout 2025, the Audit Committee held 7 (seven) meetings. Details of the attendance of each Audit Committee member are presented below:

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Audit
Table: Frequency and Attendance of Audit Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Attended Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Bambang Widodo	Ketua Komite Chairperson	7	7	100%
Lilik Qusairy	Anggota Member	7	7	100%
Tulus Setiawan	Anggota Member	7	7	100%

Tabel Agenda Rapat Internal Komite Audit
Table: Audit Committee Internal Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Pembahasan Rapat Meeting Discussion Topics
1.	24 Maret 2025 March 24, 2025	*Internal Reporting*
2.	25 Maret 2025 March 25, 2025	*Closing meeting* Audit 2024 2024 Audit Closing Meeting
3.	25 April 2025 April 25, 2025	Pembahasan Laporan Keuangan Q1 Discussion of Q1 Financial Statement
4.	25 April 2025 April 25, 2025	Rapat evaluasi KAP Public Accounting Firm (KAP) Evaluation Meeting
5.	25 Juli 2025 July 25, 2025	Pembahasan Laporan Keuangan Q2 Discussion of Q2 Financial Statement
6.	29 Oktober 2025 October 29, 2025	Pembahasan Laporan Keuangan Q3 Discussion of Q3 Financial Statement
7.	1 November 2025 November 1, 2025	*Meeting budget* 2026 bersama Auditor 2026 Budget Meeting with Auditors

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah merealisasikan program kerja yang telah disusun sebelumnya dengan melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas rencana bisnis Perseroan;
2. Melakukan evaluasi atas informasi keuangan yang akan disampaikan kepada publik dan/atau otoritas berwenang, termasuk Laporan Keuangan serta proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Perseroan;
4. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan fungsi Audit Internal di Perseroan;
5. Melakukan diskusi dan penelaahan bersama Manajemen terkait hal-hal material yang berdampak terhadap Laporan Keuangan;
6. Melakukan diskusi dan penelaahan bersama Manajemen terkait jurnal penyesuaian material yang tidak dicatat, penyimpangan material yang tidak dicatat, dan/atau penyimpangan material lainnya yang berdampak terhadap kegiatan usaha Perseroan;
7. Melakukan pembahasan hasil audit bersama Manajemen dan auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik/KAP) atas hal-hal yang berdampak terhadap Laporan Keuangan, termasuk jurnal penyesuaian yang diusulkan oleh auditor eksternal;
8. Melakukan penilaian serta memberikan pendapat dan masukan kepada Dewan Komisaris atas saran yang diajukan oleh auditor eksternal (KAP), Manajemen, maupun Satuan Pengawasan Intern (SPI) terkait perubahan prinsip dan praktik akuntansi; dan
9. Melakukan reviu atas informasi mengenai kinerja yang disampaikan oleh Perseroan.

Brief Report on The Implementation of Audit Committee Activities

Throughout 2025, the Audit Committee implemented its previously prepared work program by carrying out various activities, including the following:

1. Reviewed the Company's business plan;
2. Evaluated financial information to be disclosed to the public and/or authorized authorities, including the Financial Statements, projections, and other financial information;
3. Monitored and evaluated the management of risks faced by the Company;
4. Monitored the implementation of the Internal Audit function within the Company;
5. Discussed and reviewed material matters impacting the Financial Statements with Management;
6. Discussed and reviewed unrecorded material adjustment entries, unrecorded material deviations, and/or other material deviations impacting the Company's business activities with Management;
7. Discussed audit results with Management and the external auditor (Public Accounting Firm/KAP) on matters impacting the Financial Statements, including adjustment entries proposed by the external auditor;
8. Conducted assessments and provided opinions and input to the Board of Commissioners regarding suggestions submitted by the external auditor (KAP), Management, and the Internal Audit Unit (SPI) regarding changes to accounting principles and practices; and
9. Reviewed performance information submitted by the Company.

Rekomendasi Komite Audit pada Penunjukan Auditor Eksternal Tahun 2025

Komite Audit memberikan rekomendasi atas penunjukan Auditor Eksternal melalui Surat Rekomendasi Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 31 Desember 2025 Nomor 03/KA-MKTR/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025. Dalam hal ini, Komite Audit telah melakukan penelaahan pada Auditor Eksternal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Audit Committee Recommendation on the Appointment of the External Auditor in 2025

The Audit Committee provided a recommendation on the appointment of the External Auditor through a Recommendation Letter from the Public Accounting Firm for the Financial Year of December 31, 2025, Number 03/KA-MKTR/X/2025, dated October 29, 2025. In this regard, the Audit Committee has reviewed the External Auditor in accordance with applicable regulations.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan dan pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, KNR mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, khususnya dalam penetapan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta perumusan sistem remunerasi dan penilaian kinerja.

The Nomination and Remuneration Committee (KNR) is tasked with providing recommendations to the Board of Commissioners on policies and the implementation of nomination and remuneration functions for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The KNR also supports the implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities, particularly in determining the criteria for candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as formulating the remuneration system and performance assessment.

Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya secara independen sesuai dengan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

An Independent Commissioner chairs the Nomination and Remuneration Committee and carries out duties and responsibilities independently in accordance with the Company's Nomination and Remuneration Committee Guidelines.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah menerbitkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi pada 21 Maret 2022, untuk menjadi pedoman kerja dan tata tertib untuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Pedoman ini merujuk pada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Nomination and Remuneration Committee Guidelines and Work Procedures

The Company issued the Nomination and Remuneration Committee Charter on March 21, 2022, to serve as guidelines and procedures for members of the Nomination and Remuneration Committee. These guidelines refer to:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies,

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

3. Perundang-undangan yang berlaku maupun standar nasional terkait praktek profesional pada internal audit perusahaan.

Pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi telah memuat: struktur, keanggotaan, tugas, tanggung jawab, wewenang, serta prosedur rapat para anggota KNR.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan fungsi nominasi, KNR bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:

1. Komposisi jabatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

2. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

3. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan fungsi remunerasi, KNR bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:

1. Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

KNR dalam menentukan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan:

2. Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Establishment and Implementation Guidelines for the Work of the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies,

3. Applicable legislation and national standards relating to professional practices in the Company's internal audits.

The Nomination and Remuneration Committee Charter contains: structure, membership, duties, responsibilities, authority, and meeting procedures for KNR members.

Nomination and Remuneration Committee Duties and Responsibilities

In carrying out its nomination function, the KNR is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:

1. Composition of positions of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;

2. Policies and criteria required in the nomination process for candidates for Members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners; and

3. Performance evaluation policy for members of the board of directors and board of commissioners.

In carrying out its remuneration function, the KNR is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:

1. Structure, policies, and amount of remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners;

2. Assist the Board of Commissioners in conducting performance assessments in accordance with the remuneration received by members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

In determining the structure, policies, and amount of remuneration, the KNR must pay attention to:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;

2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;

3. Target kinerja atau kinerja masing-masing Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris; serta

4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Kriteria Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat atas pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite- Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Untuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Simber Daya Manusia.

Ketentuan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, yang menyebutkan masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

1. Remuneration applicable in the industry is in accordance with the Company's business activities of the same type, and the Company's business scale in its industry;

2. The duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors and/or Board of Commissioners are linked to the achievement of the Company's objectives and performance;

3. Performance targets or performance of each Member of the Board of Directors and/or Member of the Board of Commissioners, and

4. Balance between fixed and variable benefits.

Nomination and Remuneration Committee Criteria

In carrying out its duties and functions of supervising and providing advice on the management of the Company by the Board of Directors, the Board of Commissioners is assisted by committees under the Board of Commissioners: Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee. All independent members of the committees do not have any financial, managerial, shareholding, or family relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, or any relationship with the Company that could affect their ability to act independently. Members of the Nomination and Remuneration Committee who hold managerial positions under the Board of Directors in charge of Human Resources.

Nomination and Remuneration Committee Term of Office

The term of office of the Nomination and Remuneration Committee is regulated in Financial Services Authority Regulation (POJK) 34/POJK.04/2014 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. This stipulates that the term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee may not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected for only 1 (one) subsequent term.

Sesuai dengan Pedoman Komite Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan bahwa masa jabatan anggota Komite Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun masa tugas.

Dasar Hukum Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tahun 2025, keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 05/Kom-MKTR/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk.

Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014, yang mensyaratkan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan komposisi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang berasal dari Komisaris Independen Perseroan, 1 (satu) orang anggota independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, serta 1 (satu) orang anggota yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi.

Mengacu pada ketentuan tersebut, Perseroan telah memenuhi ketentuan komposisi keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan diketuai oleh Komisaris Independen. Komposisi keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada 2025 adalah sebagai berikut:

In accordance with the Company's Nomination and Remuneration Committee Guidelines, the term of office of independent members of the Nomination and Remuneration Committee is a maximum of 3 (three) years. It may be extended for an additional one-year term.

Legal Basis for the Nomination and Remuneration Committee Appointment

In 2025, the membership of the Company's Nomination and Remuneration Committee was stated in the Decree of the Board of Commissioners Number 05/Kom-MKTR/X/2024 dated October 10, 2024, concerning the Appointment of the Chairperson and Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk.

Nomination and Remuneration Committee Structure, Membership, and Expertise

The establishment of the Company's Nomination and Remuneration Committee (KNR) complies with the requirements stipulated in Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 34/POJK.04/2014, which requires that the Nomination and Remuneration Committee consist of at least three members, with at least 1 (one) Independent Commissioner of the Company, 1 (one) independent member not affiliated with the Company, and 1 (one) member holding a managerial position under the Board of Directors.

Referring to these provisions, the Company has fulfilled the requirements regarding the composition of the Nomination and Remuneration Committee, which consists of 3 (three) members and is chaired by an Independent Commissioner. The membership composition of the Company's Nomination and Remuneration Committee in 2025 is as follows:

Tabel Struktur Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi
Table: Nomination and Remuneration Committee Structure and Membership

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Period of Service	Masa Jabatan Term of Office
Bambang Widodo	Ketua Komite Chairperson	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/Kom-MKTR/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 Board of Commissioners Decree Number 006/Kom-MKTR/III/2022 dated March 21, 2022	Pertama First	Mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris di Perseroan. Following the Board of Commissioners' term of office in the Company.
Rudi Sarwono	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 006/Kom-MKTR/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 Board of Commissioners Decree Number 006/Kom-MKTR/III/2022 dated March 21, 2022	Pertama First	2022 – 2025
Rizki Amelia Lubis	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/Kom-MKTR/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 Board of Commissioners Decree Number 05/Kom-MKTR/X/2024 dated October 10, 2024	Pertama First	2024 – 2027

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan pada tabel sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee Educational Qualifications and Work Experience

The educational qualifications and work experience of the Chairperson and Members of the Nomination and Remuneration Committee are presented in the following table:



Bambang Widodo

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairperson of Nomination and Remuneration Committee

Masa Jabatan Term of Office	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK/002/Kom-MKTR/III/2022.	Board of Commissioners Decree Number SK/002/Kom-MKTR/III/2022
Untuk profil domisili, kewarganegaraan, usia, serta pendidikan, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. For a complete profile regarding residence, citizenship, age, and educational background, please see the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.		
Sertifikasi Certification	Indonesia Palm Oil Conference, IPOC (2025).	Indonesia Palm Oil Conference, IPOC (2025).
Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan Work Experience and Concurrent Positions	Telah disampaikan pada bab Profil Perusahaan dalam Sub bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	This has been presented in the Company Profile chapter of the Board of Commissioners Profile subchapter of this Annual Report.

Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite lainnya, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	No affiliations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, members of other Committees, or Majority and Controlling Shareholders.



Rizki Amelia Lubis

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration Committee

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/Kom-MKTR/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024	Decree of the Board of Commissioners Number 05/Kom-MKTR/X/2024 dated October 10, 2024

Untuk profil domisili, kewarganegaraan, usia, serta pendidikan, dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
For a complete profile regarding residence, citizenship, age, and educational background, please see the Executive Officers Profile section in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (2019); • Sertifikasi Quality Management System – Integrated ISO 9001,14,001, OHSAS 18.001 (2015); • Sertifikasi Auditor Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (2013); • Sertifikasi BSP Excellence Supervisory Training (2012); • Sertifikasi Lead Auditor for RSPO (2010).	• Human Resource Management Competency Certification (2019); • Quality Management System Certification – Integrated ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001 (2015); • Auditor Certification for the Indonesian Sustainable Palm Oil Plantation Guidelines (2013); • BSP Excellence Supervisory Training Certification (2012); • Lead Auditor Certification for RSPO (2010).
Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan Work Experience and Concurrent Positions	Telah disampaikan pada bab Profil Perusahaan dalam Sub bab Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.	This has been presented in the Company Profile chapter of the Executive Officers subchapter of this Annual Report.
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite lainnya, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	No affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, other Committee members, or Majority and Controlling Shareholders.



Rudi Sarwono

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration Committee

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/Kom-MKTR/III/2022 tanggal 21 Maret 2022.	Board of Commissioners Decree Number 006/Kom-MKTR/III/2022 dated March 21, 2022
Domisili Residence	Bekasi, Jawa Barat.	Bekasi, West Java.
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia.	Indonesian citizen
Usia Age	60 tahun pada akhir tahun buku 2025.	60 years old by the end of the fiscal year 2025
Pendidikan Education	• Meraih gelar Doktor Research Bidang Management dari Universitas Pelita Harapan • Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008, • Meraih gelar Sarjana Pendidikan dari Universitas IKIP Bandung pada tahun 1990.	• Doctoral Research in Management, Pelita Harapan University; • Master of Management, Gadjah Mada University – 2008; • Bachelor of Education, IKIP Bandung University – 1990.
Pengalaman Kerja Work Experience	• Human Resource Director di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. tahun 2006 – 2017; • Human Resource Manager di PT Perfetti Van Melle Indonesia tahun 2001 – 2005; • Human Resources Manager di PT General Motor Indonesia tahun 1997-2000; serta • Human Resources & General Affair Manajer di PT Samsung Metrodata Distribusi 1996 – 1997.	• Human Resources Director at PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (2006–2017); • Human Resources Manager at PT Perfetti Van Melle Indonesia (2001–2005); • Human Resources Manager at PT General Motors Indonesia (1997–2000); • Human Resources & General Affairs Manager at PT Samsung Metrodata Distribusi (1996–1997).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Lecturer and Journal Reviewer di Universitas Trilogi serta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta Tahun 2018 – sekarang.	Lecturer and Journal Reviewer at Trilogi University and the Ahmad Dahlan Institute of Technology and Business, Jakarta (2018–present).
Sertifikasi Certification	• Sertifikat Organization Behavior Management, IPPM, Jakarta (1992); • Targeted Selection Administrator Certification, DDI, Singapore (2005); • Sertifikasi Human Resources Asia Congress, Malaysia (2010); • Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Auditor Certifications, Jakarta-Riau (2012); dan • Sertifikasi HR Value Propositions, Dave Ulrich, Hongkong.	• Organizational Behavior Management Certificate, IPPM, Jakarta (1992); • • Targeted Selection Administrator Certification, DDI, Singapore (2005); • • Human Resources Asia Congress Certification, Malaysia (2010); • • Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Auditor Certification, Jakarta–Riau (2012); • • HR Value Propositions Certification, Dave Ulrich, Hong Kong.
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite lainnya, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	No affiliations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, members of other Committees, or Major and Controlling Shareholders.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak secara objektif dan independen.

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah menyampaikan independensinya yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee Independence

All members of the Nomination and Remuneration Committee, who are independent parties, have no financial, management, shareholding, and/or family relationships with any member of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders that could affect their ability to act objectively and independently.

All members of the Company's Nomination and Remuneration Committee have demonstrated their independence, as shown in the following table:

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Table: Nomination and Remuneration Committee Independence

Aspek Independensi Independency Aspects	Bambang Widodo	Rizki Amelia	Rudi Sarwono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. Has no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung di Perseroan. Has no direct or indirect shareholding in the Company.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Nomination and Remuneration Committee.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Has no direct or indirect business relationships related to the Company's business activities.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah. Has not served as a political party administrator, legislative candidate/member, and/or candidate, or served as head/deputy head of a regional government.	√	√	√

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan Rapat
Mengacu pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 21 Maret 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan kebutuhan dan penugasan dari Dewan Komisaris. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Frekuensi Pelaksanaan Rapat
Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Rincian terkait jumlah kehadiran rapat Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan pada tabel berikut:

Nomination and Remuneration Committee Meetings

Meeting Policy
According to the Nomination and Remuneration Committee Charter dated March 21, 2022, the Nomination and Remuneration Committee may hold meetings at least 3 (three) times per year, as needed and as assigned by the Board of Commissioners. A Nomination and Remuneration Committee meeting is considered valid if attended by a majority of the Nomination and Remuneration Committee members, and decisions are reached by deliberation to reach consensus.

Frequency of Meetings
Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee held 3 (three) meetings. Details regarding the attendance rate of Nomination and Remuneration Committee members are presented in the following table:

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Table: Nomination and Remuneration Committee Meeting Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Total Meetings	Jumlah Rapat Attended Meetings	Persentase Percentage
Bambang Widodo	Ketua Chairperson	3	3	100%
Rizki Amelia Lubis	Anggota Member	3	3	100%
Rudi Sarwono	Anggota Member	3	3	100%

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Pengembangan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi disajikan pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Nomination and Remuneration Committee Competency Development

The competency development of the Nomination and Remuneration Committee is presented in the Company Profile section of this Annual Report.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi di sepanjang tahun 2025, antara lain:

1. Mengidentifikasi dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS;

Brief Report on The Implementation of The Nomination and Remuneration Committee's Activities

The tasks carried out by the Nomination and Remuneration Committee throughout 2025 include:

1. Identified and proposed qualified candidates for membership in the Board of Commissioners for approval at the GMS;

2. Mengoordinasikan penilaian mandiri *(self assessment*) masing-masing anggota Direksi atas kinerja anggota Direksi secara keseluruhan, serta anggota Dewan Komisaris atas kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan; dan

3. Merekomendasikan perencanaan pengembangan kompetensi bagi anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan Remunerasi

1. Penghasilan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;

2. Penghasilan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perseroan;

3. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi yang mengacu pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi MKTR adalah sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria;

2. Dewan Komisaris atas dasar saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan usulan calon kepada Pemegang Saham;

3. Dalam RUPS dilakukan pengangkatan dan penetapan suksesi Direksi; serta

4. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat merupakan Dewan Komisaris dan Direksi yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) dan memperoleh persetujuan dari pengurus Perseroan.

2. Coordinated the self-assessment of each member of the Board of Directors on their overall performance, as well as the Board of Commissioners' overall performance; and

3. Recommended competency development plans for both members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Remuneration Policy

1. The Board of Commissioners determines the income of the Nomination and Remuneration Committee Members by taking into account the Company's capabilities;

2. The income of the Nomination and Remuneration Committee Members as referred to in point (1) is in the form of an honorarium of a maximum of 20% (twenty percent) of the salary

3. The Member of the Board of Commissioners who becomes Chairperson/Member of the Committee is not given additional income from this position other than income as a Member of the Board of Commissioners.

Board of Directors Succession Policy

The Board of Directors succession policy, as stipulated in the MKTR Nomination and Remuneration Committee Charter, is as follows:

1. The Remuneration and Nomination Committee identifies candidates who meet the criteria;

2. The Board of Commissioners, based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee, submits candidate proposals to the Shareholders;

3. In the GMS, the appointment and determination of the succession of the Board of Directors is carried out; and

4. All of the appointed members of the Board of Commissioners and Board of Directors are those who have passed the fit and proper test and obtained approval from the Company's management.

Prosedur Penetapan *Talent Pool* Direksi dan Dewan Komisaris

Pejabat satu tingkat di bawah Direksi memiliki kesempatan yang setara untuk dicalonkan sebagai anggota Direksi maupun Dewan Komisaris. Perseroan telah memiliki pedoman dalam menjaring kandidat potensial yang dilaksanakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi di bawah koordinasi Dewan Komisaris, yang selanjutnya digunakan sebagai basis data *talent pool* Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan proses identifikasi dan evaluasi terhadap calon-calon Direksi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Perseroan, serta calon Komisaris yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang berlaku. Atas dasar hasil penilaian tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan usulan calon kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya diajukan kepada Pemegang Saham.

Dewan Komisaris secara berkala melakukan peninjauan atas laporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi guna memastikan keberlanjutan kepemimpinan Perseroan.

Procedures for Determining Board of Directors and Board of Commissioners Talent Pool

Officials one level below the Board of Directors have an equal opportunity to be nominated to the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Company has established guidelines for selecting potential candidates, implemented by the Nomination and Remuneration Committee, under the coordination of the Board of Commissioners, which are then used as the Company's talent pool database.

The Nomination and Remuneration Committee identifies and evaluates candidates for Directors, both internal and external to the Company, as well as candidates for Commissioners who meet the applicable criteria and requirements. Based on the assessment results, the Nomination and Remuneration Committee submits candidate proposals to the Board of Commissioners for subsequent submission to Shareholders.

The Board of Commissioners periodically reviews reports on the implementation of the development and succession plan to ensure the sustainability of the Company's leadership.

Organ dan Komite di Bawah Direksi

Organs and Committees Under Board of Directors

Wakil Direktur Utama

Deputy President Director

Wakil Direktur Utama bertanggung jawab untuk mendukung dan membantu Direktur Utama dalam perumusan dan pelaksanaan strategi bisnis Perseroan, memastikan efektivitas operasional, serta mengembangkan dan mengoordinasikan kebijakan perusahaan yang selaras dengan Visi dan Misi Perseroan.

The Deputy President Director is responsible for supporting and assisting the President Director in formulating and implementing the Company's business strategy, ensuring operational effectiveness, and developing and coordinating company policies that align with the Company's Vision and Mission.

Tanggung Jawab Wakil Direktur Utama

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Wakil Direktur Utama berpedoman pada Piagam Wakil Direktur Utama tertanggal 23 Oktober 2024, dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mendukung Direktur Utama dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi jangka pendek dan jangka panjang Perseroan;
2. Mengawasi kinerja perusahaan dan memastikan pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan;
3. Memberikan arahan strategis kepada berbagai divisi dan memastikan koordinasi yang efektif antar departemen;
4. Bertindak sebagai pengganti Direktur Utama dalam pengambilan keputusan saat diperlukan;
5. Mengawasi operasional Perseroan dan memastikan efisiensi proses bisnis;
6. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam operasional Perseroan serta memberikan solusi yang tepat;
7. Memastikan implementasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis;
8. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan untuk meningkatkan efektivitas kerja;
9. Mengawasi kondisi keuangan perusahaan bersama dengan Direktur Keuangan;
10. Menganalisis laporan keuangan dan memberikan rekomendasi strategis terkait pengelolaan anggaran dan investasi;
11. Mengembangkan strategi mitigasi risiko untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap bisnis Perseroan;
12. Mendorong budaya kerja yang inovatif dan berbasis kinerja;

Deputy President Director Responsibilities

In carrying out duties and responsibilities, the Deputy President Director is guided by the Deputy President Director Charter dated October 23, 2024, with the following scope of duties and responsibilities:

1. Supporting the President Director in formulating and implementing the Company's short-term and long-term strategies;
2. Monitoring the Company's performance and ensuring the achievement of the set business targets;
3. Providing strategic direction to various divisions and ensuring effective coordination between departments;
4. Acting as a substitute for the President Director in decision-making when needed;
5. Monitoring the Company's operations and ensuring the efficiency of business processes;
6. Identifying challenges and opportunities in the Company's operations and providing appropriate solutions;
7. Ensuring the implementation of policies that support business sustainability and growth;
8. Optimizing the use of company resources to improve work effectiveness;
9. Monitoring the Company's financial condition together with the Finance Director;
10. Analyzing financial reports and providing strategic recommendations related to budget and investment management;
11. Developing risk mitigation strategies to anticipate potential threats to the Company's business;
12. Encouraging an innovative and high-performance work culture; and

13. Memastikan kebijakan sumber daya manusia mendukung pertumbuhan perusahaan dan kesejahteraan karyawan.

Wewenang Wakil Direktur Utama

Wakil Direktur Utama juga memiliki wewenang, yakni sebagai berikut:

1. Membantu Direktur Utama dalam menyusun rancangan kebijakan Perseroan;
2. Membantu Direktur Utama dalam menetapkan sasaran dan strategi;
3. Meminta laporan dari seluruh lapisan organisasi MKTR Group dan mengambil tindakan koreksi;
4. Membantu Direktur Utama dalam merumuskan, merencanakan dan melaksanakan strategi pengembangan bisnis yang selaras dengan strategi Perseroan;
5. Membantu Direktur Utama dalam merumuskan, merencanakan dan melaksanakan strategi keberlanjutan bisnis yang selaras dengan strategi Perseroan; serta
6. Menjaga kepentingan Perseroan dan bertindak sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Profil Wakil Direktur Utama

13. Ensuring that human resource policies support the Company's growth and employee welfare.

Deputy President Director Authorities

The Deputy President Director also has the following authorities:

1. Assisting the President Director in drafting the Company's policies;
2. Assisting the President Director in setting targets and strategies;
3. Requesting reports from all levels of the MKTR Group organization and taking corrective actions;
4. Assisting the President Director in formulating, planning, and implementing business development strategies that align with the Company's strategy;
5. Assisting the President Director in formulating, planning, and implementing business sustainability strategies that align with the Company's strategy; and
6. Protecting the interests of the Company and acting in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Profil Wakil Direktur Utama



Junidya Karina Fuad

Wakil Direktur Utama

Deputy President Director Profile

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk per tanggal 10 Oktober 2024.	Decree of the Board of Directors of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dated October 10, 2024.
Domisili Residence	Jakarta.	Jakarta.
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Pendidikan Educational Background	• Meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Trisakti pada tahun 2005; • Meraih gelar International Commercial Law di Universitas Nottingham, Inggris pada tahun 2009.	• Law degree from Trisakti University in 2005; • Bachelor of Laws, Trisakti University – 2005; • International Commercial Law Degree, University of Nottingham, England – 2009.

Sertifikasi Certification	• Sertifikasi Indonesia Internasional Sustainbility Forum 2025, IPOC	• Certification of the Indonesia International Sustainability Forum 2025, IPOC
Pengalaman Kerja Work Experience	• Memiliki pengalaman sebagai *Deputy Chief Finance Officer* di PT Menthobi Makmur Lestari (Tahun 2020 – 2024); • Menjabat sebagai *Chief Commercial Officer* di PT Menthobi Makmur Lestari (Tahun 2017 – 2020); dan • Menjabat sebagai *Trademark and Litigation* di *Lawfirm* Biro Oktroi Rooseno (Tahun 2010 – 2014).	• Deputy Chief Finance Officer at PT Menthobi Makmur Lestari (2020 – 2024); • Chief Commercial Officer at PT Menthobi Makmur Lestari (2017 – 2020); • Trademark and Litigation at Law Firm Biro Oktroi Rooseno (2010 – 2014).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Direktur PT Menthobi Makmur Lestari (2024 – Sekarang); • Komisaris PT Khatulistiwa Sinergi Imnidaya (2023 – Sekarang).	• Director at PT Menthobi Makmur Lestari (2024 – Present); • Commissioner at PT Khatulistiwa Sinergi Imnidaya (2023 – Present).

Pengembangan Kompetensi Wakil Direktur Utama

Perseroan berkomitmen untuk melakukan pengembangan kompetensi atau pelatihan Wakil Direktur Utama, terutama untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman terhadap industri agrobisnis, dan kondisi ekonomi dan bisnis terkini.

Program-program pengembangan kompetensi Wakil Direktur Utama Perseroan yang telah dilaksanakan pada 2025 adalah sebagai berikut:

Indonesia Internasional Sustainbility Forum 2025, pada tanggal 10 – 11 Oktober 2025 yang diselenggarakan oleh *Indonesian Palm Oil Conference* (IPOC).

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Wakil Direktur Utama

Tugas-tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan Wakil Direktur Utama pada 2025, baik yang berhubungan dengan pemegang saham (*shareholders*), manajemen, maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*), adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pencapaian target bisnis Perseroan terhadap Rencana Jangka Menengah Perseroan;

2. Memberikan arahan strategis Perseroan pada tahun 2025 kepada berbagai divisi; dan

Deputy President Director's Competency Development

The Company is committed to developing the Deputy President Director's competency or providing training for the Deputy President Director, particularly to enhance their abilities and understanding of the agribusiness industry and current economic and business conditions.

The competency development programs implemented for the Deputy President Director in 2025 are as follows:

The Indonesia International Sustainability Forum 2025, taking place on October 10-11, 2025, was organized by the Indonesian Palm Oil Conference (IPOC).

Brief Report on The Implementation of the Deputy President Director's Duties

The duties and activities carried out by the Deputy President Director in 2025, relating to shareholders, management, and stakeholders, are as follows:

1. Ensured the achievement of the Company's business targets in accordance with the Company's Medium-Term Plan;

2. Provided strategic direction for the Company in 2025 to various divisions; and

3. Memberikan arahan kepada Direktur Utama dan Direktur lainnya mengenai kebijakan operasional dan bisnis yang mendukung visi dan misi Perseroan.

3. Provided direction to the President Director and other Directors regarding operational and business policies that support the Company's vision and mission.

Komite di Bawah Direksi
Committees Under Board of Directors

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan belum memiliki Komite di bawah Direksi termasuk Komite Manajemen Risiko. Sehingga, tidak terdapat informasi penjelasan Komite di bawah Direksi maupun Komite Manajemen Risiko terkait dasar hukum penunjukan, rangkap jabatan, pengalaman kerja, periode dan masa jabatan, pernyataan independensi, pelatihan, pedoman kerja, uraian tugas dan tanggung jawab, kebijakan dan pelaksanaan rapat, pelaksanaan kegiatan tahun buku 2025 maupun penilaian kinerja Komite tersebut dalam Laporan Tahunan ini.

As of the end of 2025, the Company does not have any committees under the Board of Directors, including a Risk Management Committee. Therefore, this Annual Report does not provide explanatory information regarding the legal basis for appointment, concurrent positions, work experience, period and term of office, statement of independence, training, work guidelines, description of duties and responsibilities, policies and implementation of meetings, implementation of activities for the 2025 financial year, as well as the performance assessment of these committees.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya, khususnya dalam rangka memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

The Corporate Secretary serves as a liaison between the Company and its Shareholders and other Stakeholders, particularly in ensuring the Company's compliance with Capital Market laws and regulations.

Fungsi Sekretaris Perusahaan dirancang sebagai organ pendukung tata kelola Perseroan untuk membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam memenuhi kewajiban penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Secara umum, Sekretaris Perusahaan berperan sebagai saluran komunikasi yang andal dan terpercaya, serta memastikan terjalinnya hubungan yang harmonis dengan Pemangku Kepentingan guna mendukung keberlanjutan usaha Perseroan.

The Corporate Secretary's function is to support the Company's governance by assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in fulfilling their obligations to implement the principles of Good Corporate Governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. In general, the Corporate Secretary serves as a reliable and trusted channel of communication and ensures harmonious relationships with Stakeholders to support the Company's business sustainability.

Susunan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi melalui mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sebagai pejabat satu tingkat di bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan juga membidangi beberapa unit, yakni kesekretariatan dan legal, serta komunikasi perusahaan. Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Corporate Secretary Composition

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors, through the Company's internal mechanisms, with the approval of the Board of Commissioners. As an official one level below the Board of Directors, the Corporate Secretary reports directly to the President Director. The Corporate Secretary also oversees several units, including secretarial and legal affairs, as well as corporate communications. The organizational structure of the Corporate Secretary can be seen in the chart below:

Struktur Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Structure



Pejabat Sekretaris Perusahaan

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi melalui mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Posisi Sekretaris Perusahaan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk pada 2025 dijabat oleh Bapak Ilhamd Fithriansyah, berdasarkan Surat Penunjukan Corporate Secretary Direksi Perseroan Nomor 002/Dir/MKTR/III/2022 tertanggal 21 Maret 2022. Profil singkat Sekretaris Perusahaan disajikan sebagai berikut:

Corporate Secretary Officer

The appointment of the Company's Corporate Secretary complies with the provisions stipulated in Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies, i.e., appointment and dismissal based on a Decree of the Board of Directors through the Company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners.

Mr. Ilhamd Fithriansyah served as Corporate Secretary of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk in 2025, pursuant to the Company's Board of Directors Letter of Appointment Number 002/Dir/MKTR/III/2022 dated March 21, 2022. A brief profile of the Corporate Secretary is presented as follows:



Ilhamd Fithriansyah
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Penunjukan Corporate Secretary Direksi Perseroan Nomor 002/Dir/MKTR/III/2022 tertanggal 21 Maret 2022.	Letter of Appointment of Corporate Secretary to the Company's Board of Directors Number 002/Dir/MKTR/III/2022 dated March 21, 2022.
Domisili Residence	Jakarta.	Jakarta.
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia.	Indonesian citizen.
Usia Age	50 tahun pada akhir tahun buku 2025.	50 years old by the end of the 2025 fiscal year

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Diploma III Perbankan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia – 1996; • Sarjana Hukum Universitas Indonesia - 1999.	• Diploma III in Banking, Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), University of Indonesia – 1996; • Bachelor of Laws, University of Indonesia – 1999.
Pengalaman Kerja Work Experience	• Head of Legal Department PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk. (2010 – 2018); • Associate di Law Firm Aji Wijaya Sunarto Yudo & Co. (2002 – 2009).	• Head of Legal Department at PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk. (2010 – 2018); • Associate at Law Firm Aji Wijaya Sunarto Yudo & Co. (2002 – 2009).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Head of Legal Department PT Menthobi Makmur Lestari (2018 – Sekarang); • Corporate Legal PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. (2022 – Sekarang).	• Head of Legal Department at PT Menthobi Makmur Lestari (2018 – Present); • Corporate Legal at PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. (2022 – Present).

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Sekretaris Perusahaan tertanggal 21 Maret 2022, dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
    a. Keterbukaan informasi kepada Masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
    b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
    c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
    d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
    e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Corporate Secretary Duties and Responsibilities

The Corporate Secretary performs their duties and responsibilities in accordance with the Corporate Secretary Charter dated March 21, 2022, with the following scope of duties and responsibilities:

1. Follow capital market developments, especially applicable laws and regulations;
2. Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with laws and regulations in the Capital Market sector;
3. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance, which includes:
    a. Transparency of information to the public, including the availability of information on the Issuer or Public Company Website;
    b. On time submission of reports to the Financial Services Authority;
    c. Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders;
    d. Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners; and
    e. Organizing induction programs for the company for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya;

5. Menyampaikan laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai fungsi Sekretaris Perseroan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan disajikan pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan Perseroan yang berkaitan dengan Pemegang Saham, Manajemen, maupun Pemangku Kepentingan lainnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan mengadministrasi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 April 2025;

2. Melakukan keterbukaan informasi terkait kegiatan korporasi Perseroan;

3. Melakukan penyesuaian kebijakan Perseroan terkait Tata Kelola Perusahaan;

4. Melakukan penerbitan Laporan Publikasi Keuangan sesuai ketentuan dan arahan; serta

5. Melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam pelaksanaan rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris.

4. As a liaison between the Issuer or Public Company and the Shareholders of the Issuer or Public Company, the Financial Services Authority, and other stakeholders;

5. Submit periodic reports at least once every 1 (one) year regarding the functions of the Corporate Secretary to the Board of Directors and copy to the Board of Commissioners.

Corporate Secretary Competency Development

The Corporate Secretary competency development is presented in the Company Profile section of this Annual Report.

Brief Report on the Implementation of Corporate Secretary Duties

Throughout 2025, the Corporate Secretary carried out various Company activities related to Shareholders, Management, and other Stakeholders. The activities carried out by the Corporate Secretary include the following:

1. Organized and administered the Annual General Meeting of Shareholders on April 30, 2025;

2. Disclosed information regarding the Company's corporate activities;

3. Adjusted the Company's policies regarding Corporate Governance;

4. Published the Financial Report in accordance with regulations and directives; and

5. Performed secretarial functions in implementing the Board of Directors and Board of Commissioners meetings.

Audit Internal
Internal Audit

Penyelenggaraan pengawasan intern dilakukan oleh Direksi dengan dukungan unit audit internal di lingkungan MKTR, guna memastikan efektivitas pengendalian internal, kepatuhan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Audit Internal merupakan organ perusahaan yang berfungsi untuk menjalankan audit (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses *corporate governance*. Fungsi Audit Internal memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pengawasan yang memadai guna menjaga dan mengamankan kegiatan usaha agar berjalan sesuai dengan tujuan dan kebijakan Perseroan.

Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dan terukur, dengan cara mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan proses tata kelola perusahaan.

The Board of Directors conducts internal oversight, with the support of the internal audit unit within the MKTR, to ensure the effectiveness of internal controls, compliance, and the implementation of good corporate governance.

Internal Audit is a company organ responsible for conducting independent and objective audits (assurance) and consulting services. It aims to enhance value and improve company operations through a systematic approach that evaluates and strengthens the effectiveness of risk management, internal controls, and corporate governance processes. The Internal Audit function plays a strategic role in establishing an effective oversight system to safeguard business activities and ensure they are conducted in accordance with the Company's objectives and policies.

These functions are implemented through a systematic, measurable approach that evaluates and improves the effectiveness of risk management, internal control systems, and corporate governance processes.

Kedudukan dan Struktur Unit Audit Internal

Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Departemen Corporate Internal Audit yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. Nomor 07/Dir-MKTR/VII/2022 tertanggal 15 Juli 2022.

Dalam struktur organisasi Perseroan, Departemen Corporate Internal Audit merupakan unit kerja yang berada langsung di bawah Direktur Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal. Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan langsung Dewan Komisaris.

Kedudukan kepala Audit Internal secara struktural bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional memiliki akses komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui

Internal Audit Unit Position and Structure

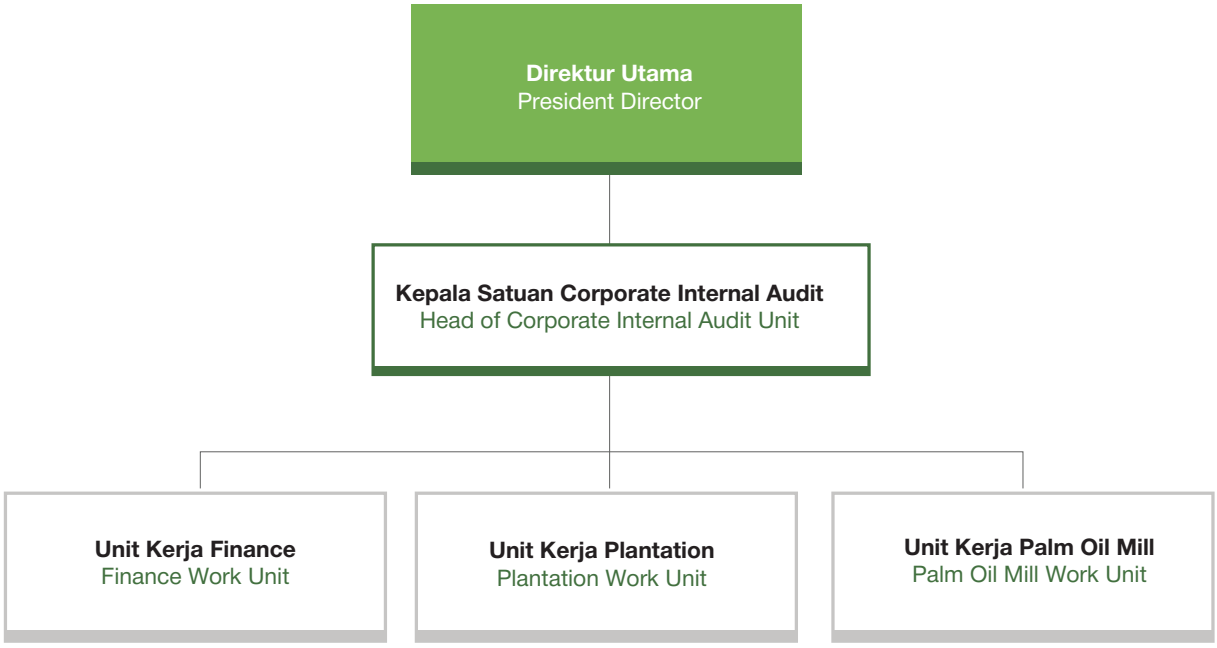
In accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charter, the Company has established a Corporate Internal Audit Department, as stipulated in PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Board of Directors Decree Number 07/Dir-MKTR/VII/2022 dated July 15, 2022.

Within the Company's organizational structure, the Corporate Internal Audit Department is a work unit directly under the President Director and led by a Head of Internal Audit. The Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the Board of Directors with the direct approval of the Board of Commissioners.

The Head of Internal Audit is structurally responsible to the President Director and, functionally, has direct communication with the Board of Commissioners through the Audit Committee to coordinate and

Komite Audit dalam melakukan koordinasi dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil audit. Sepanjang tahun 2025, Departemen Corporate Internal Audit membawahi beberapa unit kerja, sebagaimana ditampilkan dalam bagan struktur organisasi berikut.

convey information related to audit implementation and results. Throughout 2025, the Corporate Internal Audit Department oversaw several work units, as shown in the following organizational structure chart.



Pada Departemen Unit Audit Internal memiliki 3 (tiga) orang jumlah personel yang secara umum memiliki latar belakang pendidikan yang memadai serta kompetensi yang sesuai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai auditor.

Personel Unit Audit Internal ditempatkan di Kantor Pusat serta lokasi operasional Perseroan, yaitu di Jakarta dan Kalimantan Tengah. Penempatan tersebut dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Internal secara optimal di seluruh wilayah operasional Perseroan.

The Internal Audit Unit Department has three personnel who generally possess adequate educational backgrounds and the appropriate competencies to carry out their duties and responsibilities as auditors.

Internal Audit Unit personnel are stationed at the Company's Head Office and operational locations, i.e., Jakarta and Central Kalimantan. This placement is intended to support the optimal implementation of the Internal Audit function throughout the Company's operational areas.



Profil Kepala Unit Audit Internal

Internal Audit Unit Head Profile



Bimantoro S.B. Sudibyo

Kepala Satuan Corporate Internal Audit
Head of Corporate Internal Audit

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk per tanggal 10 Oktober 2024.	Decree of the Board of Directors of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk as of October 10, 2024.
Domisili Residence	Jakarta.	Jakarta.
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia.	Indonesian citizen.
Usia Age	41 tahun pada akhir tahun buku 2025.	41 years old by the end of the 2025 fiscal year.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Pertanian Universitas Gadjah Mada tahun 2008.	Bachelor of Agriculture from Gadjah Mada University in 2008.
Pengalaman Kerja Work Experience	Memiliki pengalaman sebagai Surveyor Officer di PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk (Tahun 2014 – 2017), pernah menjabat sebagai Surveyor di Menthobi Makmur Lestari (Tahun 2013 – Tahun 2014). Selain itu, juga pernah menjabat sebagai Asisten Manajer Lapangan di berbagai Perusahaan Perkebunan (1987 -1999).	As Surveyor Officer at PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk (2014 – 2017), previously served as a Surveyor at Menthobi Makmur Lestari (2013 – 2014). He also served as Assistant Field Manager in various Plantation Companies (1987-1999).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Corporate Information System PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. (2022 – Sekarang); • Head of Management Information System PT Menthobi Makmur Lestari (2017 – Sekarang).	• Served as Corporate Information System at the Company (2022 – present); • Head of Management Information System at PT Menthobi Makmur Lestari (2017 – present).
Sertifikasi Certification	Sertifikat Internal Audit Tahun 2014.	Internal Audit Certification in 2014.

Tata Kelola Unit Audit Internal

Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Direksi telah menetapkan pedoman khusus tata kelola Unit Audit Internal sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan fungsi pengawasan intern di lingkungan Perseroan. Pedoman tata kelola ini dirancang dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, Unit Audit Internal senantiasa

Internal Audit Unit Governance

As part of its commitment to good corporate governance, the Board of Directors has established specific Internal Audit Unit governance guidelines as the operational basis for internal oversight functions within the Company. These governance guidelines are designed with reference to applicable laws and regulations, as well as the principles of transparent, accountable, and high-integrity governance. In carrying out its roles and responsibilities, the Internal Audit Unit consistently adopts nationally recognized best practices in the

mengadopsi praktik terbaik (*best practices*) dalam profesi auditor internal yang diakui secara nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengawasan dilaksanakan secara objektif, independen, dan memberikan nilai tambah dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal berpedoman kepada Piagam Unit Audit Internal Perseroan tertanggal 21 Maret 2022, yang mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
3. Perundang-undangan yang berlaku maupun standar nasional terkait praktik profesional pada audit internal perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Tugas dan tanggung jawab serta ruang lingkup kegiatan Unit Audit Internal mencakup fungsi audit (*assurance*) dan konsultansi yang dilaksanakan secara independen dan objektif. Kegiatan tersebut difokuskan pada evaluasi atas kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian intern, serta proses tata kelola (*governance*) yang berlaku di seluruh lingkungan Perseroan, termasuk Anak Perseroan, dengan persetujuan Direktur Utama.

Merujuk pada Piagam Unit Audit Internal, secara terinci tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawas Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berbasis risiko;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di seluruh bidang kegiatan Perseroan dan anak Perseroan;

internal audit profession. This aims to ensure that all oversight activities are carried out objectively and independently, and that they add value to the achievement of the Company's strategic objectives.

In carrying out its duties, the Internal Audit Unit is guided by the Company's Internal Audit Unit Charter dated March 21, 2022, which refers to:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charters;
3. Applicable laws and national standards regarding professional practices in corporate internal audits.

Internal Audit Unit Duties and Responsibilities

The duties, responsibilities, and scope of activities of the Internal Audit Unit include audit (assurance) and consulting functions, carried out independently and objectively. These activities focus on evaluating the adequacy and effectiveness of risk management, internal control systems, and governance processes throughout the Company, including its subsidiaries, with the approval of the President Director.

Referring to the Internal Audit Unit Charter, the detailed duties and responsibilities of the Internal Audit Supervisory Unit are as follows:

1. Develop and implement a risk-based annual Internal Audit plan;
2. Test and evaluate the implementation of internal controls and risk management systems in accordance with Company policy;
3. Conduct audits and assessments of efficiency and effectiveness across all areas of the Company's and its subsidiaries' activities;

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

5. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

6. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada manajemen terkait dan Dewan Komisaris atau Komite Audit melalui Direktur Utama;

7. Menyusun program dan menerapkan evaluasi mutu dan kinerja Audit Internal secara berkesinambungan; dan

8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan sesuai dengan izin atau sepengetahuan dan/atau perintah Direktur Utama.

4. Provide recommendations for improvement and objective information on audited activities at all management levels;

5. Monitor, analyze, and report on the implementation of follow-up actions for suggested improvements;

6. Report audit results to relevant management and the Board of Commissioners or the Audit Committee through the President Director;

7. Develop a program and implement continuous evaluation of the quality and performance of Internal Audit; and

8. Conduct special audits when necessary with the permission, knowledge, and/or instructions of the President Director.

Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi Internal Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Departemen Corporate Internal Audit didukung oleh sertifikasi kompetensi yang memadai. Hal ini dibuktikan sertifikasi yang dimiliki Unit Audit Internal hingga 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Internal Audit Certification and Development Competency

In carrying out its duties, the Corporate Internal Audit Department is supported by adequate competency certification. This is evidenced by the certifications held by the Internal Audit Unit as of December 31, 2025, as shown in the following table:

No.	Nama Peserta Participant Name	Nama Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Name	Penyelenggara Organizer	Periode Penyelenggaraan Organizing Period
1.	Bimantoro S.B. Sudibyo	Sertifikasi Internal Audit Internal Audit Certification	Yayasan Pendidikan Internal Audit (*Qualified Internal Audit*)	2024
		Fraud Identification Training	Internal	2024

Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan program sertifikasi bagi auditor internal sebagai bentuk komitmen untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi serta profesionalisme auditor pada Unit Audit Internal. Upaya ini dilakukan guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan serta memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal dalam mendukung operasional Perseroan.

Pengembangan kompetensi auditor internal tersebut dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan, serta informasi lebih lanjut mengenai program pengembangan kompetensi Internal Audit disajikan pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The Company continuously implements a certification program for internal auditors as a commitment to maintaining and improving the competence and professionalism of auditors within the Internal Audit Unit. This effort is undertaken to optimize the implementation of the supervisory function and ensure the effectiveness of the Internal Audit Unit's duties and responsibilities in supporting the Company's operations.

The development of internal auditor competency is carried out in a planned and continuous manner, and further information regarding the Internal Audit competency development program is presented in the Company Profile section of this Annual Report.

Independensi Audit Internal

Auditor Internal harus selalu menjaga independensi dan objektivitas dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan. Untuk memastikan kedua prinsip tersebut tetap terjaga, Auditor Internal perlu:

1. Menghindarkan diri dari kondisi benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan objek pengawasan;
2. Bekerja dengan bebas tanpa pengaruh dan campur tangan dari pihak lain;
3. Memetakan, mencatat dan melaporkan suatu hal sesuai dengan kondisi sebenarnya;
4. Menghindarkan diri untuk melaksanakan tugas pada objek pengawasan di mana yang bersangkutan terlibat aktif pada objek pengawasan tersebut dalam kurun waktu kurang dari satu tahun terakhir.

Internal Audit Independence

Internal auditors must always maintain independence and objectivity in the performance of all supervisory duties. To ensure these two principles are maintained, internal auditors must:

1. Avoid any conflict of interest between their personal interests and the interests of the object of their supervision;
2. Work independently without influence or interference from other parties;
3. Map, record, and report matters in accordance with the actual conditions;
4. Avoid carrying out duties on objects of supervision where they have been actively involved within the past year.

Rapat Satuan Kerja Unit Audit Internal

Kebijakan dan Frekuensi Rapat Unit Audit Internal

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Unit Audit Internal dapat menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Komite Audit sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Selama tahun 2025, Departemen Corporate Internal Audit telah menyelenggarakan rapat koordinasi sebanyak 4 (empat) kali. Rincian tingkat kehadiran masing-masing anggota Unit Audit Internal dalam rapat tersebut disajikan sebagai berikut.

Work Unit Meetings of Internal Audit Unit

Internal Audit Meeting Policy and Frequency

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter, the Internal Audit Unit may hold coordination meetings with the Audit Committee at least 4 (four) times per year.

In 2025, the Corporate Internal Audit Department held 4 (four) coordination meetings. The attendance breakdown for each member of the Internal Audit Unit at these meetings is presented below.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Departemen Corporate Internal Audit
Table: Corporate Internal Audit Department Meeting Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal dengan Direksi Internal Meeting with the Board of Directors		
		Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Attended Meetings	%
Bimantoro S.B. Sudibyo	Ketua Satuan Corporate Internal Audit Head of Corporate Internal Audit Unit	4	4	100%
Andhika Ageng Wirazadti Kusuma	Anggota Member	4	4	100%
Andrian Qurnain	Anggota Member	4	4	100%

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Unit Audit Internal Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Unit Audit Internal (Departemen Corporate Internal Audit) telah melaksanakan seluruh aktivitas audit sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Unit Audit Internal melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menguji dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal serta manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
2. Melakukan pemeriksaan pada unit-unit perkebunan kelapa sawit serta unit-unit departemen pendukung;
3. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Audit Internal tahunan berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based audit*);
4. Menyusun laporan hasil audit serta menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit; dan
5. Berperan aktif dalam pengembangan dan peningkatan sistem pengendalian internal, termasuk pelaksanaan penilaian (*assessment*) terkait kebakaran hutan di area perkebunan maupun area perbaikan lainnya.

Pelaksanaan audit internal mencakup audit operasional, audit sistem manajemen, audit khusus, dan audit proses bisnis. Selama tahun 2025, Unit Audit Internal telah melaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan audit. Setiap temuan audit yang bersifat signifikan dilaporkan secara langsung kepada Manajemen dan Komite Audit, serta telah ditindaklanjuti secara tepat dan memadai oleh unit kerja terkait.

Brief Report on the Implementation of Internal Audit Unit Activities in 2025

Throughout 2025, the Internal Audit Unit (Corporate Internal Audit Department) carried out all audit activities in accordance with the established work program. In its implementation, the Internal Audit Unit carried out the following activities:

1. Testing and evaluating the effectiveness of the implementation of the internal control system and risk management in accordance with Company policy;
2. Conducting audits at oil palm plantation units and supporting department units;
3. Preparing and implementing an annual Internal Audit work plan based on a risk-based audit approach;
4. Preparing audit reports and submitting these reports to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee; and
5. Actively participating in the development and improvement of the internal control system, including conducting assessments related to forest fires in plantation areas and other areas for improvement.

Internal audit implementation includes operational audits, management system audits, special audits, and business process audits. In 2025, the Internal Audit Unit conducted 2 (two) audits. All significant audit findings were reported directly to Management and the Audit Committee, and the relevant work units followed up appropriately and adequately.

Audit Eksternal

External Audit

Auditor Eksternal memiliki tugas untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan Perseroan, guna memastikan bahwa laporan keuangan dalam bentuk apa pun telah disusun secara akurat, andal, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, Auditor Eksternal diberikan akses yang memadai terhadap seluruh data dan informasi Perseroan, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan, guna mendukung efektivitas proses audit.

Penunjukan Auditor Eksternal merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam menerapkan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengawasan serta audit atas pelaporan keuangan, sekaligus mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG). Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

The External Auditor is tasked with providing an opinion on the fairness of the presentation of the Company's financial statements, ensuring that the financial statements, in any form, have been prepared accurately, reliably, and in accordance with applicable Financial Accounting Standards (SAK). In carrying out their duties, the External Auditor is granted adequate access to all Company data and information, both financial and non-financial, to support the effectiveness of the audit process.

The appointment of the External Auditor is part of the Company's efforts to implement the principles of independence, transparency, and accountability in the supervision and audit of financial reporting, while also supporting the implementation of Good Corporate Governance (GCG). The Company has appointed a Public Accounting Firm (KAP) to audit its consolidated financial statements for the 2025 financial year, as determined by the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Compliance With Indonesian Financial Accounting Standards

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Perseroan senantiasa berpedoman pada peraturan dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); dan

In preparing the Financial Statements, the Company consistently adheres to the accounting regulations and standards applicable in Indonesia, including the following:

1. Financial Accounting Standards (SAK) established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI); and

2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor KEP-347/BL/2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) Chairman Decree Number KEP-347/BL/2012 concerning Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

External Audit Procedures and Audit Standards

Audit atas Laporan Keuangan Perseroan dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yang mencakup serangkaian prosedur audit yang relevan dengan kondisi dan karakteristik usaha Perseroan. Prosedur tersebut meliputi antara lain pengujian, penelaahan, dan evaluasi atas Laporan Keuangan, serta penilaian atas kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

The audit of the Company's Financial Statements was conducted in accordance with the Public Accountant Professional Standards (SPAP), which encompass a series of audit procedures relevant to the Company's business conditions and characteristics. These procedures include, among other things, testing, reviewing, and evaluating the Financial Statements, as well as assessing their compliance with the Financial Accounting Standards (SAK) established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

Dalam rangkaian proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan komunikasi dan klarifikasi dengan Manajemen Perseroan, termasuk melalui sesi tanya jawab dan konfirmasi atas pernyataan Manajemen yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau temuan dalam penyajian Laporan Keuangan, KAP akan menyampaikan hal tersebut kepada Manajemen Perseroan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Throughout the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) communicates and clarifies with the Company's Management, including through question-and-answer sessions and confirmation of Management's statements disclosed in the Financial Statements. If there are any discrepancies or findings in the presentation of the Financial Statements, the KAP will convey these to the Company's Management for follow-up in accordance with applicable regulations.

Manajemen Perseroan juga memberikan persetujuan atas dokumen kerja audit yang disusun oleh KAP, sebagai bagian dari proses pengendalian dan akuntabilitas, serta untuk keperluan peninjauan oleh instansi atau otoritas yang berwenang.

The Company's management also approves the audit work documents prepared by the Public Accounting Firm (KAP), as part of the control and accountability process, and for review by authorized agencies or authorities.

Penunjukkan Akuntan Publik

Appointment of Public Accountants

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Based on Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, the appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms (KAP) must be determined through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), taking into account recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee.

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP tersebut selanjutnya dilaporkan kepada OJK dengan melampirkan dokumen pendukung, antara lain:

1. Dokumen penunjukan beserta rekomendasi Komite Audit;
2. Hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) yang diterima dari KAP; dan
3. Dokumen perjanjian kerja antara Perseroan dengan Akuntan Publik dan KAP.

Pada tahun 2025, penunjukan Kantor Akuntan Publik serta penetapan biaya audit dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris, yang kemudian memperoleh persetujuan melalui RUPS Tahunan pada tanggal 30 April 2025, sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.

Pelaksanaan fungsi Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), serta mengacu pada perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah disepakati.

Dalam hal ini, Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik tidak memberikan jasa non audit pada tahun buku tersebut.

The appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm (KAP) is then reported to the Financial Services Authority (OJK) by attaching supporting documents, including:

1. The appointment document and recommendation from the Audit Committee;
2. The results of the self-assessment received from the KAP; and
3. The employment agreement document between the Company and the Public Accountant and Public Accounting Firm.

In 2025, the appointment of the Public Accounting Firm and the determination of audit fees were made based on the Audit Committee's recommendation to the Board of Commissioners, which was then approved by the Annual General Meeting of Shareholders on April 30, 2025, in accordance with applicable OJK regulations.

The External Audit function for the Company's Financial Statements for the 2025 financial year was carried out in accordance with applicable laws and regulations, specifically the Public Accountant Professional Standards (SPAP), and in accordance with the work agreement and the agreed audit scope.

In this case, the Public Accountant or Public Accounting Firm did not provide non-audit services in that financial year.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan *Fee*

Public Accounting Firm, Accountant's Name, and Fees

Informasi mengenai Kantor Akuntan Publik (KAP), nama Akuntan Publik, serta jenis jasa yang diberikan kepada Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir disajikan secara ringkas dalam tabel berikut:

Information regarding the Public Accounting Firm (KAP), the name of the Public Accountant, and the types of services provided to the Company over the past three years is summarized in the following table:

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Fee, dan Izin KAP
Table: Public Accounting Firm, Accountant's Name, Fees, and License

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public accounting firm	Periode KAP KAP Period	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Name of Accountant (Responsible Partner)	Periode Akuntan Accounting Period	*Fee* Jasa Audit Audit Service Fee
2025	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	2024	Indra Yagi Oktoriansyah, S.E, A.K, CA, CPA	2025	Rp250.000.000
2024	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	2024	Indra Yagi Oktoriansyah, S.E, A.K, CA, CPA	2024	Rp250.000.000

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public accounting firm	Periode KAP KAP Period	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Name of Accountant (Responsible Partner)	Periode Akuntan Accounting Period	*Fee* Jasa Audit Audit Service Fee
2023	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	2023	Indra Yagi Oktoriansyah, S.E, A.K, CA, CPA	2023	Rp250.000.000
2022	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	2022	Indra Yagi Oktoriansyah, S.E, A.K, CA, CPA	2022	Rp250.000.000
2021	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	2021	Chandra, S.E, CPA (Registration Akuntan Publik No. AP.168x5)	2021	Rp150.000.000

Jasa Lain yang Diberikan
Other Services Provided

Tidak terdapat jasa lain yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik. Sehingga tidak terdapat informasi jasa non audit dalam Laporan Tahunan ini.

The Public Accounting Firm provided no other services. Therefore, no information on non-audit services is available in this Annual Report.

Opini Jasa yang Dikeluarkan
Opinion on Services Issued

Dalam audit eksternal, Akuntan Publik menyampaikan laporan konsolidasian Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In the external audit, the Public Accountant submitted the Company's consolidated report, presenting, in all material respects, fairly the consolidated financial position as of December 31, 2025, as well as the consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Koordinasi Auditor Eksternal dan Komite Audit
Coordination Between External Auditors and Audit Committee

Dalam pelaksanaan tugas audit, Akuntan Publik eksternal menjalin komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan Unit Audit Internal serta Komite Audit. Mekanisme komunikasi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan pemahaman atas ruang lingkup, temuan, dan rekomendasi audit.

Apabila terdapat perbedaan pendapat antara Akuntan Publik eksternal dan Unit Audit Internal, Komite Audit berperan memberikan pandangan, saran, dan rekomendasi yang bersifat independen guna memastikan penyelesaian permasalahan dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In carrying out audit duties, the external Public Accountant maintains intensive communication and coordination with the Internal Audit Unit and the Audit Committee. This communication mechanism aims to ensure a shared understanding of the audit scope, findings, and recommendations.

In the event of differences of opinion between the external Public Accountant and the Internal Audit Unit, the Audit Committee provides independent insights, advice, and recommendations to ensure issues are resolved objectively and professionally, in accordance with applicable laws and regulations.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal
Effectiveness of External Audit Implementation

Unit Audit Internal secara berkelanjutan melakukan pemantauan atas tindak lanjut temuan audit guna memastikan bahwa rekomendasi yang telah disampaikan dilaksanakan secara efektif serta mencegah terulangnya temuan serupa di masa mendatang.

Selain itu, Unit Audit Internal senantiasa meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Auditor Eksternal sebagai upaya untuk memperkuat kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan pelaksanaan fungsi audit pada periode berikutnya.

The Internal Audit Unit continuously monitors the follow-up of audit findings to ensure recommendations are effectively implemented and to prevent the recurrence of similar findings.

Furthermore, the Internal Audit Unit continuously improves coordination and synergy with the External Auditor to strengthen the quality, effectiveness, and sustainability of the audit function in subsequent periods.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Boards of Commissioners and Directors' Diversity Policy

Perseroan meyakini bahwa keberagaman merupakan elemen fundamental dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, termasuk pada tingkat kepemimpinan tertinggi. Oleh karena itu, Perseroan mendorong penerapan prinsip keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup latar belakang pengalaman, keahlian, kualifikasi, serta pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan dan strategi bisnis Perseroan.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk telah disusun sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Komposisi tersebut mencerminkan sinergi karakteristik yang saling melengkapi, baik secara kolektif maupun individual, guna mendukung pengambilan keputusan yang objektif dan efektif.

Proses pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi mempertimbangkan pengalaman profesional yang memadai, khususnya di industri perkebunan dan kelapa sawit, pemahaman yang mendalam terhadap sektor usaha Perseroan, serta integritas dan komitmen terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

The Company believes that diversity is a fundamental element in strengthening sustainable corporate governance, including at the highest levels of leadership. Therefore, the Company encourages the implementation of diversity principles in the composition of the Boards of Commissioners and Directors, encompassing background experience, expertise, qualifications, and knowledge relevant to the Company's business needs and strategy.

The diverse composition of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Boards of Commissioners and Directors has been established in accordance with the provisions of the Appendix to Financial Services Authority Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance. This composition reflects a synergy of complementary characteristics, both collectively and individually, to support objective and effective decision-making.

The selection process for members of the Boards of Commissioners and Directors takes into account adequate professional experience, particularly in the plantation and palm oil industries, a deep understanding of the Company's business sector, and integrity and commitment to implementing good corporate governance principles.

Keberagaman yang selaras dengan kebutuhan Perseroan diyakini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, sekaligus memperkuat pencapaian visi dan misi Perseroan secara berkelanjutan. Implementasi prinsip keberagaman tersebut tercermin dalam penetapan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan Perseroan.

Adapun keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Diversity aligned with the Company's needs is believed to enhance the effectiveness of the Boards of Commissioners and Directors' duties and responsibilities, while simultaneously strengthening the sustainable achievement of the Company's vision and mission. The implementation of this diversity principle is reflected in the determination of relevant expertise, knowledge, and experience in carrying out the Company's supervisory and management functions.

The diversity composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors serving in 2025 is presented in the following table:

Keberagaman Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Table: Diversity of Members of the Boards of Commissioners and Directors

Aspek Keberagaman Anggota Dewan Komisaris **Diversity Aspects of the Board of Commissioners**	
Warga Negara Citizenship	Seluruh anggota Dewan Komisaris adalah warga negara Indonesia. All members of the Board of Commissioners are Indonesian.
Pendidikan Education	Pendidikan anggota Dewan Komisaris terutama bidang akuntansi, ekonomi, manajemen bisnis atau hukum. Education of members of the Board of Commissioners, especially in the fields of accounting, economics, business management and law.
Pengalaman Kerja Work Experience	Keberagaman pengalaman kerja yang termasuk anggota Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman atau menduduki jabatan senior, baik di masa lalu maupun saat ini, dalam: 1. Perusahaan nasional dan multinasional; 2. Kantor Akuntan di Indonesia; 3. Otoritas pasar modal di Indonesia; dan 4. Dosen universitas terkemuka di Indonesia. Diverse work experience of the Board of Commissioners who have experience or hold senior positions, both in the past and currently, in: 1. National and multinational companies; 2. Accounting Firms in Indonesia; 3. Capital market authorities in Indonesia; and 4. Lecturers at leading universities in Indonesia.
Usia Age	Keragaman usia anggota Dewan Komisaris berada pada usia yang cukup produktif dan matang, berkisar antara 30 sampai dengan 85 tahun. The age diversity of the members of the Board of Commissioners is at a fairly productive and mature age, ranging from 30 to 85 years.
Aspek Keberagaman Anggota Direksi **Diversity Aspects of the Board of Directors**	
Warga Negara Citizenship	Seluruh anggota Direksi adalah warga negara Indonesia. All members of the Board of Directors are Indonesian.
Pendidikan Education	Latar belakang pendidikan anggota Dewan Direksi meliputi S1 dan S2 di bidang ekonomi, akuntansi, manajemen bisnis, atau hukum. The education level of the Board of Directors members includes Bachelor's and Master's degrees in accounting, economics, agriculture, business management and law.

Pengalaman Kerja Work Experience	Keberagaman pengalaman kerja yang termasuk anggota Direksi yang memiliki pengalaman atau menduduki jabatan senior, baik di masa lalu maupun saat ini, dalam: 1. Perusahaan nasional dan multinasional; 2. Kantor Akuntan di Indonesia; 3. Otoritas pasar modal di Indonesia; dan 4. Dosen universitas terkemuka di Indonesia. Diverse work experience of the Board of Directors who have experience or hold senior positions, both in the past and currently, in: 1. National and multinational companies; 2. Accounting Firms in Indonesia; 3. Capital market authorities in Indonesia; and 4. Lecturers at leading universities in Indonesia.
Usia Age	Keragaman usia anggota Direksi berada pada usia yang cukup produktif dan matang, berkisar antara 30 sampai dengan 75 tahun. The age diversity of the members of the Board of Directors is at a fairly productive and mature age, ranging from 30 to 75 years.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem pengendalian internal Perseroan merupakan rangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang dan diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, menjaga keandalan kinerja keuangan, serta melindungi aset Perseroan. Penerapan sistem pengendalian internal ini juga ditujukan untuk memastikan tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang andal, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta memitigasi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran prinsip kehati-hatian.

Menyadari pentingnya sistem pengendalian internal dalam mendukung keberlangsungan usaha dan penciptaan nilai jangka panjang, Perseroan secara berkelanjutan melakukan penguatan dan penyempurnaan atas sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pengkajian dan pemantauan secara berkala guna memastikan efektivitas penerapannya di seluruh aktivitas operasional Perseroan.

Sistem pengendalian internal Perseroan disusun dan dijalankan dengan mengacu pada kerangka kerja *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Kerangka COSO tersebut mencakup lima elemen utama Sistem Pengendalian Internal, yaitu sebagai berikut:

The Company's internal control system is a series of policies and procedures designed and implemented in accordance with applicable laws and regulations, intending to improve operational efficiency and effectiveness, maintain reliable financial performance, and protect the Company's assets. The implementation of this internal control system also aims to ensure reliable financial and managerial reporting, enhance compliance with applicable regulations, and mitigate the risk of losses, irregularities, and violations of the principle of prudence.

Recognizing the importance of an internal control system in supporting business continuity and long-term value creation, the Company continuously strengthens and improves its established internal control system. This effort is carried out through a periodic review and monitoring process to ensure the effectiveness of its implementation across all of the Company's operational activities.

The Company's internal control system is developed and implemented in accordance with the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) framework. The COSO framework encompasses five key elements of an Internal Control System, as follows:

1. **Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)**
   Lingkungan pengendalian merupakan fondasi utama dari sistem pengendalian internal Perseroan yang mencerminkan komitmen terhadap integritas, nilai etika, dan tata kelola yang baik. Lingkungan pengendalian menyediakan dasar bagi pelaksanaan pengendalian internal secara menyeluruh di PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (Perseroan).

   Lingkungan pengendalian Perseroan mencakup antara lain:

   a. Penegakan integritas, nilai etika, dan kompetensi sumber daya manusia;

   b. Filosofi dan gaya manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha;

   c. Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab manajemen secara akuntabel;

   d. Pengorganisasian, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia; serta

   e. Perhatian, pengawasan, dan arahan yang diberikan oleh Direksi dalam mendukung penerapan pengendalian internal yang efektif.

2. **Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)**
   Penilaian risiko merupakan proses yang bersifat dinamis dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Perseroan. Proses ini dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kondisi internal maupun eksternal, sehingga Perseroan dapat menetapkan langkah mitigasi risiko yang tepat dan terukur.

3. **Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)**
   Aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa arahan manajemen dalam memitigasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Aktivitas pengendalian diterapkan pada seluruh tingkatan dan unit kerja Perseroan, yang antara lain meliputi pemberian kewenangan dan otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian kinerja, pemisahan fungsi, serta pengamanan aset Perseroan.

1. **Control Environment**
   The control environment is the primary foundation of the Company's internal control system, reflecting a commitment to integrity, ethical values, and good governance. The control environment provides the basis for the overall implementation of internal control at PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (the Company).

   The Company's control environment includes, among other things:

   a. Uphold integrity, ethical values, and human resource competency;

   b. Management philosophy and style in conducting business activities;

   c. Accountable implementation of management authority and responsibility;

   d. Organization, development, and management of human resources; and

   e. Attention, supervision, and direction provided by the Board of Directors to support the effective implementation of internal control.

2. **Risk Assessment**
   Risk assessment is a dynamic, ongoing process for identifying, analyzing, and evaluating risks that could hinder the achievement of the Company's objectives. This process is conducted periodically, taking into account changes in internal and external conditions, to enable the Company to establish appropriate and measurable risk mitigation measures.

3. **Control Activities**
   Control activities are actions established through policies and procedures to ensure that management directives to mitigate risks are effectively implemented. Control activities are implemented at all levels and work units of the Company and include, among other things, the granting of authority and authorization, verification, reconciliation, performance assessment, segregation of duties, and safeguarding of Company assets.

4. **Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)**
   Informasi dan komunikasi dalam kerangka COSO merupakan proses berkelanjutan untuk memperoleh, mengelola, dan menyampaikan informasi yang relevan dan andal. Perseroan memastikan tersedianya sistem informasi dan komunikasi yang efektif, baik secara internal maupun eksternal, guna mendukung pelaksanaan pengendalian internal dalam kegiatan operasional sehari-hari. Sistem ini mencakup penyajian laporan operasional, keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara akurat dan tepat waktu.

5. **Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*)**
   Kegiatan pemantauan dilakukan melalui evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya untuk memastikan bahwa seluruh komponen sistem pengendalian internal berfungsi secara efektif. Pemantauan ini terintegrasi dalam proses bisnis Perseroan pada berbagai tingkatan, sehingga dapat menghasilkan informasi yang andal sebagai dasar bagi perbaikan dan penyempurnaan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan.

4. **Information and Communication**
   Information and communication, within the COSO framework, is a continuous process for obtaining, managing, and disseminating relevant and reliable information. The Company ensures the availability of effective information and communication systems, both internally and externally, to support the implementation of internal controls in daily operations. This system includes the accurate and timely presentation of operational and financial reports, as well as compliance with applicable laws and regulations.

5. **Monitoring Activities**
   Monitoring activities are conducted through ongoing evaluations, separate evaluations, or a combination of both to ensure that all components of the internal control system are functioning effectively. This monitoring is integrated into the Company's business processes at various levels, thus generating reliable information as a basis for continuous improvement and refinement of the internal control system.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal
Implementation of Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal yang dikembangkan dan diterapkan oleh Perseroan dirancang untuk memastikan tercapainya efektivitas operasional, keandalan pelaporan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Sistem Pengendalian Internal Perseroan mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Penerapan budaya pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur secara menyeluruh di seluruh organisasi, yang didukung oleh perhatian, pengawasan, dan arahan Direksi pada setiap tingkatan organisasi;

2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yang dihadapi Perseroan melalui proses identifikasi, analisis, penilaian, dan pengelolaan risiko secara sistematis dan relevan;

The Internal Control System developed and implemented by the Company is designed to ensure operational effectiveness, reporting reliability, and compliance with applicable laws and regulations. In its implementation, the Company's Internal Control System encompasses the following aspects:

1. Implementation of a disciplined and structured internal control culture throughout the organization, supported by the attention, supervision, and direction of the Board of Directors at every level of the organization;

2. Assessment and management of business risks faced by the Company through a systematic and relevant process of risk identification, analysis, assessment, and management;

3. Pelaksanaan aktivitas pengendalian berupa tindakan pengawasan yang diterapkan dalam proses operasional pada setiap tingkat dan unit kerja sesuai dengan struktur organisasi Perseroan;

4. Penerapan sistem informasi dan komunikasi yang memadai untuk menyajikan laporan kegiatan operasional, keuangan, serta tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku secara akurat dan tepat waktu; serta

5. Pelaksanaan kegiatan pemantauan melalui proses evaluasi atas kualitas Sistem Pengendalian Internal, termasuk efektivitas fungsi Audit Internal, pada seluruh tingkat dan unit kerja Perseroan.

Dalam rangka mendukung efektivitas sistem tersebut, Perseroan menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas antar pegawai, yang saling terkait dan saling mendukung. Pemisahan fungsi ini didukung oleh standar, kebijakan, dan prosedur kerja yang bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya kesalahan, baik yang bersifat tidak disengaja maupun disengaja. Selain itu, Perseroan secara berkelanjutan melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan kualitas dan keberlanjutan Sistem Pengendalian Internal dalam jangka panjang.

3. Implementation of control activities in the form of supervisory measures applied in operational processes at every level and work unit in accordance with the Company's organizational structure;

4. Implementation of an adequate information and communication system to present accurate and timely reports on operational and financial activities, as well as the level of compliance with applicable provisions and regulations; and

5. Implementation of monitoring activities through an evaluation process of the quality of the Internal Control System, including the effectiveness of the Internal Audit function, at all levels and work units of the Company.

To support the effectiveness of this system, the Company implements a clear separation of duties and responsibilities among employees, with interrelated and mutually supportive roles. This separation of functions is supported by standards, policies, and work procedures that aim to minimize the risk of errors, both unintentional and intentional. Furthermore, the Company conducts ongoing monitoring and evaluation to ensure the quality and long-term sustainability of the Internal Control System.

Pengendalian Operasional dan Keuangan
Financial and Operational Control

Sistem pengendalian keuangan dan operasional Perseroan diterapkan dengan memahami dan mengelola seluruh proses bisnis secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penetapan prosedur, hingga pelaksanaan kegiatan operasional. Pengendalian ini diterapkan secara konsisten di seluruh aspek operasional Perseroan, baik pada fungsi administrasi maupun kegiatan produksi, dengan mengacu pada kriteria dan standar yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pengendalian keuangan dan operasional, Perseroan memastikan terselenggaranya pencatatan yang akurat dan tepat waktu, disertai dengan akuntabilitas atas penggunaan sumber daya serta keandalan proses pelaporan dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen yang tepat serta meningkatkan transparansi dan akurasi informasi keuangan dan operasional.

The Company's operational and financial control system is implemented by comprehensively understanding and managing all business processes, from planning and establishing procedures through to the execution of operational activities. This control is applied consistently across all aspects of the Company's operations, including both administrative functions and production activities, in accordance with established criteria and standards.

In implementing operational and financial controls, the Company ensures accurate and timely record keeping, along with accountability for resource use and the reliability of reporting and documentation processes. This aims to support precise management decision-making and enhance the transparency and accuracy of financial and operational information.

Direksi secara aktif menyampaikan informasi yang relevan dan memadai kepada seluruh karyawan terkait kegiatan usaha, baik yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Penyampaian informasi ini dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan, pengendalian, serta pertanggungjawaban kinerja pada setiap unit operasional.

The Board of Directors actively provides relevant and adequate information to all employees regarding business activities, both financial and non-financial, in accordance with the duties and functions of each work unit. This information is provided to support the effectiveness of implementation, control, and accountability for performance in each operational unit.

Sejalan dengan itu, komunikasi atas informasi kegiatan usaha diselenggarakan secara efektif, baik dalam lingkungan internal Perseroan maupun dengan pihak eksternal yang terkait. Perseroan juga didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai, sehingga pengendalian keuangan dan operasional dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi. Melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi tersebut, manajemen dapat memantau secara cepat perkembangan serta perubahan yang terjadi pada aspek keuangan dan operasional Perseroan.

Accordingly, communication regarding business activity information is conducted effectively, both internally and with relevant external parties. The Company is also supported by an adequate information technology system that enables effective, integrated financial and operational controls. Using this information technology system, management can quickly monitor developments and changes across the Company's financial and operational aspects.

Internal Control Over Financial Reporting/ICOFR

Dalam bentuk komitmen untuk menjaga integritas, akurasi, dan transparansi informasi keuangan, Direksi memastikan bahwa penerapan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (*Internal Control over Financial Reporting*/ICOFR) dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

As part of its commitment to maintaining the integrity, accuracy, and transparency of financial information, the Board of Directors ensures that Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) is comprehensive and sustainable.

Implementasi dan pengembangan ICoFR dilakukan melalui tiga tahapan proses yang sistematis dan saling terintegrasi, yaitu:

ICOFR implementation and development are carried out through three systematic and integrated stages:

1. Penyusunan Pedoman dan Rancangan Pengendalian, yang mencakup identifikasi proses bisnis, pemetaan risiko, serta penetapan titik-titik pengendalian utama;

2. Pengujian dan Pemutakhiran Rancangan Pengendalian, yang bertujuan untuk menguji efektivitas desain pengendalian yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan bila diperlukan;

3. Penyusunan Pernyataan Berjenjang, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengendalian internal, yang dilakukan secara

1. Penyusunan Pedoman dan Rancangan Pengendalian, yang mencakup identifikasi proses bisnis, pemetaan risiko, serta penetapan titik-titik pengendalian utama;

2. Testing and Updating of Control Plans, which aims to verify the effectiveness of the established control design and make improvements when necessary;

3. Preparation of a Hierarchical Statement, as a form of accountability for the implementation of internal controls, which is carried out

sistematis mulai dari level pelaksana hingga manajemen tertinggi.

Direksi memastikan bahwa penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan di Perseroan dilaksanakan secara efektif dan tepat untuk memastikan tersedianya informasi dan laporan keuangan yang andal, akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu.

Perseroan juga menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dan signifikan dapat mempengaruhi MKTR dan pemangku kepentingan sebagaimana yang telah disusun oleh Unit Audit Internal secara tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan pertimbangan dari Komite Audit.

systematically from the executive level to the highest management.

The Board of Directors ensures that the Company's internal controls over financial reporting are implemented effectively and appropriately to provide reliable, accurate, complete, appropriate, and timely financial information and reports.

The Company also implements an effective internal audit function across all aspects and elements of activities that directly and significantly impact the MKTR and stakeholders, as outlined annually by the Internal Audit Unit and approved by the President Director and the Board of Commissioners, with the consideration of the Audit Committee.

Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Compliance with Laws and Regulations

Perseroan memahami bahwa kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan prinsip fundamental dalam menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Kepatuhan ini menjadi prasyarat penting agar Perseroan dapat mengelola kegiatan operasional secara lancar, sekaligus mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, kuat, dan berkelanjutan.

Manajemen Perseroan senantiasa memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dikelola secara profesional, transparan, dan efisien, serta menjunjung tinggi komitmen terhadap kepatuhan regulasi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Seluruh karyawan dan jajaran manajemen diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal Perseroan yang terkait.

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional Perseroan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Perseroan, sistem pengendalian internal yang terkait dengan kepatuhan regulasi merupakan salah satu komponen utama dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Sistem ini menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan operasional yang sehat, berhati-hati (*prudent*), aman, dan bertanggung jawab.

The Company understands that compliance with laws and regulations is a fundamental principle in conducting its business activities sustainably. This compliance is a crucial prerequisite for the Company to manage its operational activities smoothly and support healthy, strong, and sustainable business growth.

The Company's management consistently ensures that all operational activities are managed professionally, transparently, and efficiently, and upholds its commitment to regulatory compliance in every decision-making process. All employees and management are required to comply with applicable laws and regulations, as well as related internal Company policies.

The Boards of Commissioners and Directors actively monitor and control the Company's operations to ensure that all operational activities comply with applicable laws and regulations. For the Company, the internal control system for regulatory compliance is a key component of good corporate governance. This system serves as the foundation for healthy, prudent, safe, and responsible operational activities.

Evaluasi dan Pemantauan Sistem Pengendalian

Control System Evaluation and Monitoring

Perseroan melaksanakan evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan, khususnya terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan yang berkaitan dengan aspek operasional, keuangan, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, serta aspek lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal senantiasa efektif, adaptif, dan selaras dengan dinamika bisnis Perseroan.

The Company conducts continuous evaluations of its Internal Control System, particularly regarding company policies and procedures related to operational, financial, marketing, human resource management, and other aspects relevant to business activities. This evaluation is conducted to ensure that the internal control system remains effective, adaptive, and aligned with the Company's business dynamics.

Evaluasi atas efektivitas Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan oleh Departemen Internal Audit yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian secara independen terhadap penerapan pengendalian internal di seluruh kegiatan operasional Perseroan. Selain itu, Komite Audit merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal Perseroan yang berfungsi untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah dirancang dan diimplementasikan secara memadai dan efektif.

The Internal Audit Department evaluates the effectiveness of the Internal Control System, which has the role and responsibility of independently assessing the implementation of internal controls across all of the Company's operational activities. Furthermore, the Audit Committee is an integral part of the Company's internal control system, ensuring that it has been designed and implemented effectively.

Dalam pelaksanaannya, Unit Audit Internal bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan untuk melakukan pemantauan berkelanjutan atas sistem pengendalian internal dan operasional harian Perseroan. Komite Audit selanjutnya memberikan pengawasan tambahan melalui kegiatan penelaahan dan evaluasi yang dilakukan secara triwulanan. Di samping itu, Auditor Eksternal Perseroan turut melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal sebagai bagian dari proses audit tahunan atas Laporan Keuangan Perseroan.

In its implementation, the Internal Audit Unit collaborates with the Corporate Secretary to continuously monitor the Company's internal control system and daily operations. The Audit Committee further provides additional oversight through quarterly reviews and evaluations. In addition, the Company's External Auditor also evaluates the internal control system as part of the annual audit process of the Company's Financial Statements.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan kepada pemangku kepentingan dan/atau disampaikan kepada otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi keuangan, serta laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan Perseroan. Komite Audit juga melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan.

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee reviews financial information to be published to stakeholders and/or submitted to authorities, including financial reports, financial projections, and other reports related to the Company's financial information. The Audit Committee also reviews the Company's compliance with laws and regulations relevant to its business activities.

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Statement of the Boards of Commissioners and Directors on The Implementation Of Internal Control System

Berdasarkan hasil evaluasi tahunan yang dilakukan, Dewan Komisaris dan Direksi menyimpulkan bahwa sepanjang tahun 2025, Sistem Pengendalian Internal Perseroan atas pelaporan keuangan, kegiatan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan secara efektif dan memadai.

Direksi juga menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal telah dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), serta dirancang untuk mencegah dan memitigasi risiko terjadinya kecurangan maupun tindakan lain yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan para pemangku kepentingan.

Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan dan penguatan Sistem Pengendalian Internal secara berkelanjutan guna mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta keberlanjutan usaha Perseroan.

Based on the results of the annual evaluation, the Boards of Commissioners and Directors concluded that throughout 2024, the Company's Internal Control System for financial reporting, operational activities, and compliance with applicable laws and regulations was effective and adequate.

The Board of Directors also concluded that the implementation of the Internal Control System has been carried out in accordance with the prudential principle and is designed to prevent and mitigate the risk of fraud or other actions that could cause losses to the Company and its stakeholders.

The Company is committed to continuously improving and strengthening the Internal Control System to support the implementation of good corporate governance and the sustainability of the Company's business.



Manajemen Risiko

Risk Management

Salah satu tujuan utama penerapan sistem manajemen risiko Perseroan adalah untuk mengurangi potensi risiko secara efektif serta meminimalkan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan risiko dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan terintegrasi ke dalam seluruh proses bisnis Perseroan.

Perseroan telah menetapkan metodologi pengelolaan risiko yang mencakup proses identifikasi dan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan risiko, serta pelaksanaan mitigasi risiko melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk mengelola risiko secara proaktif, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta memperkuat ketahanan Perseroan dalam menghadapi dinamika dan tantangan usaha.

The Corporate Secretary serves as a liaison between the Company and its Shareholders and other Stakeholders, particularly in ensuring the Company's compliance with Capital Market laws and regulations.

The Corporate Secretary's function is to support the Company's governance by assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in fulfilling their obligations to implement the principles of Good Corporate Governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. In general, the Corporate Secretary serves as a reliable and trusted channel of communication and ensures harmonious relationships with Stakeholders to support the Company's business sustainability.

Penerapan Manajemen Risiko Perseroan

Implementation of Corporate Risk Management

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, perdagangan, dan pengolahan kelapa sawit, menghadapi berbagai risiko operasional yang bersumber dari dinamika lingkungan internal maupun eksternal yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/ GCG) melalui pengelolaan risiko yang optimal dan komprehensif, guna mendukung pencapaian kinerja terbaik serta keberlanjutan usaha Perseroan.

Sistem manajemen risiko yang diterapkan Perseroan dirancang untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan menangani berbagai risiko inheren yang melekat pada kegiatan usaha. Pengelolaan risiko dilakukan secara menyeluruh, mencakup proses identifikasi risiko, analisis dampak risiko terhadap kinerja operasional, serta penetapan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mengendalikan potensi risiko tersebut.

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, as a company engaged in palm oil plantations, trading, and processing, faces various operational risks stemming from increasingly complex internal and external environmental dynamics. These conditions require the implementation of good corporate governance (GCG) practices, supported by comprehensive and effective risk management, to enable the Company to achieve optimal performance and business sustainability.

The Company's risk management system is designed to identify, mitigate, and address the various risks inherent in its business activities. Risk management is comprehensive, encompassing risk identification, analysis of the impact of risks on operational performance, and the establishment of appropriate mitigation measures to control these potential risks.

Pengelolaan risiko dilaksanakan melalui fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap kendala maupun potensi gangguan yang dihadapi Perseroan dapat dikelola secara efektif sehingga tidak menimbulkan kerugian material atau mengganggu kelangsungan usaha. Proses manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional Perseroan terintegrasi ke dalam sistem dan proses bisnis secara akurat dan komprehensif.

Risk management is implemented through risk identification, measurement, monitoring, and control to ensure that any obstacles or potential disruptions faced by the Company are effectively managed to prevent material losses or disruptions to business continuity. The risk management process across all of the Company's functional activities is accurately and comprehensively integrated into its business systems and processes.

Manajemen Perseroan secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap implementasi manajemen risiko guna memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara tingkat risiko dan pengendaliannya. Sistem dan kebijakan manajemen risiko juga ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar, regulasi, serta aktivitas operasional Perseroan. Di bawah koordinasi Direksi, para manajer Perseroan melakukan pengelompokan dan pemetaan risiko yang berpotensi dihadapi. Selain itu, Perseroan mendorong peran aktif seluruh karyawan untuk melaporkan potensi risiko kepada unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan secara dini dan efektif.

The Company's management continuously monitors the implementation of risk management to ensure an adequate balance between risk levels and controls. Risk management systems and policies are also reviewed periodically to adapt to changing market conditions, regulations, and the Company's operational activities. Under the Board of Directors' coordination, the Company's managers categorize and map potential risks. Furthermore, the Company encourages all employees to actively report potential risks to the unit responsible for risk management, so that mitigation measures can be implemented early and effectively.

Tujuan Penerapan Manajemen Risiko
Purpose of Implementing Risk Management

Penerapan Manajemen Risiko di PT Menthobi Karyatama Raya Tbk bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Perseroan secara berkelanjutan serta memperkuat ketahanan usaha dalam menghadapi berbagai dinamika dan ketidakpastian. Tujuan tersebut meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran seluruh insan Perseroan bahwa setiap upaya pencapaian sasaran dan target usaha mengandung risiko, sehingga setiap individu dan unit kerja, baik Direktorat, Unit Kerja Kantor Pusat, maupun Kantor Operasional, memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagai bagian dari sistem manajemen risiko korporat yang terintegrasi;

2. Meningkatkan kepastian pencapaian sasaran dan target Perseroan melalui pengelolaan risiko yang efektif, antara lain dengan:

The implementation of Risk Management at PT Menthobi Karyatama Raya Tbk aims to support the sustainable achievement of the Company's strategic objectives and strengthen business resilience in the face of various dynamics and uncertainties. These objectives include:

1. Increasing awareness among all Company personnel that every effort to achieve business goals and targets involves risk. Therefore, every individual and work unit, including Directorates, Head Office Work Units, and Operational Offices, has the responsibility to manage risk in accordance with their roles and authorities within an integrated corporate risk management system.

2. Increase the certainty of achieving the Company's goals and targets through effective risk management, including:

a. Menurunkan tingkat kemungkinan terjadinya peristiwa yang berpotensi menimbulkan dampak negatif; dan

b. Meminimalkan potensi kerugian yang dapat timbul sebagai akibat dari peristiwa tersebut;

3. Meningkatkan efisiensi operasional melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, sehingga Perseroan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan; serta

4. Memperkuat reputasi Perseroan dengan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, investor, regulator, dan masyarakat, melalui penerapan manajemen risiko yang baik. Reputasi yang positif diharapkan dapat memberikan keunggulan kompetitif serta meningkatkan daya tarik Perseroan bagi para investor.

a. Reducing the likelihood of events that have the potential to cause negative impacts; and

b. Minimizing potential losses that may arise as a result of such events;

3. Improving operational efficiency through the implementation of effective risk management, enabling the Company to optimize resource utilization, reduce waste, and increase productivity, ultimately positively impacting the Company's financial performance; and

4. Strengthening the Company's reputation by building trust among stakeholders, including customers, investors, regulators, and the public, through the implementation of good risk management. A positive reputation is expected to provide a competitive advantage and increase the Company's attractiveness to investors.

Tahapan Pelaksanaan Manajemen Risiko

Risk Management Implementation Stages

Dalam rangka menerapkan sistem manajemen risiko yang efisien dan efektif, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk menerapkan sejumlah tahapan yang terintegrasi ke dalam proses bisnis Perseroan, yang meliputi:

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian terhadap seluruh jenis risiko yang dihadapi Perseroan, termasuk risiko yang timbul dari pengembangan produk baru maupun pelaksanaan aktivitas usaha baru;

2. Memastikan ketersediaan kebijakan manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai, yang didukung oleh prosedur kerja, sistem pelaporan, dan sistem informasi yang mampu menyediakan data, informasi, serta analisis risiko secara akurat dan tepat waktu;

3. Memastikan bahwa proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah mempertimbangkan aspek operasional dan bisnis secara menyeluruh, termasuk tingkat risiko yang melekat pada setiap unit kerja;

To implement an efficient and effective risk management system, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk implements several stages integrated into the Company's business processes, including:

1. Identifying and controlling all types of risks faced by the Company, including risks arising from new product development and the implementation of new business activities;

2. Ensuring the availability of risk management policies and the establishment of adequate risk limits, supported by work procedures, reporting systems, and information systems capable of providing accurate and timely data, information, and risk analysis;

3. Ensure that the process of developing work systems and procedures takes into account comprehensive operational and business aspects, including the level of risk inherent in each work unit;

4. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah mitigasi risiko yang telah ditetapkan, guna memastikan risiko dapat dikendalikan dalam batas toleransi yang dapat diterima Perseroan; serta

5. Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan Perseroan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat dan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam seluruh aktivitas usaha.

4. Analyze and evaluate the effectiveness of established risk mitigation measures to ensure that risks can be controlled within acceptable tolerance limits for the Company; and

5. Monitor the Company's level of compliance with healthy corporate governance principles and the application of prudential principles in all business activities.

Identifikasi dan Upaya Pengelolaan Risiko

Risk Identification and Management Efforts

Sepanjang tahun 2025, Perseroan secara proaktif melakukan identifikasi terhadap berbagai risiko yang berpotensi timbul dalam proses kegiatan usaha. Proses ini merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan, guna memastikan kelangsungan usaha serta pencapaian kinerja Perseroan secara optimal.

Throughout 2025, the Company proactively identified various risks that could potentially arise in its business activities. This process is part of the implementation of integrated and sustainable risk management to ensure business continuity and optimal performance.

Berdasarkan hasil identifikasi, risiko yang dihadapi Perseroan dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu risiko operasional yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan usaha, serta risiko keuangan yang berpotensi memengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan Perseroan.

Based on the identification results, the risks faced by the Company are grouped into two main categories: operational risks, which have a significant impact on the continuity of business activities, and financial risks, which have the potential to impact the Company's performance and financial stability.

Uraian mengenai jenis risiko tersebut beserta strategi dan upaya pengelolaan yang diterapkan oleh Perseroan disajikan dalam tabel berikut.

A description of these types of risks, along with the strategies and management efforts implemented by the Company, is presented in the following table.

Tabel Jenis dan Upaya Mitigasi Risiko
Table: Types and Risk Mitigation Efforts

Jenis Risiko Types of Risks	Penjelasan Risiko Risk Explanation	Mitigasi/Pengelolaan Mitigation/Management
	Risiko Operasional **Operational Risks**	
Risiko Fluktuasi Harga Pasar Minyak Kelapa Sawit **Risk of Palm Oil Market Price Fluctuations**	Harga Minyak Kelapa Sawit (MKS), Inti Kelapa Sawit (IKS), serta produk turunannya dipengaruhi oleh dinamika harga pasar nasional dan internasional. Fluktuasi harga minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*/ CPO) berpotensi memengaruhi pendapatan, margin usaha, serta kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan. The prices of Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel Oil (PKS), and their derivative products are influenced by national and international market price dynamics. Fluctuations in crude palm oil prices can affect the Company's revenue, operating margins, and overall financial performance.	Perseroan tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko yang timbul akibat fluktuasi harga pasar produk kelapa sawit di pasar internasional. Perubahan harga komoditas tersebut berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan dan operasional Perseroan. Untuk memitigasi dampak risiko tersebut, Entitas Anak menerapkan berbagai strategi dan perencanaan usaha yang terukur, antara lain melalui optimalisasi perencanaan produksi, efisiensi biaya operasional, serta pemantauan perkembangan harga pasar secara berkelanjutan guna mendukung pengambilan keputusan manajemen yang tepat. The Company cannot completely avoid the risks arising from fluctuations in international palm oil prices. These changes in commodity prices could affect the Company's financial and operational performance. To mitigate these risks, the Subsidiary implements various measurable business strategies and plans, including optimizing production planning, enhancing operational cost efficiency, and continuously monitoring market price developments to support informed decision-making.
Risiko Perubahan Cuaca **Climate Change Risk**	Sebagai pelaku usaha di bidang pengolahan kelapa sawit, Perseroan sangat bergantung pada ketersediaan Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku utama, yang dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi cuaca. Curah hujan yang terlalu tinggi maupun periode musim hujan yang berkepanjangan berpotensi mengganggu produktivitas dan kualitas TBS, sehingga dapat berdampak pada kelancaran proses produksi dan kinerja operasional Perseroan. As a palm oil processing business, the Company relies heavily on the availability of Fresh Fruit Bunches (FFB) as its primary raw material, which is significantly affected by weather conditions. Excessive rainfall or prolonged rainy seasons can disrupt FFB productivity and quality, thereby affecting the smooth operation of the Company's production process and operational performance.	Entitas Anak senantiasa berupaya memanfaatkan data dan mempelajari siklus perubahan iklim dan cuaca, untuk meminimalkan dampak risiko iklim atau cuaca terhadap tanaman kelapa sawit. The Subsidiary continuously strives to utilize data and study climate and weather change cycles to minimize the impact of climate or weather risks on oil palm plantations.

Jenis Risiko Types of Risks	Penjelasan Risiko Risk Explanation	Mitigasi/Pengelolaan Mitigation/Management
Risiko Ketersediaan Bahan Baku **Raw Material Supply Risk**	Dalam kegiatan operasional pengolahan kelapa sawit, Perseroan bergantung pada pasokan bahan baku berupa Tandan Buah Segar (TBS). Penurunan ketersediaan pasokan TBS, baik dalam jumlah yang signifikan maupun dalam jangka waktu yang berkepanjangan, berpotensi berdampak langsung terhadap tingkat utilisasi pabrik, kontinuitas proses produksi, serta kinerja operasional dan keuangan Perseroan. In its palm oil processing operations, the Company relies on a supply of raw materials, namely Fresh Fruit Bunches (FFB). A reduction in FFB supply, whether in significant quantities or over a prolonged period, can directly affect mill utilization rates, production continuity, and the Company's operational and financial performance.	Ketersediaan TBS memegang peranan penting dalam kemampuan Perseroan untuk menghasilkan Minyak Sawit (MKS) dan Inti Kelapa Sawit (IKS). Entitas Anak mengimplementasi pada perencanaan kebutuhan bahan baku dengan matang dalam jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi dan permintaan produk. The availability of FFB is crucial to the Company's ability to produce Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel (PK). The subsidiary implements thorough raw material requirements planning within a specific timeframe, tailored to production needs and product demand.
Risiko Persaingan Usaha **Business Competition Risk**	Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan menghadapi tingkat persaingan yang cukup ketat dengan pelaku usaha lain yang menghasilkan produk sejenis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, Perseroan juga menghadapi persaingan langsung dengan perusahaan pengolahan kelapa sawit yang beroperasi di sekitar wilayah usaha Perseroan. Kondisi persaingan tersebut berpotensi mempengaruhi pangsa pasar, volume penjualan, serta kinerja keuangan Perseroan apabila tidak dikelola secara optimal. In carrying out its operational activities, the Company faces quite intense competition from other businesses producing similar products, both domestically and internationally. Furthermore, the Company also faces direct competition from palm oil processing companies operating near its business areas. This competitive environment has the potential to impact the Company's market share, sales volume, and financial performance if not managed optimally.	Dengan adanya persaingan usaha tersebut, maka Perseroan harus dapat menjaga kualitas serta harga yang ditawarkan kepada para pelanggannya. Hal tersebut tentunya membuat produk dari Perseroan, dapat bersaing secara kompetitif dengan produk-produk kompetitor. Given this competitive environment, the Company must maintain the quality and prices it offers its customers. This will ensure the Company's products can compete effectively with competitors' products.

Jenis Risiko Types of Risks	Penjelasan Risiko Risk Explanation	Mitigasi/Pengelolaan Mitigation/Management
Risiko Perkembangan Teknologi **Technological Development Risk**	Perkembangan teknologi di bidang agronomi dan peralatan pabrik yang semakin canggih menuntut Perseroan untuk melakukan adaptasi secara berkelanjutan. Apabila Perseroan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut secara tepat waktu dan efektif, terdapat risiko terjadinya penurunan efisiensi operasional serta berkurangnya daya saing dibandingkan dengan perusahaan lain di industri sejenis. Risiko ini berpotensi mempengaruhi produktivitas, kualitas produk, serta kinerja operasional dan keuangan Perseroan secara keseluruhan. Technological developments in agronomy and increasingly sophisticated manufacturing equipment require the Company to adapt continuously. If the Company fails to keep pace with these technological developments in a timely and effective manner, there is a risk of decreased operational efficiency and reduced competitiveness compared to other companies in similar industries. This risk could affect productivity, product quality, and the Company's overall operational and financial performance.	Perseroan harus mampu beradaptasi sehingga Perseroan dapat terus bersaing dan memberikan nilai tambah bagi grup Perseroan. Dalam hal Perseroan harus dapat beradaptasi pada teknologi agronomi, yang akan berdampak pada produktivitas, baik dari pabrik, maupun kebun, hingga kualitas yang dapat diberikan kepada para pelanggan. The Company must be able to adapt to remain competitive and provide added value to the group. In this regard, the Company must adapt to agronomic technology, which will impact productivity, both at the factory and on the plantation, and ultimately the quality it can deliver to customers.
Risiko Produk Substitusi **Substitute Product Risk**	Perseroan menghadapi risiko adanya produk substitusi berupa minyak nabati berbasis canola yang dipersepsikan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah serta manfaat kesehatan tertentu dibandingkan Minyak Kelapa Sawit (MKS). Perkembangan preferensi konsumen terhadap produk yang dianggap lebih sehat berpotensi mempengaruhi permintaan pasar terhadap produk berbasis kelapa sawit. Risiko ini dapat berdampak pada volume penjualan, posisi daya saing, serta kinerja keuangan Perseroan apabila tidak dikelola secara tepat. The Company faces the risk of substitution by canola-based vegetable oil, which is perceived to have lower saturated fat content and certain health benefits compared to Crude Palm Oil (CPO). Growing consumer preferences for healthier products have the potential to influence market demand for palm oil-based products. This risk could impact sales volume, competitive position, and the Company's financial performance if not managed appropriately.	Adanya produk pengganti tersebut, tentunya membuat Perseroan harus dapat menjaga kualitas serta harga dari MKS yang ditawarkan oleh Perseroan, sehingga pelanggan dapat terus menggunakan produk Perseroan tanpa berpaling ke produk pengganti tersebut. The existence of these substitute products requires the Company to maintain the quality and price of the CPO it offers, so that customers continue to use the Company's products rather than switch to substitutes.

Jenis Risiko Types of Risks	Penjelasan Risiko Risk Explanation	Mitigasi/Pengelolaan Mitigation/Management
Risiko Perubahan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Terkait Industri Kelapa Sawit **Risk of Changes in Government Policies and Regulations Related to the Palm Oil Industry**	Perseroan menghadapi risiko yang berasal dari perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah yang berkaitan dengan industri kelapa sawit, baik di tingkat nasional maupun daerah. Regulasi tersebut mencakup ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta pemerintah daerah. Perubahan atau pengetatan regulasi berpotensi mempengaruhi operasional Perseroan, termasuk peningkatan biaya kepatuhan, penyesuaian proses bisnis, serta risiko administratif dan hukum yang dapat berdampak pada kinerja dan keberlanjutan usaha Perseroan. The Company faces risks arising from changes in government policies and regulations affecting the palm oil industry, at both the national and regional levels. These regulations include provisions issued by the Ministry of Environment and Forestry, the Ministry of Finance, the Ministry of Manpower, and regional governments. Changes or tightening of regulations could affect the Company's operations, including increased compliance costs, adjustments to business processes, and administrative and legal risks that could impact performance and business sustainability.	Dalam menjalankan operasional, Perseroan senantiasa mematuhi Kebijakan dan Regulasi Pemerintah terkait industri Kelapa Sawit khususnya peraturan yang diberlakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan serta Peraturan Daerah. In carrying out its operations, the Company always complies with Government Policies and Regulations related to the Palm Oil industry, including regulations enforced by the Ministry of Environment and Forestry, the Ministry of Finance, and the Ministry of Manpower, as well as Regional Regulations.
Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah Terkait Pengelolaan Lingkungan **Risk of Changes in Government Policies Related to Environmental Management**	Perkembangan kebijakan dan standar pengelolaan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan perubahan dan penambahan indikator kerusakan lingkungan yang semakin ketat, disertai dengan penerapan sanksi yang lebih beragam, mulai dari pengenaan denda administratif, penghentian sementara kegiatan operasional, penutupan lokasi usaha, hingga pencabutan izin usaha. Perubahan ketentuan tersebut dapat menimbulkan risiko kepatuhan yang berdampak pada kelangsungan operasional, reputasi, serta kinerja keberlanjutan Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan menghadapi tingkat persaingan yang cukup ketat dengan pelaku usaha lain yang menghasilkan produk sejenis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, Perseroan juga menghadapi persaingan langsung dengan perusahaan pengolahan kelapa sawit yang beroperasi di sekitar wilayah usaha Perseroan. Kondisi persaingan tersebut berpotensi mempengaruhi pangsa pasar, volume penjualan, serta kinerja keuangan Perseroan apabila tidak dikelola secara optimal.	Entitas Anak senantiasa mendukung sepenuhnya ketentuan terkait dengan kelestarian alam dan lingkungan, termasuk pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai), pengelolaan limbah padat, cair, maupun gas. Dengan adanya persaingan usaha tersebut, maka Perseroan harus dapat menjaga kualitas serta harga yang ditawarkan kepada para pelanggannya. Hal tersebut tentunya membuat produk dari Perseroan, dapat bersaing secara kompetitif dengan produk-produk kompetitor.

Jenis Risiko Types of Risks	Penjelasan Risiko Risk Explanation	Mitigasi/Pengelolaan Mitigation/Management
Risiko Tanah Status Pengembangan **Land Development Status Risk**	Kegiatan operasional Perseroan memiliki keterkaitan erat dengan pemanfaatan lahan dan kawasan, khususnya dalam pengembangan dan pengelolaan area perkebunan. Dalam pelaksanaannya, terdapat potensi risiko apabila pengembangan kawasan perkebunan bersinggungan dengan kawasan hutan lindung atau area bernilai konservasi tinggi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, serta berpotensi berdampak pada keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem di sekitar wilayah operasional Perseroan. The Company's operational activities are closely linked to land and area utilization, particularly in the development and management of plantation areas. In practice, there are potential risks if plantation development overlaps with protected forest areas or areas of high conservation value. This situation can pose a risk to compliance with forestry and environmental laws and regulations, and may impact biodiversity and the sustainability of the ecosystems surrounding the Company's operational areas.	Sepanjang tanah yang telah dimiliki oleh Entitas Anak (PT Menthobi Makmur Lestari) sudah termasuk dalam izin lokasi. Hal ini tidak terdapat risiko hukum atas kegiatan penanaman yang dilakukan di tanah tersebut, dengan tetap mematuhi Peraturan yang ada terkait pertanahan maupun kawasan hutan. As long as the location permit covers the land owned by the Subsidiary (PT Menthobi Makmur Lestari), there is no legal risk associated with planting activities on that land, provided they comply with existing regulations regarding land and forest areas.
	Risiko Keuangan **Financial Risks**	
Risiko Kredit **Credit Risk**	Risiko kredit merupakan risiko kerugian keuangan yang timbul apabila pelanggan atau pihak terkait Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Perseroan. Risiko kredit Perseroan terutama melekat pada aset keuangan berupa kas dan setara kas, piutang usaha, serta piutang lain-lain. Credit risk is the risk of financial loss that arises if the Company's customers or related parties are unable to fulfill their contractual obligations to the Company. The Company's credit risk primarily relates to cash and cash equivalents, trade receivables, and other receivables.	Kebijakan Perseroan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dalam sistem keuangan juga akan dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur terhadap risiko kredit macet tidak signifikan. Selain itu, piutang usaha dan piutang lain-lain yang belum jatuh tempo ataupun penurunan nilai yakni dengan debitur kredit yang memiliki catatan pembayaran yang baik. Kas dan bank dan aset lain-lain yang belum jatuh tempo ataupun penurunan nilai ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik. The Company's policy requires that all customers who wish to conduct credit sales transactions undergo credit verification. Furthermore, accounts receivable balances in the financial system will be continuously monitored to ensure that exposure to bad debt risk is not significant. Furthermore, trade and other receivables that are not yet past due or impaired are with credit debtors with a good payment record. Cash and bank balances, and other assets that are not yet past due or impaired, are placed with authorized and reputable financial institutions.

Jenis Risiko Types of Risks	Penjelasan Risiko Risk Explanation	Mitigasi/Pengelolaan Mitigation/Management
Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing **Foreign Exchange Rate Fluctuation Risk**	Risiko nilai tukar mata uang asing timbul akibat fluktuasi kurs, khususnya Dolar Amerika Serikat (USD), terhadap Rupiah. Mengingat harga jual produk utama Perseroan, yaitu *Crude Palm Oil* (CPO), ditetapkan berdasarkan USD, maka perubahan nilai tukar tersebut dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan dan Entitas Anak. Apresiasi maupun depresiasi USD terhadap Rupiah berpotensi menyebabkan peningkatan atau penurunan nilai penjualan dan kinerja keuangan Grup Perseroan. Foreign exchange risk arises from exchange rate fluctuations, particularly between the United States Dollar (USD) and the Rupiah. Given that the Company's main product, Crude Palm Oil (CPO), is priced in USD, changes in exchange rates may affect the Company's and its Subsidiaries' revenues. The appreciation or depreciation of the USD against the Rupiah can increase or decrease the Company Group's sales value and financial performance.	Dalam meminimalkan risiko terhadap Perubahan kurs valuta asing, Perseroan melakukan strategi dengan sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama. To minimize the risk of changes in foreign exchange rates, the Company implements a strategy that partially manages this risk through natural hedges arising from monetary assets and liabilities denominated in the same foreign currency.
Risiko Permodalan **Capital Risk**	Risiko pengelolaan modal merupakan risiko yang timbul apabila Perseroan tidak mampu menjaga struktur permodalan yang sehat dan optimal. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa melakukan pemeliharaan rasio permodalan yang seimbang antara liabilitas dan ekuitas guna mendukung keberlanjutan usaha, menjaga fleksibilitas keuangan, serta memaksimalkan nilai dan imbal hasil bagi Pemegang Saham. Capital management risk arises when the Company is unable to maintain a healthy and optimal capital structure. Therefore, the Company consistently maintains a balanced capital ratio between liabilities and equity to support business sustainability, maintain financial flexibility, and maximize shareholder value and returns.	Perseroan mengelola dan melakukan penyesuaian terhadap struktur permodalan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Dalam rangka memelihara dan mengelola struktur permodalan, Perseroan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang. Kebijakan manajemen dalam mempertahankan secara konsisten struktur permodalan yang sehat untuk jangka panjang, guna mempertahankan akses terhadap berbagai alternatif pendanaan pada biaya (*cost of fund*) yang wajar. The Company manages and adjusts its capital structure in response to changing economic conditions. To maintain and manage its capital structure, the Company considers capital efficiency based on operating cash flow, capital expenditures, and future capital needs. Management's policy is to consistently maintain a healthy capital structure over the long term to ensure access to various funding alternatives at a reasonable cost of funds.

Jenis Risiko Types of Risks	Penjelasan Risiko Risk Explanation	Mitigasi/Pengelolaan Mitigation/Management
Risiko Likuiditas **Liquidity Risk**	Risiko likuiditas merupakan risiko terjadinya kerugian akibat adanya ketidaksesuaian antara arus kas masuk dan arus kas keluar Perseroan. Kesenjangan arus kas yang signifikan dapat menurunkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila tidak dikelola secara efektif, risiko likuiditas berpotensi mempengaruhi kelangsungan usaha serta stabilitas keuangan Perseroan. Liquidity risk is the risk of loss resulting from a mismatch between the Company's cash inflows and outflows. A significant cash flow gap can impair the Company's ability to meet maturing financial obligations, both short-term and long-term. If not managed effectively, liquidity risk can impact the Company's business continuity and financial stability.	Perseroan dan Entitas Anak mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan mengelola utang yang jatuh tempo, dengan mengatur kas serta ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit yang berkomitmen secara cukup. The Company and its Subsidiaries manage their liquidity to fund capital expenditures and manage maturing debt by managing cash and the availability of funding through sufficient committed credit facilities.
Risiko Tingkat Suku Bunga **Interest Rate Risk**	Risiko tingkat bunga timbul dari penggunaan fasilitas pinjaman oleh Perseroan, baik untuk tujuan modal kerja maupun investasi. Pinjaman dengan tingkat suku bunga variabel menyebabkan Perseroan terpapar terhadap risiko fluktuasi tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi beban keuangan serta nilai wajar kewajiban keuangan Perseroan. Perubahan tingkat suku bunga pasar berpotensi berdampak pada arus kas dan kinerja keuangan Perseroan apabila tidak dikelola secara tepat. In operational activities, palm oil processing uses raw material supply in the form of FFB. Reduction in the supply of FFB raw materials in large quantities or over a long period of time can directly affect the Company's performance.	Perseroan memiliki kebijakan formal lindung nilai sehubungan dengan eksposur tingkat bunga. Eksposur terhadap risiko tingkat bunga dipantau secara berkelanjutan oleh Perseroan. Perseroan memiliki kebijakan formal lindung nilai sehubungan dengan eksposur tingkat bunga. Eksposur terhadap risiko tingkat bunga dipantau secara berkelanjutan oleh Perseroan.

Efektivitas Pelaksanaan Manajemen Risiko

Effectiveness of Risk Management Implementation

Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Internal Audit (Departemen Corporate Internal Audit) berperan aktif dalam pelaksanaan manajemen risiko Perseroan melalui penerapan strategi pengelolaan risiko yang mencakup proses identifikasi, penilaian, pengendalian, serta evaluasi atas berbagai jenis risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan usaha Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, sistem manajemen risiko yang diterapkan Perseroan telah berjalan secara efektif dan efisien di seluruh lini bisnis dan pada setiap tingkat manajemen. Penerapan sistem tersebut memungkinkan Perseroan untuk mengelola dan memitigasi risiko yang timbul secara tepat, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan usaha serta menjaga keberlangsungan operasional Perseroan secara berkelanjutan.

The Board of Commissioners, Audit Committee, and Internal Audit (Corporate Internal Audit Department) play an active role in the implementation of the Company's risk management through the application of risk management strategies covering the processes of identification, assessment, control, and evaluation of various types of risks that may affect the Company's performance and business sustainability.

Throughout 2025, the risk management system implemented by the Company has operated effectively and efficiently across all business lines and at every level of management. The implementation of this system enables the Company to manage and mitigate arising risks appropriately, thereby supporting the achievement of business objectives and maintaining the sustainability of the Company's operations.



Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atas Penerapan Manajemen Risiko

Statement of The Board of Directors and Board of Commissioners on Risk Management Implementation

Direksi, Dewan Komisaris, serta Komite Audit Perseroan menyatakan bahwa Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan telah dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Penerapan sistem tersebut mempertimbangkan risiko jangka pendek maupun jangka panjang yang berpotensi mempengaruhi kelangsungan usaha, kinerja operasional, serta perkembangan Perseroan secara berkelanjutan.

Melalui pendekatan tersebut, Perseroan berupaya memastikan bahwa setiap risiko yang dihadapi dapat dikelola secara proporsional dan terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan strategis, sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan praktik keberlanjutan.

The Board of Directors, Board of Commissioners, and the Audit Committee state that the Risk Management System has been implemented by upholding the prudential principle. The implementation of the system takes into account both short-term and long-term risks that may affect business continuity, operational performance, and the Company's sustainable growth.

Through this approach, the Company strives to ensure that all risks encountered are managed proportionally and integrated into strategic decision-making processes, in line with the principles of Good Corporate Governance and sustainability practices.

Perkara Hukum yang Berdampak Material

Legal Cases With Material Impact

Sepanjang tahun 2025, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk beserta Entitas Anak menghadapi sejumlah permasalahan hukum yang memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Penanganan atas perkara hukum tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Informasi mengenai jenis perkara, status penanganan, serta potensi dampak terhadap Perseroan disajikan secara ringkas dalam tabel berikut sebagai bagian dari komitmen Perseroan terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan pengungkapan informasi kepada para pemangku kepentingan.

Throughout 2025, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk and its Subsidiaries were involved in several legal cases that had a material impact on the Company's business activities. The handling of these legal matters was carried out in accordance with applicable laws and regulations, and was managed in a transparent and accountable manner.

Information regarding the types of cases, the status of their resolution, and their potential impact on the Company is presented in summary form in the following table, as part of the Company's commitment to implementing good corporate governance principles and ensuring proper disclosure to stakeholders.

Tabel Perkara Hukum Penting
Table: Significant Legal Cases

No.	Permasalahan Hukum Legal Issues	Jumlah Number of Case	
		Perdata Civil	Pidana Criminal
1.	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Resolved (legally binding/final and binding)	-	-
2.	Dalam proses penyelesaian Under resolution process	-	-

Tidak adanya penanganan permasalahan hukum yang dihadapi memberikan dampak atau pengaruh signifikan atas kelangsungan usaha Perseroan selama tahun 2025.

The absence of legal issues faced have a significant impact or influence on the Company's business continuity during 2025.

Perkara Hukum Perdata
Civil Legal Cases

Pada tahun 2025, Perseroan tidak menghadapi permasalahan hukum perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maupun perkara perdata yang masih berlangsung atau merupakan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, hingga periode pelaporan ini tidak terdapat perkara hukum perdata yang berdampak material terhadap kegiatan usaha, posisi keuangan, maupun reputasi Perseroan.

In 2025, the Company did not face any civil legal cases that had obtained final and binding legal status (inkracht), nor were there any ongoing civil cases or cases carried over from previous years. Accordingly, as of the reporting period, there were no civil legal cases with a material impact on the Company's business activities, financial position, or reputation.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan, informasi terkait perkara hukum penting, apabila ada, disajikan dalam tabel berikut.

As part of its commitment to transparency and accountability to stakeholders, information regarding significant legal cases, if any, is presented in the following table.

Tabel Perkara Hukum Perdata yang Dihadapi Perseroan
Table: Civil Legal Cases Faced by the Company

Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter of the Case/Claim	Status Penyelesaian Resolution Status	Pengaruh Terhadap Kondisi Perseroan Impact on the Company's Condition	Sanksi yang dikenakan Sanctions
Nihil Nill	Nihil Nill	Nihil Nill	Nihil Nill

Perkara Hukum Anak Perusahaan
Subsidiary Legal Cases

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh Anak Perusahaan.

Throughout 2025, the Subsidiary faced no legal cases.

Permasalahan Hukum Dewan Komisaris dan Direksi

Legal Issues Involving The Board of Commissioners and Board of Directors

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris maupun Direksi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk yang sedang menjabat dan terlibat dalam permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

Demikian pula pada tingkat Entitas Anak, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki permasalahan hukum yang sedang berlangsung selama periode pelaporan. Kondisi ini mencerminkan komitmen Perseroan dan Entitas Anak dalam menjunjung tinggi prinsip integritas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG).

Throughout 2025, none of the members of the Board of Commissioners or the Board of Directors of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk who were in office were involved in any legal issues, whether civil or criminal.

Similarly, at the Subsidiary level, all members of the Board of Commissioners and Board of Directors were not involved in any ongoing legal issues during the reporting period. This condition reflects the Company's and its Subsidiaries' commitment to upholding integrity, compliance with applicable laws and regulations, and the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

Kebijakan Pengunduran Diri Dewan Komisaris dan Direksi Terkait Kejahatan Keuangan

Policy on Resignation of The Board of Commissioners and Board of Directors In Relation to Financial Crimes

Dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) secara optimal dan komprehensif di seluruh fungsi organisasi, Perseroan telah menetapkan Pedoman Kebijakan Tata Cara Pengunduran Diri Dewan Komisaris dan Direksi apabila Terlibat Kejahatan Keuangan. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan dalam memastikan integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam pelaksanaan wewenang serta tanggung jawab pada tingkat pengurusan dan pengawasan Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi diwajibkan untuk menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya kepada Perseroan apabila yang bersangkutan telah terbukti secara hukum terlibat dalam kejahatan keuangan. Ketentuan dan prosedur pengunduran diri ini diatur secara jelas dalam Pedoman Kerja atau Piagam Dewan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2022.

In order to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) in an optimal and comprehensive manner across all organizational functions, the Company has established a Policy Guideline on the Procedures for the Resignation of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Event of Involvement in Financial Crimes. This policy forms part of the Company's commitment to ensuring integrity, accountability, and compliance in the execution of authority and responsibilities at both the management and supervisory levels.

In accordance with these provisions, each member of the Board of Commissioners and/or Board of Directors is required to submit their resignation to the Company if they are legally proven to be involved in a financial crime. The terms and procedures governing such resignation are clearly stipulated in the Board of Commissioners and Board of Directors Charters, which were established on March 21, 2022.

Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, meminimalkan risiko tata kelola, serta memperkuat budaya etika dan kepatuhan di seluruh lingkungan Perseroan.

The implementation of this policy aims to maintain stakeholder trust, minimize governance risks, and strengthen a culture of ethics and compliance throughout the Company.

Sanksi Administrasi
Administrative Sanctions

Sepanjang tahun pelaporan 2025, Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan maupun Entitas Anak, serta kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi, baik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun oleh otoritas atau regulator lainnya.

Throughout the 2025 reporting period, the Company and its Subsidiaries consistently conducted their business activities in compliance with applicable laws and regulations. Based on monitoring and evaluation, there were no administrative sanctions imposed on the Company or its Subsidiaries, nor on members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by the Financial Services Authority (OJK) or any other authorities or regulators.

Kondisi ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip kepatuhan (*compliance*), kehati-hatian, serta GCG sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan pemangku kepentingan.

This condition reflects the Company's commitment to upholding compliance, prudence, and Good Corporate Governance (GCG) as part of its efforts to maintain business sustainability and stakeholder trust.

Selama tahun 2025, tidak terdapat sanksi administrasi/ sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi oleh Otoritas Terkait. Selain itu, tidak terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material serta keputusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun dalam tiga tahun terakhir dan tidak terjadi pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ ketenagakerjaan/ konsumen/ kepailitan/ komersial/ persaingan atau lingkungan pada tahun 2025.

Throughout 2025, there were no administrative sanctions/sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors by the Relevant Authorities. In addition, there were no cases of non-compliance with laws, rules, and regulations related to significant or material related party transactions, and there were no guilty decisions from the highest tax court regarding any tax matters in the last three years. There were no violations of any laws related to labor/employment/consumer/ bankruptcy/commercial/commercial/competition or environmental issues in 2025.

Klaim Hak atas Kepemilikan Tanah
Land Ownership Claims

Hingga akhir tahun 2025, tidak ada klaim hak atas kepemilikan tanah terhadap Perseroan.

As of the end of 2025, there were no land ownership claims filed against the Company.

Insider Trading

Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh informasi material disampaikan kepada pasar secara seimbang, adil, dan tepat waktu, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dan ketentuan pasar modal yang berlaku. Kebijakan ini tertuang dalam Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh pelaku pasar memperoleh akses informasi yang setara, sehingga tidak terjadi asimetri informasi antara Perseroan sebagai pihak internal dan masyarakat umum sebagai investor.

Sejalan dengan komitmen tersebut, sepanjang tahun 2025 tidak terdapat transaksi perdagangan saham Perseroan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Pengendali. Kondisi ini mencerminkan kepatuhan Perseroan terhadap prinsip integritas, pencegahan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*), serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

The Company is committed to ensuring that all material information is disclosed to the market in a balanced, fair, and timely manner, in accordance with the principles of transparency and applicable capital market regulations. This policy is outlined in the PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Business and Work Ethics Guidelines, which aim to ensure that all market participants have equal access to information. This ensures that information asymmetry between the Company, as an internal party, and the general public, as investors, is eliminated.

In line with this commitment, throughout 2025 there were no share trading transactions conducted by members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders. This condition reflects the Company's adherence to principles of integrity, the prevention of insider trading practices, and the consistent implementation of good corporate governance.

Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

Policy on the Fulfillment of Creditor Rights

Perseroan telah menetapkan Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur yang tertuang dalam Etika Bisnis Perseroan tanggal 22 Maret 2022. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi Perseroan dalam melakukan pengelolaan pendanaan dan hubungan dengan kreditur, baik dalam proses pengajuan pinjaman maupun dalam pelaksanaan kewajiban yang timbul dari perjanjian pembiayaan.

Dalam implementasinya, Perseroan mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap perjanjian, dengan memenuhi seluruh hak dan kewajiban secara transparan, tepat waktu, dan bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama kreditur. Perseroan juga berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang aktual, akurat, dan prospektif kepada kreditur sebagai bentuk pemenuhan hak atas informasi, guna mendukung pengambilan keputusan yang objektif serta menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perseroan.

The Company has established a Policy on the Fulfillment of Creditor Rights as set forth in its Business Ethics dated March 22, 2022. This policy serves as a guideline for the Company in managing financing activities and relationships with creditors, both in the loan application process and in fulfilling obligations arising from financing agreements.

In its implementation, the Company prioritizes compliance with contractual agreements by fulfilling all rights and obligations in a transparent, timely, and responsible manner in accordance with mutually agreed terms with creditors. The Company is also committed to providing creditors with up-to-date, accurate, and forward-looking information as part of fulfilling their right to information, thereby supporting objective decision-making and maintaining creditor trust.

Kreditur yang menjalin kerja sama dengan Perseroan dapat berasal dari dalam maupun luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kebijakan ini, Perseroan berupaya membangun hubungan yang berkelanjutan, saling percaya, dan berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG).

Creditors engaging with the Company may originate from both within and outside the territory of the Republic of Indonesia, in compliance with applicable laws and regulations. Through this policy, the Company seeks to build sustainable, trust-based relationships grounded in the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Kode Etik
Code of Conduct

Perseroan telah mengadopsi Kode Etik Perilaku Bisnis ("Kode Etik") sejak 21 Maret 2022 sebagai landasan etika dalam menjalankan seluruh aktivitas usaha. Kode Etik ini berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh karyawan dan manajemen Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara etis, profesional, sah, dan aman, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company has adopted a Code of Business Conduct ("Code of Conduct") since March 21, 2022, as the ethical foundation for conducting all business activities. This Code of Conduct serves as a guideline and reference for all employees and management in carrying out their duties and responsibilities in an ethical, professional, lawful, and secure manner, in accordance with applicable laws and regulations.

Perseroan meyakini bahwa penerapan Prinsip Etika Bisnis dan Etika Kerja merupakan elemen penting dalam mendukung implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG). Melalui penerapan Kode Etik secara konsisten dan berkelanjutan, Perseroan berupaya menciptakan budaya kerja yang berintegritas, meningkatkan nilai dan keberlanjutan usaha, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

The Company believes that the implementation of Business Ethics and Work Ethics principles is a key element in supporting the application of Good Corporate Governance (GCG). Through the consistent and sustainable implementation of the Code of Conduct, the Company strives to foster a culture of integrity, enhance business value and sustainability, strengthen competitiveness, and promote responsible and sustainable long-term business growth.

Pedoman Kode Etik
Code of Conduct Guidelines

Pedoman penerapan Prinsip Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dituangkan secara komprehensif dalam Kode Etik Perusahaan. Kode Etik ini memuat nilai-nilai, prinsip, serta standar perilaku yang menjadi acuan bagi seluruh karyawan dan manajemen Perseroan dalam menjalankan aktivitas usaha sehari-hari.

The guidelines for implementing Business Ethics and Work Ethics principles of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk are comprehensively outlined in the Company's Code of Conduct. This Code encompasses the values, principles, and standards of behavior that serve as references for all employees and management in conducting daily business activities.

Kode Etik Perusahaan menjelaskan perilaku yang harus dijunjung tinggi serta batasan perilaku yang wajib dipatuhi, guna memastikan

The Company's Code of Conduct defines the behaviors that must be upheld and the boundaries that must be observed to ensure the establishment

terciptanya hubungan kerja yang profesional, saling menghormati, dan berintegritas. Pedoman ini mengatur etika berinteraksi dengan rekan kerja, mitra bisnis, pelanggan, dan konsumen, sehingga seluruh insan Perseroan diharapkan mampu bertindak secara bertanggung jawab, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan serta tata kelola perusahaan yang baik.

of professional, respectful, and integrity-driven working relationships. It governs ethical interactions with colleagues, business partners, customers, and consumers, ensuring that all Company personnel act responsibly, transparently, and in alignment with sustainability values and good corporate governance principles.

Pokok-Pokok Kode Etik
Key Principles of the Code of Conduct

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk memiliki pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja yang menjadi acuan perilaku bagi seluruh insan Perseroan, Entitas Anak, Pemegang Saham, Mitra Kerja, serta pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini disusun dan diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk has established Business Ethics and Work Ethics guidelines that serve as behavioral references for all Company personnel, Subsidiaries, Shareholders, Business Partners, and other stakeholders. These guidelines are developed and implemented in line with the principles of Good Corporate Governance (GCG), namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

Melalui penerapan pedoman tersebut, Perseroan berkomitmen untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dijalankan secara berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab, guna mendukung terciptanya hubungan usaha yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Pedoman Etika Bisnis Perseroan adalah sebagai berikut:

Through the implementation of these guidelines, the Company is committed to ensuring that all business activities are conducted with integrity, professionalism, and accountability, in order to support the establishment of sustainable business relationships and enhance stakeholder trust. The Company's Business Ethics Guidelines are as follows:

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
2. Menghindari praktik-praktik yang tidak mengindahkan norma dan bertentangan dengan peraturan hukum;
3. Setiap SDM tidak dibenarkan menerima gratifikasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau terkait dengan jabatannya;
4. Setiap SDM tidak dibenarkan menawarkan atau menerima suap atau secara langsung menyuruh orang lain untuk melakukannya demi kepentingan orang yang bersangkutan;
5. Setiap SDM tidak dibenarkan melakukan praktik-praktik pembayaran tidak wajar kepada pihak-pihak di luar perusahaan atau secara langsung menyuruh orang lain untuk melakukannya demi kepentingan pihak yang bersangkutan;

1. Compliance with applicable laws and regulations;
2. Avoidance of practices that disregard norms or violate legal provisions;
3. All personnel are prohibited from accepting gratuities that may influence decision-making or are related to their position;
4. All personnel are prohibited from offering or accepting bribes, or instructing others to do so for personal benefit;
5. All personnel are prohibited from engaging in improper payment practices to external parties, or instructing others to do so for personal interest;

6. Peduli terhadap prinsip keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup (K3LH),
7. Memberikan nilai keadilan kepada seluruh SDM;
8. Menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan dan tanpa diskriminasi (tanpa memandang agama/kepercayaan, ras/suku, bangsa, jenis kelamin);
9. Menegakkan hukum dan peraturan perusahaan dengan konsisten tanpa membedakan ras, gender, agama dan jabatan, serta
10. Menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan yakni sebagai berikut:
    a. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan;
    b. Hubungan dengan Pelanggan/Konsumen;
    c. Hubungan dengan Mitra Perusahaan;
    d. Hubungan dengan Kreditur;
    e. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar;
    f. Hubungan dengan Pemerintah;
    g. Hubungan dengan Pemegang Saham; dan
    h. Hubungan dengan Pesaing.

Pedoman Etika Kerja Perseroan adalah sebagai berikut:

1. **Komitmen Sumber Daya Manusia Perusahaan ialah:**
    a. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggungjawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan semangat kebersamaan;
    b. Berkerja keras serta berusaha mencari cara yang terbaik dalam menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien;
    c. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan memperluas pengetahuan.

6. Upholding principles of occupational health, safety, and environmental protection (OHS&E);
7. Ensuring fairness for all personnel;
8. Upholding principles of fairness, equality, and non-discrimination (regardless of religion/belief, race/ethnicity, nationality, or gender);
9. Enforcing laws and Company regulations consistently without discrimination based on race, gender, religion, or position; and
10. Maintaining good relationships and communication with stakeholders, including:
    a. Relationships with Stakeholders;
    b. Relationships with Customers/Consumers;
    c. Relationships with Business Partners;
    d. Relationships with Creditors;
    e. Relationships with surrounding Communities and the Environment;
    f. Relationships with the Government;
    g. Relationships with Shareholders; and
    h. Relationships with Competitors.

The Company's Work Ethics Guidelines are as follows:

1. **Commitment of the Company's Human Resources:**
    a. Performing duties professionally with full responsibility, while upholding integrity, honesty, and a spirit of teamwork;
    b. Working diligently and striving to find the best ways to complete tasks effectively and efficiently;
    c. Demonstrating strong motivation for self-development to enhance competence and broaden knowledge.

2. Menjaga Nama Baik Perusahaan ialah:

a. Menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam maupun di luar pekerjaan;

b. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat perusahaan;

c. Menghindari perbuatan yang berpotensi pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

3. Menjaga Hubungan Baik ialah:

a. Menjaga perilaku dan sopan santun;

b. Saling menghargai, tidak meremehkan dan mebeda-bedakan satu dengan lainnya;

c. Senantiasa jujur dan berfikir positif dalam berinteraksi dengan sesama.

4. Melindungi Informasi Perusahaan ialah:

a. Melindungi informasi rahasia Perusahaan baik saat masih aktif bekerja maupun sudah tidak bekerja atau tidak mempunyai ikatan kerjasama dengan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

b. Menggunakan informasi perusahaan baik yang bersifat umum dan khusus hanya untuk kepentingan Perusahaan.

5. Pengelolaan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan ialah:

a. Memberikan data yang diper-tanggungjawabkan dan tidak melanggar hukum;

b. Tidak diperkenankan untuk meng-gunakan data, catatan dan dokumen Perusahaan untuk kepentingan pribadi dan berpotensi merugikan Perusahaan dan berimplikasi kepada *Stakeholders*; dan

2. Maintaining the Company's Reputation:

a. Demonstrating courteous and respectful behavior both within and outside the workplace;

b. Avoiding actions that may diminish the Company's honor or reputation;

c. Refraining from actions that may potentially violate applicable laws and regulations.

3. Maintaining Good Relationships:

a. Upholding proper conduct and courtesy;

b. Respecting one another, without discrimination or belittlement;

c. Maintaining honesty and a positive mindset in interactions with others.

4. Protecting Company Information:

a. Safeguarding the Company's confidential information both during and after employment or contractual engagement, in accordance with applicable laws and regulations;

b. Using Company information, whether general or specific, solely for the benefit of the Company.

5. Management of Company Data and Reporting:

a. Providing accountable data that complies with legal requirements;

b. Prohibiting the use of Company data, records, and documents for personal interests that may harm the Company or impact stakeholders; and

c. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar, diverifikasi keakuratannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Recording data and preparing reports based on valid sources, with verified accuracy and accountability.

Sosialisasi Kode Etik
Code of Conduct Socialization

Dalam rangka memastikan pemahaman dan penerapan Kode Etik secara konsisten, Perseroan melakukan sosialisasi Kode Etik secara berkala kepada seluruh karyawan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui berbagai media internal Perseroan yang dapat diakses setiap saat oleh seluruh karyawan, sehingga Kode Etik menjadi referensi yang mudah dijangkau dalam aktivitas kerja sehari-hari.

To ensure consistent understanding and implementation of the Code of Conduct, the Company regularly conducts dissemination programs for all employees. These are carried out through various internal media accessible at all times, making the Code of Conduct an easily accessible reference in daily work activities.

Kode Etik juga disampaikan kepada seluruh karyawan sejak awal bergabung dengan Perseroan sebagai bagian dari proses orientasi, guna menanamkan nilai-nilai etika, integritas, dan profesionalisme sejak dini. Selain itu, Perseroan secara berkelanjutan melakukan edukasi dan penguatan penerapan Kode Etik dalam setiap aktivitas operasional, agar seluruh karyawan memahami serta menerapkan prinsip etika dalam berinteraksi, baik terhadap diri sendiri maupun rekan kerja.

The Code of Conduct is also introduced to all employees upon joining the Company as part of the orientation process, to instill ethical values, integrity, and professionalism from the outset. In addition, the Company continuously provides education and reinforcement of the Code of Conduct in all operational activities to ensure that employees understand and apply ethical principles in their interactions, both personally and professionally.

Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai etika, keterbukaan, dan kejujuran, sekaligus menjaga reputasi Perseroan dan mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan.

These efforts are aimed at fostering a work environment that upholds ethical values, transparency, and honesty, while safeguarding the Company's reputation and supporting the sustainable implementation of good corporate governance.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik
Compliance With the Code of Conduct

Perseroan menegaskan komitmen untuk menjadikan Kode Etik sebagai standar etika tertinggi dalam seluruh aktivitas bisnis dan operasional. Kepatuhan terhadap Kode Etik berlaku bagi seluruh insan Perseroan tanpa pengecualian, baik dalam menjalankan tugas di lingkungan kerja maupun dalam aktivitas di luar Perseroan yang dapat berdampak terhadap reputasi Perseroan.

The Company affirms its commitment to establishing the Code of Conduct as the highest ethical standard across all business and operational activities. Compliance with the Code of Conduct applies to all Company personnel without exception, both in the workplace and in external activities that may impact the Company's reputation.

Sebagai bentuk penegakan disiplin dan integritas, Perseroan menerapkan mekanisme sanksi atas setiap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan,

As part of enforcing discipline and integrity, the Company implements a sanction mechanism for any violations of the Code of Conduct, adjusted

yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut meliputi:

1. Surat peringatan pertama;
2. Surat peringatan kedua;
3. Surat peringatan terakhir;
4. Penangguhan; dan/atau
5. Pemutusan hubungan kerja.

Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memperkuat budaya etika, meningkatkan kepatuhan, serta menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan, sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan keberlanjutan usaha Perseroan.

according to the severity of the offense and applicable provisions. The sanctions include:

1. First warning letter;
2. Second warning letter;
3. Final warning letter;
4. Suspension; and/or
5. Termination of employment.

The enforcement of these sanctions aims to strengthen ethical culture, enhance compliance, and maintain the Company's reputation and stakeholder trust, in line with good corporate governance principles and the Company's business sustainability.

Penerapan dan Penegakkan Kode Etik
Implementation and Enforcement of the Code of Conduct

Penerapan dan penegakan Kode Etik Perseroan berlaku secara menyeluruh dan tanpa pengecualian bagi seluruh jajaran Perseroan, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga seluruh karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak di Perseroan dan Entitas Anak. Seluruh insan Perseroan bertanggung jawab penuh untuk mematuhi dan menerapkan Kode Etik dalam setiap pelaksanaan tugas dan aktivitas usaha.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan diharapkan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Perseroan dan prinsip-prinsip etika dalam setiap kegiatan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun di luar Perseroan, sebagai wujud komitmen terhadap integritas, profesionalisme, serta tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

The implementation and enforcement of the Company's Code of Conduct apply comprehensively and without exception to all levels of the organization, including the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees, both permanent and contract, within the Company and its Subsidiaries. All Company personnel are fully responsible for complying with and implementing the Code of Conduct in the performance of their duties and business activities.

In addition, members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees are expected to consistently uphold the Company's values and ethical principles in their daily activities, both within and outside the workplace, as a manifestation of their commitment to integrity, professionalism, and the implementation of sustainable good corporate governance.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik
Sanctions for Violations of the Code of Conduct

Perseroan menerapkan tindakan disipliner secara tegas dan konsisten terhadap setiap insan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran atas Prinsip Etika Bisnis dan Etika Kerja. Pengenaan sanksi dilakukan secara proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi serta ketentuan internal yang berlaku.

The Company enforces disciplinary actions firmly and consistently against any personnel proven to have violated the principles of Business Ethics and Work Ethics. Sanctions are imposed proportionally in accordance with the severity of the violation and applicable internal provisions.

Bentuk tindakan disipliner yang dapat dikenakan meliputi teguran lisan maupun tertulis, peringatan keras disertai skorsing, pengenaan sanksi finansial, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya menjaga integritas, menegakkan budaya etika, serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan di seluruh lingkungan Perseroan

Disciplinary measures may include verbal or written warnings, formal reprimands accompanied by suspension, financial penalties, and termination of employment. This policy is implemented to maintain integrity, uphold an ethical culture, and ensure the consistent application of good corporate governance throughout the Company.

Pelanggaran Kode Etik
Code of Conduct Violations

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan mencatat tidak terdapat laporan maupun pengaduan terkait pelanggaran Kode Etik yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak, di Perseroan dan Entitas Anak.

As of the end of 2025, the Company recorded no reports or complaints regarding violations of the Code of Conduct involving members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or employees, both permanent and contract, within the Company and its Subsidiaries.

Capaian ini mencerminkan efektivitas penerapan, sosialisasi, serta pengawasan terhadap Kode Etik Perseroan, sekaligus menunjukkan komitmen seluruh insan Perseroan dalam menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, dan kepatuhan sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

This achievement reflects the effectiveness of the implementation, dissemination, and monitoring of the Company's Code of Conduct, and demonstrates the commitment of all Company personnel to upholding integrity, professionalism, and compliance as part of the implementation of sustainable good corporate governance.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen
Employee and Management Share Ownership Program

Sebagai bentuk apresiasi serta upaya meningkatkan keterlibatan karyawan dan manajemen terhadap kinerja dan keberlanjutan Perseroan, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk menerapkan program kepemilikan saham bagi karyawan dan manajemen. Kebijakan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 14/Kom-MKTR/V/2022 tentang *Employee Stock Allocation* (ESA) PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. tertanggal 27 Mei 2022.

employee and management engagement in the Company's performance and sustainability, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk has implemented a share ownership program for employees and management. This policy is established through Decree Number 14/Kom-MKTR/V/2022 concerning Employee Stock Allocation (ESA) of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk., dated May 27, 2022.

Melalui program *Employee Stock Allocation* (ESA), Perseroan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham Perseroan dengan alokasi sebesar 0,60% dari jumlah saham yang ditawarkan kepada publik, atau setara dengan 15.000.000 lembar saham. Harga pelaksanaan ESA ditetapkan sama dengan Harga Penawaran Umum, sebagaimana telah disepakati oleh manajemen Perseroan.

Through the Employee Stock Allocation (ESA) program, the Company provides employees with the opportunity to own shares in the Company, with an allocation of 0.60% of the total shares offered to the public, equivalent to 15,000,000 shares. The ESA exercise price is set equal to the Initial Public Offering price, as agreed by the Company's management.

Selain ESA, Perseroan juga menyelenggarakan *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) yang telah memperoleh persetujuan seluruh Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 01/2022. Program MESOP memberikan opsi kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan dengan jumlah maksimum sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum, atau setara dengan sebanyak-banyaknya 950.000.000 saham biasa atas nama, termasuk pelaksanaan konversi Waran Seri I.

Pelaksanaan Program MESOP selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program ini dirancang untuk menyelaraskan kepentingan manajemen, karyawan, dan pemegang saham, sekaligus mendorong peningkatan kinerja, loyalitas, serta penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi Perseroan.

In addition to ESA, the Company also implements a Management and Employee Stock Option Plan (MESOP), which has been approved by all Shareholders as stated in Deed No. 01/2022. The MESOP program grants share ownership options to management and employees, with a maximum allocation of 10% of the issued and fully paid-up capital prior to the Initial Public Offering, or up to a maximum of 950,000,000 registered ordinary shares, including the conversion of Series I Warrants.

The implementation of the MESOP program is determined by the Company's Board of Commissioners, in compliance with applicable laws and regulations. This program is designed to align the interests of management, employees, and shareholders, while encouraging improved performance, loyalty, and the creation of long-term sustainable value for the Company.

Ketentuan Kepesertaan Program *Employee Stock Allocation* (ESA)

Eligibility Criteria for the Employee Stock Allocation (ESA) Program

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak termasuk sebagai peserta dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA). Program ini secara khusus ditujukan bagi karyawan Perseroan yang memenuhi persyaratan tertentu guna memastikan pemerataan kesempatan dan penerapan prinsip tata kelola yang baik. Adapun kriteria karyawan yang berhak mengikuti Program ESA adalah sebagai berikut:

1. Karyawan dengan level Staf, yang mencakup Asisten dan Manajer;
2. Berstatus sebagai karyawan tetap Perseroan;
3. Memiliki masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun dengan batas akhir periode perhitungan hingga 30 Agustus 2022, sehingga karyawan yang masa kerjanya belum mencapai ketentuan tersebut tidak berhak memperoleh saham dalam Program ESA; dan
4. Karyawan tetap yang ditetapkan dan disetujui oleh Manajemen Perseroan.

Setiap peserta Program *Employee Stock Allocation* (ESA) diwajibkan untuk menandatangani dokumen

Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are not eligible to participate in the Employee Stock Allocation (ESA) Program. This program is specifically designated for employees who meet certain criteria, in order to ensure equal opportunity and the application of good corporate governance principles. The eligibility criteria for employees to participate in the ESA Program are as follows:

1. Employees at Staff level, including Assistant and Manager positions;
2. Permanent employees of the Company;
3. Having a minimum tenure of more than 3 (three) years, with the cut-off date for calculation set at August 30, 2022. Employees who have not met this tenure requirement are not eligible to receive shares under the ESA Program; and
4. Permanent employees who are determined and approved by the Company's Management.

Each participant in the Employee Stock Allocation (ESA) Program is required to sign the necessary

persyaratan serta tunduk sepenuhnya pada ketentuan program ESA yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Kepemilikan saham oleh karyawan yang diperoleh melalui Program ESA memberikan hak-hak yang setara dengan pemegang saham Perseroan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak tersebut meliputi:

a. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

b. Hak untuk menerima dividen serta sisa kekayaan hasil likuidasi Perseroan, apabila ada; dan

c. Hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

Melalui Program ESA, Perseroan berupaya untuk meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) karyawan serta mendorong keterlibatan aktif dalam penciptaan nilai jangka panjang secara berkelanjutan.

Selain Program ESA, Perseroan juga menyelenggarakan Program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) sebagai bagian dari strategi insentif jangka panjang bagi manajemen dan karyawan.

Program MESOP dapat diberikan kepada pihak-pihak berikut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

1. Anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi;
2. Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak termasuk Komisaris Independen, yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi; dan
3. Karyawan Perseroan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Berstatus sebagai karyawan tetap, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Direksi atau pihak yang diberi kewenangan; dan
    b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat pada saat pelaksanaan Program MESOP.

documentation and fully comply with the provisions of the ESA Program as established by the Company.

Share ownership by employees obtained through the ESA Program confers rights equivalent to those of other shareholders of the Company, in accordance with applicable laws and regulations. These rights include:

a. The right to attend and vote at the General Meeting of Shareholders (GMS);

b. The right to receive dividends and any residual assets upon liquidation of the Company, if any; and

c. Other rights as stipulated under the Company Law and its implementing regulations.

Through the ESA Program, the Company aims to enhance employees' sense of ownership and encourage active participation in the creation of long-term sustainable value.

In addition to the ESA Program, the Company also implements a Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) as part of its long-term incentive strategy for management and employees.

The MESOP Program may be granted to the following parties, in accordance with applicable provisions:

1. Members of the Board of Directors serving at the time of option issuance;
2. Members of the Board of Commissioners, excluding Independent Commissioners, serving at the time of option issuance; and
3. Employees of the Company who meet the following requirements:
    a. Permanent employee status, as determined by a Board of Directors resolution or authorized party; and
    b. Not currently subject to moderate or severe disciplinary sanctions at the time of MESOP implementation.

Jangka Waktu Pelaksanaan *Employee Stock Allocation* (ESA) dan *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP)

Timeline for the Implementation of the Employee Stock Allocation (ESA) and the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)

Pemesanan dan penyetoran pembayaran atas saham dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA) dilakukan melalui Perseroan pada Masa Penawaran Umum, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan keteraturan proses, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, pelaksanaan Program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) dilakukan secara bertahap guna mendorong keberlanjutan kinerja serta retensi manajemen dan karyawan kunci. Penerbitan hak opsi dalam program MESOP dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut:

- **Tahap I**
  Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total hak opsi diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Pencatatan Saham, yaitu pada 7 Juli 2023.
- **Tahap II**
  Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total hak opsi diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Pencatatan Saham, yaitu pada 7 Juli 2024.
- **Tahap III**
  Sebesar 40% (empat puluh persen) dari total hak opsi diterbitkan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Pencatatan Saham, yaitu pada 7 Juli 2025.

Subscription and payment for shares under the Employee Stock Allocation (ESA) Program are conducted through the Company during the Public Offering period, in accordance with the schedule determined for the Company's Initial Public Offering (IPO). This mechanism is designed to ensure orderly processes, transparency, and compliance with applicable laws and regulations.

Meanwhile, the implementation of the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) is carried out in stages to support sustained performance and retention of management and key employees. The issuance of option rights under the MESOP Program is conducted in 3 (three) phases, as follows:

- **Phase I**
  SA total of 30% (thirty percent) of the total option rights are issued no later than 12 (twelve) months from the Listing Date, i.e., July 7, 2023.
- **Phase II**
  A total of 30% (thirty percent) of the total option rights are issued no later than 24 (twenty-four) months from the Listing Date, i.e., July 7, 2024.
- **Phase III**
  A total of 40% (forty percent) of the total option rights are issued no later than 36 (thirty-six) months from the Listing Date, i.e., July 7, 2025.

Harga Pelaksanaan *Employee Stock Allocation* (ESA) Dan Management And Employee Stock Option Plan (MESOP)

Exercise Price of The Employee Stock Allocation (ESA) and Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) Programs

Harga pelaksanaan Program *Employee Stock Allocation* (ESA) ditetapkan sama dengan harga penawaran saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO) Perseroan, yaitu sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) per saham. Penetapan harga ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi karyawan sebagai pemegang saham, sejalan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

The exercise price under the Employee Stock Allocation (ESA) Program is set equal to the offering price in the Company's Initial Public Offering (IPO), amounting to Rp120 (one hundred twenty Rupiah) per share. This pricing reflects the principles of fairness and equality for employees as shareholders, in line with good corporate governance practices.

Sementara itu, harga pelaksanaan hak opsi dalam *Program Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) akan ditetapkan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler Bursa Efek Indonesia, sebelum tanggal pengajuan permohonan pencatatan saham. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan harga pelaksanaan yang wajar dan sesuai dengan kondisi pasar.

Meanwhile, the exercise price for options under the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) shall be determined at a minimum of 90% (ninety percent) of the average closing price of the Company's shares over 25 (twenty-five) consecutive trading days in the regular market of the Indonesia Stock Exchange prior to the submission date for share listing. This mechanism ensures that the exercise price remains fair and reflective of market conditions.

Terkait dengan mekanisme pembayaran dalam Program ESA, Perseroan melakukan pembayaran secara tunai menggunakan kas internal Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Pelaksanaan Program ESA dilakukan dengan tetap mengacu dan mematuhi Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

With respect to the payment mechanism under the ESA Program, the Company makes payments in cash using its internal funds to the Underwriter in connection with the Initial Public Offering. The implementation of the ESA Program is carried out in accordance with and in compliance with Bapepam Regulation Number IX.A.7 concerning Subscription and Allotment of Securities in Initial Public Offerings.

Melalui pengaturan harga dan mekanisme pembayaran yang transparan serta sesuai dengan ketentuan regulator, Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa Program Kepemilikan Saham Karyawan dilaksanakan secara akuntabel, adil, dan mendukung keberlanjutan hubungan jangka panjang antara Perseroan dan insan Perseroan.

Through transparent pricing and payment mechanisms in accordance with regulatory provisions, the Company is committed to ensuring that the Employee Share Ownership Program is implemented in an accountable and fair manner, while supporting long-term sustainable relationships between the Company and its personnel.

Kebijakan Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi

Policy on Share Ownership by the Board of Commissioners and/or Board of Directors

Ketentuan mengenai kepemilikan saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk setiap perubahan kepemilikan saham tersebut, telah diatur dalam Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Kebijakan pelaporan tersebut mencakup pengaturan mengenai kepemilikan saham Perseroan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pelaksanaan *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) dan/atau *Management Stock Ownership Program* (MESOP). Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 14/Kom-MKTR/V/2022 tentang *Employee Stock Allocation* (ESA) PT Menthobi Karyatama Raya Tbk tanggal 27 Mei 2022.

Prosedur atau mekanisme penyampaian pelaporan serta jangka waktu pelaporan oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan diatur secara jelas dan konsisten sebagai berikut:

Provisions regarding share ownership of the Company, whether direct or indirect, by members of the Board of Commissioners and Board of Directors, including any changes in such ownership, are regulated under the Policy on Reporting Ownership or Changes in Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors.

This reporting policy covers share ownership held by members of the Board of Commissioners and Board of Directors in relation to the Employee Stock Ownership Program (ESOP) and/or the Management Stock Ownership Program (MESOP). These provisions are stipulated in Decree Number 14/Kom-MKTR/V/2022 concerning Employee Stock Allocation (ESA) of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dated May 27, 2022.

The procedures and mechanisms for reporting, as well as the reporting timelines for each member of the Board of Commissioners and Board of Directors regarding their share ownership and any changes thereto, are clearly and consistently regulated as follows:

Tabel Mekanisme Pelaporan Kepemilikan dan Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan
Table: Reporting Mechanism for Share Ownership and Changes in Share Ownership of the Company

Pelaporan Individu Individual Reporting	**Pelaporan melalui Kuasa** Reporting Through Proxy
Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi menyampaikan laporan secara langsung kepada OJK dan menyampaikan Salinan laporan tersebut kepada Sekretaris Perusahaan. Jangka waktu penyampaian laporan adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada Perseroan dan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja kepada OJK terhitung sejak terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan Members of the Board of Commissioners or the Board of Directors submit reports directly to the OJK and provide a copy of such report to the Corporate Secretary. The submission timeline is no later than 3 (three) working days to the Company and no later than 10 (ten) working days to the OJK from the occurrence of ownership or any change in share ownership in the Company.	Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi menyampaikan laporan melalui Sekretaris Perusahaan dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus paling lambat 2 hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan. Jangka waktu penyampaian laporan ke OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan. Members of the Board of Commissioners or the Board of Directors submit reports through the Corporate Secretary by attaching a Special Power of Attorney no later than 2 (two) calendar days after the occurrence of ownership or any change in share ownership in the Company. The submission timeline to the OJK is no later than 5 (five) working days from the occurrence of ownership or any change in share ownership in the Company.

Perseroan telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas setiap transaksi kepemilikan dan/atau perubahan kepemilikan saham tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, selama tahun 2024, Perseroan telah menyampaikan laporan atas kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi melalui sistem *e-reporting* kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia. Informasi mengenai kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga telah diungkapkan secara lengkap dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The Company has submitted reports to the Financial Services Authority (OJK) for each transaction of share ownership and/or changes in share ownership no later than 10 (ten) days after the occurrence of such transactions, in accordance with applicable laws and regulations.

In this regard, throughout 2024, the Company has reported the share ownership of members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors through the e-reporting system to the OJK and the Indonesia Stock Exchange. Information regarding the share ownership of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors has also been fully disclosed in the Company Profile section of this Annual Report.

Whistleblowing System

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), PT Menthobi Karyatama Raya Tbk telah berkomitmen untuk membangun dan mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS).

Whistleblowing System merupakan sarana pelaporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh insan Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, baik di Perseroan maupun Entitas Anak. Pengaduan dan pelaporan melalui WBS dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal Perseroan dan Entitas Anak, yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, ketentuan internal Perseroan, serta ketentuan etika dan Kode Etik (*Code of Conduct*).

Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan dikelola secara independen melalui mekanisme WBS yang telah ditetapkan dan diatur dalam Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PT Menthobi Karyatama Raya Tbk tanggal 12 Juli 2022, serta Prosedur Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi Eksternal–Internal No. MKTRMS-LLP-01.

In an effort to enhance the effectiveness of Good Corporate Governance (GCG) implementation, PT Menthobi Karyatama Raya Tbk is committed to establishing and implementing a Whistleblowing System (WBS).

The Whistleblowing System serves as a reporting mechanism for alleged violations committed by all Company personnel in the execution of their duties and responsibilities, both within the Company and its Subsidiaries. Reports submitted through the WBS may originate from both internal and external parties of the Company and its Subsidiaries, and may relate to violations of laws and regulations, internal Company policies, as well as ethical standards and the Code of Conduct.

The Company's Whistleblowing System is managed independently through mechanisms established and regulated under the Good Corporate Governance (GCG) Guidelines of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk dated July 12, 2022, as well as the External–Internal Communication, Participation, and Consultation Procedures No. MKTRMS-LLP-01.

Struktur dan Mekanisme *Whistleblowing System*

Structure and Mechanism of the Whistleblowing System

Mekanisme pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Perseroan dan Entitas Anak dapat dilakukan apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan hukum, peraturan internal Perseroan, maupun Kode Etik. Penyampaian laporan dapat dilakukan melalui saluran berikut:

1. Surat Tertulis
   Ditujukan kepada Corporate Secretary untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran, dengan alamat:
   PT Menthobi Karyatama Raya Tbk.
   Gedung Wisma Maktour Lantai 4
   Jalan Otista Raya No. 80, Jakarta Timur

2. *Email*
   Laporan dapat disampaikan melalui alamat email resmi Perseroan: corporate@mktr.co.id.

Ada sejumlah hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduannya, untuk mempermudah dan pempercepat proses tindak lanjut, yakni sebagai berikut:

1. Pelapor harus memberikan informasi identitas diri untuk memudahkan komunikasi, sekurang-kurangnya:
   - Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim);
   - Nomor telepon/alamat email yang dapat dihubungi.

2. Pengaduan/laporan yang disampaikan minimal memberikan gambaran/penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:
   - Indikasi/fakta pelanggaran yang terjadi;
   - Pihak yang diindikasikan sebagai pelaku dan/atau pihak yang terlibat;
   - Kapan, dan di mana terjadinya; dan
   - Keterangan/informasi lain yang dianggap perlu, seperti dampak kerugian yang akan/telah diderita oleh Perseroan, atau patut diduga menunjukkan ketidakwajaran dalam perilaku pegawai yang melanggar peraturan yang berlaku.

The Whistleblowing System within the Company and its Subsidiaries may be utilized when there are indications of violations of laws, internal Company regulations, or the Code of Conduct. Reports may be submitted through the following channels:

1. Written Correspondence
   Addressed to the Corporate Secretary to be forwarded to the Whistleblowing Management Team, at:
   PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
   Wisma Maktour Building, 4th Floor
   Jalan Otista Raya No. 80, East Jakarta

2. Email
   Reports may be submitted via the Company's official email address: corporate@mktr.co.id.

There are several requirements that must be fulfilled by the whistleblower to facilitate and expedite the follow-up process, as follows:

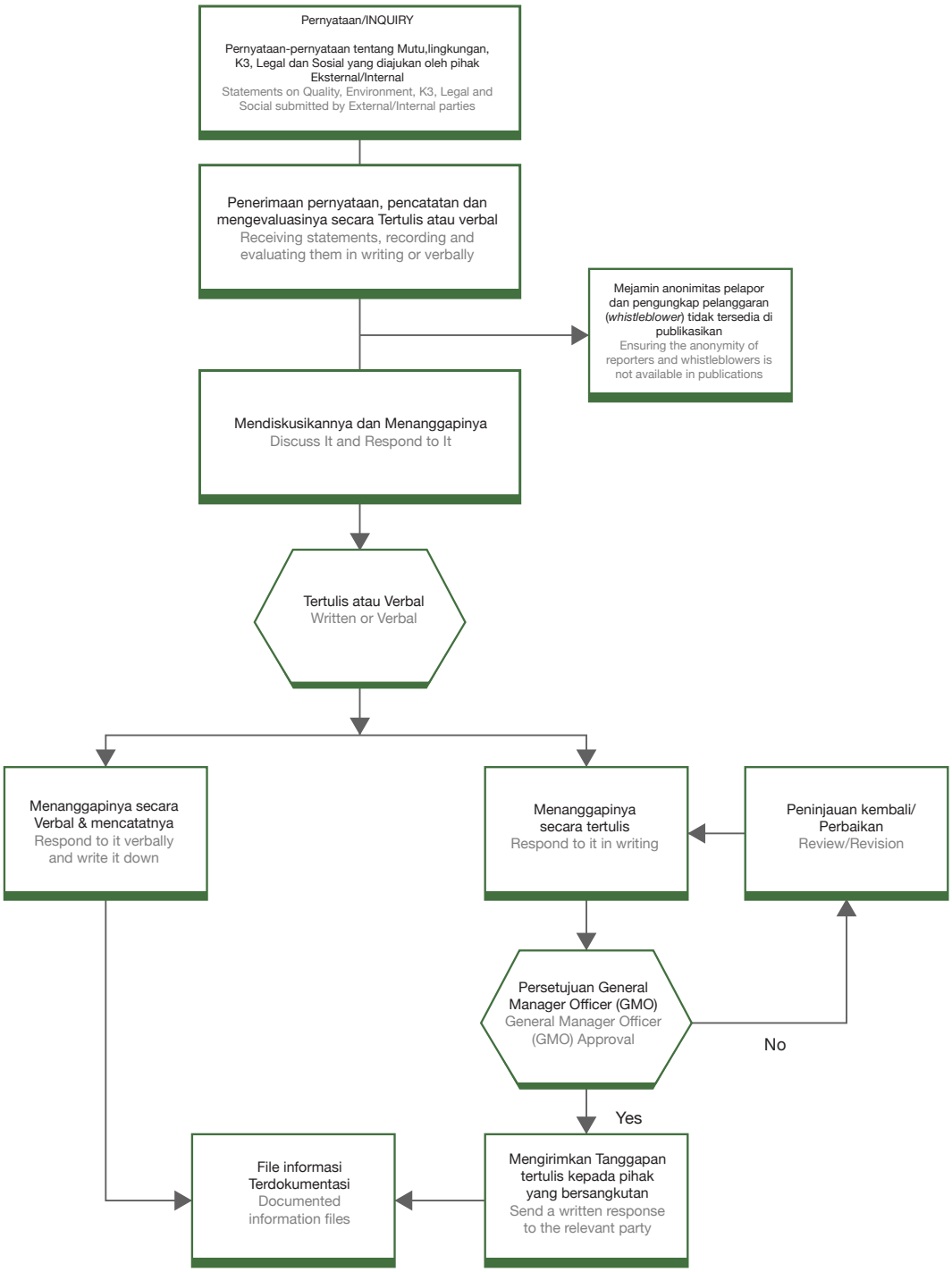
1. The whistleblower should provide identity information to enable communication, at a minimum:
   - Name of the whistleblower (anonymous reporting is permitted);
   - Contact number/email address.

2. The report/complaint should at least include a description of the following:
   - Indications/facts of the alleged violation;
   - The party suspected to be the perpetrator and/or involved;
   - When and where the incident occurred; and
   - Other relevant information deemed necessary, such as potential or actual losses incurred by the Company, or indications of irregularities in employee behavior that violate applicable regulations.

Skema mekanisme pelaporan penyimpangan atau pelanggaran, mulai dari proses pelaporan, diprosesnya pelaporan oleh tim terkait, hingga pengambilan keputusan tindak lanjut dari laporan tersebut, disampaikan sebagai berikut:

The reporting mechanism for irregularities or violations, from the submission process, handling by the relevant team, to the decision-making process regarding follow-up actions, is outlined as follows:

Prosedur Komunikasi, Partisipasi & Konsultasi Eksternal dan Internal
External and Internal Communication, Participation & Consultation Procedures



Setiap laporan pengaduan terkait dugaan tindakan pelanggaran yang diterima oleh Perseroan akan diproses dan ditelaah secara objektif oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain melalui saluran pelaporan yang telah ditetapkan, pelapor juga dapat menyampaikan informasi pengaduan secara langsung kepada Direksi dan/atau manajemen kunci Perseroan agar dapat segera ditindaklanjuti melalui proses investigasi yang memadai.

Every report or complaint regarding alleged violations received by the Company will be processed and reviewed objectively by the authorized parties in accordance with applicable provisions. In addition to the established reporting channels, whistleblowers may also submit information directly to the Board of Directors and/or key management to enable prompt follow-up through an appropriate investigation process.

Pengelolaan Pengaduan
Management of Complaint

Perseroan membentuk Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/ WBS) yang berada di bawah koordinasi Departemen Sekretaris Perusahaan. Tim ini bertugas untuk menerima, mencatat, dan melakukan analisis awal atas setiap laporan pelanggaran yang diterima dari pihak internal maupun eksternal Perseroan.

The Company has established a Whistleblowing System (WBS) Management Team under the coordination of the Corporate Secretary Department. This team is responsible for receiving, recording, and conducting a preliminary analysis of each report submitted by both internal and external parties.

Selanjutnya, laporan yang telah dianalisis akan diteruskan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan internal Perseroan untuk dilakukan tindak lanjut, investigasi, serta penetapan sanksi terhadap pelanggaran yang terbukti, dengan tetap menjunjung prinsip independensi, objektivitas, dan kerahasiaan.

Reports that have undergone initial analysis are subsequently forwarded to the relevant authorized parties in accordance with the Company's internal provisions for further action, investigation, and the determination of sanctions for proven violations, while upholding the principles of independence, objectivity, and confidentiality.

Perlindungan Bagi Pelapor
Protection for Whistleblowers

Apabila laporan pelanggaran terbukti kebenarannya, Perseroan memberikan perlindungan kepada pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelapor antara lain meliputi:

If a reported violation is proven, the Company provides protection to the whistleblower in accordance with applicable laws and regulations. The forms of protection for the whistleblower include:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor serta informasi dan isi laporan yang disampaikan;
2. Perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pelapor;
3. Perlindungan dari potensi ancaman, intimidasi, tekanan, sanksi, maupun tindakan tidak menyenangkan lainnya yang dapat timbul dari pihak terlapor atau pihak lain yang berkepentingan.

1. Assurance of confidentiality of the whistleblower's identity, as well as the information and content of the report;
2. Protection against any form of retaliation, whether direct or indirect;
3. Protection from potential threats, intimidation, pressure, sanctions, or other adverse actions that may arise from the reported party or other interested parties.

Selain itu, Perseroan menjamin dan melindungi sepenuhnya anonimitas pelapor (*whistleblower*), baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal Perseroan, apabila pelapor memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Perlindungan ini diberikan sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang beretika, transparan, dan bebas dari tindakan pembalasan (*anti-retaliation*).

In addition, the Company fully guarantees and protects the anonymity of whistleblowers, whether internal or external, if they choose not to disclose their identity. This protection is part of the Company's commitment to fostering an ethical, transparent, and non-retaliatory work environment.

Kebijakan dan Tujuan *Whistleblowing System*

Whistleblowing System Policy and Objectives

Perseroan menetapkan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS) dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, serta para pemangku kepentingan dalam tata cara penyampaian dan pengelolaan laporan pengaduan atau penyingkapan pelanggaran, guna memastikan kerahasiaan identitas pelapor, akuntabilitas laporan, serta tindak lanjut yang efektif atas setiap laporan yang diterima;
2. Memberikan perlindungan kepada para Pemangku Kepentingan serta menjaga dan melindungi reputasi serta nama baik Perseroan;
3. Meningkatkan kepatuhan seluruh insan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal, sekaligus menumbuhkan budaya etika yang tinggi dalam pelaksanaan aktivitas usaha, baik yang melibatkan pihak internal maupun pihak ketiga;
4. Meminimalkan risiko Perseroan, termasuk risiko keuangan, operasional, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi yang dapat timbul akibat terjadinya pelanggaran; dan
5. Menyediakan mekanisme deteksi dini (*early warning system*) terhadap potensi permasalahan yang dapat timbul sebagai akibat dari pelanggaran, sehingga tindakan pencegahan dan mitigasi dapat dilakukan secara tepat waktu.

The Company has established a Whistleblowing System (WBS) Policy with the following objectives:

1. To serve as a guideline for the Board of Commissioners, Board of Directors, employees, and stakeholders in reporting and managing complaints or disclosures of violations, ensuring confidentiality, accountability, and effective follow-up;
2. To provide protection to stakeholders and safeguard the Company's reputation and good name;
3. To enhance compliance among all Company personnel with applicable laws and internal policies, while fostering a strong ethical culture in business activities involving both internal and external parties;
4. To minimize risks, including financial, operational, legal, occupational safety, and reputational risks arising from violations; and
5. To provide an early warning system for potential problems that may arise as a result of violations, enabling timely preventive and mitigation measures.

Jumlah Pengaduan

Sampai dengan 31 Desember 2025, Perseroan tidak menerima pengaduan yang masuk maupun yang diproses melalui *whistleblowing system*, sehingga tidak ada tindak lanjut yang dilakukan pada pengaduan tersebut.

Number of Complaints

As of December 31, 2025, the Company did not receive any complaints, both incoming and processed complaints, through the Whistleblowing System. Therefore, no follow-up actions were required.

Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi

Gratification Control and Anti-Corruption

Perseroan secara konsisten menerapkan pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi sebagai bagian dari komitmen dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan, perilaku, maupun praktik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di seluruh lini organisasi.

The Company consistently implements gratification control and anti-corruption measures as part of its commitment to fostering a healthy, integrity-driven, and sustainable business environment. These efforts aim to prevent actions, behaviors, or practices that may lead to conflicts of interest, as well as Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) across all levels of the organization.

Seluruh insan Perseroan berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aktivitas operasional dan pengambilan keputusan bisnis.

All Company personnel are committed to complying with applicable laws and regulations and upholding the principles of Good Corporate Governance (GCG) in all operational activities and business decision-making processes.

Komitmen tersebut dituangkan secara formal dalam Piagam Kode Etik Perseroan yang berlaku bagi seluruh karyawan tanpa kecuali. Kode Etik ini disosialisasikan secara berkelanjutan melalui program pelatihan dan edukasi kepada karyawan guna memastikan pemahaman dan implementasi yang konsisten.

This commitment is formally outlined in the Company's Code of Conduct Charter, which applies to all employees without exception. The Code of Conduct is continuously disseminated through training and educational programs to ensure consistent understanding and implementation.

Dalam Kode Etik Perseroan, telah diatur secara jelas upaya pencegahan korupsi, termasuk ketentuan terkait larangan pemberian dan penerimaan gratifikasi, baik dari maupun kepada pihak ketiga dan pihak eksternal lainnya, yang berpotensi memengaruhi independensi, objektivitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

The Company's Code of Conduct clearly stipulates anti-corruption measures, including provisions prohibiting the giving or receiving of gratuities, whether from or to third parties and external parties, that may compromise independence, objectivity, and professionalism in carrying out duties and responsibilities.

Komitmen Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi

Commitment to Anti-Corruption and Gratification Prevention

Perseroan bersama Entitas Anak berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan, serta secara tegas menghindari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta praktik gratifikasi dalam seluruh kegiatan usaha.

Komitmen tersebut didukung oleh penerapan prosedur pencegahan suap dan korupsi yang diatur dalam Piagam Kode Etik Perseroan, yang disusun sebagai pedoman perilaku bagi seluruh insan Perseroan dan Pemangku Kepentingan. Adapun tujuan penerapan Kode Etik tersebut antara lain:

1. Menjadi pedoman etika dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan yang mengatur standar perilaku kerja dan profesionalisme seluruh insan Perseroan;
2. Memastikan seluruh aktivitas usaha Perseroan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG); dan
3. Mendorong keterlibatan seluruh Pemangku Kepentingan dalam mendukung penerapan GCG yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, melalui Pedoman Kode Etik, Perseroan juga menetapkan kebijakan dalam menjalankan hubungan dan aktivitas bisnis dengan Pemangku Kepentingan secara transparan, kompetitif, adil, dan selektif, sebagai bagian dari upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta untuk mendukung keberlangsungan usaha Perseroan secara berkelanjutan.

The Company, together with its Subsidiaries, is committed to fostering a sound, ethical, and sustainable business environment, and firmly refrains from all forms of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN), as well as gratification practices across all business activities.

This commitment is supported by the implementation of anti-bribery and anti-corruption procedures as stipulated in the Company's Code of Conduct Charter, which serves as a behavioral guideline for all Company personnel and Stakeholders. The objectives of implementing the Code of Conduct include, among others:

1. To serve as an ethical guideline in conducting the Company's business activities, governing standards of professional conduct and work behavior for all Company personnel;
2. To ensure that all business activities are carried out in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG); and
3. To encourage the active involvement of all Stakeholders in supporting the implementation of GCG in compliance with prevailing laws and regulations.

In addition, through the Code of Conduct, the Company establishes policies governing its relationships and business activities with Stakeholders in a transparent, competitive, fair, and selective manner, as part of its commitment to good corporate governance and to support the long-term sustainability of its business.

Sosialisasi dan Pelatihan Anti Anti-Korupsi dan Gratifikasi

Anti-Corruption and Gratification Socialization and Training

Dalam rangka mendukung penerapan gerakan anti gratifikasi dan anti korupsi, Perseroan secara berkelanjutan melakukan sosialisasi kebijakan anti korupsi dan gratifikasi yang tertuang dalam Kode Etik Perusahaan. Kode Etik tersebut disebarluaskan kepada seluruh insan Perseroan melalui media internal yang dapat diakses secara mudah dan setiap saat, sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan kegiatan usaha.

In supporting the implementation of anti-gratification and anti-corruption initiatives, the Company continuously conducts dissemination programs on anti-corruption and gratification policies as outlined in the Company's Code of Conduct. The Code of Conduct is communicated to all Company personnel through internal media that are easily accessible at all times, serving as a practical guide in carrying out business activities.

Corporate Human Resource Department berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kebijakan anti korupsi dan gratifikasi kepada seluruh karyawan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh karyawan hingga jajaran manajemen memahami serta mematuhi kebijakan yang berlaku, sehingga dalam menjalankan aktivitas operasional dapat menghindari tindakan, perilaku, maupun perbuatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi, maupun gratifikasi.

The Corporate Human Resource Department plays an active role in disseminating anti-corruption and gratification policies to all employees. These initiatives aim to ensure that employees at all levels, including management, understand and comply with the applicable policies, thereby preventing actions or behaviors that may lead to conflicts of interest, corruption, collusion, or gratification.

Selain itu, Perseroan secara berkala menyelenggarakan sosialisasi kebijakan anti korupsi dan gratifikasi kepada seluruh jajaran organisasi, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi, Manajemen, hingga karyawan, baik yang berada di kantor pusat maupun di wilayah operasional Perseroan. Dalam mendukung peningkatan pemahaman dan kompetensi, Perseroan juga mengikutsertakan karyawan dan manajemen dalam berbagai pelatihan, seminar, dan program pengembangan kompetensi, baik secara daring maupun luring, yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dan gratifikasi.

Furthermore, the Company regularly conducts socialization programs on anti-corruption and gratification policies across all levels of the organization, including the Board of Commissioners, Board of Directors, Management, and employees, both at the head office and operational sites. To enhance understanding and competencies, the Company also facilitates participation of employees and management in various training sessions, seminars, and competency development programs—both online and offline—related to corruption and gratification prevention.

Melalui upaya tersebut, Perseroan berkomitmen untuk membangun budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) guna mendukung keberlanjutan usaha Perseroan.

Through these initiatives, the Company is committed to cultivating a work culture rooted in integrity and transparency, aligned with the principles of Good Corporate Governance (GCG), in order to support the sustainable growth of the Company.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

Perseroan berkomitmen untuk menyediakan akses informasi dan data perusahaan secara terbuka, tepat waktu, akurat, dan lengkap kepada seluruh Pemangku Kepentingan, termasuk investor dan masyarakat. Penyampaian informasi tersebut dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola Perusahaan serta untuk mendukung pengambilan keputusan yang berimbang oleh para Pemangku Kepentingan.

The Company is committed to providing open, timely, accurate, and comprehensive access to corporate information and data to all Stakeholders, including investors and the public. The disclosure of such information is carried out as part of the implementation of transparency and accountability principles in corporate governance, as well as to support balanced decision-making by Stakeholders.

Dalam rangka memastikan efektivitas keterbukaan informasi, Perseroan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi resmi, antara lain sebagai berikut:

To ensure the effectiveness of information disclosure, the Company utilizes various official communication channels, including the following:

- **Media Elektronik**
  Perseroan menggunakan media elektronik sebagai sarana utama dalam penyampaian informasi kepada publik melalui situs *web* resmi www.mktr.co.id. Situs *web* tersebut memuat informasi yang komprehensif mengenai profil Perseroan, aktivitas bisnis Perseroan dan Entitas Anak, ikhtisar kinerja keuangan, informasi pemegang saham, serta informasi korporasi lainnya yang relevan dan diperbarui secara berkala.

- **Media Sosial**
  Sebagai upaya menjangkau Pemangku Kepentingan secara lebih luas dan interaktif, Perseroan juga memanfaatkan media sosial resmi sebagai kanal penyampaian informasi yang aktual dan akurat, antara lain melalui:

  - Facebook: PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
  - Instagram: @mktr.id

- **Siaran Pers**
  Selain melalui media elektronik dan media sosial, Perseroan secara aktif menyampaikan informasi melalui siaran pers yang dipublikasikan pada portal *web* Perseroan dan/atau media massa. Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menerbitkan 7 (tujuh) siaran *pers*.

- **Electronic Media**
  The Company uses electronic media as the primary means of delivering information to the public through its official website at www.mktr.co.id. The website provides comprehensive information regarding the Company's profile, business activities of the Company and its Subsidiaries, financial performance highlights, shareholder information, as well as other relevant corporate information, which is updated regularly.

- **Social Media**
  In an effort to reach Stakeholders more broadly and interactively, the Company also utilizes official social media platforms as channels for delivering timely and accurate information, including:

  - Facebook: PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
  - Instagram: @mktr.id

- **Press Releases**
  In addition to electronic and social media, the Company actively disseminates information through press releases published on the Company's website and/or in mass media. Throughout 2025, the Company issued 7 (seven) press releases.

Tabel Siaran Pers PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Tahun 2025
Table: Press Releases of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk in 2025

No.	Tanggal Date	Topik Siaran Pers Press Release Topic
1.	25 Februari 2025 February 25, 2025	MKTR Melalui Kerjasama Anak Usaha Bangun Pabrik Biomass Baru, Optimalkan Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit. MKTR Builds New Biomass Factory Through Partnership with Its Subsidiary, Optimizing Palm Oil Waste Utilization.
2.	30 April 2025 April 30, 2025	MKTR Ciptakan Standar Baru Industri Sawit Lewat Inovasi Energi Biomassa. MKTR Creates New Standards for Palm Oil Industry Through Biomass Energy Innovation.
3.	11 Juni 2025 June 11, 2025	TOP CSR Awards 2025, "MKTR Mendorong Bisnis Berkelanjutan via CSR". TOP CSR Awards 2025, "MKTR Encourages Sustainable Business through CSR."
4.	14 November 2025 November 14, 2025	Laba Bersih MKTR Naik 105% pada Kuartal Ketiga 2025 di Tengah Tantangan La Nina. MKTR Net Profit Increases 105% in Q3/2025 Amid La Nina Challenge.
5.	10 Desember 2025 Desember 10, 2025	PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Raih Penghargaan *Annual Report Award* 2024. PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Wins 2024 Annual Report Award.

No.	Tanggal Date	Topik Siaran Pers Press Release Topic
6.	10 Desember 2025 Desember 10, 2025	PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Raih Penghargaan *Annual Report Award* 2024. MKTR Wins Award for Focusing on Value-Added Innovation Rather Than Land Expansion.
7.	12 Desember 2025 Desember 12, 2025	Perkuat Fundamental Bisnis, MKTR Integrasikan Inovasi Berbasis *Sustainability* dengan Prinsip GCG. Strengthening Business Fundamentals, MKTR Integrates Sustainability-Based Innovation with Good Corporate Governance Principles.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi dan transparansi kepada Pemangku Kepentingan, Perseroan secara aktif melakukan pemaparan kinerja kepada publik (*public expose)*. Pada tanggal 30 April 2025, Perseroan telah menyelenggarakan *public expose* yang disampaikan melalui berbagai media, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kinerja keuangan dan operasional 2024, proyeksi dan strategi bisnis Perseroan untuk tahun 2025 kepada investor dan masyarakat, serta inisiatif keberlanjutan Perseroan.

As part of its commitment to information disclosure and transparency to Stakeholders, the Company actively conducts public expose activities. On April 30, 2025, the Company held a public expose delivered through various media channels, aimed at providing a clear and comprehensive overview of its 2024 financial and operational performance, business outlook and strategies for 2025, as well as its sustainability initiatives to investors and the public.

Dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut, Sekretaris Perusahaan berperan aktif dalam menyampaikan informasi material dan relevan kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi resmi, antara lain media massa, situs *web* Perseroan, media sosial, serta Sistem Pelaporan Elektronik Bursa Efek Indonesia. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga memastikan penyampaian seluruh laporan yang diwajibkan bagi Perusahaan Publik dilakukan secara lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In supporting the implementation of information disclosure, the Corporate Secretary plays an active role in communicating material and relevant information to the public through various official communication channels, including mass media, the Company's website, social media platforms, and the Indonesia Stock Exchange Electronic Reporting System. In addition, the Corporate Secretary ensures that all mandatory reports for public companies are submitted in a complete, accurate, up-to-date, and timely manner in accordance with prevailing laws and regulations.

Upaya ini dilakukan untuk menjamin tersedianya akses informasi yang setara bagi publik, Pemegang Saham, dan Pemangku Kepentingan lainnya, sekaligus memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) melalui transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi yang berkelanjutan.

These efforts are undertaken to ensure equal access to information for the public, Shareholders, and other Stakeholders, while also strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles through sustained transparency, accountability, and disclosure.

Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Policy on Procurement of Goods and/or Services

Perseroan telah menetapkan Kebijakan dan Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT Menthobi Karyatama Raya Tbk. sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan tersebut disahkan dalam Etika Bisnis Perseroan tanggal 21 Maret 2022 serta diatur lebih lanjut dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Nomor MMK-P-05.

Kebijakan pengadaan ini mengatur bahwa setiap proses pengadaan barang dan/atau jasa wajib dilaksanakan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri, dengan menjunjung tinggi integritas, bebas dari benturan kepentingan, serta berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan/kesetaraan. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh proses pengadaan di lingkungan Perseroan dan Entitas Anak.

Melalui penerapan kebijakan tersebut, Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan pengadaan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengadaan dilaksanakan dengan prinsip terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi Perseroan sekaligus meminimalkan risiko operasional, hukum, dan reputasi.

Penerapan kebijakan pengadaan ini merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam memperkuat praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian kinerja jangka panjang yang selaras dengan kepentingan para Pemangku Kepentingan.

The Company has established the Procurement Policy and Procedures for Goods and/or Services of PT Menthobi Karyatama Raya Tbk as part of its commitment to implementing good corporate governance. The policy was formalized in the Company's Code of Conduct dated March 21, 2022, and further regulated under Procurement Procedure No. MMK-P-05.

This procurement policy stipulates that all procurement processes must be carried out effectively, efficiently, professionally, and independently, while upholding integrity, avoiding conflicts of interest, and adhering to the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. These provisions apply to all procurement activities within the Company and its Subsidiaries.

Through the implementation of this policy, the Company ensures that all procurement activities support fair business competition in accordance with applicable laws and regulations. Procurement processes are conducted based on open and competitive principles, transparency, fairness, non-discrimination, and accountability, thereby creating added value for the Company while minimizing operational, legal, and reputational risks.

The implementation of this procurement policy forms part of the Company's efforts to strengthen ethical and sustainable business practices, while supporting the achievement of long-term performance aligned with the interests of its Stakeholders.

Prosedur dan Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Procedures and Process for Procurement of Goods and/or Services

Perseroan menerapkan prosedur dan proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan mempertimbangkan secara cermat jenis, sifat, nilai, serta tingkat kompleksitas barang dan/atau jasa yang dibutuhkan. Penetapan metode pengadaan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap proses pengadaan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan menentukan metode pengadaan yang paling sesuai dengan kebutuhan operasional, dengan memperhatikan sistem penyampaian penawaran, mekanisme evaluasi penawaran, persetujuan pejabat yang berwenang, serta jenis dan sistem kontrak yang digunakan. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan prosedur internal yang berlaku guna meminimalkan risiko penyimpangan, benturan kepentingan, maupun praktik yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis.
Adapun metode pengadaan barang dan/atau jasa yang dapat diterapkan oleh Perseroan meliputi:

1. Pengadaan Langsung;
2. Penunjukan Langsung; serta
3. Tender atau Seleksi Terbatas.

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa, Perseroan menekankan penerapan proses pengadaan yang transparan, kompetitif, dan adil guna memperoleh Pemasok yang memenuhi persyaratan kualitas pekerjaan serta harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Setiap Pemasok atau vendor yang berpartisipasi dalam proses pengadaan diwajibkan untuk memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan Perseroan, yang mencakup kapasitas administratif, keuangan, dan teknis, serta kepatuhan terhadap seluruh persyaratan perizinan dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga mewajibkan vendor untuk memenuhi standar Perseroan terkait sistem manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), manajemen

The Company implements procurement procedures and processes for goods and/or services by carefully considering the type, nature, value, and level of complexity of the required goods and/or services. The selection of procurement methods is carried out to ensure that each procurement process is conducted effectively, efficiently, transparently, and accountably, in line with the principles of good corporate governance.

In practice, the Company determines the most appropriate procurement method based on operational needs, taking into account the bid submission system, bid evaluation mechanism, approval by authorized officials, as well as the type and structure of contracts applied. All stages are carried out in accordance with prevailing internal procedures to minimize the risk of irregularities, conflicts of interest, and practices that are inconsistent with business ethics principles.

The procurement methods that may be applied by the Company include:

1. Direct Procurement;
2. Direct Appointment; and
3. Tender or Limited Selection.

In conducting procurement of goods and/or services activities, the Company emphasizes transparent, competitive, and fair processes to obtain Suppliers that meet the required quality standards at reasonable and accountable pricing. All procurement activities are carried out in accordance with applicable internal policies and procedures, while upholding the principles of good corporate governance.

Each Supplier or vendor participating in the procurement process is required to meet the qualifications established by the Company, including administrative, financial, and technical capabilities, as well as compliance with all licensing requirements and tax obligations in accordance with prevailing laws and regulations. In addition, vendors are required to comply with the Company's standards related to environmental management systems, occupational health and safety (OHS), quality management, technical specifications, and

mutu, spesifikasi teknis, serta pemenuhan jadwal pekerjaan, termasuk keselarasan dengan Kebijakan Keberlanjutan Perseroan.

project timelines, including alignment with the Company's Sustainability Policy.

Penerapan pengadaan yang bertanggung jawab ini juga diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Perseroan berkomitmen untuk mendukung perekonomian lokal dengan mendorong keterlibatan usaha kecil, koperasi, serta pemasok lokal yang berada di sekitar wilayah operasional Perseroan dalam rantai pasokan. Upaya ini merupakan bagian dari kontribusi Perseroan dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memperkuat hubungan dengan Pemangku Kepentingan di tingkat lokal.

The implementation of responsible procurement is also aimed at generating positive economic impacts for surrounding communities. The Company is committed to supporting local economic development by encouraging the participation of small enterprises, cooperatives, and local suppliers within the vicinity of its operational areas in the supply chain. This initiative forms part of the Company's contribution to creating sustainable economic value while strengthening relationships with local Stakeholders.

Pedoman Benturan Kepentingan

Conflict of Interest Guidelines

Perseroan memahami bahwa penanganan benturan kepentingan secara tegas, konsisten, dan terintegrasi merupakan faktor penting dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang efektif, menjaga keharmonisan hubungan dengan seluruh Pemangku Kepentingan, serta meningkatkan nilai Perseroan secara berkelanjutan.

The Company recognizes that the proper, consistent, and integrated management of conflicts of interest is a key factor in supporting effective corporate governance, maintaining harmonious relationships with all Stakeholders, and enhancing long-term Company's value.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menyusun dan menerapkan Pedoman Benturan Kepentingan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Etika Bisnis dan Etika Kerja, serta Budaya Perusahaan yang berlaku di lingkungan Perseroan. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh insan Perseroan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola potensi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan usaha.

In this regard, the Company has developed and implemented Conflict of Interest Guidelines, which are aligned with prevailing laws and regulations, the Company's Code of Business Conduct and Work Ethics, as well as its corporate values. These guidelines serve as a reference for all Company personnel in identifying, preventing, and managing potential conflicts of interest in decision-making processes and business activities.

Ketentuan mengenai benturan kepentingan tersebut telah secara resmi tertuang dalam Etika Bisnis dan Etika Kerja Perseroan yang ditetapkan sejak 21 Maret 2022, dan berlaku bagi seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, serta karyawan tanpa pengecualian.

Provisions regarding conflicts of interest are formally stipulated in the Company's Code of Business Conduct and Work Ethics, which has been in effect since March 21, 2022, and applies to all members of the Board of Commissioners, Board of Directors, management, and employees without exception.

Pedoman Kebijakan Komunikasi

Communication Policy Guidelines

Perseroan telah menyusun Pedoman Kebijakan Komunikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan oleh Perseroan kepada publik dilakukan secara lengkap, akurat, terkini, tidak menyesatkan, mudah diakses, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal. Kebijakan ini juga dirancang untuk menjamin adanya perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh Pemegang Saham, terutama dalam pemenuhan hak-hak mereka sebagai pemilik saham di Perseroan.

The Company has established Communication Policy Guidelines aimed at ensuring that all information disclosed to the public is complete, accurate, up-to-date, not misleading, easily accessible, and compliant with prevailing laws and regulations, particularly those related to the capital market. This policy is also designed to ensure fair and equal treatment of all Shareholders, especially in fulfilling their rights as owners of shares in the Company.

Pedoman Kebijakan Komunikasi tersebut menjadi acuan Perseroan dalam menjalankan komunikasi yang efektif dan bertanggung jawab dengan Pemegang Saham, regulator pasar modal, serta seluruh pelaku pasar modal lainnya, guna mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG).

The Communication Policy Guidelines serve as a reference for the Company in conducting effective and responsible communication with Shareholders, capital market regulators, and all market participants, in order to support the principles of transparency and accountability in the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

Pedoman Kebijakan Komunikasi ini telah diintegrasikan dalam Etika Bisnis dan Etika Kerja Perseroan yang ditetapkan sejak 21 Maret 2022, dan berlaku bagi seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, serta karyawan Perseroan dalam melaksanakan fungsi komunikasi dan penyampaian informasi kepada Pemangku Kepentingan.

These guidelines have been integrated into the Company's Code of Business Conduct and Work Ethics, which has been in effect since March 21, 2022, and apply to all members of the Board of Commissioners, Board of Directors, management, and employees in carrying out communication functions and information disclosure to Stakeholders.

Pedoman Transaksi Afiliasi

Affiliated Transaction Guidelines

Perseroan telah menyusun Pedoman Transaksi Afiliasi sebagai acuan bagi seluruh insan Perseroan dalam melaksanakan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi afiliasi dilakukan sesuai dengan praktik usaha yang wajar dan lazim,

The Company has established Affiliated Transaction Guidelines as a reference for all Company personnel in conducting transactions with affiliated parties. These guidelines are intended to ensure that all affiliated transactions are carried out in accordance with normal and customary business practices,

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*).

comply with applicable laws and regulations, and adhere to the arm's length principle.

Pedoman Transaksi Afiliasi ini disusun untuk membantu manajemen Perseroan dalam menjaga independensi dan objektivitas dalam pengelolaan transaksi dengan pihak terafiliasi, sehingga setiap transaksi dilakukan dalam batas kewenangan yang berlaku serta tidak menimbulkan benturan kepentingan dan tidak berpotensi merugikan Perseroan maupun para Pemegang Saham.

The Affiliated Transaction Guidelines are designed to assist management in maintaining independence and objectivity in managing transactions with affiliated parties, ensuring that such transactions are conducted within the scope of authorized limits, do not create conflicts of interest, and do not potentially harm the Company or its Shareholders.

Pedoman ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Etika Bisnis dan Etika Kerja Perseroan, yang telah ditetapkan sejak 21 Maret 2022, dan berlaku mengikat bagi Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, serta seluruh karyawan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

These guidelines form an integral part of the Company's Code of Business Conduct and Work Ethics, established on March 21, 2022, and are binding upon the Board of Commissioners, Board of Directors, management, and all employees in conducting the Company's business activities.

Dalam melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, Direksi menyatakan bahwa transaksi afilias selama tahun 2025i telah melalui prosedur yang memadai dan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

In carrying out material transactions involving conflicts of interest and/or transactions with affiliated parties/related parties, the Board of Directors states that affiliated transactions throughout 2025 have been conducted in accordance with generally accepted business practices, including compliance with the arm's-length principle.

Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Corporate Governance of Public Company

Secara umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka telah melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta senantiasa berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan.

As a public company, the Company has generally complied with all regulations and provisions issued by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) and remains committed to continuous improvement in order to create sustainable value for Shareholders and all Stakeholders.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan secara khusus memperhatikan dan mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka,

In its implementation, the Company pays particular attention to and complies with applicable OJK regulations, including the provisions set forth in OJK Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Corporate Governance of Public Companies, which serves as a reference

sebagai acuan dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan.

Pedoman tersebut memuat aspek, prinsip, dan rekomendasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) yang berfungsi sebagai acuan bagi Perseroan dalam mendorong penerapan praktik tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel, sebagaimana wajib dipatuhi oleh Perusahaan Terbuka.

Mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, penerapan GCG mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang menjadi dasar penilaian dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan.

Adapun aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut disajikan pada tabel berikut.

in consistently and sustainably implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG).

These guidelines outline the aspects, principles, and recommendations of Good Corporate Governance that serve as a reference for the Company in promoting sound, transparent, and accountable governance practices, as required for public companies.

Referring to OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015, the implementation of GCG encompasses 5 (five) aspects, 8 (eight) principles, and 25 (twenty-five) recommendations, which form the basis for assessing and implementing good corporate governance within the Company.

The aspects and principles of Good Corporate Governance are presented in the following table.

Tabel Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Table: Guidelines for Corporate Governance of Public Companies

Aspek A / Aspect A **Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham** **Public Company Relationship with Shareholders in Guaranteeing Shareholder Rights**		**Telah Dilaksanakan / Belum Dilaksanakan** **Implemented / Not Yet Implemented**
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) **Principle 1** Increasing the Value of the General Meeting of Shareholders	**Rekomendasi** 1.1) Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. **Recommendations** 1.1) The Public Company has a method or technical procedures for voting, both open and closed, that prioritize independence and the interests of shareholders.	Telah Dilaksanakan Implemented
	1.2) Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. 1.2) All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company attend the Annual General Meeting (GMS).	Telah Dilaksanakan Implemented
	1.3) Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. 1.3) A summary of the minutes of the GMS is available on the Public Company's website for at least 1 (one) year.	Telah Dilaksanakan Implemented

Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor **Principle 2** Improving the Quality of Communication between the Public Company and Shareholders or Investors	**Rekomendasi** 2.1) Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. **Recommendations** 2.1) The Public Company has a communication policy with shareholders or investors.	Telah Dilaksanakan Implemented
	2.2) Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. 2.2) The Public Company discloses its communication policy for shareholders or investors on its website.	Telah Dilaksanakan Implemented
Aspek B / Aspect B **Fungsi dan Peran Dewan Komisaris** **Function and Role of the Board of Commissioners**		**Telah Dilaksanakan / Belum Dilaksanakan** **Implemented / Not Yet Implemented**
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris **Principle 3** Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners	**Rekomendasi** 3.1) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. **Recommendations** 3.1) Determining the number of Board of Commissioners members considers the condition of the Public Company.	Telah Dilaksanakan Implemented
	3.2) Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. 3.2) Determining the composition of the Board of Commissioners considers diversity in expertise, knowledge, and required experience.	Telah Dilaksanakan Implemented
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris **Principle 4** Improving the Quality of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	**Rekomendasi** 4.1) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. **Recommendations** 4.1) The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	Telah Dilaksanakan (Tahap Sosialisasi) Implemented (Socialization Stage)
	4.2) Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. 4.2) The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report of the Public Company.	Telah Dilaksanakan (Tahap Sosialisasi) Implemented (Socialization Stage)
	4.3) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. 4.3) The Board of Commissioners has a policy related to the resignation of Board of Commissioners members if they are involved in financial crimes.	Telah Dilaksanakan Implemented

	4.4) Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi Menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. 4.4) The Board of Commissioners or the Nomination and Remuneration Committee formulates succession policies for Board of Directors members in the Nomination process.	Telah Dilaksanakan Implemented
Aspek C / Aspect C **Fungsi dan Peran Dewan Direksi** **Function and Role of the Board of Directors**		**Telah Dilaksanakan / Belum Dilaksanakan** **Implemented / Not Yet Implemented**
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Direksi **Principle 5** Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners	**Rekomendasi** 5.1) Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. **Recommendations** 5.1) Determining the number of Board of Directors members considers the condition of the Public Company and the effectiveness in decision-making.	Telah Dilaksanakan Implemented
	5.2) Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. 5.2) Determining the composition of the Board of Directors considers diversity in expertise, knowledge, and required experience.	Telah Dilaksanakan Implemented
	5.3) Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3) Board of Directors members overseeing accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting.	Telah Dilaksanakan Implemented
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi **Principle 6** Improving the Quality of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors	**Rekomendasi** 6.1) Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. **Recommendations** 6.1) The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	Telah Dilaksanakan (Tahap Pematangan) Implemented (Maturity Stage)
	6.2) Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. 6.2) The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed in the Annual Report of the Public Company.	Telah Dilaksanakan Implemented
	6.3) Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. 6.3) The Board of Directors has a policy related to the resignation of Board of Directors members if they are involved in financial crimes.	Telah Dilaksanakan (Tahap Pematangan) Implemented (Maturity Stage)

Aspek D / Aspect D **Partisipasi Pemangku Kepentingan** **Stakeholders' Participation**		**Telah Dilaksanakan / Belum Dilaksanakan** **Implemented / Not Yet Implemented**
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan **Principle 7** Enhancing Corporate Governance Aspects through Stakeholders' Participation	**Rekomendasi** 7.1) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. **Recommendations** 7.1) The Public Company has policies to prevent insider trading.	Telah Dilaksanakan Implemented
	7.2) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*. 7.2) The Public Company has anti-corruption and anti-fraud policies.	Telah Dilaksanakan Implemented
	7.3) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. 7.3) The Public Company has policies regarding selecting and improving supplier or vendor capabilities.	Telah Dilaksanakan Implemented
	7.4) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. 7.4) The Public Company has policies regarding fulfilling creditors' rights.	Telah Dilaksanakan Implemented
	7.5) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *system whistleblowing*. 7.5) The Public Company has a whistleblowing system policy.	Telah Dilaksanakan Implemented
	7.6) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. 7.6) The Public Company has policies for providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.	Telah Dilaksanakan Implemented
Aspek E / Aspect E **Kererbukaan Informasi** **Information Disclosure**		**Telah Dilaksanakan / Belum Dilaksanakan** **Implemented / Not Yet Implemented**
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Principle 8 Improving the Implementation of Information Disclosure	Rekomendasi 8.1) Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Recommendations 8.1) The Public Company utilizes information technology more widely, aside from the website, as a means of information transparency.	Telah Dilaksanakan Implemented

	8.2) Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Recommendations 8.2) The Annual Report of the Public Company discloses ultimate beneficial owners with at least a 5% ownership stake and discloses ultimate beneficial owners through major shareholders and controllers.	Telah Dilaksanakan Implemented

Seluruh rekomendasi mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah dilaksanakan Perseroan selama tahun buku 2025. Adapun untuk rekomendasi pada penilaian self assessment Dewan Komisaris dan Direksi sudah menuju tahap pematangan pada tahun buku tersebut.

All recommendations refer to the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) Number 32/SEOJK.04/2015 concerning the Guidelines for Public Company Governance, which the Company implemented throughout the 2025 financial year. As for the recommendations on the self-assessment of the Board of Commissioners and Directors, they had entered the maturity stage in that financial year.

Lampiran

Appendix

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan terhadap *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS)

Corporate Governance Implementation Conformity to Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Untuk terus mempertahankan dan utamanya meningkatkan penerapan prinsip GCG, Perusahaan telah membuat referensi silang terhadap penilaian ACGS untuk mempermudah perolehan data, sebagai berikut:

In order to maintain and primarily improve the application of GCG principles, the Company has made cross references to the ACGS assessment to facilitate data collection, as follows:

	Parameter	Keterangan Penyajian Description
Prinsip A. Hak Pemegang Saham **Rights of Shareholders**		
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham Basic Shareholder Rights	
A.1.1	Perusahaan membagi dividen dalam kurun 60 hari sejak diumumkan The Company distributes dividends within 60 days of the announcement	√
A.2	Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan perubahan-perubahan fundamental Perusahaan Right to participate in decisions concerning fundamental corporate changes	
A.2.1	Amandemen Anggaran Dasar Amendments to the Company's constitution?	√
A.2.2	Otorisasi penerbitan saham baru The authorisation of additional shares?	√
A.2.3	Pengalihan Aset atau penjualan Perusahaan The transfer of all or substantially all assets, which in effect results in the sale of the Company?	x
A.3	Hak Untuk Berpartisipasi Secara Efektif dan Menggunakan Suara dalam RUPS Serta Hak untuk Mendapatkan Informasi Mengenai Aturan-aturan yang Berlaku dalam RUPS (Termasuk Prosedur Voting) The Right to Participate Effectively and Use Votes in the GMS and the Right to Obtain Information Regarding the Rules Applicable at the GMS (Including Voting Procedures)	
A.3.1	Pemegang saham diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam memutuskan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in- kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive Directors/Commissioners?	√
A.3.2	Perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham non-pengendali untuk mencalonkan kandidat Direksi dan Dewan Komisaris Does the Company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for Board of Directors/Commissioners?	√
A.3.3	Perusahaan memfasilitasi pemegang saham untuk melakukan pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris secara individu Does the Company allow shareholders to elect Directors/Commissioners individually?	√
A.3.4	Apakah mengungkapkan prosedur pemungutan suara dan tabulasi suara dalam RUPS sebelum RUPS dimulai Does the Company disclose the voting and vote tabulation procedures used, declaring both before the meeting proceeds?	√

	Parameter	Keterangan Penyajian Description
A.3.5	Notulen waktu RUPS merekam dan mencatat adanya kesempatan bagi pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan dan usulan Do the minutes of the most recent AGM record that there was an opportunity allowing for shareholders to ask questions or raise issues?	√
A.3.6	Perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara (setuju, tidak setuju, abstain) untuk tiap-tiap agenda rapat Did the Company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for each agenda item for the most recent AGM?	√
A.3.7	Perusahaan mengungkapkan daftar kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris dalam RUPS Did the Company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	√
A.3.8	Perusahaan mengungkapkan bahwa seluruh Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam RUPS The Company discloses that all Directors and Board of Commissioners are present at the GMS	√
A.3.9	Perusahaan memberikan fasilitas pemungutan suara dengan surat kuasa Does the Company allow for voting in absentia?	√
A.3.10	Pemungutan suara dilakukan dengan cara tertutup Voting is carried out in a closed manner	x
A.3.11	Perusahaan mengungkapkan bahwa menggunakan pihak ketiga dalam memvalidasi perhitungan suara dalam RUPS Does the Company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?	x
A.3.12	Hasil pemungutan suara dipublikasikan sehari sesudah pemungutan suara Does the Company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM for all resolutions?	√
A.3.13	Perusahaan menyediakan waktu paling tidak 21 hari untuk mengumumkan keputusan RUPS Do companies provide at least 21 days notice for all resolutions?	√
A.3.14	Perusahaan memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk tiap-tiap agenda yang membutuhkan persetujuan pemegang saham dalam pengumuman atau undangan RUPS Does the Company provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the acCompanying statement?	√
A.3.15	Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk menempatkan perihal agenda dalam RUPS The Company provides an opportunity for shareholders to post agenda in the GMS	√
A.4	Berfungsinya pasar dalam mengendalikan Perusahaan secara efisien dan transparan Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner	
A.4.1	Untuk kasus merger, akuisisi, dan/atau takeover, Perusahaan menunjuk pihak independen untuk melakukan evaluasi kewajaran harga transaksi In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers, does the board of Directors/Commissioners of the offeree Company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	√
A.5	Pelaksanaan hak pemegang saham, termasuk pemegang saham institusi difasilitasi oleh Perusahaan The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated.	
A.5.1	Perusahaan mempublikasikan kebijakan untuk mendorong pemegang saham, termasuk pemegang saham institusi untuk menghadiri RUPS Does the Company publicly disclose policies to encourage shareholders including institutional shareholders to attend the AGM?	√
Prinsip B. Perlakuan yang Sama kepada Pemegang Saham **Equitable Treatment of Shareholders**		
B.1	Kepemilikan saham dan hak suara Shares and voting rights	

	Parameter	Keterangan Penyajian Description
B.1.1	Saham biasa memiliki 1 hak suara per lembar Do the Company's ordinary or common shares have one vote for one share?	√
B.1.2	Jika Perusahaan memiliki lebih dari satu kelas/seri saham, maka hak suara untuk tiap-tiap seri saham dipublikasikan Where the Company has more than one class of shares, does the Company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the Company website/reports/the stock exchange/the regulator's website)?	√
B.2	Panggilan RUPS Notice of AGM	
B.2.1	Tiap-tiap permasalahan dalam RUPS memiliki penyelesaian Does each resolution in the most recent AGM deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?	√
B.2.2	Keputusan RUPS diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan dipublikasikan bersamaan dengan yang Bahasa Indonesia Are the Company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version?	√
B.2.3	Profil Dewan Komisaris dan Direksi ditampilkan saat pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi Are the profiles of Directors/Commissioners (at least age, qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/reelection included?	√
B.2.4	RUPS mengungkapkan pemilihan Auditor Eksternal secara jelas Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?	√
B.2.5	Perusahaan memudahkan pemegang saham mendapatkan formulir surat kuasa Documents required to be proxy/Were the proxy documents made easily available?	x
B.3	Terdapat larangan insider trading dan tindakan menguntungkan diri sendiri Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.	
B.3.1	Perusahaan memiliki kebijakan untuk melarang Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan untuk mengambil keuntungan akan informasi yang tidak tersedia secara umum (inside information) Does the Company have policies and/or rules prohibiting Directors/Commissioners and employees to benefit from knowledge which is not generally available to the market?	√
B.3.2	Direksi dan Komisaris diwajibkan untuk melaporkan transaksi mereka di saham Perusahaan dalam Waktu 3 hari kerja Are the Board of Directors and Commissioners and commissioners required to report their dealings in Company shares within 3 business days?	√
B.4	Transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh anggota Dewan komisaris & Direksi Related party transactions by directors and key executives.	
B.4.1	Direksi dan Dewan Komisaris diharuskan untuk mengungkapkan adanta transaksi dengan Perusahaan atau konflik kepentingan lainnya Are directors and commissioners required to disclose their interest in transactions and any other conflicts of interest?	√
B.4.2	Perusahaan memiliki kebijakan bahwa komite penunjang Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap transaksi dengan pihak berelasi, apakah dilakukan atas nama kepentingan Perusahaan Does the Company have a policy requiring a committee of independent Board of Directors and Commissioners to review material/significant RPTs to determine whether they are in the best interests of the Company and shareholders?	√
B.4.3	Perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tidak memberikan pendapat atau keputusan pada saat memiliki konflik kepentingan Does the Company have a policy requiring board members (Board of Directors/Commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	√
B.4.4	Perusahaan memiliki kebijakan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang mengharuskan dilakukannya secara wajar/harga pasar (arm's length basis) Does the Company have policies on loans to Board of Directors/Commissioners forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	x
B.5	Melindungi hak pemegang saham minoritas Protecting minority shareholders from abusive actions	

	Parameter	Keterangan Penyajian Description
B.5.1	Perusahaan mempublikasikan transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan harga pasar dan bersifat arms length Does the Company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?	√
B.5.2	Dalam hal transaksi pihak berelasi memerlukan persetujuan pemegang saham, keputusan Tidak dibuat oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan In case of related party transactions requiring shareholders approval, is the decision made by disinterested shareholders?	√
Prinsip C. Peran Pemangku Kepentingan **Role of Stakeholders**		
C.1	Hak-Hak Para Pemangku Kepentingan yang ditetapkan oleh Undang - Undang atau lewat kesepakatan bersama seharusnya dihormati Stakeholders' rights established by Law or by mutual agreement should be respected	
C.1.1	Perusahaan mengungkapkan kebijakan kesehatan dan keselamatan konsumen The existence and scope of the Company's efforts to address customers' health and safety?	-
C.1.2	Perusahaan mengungkapkan kebijakan pemilihan pemasok Supplier/contractor selection procedures?	-
C.1.3	Perusahaan mengungkapkan kebijakan ramah lingkungan dalam proses bisnisnya dan konsisten dalam menerapkan sustainable development Describes the Company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?	-
C.1.4	Perusahaan mengungkapkan kebijakan kepeduliannya kepada masyarakat Elaborates the Company's efforts to interact with the communities in which they operate?	-
C.1.5	Perusahaan mengungkapkan kebijakan program dan prosedur anti korupsi Describe the Company's anti-corruption programmes and procedures?	-
C.1.6	Perusahaan mengungkapkan kebijakan perlindungan hak-hak kreditor Describes how creditors' rights are safeguarded?	-
C.1.7	Perusahaan melaporkan CSR Report atau SR Does the Company have a separate corporate responsibility (CR) report/section or sustainability report/section?	-
C.2	Hak stakeholder untuk memperoleh penyelesaian yang efektif akan pelanggaran hak-haknya Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.	
C.2.1	Perusahaan menyediakan informasi contact dalam website atau laporan tahunan yang memfasilitasi para stakeholder untuk menyampaikan keluhan akan pelanggaran hak-hak mereka Does the Company provide contact details via the Company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	√
C.3	Kepemilikan saham dan hak suara Shares and voting	
C.3.1	Perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan Does the Company explicitly disclose the health, safety, and welfare policy for its employees?	√
C.3.2	Perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik program pelatihan dan Pengembangan bagi karyawannya Does the Company explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees?	√
C.3.3	Perusahaan memiliki kebijakan pemberian kompensasi (reward) untuk pencapaian kinerja di atas kinerja keuangan yang sudah ditentukan Does the Company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the Company beyond short- term financial measures?	x

	Parameter	Keterangan Penyajian Description
C.4	Stakeholders termasuk karyawan individu maupun perwakilannya memiliki hak dan kesempatan untuk bisa mengkomunikasikan kepedulian mereka akan tindakan-tindakan ilegal atau tidak etis kepada Dewan Komisaris dan Direksi tanpa ada rasa takut Stakeholders including individual employee and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this.	
C.4.1	Perusahaan memiliki prosedur untuk penyampaian tidakan ilegal (termasuk korupsi) atau tidak etis oleh karyawan Does the Company have procedures for complaints by employees concerning illegal (including corruption) and unethical behavior and provide contact details via the Company's website or annual report?	√
C.4.2	Perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan yang menyampaikan adanya tindakan tidak ilegal atau tidak etis dari tindakan balas dendam Does the Company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals illegal/ unethical behavior from retaliation?	√
Prinsip D. Pengungkapan dan Transparansi **Disclosure and Transparency**		
D.1	Transparansi tentang Struktur Kepemilikan Transparent ownership structure	
D.1.1	Informasi kepemilikan saham memperlihatkan identitas beneficial owner, memiliki 5% atau lebih saham Perusahaan Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?	√
D.1.2	Perusahaan mengungkapkan saham utama/pengendali baik secara langsung maupun tidak langsung Does the Company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?	√
D.1.3	Perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi baik secara langsung maupun tidak langsung Does the Company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?	√
D.1.4	Perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh manajemen senior baik secara langsung maupun tidak langsung Does the Company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	√
D.1.5	Perusahaan mengungkapkan struktur grup korporasi, termasuk entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, SPV dan lainnya Does the Company disclose details of the parent/holding Company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/vehicles (SPEs)/(SPVs)?	√
D.2	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report	
D.2.1	Perusahaan mengungkapkan tujuan dan sasaran Corporate objectives	√
D.2.2	Perusahaan mengungkapkan indikator-indikator kinerja keuangan Financial performance indicators	√
D.2.3	Perusahaan mengungkapkan indikator-indikator kinerja non keuangan Non-financial performance indicators	√
D.2.4	Perusahaan mengungkapkan kebijakan dividen Dividend policy	√
D.2.5	Perusahaan mengungkapkan biografi lengkap (paling tidak umur, kualifikasi, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman dan rangkap jabatan) Dewan Komisaris dan Direksi Biographical details (at least age, qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of Directors/Commissioners	√
D.2.6	Perusahaan mengungkapkan jumlah kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat Attendance details of each Director/Commissioner in respect of meetings held	√

	Parameter	Keterangan Penyajian Description
D.2.7	Perusahaan mengungkapkan remunerasi Dewan Direksi dan Komisaris Details of remuneration of the CEO and each member of the board of Board of Commissioners and Directors	√
D.2.8	Perusahaan mengungkapkan kepatuhannya pada pedoman corporate governace, dan jika tidak mematuhi memberikan penjelasan Does the Annual Report contain a statement confirming the Company's full compliance with the code of corporate governance?	√
D.3	Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Berelasi Disclosure of related party transactions (RPT)	
D.3.1	Perusahaan mengungkapkan kebijakan terkait dengan mekanisme review dan persetuaan akan transaksi dengan pihak berelasi yang material Does the Company disclose its policy covering the review and approval of material/significant RPTs?	√
D.3.2	Perusahaan mengungkapkan nama-nama pihak dan jenis hubungannya terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi Does the Company disclose the name of the related party and relationship for each material/ significant RPT?	√
D.4	Pengungkapan atas transaksi saham Perusahaan yang dilakukan oleh para anggota Direksi atau Dewan Komisaris Board of Commissioners and Directors dealings in shares of the Company	
D.4.1	Perusahaan mengungkapkan perdagangan saham oleh pihak dalam Does the Company disclose trading in the Company's shares by insiders?	x
D.5	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor External auditor and Auditor Report	
D.5.1	Perusahaan mengungkapkan audit fees Are audit fees and non-audit fees disclosed?	√
D.5.2	Non audit fees tidak melebihi audit fees Does the non-audit fees exceed the audit fees?	x
D.6	Media Komunikasi Medium of communications	
D.6.1	Perusahaan memiliki media komunikasi pelaporan kuartalan Quarterly reporting	-
D.6.2	Perusahaan memiliki website Company website	√
D.6.3	Perusahaan menyelenggarakan analyst briefing Analyst's briefing	x
D.6.4	Perusahaan menyelenggarakan press conferences Media briefings/press conferences	√
D.7	Penyampaian Laporan Tahunan yang tepat waktu Timely filing/release of annual/financial reports	
D.7.1	Laporan Keuangan Teraudit diterbitkan dalam waktu 120 hari dari ditutupnya tahun buku Are the audited annual financial report released within 120 days from the financial year end?	-
D.7.2	Laporan Tahunan diterbitkan dalam waktu 120 hari dari ditutupnya tahun buku Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	-
D.7.3	Laporan Keuangan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau pejabat yang relevan Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/ commissioners and/or the relevant officers of the Company?	√
D.8	Situs web Perusahaan Company website	
D.8.1	Tersedianya laporan keuangan tahun ini dan tahun sebelumnya Financial statements/reports (latest quarterly)	√

	Parameter	Keterangan Penyajian Description
D.8.2	Materi pertemuan dengan analis dan media Materials provided in briefings to analysts and media	-
D.8.3	Tersedianya Laporan Tahunan yang bisa diunduh Downloadable annual report	√
D.8.4	Tersedianya Pemberitahuan RUPS Notice of AGM and/or EGM	√
D.8.5	Tersedianya Risalah RUPS Minutes of AGM and/or EGM	x
D.8.6	Perusahaan memiliki website yang mengungkapkan Anggaran Dasar, Akte Pendirian dan dokumen-dokumen pendirian Perusahaan lainnya Company's constitution (Company's by-laws, memorandum and articles of association)	x
D.9	Hubungan investor Investor Relation	
D.9.1	Perusahaan mengungkapkan informasi rinci tentang kontak Perusahaan (telepon, fax, dan email) dari bagian/petugas bertanggung jawab terhadap kegiatan hubungan investor Does the Company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer responsible for investor relations?	√
Prinsip E. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi **Board of Commissioners and Board of Directors**		
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Board of Commissioners Duties and Responsibilities	
E.1.1	Perusahaan mengungkapkan board charter Does the Company disclose its corporate governance board charter?	√
E.1.2	Perusahaan mengungkapkan jenis-jenis keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris Are the types of decisions requiring board of Directors/Commissioners' approval disclosed?	√
E.1.3	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi difefinisikan dengan jelas Are the roles and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors clearly stated?	√
E.1.4	Perusahaan memiliki pernyataan visi dan misi yang diperbarui Does the Company have an updated vision and mission statement?	√
E.1.5	Dewan direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi Perusahaan setidaknya setiap tahun Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing the Company's strategy at least annually?	√
E.1.6	Direksi memantau/mengawasi implementasi strategi Perusahaan Does the board of directors monitor/oversee the implementation of the corporate strategy?	√
E.2	Struktur Dewan Komisaris Board of Commissioners Structure	
E.2.1	Perusahaan mengungkapkan isi Code of Ethics or Conduct Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	√
E.2.2	Perusahaan mengungkapkan bahwa seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dan karyawan wajib mematuhi Code of Ethics or Conduct Does the Company disclose that all Board of Commissioners, Board of Directors, senior management and employees are required to comply with the code?	√
E.2.3	Perusahaan mengungkapkan penerapan dan pemonitoran kepatuhan terhadap Code of Ethics or Conduct Does the Company disclose how it implements and monitors compliance with the code of ethics or conduct?	√
E.2.4	Direksi/Komisaris independen sekurang-kurangnya 50% dari Komisaris Independen Do independent the Board of Commissioners and Board of Directors make up at least 50% of the the Independent Commissioners	√

	Parameter	Keterangan Penyajian Description
E.2.5	Perusahaan memiliki batas masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 kali masa jabatan masing-masing lima tahun untuk Direktur/Komisaris independen Does the Company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years each for its independent directors/ commissioners?	√
E.2.6	Perusahaan telah menetapkan batas lima kursi dewan yang dapat dijabat oleh seorang Direktur/ Komisaris Independen/non- eksekutif secara bersamaan Has the Company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive Director/Commissioner may hold simultaneously?	x
E.2.7	Perusahaan memiliki Direktur Eksekutif yang menjabat di lebih dari dua Dewan Perusahaan yang Terdaftar di luar grup Does the Company have any executive Directors who serve on more than two Boards of listed Companies outside of the group?	x
E.2.8	Perusahaan memiliki Komite Nominasi (NC) Does the Company have a Nominating Committee (NC)?	√
E.2.9	Komite Nominasi terdiri dari mayoritas Direktur/Komisaris Independen Does the Nominating Committee comprise of a majority of Independent Directors/Commissioners?	√
E.2.10	Ketua Komite Pencalonan adalah Direktur/Komisaris Independen Is the chairman of the Nominating Committee an Independent Director/Commissioner?	√
E.2.11	Perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi Does the Company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Nominating Committee?	√
E.2.12	Kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan Komite Nominasi bertemu setidaknya dua kali dalam setahun Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	√
E.2.13	Perusahaan memiliki Komite Remunerasi Does the Company have a Remuneration Committee?	√
E.2.14	Komite Remunerasi terdiri dari mayoritas Direktur/Komisaris independen Does the Remuneration Committee comprise of a majority of independent Directors/ Commissioners?	√
E.2.15	Ketua Komite Remunerasi merupakan Direktur/Komisaris Independen Is the chairman of the Remuneration Committee an Independent Director/Commissioner?	√
E.2.16	Apakah Perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi? Does the Company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Remuneration Committee?	√
E.2.17	Apakah kehadiran anggota pada rapat Komite Remunerasi diungkapkan? Is the attendance of members at Remuneration Committee meetings disclosed?	√
E.2.18	Apakah Perusahaan memiliki Komite Audit? Does the Company have an Audit Committee?	√
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari Direktur/Komisaris non-eksekutif dengan mayoritas anggota independen? Direksi/Komisaris? Does the Audit Committee comprise entirely of non-executive Directors/Commissioners with a majority of independent Directors/Commissioners?	√
E.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan Direktur/Komisaris Independen? Is the chairman of the Audit Committee an Independent Director/Commissioner?	√
E.2.21	Apakah Perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Audit? Does the Company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	√
E.2.22	Apakah paling sedikit salah satu Direktur/Komisaris Independen komite mempunyai keahlian akuntansi (accounting kualifikasi atau pengalaman)? Does at least one of the Independent Directors/Commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	√

	Parameter	Keterangan Penyajian Description
E.2.23	Apakah kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat setidaknya empat kali? saat tahun ini? Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	√
E.2.24	Apakah Komite Audit mempunyai tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi mengenai penunjukan dan pemberhentian pihak eksternal auditor? Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	√
E.3	Peran Dewan Komisaris Role of the Board of Commissioners	
E.3.1	Apakah rapat dewan Direksi/Komisaris dijadwalkan sebelum awal tahun buku? Are the board of Directors/Commissioners meetings scheduled before the start of financial year?	√
E.3.2	Apakah dewan Direksi/Komisaris mengadakan pertemuan minimal enam kali dalam setahun? Does the board of Directors/Commissioners meet at least six times per year?	√
E.3.3	Apakah masing-masing Direktur/Komisaris menghadiri setidaknya 75% dari seluruh rapat dewan yang diadakan sepanjang tahun? Has each of the Directors/Commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	√
E.3.4	Apakah Perusahaan mensyaratkan kuorum minimum minimal 2/3 untuk pengambilan keputusan dewan? Does the Company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	√
E.3.5	Apakah Direktur/Komisaris non-eksekutif Perusahaan mengadakan pertemuan terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran eksekutif? Did the non-executive Directors/Commissioners of the Company meet separately at least once during the year without any executives present?	√
E.3.6	Apakah kertas rapat dewan Direksi/Komisaris diberikan kepada dewan setidaknya lima hari kerja sebelumnya? dari rapat dewan? Are board papers for board of Directors/Commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	x
E.3.7	Apakah Sekretaris Perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung dewan dalam melaksanakan tanggung jawabnya? Does the Company Secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	√
E.3.8	Apakah Sekretaris Perusahaan terlatih dalam bidang hukum, akuntansi atau praktik kesekretariatan Perusahaan dan selalu mengikuti perkembangan yang relevan? Is the Company Secretary trained in legal, accountancy or Company secretarial practices and has kept abreast on relevant developments?	√
E.3.9	Apakah Perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Direktur/Komisaris baru? Does the Company disclose the criteria used in selecting new Directors/Commissioners?	√
E.3.10	Apakah Perusahaan mengungkapkan proses yang diikuti dalam menunjuk Direktur/Komisaris baru? Does the Company disclose the process followed in appointing new Directors/Commissioners?	√
E.3.11	Apakah seluruh Direktur/Komisaris dapat dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun bagi Perusahaan tercatat di negara yang peraturan perundang-undangannya menetapkan jangka waktu masing-masing 5 tahun? Jangka waktu lima tahun harus diwajibkan oleh Undang-Undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011. Are all Directors/Commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years each? the five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011.	√
E.3.12	Apakah Perusahaan mengungkapkan kebijakan remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang serta ukuran kinerja) untuk direktur eksekutif dan CEO? Does the Company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy (i.e. the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	√

	Parameter	Keterangan Penyajian Description
E.3.13	Apakah terdapat pengungkapan struktur biaya untuk Direktur/Komisaris non-eksekutif? Is there disclosure of the fee structure for non-executive Directors/Commissioners?	√
E.3.14	Apakah pemegang saham atau Dewan Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior? Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	√
E.3.15	Apakah Perusahaan memiliki standar terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja bagi direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan, seperti penyediaan kembali dan bonus yang ditangguhkan? Does the Company have measurable standards to align the performancebased remuneration of the executive directors and senior executived with long-term interests of the Company, such as claw back provision and deferred bonuses?	x
E.3.16	Apakah Perusahaan mempunyai fungsi audit internal tersendiri? Does the Company have a separate internal audit function?	√
E.3.17	Apakah kepala audit internal telah diidentifikasi atau, jika dialihdayakan, apakah nama Perusahaan eksternal tersebut diungkapkan? Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	√
E.3.18	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit? Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	√
E.3.19	Apakah Perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal/kerangka manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka tersebut? Does the Company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?	√
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan mengungkapkan bahwa dewan Direksi/Komisaris telah melakukan peninjauan terhadap pengendalian material Perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko? Does the Annual Report disclose that the board of Directors/Commissioners has conducted a review of the Company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	√
E.3.21	Apakah Perusahaan mengungkapkan risiko-risiko utama yang secara material dihadapi oleh Perusahaan (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan hidup, sosial, ekonomi)? Does the Company disclose the key risks to which the Company is materially exposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	√
E.3.22	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan Direksi/Komisaris atau Komite Audit yang memberikan komentar atas kecukupan pengendalian internal/sistem manajemen risiko Perusahaan? Does the Annual Report contain a statement from the board of Directors/Commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the Company's internal controls/risk management systems?	√
E.4	Individu dalam Susunan Dewan Komisaris Individuals in the Board of Commissioners	
E.4.1	Apakah ada orang yang berbeda yang mengambil peran sebagai ketua dan CEO? Do different persons assume the roles of chairman and CEO?	x
E.4.2	Apakah ketua merupakan Direktur/Komisaris independen? Is the chairman an independent Director/Commissioner?	√
E.4.3	Apakah ada di antara direktur yang merupakan mantan CEO Perusahaan dalam 2 tahun terakhir? Is any of the directors a former CEO of the Company in the past 2 years?	x
E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab ketua diungkapkan? Are the role and responsibilities of the chairman disclosed?	√
E.4.5	Jika Ketua tidak independen, apakah Dewan telah menunjuk Pemimpin/Direktur Independen Senior dan apakah perannya telah ditetapkan? If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	x

	Parameter	Keterangan Penyajian Description
E.4.6	Apakah setidaknya satu Direktur/Komisaris non-eksekutif mempunyai pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama tempat Perusahaan beroperasi? Does at least one non-executive Director/Commissioner have prior working experience in the major sector that the Company is operating in?	√
E.5	Kinerja Dewan Komisaris Performance of the Board of Commissioners	
E.5.1	Apakah Perusahaan mempunyai program orientasi bagi Direktur/Komisaris baru? Does the Company have orientation programmes for new Directors/Commissioners?	√
E.5.2	Apakah Perusahaan mempunyai kebijakan yang mendorong Direksi/Komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesi yang berkelanjutan atau berkelanjutan? Does the Company have a policy that encourages Directors/Commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	√
E.5.3	Apakah Perusahaan mengungkapkan rencana dewan Direksi/Komisaris mengenai suksesi CEO/ Direktur Utama/Presiden dan manajemen kunci? Does the Company disclose how the board of Directors/Commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	√
E.5.4	Apakah Direksi/Komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Direktur Utama/ Presiden? Does the board of Directors/Commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/ President?	√
E.5.5	Apakah Perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap dewan Direksi/Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut? Did the Company conduct an annual performance assessment of the board of Directors/ Commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	√
E.5.6	Apakah Perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing Direktur/ Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut? Did the Company conduct an annual performance assessment of the individual Directors/ Commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	√
E.5.7	Apakah Perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap komite-komite dewan dan mengungkapkan kriteria serta proses yang diikuti untuk penilaian tersebut? Did the Company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	√
	v = comply | x = not comply | -= not applicable	
Bonus		
(B)A	Rights of Shareholders	
(B)A.1	Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.	
(B)A.1.1	Does the Company practice secure electronic voting in absentia at the general meetings of shareholders?	
(B)B	Equitable Treatment of Shareholders	
(B)B.1	Notice of AGM	
(B)B.1.1	Does the Company release its notice of AGM (with detailed agendas and explanatory circulars), as announced to the Exchange, at least 28 days before the date of the meeting?	
(B)C	Role of Stakeholders	
(B)C.1		
(B)C.1.1	Does the Company adopt an internationally recognized reporting framework for sustainability (i.e. GRI, Integrated Reporting, SASB)?	
(B)D	Disclosure and Transparency	
(B)D.1		
(B)D.1.1	Are the audited annual financial report/statement released within 60 days from the financial year end?	

	Parameter	Keterangan Penyajian Description
(B)D.1.2	Does the Company disclose details of remuneration of the CEO?	
(B)E	Responsibilities of the Board	
(B)E.1	Board Competencies and Diversity	
(B)E.1.1	Does the Company have at least one female independent Director/Commissioner?	
(B)E.1.2	Does the Company have a policy and disclose measurable objectives for implementing its board diversity and report on progress in achieving its objectives?	
(B)E.2	Board Structure	
(B)E.2.1	Is the Nominating Committee comprise entirely of independent Directors/Commissioners?	
(B)E.2.2	Does the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of directors aligned with the Company's strategic directions?	
(B)E.3	Board Appointments and Re-Election	
(B)E.3.1	Does the Company use professional search firms or other external sources of candidates (such as director databases set up by director or shareholder bodies) when searching for candidates to the board of Directors/Commissioners?	
(B)E.4	Board Appointments and Re-Election	
(B)E.4.1	Do independent non-executive Directors/Commissioners make up more than 50% of the board of Directors/Commissioners for a Company with independent chairman?	
(B)E.5	Risk Oversight	
(B)E.5.1	Does the board describe its governance process around IT issues including disruption, cyber security, disaster recovery, to ensure that all key risks are identified, managed and reported to the board?	
(B)E.6	Board Performance	
(B)E.6.1	Does the Company have a separate board level Risk Committee?	
Penalti Penalty		
(P)A	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	
(P)A.1	Hak Dasar Pemegang Saham Basic Shareholder Rights	
(P)A.1.1	Apakah Perusahaan gagal atau lalai memberikan perlakuan yang sama dalam pembelian kembali saham kepada seluruh pemegang saham? Did the Company fail or neglect to offer equal treatment for share repurchases to all shareholders?	
(P)A.2	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diperbolehkan untuk saling berkonsultasi mengenai permasalahan yang menjadi perhatian merekahak-hak dasar pemegang saham sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip, dengan pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse.	
(P)A.2.1	Apakah terdapat bukti adanya hambatan yang menghalangi pemegang saham untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lainnya? Is there evidence of barriers that prevent shareholders from communicating or consulting with other shareholders?	
(P)A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus mengetahui peraturannya, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.	
(P)A.3.1	Apakah Perseroan mencantumkan mata acara tambahan yang tidak diumumkan sebelumnya dalam pemanggilan RUPST/RUPSLB? Did the Company include any additional and unannounced agenda item into the notice of AGM/ EGM?	

	Parameter	Keterangan Penyajian Description
(P)A.3.2	Apakah Ketua Dewan, Ketua Komite Audit dan CEO menghadiri RUPS terakhir? Did the Chairman of the Board, Audit Committee Chairman and CEO attend the most recent AGM?	
(P)A.4	Struktur dan pengaturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional terhadap kepemilikannya. kepemilikan ekuitas harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.	
(P)A.4.1	Perjanjian Pemegang Saham? Shareholders Agreement?	
(P)A.4.2	Batas Pemungutan Suara? Voting Cap?	
(P)A.4.3	Hak Pilih Ganda? Mutiple Voting Rights?	
(P)A.5	Struktur dan pengaturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikannya. kepemilikan ekuitas harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.	
(P)A.5.1	Apakah struktur kepemilikan piramida dan/atau struktur kepemilikan silang terlihat jelas? Is a pyramid ownership structure and/or cross holding structure apparent?	
(P)B	Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham Equitable Treatment of Shareholders	
(P)B.1	Perdagangan orang dalam dan transaksi mandiri yang bersifat kekerasan harus dilarang. Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.	
(P)B.1.1	Apakah pernah ada kasus insider trading yang melibatkan Direksi/Komisaris, manajemen dan karyawan di masa lalu? tiga tahun? Has there been any conviction of insider trading involving Directors/Commissioners, management and employees in the past three years?	
(P)B.2	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan sewenang-wenang Protecting minority shareholders from abusive action	
(P)B.2.1	Apakah terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan sehubungan dengan transaksi pihak berelasi yang material? dalam tiga tahun terakhir? Has there been any cases of non compliance with the laws, rules and regulations pertaining to material related party transactions in the past three years?	
(P)B.2.2	Apakah ada RPT yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (yaitu tidak dilakukan secara wajar) kepada entitas selain anak Perusahaan yang dimiliki sepenuhnya? Were there any RPTs that can be classified as financial assistance (i.e not conducted at arms length) to entities other than wholly-owned subsidiary companies?	
(P)C	Peran Pemangku Kepentingan Role of Stakeholders	
(P)C.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati. The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected.	
(P)C.1.1	Apakah pernah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang terkait ketenagakerjaan/pekerjaan/ konsumen/kebangkrutan/ komersial/persaingan usaha atau masalah lingkungan? Have there been any violations of any laws pertaining to labour/employment/consumer/insolvency/ commercial/ competition or environmental issues?	
(P)C.2	Apabila pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola Perusahaan, mereka harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan, memadai dan informasi yang dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur. Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis.	
(P)C.2.1	Apakah Perusahaan pernah dikenakan sanksi oleh regulator karena tidak melakukan pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa materi? (P)D Pengungkapan dan Transparansi (P)D.1 Sanksi dari regulator atas laporan keuangan Has the Company faced any sanctions by regulators for failure to make announcements within the requisite time period for material events?	

	Parameter	Keterangan Penyajian Description
(P)D	Disclosure and Transparency	
(P)D.1	Sanctions from regulator on financial reports	
(P)D.1.1	Apakah Perusahaan menerima “opini wajar dengan pengecualian” dalam laporan audit eksternalnya? Did the Company receive a “qualified opinion” in its external audit report?	
(P)D.1.2	Apakah Perusahaan menerima “adverse opinion” dalam laporan audit eksternalnya? Did the Company receive an “adverse opinion” in its external audit report?	
(P)D.1.3	Apakah Perusahaan menerima “disclaimer opinion” dalam laporan audit eksternalnya? Did the Company receive a “disclaimer opinion” in its external audit report?	
(P)D.1.4	Apakah Perusahaan dalam satu tahun terakhir telah merevisi laporan keuangannya karena alasan selain perubahan kebijakan akuntansi? Has the Company in the past year revised its financial statements for reasons other than changes in accounting policies?	
(P)E	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board	
(P)E.1	Kepatuhan terhadap aturan pencatatan, peraturan dan hukum yang berlaku Compliance with listing rules, regulations and applicable laws	
(P)E.1.1	Apakah terdapat bukti bahwa Perusahaan tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pencatatan selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan? Is there any evidence that the Company has not complied with any listing rules and regulations over the past year apart from disclosure rules?	
(P)E.1.2	Apakah pernah ada Direktur/Komisaris non-eksekutif yang mengundurkan diri dan mengangkat permasalahan terkait tata kelola? kekhawatiran? Have there been any instances where non-executive directors/commissioner have resigned and raised any issues of governance-related concerns?	
(P)E.2	Struktur Pengurus Board Structure	
(P)E.2.1	Apakah Perseroan mempunyai Direktur/Komisaris independen yang telah menjabat lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun (mana yang lebih tinggi) dengan jabatan yang sama? Does the Company have any independent Directors/Commissioners who have served for more than nine years or two terms of five years 1 each (which ever is higher) in the same capacity?	
(P)E.2.2	Apakah Perusahaan gagal mengidentifikasi siapa saja Direktur/Komisaris independen? Did the Company fail to identify who are the independent director(s)/commissioner(s)?	
(P)E.2.3	Apakah Perusahaan mempunyai direktur/noneksekutif/komisaris independen yang menjabat pada lebih dari lima dewan di Perusahaan publik? Does the Company have any independent directors/nonexecutive/commissioners who serve on a total of more than five boards of publicly-listed companies?	
(P)E.3	Audit Eksternal External Audit	
(P)E.3.1	Apakah ada di antara direktur atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau rekan auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)? Is any of the directors or senior management a former employee or partner of the current external auditor (in the past 2 years)?	
(P)E.4	Struktur dan Komposisi Pengurus Board Structure and Composition	
(P)E.4.1	Apakah ketuanya pernah menjadi CEO Perusahaan dalam tiga tahun terakhir? Has the chairman been the Company CEO in the last three years?	
(P)E.4.2	Apakah Direktur/Komisaris non-eksekutif independen menerima opsi, bagi hasil atau bonus? Do independent non-executive Directors/Commissioners receive options, performance shares or bonuses?	
	v = terpenuhi | x = tidak terpenuhi |-= tidak sesuai/tidak dapat diterapkan	
	v = comply | x = not comply | -= not applicable	

Kesesuaian Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)

Cross Reference to the Indonesia Corporate Governance Manual (PUGKI)

Berikut disampaikan Rekomendasi dan Panduan dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 dan penerapannya oleh Perusahaan.

The following are recommendations and guidelines in the 2021 General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) and their implementation by Companies.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guide	**Uraian** Description	***Apply or Explain***	**Keterangan Penerapan** Implementation Description
1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris** **Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners**				
	1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi **Roles and Responsibilities of the Board of Directors**				
	1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: 1. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; 2. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; 3. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience)* To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out its leadership role and strives to achieve the following governance results: *1.* competitive and focused on long-term performance; *2.* ethical and responsible in running business; *3.* contribute positively to society and the environment; and the ability to survive and grow (corporate resilience)			
		1.1.1.1	Direksi mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya korporasi yang berintegritas. The Board of Directors maintains high standards of business ethics and ensures the implementation of a code of ethics that creates a corporate culture of integrity.	√	
		1.1.1.2	Direksi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa karyawan memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai korporasi dan standar etika bisnis yang tinggi. The Board of Directors fosters a corporate culture that ensures that employees understand their responsibility to behave in accordance with corporate values and high standards of business ethics.	√	
		1.1.1.3	Direksi memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. Direksi mempunyai perencanaan strategis yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
			The Board of Directors ensures the fulfillment of corporate social and environmental responsibilities. the Board of Directors has a clear strategic plan in carrying out corporate social and environmental responsibilities.		
		1.1.1.4	Direksi memastikan bahwa korporasi kuat secara finansial dan gesit secara operasional. The Board of Directors ensures that the corporation is financially strong and operationally agile.	√	
	1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporation's mission, vision, goals, objectives, strategies and annual and medium-term plans are consistent with long-term goals, by effectively utilizing innovation and technology.		√	
		1.1.2.1	Ketika mengembangkan strategi dan rencana, Direksi mempromosikan inovasi dan penggunaan teknologi mutakhir untuk meningkatkan daya saing, menanggapi perhatian dan harapan pemangku kepentingan, serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. When developing strategies and plans, the Board of Directors promotes innovation and the use of advanced technologies to increase competitiveness, respond to stakeholder concerns and expectations, and fulfill social and environmental responsibilities.	√	
		1.1.2.2	Direksi memprioritaskan dan mengedepankan budaya korporasi yang mencakup inovasi dan menyertakan inovasi ke dalam strategi korporasi, perencanaan pengembangan operasional, dan pengawasan operasi. The Board of Directors prioritizes and promotes a corporate culture that includes innovation and incorporates innovation into corporate strategy, operational development planning, and operational supervision.	√	
		1.1.2.3	Direksi mendorong inovasi yang meningkatkan penciptaan nilai jangka panjang untuk bisnis dalam lingkungan yang berubah. Inovasi tersebut dapat mencakup merancang model bisnis, produk dan layanan yang inovatif, mempromosikan riset, meningkatkan proses produksi dan operasi, dan berkolaborasi dengan mitra. The Board of Directors drives innovation that enhances long-term value creation for the business in a changing environment. Such innovation can include designing innovative business models, products and services, promoting research, improving production processes and operations, and collaborating with partners.	√	
	1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang- undangan dan standar yang berlaku.		√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		The Board of Directors ensures that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with the corporate vision, mission, goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations and standards.			
	1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.		√	
		1.1.4.1	Direksi memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi korporasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang relevan yang diterbitkan lembaga yang bereputasi. Selain itu, Direksi juga memastikan ketersediaan sumber daya (termasuk karyawan) yang memadai. The Board of Directors ensures that everyone involved in the preparation and disclosure of corporate information has relevant knowledge, skills and experience, reflected, among other things, in relevant professional certification issued by reputable institutions. Apart from that, the Board of Directors also ensures the availability of adequate resources (including employees).	√	
		1.1.4.2	Ketika menyetujui pengungkapan informasi (termasuk untuk pengungkapan informasi keuangan berkala), Direksi mempertimbangkan semua faktor yang berikut ini: 1. Hasil evaluasi ketepatan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal; 2. Opini auditor eksternal atas laporan keuangan, pengamatan atas sistem pengendalian internal, dan pengamatan lainnya melalui sumber lain; 3. Pendapat Komite Audit; 4. Konsistensi dengan tujuan, strategi, dan kebijakan. When approving information disclosures (including periodic disclosures of financial information), the Board of Directors considers all of the following factors: 1. Results of evaluation of design accuracy and effectiveness of internal control system implementation; 2. External auditor's opinion on financial reports, observations of the internal control system, and other observations through other sources; 3. Audit Committee Opinion; 4. Consistency with goals, strategies and policies.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		1.1.4.3	Direksi menyampaikan laporan yang mengomentari Laporan Keuangan Triwulanan dan dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan sehingga bermanfaat bagi investor dan analis yang akan meninjau fundamental dan kinerja keuangan korporasi. The Board of Directors submits a report that comments on the Quarterly Financial Report and is published simultaneously with the Quarterly Financial Report so that it is useful for investors and analysts who will review the corporation's financial fundamentals and performance.	√	
	1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared appropriately.		√	
		1.1.5.1	Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas korporasi dan memenuhi standar nasional dan atau global. Sustainability reports are prepared based on a reporting framework that is appropriate to the size and complexity of the corporation and meets national and/or global standards.	√	
		1.1.5.2	Pelaporan keberlanjutan korporasi mencerminkan praktik korporasi yang mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan. Corporate sustainability reporting reflects corporate practices that support sustainable value creation.	√	
	1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors builds a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with corporate business needs and priorities, encourages business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate goals and strategies.		x	
		1.1.6.1	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki kebijakan alokasi sumber daya TI yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya TI yang memadai dan optimal. The Board of Directors ensures that the corporation has an IT resource allocation policy that ensures adequate and optimal investment and allocation of IT resources.	√	
		1.1.6.2	Direksi memastikan bahwa manajemen risiko korporasi mencakup manajemen risiko TI. The Board of Directors ensures that corporate risk management includes IT risk management.	x	
		1.1.6.3	Direksi memastikan korporasi memiliki kebijakan dan prosedur keamanan TI, termasuk perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
			The Board of Directors ensures that the corporation has IT security policies and procedures, including protection of data security and confidentiality.		
	1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting equipment so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.		x	
	1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. the Charter includes, among other things, the division of roles of individual Directors which can be regulated in the Directors' Charter or by a Directors' Decree.		√	
	1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.		√	
	1.2 Penilaian Kinerja-Direksi dan Anggotanya Performance Assessment-Board of Directors and Members				
	1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur. The Board of Commissioners conducts annual formal evaluations objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual Director.		√	
		1.2.1.1	Dewan Komisaris menetapkan kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) bagi Direksi untuk menilai kinerja Direksi. Hasil penilaian sendiri disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dinilai dan bila diperlukan disesuaikan dengan penilaian Dewan Komisaris. The Board of Commissioners establishes a self-assessment policy for the Board of Directors to assess the performance of the Board of Directors. the results of the self-assessment are submitted to the Board of Commissioners for assessment and, if necessary, adjusted to the assessment of the Board of Commissioners.	√	
		1.2.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi dan sebagai dasar penilaian akuntabilitas Direksi mengenai tingkat keberhasilan Korporasi dalam mencapai target-target kinerja. Tolak ukur yang terpilih dicantumkan ke dalam kontrak kesepakatan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
			Self-assessment policies or other assessment policies are based on assessment benchmarks that are specific, measurable, achievable and relevant and are in accordance with those determined by the Board of Commissioners based on the considerations of the Nomination and Remuneration Committee and as a basis for assessing the accountability of the Board of Directors regarding the level of success of the Corporation in achieving targets. performance. the selected benchmarks are included in the work agreement contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners.		
		1.2.1.3	Skema remunerasi yang berupa saham yang diberikan kepada Direktur, Komisaris, dan karyawan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham. The remuneration scheme in the form of shares given to Directors, Commissioners and employees must obtain approval from the shareholders.	√	
		1.2.1.4	Perpanjangan masa jabatan direktur didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of a director's term of office is based on satisfactory performance evaluation results regarding his or her contribution.	√	
	1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.		√	
		1.2.2.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa evaluasi kinerja Direktur Utama didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang telah dikomunikasikan kepadanya terlebih dahulu. Kriteria atau evaluasi kinerja harus memberi insentif kepada Direktur Utama untuk menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan korporasi dan penciptaan nilai berkelanjutan. The Board of Commissioners ensures that the President Director's performance evaluation is based on predetermined criteria which have been communicated to him in advance. Performance criteria or evaluation must provide incentives to the President Director to carry out his role in supporting the achievement of corporate goals and the creation of sustainable value.	√	
		1.2.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap Direktur Utama. Dewan Komisaris atau Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk Dewan Komisaris mengkomunikasikan hasil (termasuk area pengembangan) evaluasi kinerja kepada Direktur Utama.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		1.2.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap Direktur Utama. Dewan Komisaris atau Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk Dewan Komisaris mengkomunikasikan hasil (termasuk area pengembangan) evaluasi kinerja kepada Direktur Utama. The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, carries out an annual performance evaluation of the President Director. the Board of Commissioners or the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee appointed by the Board of Commissioners communicates the results (including development areas) of performance evaluation to the President Director.	√	
		1.2.2.3	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi menyetujui kriteria evaluasi kinerja anggota Direksi lainnya. Dewan Komisaris memastikan Direktur Utama mengevaluasi kinerja anggota Direksi lainnya secara objektif dan akurat berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, approves the performance evaluation criteria for other members of the Board of Directors. the Board of Commissioners ensures that the President Director evaluates the performance of other members of the Board of Directors objectively and accurately based on previously determined performance evaluation criteria.	√	
	1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris **Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners**				
	1.3.1		Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision and corporate strategy formulated by the Board of Directors. the Board of Commissioners also reviews, provides advice and approves business plans and long-term financial plans and short-term financial plans of the corporation. the Board of Commissioners provides advice and monitors the Board of Directors regarding implementation management. the Board of Directors and Board of Commissioners are involved in very important decisions for the corporation, regulated in the corporation's articles of association.	√	
	1.3.2		Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan The types of decisions that require approval from the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
	1.3.3		Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/ atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. By taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and is decided by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners pays attention to diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities without distinction between ethnicity, religion, race, group and gender. the Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	√	
	1.3.4		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function prepares a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors. Every year the Board of Commissioners review reports on the implementation of development and succession plans submitted by the President Director.	√	
	1.3.5		Dewan Komisaris: 1. Mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; 2. Secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Board of Commissioners: 1. Submit to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee carrying out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that is in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; 2. Periodically review the remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners.	√	
	1.3.6		Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners monitors the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		1.3.6.1	Dewan Komisaris memastikan dilakukannya evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan governansi korporat baik secara mandiri maupun menggunakan konsultan eksternal independen. The Board of Commissioners ensures that regular evaluations are carried out on the implementation of corporate governance policies, both independently and using independent external consultants.	√	
	1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with corporate goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations, codes of conduct and standards.		√	
		1.3.7.1	Dewan Komisaris memahami sifat dan ruang lingkup risiko utama korporasi, serta secara berkala meninjau dan menyetujui selera risiko (*risk appetite*) korporasi. The Board of Commissioners understands the nature and scope of the corporation's main risks, and periodically reviews and approves the corporation's risk appetite.	√	
		1.3.7.2	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa: 1. Penetapan dan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah konsisten dengan tujuan, sasaran, strategi, dan selera risiko (risk appetite) korporasi; 2. Kebijakan manajemen risiko dapat memberikan sinyal peringatan dini (*early warning signals*) atas risiko material; 3. Kebijakan manajemen risiko ditinjau secara berkala, misalnya setiap tahun. The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that: *1.* Establishing and implementing risk management policies is consistent with corporate goals, objectives, strategies and risk appetite; *2.* Risk management policies can provide early warning signals for material risks; *3.* Risk management policies are reviewed periodically, for example every year.	√	
		1.3.7.3	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan agar risiko utama teridentifikasi melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal. The Board of Commissioners monitors and provides input so that main risks are identified through consideration of internal and external factors.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		1.3.7.4	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah dinilai, dan bahwa tersedia strategi dan rencana mitigasi risiko yang tepat. The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that the impact and likelihood of risks occurring have been assessed, and that appropriate risk mitigation strategies and plans are in place.	√	
		1.3.7.5	Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal korporasi. The Board of Commissioners regularly monitors the effectiveness of risk management and the corporation's internal control system.	√	
	1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs the achievement of the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.		√	
		1.3.8.1	Sebelum menyetujui laporan keuangan, Dewan Komisaris menerima pernyataan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan korporasi, bahwa menurut pendapat mereka, catatan keuangan entitas telah dikelola dengan baik dan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan secara wajar tentang posisi dan kinerja keuangan korporasi dan bahwa pendapat mereka tersebut dibentuk berdasarkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang didesain secara tepat dan diimplementasikan secara efektif. Before approving the financial report, the Board of Commissioners received a statement from the President Director and Finance Director of the corporation, that in their opinion, the entity's financial records have been managed well and the financial report has been prepared in accordance with applicable accounting standards and presents a fair presentation of the corporation's financial position and performance. and that their opinion is formed based on an appropriately designed and effectively implemented risk management and internal control system.	√	
	1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews and approves the Corporation's annual reports and sustainability reports and ensures their integrity, as well as oversees the corporate disclosure and communication process.		√	
	1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.		√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
	1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.		√	
	1.3.12	Komisaris Independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent Commissioners are highly expected to be able to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.		√	
		1.3.12.1	Jika Komisaris Utama bukan Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen atau Komisaris Independen yang senior (jika Komisaris Independen lebih dari satu orang) untuk menjalankan peran Komisaris Utama untuk tugas-tugas Komisaris Utama yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi. Kriteria dalam menunjuk Komisaris Independen senior yaitu: 1. Mampu menyampaikan pendapat/argumen secara konstruktif kepada Komisaris Utama; 2. Dibandingkan komisaris lainnya, memiliki pengetahuan lebih tentang korporasi, termasuk kinerja, pasar, dan pemangku kepentingannya; 3. Mampu memberikan pandangan/pemikiran yang berimbang terhadap isu dan perhatian dari pemegang saham mayoritas. If the President Commissioner is not an Independent Commissioner, then the Board of Commissioners appoints an Independent Commissioner or a senior Independent Commissioner (if there is more than one Independent Commissioner) to carry out the role of President Commissioner for tasks of the President Commissioner that have potential conflicts of interest with affiliated parties. the criteria for appointing a senior Independent Commissioner are: 1. Able to express opinions/arguments constructively to the President Commissioner; 2. Compared to other commissioners, has more knowledge about the corporation, including its performance, market and stakeholders; 3. Able to provide balanced views/thoughts on issues and concerns of the majority shareholder.	√	
		1.3.12.2	Dalam menjalankan peran sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen agar: 1. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; 2. Memantau benturan kepentingan antara korporasi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali;	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
			3. Memperhatikan secara independen pandangan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya; dan 4. Mendorong dialog antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. In carrying out his role as a member of the Board of Commissioners, the Independent Commissioner must: 1. Acting in the best interests of the corporation; 2. Monitor conflicts of interest between the corporation and members of the Board of Directors and Board of Commissioners or controlling shareholders; 3. Taking independent account of the views of minority shareholders and other stakeholders; And 4. Encourage dialogue between management, shareholders and other stakeholders.		
		1.3.12.3	Korporasi mengungkapkan alasan berakhirnya tugas Komisaris Independen yang terjadi sebelum masa jabatan berakhir. The corporation discloses the reasons for the end of the Independent Commissioner's duties which occurred before the end of the term of office.	√	
	1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. the Chief Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialogue that allows a variety of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. Apart from that, there must also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.		√	
		1.3.13.1	Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web korporasi. Details of the duties of the President Commissioner are disclosed in the annual report and corporate website.	√	
		1.3.13.2	Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris. The President Commissioner coordinates the distribution of supervisory roles among members of the Board of Commissioners, chairs meetings of the Board of Commissioners and represents the Board of Commissioners in matters with parties outside the Board of Commissioners.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		1.3.13.3	Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama/anggota Direksi perlu menjadi Komisaris utama, maka Dewan Komisaris memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan. Former President Directors and members of the Board of Directors who are elected as members of the Board of Commissioners cannot be immediately appointed as President Commissioner. There needs to be a cooling off period of 2 (two) years before being reappointed as President Commissioner. If the Board of Commissioners decides that the former President Director/member of the Board of Directors needs to become President Commissioner, then the Board of Commissioners provides reasons and explanations in the Annual Report.	√	
	1.4 Pembentukan Komite **Committee Formation**				
	1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporation has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Management Monitoring Committee.		√	
		1.4.1.1	Untuk Komite yang tidak diwajibkan dalam aturan perundangan, jika tidak memiliki Komite, korporasi mengungkapkan fakta tersebut dan mengungkapkan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa fungsi Komite tersebut dilaksanakan Dewan Komisaris sebagaimana mestinya. For Committees that are not required by law, if they do not have a Committee, the corporation discloses this fact and discloses the process used to ensure that the function of the Committee is carried out by the Board of Commissioners as it should.	√	
	1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and that the majority of other committees formed by the Board of Commissioners are independent, and that all committee members are competent, committed and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.		√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		1.4.2.1	Komite memiliki piagam yang secara jelas menetapkan perannya dan memberikan kepadanya semuas wewenang yang diperlukan untuk menjalankan perannya. Wewenang ini antara lain mencakup hak untuk memperoleh informasi, bertemu dengan pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya (dengan atau tanpa kehadiran manajemen), dan meminta nasihat dari konsultan/ahli eksternal independen jika komite menilai diperlukan. The Committee has a charter that clearly defines its role and provides it with all the authority necessary to carry out its role. This authority includes, among other things, the right to obtain information, meet with related parties in connection with the implementation of their duties (with or without the presence of management), and request advice from independent external consultants/experts if the committee deems it necessary.	√	
	1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure that monitoring of the implementation of the Audit Committee's duties is objective and independent, the President Commissioner may not be chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be explained in the annual report.		√	
	1.5 Penilaian Kinerja-Dewan Komisaris dan Anggotanya **Performance Assessment-Board of Commissioners and Members**				
	1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees and each individual commissioner.		√	
		1.5.1.1	Dewan Komisaris dapat mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja sebagai Dewan secara keseluruhan. The Board of Commissioners may have a self-assessment policy to assess performance as a Board as a whole.	√	
		1.5.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris. Self-assessment policies or other assessment policies are based on benchmarks or assessment criteria that are specific, measurable, achievable and relevant and in accordance with those determined by the Board of Commissioners.	√	
		1.5.1.3	Perpanjangan masa jabatan Komisaris didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of the Commissioner's term of office is based on satisfactory performance evaluation results regarding his contribution.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		1.5.1.4	Dewan Komisaris melibatkan konsultan eksternal independen secara berkala paling tidak sekali dalam masa jabatan, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang objektif dan jujur. The Board of Commissioners regularly engages independent external consultants at least once during their term of office, to facilitate objective and honest performance evaluations of the Board of Commissioners.	√	
	1.6 Benturan Kepentingan **Conflict of Interest**				
	1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chair of the committee performing the nominating function, before accepting a new appointment as director or commissioner of a publicly traded corporation, other directorship or other position with a significant time commitment.		√	
		1.6.1.1	Dewan Komisaris memastikan kebijakan dan pedoman yang jelas bagi anggota Direksi yang menjabat atau ingin menjabat sebagai direktur atau komisaris di korporasi lain. Kebijakan harus menetapkan penunjukan yang diizinkan dan jumlah korporasi yang diizinkan yang di dalamnya mereka dibolehkan untuk secara bersamaan menjabat sebagai direktur atau komisaris. The Board of Commissioners ensures clear policies and guidelines for members of the Board of Directors who serve or wish to serve as directors or commissioners in other corporations. the policy should specify the permitted appointments and the permitted number of corporations in which they are permitted to simultaneously serve as directors or commissioners.	√	
	1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in monitoring and making decisions regarding potential conflicts of interest involving the Commissioner or affiliates of the Commissioner concerned.		√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		1.6.2.1	Dewan Komisaris memiliki prosedur untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait (abstain) benturan kepentingan tersebut. The Board of Commissioners has procedures to ensure that members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who have a conflict of interest do not participate in decision making related to (abstain) the conflict of interest.	√	
		1.6.2.2	Setiap anggota Dewan Komisaris menginformasikan segera kepada Direksi dan Dewan Komisaris jika ada potensi benturan kepentingan, termasuk sebagai akibat dari kedudukannya sebagai konsultan atau pejabat di Perusahaan pelanggan. Each member of the Board of Commissioners immediately informs the Board of Directors and Board of Commissioners if there is a potential conflict of interest, including as a result of his or her position as a consultant or official in the customer Company, suppliers, creditors or other business partners.	√	
		1.6.2.3	Semua anggota Direksi mengungkapkan dengan segera potensi benturan kepentingannya kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta tidak turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan. All members of the Board of Directors immediately disclose potential conflicts of interest to the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors and do not participate in decision making in cases where they have a conflict of interest.	√	
		1.6.2.4	Dalam laporannya, Dewan Komisaris menginformasikan kepada RUPS adanya benturan kepentingan material yang terjadi disertai perlakuannya. Benturan kepentingan material yang sifatnya tidak sekadar sementara waktu dapat berakibat pada penghentian jabatan sebagai anggota dewan. In its report, the Board of Commissioners informed the GMS of the existence of a material conflict of interest and its treatment. A material conflict of interest that is more than temporary in nature may result in termination of office as a member of the board.	√	
	1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris **Increasing the Competency of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners**				
	1.7.1		Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations and standards as well as other applicable obligations. the Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their roles on the Board.			
		1.7.1.1	Direksi memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat menerima program pengenalan yang formal dan memadai serta semua informasi yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka. The Board of Directors ensures that newly appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners receive a formal and adequate induction program as well as all information relevant to their roles and responsibilities.	√	
		1.7.1.2	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara teratur menerima program pelatihan dan pengembangan pengetahuan yang relevan, memadai dan berkelanjutan. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners regularly receive relevant, adequate and sustainable training and knowledge development programs.	√	
		1.7.1.3	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara regular menerima informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas mengenai perkembangan terakhir peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, kewajiban lain yang berlaku, faktor risiko, dan lingkungan bisnis korporasi. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners regularly receive accurate, timely and clear information regarding the latest developments in relevant laws and regulations and standards, other applicable obligations, risk factors and the corporate business environment.	√	
2	**Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** **Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners**				
	2.1 Komposisi Direksi **Composition of the Board of Directors**				
	2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining prospective director candidates, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine candidates who meet the requirements.		√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
	2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities and skills required to appropriately fulfill the role of the Board of Directors and pay attention to the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.		√	
		2.1.2.1	Informasi tentang calon Direksi harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: 1. identitas calon dan alasan pengangkatan; 2. kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; 3. jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; 4. faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; 5. lama masa jabatan; 6. kehadiran dalam rapat Direksi (kecuali untuk Direktur baru); dan 7. setiap kepemilikan saham dalam korporasi. Information about prospective Directors must be disclosed in the election/re-election process and must be available from the date the GMS summons is issued until the GMS is held and can be downloaded via the Public Company website and/ or e-GMS, including: *1.* identity of the candidate and reasons for appointment; *2.* core competencies, qualifications, and professional background; *3.* current positions at other corporations, as well as key roles at non-profit/charitable organizations; *4.* factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; *5.* length of term of office; *6.* attendance at Board of Directors meetings (except for new Directors); And *7.* any share ownership in the corporation.	√	
		2.1.2.2	Komposisi Direksi dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota- anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi. The composition of the Board of Directors is formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background and gender required to appropriately fulfill the role of the Board of Directors.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		2.1.2.3	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi korporasi serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Determining the number of members of the Board of Directors takes into account the condition of the corporation and effectiveness in decision making.	√	
		2.1.2.4	Setidaknya ada satu direktur yang memiliki pengalaman sebelumnya di sektor utama tempat korporasi beroperasi. There is at least one director who has previous experience in the main sector in which the corporation operates.	√	
		2.1.2.5	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi yang diakui pemerintah dan terdaftar sebagai anggota di asosiasi profesi tersebut. Members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting, reflected, among other things, in professional certificates issued by government-recognized accounting professional associations and are registered as members of these professional associations.	√	
	2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Corporate policies regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners are disclosed in the Annual Report.		√	
		2.1.3.1	Korporasi melaporkan dalam Laporan Tahunan keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris saat ini, target komposisi yang terukur dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai target tersebut. Informasi harus mencakup referensi tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Direksi dan Dewan Komisaris. Corporations report in the Annual Report the current diversity of the Board of Directors and Board of Commissioners, measurable composition targets and the progress achieved in achieving these targets. Information should include references to how diversity is achieved through appropriate succession planning in the Board of Directors and Board of Commissioners.	√	
	2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired Board composition. the Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.		√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		2.1.4.1	Informasi tentang calon Komisaris harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: 1. Identitas calon dan alasan pengangkatan; 2. Kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; 3. Jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; 5. Lama masa jabatan; 6. Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dan komite (kecuali untuk Komisaris baru); dan 7. Setiap kepemilikan saham dalam korporasi Information about prospective Commissioners must be disclosed in the election/re-election process and must be available from the date the GMS summons is issued until the GMS is held and can be downloaded via the Public Company website and/or e-GMS, including: 1. Identity of the candidate and reasons for appointment; 2. Core competencies, qualifications, and professional background; 3. Current positions at other corporations, as well as key roles at non-profit/charitable organizations; 4. Factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; 5. Length of term of office; 6. Attendance at Board of Commissioners and committee meetings (except for new Commissioners); And 7. Any share ownership in the corporation	√	
		2.1.4.2	Jika Dewan Komisaris menggunakan konsultan eksternal independen dalam proses nominasi, maka informasi relevan mengenai konsultan eksternal independen diungkapkan di laporan tahunan, termasuk informasi mengenai independensi dan benturan kepentingan. If the Board of Commissioners utilizes an independent external consultant in the nomination process, relevant information regarding the independent external consultant shall be disclosed in the annual report, including information on independence and conflicts of interest.	√	
	2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee responsible for the nomination function establishes procedures and nomination criteria consistent with the expertise matrix of the Board of Commissioners approved by the Board of Commissioners and ensures that candidate profiles meet the requirements set forth in the expertise matrix and nomination criteria.		√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
	2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background and gender required to appropriately fulfill the role of the Board of Commissioners.		√	
		2.1.6.1	Setidaknya ada satu Komisaris memiliki pengalaman sebelumnya pengalaman di sektor utama tempat korporasi beroperasi At least one Commissioner has previous experience in the main sector in which the corporation operates	√	
		2.1.6.2	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi korporasi. Determining the number of members of the Board of Commissioners takes into account the condition of the corporation.	√	
	2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles where there is a potential conflict of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence. from a corporate perspective.		√	
		2.1.7.1	Mantan Direktur Utama/anggota Direksi dapat masuk ke dalam Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun. Former President Directors/members of the Board of Directors can join the Board of Commissioners as Independent Commissioners only in extraordinary circumstances and there must be a gap period between these positions of at least 2 (two) years.	√	
		2.1.7.2	Mantan Komisaris Independen dapat diangkat kembali sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun. Former Independent Commissioners can be reappointed as Independent Commissioners only in extraordinary circumstances and there must be a gap period between positions of at least 2 (two) years.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		2.1.7.3	Masa jabatan Komisaris Independen tidak boleh melebihi batas waktu 9 (sembilan) tahun. bagi korporasi dengan masa jabatan 5 (lima) tahun maka tidak boleh melebihi batas waktu 10 (sepuluh) tahun. Setelah sembilan/sepuluh tahun, seorang Komisaris Independen dapat terus menjabat hanya sebagai Komisaris. The term of office of an Independent Commissioner may not exceed the time limit of 9 (nine) years. For corporations with a term of office of 5 (five) years, the term of office may not exceed 10 (ten) years. After nine/ten years, an Independent Commissioner may continue to serve only as Commissioner.	√	
	2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, strict and transparent process for the appointment and promotion of members of the Board of Directors and Board of Commissioners		√	
		2.1.8.1	Tanggung jawab dan peran Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk namun tidak terbatas pada: 1. Menyusun pedoman untuk memastikan bahwa semua Komisaris mengalokasikan waktu yang cukup kepada korporasi agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Pedoman tersebut mencakup diantaranya: a. Dalam penunjukan komisaris utama, Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan uraian spesifikasi pekerjaan, termasuk persyaratan komitmen waktu yang juga mempertimbangkan kebutuhan komitmen waktu pada saat krisis. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Perubahan komitmen harus segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan dampaknya dijelaskan dalam laporan tahunan berikutnya; b. Dalam penunjukan anggota komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan anggota komisaris. Syarat dan ketentuan ini tersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Komitmen waktu yang diharapkan dicantumkan dalam Surat penunjukan anggota Komisaris dan anggota Komisaris harus memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi komitmen waktu	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
			yang diharapkan. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan, beserta indikasi komitmen waktu yang diperlukan dan Dewan Komisaris harus diberitahu jika terdapat perubahan atas komitmen tersebut; 2. Secara proaktif memimpin dan bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan reviu berkelanjutan atas perencanaan suksesi Direksi dan Dewan Komisaris; 3. Menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite; 4. Mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen nominasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi. The responsibilities and roles of the Nomination and Remuneration Committee include but are not included limited to: *1.* Develop guidelines to ensure that all Commissioners allocate sufficient time to the corporation to carry out their responsibilities effectively. These guidelines include: *a.* In appointing the main commissioner, the Nomination and Remuneration Committee prepares a description of the job specifications, including time commitment requirements which also takes into account the need for time commitment in times of crisis. Any other significant commitments outside the corporation must be disclosed to the Board of Commissioners prior to appointment and disclosed in the annual report. Changes in commitments must be immediately reported to the Board of Commissioners and their impacts explained in the next annual report; *b.* In appointing commissioners, the Nomination and Remuneration Committee determines the terms and conditions for appointing commissioners. These terms and conditions are available for inspection. the expected time commitment is stated in the Letter of appointment of Commissioners and Commissioners must have sufficient time to fulfill the expected time commitment. the existence of other significant		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
			commitments outside the corporation must be disclosed to the Board of Commissioners prior to appointment, along with an indication of the time commitment required and the Board of Commissioners must be notified if there are changes to these commitments; 2. Proactively lead and be responsible for the development, implementation and ongoing review of succession planning for the Board of Directors and Board of Commissioners; 3. Uphold the principle of independence in handling conflicts of interest (and potential conflicts of interest) between committee members in carrying out the Committee's duties; 4. Consider and be responsible for appointing nominated independent consultants, including the selection and requirements for their assignment, as well as disclosing the identity and costs of consulting services.		
	2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris **Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners**				
	2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. Directors' remuneration must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. the amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and corporate performance.		√	
		2.2.1.1	Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai korporasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat. Remuneration policies are reasonable and fair, both in structure and amount, and are determined in the context of corporate values, internal reward structures, and encourage competition while remaining sensitive to stakeholder expectations and community norms.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		2.2.1.2	Korporasi memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayar (*clawback*). The corporation has a remuneration policy for members of the Board of Directors that is performance-based and in line with the achievement of the corporation's long-term interests, such as the following performance measures: share ownership options, deferred bonuses, provisions for the return of part or all of the bonuses/incentives that have been paid (clawback).	√	
		2.2.1.3	Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham korporasi. The Board of Directors does not receive other facilities apart from the facilities already provided at the corporation's General Meeting of Shareholders.	√	
	2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Disamping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. the amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation and corporate performance. Apart from that, consideration must also be given to his position as President Commissioner and chairman as well as his membership in committees.		√	
		2.2.2.1	Remunerasi Dewan Komisaris harus berupa remunerasi tetap. Jika anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang korporasi dan berbeda dengan anggota Direksi. The remuneration of the Board of Commissioners must be a fixed remuneration. If members of the Board of Commissioners are given remuneration related to performance, the basis for the award must be related to the long-term development of the corporation and is different from members of the Board of Directors.	√	
		2.2.2.2	Komisaris Independen tidak boleh menerima opsi saham, saham yang dikaitkan dengan kinerja, atau bonus. Independent Commissioners may not receive stock options, shares linked to performance, or bonuses.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		2.2.3.1	Dalam menjalankan perannya Komite Nominasi dan Remunerasi: 1. Menentukan proporsi yang tepat dan seimbang antara komponen remunerasi yang tetap dan yang terkait kinerja, komponen remunerasi yang dibayar langsung atau yang ditangguhkan. Indikator kinerja, termasuk indikator non-keuangan, dipastikan relevan dan dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja jangka panjang korporat. Insentif remunerasi dipastikan sesuai dengan kebijakan risiko korporasi. Selain itu, terdapat penetapan batas atas remunerasi dan batas atas tersebut diungkapkan di laporan tahunan;		
			2. Mempertimbangkan apakah direktur dan komisaris memenuhi syarat untuk memperoleh bonus tahunan dan/ atau tunjangan dengan skema insentif jangka panjang; 3. Secara hati-hati mempertimbangkan kewajiban kompensasi (termasuk iuran pensiun dan semua komponen lainnya) yang menjadi hak Direktur/Komisaris jika diberhentikan lebih awal. Tujuannya adalah untuk menghindari pemberian penghargaan atas kinerja yang tidak baik; 4. Mempertimbangkan konsekuensi kewajiban pensiun dan manfaat jangka panjang lainnya bagi Direktur dan Komisaris bagi korporasi, termasuk dampak kenaikan imbalan kerja tersebut dan perubahan lainnya, terutama untuk Direktur dan Komisaris yang hampir pensiun; 5. Menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite; 6. Mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen remunerasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi. In carrying out its role the Nomination and Remuneration Committee: 1. Determine the appropriate and balanced proportion between fixed and performance-related remuneration components, remuneration components that are paid directly or that are deferred. Performance indicators, including non-financial indicators, are ensured to be relevant and designed to support the achievement of long- term corporate performance. Remuneration incentives are ensured in accordance with corporate risk policies. In addition, there is a determination of an upper limit on remuneration and this upper limit is disclosed in the annual report;	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
			2. Consider whether directors and commissioners qualify for annual bonuses and/or allowances under long-term incentive schemes; 3. Carefully consider the compensation obligations (including pension contributions and all other components) that the Director/ Commissioner is entitled to if dismissed early. the aim is to avoid rewarding poor performance; 4. Consider the consequences of pension obligations and other long-term benefits for Directors and Commissioners for the corporation, including the impact of increases in employee benefits and other changes, especially for Directors and Commissioners who are nearing retirement; 5. Uphold the principle of independence in handling conflicts of interest (and potential conflicts of interest) between committee members in carrying out the Committee's duties; 6. Consider and be responsible for appointing an independent consultant for remuneration, including the selection and requirements for assignment, as well as disclosing the identity and costs of consultancy services.		
3	**Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris** **Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners**				
	3.1 Sifat Hubungan Kerja **Nature of the Working Relationships**				
	3.1.1		Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as between members of the Board of Directors and members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to prevent leaks of confidential information.	√	
	3.1.2		Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision and strategy and regularly discusses their implementation.	√	
	3.1.3		Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guide	**Uraian** Description	***Apply or Explain***	**Keterangan Penerapan** Implementation Description
	3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.			√	
		3.1.3.1	Peran dan tanggung jawab Sekretaris Korporasi mencakup, namun tidak terbatas pada: 1. Memastikan arus informasi yang baik antara Dewan Komisaris dengan komitenya dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi; 2. Memantau perkembangan governansi korporat, termasuk memastikan piagam Dewan Komisaris, Direksi, dan komite dilaksanakan sepenuhnya, membantu serta memberikan advis kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapkan praktik governansi korporat untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan; 3. Mengelola semua keperluan rapat Dewan Komisaris, Direksi, Direksi dengan Dewan Komisaris, komite yang dibentuk Dewan Komisaris, menghadiri dan mencatat risalah semua rapat dan memfasilitasi komunikasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris, termasuk memastikan bahwa pembahasan dan keputusan rapat Direksi dan Dewan Komisaris dicatat secara akurat dalam risalah; 4. Mengatur dan memfasilitasi orientasi Direktur/Komisaris/ anggota komite baru dan pengembangan profesional Direktur/ Komisaris/anggota komite; 5. Mengelola aktivitas hubungan investor untuk menjaga dan meningkatkan komunikasi antara korporasi dengan pemegang saham/ investor, baik lokal maupun asing. The roles and responsibilities of the Corporate Secretary include, but are not limited to: Ensure a good flow of information between the Board of 1. Commissioners and its committees and between the Board of Commissioners and the Board of Directors; 2. Monitor the development of corporate governance, including ensuring that the charter of the Board of Commissioners, Directors and committees is fully implemented, assisting and providing advice to the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance practices to meet stakeholder expectations;	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
			3. Manage all meeting requirements of the Board of Commissioners, Board of Directors, Directors and Board of Commissioners, committees formed by the Board of Commissioners, attend and record minutes of all meetings and facilitate communication between the Board of Directors and the Board of Commissioners, including ensuring that discussions and decisions at meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners are recorded accurately in treatise; 4. Organize and facilitate the orientation of new Directors/ Commissioners/committee members and professional development of Directors/Commissioners/committee members; 5. Manage investor relations activities to maintain and improve communication between corporations and shareholders/ investors, both local and foreign.		
		3.1.3.2	Setiap Direktur dan Komisaris dapat berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Korporat dan sebaliknya. Each Director and Commissioner can communicate directly with the Corporate Secretary and vice versa.	√	
		3.1.3.3	Dewan Komisaris memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Korporasi. The Board of Commissioners provides consideration to the Board of Directors in appointment and the dismissal of the Corporate Secretary.	√	
	3.2 Akses Informasi Dewan Komisaris **Access Information on the Board of Commissioners**				
	3.2.1		Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai.Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. the Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. the Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay and comprehensively on all issues relevant to the corporation. the Board of Commissioners may at any time ask the Board of Directors to provide additional information.	√	
		3.2.1.1	Dewan Komisaris memiliki proses yang memungkinkan anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen, dapat memiliki akses ke Direksi dan manajemen senior terkait. The Board of Commissioners has a process that allows members of the Board of Commissioners, including Independent Commissioners, to have access to the Board of Directors and related senior management.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		3.2.1.2	Direktur Utama atau Sekretaris Korporat segera menginformasikan kepada Dewan Komisaris tentang peristiwa besar yang material dan penting mengenai kondisi dan kinerja serta pengelolaan korporasi. Jika diperlukan, rapat Dewan Komisaris diadakan untuk membahas peristiwa tersebut. The President Director or Corporate Secretary immediately informs the Board of Commissioners about major material and important events regarding the condition, performance and management of the corporation. If necessary, a Board of Commissioners meeting is held to discuss the incident.	√	
		3.2.1.3	Di antara rapat Dewan, Dewan Komisaris berhubungan secara teratur dengan Direksi agar terus dapat terinformasikan perkembangan korporasi yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Between Board meetings, the Board of Commissioners communicates regularly with the Board of Directors to keep them informed of corporate developments that need the attention of the Board of Commissioners so that the Board of Commissioners can carry out their duties more effectively.	√	
3.2	**Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi** **Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structure on the Corporation**				
	3.3.1		Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of ownership structure on corporations. the Board of Directors and Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the share ownership structure and relationships between corporate shareholders that may have an impact on the management and operations of the corporation.	√	
		3.3.1.1	Direksi dan Dewan Komisaris memahami struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pengendalian atas korporasi, termasuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis keluarga sebagai pemegang saham pengendali, perjanjian antar pemegang saham, atau kebijakan grup bisnis dimana korporasi merupakan bagiannya. The Board of Directors and Board of Commissioners understand the shareholder ownership structure and relationships between corporate shareholders, and consider the impact on control over the corporation, including written and unwritten family agreements as controlling shareholders, agreements between shareholders, or policies of the business group of which the corporation is a part.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		3.3.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi tidak mempengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, (termasuk di antaranya dalam kaitannya dengan rencana suksesi Direksi) demi kepentingan terbaik korporasi. The Board of Directors and Board of Commissioners ensure that the shareholder ownership structure and relationships between corporate shareholders do not affect the implementation of the roles and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, (including in relation to the Directors' succession plan) in the best interests of the corporation.	√	
		3.3.1.3	Dewan Komisaris memantau dan Direksi memastikan bahwa informasi diungkapkan dengan benar ketika terdapat kondisi yang berdampak pada pengendalian atas korporasi. The Board of Commissioners monitors and the Board of Directors ensures that information is disclosed correctly when there are conditions that impact control over the corporation.	√	
4	**Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab** **Ethical and Responsible Behavior**				
	4.1 Pedoman Etika dan Perilaku **Code of Ethics and Conduct**				
	4.1.1		Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: 1. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; 2. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; 3. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. 4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; 5. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; 6. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; 7. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. 8. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. 9. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		10. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. 11. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. This statement is outlined in the Code of Business Conduct and Ethics which must clearly express the corporation's expectations that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as employees will: *1.* Acting in the best interests of the corporation; *2.* Act honestly and with high standards of integrity; *3.* Be independent and act on complete information, in good faith, with due diligence and care. *4.* Comply with the laws and regulations that apply to the corporation and its operations; *5.* Avoid actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethical guidelines; *6.* Not be involved or participate in any activity that will create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that will have a negative impact on the corporation's reputation; *7.* Do not take advantage of property or information owned by the corporation, ownership of other assets or its customers for personal gain or which causes losses to the corporation and its customers. *8.* Not taking advantage of his position or the opportunities generated by his position for personal gain. *9.* Avoid acts of requesting or receiving from third parties payments, gratuities or other benefits for oneself or for other people which creates a conflict of interest/providing benefits to third parties in violation of statutory regulations. *10.* Respect differences of opinion and the rights of every member of the Board of Directors, Board of Commissioner, and employees *11.* Ensure complete, fair, accurate, timely and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.		
	4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, antikecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors determines policies and practices for anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, involvement in politics by referring to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other related standards.		√	
		4.1.2.1	Direksi mengembangkan dan menetapkan sistem yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		4.1.2.1	Direksi mengembangkan dan menetapkan sistem yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis. The Board of Directors develops and establishes a system that can be used as an effort to prevent money laundering and terrorist financing, anti-corruption, offering or accepting bribes as well as payments or other inducements to commit acts that violate laws and regulations or are unethical.	√	
		4.1.2.2	Direksi mengkomunikasikan kebijakan anti pencucian uang, anti suap, dan anti korupsi dengan memberi pelatihan kepada staf serta berupaya memperluas upaya anti pencucian uang, anti suap dan anti korupsi kepada pemangku kepentingan. The Board of Directors communicates anti-money laundering, anti-bribery and anti-corruption policies by providing training to staff and making efforts to expand anti-money laundering, anti-bribery and anti-corruption efforts to stakeholders.	√	
		4.1.2.3	Setiap pelanggaran material terhadap kebijakan anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi harus diinformasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris. Any material violation of anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption policies must be informed to the Board of Directors and Board of Commissioners or the Board of Commissioners Committee.	√	
		4.1.2.4	Direksi menetapkan dan meninjau secara teratur kebijakan yang transparan tentang keterlibatan politik, yang mencakup lobi dan donasi untuk tujuan politik atau kandidat jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa manfaat dan risiko dari pendekatan yang diambil dipahami, dipantau, dan ditinjau secara teratur oleh Dewan Komisaris. The Board of Directors establishes and regularly reviews a transparent policy on political engagement, which includes lobbying and donations to political causes or candidates where permitted by law, and ensures that the benefits and risks of the approach taken are understood, monitored and regularly reviewed by the Board of Commissioners.	√	
	4.2 Nilai-nilai dan Budaya Organisasi **Organizational Values and Culture**				
	4.2.1		Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. Corporations articulate, cultivate and express corporate culture and values.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		4.2.1.1	Korporasi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta seluruh karyawannya memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman etika dan perilaku. The corporation fosters a corporate culture that ensures that all members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as all employees understand and are committed to carrying out their responsibilities to behave in accordance with ethical and behavioral guidelines.	√	
		4.2.1.2	Terdapat pelatihan dan sosialisasi yang memadai di level Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh karyawan korporasi yang disebutkan di atas untuk semua aspek yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai dan etika korporasi. There is adequate training and outreach at the level of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as all corporate employees mentioned above for all aspects related to corporate culture, values and ethics.	√	
		4.2.1.3	Terdapat penilaian dan program pemantauan agar seluruh Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan korporasi memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan korporasi dalam perilaku yang tidak tepat. There is an assessment and monitoring program so that all Directors, Board of Commissioners and all corporate employees understand the relevant code of ethics and implement it effectively to avoid corporate involvement in inappropriate behavior.	√	
4.3 Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya **Communication and Enforcement of Ethics, Values and Culture Guidelines**					
	4.3.1		Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The corporate code of conduct and ethics are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees, integrated into corporate strategy and operations including the risk management system and remuneration structure, and enforced.	√	
		4.3.1.1	Korporasi memiliki pedoman pelaporan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong dilaporkannya perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana korporasi melindungi pelapor yang beritikad baik. Corporations have violation reporting guidelines that can be used to encourage reporting of behavior that violates laws and regulations or is unethical, which also includes guidelines on how corporations protect whistleblowers who have good intentions.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		4.3.1.2	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan komite segera diberitahu jika terdapat pelanggaran material pedoman etika dan perilaku. The Corporation ensures that the Board of Commissioners and committees are immediately notified if there is a material violation of ethical and behavioral guidelines.	√	
		4.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Komite segera diberitahu jika terdapat insiden material yang dilaporkan berdasarkan kebijakan pelaporan pelanggaran. The Corporation ensures that the Board of Commissioners and Committees are immediately notified if any material incidents are reported based on the violation reporting policy.	√	
		4.3.1.4	Direksi memastikan bahwa pelanggaran pedoman mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk pemecatan Jika terdapat pelanggaran, Direksi wajib mengambil tindakan preventif agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. The Board of Directors ensures that violations of the guidelines result in disciplinary action, including dismissal. If there is a violation, the Board of Directors is obliged to take preventive action so that the violation does not happen again.	√	
5	**Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan** **Risk Management, Internal Control and Compliance**				
	5.1 Pengendalian Internal dan Kepatuhan **Internal Control and Compliance**				
	5.1.1		Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors carries out regular reviews of the accuracy of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and corporate compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the Corporation's annual report.	√	
		5.1.1.1	Reviu berkala yang dilakukan oleh Direksi secara khusus mempertimbangkan: 1. Adanya perubahan sejak reviu berkala terakhir tentang sifat dan ruang lingkup risiko signifikan dan kemampuan korporasi dalam merespons perubahan bisnis dan lingkungan eksternalnya; 2. Ruang lingkup dan mutu pemantauan yang sedang berjalan atas risiko dan sistem pengendalian internal, peran fungsi audit internal dan penyedia jasa asurans lainnya;	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
			3. Cakupan dan frekuensi komunikasi hasil pemantauan di atas kepada Dewan Komisaris (atau kepada Komite Audit) yang memampukan Dewan Komisaris untuk menilai secara menyeluruh tentang kondisi pengendalian internal dan efektivitasnya dalam pengelolaan risiko; 4. Terjadinya kegagalan atau defisiensi dalam pengendalian internal yang ditemukan dalam periode yang direviu dan luasnya dampak kontinjensi yang telah, dapat, atau mungkin terjadi di masa depan, yang berdampak material atas kondisi atau kinerja keuangan korporasi; dan 5. Efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. Periodic reviews carried out by the Board of Directors specifically consider: *1.* There have been changes since the last periodic review regarding the nature and scope of significant risks and the corporation's ability to respond to changes in its business and external environment; *2.* The scope and quality of ongoing monitoring of risks and internal control systems, the role of the internal audit function and other assurance service providers; *3.* The scope and frequency of communication of the above monitoring results to the Board of Commissioners (or to the Audit Committee) which enables the Board of Commissioners to comprehensively assess the condition of internal control and its effectiveness in risk management; *4.* The occurrence of failures or deficiencies in internal control discovered in the period reviewed and the extent of contingent impacts that have, can, or may occur in the future, which have a material impact on the corporation's financial condition or performance; And *5.* Effectiveness of internal controls relating to financial reporting and compliance with applicable laws and regulations.		
		5.1.1.2	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki sebuah fungsi yang berperan untuk senantiasa mengikuti perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan usahanya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya, serta memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal korporasi. The Board of Directors ensures that the corporation has a function whose role is to always follow changes in various applicable laws and regulations related to its business and laws and regulations in general, as well as having a system to ensure corporate compliance with applicable laws and regulations corporate internal.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
	5.2 Manajemen Resiko **Risk Management**				
	5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are one unit, disclosed transparently, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as in discussions at meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.		√	
		5.2.1.1	Direksi memimpin penerapan manajemen risiko untuk dimanfaatkan oleh seluruh jajaran manajemen dalam menciptakan dan melindungi nilai bagi korporasi, dengan memberi contoh dan menjadi teladan dalam hal pengendalian dan pengelolaan risiko dalam aktivitas bisnis dan operasional guna menanamkan, memperkuat, dan mengembangkan budaya sadar risiko yang berlandaskan pada kepatuhan dan pengendalian internal yang efektif. The Board of Directors leads the implementation of risk management to be utilized by all levels of management in creating and protecting value for the corporation, by setting an example and being a role model in terms of controlling and managing risks in business and operational activities in order to instill, strengthen and develop a risk-aware culture that is based on compliance and effective internal control.	√	
		5.2.1.2	Direksi mengungkapkan: 1. Risiko-risiko utama yang dihadapi korporasi serta pengelolaannya; dan 2. Apakah terdapat eksposur material atas risiko lingkungan atau sosial dan, jika ya, bagaimana mengelola atau intensi dalam mengelola risiko tersebut. The Board of Directors stated: 1. The main risks faced by the corporation and their management; And 2. Whether there is material exposure to environmental or social risks and, if so, how to manage or intend to manage those risks.	√	
		5.2.1.3	Direksi memastikan kesesuaian sistem pengendalian internal dan kerangka kerja manajemen risiko dengan karakteristik kebutuhan dan proses bisnis korporasi sehingga proses pengendalian internal dan pengelolaan risiko terhadap seluruh jenis risiko yang dihadapi korporasi, termasuk di dalamnya komunikasi dan pelaporan tentang risiko, manajemen risiko, pemeriksanaannya, serta efektivitasnya, dapat terlaksana secara efektif selaras dengan ekspektasi para pemangku kepentingan.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
			The Board of Directors ensures the suitability of the internal control system and risk management framework with the characteristics of the corporation's needs and business processes so that the internal control and risk management processes cover all types of risks faced by the corporation, including communication and reporting about risks, risk management, audits and their effectiveness, can be implemented effectively in line with stakeholder expectations.		
		5.2.1.4	Direksi memastikan proses governansi risiko di Teknologi Informasi termasuk gangguan, keamanan cyber, pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. The Board of Directors ensures risk governance processes in Information Technology including disruption, cyber security, disaster recovery, to ensure that all major risks are identified, managed and reported to the Board of Commissioners.	√	
	5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists the implementation of the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused and independent mechanism for supervising corporate risk management.		√	
		5.2.2.1	Peran Komite Pemantau Manajemen Risiko termasuk diantaranya: 1. Memantau kinerja korporat terhadap kerangka manajemen risiko, termasuk memantau apakah korporasi beroperasi dalam selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; 2. Memantau pengendalian terhadap risiko-risiko utama, termasuk risiko utama pelaporan keuangan dan risiko kecurangan (*fraud risk*); 3. Mereviu setiap kejadian material yang melibatkan fraud atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko korporasi, serta pelajaran yang didapat untuk mencegah terulang di masa dating; 4. Menerima laporan dari auditor internal tentang hasil reviu atas kecukupan proses manajemen risiko korporasi; 5. Menerima laporan dari manajemen tentang sumber risiko baru dan yang muncul serta pengendalian risiko dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Direksi untuk menangani risiko tersebut; 6. Menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka manajemen risiko entitas atau selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; dan 7. Mengawasi program asuransi korporasi, dengan memperhatikan bisnis korporat dan risiko ya	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
			The role of the Risk Management Monitoring Committee includes: 1. Monitor corporate performance against the risk management framework, including monitoring whether the corporation operates within the risk appetite approved by the Board of Commissioners; 2. Monitor control of key risks, including major financial reporting risks and fraud risks; 3. Reviewing every material incident involving fraud or significant weaknesses in corporate risk control, as well as lessons learned to prevent recurrence in the future; 4. Receive reports from internal auditors regarding the results of reviews of the adequacy of corporate risk management processes; 5. Receive reports from management regarding new and emerging sources of risk as well as risk control and mitigation steps that have been carried out by the Board of Directors to handle these risks; 6. Prepare recommendations to the Board of Commissioners regarding changes that must be made to the entity's risk management framework or risk appetite as approved by the Board of Commissioners; And 7. Oversee corporate insurance programs, taking into account corporate business and insurable risks.		
		5.2.2.2	Jumlah anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah memadai dan mayoritas independen; di antara anggotanya memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan dan pemahaman yang memadai tentang industri tempat entitas beroperasi, untuk dapat melaksanakan mandat komite secara efektif. The number of members of the Risk Management Monitoring Committee is adequate and the majority are independent; among its members have the necessary technical knowledge and sufficient understanding of the industry in which the entity operates, to be able to carry out the committee's mandate effectively.	√	
5.3 Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan **Integration of Governance, Risk Management and Compliance**					
	5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors has built an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system, by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its goals.		√	
		5.3.1.1	Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
			The Board of Directors ensures coordination and increased capability between the main GRC systems which include governance systems, strategic management, performance management, risk management, compliance management and internal audit systems so that the corporation remains on the right track in achieving its goals.		
	5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the department in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest.		√	
	5.4 Audit Internal **Internal Audit**				
	5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function helps the corporation to achieve its goals by bringing an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control and corporate governance.		√	
		5.4.1.1	Audit internal dilakukan secara objektif dan independen dari manajemen korporasi dan dari fungsi yang diauditnya. Dengan demikian, Audit Internal secara fungsional bertanggung jawab dan melapor kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris dan dapat berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris dengan atau tanpa kehadiran Direksi. Internal audits are carried out objectively and independently from corporate management and from the function being audited. Thus, Internal Audit is functionally responsible and reports to the Board of Commissioners through the Audit Committee, has direct access to the Audit Committee and Board of Commissioners and can communicate and meet directly with the Audit Committee and Board of Commissioners with or without the presence of the Board of Directors.	√	
		5.4.1.2	Dewan Komisaris melalui komite audit memastikan fungsi audit internal memiliki wewenang, sumber daya dan akses atas informasi yang memadai untuk melaksanakan perannya secara efektif. The Board of Commissioners, through the audit committee, ensures that the internal audit function has adequate authority, resources and access to information to carry out its role effectively.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		5.4.1.3	Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal, lingkup pekerjaan, dan anggaran untuk fungsi Audit Internal. The Audit Committee recommends to the Board of Commissioners the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit, scope of work, and budget for the Internal Audit function.	√	
		5.4.1.4	Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern dan mengevaluasi kinerja Audit Internal setiap tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. Setiap tiga tahun sekali, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris menunjuk konsultan eksternal independen untuk mengkaji ulang kinerja Audit Internal. The Audit Committee reviews the effectiveness of internal audit implementation and evaluates Internal Audit performance every year and submits the results to the Board of Commissioners. Every three years, taking into account the recommendations of the Audit Committee, the Board of Commissioners appoints an independent external consultant to review the performance of the Internal Audit.	√	
		5.4.1.5	Audit internal membuat rencana audit, yang melibatkan Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Audit. Rencana audit internal disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Internal audit creates an audit plan, involving the President Director, Board of Commissioners with consideration by the Audit Committee. the internal audit plan is submitted to the Board of Directors and Board of Commissioners for approval.	√	
		5.4.1.6	Komite Audit memastikan pelaksanaan audit internal dilakukan berdasarkan standar profesional audit internal yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi kode etik profesi serta kode etik organisasi. The Audit Committee ensures that internal audits are carried out based on standards applicable to internal audit professionals and by upholding the professional code of ethics and organizational code of ethics.	√	
6	**Pengungkapan dan Transparansi** **Disclosure and Transparency**				
	6.1 Kebijakan Pengungkapan **Disclosure Policy**				
	6.1.1		Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate secrets.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
	6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' rights to obtain regularly and timely relevant material information about the corporation must be fulfilled.		√	
		6.1.2.1	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/ keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku. The corporation has and discloses a written policy in carrying out its obligations of continuous disclosure/information disclosure based on applied regulations.	√	
	6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan **Financial and Sustainability Reports**				
	6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The Corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that have not been audited or reviewed by an external auditor are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions.		√	
		6.2.1.1	Pengungkapan sistem dan prosedur paling tidak mencakup: 1. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim; 2. Peran fungsi manajemen risiko/kepatuhan/ pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim; 3. Pengungkapan dan Transparansi Disclosure of systems and procedures includes at least: *1.* Internal control over financial reporting, including interim financial reports; *2.* The role of the risk management/compliance/ management oversight function and the internal audit function in ensuring the integrity of interim financial reports; *3.* The role of the Audit Committee in reviewing interim financial reports to be published.	√	
	6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of financial report audits carried out by external auditors. These activities include recommending the appointment, reappointment and, if necessary, dismissal and remuneration of external auditors.		√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		6.2.2.1	Proses seleksi auditor eksternal yang melalui tender dilakukan secara transparan sehingga pemegang saham dapat mengamati dan memantau proses jika mereka menginginkannya. The external auditor selection process through tender is carried out transparently so that shareholders can observe and monitor the process if they wish.	√	
		6.2.2.2	Komite Audit memastikan bahwa dalam kontrak dengan auditor tidak terdapat klausula yang dapat mengganggu independensi atau kompetensi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan. The Audit Committee ensures that in the contract with the auditor there are no clauses that could interfere with the auditor's independence or competence in carrying out the financial statement audit.	√	
		6.2.2.3	Komite Audit melakukan dialog yang memadai dengan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen dan memantau interaksi antara manajemen dan auditor eksternal, termasuk mereviu management letter yang diberikan oleh auditor eksternal dan mengawasi tanggapan manajemen; The Audit Committee carries out adequate dialogue with the external auditor without the presence of management and monitors interactions between management and the external auditor, including reviewing the management letter provided by the external auditor and monitoring management's response;	√	
		6.2.2.4	Dewan Komisaris, atau Komite Audit, memastikan agar auditor eksternal segera menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan auditor eksternal selama pelaksanaan audit. The Board of Commissioners, or Audit Committee, ensures that the external auditor immediately informs all significant findings and problems discovered by the external auditor during the audit.	√	
		6.2.2.5	Komite Audit mereviu setiap jasa non audit yang diberikan oleh auditor eksternal dan afiliasinya serta biaya terkait, untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak mengganggu independensi auditor. The Audit Committee reviews every non-audit service provided by the external auditor and its affiliates and related costs, to ensure that such services do not compromise the auditor's independence.	√	
	6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately and prepared in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.		√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		6.2.3.1	Laporan keberlanjutan diberikan asuransi oleh pihak eksternal yang independen dan kompeten. Sustainability reports are provided with assurance by independent and competent external parties.	√	
	6.2.4	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan Perusahaan telah memaparkan tentang kinerja keberlanjutan Perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun, sehingga diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The Company has published a Sustainability Report which is an integral part of the Annual Report. the Company's Sustainability Report has explained the Company's sustainability performance covering economic, social, environmental and governance aspects, which is presented in comparison for 3 years, so it is hoped that it will help shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.		√	
	6.3 Diseminasi Informasi **Information Dissemination**				
	6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels should provide equal, timely and relatively inexpensive access to relevant information for users.		√	
		6.3.1.1	Korporasi secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan. Corporations regularly hold meetings with financial analysts.	√	
		6.3.1.2	Korporasi memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara efektif dan lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. Corporations utilize information technology effectively and more widely apart from websites as a medium for information disclosure.	√	
		6.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa informasi yang disebarkan dijaga dan terproteksi keamanannya. The corporation ensures that the security of the information it disseminates is maintained and protected.	√	
	6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporation ensures that an annual statement regarding the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guide is available on the website for a minimum period of five years.		√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
	6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations listed on the capital market in jurisdictions other than the home jurisdiction, the applicable corporate governance laws and regulations must be clearly disclosed. In the case of cross listing, cross listing criteria and procedures, criteria and procedures for recognizing listing requirements for the main listing must be transparent and documented.		√	
7	**Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham** **Protection of Shareholder Rights**				
	7.1 Hak Pemegang Saham **Shareholder Rights**				
	7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The corporation has a communications policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.		√	
		7.1.1.1	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, diperbolehkan untuk melakukan konsultasi satu dengan lainnya tentang isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana yang ditetapkan dalam Prinsip ini, namun hal ini tidak boleh disalahgunakan. Shareholders, including institutional shareholders, are permitted to consult with each other on issues regarding basic shareholder rights as stipulated in these Principles, but this must not be abused.	√	
		7.1.1.2	Korporasi mendorong adanya dialog konstruktif antara pemegang saham (terutama investor institusional) dengan manajemen. Korporasi menanggapi permintaan dari pemegang saham untuk terlibat dalam dialog untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai korporasi dalam jangka menengah hingga panjang. Corporations encourage constructive dialogue between shareholders (especially institutional investors) and management. the corporation responded to requests from shareholders to engage in dialogue to support sustainable growth and increase corporate value in the medium to long term.	√	
		7.1.1.3	Korporasi menyediakan wadah atau platform dialog konstruktif antara seluruh pemegang saham dengan manajemen. Corporations provide a forum or platform for constructive dialogue between all shareholders and management.	√	
		7.1.1.4	Korporasi segera mengungkapkan kepada publik semua fakta baru yang material yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya yang serupa. The Corporation promptly discloses to the public all material new facts that are available to financial analysts and other similar parties.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		7.1.1.5	Korporasi mengungkapkan kebijakan komunikasi korporasi dengan pemegang saham atau investor dalam situs web dan laporan. Corporations disclose corporate communication policies with shareholders or investors in websites and reports.	√	
	7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The corporation, which is the parent entity, ensures that its corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the corporation's investment is significant.		√	
		7.1.2.1	Kerangka kerja dan kebijakan governansi korporat di entitas anak termasuk kebijakan tertulis antara lain mengenai: 1. Umumnya, untuk entitas anak dengan ukuran relatif besar, Dewan Komisaris perlu dilibatkan dalam penunjukkan pengurus di entitas anak. Untuk entitas anak yang lebih kecil, Direksi yang berwenang melaksanakannya; 2. Efektivitas sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3. Pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas informasi material entitas anak, termasuk informasi keuangan, transaksi dengan pihak berelasi dan informasi material lainnya. 4. Jika korporasi memiliki/membentuk entitas berbadan hukum selain perseroan terbatas, korporasi memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas tersebut disesuaikan dengan konteks jenis badan hukumnya. Corporate governance framework and policies in subsidiaries include written policies regarding, among other things: 1. Authority to appoint commissioners and directors. Generally, for subsidiaries with relatively large sizes, the Board of Commissioners needs to be involved in appointing management in the subsidiary. For smaller subsidiaries, the Board of Directors has the authority to implement it; 2. Effectiveness of the internal control system and compliance with applicable laws and regulations; And 3. Timely and accurate disclosure of material information on subsidiaries, including financial information, transactions with related parties and other material information. 4. If a corporation owns/forms a legal entity other than a limited liability Company, the corporation ensures that its corporate governance policies apply to that entity according to the context of the type of legal entity.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		7.1.2.2	Untuk investasi di entitas anak yang signifikan namun di bawah mayoritas (seperti kepemilikan antara 20 persen sampai 50 persen saham), Direksi memastikan bahwa terdapat perjanjian pemegang saham atau perjanjian lain yang memungkinkan korporasi memantau kinerja korporasi dan berpartisipasi dalam kepengurusan, termasuk untuk persetujuan transaksi dan keputusan yang signifikan. Hal ini diperlukan antara lain untuk memastikan bahwa korporasi memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu di entitas anak. For investments in subsidiaries that are significant but below the majority (such as ownership of between 20 percent to 50 percent of shares), the Board of Directors ensures that there is a shareholder agreement or other agreement that allows the corporation to monitor corporate performance and participate in management, including for approval of transactions and decisions. which is significant. This is necessary, among other things, to ensure that the corporation has adequate, accurate and timely information on subsidiaries.	√	
	7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. Corporations have rules and procedures governing acquisitions, takeovers and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure transactions occur transparently and under fair conditions and protect the rights of all shareholders according to their class.		√	
		7.1.3.1	Korporasi secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur tersebut sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi. Corporations clearly disclose these rules and procedures so that investors understand their rights and the right to obtain compensation.	√	
		7.1.3.2	Taktik yang mencegah pengambilalihan (anti-take-over devices) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas. Tactics that prevent takeover (anti-take-over devices) must not be used to protect management and the Board of Commissioners from accountability.	√	
	7.2 Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham **Fair Treatment of Shareholders**				
	7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: 1. semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara; 2. pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.		√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		Corporations have rules and procedures that ensure: 1. all shareholders of the same series within a class of shares must be treated equally; 2. disclosure of these rules and procedures as well as disclosure of capital structures and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control that is disproportionate to their share ownership.			
		7.2.1.1	Untuk memastikan transparansi hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba, korporasi mengungkapkan kebijakan dividen yang terukur, misalnya target rasio pembayaran dividen/dividen per saham. To ensure transparency of shareholders' rights to obtain a share of profits, corporations disclose measurable dividend policies, for example the target dividend payment ratio/ dividends per share.	√	
		7.2.1.2	Para investor memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri maupun kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam nilai ekonomi saham atau hak suara mendapat persetujuan dari kelas saham yang terdampak secara negatif. Investors obtain information about the rights attached to all series and classes of shares before they buy them. Any change in the economic value of shares or voting rights requires the approval of the class of shares negatively affected.	√	
		7.2.1.3	Agar pemegang saham dapat mengetahui pemilik manfaat akhir (beneficial owner) korporasi dengan kepemilikan signifikan, korporasi mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham melalui pemegang saham utama dan pengendali serta pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham paling sedikit 5% (lima persen). So that shareholders can know the ultimate beneficial owner (beneficial owner) of a corporation with significant ownership, the corporation discloses the ultimate beneficial owner in share ownership through the main and controlling shareholders and the ultimate beneficial owner in share ownership of at least 5% (five percent).	√	
		7.2.1.4	Korporasi mengungkapkan: 1. Perjanjian antar pemegang saham; 2. *Voting cap*; 3. *Multiple voting rights*; 4. Perikatan lain yang memungkinkan pemegang saham tertentu memiliki hak suara di atas kepemilikannya di korporasi. The corporation revealed: 1. Agreement between shareholders; 2. Voting stamp; 3. Multiple voting rights; 4. Other agreements that allow certain shareholders to have voting rights over their ownership in the corporation.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		7.2.1.5	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. Corporations have rules and procedures that ensure related party transactions are approved and implemented in a manner that ensures that conflicts of interest are managed appropriately, and protects the interests of the corporation and shareholders.	√	
	7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. Corporations have rules and procedures that ensure related party transactions are approved and implemented in a manner that ensures that conflicts of interest are managed appropriately, and protects the interests of the corporation and shareholders.		√	
		7.2.2.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur operasional baku bahwa transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi adalah adil dan wajar (*arm's length transaction*). Corporations have standard operational policies and procedures that ensure that transactions with related parties are carried out in such a way as to ensure that transactions are fair and reasonable (arm's length transactions).	√	
		7.2.2.2	Transaksi pihak berelasi yang material, termasuk perjanjian jasa konsultasi dan jasa atau pekerjaan lainnya antara direktur/ komisaris dan afiliasinya dengan korporasi harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan aturan perundangan berlaku. Selain yang sudah diatur persetujuannya dalam aturan perundangan, transaksi pihak berelasi yang material memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemberian persetujuan. Material related party transactions, including consulting service agreements and other services or work between Directors/Commissioners and their affiliates with the corporation must obtain approval in accordance with applicable laws and regulations. Apart from those that have been regulated for approval in statutory regulations, material related party transactions obtain approval from the Board of Commissioners. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in granting approval.	√	
		7.2.2.3	Korporasi memiliki kebijakan bahwa transaksi yang sudah pasti merugikan pemegang saham publik/minoritas dilarang. Contoh transaksi tersebut:	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
			1. Bantuan/subsidi keuangan kepada Direksi atau Komisaris pada tingkat bunga di bawah kewajaran; kalaupun ada pemberian pinjaman harus dilakukan pada tingkat bunga dan syarat wajar dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris; 2. Bantuan/subsidi keuangan kepada entitas selain entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh korporasi. The corporation has a policy that transactions that are certain to harm public/minority shareholders are prohibited. Examples of such transactions: 1. Financial assistance/subsidies to Directors or Commissioners at interest rates below reasonable; even if there is a loan, it must be made at a reasonable interest rate and terms and obtain approval from the Board of Commissioners; 2. Financial assistance/subsidies to entities other than entities wholly owned by the corporation.	√	
		7.2.2.4	Dewan Komisaris mengungkapkan kebijakan proses untuk menyetujui, meninjau dan memantau transaksi pihak berelasi dan setiap konflik kepentingan yang melekat. The Board of Commissioners discloses the process policy for approving, reviewing and monitoring related party transactions and any inherent conflicts of interest.	√	
		7.2.2.5	Kesimpulan kajian Komite Audit atas transaksi pihak berelasi/ benturan kepentingan yang signifikan diungkapkan dalam Laporan Tahunan korporasi. The conclusions of the Audit Committee's review of related party transactions/significant conflicts of interest are disclosed in the corporation's Annual Report.	√	
	7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/ belum tersedia di pasar. Corporations have and disclose policies to prevent insider trading. Corporations have clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by directors, commissioners and insiders to ensure that anyone cannot profit directly or indirectly from information that is not/not yet available on the market.		√	
	7.3 Rapat Umum Pemegang Saham **General Meeting of Shareholders**				
	7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi		√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		The corporation calls for a GMS with the GMS agenda and materials as complete and as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed via electronic means such as through the corporate website			
		7.3.1.1	Dalam materi atas agenda RUPS, korporasi menyampaikan informasi relevan dan lengkap yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, termasuk penjelasan dan justifikasi (*rationale*) atas keputusan yang diusulkan untuk disetujui dalam RUPS. In the material on the GMS agenda, the corporation submits relevant and complete information needed for decision making, including explanations and justification (rationale) for the decisions proposed for approval at the GMS.	√	
	7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS.		√	
		7.3.2.1	Korporasi menyediakan infrastruktur yang memungkinkan kehadiran seluruh pemegang saham domestik maupun asing, termasuk investor institusi dalam RUPS. The corporation provides infrastructure that allows the presence of all domestic and foreign shareholders, including institutional investors, at the GMS.	√	
		7.3.2.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners were present at the Annual GMS.	√	
		7.3.2.3	Ketua Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta komite lainnya siap memberikan tanggapan yang berarti atas pertanyaan yang ditujukan kepada mereka dalam RUPS. Chairs of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Monitoring Committee, and other committees are ready to provide meaningful responses to questions addressed to them at the GMS.	√	
		7.3.2.4	Pemegang saham memiliki kesempatan, dalam batas kewajaran, untuk: 1. Mengajukan pertanyaan dalam RUPS, termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan hasil audit eksternal tahunan; 2. Memasukkan suatu acara ke dalam agenda RUPS; dan 3. Mengajukan usulan resolusi. Shareholders have the opportunity, within reasonable limits, to: *1.* Ask questions at the GMS, including questions relating to the results of the annual external audit *2.* Include an event in the GMS agenda; And *3.* Submit a proposed resolution.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		7.3.2.5	Korporasi memiliki cara atau prosedur teknis pemungutan suara (voting) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham, yaitu: 1. Lokasi RUPS yang mudah diakses sebagian besar pemegang saham; 2. Pemungutan secara tertutup (poll-voting) dan bukan dengan mengacungkan tangan (*show of hands*); 3. Memastikan tidak ada syarat dan prosedur RUPS yang menghambat pemegang saham untuk turut serta mengambil keputusan. Corporations have technical voting methods or procedures that prioritize independence and the interests of shareholders, such as: 1. GMS location that is easily accessible to most shareholders; 2. Closed voting (poll-voting) and not by show of hands; 3. Ensure that there are no GMS requirements and procedures that prevent shareholders from participating in making decisions.	√	
		7.3.2.6	Korporasi mengupayakan prosedur pemungutan suara secara elektronik serta mengambil langkah untuk membangun infrastruktur yang memungkinkan pemungutan suara secara elektronik atau menggunakan infrastruktur yang telah tersedia di ekosistem dalam pemungutan suara. Corporations are working on electronic voting procedures and taking steps to build infrastructure that enables electronic voting or use existing infrastructure in the voting ecosystem.	√	
		7.3.2.7	Setiap pemungutan suara dalam RUPS hanya untuk satu keputusan, tidak ada penggabungan beberapa keputusan ke dalam resolusi yang sama (bundling). Each vote at the GMS is only for one decision, there is no combining of several decisions into the same resolution (bundling).	√	
		7.3.2.8	Korporasi menunjuk pihak independen (pengawas/inspektur) untuk menghitung dan/ atau mengesahkan suara dalam RUPS dan mengungkapkannya dalam risalah RUPS. The corporation appoints an independent party (supervisor/ inspector) to count and/or ratify the votes at the GMS and disclose this in the minutes of the GMS.	√	
		7.3.2.9	Jika resolusi yang disetujui oleh pemegang saham pengendali bertentangan dengan sebagian besar suara pemegang saham non pengendali, maka pasca RUPS, korporasi mengungkapkan tindakan apa yang diambil untuk memahami dan menanggapi hal yang menjadi perhatian pemegang saham non pengendali yang menyebabkannya memberikan suara yang berbeda dari pemegang saham pengendali.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
			If the resolution approved by the controlling shareholder conflicts with the majority of non-controlling shareholders' votes, then post-GMS, the corporation discloses what actions it took to understand and respond to the non-controlling shareholder's concerns that caused it to vote differently from the controlling shareholder.		
	7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.		√	
		7.3.3.1	Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kandidat Direktur dan Komisaris serta menyampaikan semua informasi relevan yang material mengenai kandidat kepada pemegang saham dalam proses pemilihan anggota dewan. Informasi yang diungkapkan termasuk informasi mengenai jabatan Direktur atau Komisaris di korporasi lain, dan apakah mereka dinilai independen dari sudut pandang korporasi. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, carries out an in-depth examination of Director and Commissioner candidates and conveys all material relevant information regarding the candidates to shareholders in the process of selecting board members. the information disclosed includes information regarding Director or Commissioner positions in other corporations, and whether they are considered independent from the corporation's perspective.	√	
		7.3.3.2	Direktur dan Komisaris dicalonkan untuk pemilihan setidaknya sekali setiap tiga tahun atau lima tahun bagi korporasi yang peraturannya mengharuskan lima tahun. Akan lebih baik jika pencalonan dilakukan setiap setahun sekali. Directors and Commissioners are nominated for election at least once every three years or five years for corporations whose regulations require five years. It would be better if nominations were carried out once a year.	√	
		7.3.3.3	Pemegang saham melakukan pemungutan suara terpisah untuk tiap-tiap kandidat Direktur dan Komisaris. Shareholders vote separately for each candidate for Director and Commissioner.	√	
	7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures transparency and accountability of external auditors at the GMS.		√	
		7.3.4.1	Dalam panggilan RUPS, korporasi mengidentifikasi dan menginformasikan calon auditor eksternal yang akan ditunjuk atau ditunjuk kembali dalam RUPS. In the invitation to the GMS, the corporation identifies and informs prospective external auditors who will be appointed or re-appointed at the GMS.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		7.3.4.2	Korporasi memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri RUPS dan berkewajiban menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan. The corporation ensures that external auditors attend the GMS and are obliged to answer questions from shareholders related to the audit of financial statements.	√	
	7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. Submission of voting results and a complete summary of the minutes of the GMS will be announced to the public on the following working day.		√	
		7.3.5.1	Risalah RUPS diinformasikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS. The minutes of the GMS are communicated to shareholders no later than 30 working days after the GMS.	√	
		7.3.5.2	Risalah RUPS memuat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab. The minutes of the GMS contain questions asked by shareholders and answers given by the chairman of the meeting or the party who answered.	√	
		7.3.5.3	Penyelenggaraan RUPS, beserta semua materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain laporan tahunan dan hasil pemungutan suara, termasuk agenda rapat yang bersangkutan dimuat di laman atau media digital komunikasi resmi korporasi dan tersedia selama paling tidak 10 (sepuluh) tahun. The holding of the GMS, along with all meeting materials, reports and related documents which include, among other things, the annual report and voting results, including the relevant meeting agenda are published on the Company's official website or digital communication media and are available for at least 10 (ten) years.	√	
8	**Pemangku Kepentingan Lainnya** **Other Stakeholders**				
	8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (stakeholder engagement) **Key Stakeholder Engagement**				
	8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The Corporation, through the Corporate Secretary, carries out regular, transparent and effective communication with key stakeholders and involves them to understand their hopes and complaints as well as the impact of the corporation on them.		√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		8.1.1.1	Korporasi mengungkapkan proses dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan kunci yang akan dilibatkan. The corporation revealed the process for identifying and selecting key stakeholders to be involved.	√	
		8.1.1.2	Korporasi mengungkapkan pendekatan dan kegiatan dalam menangani keterlibatan pemangku kepentingan kunci termasuk frekuensinya berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan kunci. The corporation discloses its approach and activities in handling key stakeholder engagement including its frequency based on type and key stakeholder group.	√	
		8.1.1.3	Korporasi menyediakan saluran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan kunci (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll) untuk menyampaikan pendapat dan masukan, menyuarakan keluhan dan/ atau pengaduan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka. Corporations provide channels through which key stakeholders (e.g. customers, suppliers, the general public, etc.) can express opinions and input, voice their complaints and/or complain about possible violations of their rights.	√	
		8.1.1.4	Korporasi mengungkapkan pandangan, masukan dan keluhan signifikan yang disampaikan para pemangku kepentingan yang diperoleh dari keterlibatan pemangku kepentingan kunci, termasuk: • Respon korporasi; dan • Kelompok pemangku kepentingan kunci yang menyampaikan pandangan dan masukan. Corporations express significant views, input and complaints delivered by key stakeholders gained from engagement key stakeholders, including: · Corporate response; · Key stakeholder groups who provide views and input.	√	
	8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis **Integration of Sustainability in Business Models**				
	8.2.1		Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including determining corporate sustainability strategies, priorities and targets. the Board of Directors and Board of Commissioners include sustainability considerations when carrying out their roles, including, among others, in the development and implementation of corporate strategy, business plans, main action plans and risk management.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		8.2.1.1	Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures that corporate sustainability strategies, priorities and targets as well as performance against these targets are communicated to stakeholders.	√	
		8.2.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi korporasi dan bisnisnya. The Board of Directors and Board of Commissioners always follow and understand sustainability issues that are relevant to the corporation and its business.	√	
		8.2.1.3	Evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris mencakup kinerja mereka dalam mengawasi dan menangani risiko serta peluang yang signifikan tentang keberlanjutan korporasi. Evaluation of the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners includes their performance in monitoring and handling significant risks and opportunities regarding corporate sustainability.	√	
		8.2.1.4	Direksi menunjuk seseorang dalam manajemen yang berperan khusus dalam mengelola secara strategi berkelanjutan, termasuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam kegiatan korporasi. The Board of Directors appoints someone in management who has a special role in strategically managing sustainability, including integrating sustainability considerations into corporate activities.	√	
	8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan **Protection of Stakeholders**				
	8.3.1		Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the application of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporation and ensure that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with stakeholder rights.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		8.3.1.1	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan tentang tanggung jawab korporasi kepada pelanggan termasuk antara lain mempertimbangkan keamanan informasi pelanggan, etika dan perilaku penjualan, layanan purna jual sesuai dengan umur produk/ masa layanan, serta menindaklanjuti tingkat kepuasan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Iklan dan hubungan masyarakat harus mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab dan dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk menghindari penyesatan pelanggan, atau menyebabkan kesalahpahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh korporasi. The corporation implements and discloses policies regarding corporate responsibility to customers, including considering customer information security, sales ethics and behavior, after-sales service according to product age/service period, as well as following up on customer satisfaction levels to improve product and service quality. Advertising and public relations should promote responsible consumption and be conducted responsibly, including avoiding misleading customers, or causing misunderstandings about the products and services offered by the corporation.	√	
		8.3.1.2	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan yang meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok. Korporasi juga memiliki kebijakan yang mendorong dan memantau pemasok untuk menghormati hak asasi manusia, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memperlakukan karyawan, staf, dan pekerja mereka secara adil, serta memastikan bahwa pemasok telah menerapkan kebijakan dan prosedur bisnis yang berkelanjutan dan berbasis nilai berkelanjutan. The corporation implements and discloses policies that include criteria for selecting suppliers, transparent procurement mechanisms, efforts to increase supplier capabilities, and fulfillment of rights related to suppliers. the corporation also has policies that encourage and monitor suppliers to respect human rights, carry out social and environmental responsibilities, treat their employees, staff and workers fairly, and ensure that suppliers have implemented sustainable and value-based business policies and procedures.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		8.3.1.3	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman bisnis korporasi untuk mengembangkan dan menghasilkan kegiatan tanggung jawab sosial yang secara konkrit memberikan nilai tambah bagi masyarakat termasuk mendorong kemandirian masyarakat. Corporations carry out and express social responsibility by applying corporate business knowledge and experience to develop and produce socially responsible activities that concretely provide added value to society, including encouraging community independence.	√	
		8.3.1.4	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dengan mencegah, mengurangi, dan mengelola hal-hal berdampak negatif terhadap lingkungan dari semua aspek operasi korporasi, termasuk dalam penggunaan: 1. Bahan baku; 2. Energi; 3. Penggunaan air; 4. Pemanfaatan sumber daya terbarukan; 5. Pemanfaatan serta rehabilitasi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah dan penurunan dampak gas rumah kaca serta emisi karbon. Corporations carry out and express environmental responsibility by preventing, reducing and managing things that have a negative impact on environment from all aspects of corporate operations, including the use of: 1. Raw material; 2. Energy; 3. Water usage; 4. Utilization of renewable resources; 5. Utilization and rehabilitation of biodiversity, waste management and reducing the impact of greenhouse gasses and carbon emissions.	√	
		8.3.1.5	Korporasi melaksanakan dan mengungkapkan kebijakan persaingan yang sehat dengan mengedepankan perilaku bisnis yang etis dan tidak melakukan praktik anti persaingan untuk mendapatkan atau melindungi posisi pasar. The corporation implements and discloses fair competition policies by prioritizing ethical business behavior and not engaging in anti-competitive practices to gain or protect market position.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guide	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Description
		8.3.1.6	Direksi memiliki kebijakan guna melindungi hak para kreditur. 1. Dewan Komisaris mengawasi dan Direksi memonitor likuiditas dan solvabilitas keuangan korporasi. 2. Direksi memastikan bahwa risiko terhadap posisi keuangan atau kesulitan keuangan segera teridentifikasi, dikelola, dimitigasi serta dilaporkan. Dewan Komisaris memantau penanganan Direksi atas risiko atau kesulitan keuangan dan menerima laporan rutin. The Board of Directors has a policy to protect the rights of creditors. 1. The Board of Commissioners supervises and the Board of Directors monitors the corporation's financial liquidity and solvency. 2. The Board of Directors ensures that risks to the financial position or financial difficulties are immediately identified, managed, mitigated and reported. the Board of Commissioners monitors the Directors' handling of financial risks or difficulties and receives regular reports.	√	
	8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritizes sustainability.		√	
		8.3.2.1	Korporasi memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan. The corporation has a policy of providing long-term incentives to employees, which encourages sustainable value creation.	√	
		8.3.2.2	Remunerasi berbasis kinerja untuk karyawan harus memperhatikan unsur risiko, termasuk mengukur imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko (*risk-adjusted return*), untuk memastikan bahwa tidak ada insentif yang diberikan untuk pengambilan risiko yang tidak diinginkan. Performance-based remuneration for employees must take into account the element of risk, including measuring risk- adjusted returns, to ensure that no incentives are provided for undesirable risk taking.	√	
		8.3.2.3	Direksi mengelola dengan baik benturan kepentingan yang mungkin timbul antara karyawan sebagai penerima manfaat dana pensiun dengan korporasi sebagai pengelola dana pensiun. The Board of Directors properly manages conflicts of interest that may arise between employees as recipients of pension fund benefits and the corporation as pension fund manager.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guide	**Uraian** Description	***Apply or Explain***	**Keterangan Penerapan** Implementation Description
		8.3.2.4	Direksi memastikan korporasi memiliki program pengembangan dan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk memastikan bahwa korporasi memiliki karyawan dalam jumlah yang memadai dan yang berpengetahuan, terampil, dan berpengalaman. The Board of Directors ensures that the corporation has an effective human resource development and management program to ensure that the corporation has an adequate number of employees who are knowledgeable, skilled and experienced.	√	
		8.3.2.5	Pada saat mengisi posisi manajerial dalam korporasi, Direksi mempertimbangkan unsur keberagaman, nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender. Kebijakan keberagaman tersebut disertai dengan tujuan yang terukur. When filling managerial positions in a corporation, the Board of Directors considers elements of diversity, non-discrimination and provides equal opportunities to all candidates without distinction of ethnicity, religion, race, class and gender. the diversity policy is accompanied by measurable goals.	√	

Kriteria SEOJK No. 16 Tahun 2021

SEOJK Criteria Number 16 Year 2021

Kriteria Penyampaian Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Criteria for Submission of Annual Reports Based on Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
I	**Bentuk Laporan Tahunan**	**The Form of Annual Report**	
1	Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik.	The Annual Report shall be published in both hard and soft copy.	√
2	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	The hard copy report shall be printed on light colored, good quality, A4-sized paper, bound and able to be reproduced in good quality.	√
3	Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.	√
4	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF).	The soft copy report shall be presented in the form of electronic document in a pdf file format.	√
II	**Isi Laporan Tahunan**	**The Content of Annual Report**	
1	Laporan Tahunan paling sedikit memuat: a. Ikhtisar data keuangan penting; b. Informasi saham (jika ada); c. Laporan Direksi; d. Laporan Dewan Komisaris; e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik; f. Analisis dan pembahasan manajemen; g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.	The Annual Report shall at least include: *a.* Financial highlights; *b.* Share highlights; *c.* The Board of Directors report; *d.* The Board of Commissioners report; *e.* Company profile; *f.* Management analysis and discussion; *g.* Corporate governance; *h.* Social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company; *i.* Audited annual finance report *j.* A statement letter from the BOD and BOC on responsibility of the Annual Report.	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
III	Uraian Isi Laporan Tahunan	The Detail of The Content of Annual Report	
a.	Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten	Financial Highlights Financial highlights shall be presented in comparison between three fiscal years or since the Issuer or Public	24 - 26

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
	atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: 1. Pendapatan/penjualan; 2. Laba bruto; 3. Laba (rugi); 4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali; 5. Total laba (rugi) komprehensif; 6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; 7. Laba (rugi) per saham; 8. Jumlah aset; 9. Jumlah liabilitas; 10. Jumlah ekuitas; 11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; 12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; 13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan; 14. Rasio lancar; 15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas; 16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan 17. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.	Company starting its business if less than three years, at least include: *1.* Net sales; *2.* Gross profit; *3.* Profit (loss); *4.* Total profit (loss) attributable to owners of parent entity and non-controlling interest; *5.* Total comprehensive profit (loss); *6.* Total comprehensive profit (loss) attributable to owners of parent entity and non-controlling interest; *7.* Earning per share; *8.* Total assets; *9.* Total liabilities; *10.* Total equity; *11.* Return on assets; *12.* Return on equity; *13.* Return on net sales; *14.* Current ratio; *15.* Liabilities to equity ratio; *16.* Liabilities to assets ratio, and *17.* Other relevant information and financial ratio with the Issuer or Public Company and the type of industry.	24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26
b.	Informasi Saham	Share Highlights	27 - 31
	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: 1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a. Jumlah saham yang beredar; b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan d. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	Share highlights shall at least include: *1.* The issued shares shall be reported every quarter in a form of a comparison of the last two fiscal years that shall include: a. number of issued shares; b. market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed; c. highest, lowest, and closing price based on the price on the stock exchange where the share are listed; and d. trading volume based on the stock exchange where the share are listed.	27 29
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;	Information point b), c) and d) is only disclosed if the shares are listed on the stock exchange;	
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: a. tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	in regards to corporate action that cause changes in shares, such as stock split, reverse stock, dividends, bonus shares, changes in nominal value of shares, issuance of conversion bonds, as well as capital additions and subtraction, share highlights as stated in poin 1) shall be added some explanation at least about: a. corporate action dates;	29 - 30

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
	b. rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; c. jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; d. jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan e. harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.	b. ration of stock split, reverse stock, dividends, bonus share, total convention bonds issued, and changes in nominal value of shares; c. total number of issued shares before and after the corporate action; d. total convention bonds issued (if any); and e. share price before and after the corporate action.	
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara per-dagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan	In the event of a share suspension or delisting during fiscal year, provide the explanation for the share suspension and or delisting; and	31
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/ atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.	In the event of a shares suspension and or the shares delisting as stated in point 3 are still going on until the end of the fiscal year, provide explanation related how to solve the shares suspension and or delisting.	31
c.	Laporan Direksi	Board of Directors' Report	54 - 65
	1. Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategi Emiten atau Perusahaan Publik; c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	The Board of Directors report shall include: Performance of the Company, at least including: a. Strategies and policies of the Company; b. Role of the Board of Directors in formulating Company's strategies and policies; c. Process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of Company's strategies; d. Comparison between Company's achievement and target. e. Challenges/obstacles faced by the Company;	 59 - 60 61 61 61 - 62 59
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan	Brief description about Company's business prospect; and	62 - 63
	3. Penerapan tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	Implementation of the business prospects of the Issuer or Public Company.	62 - 63
d.	Laporan Dewan Komisaris	Board of Commissioners' Report	40 - 53
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: 1. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk	The Board of Commissioners Report shall include: 1. The evaluation of the Board of Directors performance in managing	44 - 45

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
	pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; 2. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan 3. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	the Company, as well as the Board of Commissioners supervision during the formulation and implementation of the Company's strategies by the Board of Directors. 2. The view on the Company's business prospect prepared by the Board of Directors; and 3. The view on the implementation of the Company's corporate governance.	48 - 49 49 - 50
e.	Profil Emiten atau Perusahaan Publik	The Company Profile	
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: 1. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; 2. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: a. alamat; b. nomor telepon; c. alamat surat elektronik; dan d. alamat situs web;	The Company Profile shall include: 1. Name of the Company including if there were change of the Company's name, reason of the change and the effective date of the name change in fiscal year; 2. The access to the Company, including branch or representative office that allow public to get information about the Company, such as: a. Address; b. Phone number; c. Email; and d. Website.	70, 75 71
	3. Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	3. Brief Company's history;	72 - 75
	4. Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya Perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai Perusahaan;	4. The Company's Vision, Mission and Corporate Culture or values;	79 - 83
	5. Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/ atau jasa yang dihasilkan;	5. The Company's business activities based on the latest Company's Article of Association, including products and services offered.	84 - 91
	6. Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional Perusahaan;	6. The Company's operational area; where the operational activities happen or area coverage of the Company's operations;	92 - 93
	7. Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan;	7. The Company's organization chart, at least to one level below the Board of Directors including committee under the Board of Directors (if any) and committee under the Board of Commissioners along with names and positions;	94 - 95
	8. Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;	8. List of Company's membership on national or international association that related with the implementation of sustainable finance.	138

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
	9. Profil Direksi, paling sedikit memuat: a. Nama dan jabatan yang sesuai dengantugas dan tanggung jawab; b. Foto terbaru; c. Usia; d. Kewarganegaraan; e. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: i. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi ada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; ii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan iii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	9. The Board of Directors profile, shall include: a. Name and position in accordance with the duties and responsibilities; b. Latest self-picture; c. Age; d. Nationality; e. Educational background and certification; f. Work experience with information such as: i. The legal basis of appointment of the member of the Company's Board of Directors; ii. Concurrent position, as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, or member of committee and other position inside or outside the Company. Please disclosed if the member of the Board of Directors doesn't have concurrent position. iii. Working experience with the time period both in and outside the Company.	102 - 108
	g. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan	g. Affiliated relationship with other member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, main shareholders, and controlling either directly or indirectly to the individual owner, the information shall be included the name of the affiliated parties. The Company have also to disclose the information if the member of the Board of Directors doesn't have affiliated relationship.	
	h. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	h. The change in the composition of the Board of Directors and the reason. If there were no change in the composition of the Board of Directors, the Company have also to disclose the information.	96
	10. Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a. Nama dan jabatan; b. Foto terbaru; c. Usia; d. Kewarganegaraan; e. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: i. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; ii. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; iii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/ atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	10. The Board of Commissioners profile, shall include: a. Name and position; b. Latest self-picture; c. Age d. Nationality; e. Educational background and certification; f. Work experience with information such as: i. The legal basis of the appointment of the member of the Board of Commissioners; ii. The first legal basis for the Independent Commissioner in the Company; iii. Concurrent position, as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, or member of committee and other position both in or outside the Company. Please disclosed if the member of the Board of Commissioners doesn't have concurrent position.	98 - 101

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
	iv. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	iv. Work experience with the time period both in or outsite the Company;	
	g. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;	g. Affiliated relationship with other member of the Board of Commissioners, main shareholders, controlling parties both directly or indirectly to the individual owner, including the name of the affiliated parties. Please disclosed if the member of the Board of Commissioners doesn't have any affiliated relationship;	
	h. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan	h. The statement of independence of the Independent Commissioner if already held the position for more than two periods.	
	i. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	i. The change in the composition of the Board of Commissioners with the reason. Please disclosed if there were no change in composition of the Board of Commissioners during the fiscal year.	96
	11. Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	11. If there was change in the composition of the Board of Directors or the Board of Commissioners at happened after the fiscal year and occurred before the Annual Report submission deadline, the composition presented in the Annual Report should be the latest and the previous one.	-
	12. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	12. Total employees, based on gender, position, age, educational level, and employment status (permanent/temporary) in the fiscal year; the information can be presented in tabular form.	140 - 146
	13. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: a. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/ atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan c. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.	13. The name of shareholders and the ownership at the beginning and the end of the fiscal year that include: a. Shareholders with 5% or more shares of the Company; b. Member of the Board of Directors and Board of Commissioners who own the Company shares. Please disclose the member of the Board of Directors or Board of Commissioners doesn't have the Company shares; and c. Public shareholders, group of shareholders who own less than 5% of the Company shares. The information can be presented in tabular form.	120 - 122 124 - 125 122 - 124

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
	14. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/ atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	14. The percentage of indirect ownership of the Company share by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; Please disclose if the member of the Board of Directors or Board of Commissioners doesn't have indirect ownership of the Company shares.	- -
	15. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: a. Kepemilikan institusi lokal; b. Kepemilikan institusi asing; c. Kepemilikan individu lokal; dan d. Kepemilikan individu asing;	15. The number of shareholders and the percentage of ownership at the end of the fiscal year based on the classifications of: a. The ownership of local institution; b. The ownership of foreign institution; c. The ownership of local individual; and d. The ownership of foreign individual	117 - 118
	16. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	16. The information of major shareholders and main controlling shareholders of the Company, either directly or indirectly, up to the individual shareholders shall be presented in a chart or table.	116
	17. Nama entitas anak, Perusahaan asosiasi, Perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, Perusahaan asosiasi, Perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	17. The name of subsidiaries, associated companies, joint venture Company in which the Public Company has a controlled joint entities (if any), as well as percentage of ownership, line of business, total asset, and the operating status; for the subsidiaries, address information is required.	130 - 137
	18. Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	18. The chronological listing of shares, number of shares, nominal value, and offering price from the initial listing until the end of the fiscal year as well as the name of Stock Exchange where the Company is listed, including stock split, reverse stock, dividend, bonus shares, and changes in nominal value of shares, implementation of conversion securities, addition and subtraction of capital (if any);	126 - 128
	19. Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/ imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	19. The information about other listing of securities as mentioned in point 18), that haven't due in the fiscal year at least mention about the name of securities, year of issuance, interest rate, date of maturity, offering value, and rating of securities (if any);	128

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
	20. Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/ asosiasi/aliansinya meliputi: a. Nama dan alamat; b. Periode penugasan; c. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; d. Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan e. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/ asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	20. The information about the use of Public Accountant services and Public Accounting Firm with its network/association/alliance including: a. Name and address; b. Assignment period; c. Information about audit and non-audit services provided; d. Service fee for each audit and non-audit assignment during the fiscal year; and e. In terms of the Public Accountant and Public Accounting Firm didn't provide non-audit services, please disclose the information. The disclosure of information about Public Accountant and Public Accounting Firm services with its network/ association/alliance, shall be presented in tabular form.	139
	21. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	21. Name and address of the other capital market supporting institutions and professional.	139 - 140
f.	Analisis dan Pembahasan Manajemen	Management Analysis and Discussion	202 - 276
	Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	Management analysis and discussion shall include the analysis and discussion about financial report and other important information with an emphasis on material changes during the fiscal year, that include:	
	1. Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; b. Pendapatan/penjualan; dan c. Profitabilitas;	1. Operation review per business segment according to the type of industry of the Company, include: a. Production which include process, capacity and its development; b. Revenue/sales; and c. Profitability	217 - 218
	2. Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; c. Ekuitas; d. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan e. Arus kas;	2. Comprehensive financial performance that include a comparison of financial performance for the latest two fiscal years, explanation about the cause and impact of the changes, at least include: a. Current assets, non-current assets, and total assets; b. Current liability, non-current liability, and total liability; c. Equity; d. Revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and e. Cash flows;	221 - 238
	3. Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	3. The ability to pay depts or obligations with relevant ratio;	239 - 241
	4. Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	4. Collectibility level of Company's receivables with relevant ratio;	241 - 242

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
	5. Struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	5. Capital structure and management policies of the capital structure including the basis of appointment of the related policies;	242 - 244
	6. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: a. Tujuan dari ikatan tersebut; b. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; c. Mata uang yang menjadi denominasi; dan d. Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	6. Discussion about the commitment of the capital investments goods, includes: a. The purpose of the commitment; b. The source of fund to fulfill the commitment; c. The dominated currency; and d. The Company's plant to protect itself from the related foreign currency risk.	244 - 250
	7. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a. Jenis investasi barang modal; b. Tujuan investasi barang modal; dan c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	7. Discussion on the realize capital investment goods during the fiscal year, include: a. Type of capital investment goods; b. Purpose of the capital investment goods; c. Value of the capital investment goods realized;	251 - 252
	8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	8. The information and fact after the date of accounting report (if any);	252 - 254
	9. Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	9. The business prospect related with industry, economy and international market condition supporting by quantitative data from reliable sources.	257 - 260
	10. Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: a. Pendapatan/penjualan; b. Laba (rugi); c. Struktur modal (capital structure); atau d. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	10. Comparison between target/projection in the beginning of the fiscal year and the actual result (realization) such as: a. Revenue/sales; b. Profit (loss); c. Capital structure; or d. Other important things;	254 - 257
	11. Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: a. Pendapatan/penjualan; b. Laba (rugi); c. Struktur modal (capital structure); d. Kebijakan dividen; atau e. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	11. The Company's one year target/projection shall include: a. Revenue/sales; b. Profit (loss); c. Capital structure; d. Dividend policies; or e. Other important things	261 - 263
	12. Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	12. Marketing aspect of Company's product and services, including marketing strategy and market share;	214 - 216

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
	13. Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: a. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; b. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen nonkas; c. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d. Jumlah dividen per tahun yang dibayar;	13. The explanation about dividend during the last two fiscal years, include: a. Dividend policies, such as information about the percentage of total dividend to net profit; b. The cash dividend payout date or the distribution date for non-cash dividend; c. The amount of dividend per share (cash or non-cash); and d. The amount of dividend pain per year.	265 - 266
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	The disclosure of information can be presented in the tabular form. Please disclose if the Company didn't provide dividend in the last two years.	266
	14. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	14. The realization of the use of the proceed of the Public Offering, with requirements such as: a. If the Company has an obligation to submit a realization report of the use of fund within the fiscal year, then disclosed the cumulative use of the proceeds from the public offering until the end of the fiscal year; and b. The Company is required to explain if there is any change on the use of the proceeds as regulated in the Regulation of the Financial Services Authority on The Use of The Proceeds of The Offering;	268 - 269
	15. Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi; b. Nama pihak yang melakukan transaksi; c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada); d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; e. Pemenuhan ketentuan terkait; dan f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: i. Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle); dan	15. The significant material (if any) regarding to investment, expansion, divestment, merger/ consolidation, acquisition, dept/equity restructuring, significant transaction, affiliated transaction, and conflict of interest transaction, with in the fiscal year, includes: a. Date, amount and object of transaction; b. The name of parties involved in the transaction; c. The nature of the affiliated relationship (if any); d. The description of the fairness of the transaction; e. The compliance with the relevant provisions; and f. If there was affiliated relationship, the Company also has to disclose: i. A statement from the Board of Directors to explain that the affiliated transaction has gone through adequate procedures to ensure that the transaction done in accordance with generally accepted business practices among others by complying with the arms-length principle;and	271 271 271 271 271 272 273

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
	ii. Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*);	ii. The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the armslength principle;	273
	g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	g. For affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out in order to generate business income and run regularly, repeatedly, and/or continuously; In the event that the affiliated transactions or material transactions in question have been disclosed in the annual	274
	h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/ atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	h. For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	273
	i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	i. In the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this is disclosed;	273
	16. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	16. The significant changes in rules and regulations towards the Company's operation and its effect towards the financial report (if any);	274
	17. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	17. The changes in the accounting policies, its reason and effect towards the financial report (if any).	275
g.	Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	Corporate Governance	

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	The Company's Corporate Governance shall include:	
	1. RUPS, paling sedikit memuat: a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: i. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan ii. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahunsebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan	1. General Meeting of Shareholders (GMS), include: a. The information of the resolutions of the GMS in the fiscal year and one year prior the fiscal year include: i. The resolution of the GMS in the fiscal year and one year prior the fiscal year that realized in the fiscal year; and ii. The resolution of the GMS in the fiscal year and one year prior the fiscal year that not realized and the reason.	302 - 313 304 - 313
	b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	b. In the event that the Company uses an independent party in the implementation of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	305
	2. Direksi, paling sedikit memuat: a. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	2. The Board of Directors, include: a. The Board of Directors duties and responsibilities; the information about each duties and responsibilities of the Board of Directors shall be presented in tabular form. b. A statement that the Board of Directors has guidelines or BOD charter; c. The policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS; Information on the level of attendance of members of the Board of Directors at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in tabular form.	336 - 349 341 - 343 336 - 337 336 - 337
	d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: i. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetens anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan ii. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	d. Training and/or competency improvement of members of the Board of Directors: i. Policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and ii. Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any);	347 - 348 147
	e. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: i. Prosedur penilaian kinerja; dan ii. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	e. The evaluation of the Board of Directors on the performance of the committees that support the implementation of the duties of the Board of Directors in the fiscal year shall at least contain: i. The performance evaluation procedure; ii. The criteria used, such as achievements, competency, attendance at meeting; and	384

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
	f. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memilik komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	f. In the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	384
	3. Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris; c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	3. The Board of Commissioners, shall include: a. The Board of Commissioners duties and responsibilities; b. A statement that the Board of Commissioners has guidelines or BOD charter; c. Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS; Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	314 - 336 315 - 316 314 - 315 329 - 330
	d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: i. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan ii. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	d. Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners: i. Policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Commissioners, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and ii. Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	332 147
	e. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota DewanKomisaris, paling sedikit memuat: i. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; ii. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan iii. Pihak yang melakukan penilaian; dan	e. Performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing: i. Procedures for implementing performance appraisals; ii. The criteria used are performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and iii. The party conducting the assessment; and	332 - 334 348 - 349 332 - 334, 348 332 - 334 348 - 349 334, 348
	f. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: i. Prosedur penilaian kinerja; dan ii. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	f. The Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year includes: i. Performance appraisal procedures; and ii. The criteria used are performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings;	335 - 336
	4. Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan	4. The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain: a. The nomination procedure, including a brief description of the nomination policies and processes for members of the Board ofDirectors and/or members of the Board of	350 - 360 357 - 358

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
	b. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: i. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan DewanKomisaris; ii. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/ bonus dan lainnya; dan iii. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	b. Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others: i. Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners; ii. The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances,tantiem/bonus and others; and iii. The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	351 - 356 352 - 354 354 - 356 354 - 356
	5. Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: a. Nama; b. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah; c. Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah; d. Tugas dan tanggung jawab dewan Pengawas Syariah; dan e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	5. The sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain a. Name; b. The legal basis for the appointment of the sharia supervisory board; c. The period of assignment of the sharia supervisory board; d. Duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and e. The frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;	360
	6. Komite Audit, paling sedikit memuat: a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b. Usia; c. Kewarganegaraan; d. Riwayat pendidikan; e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: i. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; ii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/ atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan iii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	6. The Audit Committee, include: a. Name and positions in the committee; b. Age; c. Nationality; d. Educational background; e. Work experience, include: i. Legal basis for appointment as committee member; ii. Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and iii. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	360 - 370 364 365 - 366 365 - 366 365 - 366 365 - 366 365 - 366 365 - 366
	f. Periode dan Masa Jabatan anggota Komite Audit;	f. Period and Term of Office of Audit Committee members;	362
	g. Pernyataan independensi Komite Audit;	g. Statement of independence of the audit committee;	367
	h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telahdiikuti dalam tahun buku (jika ada);	h. Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	147 - 148
	i. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut; dan	i. Policies and implementation of the frequency of Audit Committee meetings and the level of attendance of Audit Committee members in those meetings; and	368
	j. Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit;	j. The implementation of the Audit Committee's activities for the financial year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	369

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
	7. Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan Komite; b. Usia; c. Kewarganegaraan; d. Riwayat pendidikan; e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: i. Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite; ii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan/ atau Anggota Komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan iii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	7. The Nomination and Remuneration Committee, include: a. Name and positions in the Committee; b. Age; c. Nationality; d. Educational background; e. Work experience, include: i. Legal basis for appointment as committee member; ii. Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, Member of the Board of Directors, and/or Committee Member and other positions (if any); and iii. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	370 - 380 374 374 - 376 374 - 376 374 - 376 374 - 376 374 - 376 374 - 376
	f. Periode dan masa jabatan anggota Komite; g. Pernyataan independensi komite; h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i. Uraian tugas dan tanggung jawab; j. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); k. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; l. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan m. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: i. Alasan tidak dibentuknya komite; dan ii. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	f. Period and term of office of the committee members; g. Statement of independence of the committee; h. Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); i. Description of duties and responsibilities; j. A statement that it has a guideline or charter; k. Policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting; l. A brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and m. in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose: i. Reasons for not forming the committee; and ii. The party carrying out the nomination and remuneration function;	374 377 378, 148 371 - 372 370 - 371 378 378 - 379
	8. Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b. Usia; c. Kewarganegaraan; d. Riwayat pendidikan; e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: i. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; ii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/ atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan iii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	8. Other committee that support the role and function of the Board of Directors (if any) or the Board of Commissioners, include: a. Name and positions in the committee; b. Age; c. Nationality; d. Educational background; e. Work experience, include: i. Legal basis for appointment as committee member; ii. Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and iii. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
	f. Periode dan masa jabatan anggota Komite; g. Pernyataan independensi komite; h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan i. Uraian tugas dan tanggung jawab; j. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; k. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota Komite dalam rapat tersebut; dan l. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite pada tahun buku;	f. Period and term of office of the Committee members; g. Statement of independence of the committee; h. Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); i. Description of duties and responsibilities; j. A statement that it has a guideline or charter; k. Policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting; l. A brief description of the implementation of activities in the fiscal year	
	9. Sekretaris Perusahaan, paling sedikit memuat: a. Nama; b. Domisili; c. Riwayat jabatan, meliputi: i. Dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan ii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; d. Riwayat pendidikan; e. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan f. Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	9. Corporate Secretary, include: a. Name; b. Domicile; c. Work experience, include: i. legal basis for appointment as Corporate Secretary; and ii. work experience and the time period both in and outside the Company; d. Educational background; e. Training or competency development in the fiscal year; and f. Description of corporate secretary duties in the fiscal year;	384 - 387 385 - 386 385 - 386 385 - 386 385 - 386 385 - 386 387, 149 382
	10. Unit Audit Internal, paling sedikit memuat: a. Nama kepala Unit Audit Internal; b. Riwayat jabatan, meliputi: i. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan ii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; c. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; e. Struktur dan kedudukan unit audit internal; f. Uraian tugas dan tanggung jawab; g. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan h. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	10. Internal Audit Unit, include: a. Name of Head of Internal Audit; b. Work experience, include: i. Legal basis for appointment as Head of Internal Audit; ii. Work experience and the time period both in and outside the Company; c. Qualification or certification as Internal Audit (if any); d. Training or competency development in the fiscal year. e. Structure and position of internal audit unit; f. Description of duties and responsibilities; g. A statement that it has a guideline or Internal Audit charter; h. Brief description about the implementation of duties of the Internal audit unit in the fiscal year include the policies and implementation of meeting frequency with the Board of Directors, Board of Commissioners, or Audit Committee;	388 - 394 390 390 390 390 392, 149 388 - 389 391 - 392 390 - 391 394
	11. Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan lainnya; b. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan	11. A description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing: a. Financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations; b. Review of the effectiveness of the internal control system; and	401 - 405 404 - 406 407

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
	c. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	c. Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	408
	12. Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; b. Jenis risiko dan cara pengelolaannya; c. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan d. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	12. Risk management system implemented by the Company, include: a. General description about the Company's risk management system; b. Type of risks and how to manage; c. Review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and d. Statement of the Board of Directors and/ or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	409 - 421 409 - 412 412 - 419 420 421
	13. Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: a. Pokok perkara/gugatan; b. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan c. Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	13. Legal cases that have a material impact faced by the Company, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain: a. Subject matter/claim; b. Status of settlement of cases/claims; and c. The effect on the condition of the Company;	421 - 423 422 422 422
	14. Informasi tentang sanksi administratif/ sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	14. Information on administrative sanctions/sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any);	424
	15. Informasi mengenai Kode Etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: a. Pokok-pokok Kode Etik; b. Bentuk sosialisasi Kode Etik dan upaya penegakannya; dan c. Pernyataan bahwa Kode Etik berlaku bagi anggota Direksi,anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	15. Information on Code of Ethic and business conducts, include: a. The main points of the Code of Ethics; b. The form of socialization of the Code of Ethics and its enforcement efforts; and c. A statement that the Code of Ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuers or Public Companies;	426 - 432 427 - 430 430 430 - 431
	16. Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: a. Jumlah saham dan/atau opsi; b. Jangka waktu pelaksanaan; c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	16. A brief description of the policy of providing long-term performance based compensation to management and/or employees owned by the Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP); In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain: a. Number of shares or option; b. Implementation period; c. Requirements for eligible employees and/or management; and d. Exercise price or determination of exercise price;	432 - 436 432 - 433 435 433 - 434 436

No.	Kriteria	Criteria	Hal Page
	17. Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan b. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	17. A brief description of the information disclosure policy regarding: a. Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and b. Implementation of the said policy;	437 - 438
	18. Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. Cara penyampaian laporan pelanggaran; b. Perlindungan bagi pelapor; c. Penanganan pengaduan; d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan e. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: i. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan ii. Tindak lanjut pengaduan;	18. A description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least containing: a. Method of submitting violation reports; b. Protection for whistleblowers; c. The handling of complaints; d. The party managing the complaint; and e. The results of the handling of complaints, at least: i. The number of complaints received and processed in the financial year; and ii. Follow-up to complaints;	438 - 443 439 441 - 442 441 441 438 443
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	In the event that the Company does not have a whistleblowing system, it is disclosed regarding this matter	
	19. Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan b. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.	19. A description of the anti-corruption policy of the Company, at least containing: a. Programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in Issuers or Public Companies; and b. Anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies; In the event that the Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.	443 - 445 443 - 444 444 - 445
	20. Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: a. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau b. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	20. Implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers that issue equity securities or Public Companies, including: a. A statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or b. Explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any). Disclosure of information can be presented in tabular form.	452 - 457 457
h.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at most slightly load:	

2025
Annual Report
Laporan Tahunan

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
Wisma Maktour Lt.4
Jalan Otista Raya No.80
Jakarta Timur 13330 Indonesia

Telepon:+6221-50201035
Email: corporate@mktr.co.id
Website: www.mktr.co.id